ASABRI

Laporan Tahunan
Annual Report
2022



INOVASI DIGITAL untuk Layanan Berkelanjutan

Digital Innovation for Sustainable Services



INOVASI DIGITAL
untuk Layanan Berkelanjutan
DIGITAL INNOVATION FOR SUSTAINABLE SERVICES

Perubahan dan transformasi dunia, turut menjadi semangat PT ASABRI (Persero) untuk terus adaptasi dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pandemi COVID-19 tentunya menjadi salah satu faktor pendorong dalam menumbuhkan kesadaran Masyarakat dalam melihat pentingnya beradaptasi dengan dunia digital. Aspek penting yang mengiringi semangat untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan dunia digital adalah aspek berkelanjutan. Seiring sejalan dengan semangat yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20, *"Recover Together, Recover Stronger"*, pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) menyambutnya dengan mengimplementasikan Inovasi Digital untuk Layanan Berkelanjutan.

Tema Laporan Tahunan PT ASABRI (Persero) tahun buku 2022 tersebut menjadi semangat Perusahaan untuk terus menjaga keberlanjutan layanan dengan memberikan inovasi digital kepada Peserta. PT ASABRI (Persero) bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya untuk turut mewujudkan Indonesia untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat salah satunya dengan meluncurkan layanan digital ASABRI STAR (layanan autentikasi digital), peningkatan kualitas layanan dan berbagai upaya serta inisiatif strategis bersama seluruh pemangku kepentingan dengan terus melakukan sinergi, inovasi, dan transformasi untuk mewujudkan layanan prima yang berkelanjutan.

Changes and transformations in the world have also become the spirit of PT ASABRI (Persero) to continue to be adaptive and provide the best for Indonesia. The COVID-19 pandemic is certainly one of the driving factors in raising public awareness regarding the importance of adapting to the digital world. An important aspect that accompanies the spirit to transform and adapt to the digital world is the aspect of sustainability. Along with the spirit promoted by Indonesia in the G20 Presidency, "Recover Together, Recover Stronger", in 2022, PT ASABRI (Persero) welcomes it by implementing Digital Innovation for Sustainable Services.

The theme of the Annual Report of PT ASABRI (Persero) for the fiscal year 2022 is the spirit of the company to continue to maintain service sustainability by providing digital innovation to Participants. PT ASABRI (Persero) together with all stakeholders continues to strive to help realize Indonesia Recover Faster, Rise Stronger, including launching ASABRI STAR digital services (digital authentication services), improving service quality, and implementing various strategic initiatives in collaboration with stakeholders. This ongoing synergy, innovation, and transformation are aimed at realizing sustainable excellence in service.

Sejak tahun 2020, melalui peluncuran ASABRI Mobile, ASABRI mulai melakukan inovasi digital yang berkelanjutan. ASABRI terus berupaya agar inovasi dan transformasi digital ini memberikan hasil dan terus menciptakan nilai tambah baru bagi PT ASABRI (Persero), serta memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Since 2020, through the launch of ASABRI Mobile, ASABRI has started to carry out continuous digital innovation. ASABRI continues to strive for this digital innovation and transformation to deliver results and continue to create new added value for PT ASABRI (Persero), to have a positive impact on the company's overall performance.

Melalui ASABRI Mobile Peserta dapat mengetahui produk ASABRI, termasuk saldo *individual account* yakni akumulasi premi dan hasil pengembangannya.

Through ASABRI Mobile, participants can find out about ASABRI products, including individual account balances, namely premium accumulation and development results.



773.542
kali | times
(diunduh sejak peluncuran)
(downloaded since launching)

515.937
(pengguna terdaftar)
(registered users)

ASABRI STAR hadir mempermudah Peserta Pensiun melakukan autentikasi secara mandiri *(self service)* dimanapun dan kapanpun.

ASABRI STAR is here to make it easier for Pension Participants to authenticate independently (self- service) anywhere and anytime.



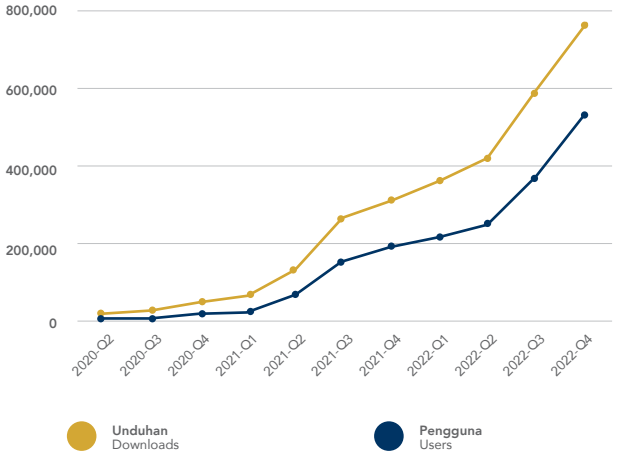
218.084
kali | times
(diunduh sejak peluncuran)
(downloaded since launching)

330.231
(Peserta Pensiun yang melakukan *Enrollment* atau 71,7% dan total peserta pensiun)
(Enrolment of pension participants or 71.7% of total pension participants)

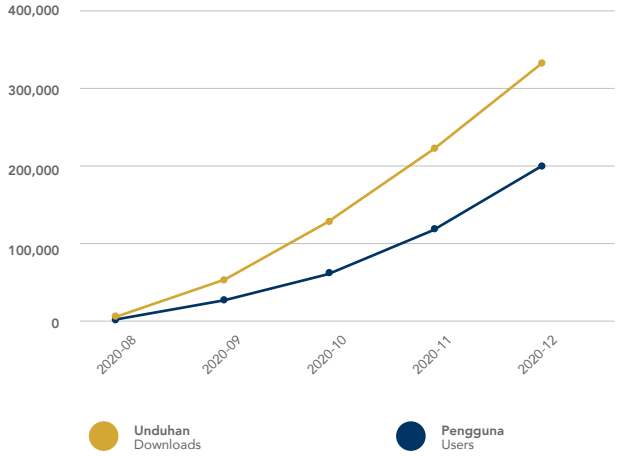
ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan secara digital untuk memberikan kemudahan bagi para Peserta dan terus berupa agar persentase pengguna autentikasi digital dapat terus bertumbuh.

ASABRI is committed to continuing to improve digital services to provide convenience for Participants and continues to strive so that the percentage of digital authentication users can continue to grow.

PERTUMBUHAN ASABRI Mobile SEJAK PELUNCURAN
ASABRI Mobile Growth Since Launch



PERTUMBUHAN ASABRI STAR SEJAK PELUNCURAN
ASABRI STAR Growth Since Launch



Daftar Isi
Table of Contents

KILAS KINERJA 2022
PERFORMANCE HIGHLIGHT 2022

Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Overview	8
Ikhtisar Posisi Keuangan Overview of Financial Position	10
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	10

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan Corporate Identity	44
Makna Logo Meaning of Logos	46
Riwayat Singkat Brief History	48
Jejak Langkah Milestones	50
Visi dan Misi Vision and Mission	51
Budaya Perusahaan Corporate Culture	52
Kegiatan Usaha Business Activities	54
Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan Products and/or Services Produced	61
Struktur Organisasi Organizational Structure	66
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	68
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	73
Profil Pejabat Senior Senior Officer Profile	78
Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	80
Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri List of Industry Association Memberships	81
Wilayah Operasional Operational Area	82
Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Company Supporting Institutions and Professions	84
Informasi pada *Website* Perusahaan Information on the Company Website	86
Peristiwa Penting 2022 2022 Event Highlights	88
Penghargaan dan Sertifikasi 2022 Awards and Certifications 2022	94

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	14
Laporan Direksi Board of Directors Report	24
Tanggung Jawab Pelaporan Tahun 2022 Annual Reporting Responsibility 2022	40

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

Sumber Daya Manusia Human Resources	98
Strategi Manajemen SDM HR Management Strategy	100
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen SDM HR Management Policy and Implementation	101
Rencana Kerja SDM Tahun 2023 HR Work Plan 2023	117
Teknologi Informasi Information Technology	119
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	121
Roadmap Teknologi Informasi ASABRI ASABRI Information Technology Roadmap	122
Pencapaian Tahun 2022 Achievement Year 2022	124

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industry Overview	130
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operating Review by Business Segment	136
Tinjauan Operasional Operational Overview	141
Kinerja Keuangan Financial Performance	143
Laporan Laba Rugi Komprehensif Statement of Comprehensive Income	144
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position	152
Laporan Arus Kas Cash Flow Statement	165
Analisis Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya Analysis of the Ability to Pay Debts, Collectibility of Receivables and Other Financial Ratios	168
Struktur Modal Capital Structure	172
Ikatan Investasi untuk Investasi Barang Modal Investment Bond for Capital Goods Investment	173

Informasi Realisasi Investasi Barang Modal Information on Capital Goods Investment Realization	173
Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Tahun 2022 Analysis of Target and Realization Achievement in 2022	174
Informasi dan Fakta Material yang terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After the Date of the Accountant's Report	177
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	178
Kebijakan Dividen Dividend Policy	180
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering	181

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	206
Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance	207
Penerapan Prinsip GCG Implementation of GCG Principles	210
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2022 Implementation of Corporate Governance in 2022	211
Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	212
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	220
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	222
Dewan Komisaris Board of Commissioners	223
Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris Organs and Committees under the Board of Commissioners	240
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors	257
Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Policy on the Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition	264
Direksi Board of Directors	267
Komite dan Organ di bawah Direksi Committees and Organs under the Board of Directors	284
Akuntan Publik (Auditor Eksternal) Public Accountant (External Auditor)	308
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	312
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest or Transactions with Affiliated Parties	181
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	194
Menghadapi Tantangan Bisnis Facing Business Challenges	194
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	198
Strategi Bisnis Tahun 2023 Business Strategy 2023	201
Manajemen Risiko Risk Management	318
Pengelolaan Kepatuhan Compliance Management	335
Kode Etik Code of Conduct	338
Program Anti Korupsi Anti-Corruption Program	342
Kebijakan Gratifikasi Gratification Policy	342
Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Whistleblowing System	350
Perkara Hukum Tahun 2022 Legal Cases in 2022	356

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	362
Pilar TJSL Pillars of CSR	363
Struktur Pengelola TJSL CSR Management Structure	364
Kinerja Program TJSL 2022 Performance of CSR Program 2022	365
Realisasi Program Non PUMK dan PUMK Realization of Non PUMK and PUMK Programs	367
Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup Social Responsibility for the Environment	379
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peserta Social Responsibility to Participants	381

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022
2022 FINANCIAL REPORT 385



KILAS KINERJA 2022



Performance Highlight 2022

Ikhtisar Kinerja Operasional
Operational Performance Overview

ASABRI berhasil memastikan bahwa pembayaran klaim dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan hak peserta. Tahun 2022 ASABRI membayarkan klaim manfaat sebesar Rp1,76 triliun dengan rincian pembayaran klaim dan manfaat THT sebesar Rp1,48 triliun, JKK sebesar Rp63,77 miliar dan JKm sebesar Rp211,90 miliar. Sehingga rasio klaim tahun 2022 sebesar 108,64% di luar premi UPSL. ASABRI telah menyalurkan pembayaran pensiun sebesar Rp16,68 triliun yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBP) kepada 556,671 orang penerima manfaat pensiun.

ASABRI has succeeded in ensuring that claim payments are paid on time and in the right amount in accordance with the rights of participants. In 2022, ASABRI paid benefit claims of IDR1.76 trillion with details of payment of claims and benefits for ENT of IDR1.48 trillion, JKK of IDR63.77 billion, and JKm of IDR211.90 billion. So the claim ratio in 2022 is 108.64% excluding UPSL premiums. ASABRI has distributed pension payments of IDR16.68 trillion sourced from the State Budget (APBN) to 556.771 pension beneficiaries.

PEMBAYARAN PENSIUN
Pension Payments

RP16,68 TRILIUN
trillion

tumbuh 10,10% dari tahun 2021 sebesar Rp14,87 triliun.
grew 10.10% from 2021 IDR14.87 trillion.

TABUNGAN HARI TUA (THT)
Old-Age Savings

Pendapatan Premi | Premium Income

RP5,70 TRILIUN
trillion

tumbuh 404,42% dari tahun 2021 sebesar Rp1,13 triliun, faktor utama peningkatannya berasal dari adanya pengakuan UPSL sebesar Rp4,55 triliun
grew 404.42% from 2021 of IDR1.13 trillion, the main factor for the increase came from the recognition of UPSL amounting to IDR4.55 trillion

Pembayaran Klaim dan Manfaat | Payment of Claims and Benefits

RP1,48 TRILIUN
trillion

lebih rendah dibandingkan 2021 sebesar Rp1,65 triliun
lower than 2021 of IDR1.65 trillion

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)
Work Accident Insurance

Pendapatan Premi | Premium Income

RP201,77 MILIAR
billion

tumbuh 1,97% dari tahun 2021 sebesar Rp197,88 miliar
grew 1.97% from 2021 of IDR197.88 billion

Pembayaran Klaim dan Manfaat | Payment of Claims and Benefits

RP63,77 MILIAR
billion

lebih rendah dibandingkan 2021 sebesar Rp84,54 miliar
lower than 2021 of IDR84.54 billion

JAMINAN KEMATIAN (JKm)
Death Insurance

Pendapatan Premi | Premium Income

RP263,60 MILIAR
billion

tumbuh 1,96% dari tahun 2021 sebesar Rp258,53 miliar
grew 1.96% from 2021 of IDR258.53 billion

Pembayaran Klaim dan Manfaat | Payment of Claims and Benefits

RP211,90 MILIAR
billion

lebih rendah dibandingkan 2021 sebesar Rp231,54 miliar
lower than 2021 of IDR231.54 billion

ASABRI mobileapps
ASABRI in your hand

PT ASABRI (Persero) terus melakukan optimalisasi aplikasi ASABRI Mobile yang mulai diperkenalkan sejak 2020. Sampai dengan Desember 2022, peserta yang telah melakukan registrasi sebanyak 342.071 peserta, meningkat 97,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya *database* yang baik, maka berdampak pada tingkat akurasi perhitungan liabilitas.

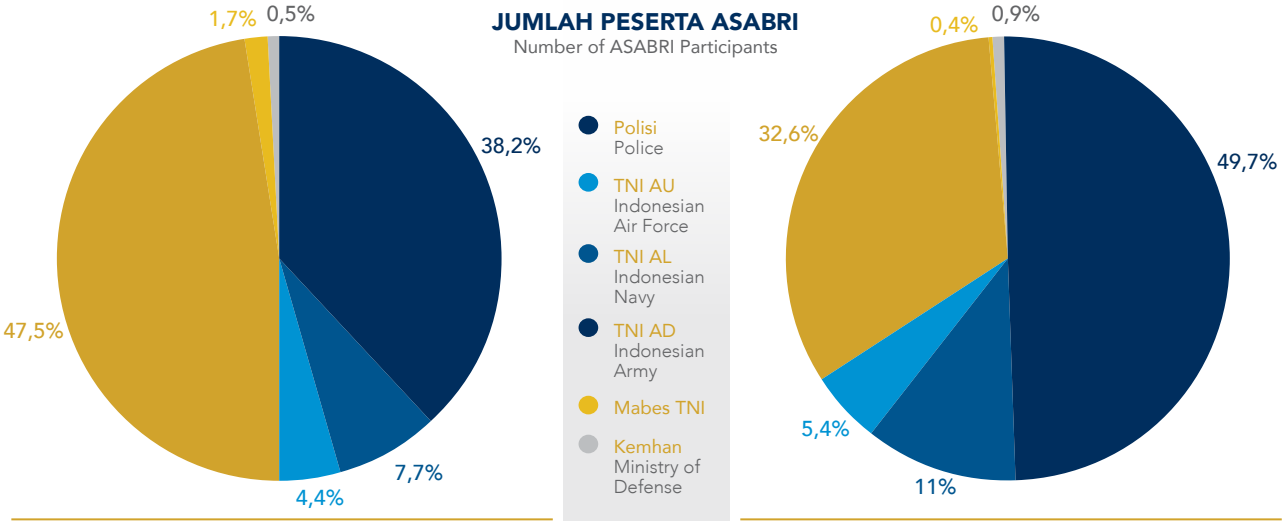
PT ASABRI (Persero) continues to optimise ASABRI Mobile Apps which have been introduced since 2020. As of December 2022, 342,071 participants have registered marking a 97.8% increase compared to the previous year. With a robust database, this improvement has a positive impact on the accuracy of liability calculations.

ASABRI terus melakukan upaya memperluas jangkauan layanan untuk mempercepat pengajuan klaim melaui ASABRI Link dengan metode *Office Channeling*. Sampai dengan Tahun 2022, terdapat 1.806 titik layanan di seluruh Indonesia dengan klaim yang terselesaikan sebanyak 56.332 klaim.

ASABRI link
Lebih dekat melayani Peserta

ASABRI continues to make efforts to expand service coverage to accelerate claim submission through ASABRI Link with the Office Channeling method. As of 2022, there are 1,806 service points throughout Indonesia with 56,332 claims resolved.

JUMLAH PESERTA ASABRI
Number of ASABRI Participants



Peserta Aktif: **orang**
Active Participants: people

Peserta Pensiun: **orang**
Pension Participants: people

Tahun 2022 ASABRI berhasil melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul PKS dengan TNI, Kemhan, BKN dan Dukcapil yang sudah lebih dulu dilakukan. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk melengkapi data kepesertaan khususnya Anggota Polri yang diharapkan dapat mempercepat kelengkapan data riwayat kepangkatan dan data keluarga Anggota Polri serta data pendukung lainnya, sehingga akurasi dalam penghitungan simulasi premi dan cadangan klaim menjadi lebih akurat guna mendukung peningkatan layanan kepada Peserta.

In 2022, ASABRI successfully signed a Cooperation Agreement (PKS) with the Indonesian National Police (Polri), following similar PKS agreements with the TNI, Ministry of Defence, BKN, and Dukcapil that had already been executed. This cooperation agreement aims to complete membership data, especially for Police Members, which is expected to expedite the completeness of rank history data and family data for Police Members and other supporting data. This will enhance the accuracy of premium calculations and claim reserves, ultimately supporting improved services to Participants.

Ikhtisar Posisi Keuangan
Overview of Financial Position

(dalam jutaan Rupiah | in millions IDR)

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Jumlah Aset Total of Assets					
Jumlah Liabilitas Total Liabilities					
Jumlah Ekuitas Total Equity					
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity					

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

(dalam jutaan Rupiah | in millions IDR)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Statement of Comprehensive Income	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
Pendapatan Premi Premium Income					
Hasil Investasi Investment Return					
Pendapatan Lain-lain Other Income					
Jumlah Pendapatan Total Income					
Klaim dan Manfaat Claims and Benefits					
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (Increase) Decrease in Liability for Future Policy Benefits					
Umum dan Administrasi General and Administration					
Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Reimbursement of Operational Costs					
Jumlah Beban Amount of Expense					
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax					
Beban Pajak Kini Current Tax Expense					
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Benefits (Expenses) of Deferred Taxes					
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year					
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year after Tax					
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year					

Grafik Keuangan
Financial Graphics

Aset
Assets

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Liabilitas
Liabilities

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Ekuitas
Equity

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Pendapatan Bersih
Net Income

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Beban
Expenses

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

Laba (Rugi) Komprehensif
Comprehensive Profit (Loss)

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

02





LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report



Fary Djemy Francis
Komisaris Utama
President Commissioner

Bersama Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk mengelola seluruh program sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak memiliki potensi benturan kepentingan, serta mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian agar dapat merasionalkan beban pemerintah dalam menyelenggarakan program tersebut.

Together with the Board of Directors, the Board of Commissioners is committed to managing the entire program in accordance with the principles of good corporate governance, not having potential conflicts of interest, and making prudent decisions, in order to rationalise the burden on the government in administering the program.

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Pemegang saham dan para pemangku lainnya yang kami hormati, dengan ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun buku 2022. Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) selalu berpedoman pada anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris senantiasa melakukan akselerasi guna mendorong pencapaian target kinerja Perusahaan, memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan telah mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan, dijalankan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam laporan ini Dewan Komisaris melaporkan penilaian terhadap kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi Perusahaan, pandangan atas strategi yang disusun oleh Direksi, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), penilaian atas komite penunjang Dewan Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris, frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi, serta fokus perhatian pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022.

Bersama Direksi, Dewan Komisaris berkomitmen untuk mengelola THT dan AIP sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak memiliki potensi benturan kepentingan, serta mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, agar dapat merasionalkan beban pemerintah dalam menyelenggarakan program tersebut.

DEAR STAKEHOLDERS,

Dear shareholders and other stakeholders, we hereby submit a report on the implementation of supervisory and advisory duties to the Board of Directors throughout the 2022 financial year. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) is always guided by the Company's articles of association and laws and regulations. The Board of Commissioners always accelerates to encourage the achievement of the Company's performance targets and ensures that the Company's operational activities have referred to the work plan that has been set, carried out in accordance with good corporate governance, in accordance with the interests of shareholders and other stakeholders, and ensures compliance with all applicable laws and regulations.

"In this report, the Board of Commissioners presents an evaluation of the Board of Directors' performance, oversees the implementation of the Company's strategy, offers insights into the strategy devised by the Board of Directors, assesses the implementation of Good Corporate Governance (GCG), evaluates the supporting committees of the Board of Commissioners, notes changes in the composition of the Board of Commissioners, reviews the frequency and method of providing advice to members of the Board of Directors, and highlights the areas of focus for the Board of Commissioners' supervisory efforts in 2022.

Together with the Board of Directors, the Board of Commissioners is committed to managing THT and AIP in accordance with the principles of good corporate governance, ensuring there are no potential conflicts of interest and making prudent decisions, in order to rationalize the burden on the government in administering the programs.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris berpendapat bahwa sepanjang tahun 2022, Direksi telah berupaya secara berkesinambungan dan konsisten untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada peserta. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan titik layanan dan jumlah yang dilayani melalui ASABRI Link, pengembangan pemanfaatan aplikasi ASABRI Mobile, dan peningkatan *enrollment* dan autentikasi melalui aplikasi STAR (Sistem Autentikasi ASABRI). Perusahaan juga telah mengimplementasikan 11 layanan *sharing service point* yaitu pusat layanan informasi TASPEN-ASABRI pada Mall Pelayanan Publik (MPP).

Meskipun hasil investasi perusahaan masih jauh di bawah target RKAP tahun 2022, Direksi tetap dapat memastikan terselenggaranya layanan program Asuransi/Jaminan Sosial dan Pensiun di lingkungan prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian upaya penyehatan Perusahaan perlu terus dilanjutkan, seperti sinergi klaster, realisasi penerimaan UPSL, *rebalancing* portofolio, serta percepatan penyelesaian *asset recovery* dan aset non produktif.

Kinerja Perusahaan dalam tahun 2022, tergambar oleh laporan auditor independen Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Nomor 00196/2.1030/AU.6/08/1698-1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 KAP RSM memberikan opini bahwa laporan keuangan PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2022 menyajikan secara wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan mencapai 88,07 dari skala 100, serta pada tingkat kesehatan meraih predikat "SEHAT-A" dengan nilai 68. Namun Perusahaan melakukan perhitungan kembali atas kinerja tahun 2022 yang mengacu pada PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, di mana pada Bab II huruf E.1.a.2. disebutkan bahwa pencapaian realisasi tingkat kesehatan tidak memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau faktor di luar pengendalian Direksi, maka

Assessment of the Board of Directors Performance

The Board of Commissioners believes that throughout 2022, the Board of Directors has consistently and continuously strived to enhance performance and service for participants. These efforts included expanding service points and the number of individuals served through ASABRI Link, enhancing the utilization of the ASABRI Mobile application, and improving enrollment and authentication processes through the STAR application (ASABRI Authentication System). Additionally, the company has implemented 11 sharing service points, such as the TASPEN-ASABRI information service center at the Public Service Mall (MPP).

Although the company's investment returns are still far below the 2022 RKAP target, the Board of Directors can still ensure that the implementation of Social Insurance/Guarantee and Pension program services for TNI soldiers, Police Members, and ASN within the Ministry of Defence and Police can run well. Thus, the Company's restructuring efforts need to be continued, such as cluster synergies, realization of UPSL revenue, portfolio rebalancing, and acceleration of asset recovery and non- productive asset settlement.

The company's performance in 2022 is reflected in the independent auditor's report Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) Number 00196/2.1030/AU.6/08/1698-1/II/2023 dated February 28, 2023 KAP RSM gave an opinion that the financial statements of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 present fairly without modification in all material respects, as well as financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the basis for preparing the financial statements as stated in the notes to the financial statements.

The Company's Key Performance Indicator (KPI) achievement reached 88.07 on a scale of 100, and at the health level achieved the predicate "SEHAT-A" with a score of 68. However, the Company recalculated the performance in 2022 which refers to PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the income of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, where in Chapter II letter E.1.a.2. it is stated that the achievement of the realization of the health level does not consider expenses/profits resulting from the actions of the previous Board of Directors and/or

nilai tingkat kesehatan menjadi 89 dengan predikat "SEHAT-AA", sebagaimana disampaikan dalam Laporan Asuransi Akuntan Independen KAP RSM Nomor R/107. AAT/cwm/2023 tanggal 30 Maret 2023.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Prospek usaha PT ASABRI (Persero) telah disampaikan dalam RJPP 2020-2024. Rencana Jangka Panjang tersebut sebagai *guideline* bagi manajemen PT ASABRI (Persero) yang telah dibahas bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) dengan mempertimbangkan karakteristik ASABRI yang mengemban amanah pengelolaan Program Asuransi Sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

Sebagai entitas yang fokus memberikan layanan Asuransi Sosial bagi bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, ASABRI memiliki beberapa program, yaitu Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Manfaat Pensiun. Di samping itu, sebagai korporasi ASABRI juga melaksanakan kegiatan investasi serta kegiatan kerja sama lainnya yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Setiap tahun, *guideline* dalam RJPP diterjemahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.

Manajemen ASABRI telah mengembangkan RKAP tahun 2022 dengan baik, terukur, serta mempertimbangkan beberapa strategi perbaikan perusahaan, serta kerja sama dengan BUMN lainnya yang bersifat sinergi serta masukan aspirasi dari pemegang saham.

Tentunya Dewan Komisaris berharap ke depan PT ASABRI (Persero) tumbuh menjadi entitas bisnis yang memiliki kinerja operasional dan keuangan yang prima, sehat, tumbuh sesuai dengan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan serta selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Menjadi entitas yang dipercaya oleh Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri selaku pengguna jasa ASABRI termasuk mendapat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan lainnya.

factors beyond the control of the Board of Directors. As a result, the health level score is revised to 89 with the rating "SEHAT-AA," as indicated in the Independent Accountant Insurance Report KAP RSM Number R/107.AAT/cwm/2023 dated March 30, 2023."

Outlook on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

PT ASABRI (Persero) business prospects have been presented in the 2020-2024 RJPP. The Long- Term Plan is a guideline for the management of PT ASABRI (Persero) which has been discussed with the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) by considering the characteristics of ASABRI which carry out the mandate of managing the Social Insurance Program for TNI Soldiers, members of the National Police, and State Civil Apparatus Employees (ASN) within the Ministry of Defence and the National Police.

As an entity that focuses on providing Social Insurance services for TNI Soldiers, members of the National Police, and Employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defence and the National Police, ASABRI has several programs, namely Tabungan Hari Tua, Work Accident Insurance, Death Insurance, and Retirement Benefits. Moreover, as a corporation, ASABRI also engages in investment activities and other cooperative initiatives with the goal of enhancing the company's value.

Every year, the guidelines in the RJPP are translated into the annual Corporate Budget Work Plan (RKAP) in accordance with the conditions and challenges faced by the company.

ASABRI management has developed the 2022 RKAP meticulously, considering various strategies for company improvement, as well as fostering synergistic cooperation with other state-owned enterprises (SOEs) and incorporating input from shareholders.

Certainly, the Board of Commissioners envisions that PT ASABRI (Persero) will grow into a business entity known for its outstanding operational and financial performance, robust health, alignment with the expectations of all stakeholders, and unwavering commitment to good corporate governance. It aims to be a trusted entity not only by TNI Soldiers, members of the National Police, and State Civil Apparatus Employees (ASN) within the Ministry of Defence and the National Police, who are users of ASABRI services, but also to earn the trust of all other stakeholders.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Operasional PT ASABRI (Persero) masuk dalam kategori lembaga keuangan non bank. Sehingga Perseroan mengikuti praktik yang ditetapkan dalam kerangka *Self Regulating Organization* (SRO), yang dikoordinasikan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sebagai institusi terkait dengan pemerintahan *Government Related Corporation* (GRC), Perusahaan diatur juga dengan Peraturan Kementerian Keuangan dan Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Perusahaan menyadari bahwa kelangsungan hidup dan pertumbuhannya ditentukan oleh peran aktif para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Indentifikasi pemangku kepentingan dan penyiapan struktur serta proses untuk mengakomodasi peran aktif para pemangku kepentingan ini tergambar dalam kegiatan-kegiatan berikut:

Rujukan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GGC)

Sumber-sumber prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* terpenting bagi PT ASABRI (Persero) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2022, tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Outlook on the Implementation of Corporate Governance Company

PT ASABRI (Persero) operates within the category of non-bank financial institutions. Therefore, the Company adheres to practices outlined within the Self Regulating Organization (SRO) framework, coordinated through the Financial Services Authority (OJK). As a Government Related Corporation (GRC), the Company is also subject to regulations from the Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned Enterprises.

The Company recognizes that its sustainability and growth depend on the active involvement of both internal and external stakeholders. The identification of these stakeholders and the establishment of structures and processes to accommodate their active roles are reflected in the following activities:

Good Corporate Governance (GGC) References

The most important sources of good corporate governance principles for PT ASABRI (Persero) are:

1. Law Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises;
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 102 of 2015 concerning Soldiers' Social Insurance Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2020;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012;
4. Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.05/2015 regarding the Implementation of Risk Management for Non- Bank Financial Services Institutions.
5. Financial Services Authority Regulation Number 25 of 2022, concerning Supervision of the Management of the Social Insurance Program for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police by the Financial Services Authority.

Asesmen Penerapam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GGC)

Asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance (GCG)* Perusahaan dari waktu ke waktu menunjukkan capaian-capaian sebagai berikut.

Good Corporate Governance (GGC) Implementation Assessment

The assessment of the Company's Good Corporate Governance (GCG) implementation over time shows the followingachievements.

Tahun Year	Metode Method	Capaian Skor Score Achievement	Predikat Predicate
2018	Asesmen Independen oleh PT Mark Asia Independent Assessment by PT Mark Asia	91,64	Sangat Baik Very Good
2019	*Self Assessment*	87,15	Sangat Baik Very Good
2020	Asesmen Independen oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Independent Assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)	74,787	Cukup Baik Fairly Good
2021	*Self Assessment*	86,284	Sangat Baik Very Good
2022	Asesmen Independen oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Independent Assessment by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)	82,503	Baik Good

Penerapan *Whistleblowing System (WBS)*

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana penerapan *GCG* guna memfasilitasi laporan pihak luar perusahaan dan pihak internal atas berbagai dugaan pelanggaran. WBS yang efektif akan mendorong terbentuknya budaya perusahaan berbasis prinsip-prinsip GCG dan penerapan bisnis yang beretika.

Dewan Komisaris berkomitmen dalam membangun dan mengawasi perusahaan dalam efektivitas pelaksanaan WBS. ASABRI telah memiliki WBS yang berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam ASABRI, termasuk di dalamnya *insider trading, fraud, money laundrying, anti bribery and corruption,* diskriminasi, dan penyimpangan lainnya. Menurut pandangan Dewan Komisaris, ASABRI telah mengembangkan mekanisme WBS, dengan dimilikinya media pengaduan, yaitu melalui situs resmi ASABRI di www.asabri.co.id, dan melalui *email* khusus dengan alamat *email* pengaduan@asabri.co.id serta dibentuknya pihak khusus yang menangani pengaduan.

Terkait dengan penanganan pengaduan, telah dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/10/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.06/57-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT ASABRI

Implementation of Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS) is a means of implementing GCG to facilitate reports from outside the company and internal parties on various alleged violations. An effective WBS will encourage the establishment of a corporate culture based on GCG principles and ethical business practices.

The Board of Commissioners is committed to establishing and overseeing the company's effective implementation of the WBS. ASABRI has implemented a WBS that functions as a means to prevent and report violations or fraudulent activities within ASABRI. This includes addressing issues such as insider trading, fraud, money laundering, anti-bribery, corruption, discrimination, and other irregularities. In the perspective of the Board of Commissioners, ASABRI has developed a well-structured WBS mechanism, which includes a designated reporting platform on ASABRI official website at www.asabri.co.id and a dedicated email address at pengaduan@asabri.co.id. Additionally, a specialized team has been established to handle these reports.

Regarding the handling of complaints, it has been outlined in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/10/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.06/57-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020 concerning Guidelines for the Management of Whistleblowing System of

(Persero) yang telah memuat secara rinci mengenai ketentuan dan pelaksanaan *Whistleblowing System*. Dewan Komisaris memberikan arahan agar efektivitas pelaksanaan *Whistleblowing System* terus ditingkatkan, sehingga *Whistleblowing System* tidak hanya menjadi pedoman, namun juga dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan secara aktif kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan rencana kerja yang disusun oleh komite-komite dikoordinir oleh Sekretaris Dewan Komisaris terutama yang berkaitan dengan pihak Manajemen. Komite Audit berperan aktif dalam mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris antara lain dengan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan, melakukan seleksi dan pengusulan penunjukan calon Kantor Akuntan Publik (KAP) serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP, mendorong efektivitas peran Satuan Audit Internal, sedangkan Komite Pemantau Risiko secara proaktif mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain dengan melakukan penelaahan dan memberikan masukan terkait implementasi manajemen risiko di perusahaan, mengevaluasi kepatuhan kebijakan Direksi khususnya yang terkait dengan pengelolaan risiko dan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi kecukupan dan keseimbangan pengelolaan risiko pada kegiatan investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan, *property*, layanan asuransi serta mengevaluasi kecukupan *coverage* asuransi atas aset dan risiko Perusahaan yang penting. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan mendukung tugas Dewan Komisaris dalam melakukan Nominasi terhadap *Nominated Talent* PT ASABRI (Persero) yang terdiri atas pejabat 1 level di bawah Direksi dan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap Direksi yang saat ini sedang menjabat. Selain itu, mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi kegiatan manajemen Direksi pada aspek *human capital*.

PT ASABRI (Persero) which has contained detailed provisions and implementation of the Whistleblowing System. The Board of Commissioners provides direction so that the effectiveness of the implementation of the Whistleblowing System continues to be improved, so that the Whistleblowing System is not only a guideline, but can also be implemented properly and effectively.

BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEE PERFORMANCE ASSESSMENT

In carrying out active supervision of the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The implementation of work plans prepared by committees is coordinated by the Secretary of the Board of Commissioners, especially those related to Management. The Audit Committee plays an active role in supporting the supervisory duties of the Board of Commissioners, including by reviewing financial information issued by the Company, selecting and proposing the appointment of candidates for the Public Accounting Firm (KAP) as well as evaluating the implementation of audits carried out by the KAP, encouraging the effectiveness of the Unit's role. Internal Audit, while the Risk Monitoring Committee proactively supports the supervisory function of the Board of Commissioners, including by reviewing and providing input regarding the implementation of risk management in the company, evaluating compliance with the Board of Directors policies, especially those related to risk management and the provisions of laws and regulations, evaluating the adequacy and balancing risk management in investment activities in financial institution instruments, property, insurance services and evaluating the adequacy of insurance coverage for important Company assets and risks. The Nomination and Remuneration Committee supports the Board of Commissioners in their nomination processes for Nominated Talent within PT ASABRI (Persero). This category comprises officials one level below the Directors. The committee also assists the Board of Commissioners in evaluating the performance of the current Directors. Furthermore, it aids in supervising the Board of Directors' management activities, particularly in terms of human capital.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada periode 2022, jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris ASABRI mengalami perubahan sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2022 – 11 Agustus 2022

Dewan Komisaris berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In the 2022 period, the number and composition of the ASABRI Board of Commissioners changed as follows:

Period January 1, 2022 - August 11, 2022

The Board of Commissioners totaled 5 (Five) people consisting of 1 (one) President Commissioner concurrently Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 1 (one) Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2022 – 11 Agustus 2022
Composition of the Board of Commissioners Period January 1, 2022 - August 11, 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	SK Menteri BUMN SOEs Minister Decree	SK OJK OJK Decree
1	Fary Djemy Francis	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-254/MBU/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-254/MBU/07/2020 dated July 29, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020 Financial Services Authority Letter Number S-41/D.05/2020 dated November 10, 2020
2	Ida Bagus Purwalaksana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-288/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-288/MBU/09/2020 dated September 15, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-18/D.05/2021tanggal 28 Agustus 2021 Financial Services Authority Letter Number S-18/D.05/2021 dated August 28, 2021
3	I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-288/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-288/MBU/09/2020 dated September 15, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-14/D.05/2021 tanggal 22 Juli 2021 Financial Services Authority Letter Number S-14/D.05/2021 dated July 22, 2021
4	Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-33/MBU/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-33/MBU/02/2021 dated February 01, 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/D.05/2021 tanggal 23 November 2021 Financial Services Authority Letter Number S-21/D.05/2021 dated November 23, 2021
5	Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-251/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-251/MBU/10/2019 dated October 17, 2019	Surat Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor S-29/D.0522/KDK.05/2020 tanggal 4 September 2020 Financial Services Authority Letter Number S-29/D.0522/KDK.05/2020 dated September 4, 2020

Periode 11 Agustus 2022 - 31 Desember 2022

Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Period August 11, 2022 - December 31, 2022

The Board of Commissioners totaled 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Commissioner who concurrently serves as an Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 1 (one) Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris Periode 11 Agustus 2022 – 31 Desember 2022
Composition of the Board of Commissioners Period August 11, 2022 - December 31, 2022

No	Nama Name	Jabatan Position	SK Menteri BUMN SOE Minister Decree	SK OJK OJK Decree
1	Fary Djemy Francis	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-254/MBU/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-254/MBU/07/2020 dated July 29, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020 Financial Services Authority Letter Number S-41/D.05/2020 dated November 10, 2020
2	Budi Prijono	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-172/MBU/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-172/MBU/08/2022 dated August 11, 2022	Dalam proper pengajuan *Fit And Proper Test* OJK In proper submission of the OJK Fit And Proper Test
3	I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-288/MBU/09/2020 tanggal 15 September 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-288/MBU/09/2020 dated September 15, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-14/D.05/2021 tanggal 22 Juli 2021 Financial Services Authority Letter Number S-14/D.05/2021 dated July 22, 2021
4	Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-33/MBU/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-33/MBU/02/2021 dated February 01, 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/D,05/2021 tanggal 23 November 2021 Financial Services Authority Letter Number S-21/D,05/2021 dated November 23, 2021
5	Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-251/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-251/MBU/10/2019 dated October 17, 2019	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-29/D.0522/KDK.05/2020 tanggal 4 September 2020 Financial Services Authority Letter Number S-29/D.0522/KDK.05/2020 dated September 4, 2020

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas dorongan, penguatan, arahan, dan dukungan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja ASABRI di bidang penyelenggaraan jasa asuransi sosial.

Kami juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Direksi atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan dalam merealisasikan rencana bisnis ASABRI, meski tengah berada dalam situasi bisnis yang dinamis dan cukup menantang. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras, usaha, dan inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan Manajemen, serta seluruh Insan ASABRI dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja yang memuaskan dan meningkatkan layanan kepada Peserta. Dewan Komisaris mengajak kepada semua jajaran PT ASABRI (Persero) untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerja sama yang baik akan dapat membawa kemajuan bagi PT ASABRI (Persero). Semoga hubungan dan kerja sama yang harmonis di antara seluruh Pemangku Kepentingan senantiasa semakin baik di masa yang datang.

Ke depannya, Dewan Komisaris berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemberian saran dalam rangka mewujudkan visi dan misi ASABRI sebagai Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan para Peserta ASABRI.

STAKEHOLDER APPRECIATION

The Board of Commissioners would like to express our sincere gratitude to the Shareholders and Stakeholders for their encouragement, support, guidance, and strengthening of our efforts to enhance ASABRI performance in the field of social insurance services.

We would also like to extend our utmost appreciation to the entire Board of Directors for their unwavering dedication and hard work in realizing ASABRI business plans, even in the face of dynamic and challenging business conditions. These accomplishments are the result of the relentless hard work, dedication, and innovative spirit of the Board of Directors, Management, and all ASABRI team members, aimed at achieving outstanding performance and improving services for our Participants. The Board of Commissioners invites all levels of PT ASABRI (Persero) to maintain their optimism when confronting future challenges. We firmly believe that through effective collaboration, we can propel PT ASABRI (Persero) toward further progress. We hope that the harmonious relationships and cooperation among all stakeholders will continue to strengthen in the future.

Looking ahead, the Board of Commissioners is committed to continually enhancing our supervisory performance and providing valuable guidance to fulfill ASABRI vision and mission as a professional National Social Insurance Company that enhances the welfare of ASABRI Participants.

Jakarta, 2023

Atas Nama Dewan Komisaris,
On Behalf of the Board of Commissioners,



Fary Djemy Francis
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Wahyu Suparyono
Direktur Utama
President Director

Kinerja baik ASABRI di tahun 2022 merupakan bagian dari komitmen ASABRI untuk dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada segmen percepatan penyehatan Perusahaan, perbaikan investasi, serta fokus kepada peserta melalui pengelolaan risiko yang baik dan efisiensi biaya. ASABRI juga melanjutkan transformasi digital untuk meningkatkan layanan kepada para peserta.

ASABRI good performance in 2022 is reflects the company's commitment to sustainable growth. This commitment is centered on accelerating the company's restructuring efforts, enhancing investments, and prioritizing participants through effective risk management and cost efficiency. Furthermore, ASABRI continues to embrace digital transformation to enhance its services for participants.

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Berbagai tantangan bisnis di masa pandemi COVID-19 berhasil kita lalui bersama. Tahun 2022 mencerminkan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional setelah pelonggaran pembatasan mobilitas dan pencabutan PPKM oleh pemerintah. ASABRI mencatatkan laba tahun 2022 sebesar Rp , laba tersebut ditopang dari pendapatan premi sebesar Rp , naik 288,23% YoY dan kontribusi dari hasil investasi program THT, JKK, dan JKm senilai Rp Pada tahun 2022, Perusahaan menerima premi *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) dari Pemerintah sebesar Rp yang berasal dari kekurangan premi yang dibayarkan oleh Pemerintah karena adanya perubahan formula manfaat pada tahun 2022, ASABRI mencatatkan aset Rp , naik 13,17% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Kinerja baik ASABRI di tahun 2022 merupakan bagian dari komitmen ASABRI untuk dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus pada segmen percepatan penyehatan perusahaan, perbaikan investasi serta fokus kepada peserta melalui pengelolaan risiko yang baik, dan efisiensi biaya. ASABRI juga melanjutkan transformasi digital untuk meningkatkan layanan kepada para peserta.

Selain peningkatan kinerja keuangan, kami terus berinovasi dengan mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mengembangkan layanan autentikasi secara digital untuk memudahkan layanan kepada peserta pensiun.

DEAR STAKEHOLDERS,

We have overcome many business challenges during the COVID-19 pandemic. The year 2022 reflects the recovery and resilience of the national economy after the easing of mobility restrictions and the revocation of PPKM by the government. ASABRI recorded a profit of IDR in 2022, driven by premium income amounting to IDR , marking a 288.23% YoY increase. Additionally, contributions from investment returns for the THT, JKK, and JKm Programs amounted to IDR . In 2022, the Company received Unfunded Past Service Liabilities (UPSL) premiums from the Government totaling IDR4.55 trillion. This was due to a shortfall in premiums paid by the Government as a result of changes in the benefit formula for the year 2022. ASABRI reported total assets of IDR , representing a 13.17% increase compared to the previous year.

ASABRI good performance in 2022 is part of ASABRI commitment to sustainable growth, with a focus on accelerating the company's restructuring segment, improving investments, and prioritizing participants through effective risk management and cost efficiency. ASABRI also continues its digital transformation efforts to enhance services for participants.

In addition to improving financial performance, we continue to innovate by developing products and services that better suit the needs of participants. In 2022, PT ASABRI (Persero) developed digital authentication services to facilitate services to retired participants.

Kami akan terus memberikan nilai tambah kepada seluruh peserta ASABRI dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan ASABRI sebagai Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan.

We will continue to provide added value to all ASABRI participants and stakeholders, including the community through the Corporate Social Responsibility (CSR) Program. This reflects our commitment to transform ASABRI into a professional National Social Insurance Company by continuously fostering a culture and conducting business sustainably.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan, izinkan kami menyampaikan laporan tahunan untuk tahun buku 2022 yang juga menjadi gambaran tentang perjalanan operasional dan keuangan Perusahaan sepanjang tahun buku tersebut. Laporan Direksi ini akan menyajikan analisis atas kinerja Perusahaan, analisis tentang prospek usaha, aspek keberlanjutan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan.

As a testament to our accountability in managing the Company, we hereby present the annual report for the fiscal year 2022. This report provides an overview of the Company's operational and financial performance throughout the fiscal year. The Directors' Report included in this document will offer an analysis of the Company's performance, business prospects, sustainability aspects, and the progress made in implementing corporate governance.

TINJAUAN KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI ASURANSI DI TAHUN 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada Triwulan IV-2022 tumbuh solid sebesar 5,01% (YoY). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (YoY). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (YoY).

REVIEW OF ECONOMIC CONDITIONS AND THE INSURANCE INDUSTRY IN 2022

The Central Bureau of Statistics (BPS) recorded that Indonesia's economy in the fourth quarter of 2022 grew solidly by 5.01% (YoY). On a full-year basis, Indonesia's economic growth throughout 2022 also recorded an impressive growth of 5.31% (YoY). This figure exceeded the target set by the Government of 5.2% (YoY).

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil pemerintah, salah satunya melalui program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Despite recording negative growth when hit by the COVID-19 pandemic in 2020, the national economy continues to show resilience and is recovering faster. Supported by strong national economic fundamentals, domestic economic activity continues to grow even though global conditions are still experiencing ups and downs. The mix of various constructive policies and strategies taken by the government, one of which is through the COVID-19 Handling and National Economic Recovery (PC-PEN) program, is the key to success in driving the pace of the national economy.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022, meningkat dibandingkan dengan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 sebesar 1,87% (YoY) dan lebih tinggi dari sasaran 3,0+1%, terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.

The Central Bureau of Statistics (BPS) also noted that Indonesia experienced 5.51% inflation throughout 2022, an increase compared to the 2021 Consumer Price Index (CPI) inflation of 1.87% (YoY) and higher than the target of 3.0+1%, mainly influenced by the impact of subsidised fuel oil (BBM) price adjustments in September 2022.

Secara umum, sepanjang tahun 2022, laju inflasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa komoditas yang dominan

In general, throughout 2022, the inflation rate increased due to global price pressures, food supply disruptions, and the fuel adjustment policy, as well as increased public demand with the improvement in pandemic conditions. Some of the commodities that dominantly drive inflation are petrol, household fuels, and air freight rates. Rising

mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng pada Semester I 2022. Gangguan cuaca yang terjadi di pertengahan tahun juga sempat mendorong naiknya volatilitas harga aneka cabai dan bawang merah meskipun kemudian mereda di akhir tahun.

global CPO prices also pushed up cooking oil prices in the first half of 2022. Weather disturbances that occurred in the middle of the year also pushed up the price volatility of various chillies and shallots although it later subsided at the end of the year.

Industri asuransi jiwa di Indonesia mengalami penurunan aset sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data OJK, aset industri asuransi jiwa turun sebesar 2,39% secara tahunan menjadi Rp585,86 triliun pada Desember 2022 diikuti dengan pendapatan premi yang naik 10,69% atau sebesar Rp169,95 triliun. Posisi aset ini menjadi yang paling rendah sepanjang tahun 2022 meskipun demikian perusahaan asuransi asing masih mendominasi aset di industri asuransi jiwa.

The Death Insurance industry in Indonesia experienced a decline in assets throughout 2022. Based on OJK data, Death Insurance industry assets fell by 2.39% on an annual basis to IDR585.86 trillion in December 2022 followed by premium income which rose by 10.69% or IDR169.95 trillion. This asset position is the lowest throughout 2022 even though foreign insurance companies still dominate assets in the Death Insurance industry.

Selain itu situasi ekonomi Indonesia saat ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan industri asuransi sosial yang saat ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan berdasarkan data dari OJK per Desember 2022 aset industri asuransi sosial naik tipis yaitu 0,47% menjadi Rp757,95 Triliun dengan pendapatan premi bruto naik 10,36% atau sebesar Rp232,43 Triliun yang diikuti dengan kenaikan klaim bruto sebesar 22,09% atau Rp162,51 triliun.

In addition, Indonesia's current economic situation also affects the growth of the social insurance industry, which is currently run by BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. Based on data from OJK as of December 2022, the assets of the social insurance industry rose slightly, namely 0.47% to IDR757.95 trillion with gross premium income up 10.36% or IDR232.43 trillion followed by an increase in gross claims of 22.09% or IDR162.51 trillion.

Pada Industri asuransi Asuransi ASN, TNI/Polri, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan yang saat ini dikelola oleh PT ASABRI (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Jasa Raharja (Persero) per Desember 2022 kemarin mengalami tren positif pada aset meskipun tren kenaikan klaim bruto masih lebih besar dari peningkatan tren pendapatan premi. Berdasarkan data dari OJK per Desember 2022 aset mengalami kenaikan 14,75% atau menjadi sebesar Rp163,87 triliun diikuti dengan tren kenaikan pendapatan premi bruto 7,03% atau Rp16,51 triliun atau lebih kecil dari jumlah klaim bruto yakni 8,4% atau Rp18,80 triliun.

In the ASN, TNI/Polri, General Passenger Accidents and Road Traffic Insurance insurance industry which is currently managed by PT ASABRI (Persero), PT Taspen (Persero) and PT Jasa Raharja (Persero) as of December 2022 yesterday experienced a positive trend in assets even though the upward trend in gross claims was still greater than the increasing trend in premium income. Based on data from OJK as of December 2022, assets increased by 14.75% or to IDR163.87 trillion followed by an upward trend in gross premium income of 7.03% or IDR16.51 trillion or smaller than the number of gross claims, which was 8.4% or IDR18.80 trillion.

PRIORITAS DAN INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2022

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 merupakan lanjutan dari pelaksanaan implementasi strategi yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024, yang masih dalam tahapan "Penguatan *Core Business*" yaitu tahapan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang didukung dengan pengembangan teknologi informasi dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu dalam rangka pemulihan kondisi keuangan, perusahaan telah dan akan melakukan restrukturisasi keuangan, *rebalancing* portofolio, serta melakukan penguatan tata kelola investasi.

STRATEGIC PRIORITIES AND INTIATIVES IN 2022

The programs and activities conducted in 2022 are part of the ongoing implementation of the strategies outlined in the Company's Long-term Plan (RJPP) for the period 2020-2024. This plan is currently in the "Strengthening Core Business" phase, which focuses on enhancing service quality through the development of information technology and the improvement of human resources. Furthermore, to address financial recovery, the company has undertaken and will continue to implement financial restructuring, portfolio rebalancing, and enhanced investment governance.

Dengan memperhatikan inisiatif strategis pada Klaster Asuransi Sosial dan Dana Pensiun ASN, TNI, dan Polri yang telah disusun oleh dan ditetapkan pada RJPP, di tahun 2022 inisiatif strategis yang dilaksanakan terbagi atas 6 aspek yaitu Investasi dan Keuangan, Program, Layanan dan Operasional, IT, SDM, dan *Risk Management*.

Investasi dan Keuangan

Awal tahun 2022 Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terkait *UPSL* sebesar Rp4,55 triliun sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero). ASABRI juga telah menerima surat rencana pembayaran *UPSL* di tahun 2022 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-914/MK.02/2022 tanggal 4 November 2022 hal Rencana Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero), dengan realisasi pembayaran yang sudah diterima oleh perusahaan pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1 triliun pada Bulan November dan sebesar Rp1,28 triliun pada bulan Desember.

Perbaikan tata kelola investasi juga dilakukan oleh Perusahaan melalui beberapa hal, pertama, melakukan revisi anggaran dasar terkait peranan dan komposisi Dewan Komisaris dalam keputusan investasi guna memperkuat dan perbaikan tata kelola dalam pengembangan bisnis dan pengawasan di Perusahaan serta adanya penyesuaian *tiering* kewenangan dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk persetujuan Dewan Komisaris dalam penyusunan kebijakan tata kelola investasi, kebijakan manajemen risiko dan kebijakan audit internal.

Kedua, telah terbit kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris atas Penguatan Kebijakan Investasi, Manajemen Risiko, Produk dan Aktuaria sesuai Keputusan Direksi tentang Komite Produk dan Aktuaria Nomor KEP/AP.01/43-AS/IV/2022 tentang Komite Produk dan Aktuaria dan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/PH.06/28-S/111/2021; KEP/004/KOM/AS/111/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Kebijakan Investasi PT ASABRI (Persero).

Ketiga, agar penguatan tata kelola investasi lebih optimal, maka Perusahaan melaksanakan sistem investasi yang terintegrasi dari *front office* (area Investasi), *middle office* (area Manajemen Risiko) serta *back office* (area settlement dan Akuntansi) melalui aplikasi Investpro dan Axapta, sehingga seluruh proses investasi dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Taking into account the strategic initiatives in the Social Insurance Cluster and the ASN, TNI, and Polri Pension Funds that have been prepared by and stipulated in the RJPP, in 2022 the strategic initiatives implemented are divided into 6 aspects, namely Investment and Finance, Program, Services and Operations, IT, HR, and Risk Management.

Investment and Finance

At the beginning of 2022, the Company received approval from the Minister of Finance regarding UPSL of IDR4.55 Trillion in accordance with the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 concerning Determination of Unfunded Past Service Liability (UPSL) for the Program Tabungan Hari Tua at PT ASABRI (Persero). ASABRI has also received a letter of UPSL payment plan in 2022 as per the Minister of Finance Letter Number S-914/MK.02/2022 dated November 4, 2022 regarding Unfunded Past Service Liability Payment Plan PT ASABRI (Persero) Program Tabungan Hari Tua, with the realization of payments received by the company in 2022 amounting to IDR1 trillion in November and IDR1.28 trillion in December.

Improvements in investment governance were also implemented by the Company through several measures. First, the company revised its articles of association related to the role and composition of the Board of Commissioners in investment decisions to strengthen and enhance governance in business development and supervision within the Company. Additionally, there were adjustments to the tiering of authority in making investment decisions, including the approval of the Board of Commissioners in the formulation of investment governance policies, risk management policies, and internal audit policies.

Second, an agreement has been issued between the Board of Directors and the Board of Commissioners on Strengthening Investment, Risk Management, Product and Actuarial Policies in accordance with the Decree of the Board of Directors on the Product and Actuarial Committee Number KEP/AP.01/43-AS/IV/2022 concerning the Product and Actuarial Committee and the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/PH.06/28-S/111/2021; KEP/004/KOM/AS/111/2021 dated March 31, 2021 concerning the Investment Policy of PT ASABRI (Persero).

Third, in order to strengthen investment governance more optimally, the Company implements an integrated investment system from that encompasses the front office (Investment area), middle office (Risk Management area), and back office (Settlement and Accounting area) through the Investpro and Axapta applications, ensuring that the entire investment process can be carried out transparently and accountably.

Program

ASABRI berupaya mewujudkan reformasi program THT melalui kajian perbaikan pengelolaan program THT bagi TNI, Polri, dan ASN yang telah disampaikan kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan melalui Surat Direktur Utama PT ASABRI (Persero) tanggal 30 Juni 2022 hal Penyampaian Kajian Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) PT ASABRI (Persero). Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi data pendukung atau pertimbangan dalam rencana penyusunan reformasi pada Program THT. Estimasi pelaksanaan *Reform* Program Pensiun dan THT dapat dilakukan mulai 2022 atau paling lama 2024. Kegiatan ini merupakan program kerja Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan melibatkan instansi atau lembaga terkait. Pelaksanaan atas implementasi program kerja tersebut bergantung pada kebijakan Pemerintah dan kondisi pendanaan negara.

Kami terus melakukan perbaikan layanan kepada peserta, salah satunya melalui program *monetary benefit* dalam bentuk *housing benefit*, *merchant discount*, dan *top up* asuransi. Dalam bentuk *housing benefit*, Perusahaan telah bekerja sama dengan Taspen Properti Indonesia sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT ASABRI (Persero) dengan PT Taspen Properti Indonesia Nomor SPKS/HK.02/236-AS/XII/2022 dan 80/HK.810/TP-000/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang *Housing Benefit* Untuk Peserta PT ASABRI (Persero) untuk melakukan pemberian Pinjaman Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (PUM KPR) dari ASABRI jika ada peserta aktif ASABRI yang berminat untuk membeli hunian yang dimiliki oleh Taspen Properti Indonesia dengan adanya pemberian harga khusus.

Dalam bentuk *merchant discount,* Perusahaan bekerja sama dengan BULOG guna menyelenggarakan bahan pangan untuk peserta dengan harga terjangkau. Untuk *benefit* pada aspek kesehatan, Perusahaan telah bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek dalam penyediaan obat-obatan dan Prodia berupa pelayanan jasa kesehatan dalam rangka menjamin dan menjaga kesehatan para peserta.

Sedangkan dalam bentuk *top up* asuransi, Perusahaan telah menandatangani PKS dengan Taspen Life perihal penyelenggaraan program Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) dan Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS) bagi peserta. Selain melalui *monetary benefit*, terdapat program *non-monetary benefit* berupa kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian peserta saat masa pensiun. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Perusahaan dengan menggandeng mitra bayar, di mana pada tahun 2022 telah terselenggara di beberapa Kantor Cabang yang diikuti sebanyak lebih dari 1000 peserta.

Program

ASABRI is making efforts to realize the reform of the THT program through a study aimed at improving the management of the THT program for TNI, Polri, and ASN. This study has been submitted to the Minister of BUMN and the Minister of Finance through a letter from the President Director of PT ASABRI (Persero) dated June 30, 2022, regarding the Submission of a Study on the Implementation of the Program Tabungan Hari Tua (THT), Work Accident Insurance (JKK), and Death Insurance (JKm) of PT ASABRI (Persero). The purpose of this study is to provide supporting data and considerations for the plan to formulate reforms within the THT Program. The estimated implementation of the Pension and THT Program Reform is scheduled to commence in 2022, with the latest starting date being 2024. This initiative is part of the Government's work program, overseen by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, and involves relevant agencies and institutions. The implementation of this work program is contingent on Government policies and the financial condition of the state.

We continue to improve services for participants, including through a monetary benefit program in the form of housing benefits, merchant discounts, and insurance top-ups. Regarding housing benefits, the Company has collaborated with Taspen Properti Indonesia in accordance with the Cooperation Agreement between PT ASABRI (Persero) and PT Taspen Properti Indonesia, numbered SPKS/HK.02/236-AS/XII/2022 and 80/HK.810/TP-000/XII/2022, dated December 28, 2022, concerning Housing Benefits for Participants of PT ASABRI (Persero). This collaboration enables ASABRI to provide Housing Advance Loans (PUM KPR) to active ASABRI participants interested in purchasing housing owned by Taspen Properti Indonesia at special prices.

In the form of merchant discount, the Company cooperates with BULOG to organise food for participants at affordable prices. For benefits in the health aspect, the Company has collaborated with Kimia Farma Apotek in providing medicines and Prodia in the form of health services in order to ensure and maintain the health of the participants.

While in the form of top up insurance, the Company has signed an agreement with Taspen Life regarding the implementation of the Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) and Taspen Dwiguna Sejahtera (TDS) Program for participants. In addition to monetary benefits, there is a non- monetary benefit program in the form of entrepreneurial activities to improve the economy of participants during retirement. The activity was initiated by the Company by cooperating with pay partners, where in 2022 it was held in several Branch Offices which were attended by more than 1000 participants.

Memperkuat Sinergi Klaster BUMN kami bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) dalam kegiatan program kewirausahaan bagi peserta ASABRI dan Taspen dengan tujuan untuk dapat melatih kemampuan peserta dalam berwirausaha yang ke depannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Peserta pada saat pensiun. Pelatihan ini dilaksanakan oleh kantor cabang bekerja sama dengan mitra bayar di Kantor Cabang dan sudah diikuti 1.751 peserta.

To strengthen the synergy of the BUMN Cluster, we collaborate with PT Taspen (Persero) in entrepreneurship program activities for ASABRI and Taspen participants. The goal is to train participants' entrepreneurial skills, which are expected to improve their economic situation upon retirement. This training is conducted by branch offices in collaboration with payment partners at the branch level and has been attended by 1,751 participants.

Layanan dan Operasional

Membuktikan komitmen ASABRI sebagai Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa, ASABRI senantiasa meningkatkan kapabilitas layanan dan digitalisasi layanan. Kami terus berinovasi dengan menerapkan nilai-nilai Kompeten, Adaptif dan Kolaboratif dengan tetap mengutamakan kebutuhan peserta sebagai dasar pendekatan bisnis dalam memberikan layanan digital yang cepat, mudah dan praktis.

Untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan atau *customer satisfaction* bagi peserta, kami bekerja sama dengan TASPEN sebagai klaster BUMN sejenis untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sehingga terciptanya layanan yang melebihi dari harapan Peserta atau *Delighted Customer Services* (DCS). Kerja sama yang telah terjalin yaitu program *Sharing Branches* atau layanan informasi Taspen dan ASABRI pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah terlaksana di 11 titik layanan MPP dari target 10 titik layanan MPP sebagai berikut:

Services and Operations

To prove ASABRI commitment as a lifelong companion in your journey, we continuously enhance our service capabilities and digitalize our services. We persistently innovate by applying the values of Competence, Adaptability, and Collaboration, always keeping the participants' needs at the forefront of our business approach to provide fast, easy, and practical digital services.

In order to provide a delightful customer experience for our participants, we collaborate with TASPEN, a similar SOE cluster, to develop and enhance our services, aiming to exceed Participant expectations and achieve Delighted Customer Services (DCS). One of the established collaborations is the Sharing Branches program, which provides Taspen and ASABRI information services at the Public Service Mall (MPP). This program has been implemented at 11 MPP service points, surpassing the initial target of 10 MPP service points as follows:

No	Kantor Cabang Branch Office	Pelaksanaan Launching Implementation of Launching	Lokasi MPP MPP Location
1	Kantor Cabang Utama Jakarta Main Branch Office of Jakarta	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Epicentrum Jl. Epicentrum Sel. No. Kav. 22 RT.2 /RW.5, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Setiabudi District, South Jakarta City, Special Capital Region Jakarta
2	Kantor Cabang Utama Jakarta Main Branch Office of Jakarta	7 November 2022 November 7, 2022	MPP Kota Bogor | Bogor City Jl. Malabar 2 No.17A, Babakan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128 Central Bogor District, Bogor City, West Java 16128
3	Kantor Cabang Bandung Branch Office of Bandung	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya City Jl. Letnan Harun No.1, Sukamulya, Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Bungursari District, Tasikmalaya City, West Java
4	Kantor Cabang Semarang Branch Office of Semarang	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Pati Jl. Raya Pati, Kudus KM 4 Sawah Kec. Margorejo Kab. Pati Jawa Tengah Margorejo District, Pati Regency, Central Java
5	Kantor Cabang Surabaya Branch Office of Surabaya	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Tuban Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.57 Kel. Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban Prov. Jawa Timur Latsari Village, Tuban District, Regency Tuban, East Java Province
6	Kantor Cabang Yogyakarta Branch Office of Yogyakarta	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Purworejo Jl. Proklamasi, Plaosan Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah Purworejo District, Purworejo Regency, Central Java

No	Kantor Cabang Branch Office	Pelaksanaan Launching Implementation of Launching	Lokasi MPP MPP Location
7	Kantor Cabang Denpasar Branch Office of Denpasar	25 Mei 2022 May 25, 2022	MPP Badung Pusat Pemerintahan, Sempidi Kec. Mengwi, Kab. Badung, Bali Mengwi District, Badung Regency, Bali
8	Kancab Banjarmasin Branch Office of Banjarmasin	31 Mei 2022 May 31, 2022	MPP Banjarbaru Jl. Husni Thamrin No. 01, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimatan Selatan North Banjarbaru District, Banjarbaru City, South Kalimantan
9	Kantor Cabang Medan Branch Office of Medan	20 Juni 2022 June 20, 2022	MPP Tebing Tinggi Jl. Gn. Leuser, Tj. Marulak Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Rambutan District, Tebing Tinggi City, North Sumatera
10	Kantor Cabang Makassar Branch Office of Makassar	19 Agustus 2022 August 19, 2022	MPP Maros Jl. Gladiol, Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros Sulawesi Selatan Turikale District, Maros Regency, South Sulawesi
11	Kantor Cabang Malang Branch Office of Malang	31 Oktober 2022 October 31, 2022	MPP Banyuwangi Jl. Sritanjung No.1, Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi District, Banyuwangi Regency, East Java

Selain itu, kerja sama juga kita jalin dalam pengembangan sistem antrean *online* yang terintegrasi untuk mendukung terwujudnya *Integrated Back Office Management* (IBOM) juga sudah terlaksana di tahun 2022.

Bertepatan dengan HUT ke-51 pada 1 Agustus 2022 ASABRI berhasil meluncurkan Aplikasi STAR (Sistem Autentikasi ASABRI) yaitu aplikasi digital yang membantu program autentikasi secara digital dengan tujuan untuk mempermudah layanan kepada peserta pensiunan TNI-Polri, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan sistem ini, peserta pensiun tidak perlu datang ke cabang ASABRI atau mitra bayar. Adapun sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sudah sebanyak 330.231 peserta pensiun telah melakukan *enrollment*.

Teknologi Informasi

Mendorong integrasi dan kapitalisasi data dalam rangka transformasi digital ASABRI telah melakukan pengembangan *database*, *data security and commercialization*. ASABRI telah membangun *dashboard* Data Kepesertaan yang digunakan untuk laporan rekapitulasi data peserta dan pembangunan *monitoring* transaksi *database* yang mencakup *data analitycs* untuk perbaikan data telah selesai dan *Go Live* pada tanggal 23 Maret 2022.

ASABRI juga berkomitmen untuk terus menjaga kepatuhan dengan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data Peserta karena itu kami melakukan pengembangan sistem proses pengelolaan data yang didukung dengan SDM pengelola data yang telah dibekali pelatihan tentang *Data Privacy Solutions Engineer* dengan membuat Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi untuk *IT Maturity* berdasarkan COBIT 2019.

In addition, we also collaborate in developing an integrated online queuing system to support the realization of Integrated Back Office Management (IBOM) has also been implemented in 2022.

Coinciding with the 51st Anniversary on August 1, 2022 ASABRI successfully launched the STAR Application (ASABRI Authentication System), a digital application that helps the authentication program a digital application designed to facilitate digital authentication for retired TNI-Polri participants and Civil Apparatus State (ASN) participants. It is hoped that with this system, pension participants will no longer need to visit ASABRI branches or payment partners. As of December 31, 2022, a total of 330,231 pension participants have enrolled.

Information Technology

Encouraging data integration and capitalisation in the context of digital transformation ASABRI has carried out database development, data security and commercialisation. ASABRI has built a Participation Data dashboard which is used for participant data recapitulation reports and the development of database transaction monitoring which includes data analitycs for data improvement has been completed and Go Live on March 23, 2022.

ASABRI is also committed to continuing to maintain compliance with regulations relating to the protection of Participant data, therefore we are developing a data management process system supported by data management human resources who have been provided with training on Data Privacy Solutions Engineer by making Information Technology Governance Policies and Procedures for IT Maturity based on COBIT 2019.

Sumber Daya Manusia

Saat ini ASABRI fokus mengembangkan layanan melalui transformasi dan inovasi teknologi guna mempermudah klaim bagi peserta. Guna memastikan inovasi terus berjalan, ASABRI menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kebutuhan peserta dan pemangku kepentingan.

Optimasi pengembangan Karyawan juga dilakukan untuk mengisi *Generation Gap* melalui penguatan *Human Capital Integrated System* (HCIS). Untuk mencari bibit-bibit ungulan ASABRI melaksanakan *integrated talent recruitment and culture transformation* yang merupakan program pengembangan *talent pooling system* (terutama untuk *professional hire*) dan transisi budaya menuju *entrepreneurship culture* berbasis *core values* BUMN yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Pelaksanaan *integrated and centralized recruitment* serta program *Employer Value Proposition* (EVP) dilaksanakan melalui Program Perekrutan Bersama (PPB) Bersama Kementerian BUMN.

Mendorong terbentuknya lingkungan yang mampu menstimulasi Karyawan untuk terus berinovasi dan proaktif, ASABRI melaksanakan *Officer Development Program* (ODP) dengan serangkaian kegiatan mulai dari *in-class training* sampai dengan *final project* presentation sebanyak 6 *batch*. Implementasi atas proyek inovasi yang diusulkan dalam ODP akan dioptimalkan pelaksanaannya pada tahun 2023.

ASABRI menyusun program-program pengembangan SDM seperti program *onboarding* bagi karyawan baru, program *skill* dan *knowledge* secara *online learning* melalui video pembelajaraan (*video e-learning*) serta pemanfaatan *platform* sharepoint Microsoft 365 sebagai *database mapping* laporan *knowledge sharing* dari Unit Kerja.

Sinergi klaster BUMN juga dilaksanakan dalam pengembangan SDM. ASABRI bersama dengan Taspen melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengembangkan modul dan sistem pelatihan secara bersama. Sampai dengan tahun 2022 implementasi 3 (tiga) *Integrated Module* telah tercapai yaitu *Electronic Library* melalui Liber-T, *Knowledge Sharing Platform* melalui Yammer, dan implementasi *Learning Management System* (LMS) melalui Simple Taspen.

ASABRI bersama Taspen juga bekerja sama dalam pelaksanaan *cross assignment* melalui pertukaran SDM antar Perusahaan yang telah diikuti oleh 3 peserta dari ASABRI dan 2 peserta dari Taspen.

Human Resources

Currently, ASABRI is focused on developing services through technology transformation and innovation to simplify claims for customers. To ensure that innovation continues to progress, ASABRI is preparing its Human Resources (HR) to be able to respond and adapt quickly to various needs of participants and stakeholders.

Employee development optimization is also carried out to bridge the Generation Gap through strengthening the Human Capital Integrated System (HCIS). To identify exceptional talents, ASABRI conducts an Integrated Talent Recruitment and Culture Transformation program, which is a talent pooling system development initiative (especially for professional hires) and a cultural transition toward an entrepreneurship culture based on the core values of SOEs, which are Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, and Kolaboratif (AKHLAK). The implementation of integrated and centralized recruitment, as well as the Employer Value Proposition (EVP) program, is carried out through the Joint Recruitment Program (PPB) in collaboration with the Ministry of SOEs.

To encourage the creation of an environment that can stimulate employees to innovate and be proactive, ASABRI has implemented the Officer Development Program (ODP) with a series of activities ranging from in-class training to the final project presentation in 6 batches. The implementation of the innovation projects proposed in the ODP will be optimized in 2023.

ASABRI prepares HR development Program such as onboarding Program for new employees, online learning skills and knowledge Program through video e-learning and the use of the Microsoft 365 sharepoint platform as a database for mapping knowledge sharing reports from Work Units.

SOE cluster synergy is also implemented in HR development. ASABRI together with Taspen conducted a Joint Operation (KSO) to develop training modules and systems together. Until 2022 the implementation of 3 (three) Integrated Modules has been achieved, namely Electronic Library through Liber-T, Knowledge sharing platform through Yammer, and implementation of Learning Management System (LMS) through Simple Taspen.

ASABRI and Taspen also collaborate in the implementation of cross assignment through HR exchange between companies which has been attended by 3 participants from ASABRI and 2 participants from Taspen.

Risk Management

Dalam pengelolaan *Risk Management* saat ini ASABRI berada pada level *Managed* di mana pada tahap tersebut terdapat beberapa karakteristik, yaitu proses manajemen risiko di seluruh unit terstandardisasi, terdokumentasi dan terkomunikasikan secara menyeluruh dan sistematis, keseluruhan proses manajemen risiko terintegrasi dalam proses bisnis, dan manajemen risiko tidak hanya bersifat diagnostik namun memiliki kemampuan analisis *predictive* dan *prescriptive*.

Pada inisiatif ini target yang akan dicapai adalah tersedianya *Integrated Risk Monitoring Dashboard* (IRMD) sebagai bentuk sistem peringatan dini. Saat ini, *dashboard monitoring* risiko yang digunakan Perusahaan sudah tersedia melalui aplikasi Investpro, namun Perusahaan akan terus melakukan pengembangan.

Target selanjutnya adalah agar setiap laporan terkait Manajemen Risiko menjadi terintegrasi dalam bentuk *Early Warning System* (EWS) sehingga menjadi *live dashboard*. Pengembangan EWS dimulai dengan penyusunan *blueprint*, di mana penyusunan blueprint EWS tersebut telah selesai pada tanggal 21 Desember 2022 dengan rencana pengembangan aplikasinya dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas manajemen risiko, ASABRI secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi *risk management*. Hal ini bertujuan agar *Risk Officer* dapat memahami risiko dalam pelaksanaan bisnis sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya untuk memitigasi terjadinya suatu risiko.

Kinerja Perusahaan

ASABRI berhasil membukukan kinerja yang baik di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tercermin dari pencapaian total aset ASABRI di 2022 mencapai , meningkat sebesar 13,17% (YoY) dari yang dicapai pada 2021. Liabilitas ASABRI juga mengalami kenaikan senilai , naik r atau 2,04% dibandingkan dengan liabilitas di 2021. Penyebab utama naiknya jumlah liabilitas tersebut dikarenakan adanya peningkatan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) di akhir tahun 2022 yang dikarenakan penurunan bunga aktuaria dari 9,7% di tahun 2021 menjadi 9,5% di tahun 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2022 tercatat , pencapaian ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar 69,86% dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar . Kenaikan ekuitas ini dipicu kenaikan saldo laba dari laba periode berjalan yang berasal dari pengakuan premi *UPSL*.

Risk Management

In managing Risk Management, ASABRI is currently at the Managed level where at this stage there are several characteristics, namely the risk management process in all units is standardised, documented and communicated thoroughly and systematically, the entire risk management process is integrated into business processes, and risk management is not only diagnostic but has predictive and prescriptive analysis capabilities.

In this initiative, the target to be achieved is the availability of the Integrated Risk Monitoring Dashboard (IRMD) as an early warning system. Currently, the risk monitoring dashboard used by the Company is available through the Investpro application, but the Company will continue to develop it.

The next target is for every report related to Risk Management to be integrated in the form of an Early Warning System (EWS) so that it becomes a live dashboard. The EWS development started with the blueprint preparation, where the EWS blueprint preparation was completed on December 21, 2022 with a plan to develop its application in fiscal year 2024.

To enhance risk management knowledge and capacity, ASABRI continuously conducts Risk Management Training and Certification. This is intended to enable Risk Officers to understand the risks in business implementation so that they can actively fulfill their roles in mitigating potential risks.

Company Performance

ASABRI managed to record a good performance amidst global economic uncertainty, as reflected in the achievement of ASABRI total assets in 2022, reaching . This represents an increase of 13.17% (YoY) compared to the figures for 2021. ASABRI liabilities also increased to , which is an increase of or 2.04% compared to the liabilities in 2021. The primary reason for the increase in liabilities is the rise in Liabilities for Future Policy Benefits (LMPMD) at the end of 2022, driven by a decrease in actuarial interest rates from 9.7% in 2021 to 9.5% in 2022.

Equity as of December 31, 2022, was recorded at . This achievement represents a significant increase of 69.86% compared to the position as of December 31, 2021, when it was at . The increase in equity can be attributed to a rise in retained earnings resulting from the recognition of UPSL premiums.

Tumbuh, Tangguh: Bangkit Bersama Wujudkan Layanan Prima

Growing, Resilient: Rise Together to Realise Excellent Service

Selaras dan seirama seluruh Insan ASABRI bersama dengan seluruh *stakeholder* melangkah membawa ASABRI menjadi lebih baik dan berevolusi ke arah layanan digital. ASABRI memastikan implementasi strategi secara menyeluruh melalui komunikasi yang efektif di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bersama dengan seluruh Insan ASABRI berkomitmen dan memastikan dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan telah sesuai dengan strategi bisnis, *risk appetite*, dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Direksi juga secara aktif memantau pelaksanaan strategi-strategi kebijakan perusahaan melalui peninjauan berkala, pemberian umpan balik, dan pengambilan keputusan yang sejalan dengan dinamika di lapangan dan peraturan yang berlaku. Hasilnya terbukti bahwa peningkatan pencapaian operasional ASABRI di tahun 2022 telah berhasil meningkat dari tahun sebelumnya.

In harmony and unity, all ASABRI personnel, along with all stakeholders, have stepped forward to make ASABRI better and evolve toward digital services. ASABRI ensures comprehensive strategy implementation through effective communication under the guidance and supervision of the Board of Commissioners. The Board of Directors, along with all ASABRI personnel, are committed to ensuring that the management of the company's operational activities aligns with the business strategy, risk appetite, and other approved policies set forth by the Board of Commissioners. The Board of Directors actively monitors the implementation of the company's policy strategies through regular reviews, feedback, and decision-making that aligns with the dynamics in the field and applicable regulations. The results show that ASABRI operational achievements in 2022 have significantly improved compared to the previous year.

ASABRI berhasil memastikan bahwa pembayaran klaim dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan hak peserta. Tahun 2022 ASABRI membayarkan klaim manfaat sebesar Rp1,76 triliun dengan rincian pembayaran klaim dan manfaat THT sebesar Rp1,48 triliun, JKK sebesar Rp63,77 miliar dan JKm sebesar Rp211,90 miliar. Sehingga *Claim Ratio* tahun 2022 sebesar 108,64%.

ASABRI succeeded in ensuring that claim payments were paid on time and in the right amount in accordance with participant rights. In 2022 ASABRI paid benefit claims of IDR1.76 trillion with details of payment of claims and benefits for ENT of IDR1.48 trillion, JKK of IDR63.77 billion and JKm of IDR211.90 billion. So that the Claim Ratio in 2022 is 108.64%.

ASABRI telah menyalurkan pembayaran pensiun sebesar Rp16,68 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada 556.671 orang penerima manfaat pensiun. Nominal pembayaran manfaat pensiun tersebut meliputi Dapem (Dapem Induk, Rapel, Gaji ke-13, Susulan, dan THR) dan nominal pensiun Non Dapem (Pensiun Pertama (PP), Uang Kekurangan Pensiun (UKP), dan Uang Duka Wafat (UDW).

ASABRI has disbursed pension payments totaling IDR16.68 trillion, sourced from the State Budget (APBN), to 556,671 pension beneficiaries. The nominal pension benefit payments include Dapem (Main Dapem, Rapel, 13th Salary, Supplementary, and THR) and Non-Dapem pension nominal (First Pension (PP), Pension Shortfall (UKP), and Death Benefit (UDW)).

Peningkatan kualitas data peserta pada *database* ASABRI secara masif terus dilakukan. Tahun 2022 ASABRI berhasil melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul PKS dengan TNI, Kemhan, BKN dan Dukcapil yang sudah lebih dulu dilakukan. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk melengkapi data kepesertaan khususnya Anggota Polri yang diharapkan dapat mempercepat kelengkapan data riwayat kepangkatan dan data keluarga Anggota Polri serta data pendukung lainnya, sehingga akurasi data dalam penghitungan simulasi premi menjadi lebih akurat mendukung peningkatan layanan kepada Peserta.

Massive improvement in the quality of participant data in the ASABRI database continues to be carried out. In 2022 ASABRI succeeded in signing a Cooperation Agreement (PKS) with the Indonesian National Police (Polri) following the PKS with the TNI, Ministry of Defense, BKN and Dukcapil which had already been carried out. This cooperation agreement aims to complete membership data, especially Polri members, which is expected to accelerate the completeness of rank history data and family data for Polri members and other supporting data, so that data accuracy in calculating premium simulations becomes more accurate to support improved services to Participants.

PROSPEK USAHA

Di tahun 2022 perusahaan telah memperoleh 2 (dua) dukungan perbaikan keuangan dari Kementerian Keuangan yaitu:

Penetapan *Unfunded Past Service Liability (UPSL)*

Penetapan besaran kontribusi Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) Program THT akibat perubahan formulasi manfaat Program THT sebesar Rp4.550.263.772.727 sebagaimana Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero).

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-914/MK.02/2022 tanggal 04 November 2022 hal Rencana Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero). *UPSL* diterima dari Pemerintah dengan jadwal pencairan sebagai berikut

1. Bulan November 2022 telah dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
2. Bulan Desember 2022 telah dibayarkan sebesar Rp1.280.000.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan KMPMD Program THT

Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 hal Persetujuan Metode dan Asumsi Dalam Perhitungan KMPMD Program THT pada PT ASABRI (Persero) Tahun 2022. Pada surat tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyetujui penggunaan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) dan asumsi bunga aktuaria sebesar 9,50% untuk Tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan melakukan perhitungan LMPMD program THT dengan menggunakan tingkat bunga aktuaria yang telah disetujui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tingkat solvabilitas Perusahaan mencapai 74,26% yang dihitung berdasarkan asumsi bunga aktuaria dalam perhitungan LMPMD sebesar 9,5%. Pencapaian tersebut masih di bawah tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan yakni sebesar 100,00% dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM). Namun membaik bila dibandingkan tahun 2021

BUSINESS OUTLOOK

In 2022 the company has received 2 (two) financial improvement supports from the Ministry of Finance namely:

Determination of Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Determination of the amount of Government Contribution to the Unfunded Past Service Liability (UPSL) of the THT Program due to changes in the benefit formulation of the THT Program amounting to IDR4,550,263,772,727 as stated in the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 concerning Determination of Unfunded Past Service Liability of the Program Tabungan Hari Tua at PT ASABRI (Persero).

In accordance with the letter of the Minister of Finance Number S-914/MK.02/2022 dated November 04, 2022 regarding the Unfunded Past Service Liability Payment Plan PT ASABRI (Persero) Program Tabungan Hari Tuame. UPSL is received from the Government with the following disbursement schedule:

1. November 2022 has been paid in the amount of IDR1,000,000,000,000 (one trillion rupiah);
2. December 2022 has been paid in the amount of IDR1,280,000,000,000 (one trillion two hundred eighty billion rupiah).

Approval of Methods and Assumptions in the Calculation of the THT Program KMPMD

Letter of the Minister of Finance Number S-49/MK.02/2022 dated January 30, 2022 concerning Approval of Methods and Assumptions in the Calculation of KMPMD for the THT Program at PT ASABRI (Persero) in 2022. The letter stated that the Minister of Finance approved the use of the Gross Premium Valuation (GPV) method and an actuarial interest assumption of 9.50% for 2022. Based on the letter, the Company calculated the LMPMD of the THT program using the approved actuarial interest rate.

Based on the Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021 dated June 14, 2021 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of the Tabungan Hari Tua, Work Accident and Death Insurance Program for Employees of the State Civil Apparatus, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the Indonesian National Police, the Company's solvency level reached 74.26% which was calculated based on the actuarial interest assumption in the LMPMD calculation of 9.5%. This achievement is still below required solvency level of 100.00% of the Solvency Level Limit. Minimum (BTSM). However, it improved when compared to 2021 of minus 1210.48%.

sebesar minus 1210,48%. Adapun Perusahaan berupaya untuk meningkatkan dengan cara pemulihan atas aset bermasalah dan meningkatkan hasil investasi dengan fokus investasi pada instrumen *fixed income*.

ASABRI selaku pengelola program THT bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri telah menyampaikan kajian komprehensif Program THT pada tahun 2022 kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan sebagaimana Surat Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor B/AP.01/1199-AS/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 hal Penyampaian Kajian Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian PT ASABRI (Persero). Berdasarkan Surat Penyampaian Kajian Komprehensif Program THT, kami merekomendasikan beberapa hal antara lain:

1. Alokasi Premi Atas Manfaat Biaya Pemakaman;
2. Alokasi Biaya Operasional Atas Penyelenggaraan Program THT;
3. Rencana Reformasi Program THT sesuai Program Kerja Pemerintah.

Penyampaian rekomendasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap risiko yang dipertanggungkan harus memiliki alokasi premi yang memadai dan mempertimbangkan biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha atau pengelolaan program yang diperjanjikan. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipenuhi, pengelolaan program menjadi kurang ideal dan akan memengaruhi ketersediaan dana kelolaan.

PENERAPAN PRAKTIK GCG

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di ASABRI berperan dalam meningkatkan keunggulan dan membangun daya saing ASABRI secara berkelanjutan. Di samping itu, penerapan prinsip GCG juga dapat meningkatkan nilai dan citra ASABRI di mata para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, ASABRI berupaya untuk mengimplementasikan prinsip GCG tidak hanya sebatas pada bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga diaplikasikan pada sikap dan tingkah laku setiap insan ASABRI dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis. Untuk memastikan agar implementasi GCG dilakukan di seluruh level organisasi secara konsisten dan berkesinambungan, ASABRI telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan GCG yang meliputi GCG *Code*, Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*), *Board Manual*, *Whistleblowing System*, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman Kepatuhan, dan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

The Company aims to improve its performance by recovering non-performing assets and increasing investment returns, with a focus on investing in fixed income instruments.

ASABRI as the manager of the THT program for TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defense and Police has submitted a comprehensive study of the THT Program in 2022 to the Minister of BUMN and the Minister of Finance as stated in the Letter of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number B/AP.01/1199-AS/VI/2022 dated June 30, 2022 regarding Submission of a Study on the Implementation of the Program Tabungan Hari Tua, Work Accident Insurance, and Death Insurance of PT ASABRI (Persero). Based on the Letter of Submission of the Comprehensive Study of the THT Program, we recommend several things, among others:

1. Premium Allocation for Funeral Cost Benefits;
2. Allocation of Operational Costs for the Implementation of the ENT Program;
3. THT Program Reform Plan in accordance with the Government Work Program.

The submission of these recommendations is made with the consideration that every insured risk must have an adequate premium allocation and take into account the operational costs required for conducting business activities or managing the promised program. If there are things that have not been fulfilled, program management becomes less than ideal and will affect the availability of managed funds.

IMPLEMENTATION OF GCG PRACTICES

The implementation of good corporate governance (GCG) principles in ASABRI plays a role in enhancing excellence and fostering ASABRI competitiveness in a sustainable manner. Furthermore, the implementation of GCG principles can enhance the value and image of ASABRI in the eyes of its stakeholders. Therefore, ASABRI strives to implement GCG principles not only as a form of compliance with applicable regulations, but also applied to the attitudes and behaviour of every ASABRI employee in carrying out all business activities. To ensure consistent and continuous implementation of GCG at all levels of the organization, ASABRI has established various policies governing GCG implementation. These policies include the GCG Code, Corporate Ethics Standards (Code of Conduct), Board Manual, Whistleblowing System, Gratification Guidelines, Conflict of Interest Guidelines, Compliance Guidelines, and Anti-Bribery Management System Guidelines.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, ASABRI telah melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya kegiatan *Assessment* GCG yang dikembangkan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Dari pelaksanaan *Assessment* GCG tahun 2022, ASABRI berhasil memperoleh skor sebesar 82,503% dengan predikat "Baik".

In order to improve the quality of GCG implementation, ASABRI has carried out several activities including: GCG Assessment activities developed with reference to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. From the implementation of the GCG Assessment in 2022, ASABRI managed to obtain a score of 82.503% with the predicate "Good".

PT ASABRI (Persero) juga telah menyelenggarakan kegiatan *Surveillance* SMAP pada tanggal 26 Agustus 2022, pada kegiatan tersebut PT ASABRI (Persero) telah berhasil dalam mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System*. Selain itu, PT ASABRI (Persero) juga telah melakukan pendaftaran atas Program Kepatuhan Persaingan Usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bentuk langkah ASABRI dalam mencegah terjadinya pelanggaran termasuk konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menciptakan persepsi positif sebagai ASABRI dengan etika bisnis yang tinggi, serta menciptakan prosedur baku internal perusahaan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

PT ASABRI (Persero) has also held SMAP Surveillance activities on August 26, 2022, at this activity PT ASABRI (Persero) has successful in maintaining ISO 37001: 2016 Anti Bribery Management System certification. In addition, PT ASABRI (Persero) has also registered the Competition Compliance Program with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as a form of ASABRI steps in preventing violations including the cost consequences arising from non-compliance with Law Number 5 Year 1999, creating a positive perception as ASABRI with high business ethics, and creating internal standard procedures in accordance with the principles of fair business competition.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Hingga 31 Desember 2022, terdapat satu kali penambahan dalam susunan dan komposisi Direksi. Susunan Direksi semula terdiri dari 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang, di mana terdapat penambahan pejabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan. Adapun perubahan susunan dan komposisi Direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Periode 1 – 24 Januari 2022

Direksi berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM dan Hukum, 1 (satu) orang Direktur Investasi, dan 1 (satu) orang Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Until December 31, 2022, there was one addition in the composition of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors originally consisted of 4 (four) people to 5 (five) people, in which there was an additional official as Director of Institutional Relations. The changes in the composition of the Board of Directors in 2022 are as follows:

Period January 1 - 24, 2022

The Board of Directors totalled 4 (four) persons consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) HR and Legal Director, 1 (one) Investment Director, and 1 (one) Finance and Risk Management Director.

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Menteri BUMN SOEs Minister Decree	Persetujuan OJK OJK Approval
1	Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-264/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-264/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020 Financial Services Authority Letter Number S-41/D.05/2020 dated November 10, 2020

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Menteri BUMN SOEs Minister Decree	Persetujuan OJK OJK Approval
2	Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-36/MBU/01/2020 dated January 30, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/D.05/2021 tanggal 5 Februari 2021 Financial Services Authority Letter Number S-1/D.05/2021 dated February 5, 2021
3	Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-36/MBU/01/2020 dated January 30, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27/D.05/2020 tanggal 1 Agustus 2020 Financial Services Authority Letter Number S-27/D.05/2020 dated August 1, 2020
4	Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-119/MBU/04/2021 dated April 15, 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/D.05/2021 tanggal 22 Desember 2021 Financial Services Authority Letter Number S-26/D.05/2021 dated December 22, 2021

Periode 25 Januari 2022 – 31 Desember 2022

Direksi berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur SDM dan Hukum, 1 (satu) orang Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, 1 (satu) orang Direktur Investasi, dan 1 (satu) orang Direktur Hubungan Kelembagaan.

Period January 25, 2022 - December 31, 2022

The Board of Directors totalled 5 (five) persons consisting of 1 (one) President Director, 1 (one) HR and Legal Director, 1 (one) Finance and Risk Management Director, 1 (one) Investment Director, and 1 (one) Institutional Relations Director.

No.	Nama Name	Jabatan Position	SK Menteri BUMN SOEs Minister Decree	Persetujuan OJK OJK Approval
1	Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-264/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-264/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020 Financial Services Authority Letter Number S-41/D.05/2020 dated November 10, 2020
2	Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-36/MBU/01/2020 dated January 30, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1/D.05/2021 tanggal 5 Februari 2021 Financial Services Authority Letter Number S-1/D.05/2021 dated February 5, 2021
3	Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-36/MBU/01/2020 dated January 30, 2020	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-27/D.05/2020 tanggal 1 Agustus 2020 Financial Services Authority Letter Number S-27/D.05/2020 dated August 1, 2020
4	Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-119/MBU/04/2021 dated April 15, 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-26/D.05/2021 tanggal 22 Desember 2021 Financial Services Authority Letter Number S-26/D.05/2021 dated December 22, 2021
5	Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor SK-29/MBU/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number SK-29/MBU/01/2022 dated January 25, 2022	Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-12/D.05/2022 tanggal 4 Juli 2022 Financial Services Authority Letter Number S-12/D.05/2022 dated July 4, 2022

APRESIASI

Akhir kata, kami segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham maupun jajaran Dewan Komisaris yang merupakan Organ Tata Kelola tertinggi di ASABRI atas dukungan, arahan, dan masukan yang diberikan guna meningkatkan performa ASABRI dan mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Manajemen dan Insan ASABRI atas komitmen, kerja keras, dan loyalitas yang diberikan selama proses pelaksanaan aktivitas bisnis demi tercapainya target-target bisnis ASABRI di tengah dinamika industri asuransi yang cukup berat sepanjang tahun 2022.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja, pemasok, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung pelaksanaan bisnis ASABRI, sehingga kami dapat melaksanakan kinerja dengan hasil yang positif di tahun ini.

Ke depannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan performa terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi ASABRI untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan Peserta.

APPRECIATION

Finally, we as the Board of Directors would like to express our deepest gratitude to the Government of the Republic of Indonesia as the Shareholder and the Board of Commissioners as the highest Governance Organ in ASABRI for the support, direction, and input provided to improve ASABRI performance and achieve sustainable business growth.

We also express our highest appreciation to all ASABRI Management and People for their commitment, hard work, and loyalty during the process of implementing business activities in order to achieve ASABRI business targets amidst the tough dynamics of the insurance industry throughout 2022.

We would also like to thank our partners, suppliers, communities, and other stakeholders who have supported the implementation of ASABRI business, so that we can carry out performance with positive results this year.

Going forward, we remain committed to always providing the best performance in order to realise ASABRI vision and mission to become a professional National Social Insurance Company and be able to improve the welfare of Participants.

Jakarta, 2023

Direktur Utama PT ASABRI (Persero)
President Director of PT ASABRI (Persero)



Wahyu Suparyono
Direktur Utama
President Director

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 2022
Annual Reporting Responsibility 2022

Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT ASABRI (Persero)
Statement Letter of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the 2022 Annual Report PT ASABRI (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT ASABRI (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT ASABRI (Persero) in 2022 has been contained in full and are fully responsible for the correctness of the contents of the Company's Annual Report.

Thus this statement is made with truth.

DEWAN KOMISARIS,
BOARD OF COMMISSIONERS,

Fary Djemy Francis
Komisaris Utama
President Commissioner

Budi Prijono*
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Aridono Sukmanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

I Nengah Putra Winata
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rofyanto Kurniawan
Komisaris
Commissioner

*Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan
*In the process of fit and proper assessment by the Financial Services Authority

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 PT ASABRI (Persero)

Statement Letter of the Board of Directors regarding Responsibility for the 2022 Annual Report PT ASABRI (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT ASABRI (Persero) tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the Annual Report of PT ASABRI (Persero) in 2022 has been contained in full and are fully responsible for the correctness of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made with truth.

DIREKSI,
BOARD OF DIRECTORS,

Wahyu Suparyono
Direktur Utama
President Director

Jeffry Haryadi P. Manullang
Direktur Investasi
Director of Investment

Helmi Imam Satriyono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Sri Ainin Muktirizka
Direktur SDM dan Hukum
Director of Human Resources and Legal

Khaidir Abdurrahman
Direktur Hubungan Kelembagaan
Director of Institutional Relations


03



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Identitas Perusahaan
Corporate Identity



NAMA PERUSAHAAN
Company Name
PT ASABRI (PERSERO)

NAMA PANGGILAN
Nickname
ASABRI

BIDANG USAHA
Line of business
ASURANSI SOSIAL
Social Insurance

TANGGAL PENDIRIAN
Date of Establishment
1 AGUSTUS 1971
August 1, 1971

KEPEMILIKAN
Ownership
100% PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
100% Government of the Republic of Indonesia

STATUS
Status
BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
State-Owned Enterprise (Persero)

MODAL DASAR DAN DISETOR PENUH
Authorised and Fully Paid-up Capital
RP500.000.000.000 BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)
IDR500.000.000.000 State-Owned Enterprise (Persero)

AKTA PENDIRIAN
Deed of Establishment

AKTA NOMOR 201 TANGGAL 30 DESEMBER 1992 TENTANG PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS MUNIHANI SALIM S. H. NOTARIS DI JAKARTA

Deed Number 201 dated December 30, 1992 concerning the Establishment and Articles of Association of the Company (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia made by Notary Munihani Salim S. H. Notary in Jakarta.

DASAR HUKUM PENDIRIAN
Legal Basis for Establishment

- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1971 TANGGAL 31 JULI 1971 TENTANG PENDIRIAN UMUM ASURANSI SOSIAL A.B.R.I**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1991 TANGGAL 17 DESEMBER 1991 TENTANG PENGADILAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**
- Government Regulation Number 45 of 1971 dated July 31, 1971 on the Establishment of A.B.R.I. Social Insurance General
- Government Regulation Number 68 of 1991 dated December 17,1991 concerning the Transfer of the Form of Public Company (Perum) of Social Insurance of the Armed Forces of the Republic of Indonesia into a Company (Persero)

DATA JARINGAN KANTOR
Office Network Data

KANTOR PUSAT	**: 1**
KANTOR CABANG TIPE A	**: 4**
KANTOR CABANG TIPE B	**: 11**
KANTOR CABANG TIPE C	**: 18**
Head Office	: 1
Type A Branch Office	: 4
Type B Branch Office	: 11
Type C Branch Office	: 18

ALAMAT PERUSAHAAN
Company Address

KANTOR PUSAT:
Head Office:
GEDUNG PT ASABRI (PERSERO)
JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 11, CAWANG
JAKARTA – 13630
NO. TELP. | PHONE **: 021 8094135**
021 8094140
FAKSIMILE | FAXIMILE **: 021 8012313**
WEBSITE : www.asabri.co.id

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

OKKI JATNIKA
SEKRETARIAT PERUSAHAAN
Corporate Secretariat
GEDUNG KANTOR PUSAT
Head Office
PT ASABRI (PERSERO) 1ST FLOOR JALAN MAYJEN SUTOYO NO. 11, CAWANG JAKARTA – 13630
***E-MAIL* : corsec@asabri.co.id**

JUMLAH KARYAWAN
Number of Employees

498 ORANG
498 People

CONTACT ADDRESS

CALL CENTER : 1500043
***E-MAIL* : asabri@asabri.co.id**

MEDIA SOSIAL
Social Media

@asabriofficial **@asabri_official** **Asabri Official** **@asabri_official**

Makna Logo
Meaning of Logo

Pada 26 Februari 2018, ASABRI meresmikan logo baru yang menandai *re-branding* dan dimulainya transformasi bisnis serta peningkatan layanan asuransi sosial terhadap Pesertanya, yang terdiri dari Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

On February 26, 2018, ASABRI inaugurated a new logo that marks the re-branding and the start of business transformation and improvement of social insurance services to its Participants, consisting of TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defence and the Police.

Arti Bentuk Logo
Logo Shape Meaning



PAYUNG | UMBRELLA

Menyatukan loyalitas, memberikan perlindungan serta ketenangan untuk berbakti

Uniting loyalties, providing protection and offering peace of mind for dedicated service

BINTANG | STAR

Mewakili seluruh Prajurit TNI AD dan seluruh ASN yang bertugas di setiap kesatuan TNI AD

Representing the entire Indonesian National Army and all ASN who serve in every unit of the Indonesian National Army

BURUNG | BIRD

Mewakili seluruh Prajurit TNI AU dan seluruh ASN yang bertugas di setiap kesatuan TNI AU

Representing all Soldiers of the Indonesian National Army Air Force and all ASN who serve in every unit of the Indonesian National Army Navy

PERISAI | SHIELD

Mewakili seluruh Polri dan seluruh ASN yang bertugas di setiap kesatuan Polri

Representing all police officers and all civil servants on duty in each police unit

JANGKAR | ANCHOR

Mewakili seluruh TNI AL dan seluruh ASN yang bertugas di setiap kesatuan TNI AL

Representing the entire Indonesian National Army Navy and all ASN who serve in every unit of the Indonesian National Army Navy

Arti Warna Logo
Meaning of Logo Colors

BIRU
BLUE
#002966

Merepresentasikan kesan yang dapat diandalkan, bijaksana, terpercaya dan profesional.
Represents an impression of being reliable, discreet, trustworthy and professional.

KUNING EMAS
GOLDEN YELLOW
#CCA600

Merepresentasikan sebuah harapan dan kesejahteraan bagi para Peserta.
Represents hope and prosperity for the Participants.

PUTIH
WHITE
#FFFFFF

Merepresentasikan kejujuran dan ketulusan dalam melakukan setiap pekerjaan.
Represents honesty and sincerity in doing every job.

Riwayat Singkat
Brief History

ASABRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri melalui penyelenggaraan asuransi sosial.

ASABRI as a State-Owned Enterprise (BUMN) always supports the Government's program in improving the welfare of TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defence and Police through the implementation of social insurance.

Bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri yang awalnya merupakan Peserta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi Peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan Khusus urusan Militer dengan nama TASPENmil yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 7 Jakarta Pusat. TASPENmil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PT ASABRI (Persero).

Dalam perjalanan selanjutnya, keikutsertaan Prajurit TNI dan Anggota Polri dalam TASPEN semakin memengaruhi penyelenggaraan Program TASPEN, karena:
1. Batas Usia Pensiun (BUP) Prajurit TNI dan Anggota Polri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 berbeda dengan BUP PNS berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
2. Sifat khas Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki risiko tinggi, sehingga banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas. Karena masa penerimaan premi yang lebih singkat tersebut, maka akumulatif penerimaan premi dari Peserta TNI/Polri ke Perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan premi dari PNS pada umumnya.
3. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah Prajurit TNI dan Anggota Polri secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
4. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang diajukan oleh para Peserta, sehingga terdapat pertimbangan mengenai perlunya diberikan manfaat yang lebih memadai, walaupun masa pembayaran premi ke Perusahaan belum lama.

It all began with the differences in the military characteristics concerning the participation of TNI Soldiers, Police Members, and Ministry of Defense/Polri civil servants who were originally participants in the Public Employee Savings and Insurance Fund (TASPEN) established on April 17, 1963 based on Government Regulation Number 15 of 1963. To facilitate the management of insurance for military Participants, based on the idea of the War Force of the Republic of Indonesia (APRI) in this case the Army and the approval of the Minister of Revenue, Financing and Special Supervision of Military Affairs under the name TASPENmil which operates at the Army Financial Staff Office on Jalan Merdeka Selatan Number 7 Central Jakarta. This TASPENmil later became the forerunner of PT ASABRI (Persero).

In the following journey, the participation of TNI Soldiers and Polri Members in TASPEN has increasingly influenced the implementation of the TASPEN Program, because:
1. The Retirement Age Limit (BUP) for TNI Soldiers and Polri Members based on Article 1 of Law Number 6 of 1966 is different from the BUP for civil servants based on Article 9 of Law Number 11 of 1969.
2. The unique nature of TNI Soldiers and Police Members who have high risks, so that many retire because they are killed or died in the line of duty. Due to the shorter period of premium income, the accumulative premium income from TNI/Polri Participants to the Company is smaller than the premium income from civil servants in general.
3. The existence of a Government policy to reduce the number of TNI Soldiers and Police Members on a large scale in the context of rejuvenation which began in mid-1971.
4. The amount of contributions collected at that time was not proportional to the estimated claims submitted by the Participants, so there were considerations regarding the need to provide more adequate benefits, even though the premium payment period to the Company had not been long.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri, maka Departemen Pertahanan dan Keamanan (saat ini Kementerian Pertahanan) memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Perum ASABRI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 1971 dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1971, sehingga selanjutnya tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991, bentuk badan hukum Perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.

Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Perseroan telah disertai perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201 tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.

ASABRI sebagai Badan usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri melalui penyelenggaraan asuransi sosial. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

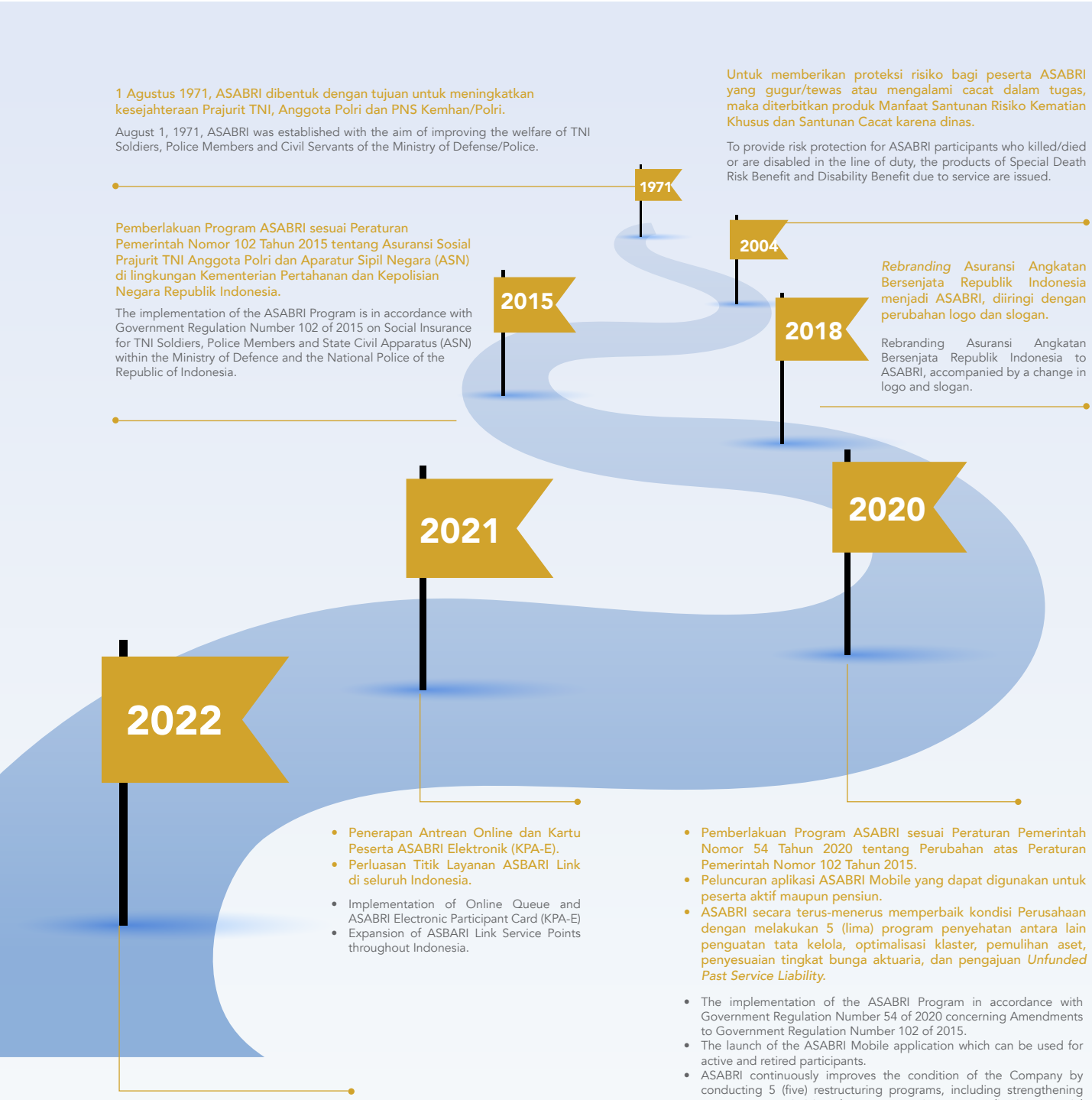
To follow up on this and improve the welfare of TNI Soldiers, Police Members, and Ministry of Defence/Police Civil Servants, the Ministry of Defence and Security (currently the Ministry of Defence) initiated to manage separate premiums by forming a more suitable insurance institution, namely the General Company for Social Insurance of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (Perum ASABRI) which was established based on Government Regulation Number 45 of 1971 which was established in 1971 that promulgated on July 31, 1971 and effective from 1 August 1971, so that subsequently August 1st is designated as ASABRI Anniversary.

In an effort to improve business efficiency and effectiveness, based on Government Regulation Number 68 of 1991, the Company's legal form was transferred from a Public Company (Perum) to a Company (Persero) with the purpose and objective of organising social insurance as referred to in Government Regulation Number 67 of 1991 concerning Social Insurance for the Armed Forces of the Republic of Indonesia, which revoked Government Regulation Number 44 of 1971.

The change in the form of business entity from Perum to Company has been accompanied by changes to the Articles of Association through Notarial Deed Muhani Salim, S.H., Number 201 dated December 30, 1992 concerning the Establishment and Articles of Association of the Company (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, as amended several times, most recently by Deed Number 9 dated October 8, 2009 made before Notary Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H., substitute for Notary Imas Fatimah, S.H.

ASABRI as a State-Owned Enterprise (BUMN) always supports the Government's program in improving the welfare of TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defence and Police through the implementation of social insurance. Therefore, in order to follow up on the development of laws and regulations related to the implementation of social insurance Government Regulation Number 54 of 2020 dated September 30, 2020 on the Amendment to Government Regulation Number 102 of 2015 dated December 28, 2015 on Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police was promulgated.

Jejak Langkah
Milestones



1971

1 Agustus 1971, ASABRI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.

August 1, 1971, ASABRI was established with the aim of improving the welfare of TNI Soldiers, Police Members and Civil Servants of the Ministry of Defense/Police.

2004

Untuk memberikan proteksi risiko bagi peserta ASABRI yang gugur/tewas atau mengalami cacat dalam tugas, maka diterbitkan produk Manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus dan Santunan Cacat karena dinas.

To provide risk protection for ASABRI participants who killed/died or are disabled in the line of duty, the products of Special Death Risk Benefit and Disability Benefit due to service are issued.

2015

Pemberlakuan Program ASABRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

The implementation of the ASABRI Program is in accordance with Government Regulation Number 102 of 2015 on Social Insurance for TNI Soldiers, Police Members and State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defence and the National Police of the Republic of Indonesia.

2018

Rebranding Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi ASABRI, diiringi dengan perubahan logo dan slogan.

Rebranding Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia to ASABRI, accompanied by a change in logo and slogan.

2020

- Pemberlakuan Program ASABRI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015.
- Peluncuran aplikasi ASABRI Mobile yang dapat digunakan untuk peserta aktif maupun pensiun.
- ASABRI secara terus-menerus memperbaik kondisi Perusahaan dengan melakukan 5 (lima) program penyehatan antara lain penguatan tata kelola, optimalisasi klaster, pemulihan aset, penyesuaian tingkat bunga aktuaria, dan pengajuan *Unfunded Past Service Liability.*

- The implementation of the ASABRI Program in accordance with Government Regulation Number 54 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 102 of 2015.
- The launch of the ASABRI Mobile application which can be used for active and retired participants.
- ASABRI continuously improves the condition of the Company by conducting 5 (five) restructuring programs, including strengthening governance, optimising clusters, recovering assets, adjusting actuarial interest rates, and filing Unfunded Past Service Liability.

2021

- Penerapan Antrean Online dan Kartu Peserta ASABRI Elektronik (KPA-E).
- Perluasan Titik Layanan ASBARI Link di seluruh Indonesia.

- Implementation of Online Queue and ASABRI Electronic Participant Card (KPA-E)
- Expansion of ASBARI Link Service Points throughout Indonesia.

2022

- Peluncuran Aplikasi Autentikasi Digital Bagi Peserta Pensiun – ASABRI STAR.
- Penerapan SPTB Online dan Perluasan Mall Pelayanan Publik ASABRI.

- Launch of Digital Authentication Application for Pension Participants – ASABRI STAR.
- Implementation of SPTB Online and Expansion of the ASABRI Public Service Mall.

Visi dan Misi
Vision and Mission

VISI Vision

MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SOSIAL NASIONAL YANG PROFESIONAL DENGAN MELAKUKAN TRANSFORMASI BUDAYA DAN BISNIS PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN.

To become a professional National Social Insurance Company by transforming the Corporate Culture and business in a sustainable.

MISI Mission

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PESERTA ASABRI MELALUI PENGEMBANGAN SYSTEM PELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN PENINGKATAN MANFAAT ASURANSI SOSIAL, DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS DAN BERAKHLAK, SERTA PENGELOLAAN INVESTASI YANG TEPAT.

Improving the welfare of ASABRI Participants through the development of technology-based service systems and increasing social insurance benefits, supported by the development of Human Resources with integrity and morals, as well as proper investment management.



Penjelasan Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan merupakan landasan berpijak bagi Perusahaan di dalam memutar roda Perusahaan ke arah tujuan yang ingin ASABRI wujudkan.

Sebagaimana yang dicanangkan dalam Visi ASABRI bahwa ASABRI diharapkan mampu menyejahterakan Pesertanya dengan didukung pengembangan sistem layanan berbasis teknologi untuk memberikan manfaat/jaminan yang optimal, juga didukung oleh pengembangan SDM yang berintegritas dan berakhlak, serta pengelolaan investasi yang tepat.

Adapun Misi Perusahaan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri dengan tetap memperhatikan kinerja ASABRI agar tetap sehat, peningkatan produktivitas Karyawan dan kemanfaatan bagi *stakeholder*, sehingga setiap langkah ASABRI harus selalu berpijak pada Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mengawasi Visi dan Misi Perusahaan, maka rumusan tugas pokok ASABRI menjadi hal penting untuk dijadikan pedoman dalam menggapai target/sasaran yang ingin dicapai. Adapun tugas pokok secara makro yaitu mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penanaman dana investasi dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sedangkan secara mikro yaitu menunjang upaya peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri beserta keluarganya dengan memberikan "Perlindungan Dasar" atas risiko dari para Peserta.

Explanation of the Company's Vision and Mission

The Company's Vision and Mission are the cornerstones for the Company in turning the wheels of the Company towards the goals that ASABRI wants to realise.

As stated in ASABRI Vision, ASABRI is expected to be able to improve the welfare of its Participants supported by the development of a technology-based service system to provide optimal benefits/guarantees, also supported by the development of human resources with integrity and morals, and proper investment management.

The Company's Mission is an effort to improve the welfare of TNI soldiers, members of the National Police, and ASN employees within the Ministry of Defence and the National Police while still paying attention to ASABRI performance to remain healthy, increase employee productivity and benefits for stakeholders, so that every step is taken. ASABRI must always be based on the Company's Vision and Mission that has been set.

In an effort to oversee the Company's Vision and Mission, the formulation of ASABRI main tasks is important to serve as a guideline in achieving the targets to be achieved. The macro main task is to support Government programs in the field of economy and national development through investment funds and the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) while micro is to support efforts to improve the welfare of TNI Soldiers, Police Members, and ASN Kemhan/Polri and their families by providing "Basic Protection" for the risks of the Participants.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Budaya Perusahaan memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Target Perusahaan. Dalam melaksanakan proses pengembangan mencapai visi Perusahaan menjadi Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan, PT ASABRI (Persero) memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan untuk mewujudkan visi dan misinya berdasarkan standar global dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*. Berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/OT.01.01/53-AS/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama PT ASABRI (Persero), Perseroan telah menetapkan nilai-nilai dan norma perilaku yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari oleh seluruh jajaran dalam pelaksanaan Budaya Perusahaan. Nilai-nilai dasar ASABRI yang dianut dan diwujudkan dalam praktik bisnis sehari-hari sebagaimana berikut:

Corporate culture plays an important role in managing the Company's human resources in an effort to realise the Company's Vision, Mission and Targets. In carrying out the development process to achieve the Company's vision of becoming a professional National Social Insurance by transforming the Company's culture and business on an ongoing basis, PT ASABRI (Persero) has a value system as a company commitment to realise its vision and mission based on global standards and the implementation of good corporate governance. Based on the Decree of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/OT.01.01/53-AS/VIII/2020 dated August 28, 2020 concerning the Vision, Mission and Main Values of PT ASABRI (Persero), the Company has established values and norms of behaviour that must be obeyed and applied in the implementation of daily work by all levels in the implementation of Corporate Culture. The basic values of ASABRI that are embraced and realised in daily business practices are as follows:



AMANAH
Trust

Perilaku dan sikap yang Amanah yaitu selalu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Amanah behaviour and attitude is always upholding the trust given, fulfilling promises and commitments, being responsible for tasks, decisions, and actions taken, and adhering to moral and ethical values.

KOMPETEN
Competent

Perilaku dan sikap yang Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

Competent behaviours and attitudes include continuing to learn and develop capabilities, improving personal competencies to meet changing challenges, helping others learn, and completing tasks with the highest quality.

HARMONIS
Harmonising

Perilaku dan sikap yang Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Harmonious behavior and attitudes, namely caring for each other and respecting differences, respecting everyone regardless of background, liking to help others and building a conducive work environment.

LOYAL
Loyal

Perilaku dan sikap yang Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, menjaga nama baik sesama Karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, serta patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Loyal behaviour and attitudes are dedicated and prioritise the interests of the Nation and State, maintain the good name of fellow Employees, leaders, SOEs, and the State, willing to sacrifice to achieve greater goals, and obey the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.

ADAPTIF
Adaptive

Perilaku dan sikap yang Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, dan selalu bertindak proaktif.

Adaptive behaviours and attitudes are continuing to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, quickly adjusting to be better, constantly making improvements following technological developments, and always acting proactively.

KOLABORATIF
Collaborative

Perilaku dan sikap yang Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Collaborative behaviours and attitudes are building synergistic cooperation, providing opportunities for various parties to contribute, being open in working together to produce added value, and mobilising the use of various resources for a common goal.

Kegiatan Usaha
Business Activities

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, kegiatan usaha ASABRI adalah sebagai berikut:
1. Bidang Asuransi/Jaminan Sosial untuk Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri yang meliputi antara lain pelaksanaan Asuransi/Jaminan Kematian, Asuransi/Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/Jaminan Hari Tua dan Asuransi/Jaminan Pensiun kepada Peserta ASABRI yang terdiri dari atas Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri berdasarkan PP 67 tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan PP 68 tahun 1991 tentang bentuk Badan Hukum Perusahaan dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Melakukan kegiatan investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Tabungan Hari Tua (THT)
Program Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.

Iuran Program THT, terdiri atas:
a. Iuran peserta sebesar 3,25% dari penghasilan (gaji pokok dan tunjangan keluarga setiap bulan); dan
b. Iuran pemberi kerja akan diatur dengan pemerintah tersendiri.

Based on the latest Articles of Association of the Company, ASABRI business activities are as follows:
1. The field of Social Insurance/Guarantee for TNI Soldiers, Police Members and PNS Kemhan/Polri which includes, among others, the implementation of Death Insurance/Guarantee, Work Accident Insurance/Guarantee, Old Age Insurance/Guarantee and Pension Insurance/Guarantee to ASABRI Participants consisting of TNI Soldiers, Police Members, and PNS Kemhan/Polri based on PP 67 of 1991 concerning Social Insurance for the Armed Forces of the Republic of Indonesia and PP 68 of 1991 concerning the form of the Company's Legal Entity is transferred from a Public Company (Perum) to a Company (Persero).
2. Conduct investment activities with due observance of the provisions of laws and regulations.

Old Age Savings Program (THT)
The Old Age Savings Program (THT) is a savings program that is funded by participants' contributions and government contributions and its development, which is organised to ensure that participants receive cash when they retire, either because they reach retirement age or not because they reach retirement age.

Contributions to the THT Program, consists of:
a. Participant contributions of 3.25% of income (basic salary and monthly family allowance); and
b. Employer contributions will be regulated by a separate government.

Tabel Manfaat Program THT
THT Program Benefits Table

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
Tabungan Asuransi (TA) Insurance Savings (TA)	Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. Participants who are dismissed with pension rights or retirement benefits.	Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir sebelum pensiun. Contribution Index Factor (FII) multiplied by last earnings before retirement.
Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) Cash Value of Insurance Savings (NTTA)	Peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau kepada ahli waris dari Peserta yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. Participants who are dismissed without pension rights, without benefits of a pension nature, or to the heirs of Participants who killed, died and pass away in active service status.	Faktor Indeks Iuran (FII) dikalikan penghasilan terakhir pada saat berhenti atau gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa. Contribution Index Factor (FII) multiplied by the last earnings at the time of cessation or killed, died and pass away.
Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP) Funeral expenses for retired participants (BPPP)	Ahli waris dalam hal Peserta pensiunan meninggal dunia. Heirs in the event of the retired Participant's death.	Rp5.000.000,- IDR5,000,000,-

Tabel Manfaat Program THT
THT Program Benefits Table

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S) Funeral expenses for wife or husband (BPI/S)	Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal istri atau suami Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan potongan iuran THT. An active Participant, retired Participant or beneficiary in the event of the death of the wife or husband of an active Participant or retired Participant related to the deduction of THT contributions.	Rp4.000.000,- IDR4,000,000,-
Biaya Pemakaman Anak (BPA) Child Funeral Expenses (CPA)	Peserta aktif, Peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT. An active Participant, retired Participant or beneficiary in the event of the death of an active Participant's or retired Participant's child related to the ENT contribution.	Rp3.000.000,- untuk paling banyak 2 (dua) anak yang masuk dalam tunjangan. IDR3,000,000,- for a maximum of 2 (two) children included in the allowance.

Program JKK

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Iuran Program JKK sebesar 0,62% dari gaji pokok peserta setiap bulan dan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Manfaat Program JKK meliputi:

1. Perawatan (rawat jalan dan rawat inap) yang diberikan kepada Peserta aktif yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja termasuk tugas latihan dan operasi (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020), dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan Peserta sembuh. Perawatan yang dimaksud meliputi
   a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
   b. Perawatan dasar tingkat pertama dan lanjutan;
   c. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
   d. Perawatan intensif;
   e. Penunjang diagnostik;
   f. Pengobatan;
   g. Layanan khusus;
   h. Alat kesehatan dan implan;
   i. Jasa dokter dan/atau medis;
   j. Operasi;
   k. Transfusi darah, dan/atau
   l. Rehabilitasi medik.

   Perawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter dan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah kelas I, rumah sakit swasta yang setara, atau fasilitas perawatan terdekat. Manfaat Program JKK jika terjadi kecelakaan kerja, meliputi:

JKK Program

The Work Accident Insurance Program (JKK) provides protection against the risks of accidents or occupational diseases during the service period. Participants contribute 0.62% of their basic monthly salary to the JKK Program, with the Employer covering this contribution.

JKK Program benefits include:

1. Treatment (outpatient and inpatient) provided to active Participants who experience accidents on the way from home to work or vice versa, accidents at work including training tasks and operations (in accordance with Government Regulation No. 54/2020), and/or occupational diseases until the Participant recovers. The treatment referred to includes
   a. Basic and supporting examinations;
   b. Basic first-level and advanced treatment;
   c. Class I hospitalisation in government hospitals, regional government hospitals, or equivalent private hospitals;
   d. Intensive care
   e. Diagnostic support
   f. Treatment;
   g. Special services
   h. Medical devices and implants
   i. Doctor and/or medical services
   j. Surgery
   k. Blood transfusion, and/or
   l. Medical rehabilitation.

Treatment is carried out based on medical needs and indications determined by a doctor and carried out at a class I Government hospital, an equivalent private hospital, or nearest treatment facility. Benefits of the JKK Program in the event of a work accident include:

a. Perawatan (rawat jalan dan rawat inap), diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja sampai dengan Peserta sembuh.
b. Perawatan lanjutan diberikan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan pada saat kecelakaan dalam latihan dan operasi karena diperlukan sebagai tindak lanjut perawatan layanan kesehatan tertentu.

2. Santunan yang meliputi:
   a. Santunan cacat dinas khusus;
   b. Santunan cacat dinas biasa;
   c. Santunan risiko kematian khusus karena gugur;
   d. Santunan risiko kematian khusus karena tewas;
   e. Biaya pengangkutan peserta kecelakaan kerja; dan/atau
   f. Bantuan beasiswa.

a. Treatment (outpatient and inpatient), provided to Participants who experience accidents on the way from home to work or vice versa, accidents at work, and/or occupational diseases until the Participant recovers.

b. Follow-up care is provided to Participants who have an accident during an accident in training and surgery because it is needed as a follow-up to certain health service treatments.

2. Benefit which includes:
   a. Special service disability benefits;
   b. Ordinary service disability benefits;
   c. Special death risk compensation due to killed;
   d. Special death risk compensation due to died;
   e. Transport costs for work accident participants; and/or
   f. Scholarship assistance.

Tabel Manfaat Program JKK
JKK Program Benefits Table

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
Perawatan Care	Peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, kecelakaan di tempat kerja termasuk tugas latihan dan operasi, dan/atau penyakit yang timbul akibat kerja. Participants who suffer accidents on the way from home to work or vice versa, accidents at work including training tasks and operations, and/or occupational diseases.	Ditanggung oleh ASABRI sampai Peserta sembuh Covered by ASABRI until the Participant recovers
Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK) Special Service Disability Benefit (SCDK)	Peserta yang mengalami cacat golongan B atau C, yaitu: • Golongan B: Prajurit dan PNS Kemhan yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri bukan sebagai akibat tindakan langsung musuh, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita; atau Anggota Polri dan PNS Polri yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas kepolisian bukan sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak kriminal/pelanggar hukum, atau yang menentang negara, atau pemerintahan yang sah, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita. • Golongan C: Prajurit dan PNS Kemhan yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung musuh, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita; atau Anggota Polri dan PNS Polri yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak kriminal/pelanggar hukum, atau yang menentang negara, atau pemerintahan yang sah, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita.	Besaran manfaat disesuaikan dengan tingkat dan golongan cacat. The amount of benefits is adjusted according to the level and class of disability.

Tabel Manfaat Program JKK
JKK Program Benefits Table

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
	Participants who have a class B or C disability, namely: • Group B: Soldiers and civil servants of the Ministry of Defence who experience disability that occurs in carrying out the duties of military operations of war or military operations other than war at home or abroad not as a result of direct enemy action, or not as a result of illness suffered; or Members of the Indonesian National Police (Polri) and civil servants of the Indonesian National Police (PNS Polri) who suffer a disability incurred in carrying out police duties not as a result of direct action by criminals/ lawbreakers, or who oppose the state, or legitimate government, or not as a result of illness suffered. • Group C: Soldiers and civil servants of the Ministry of Defence who have suffered a disability incurred in the performance of military operations of war or military operations other than war at home or abroad as a result of direct action by the enemy, or not as a result of an illness; or Members of the National Police and Civil Servants of the National Police who have suffered a disability incurred in the performance of police duties as a result of direct action by criminals/lawbreakers, or those who oppose the state, or legitimate government, or not as a result of an illness.	
Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB) Service Disability Benefit (SCDB)	Peserta yang mengalami cacat golongan A, yaitu: • Prajurit dan PNS Kemhan yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas sehari-hari selain tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita; atau • Anggota Polri dan PNS Polri yang mengalami kecacatan yang terjadi dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari, atau bukan akibat dari penyakit yang diderita. Participants who experience class A disability, namely: • Soldiers and civil servants of the Ministry of Defence who experience disability that occurs in carrying out daily duties other than the duties of military operations of war or military operations other than war at home or abroad, or not as a result of an illness suffered; or • Members of the National Police and civil servants of the National Police who experience disability that occurs in carrying out daily official duties, or is not the result of an illness suffered.	Besaran manfaat disesuaikan dengan tingkat dan golongan cacat. The amount of benefits is adjusted according to the level and class of disability.
Santunan Risiko Kematian Khusus karena Gugur Special Death Risk Benefit due to Fatalities	Ahli waris dari: • Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas operasi militer perang atau operasi militer selain perang di dalam atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau akibat langsung dari cuaca dan medan operasi; atau • Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintahan yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas. Heirs of: • Soldiers and civil servants of the Ministry of Defence who died in carrying out the duties of military operations of war or military operations other than war at home or abroad, as a direct result of enemy action, and/or as a direct result of the weather and the operating field; or • Members of the National Police and civil servants of the National Police who died in carrying out police duties, at home or abroad, as a result of direct actions of lawbreakers or criminal offences or who oppose the state or legitimate government and/or natural factors encountered in the course of duty.	Rp450.000.000,- IDR450,000,000,-

Tabel Manfaat Program JKK
JKK Program Benefits Table

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
Santunan Risiko Kematian Khusus karena Tewas Special Death Risk Benefit due to Death	Ahli waris dari: • Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas di dalam atau di luar negeri; atau • Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam tugas kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum/tindak pidana dan atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas. Heirs of: • Soldiers and civil servants of the Ministry of Defence who died in carrying out the duties of the Indonesian National Army or in other circumstances directly related to service at home or abroad; or • Members of the National Police and civil servants of the National Police who died in the performance of police duties, at home and abroad or in other circumstances directly related to the service not as a result of direct actions of lawbreakers/criminal offences and or natural factors encountered in the course of duty.	Rp350.000.000,- IDR350,000,000,-
Biaya Pengangkutan Freight Costs	Peserta yang mengalami kecelakaan kerja Participants who have a work accident	Angkutan darat/sungai/ danau paling besar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); Angkutan laut paling besar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Angkutan udara paling besar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah); dan Apabila menggunakan lebih dari 1 moda angkutan maka diberikan biaya akumulasi angkutan yang digunakan. Land/river/lake transport at a maximum of IDR2,000,000 (two million rupiah); Sea transport at a maximum of IDR2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah); Air transport at a maximum of IDR4,000,000 (four million rupiah); and If using more than 1 mode of transport, the accumulated cost of the transport used is given.
Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKK) Scholarship Assistance (Beasiswa-JKK)	Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang gugur, meninggal, atau cacat tingkat III. Adapun ketentuan penerima Bantuan Beasiswa antara lain: • Masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan formal; • Berusaha paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; • Belum pernah menikah; dan • Belum bekerja. Provided to assist the education costs of children of Participants who are killed, pass away, or disabled level III. The provisions for recipients of Scholarship Assistance include: • Still in school or officially registered at a formal educational institution; • Have a maximum age of 25 (twenty-five) years; • Has never been married; and • Not yet employed.	Rp30.000.000,- untuk 1 (satu) orang anak dan maksimal dibayarkan untuk 2 (dua) orang anak. IDR30.000.000,- for 1 (one) child and maximum paid for 2 (two) children.

Program JKm

Program Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.

Iuran Program JKm sebesar 0,81% dari gaji pokok Peserta setiap bulan dan ditanggung oleh Pemberi Kerja.

JKm Program

The Death Insurance Program (JKm) is protection against the risk of death not due to work accidents and not due to special services.

The contribution of the JKm Program is 0.81% of the Participant's basic salary every month and is borne by the Employer.

Tabel Manfaat Program JKm
Benefits Table of the JKm Program

Program Program	**Diberikan Kepada** Given To	**Besaran Manfaat** Benefit Amount
Santunan Risiko Kematian Risk of Death Compensation	Ahli waris dari Peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif, terdiri atas: • Santunan Kematian Sekaligus (SKS) bagi Perwira TNI, Perwira Polri atau PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional keahlian. The heirs of Participants who pass away normally in active service status, consisting of: • Simultaneous Death Benefit (SKS) for TNI Officers, Polri Officers or Ministry of Defence civil servants and Polri civil servants who hold middle high leadership positions, pratama, administrator positions, supervisory positions or functional expertise positions.	Rp30.000.000,- IDR30,000,000,-
	Santunan Kematian Sekaligus (SKS) bagi Bintara atau Tamtama TNI dan Polri atau PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional keterampilan. Simultaneous Death Benefit (SKS) for non-commissioned officers or enlisted personnel of the Indonesian Armed Forces (TNI) and Indonesian National Police (Polri) or civil servants of the Ministry of Defence and civil servants of the Indonesian National Police (Polri) who hold executive positions or functional skill positions.	Rp27.500.000,- IDR27,500,000,-
Uang Duka Wafat (UDW). Death Benefit (UDW).	Ahli waris dari Peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif Heirs of Participants who died in active service status	Tiga kali gaji pokok terakhir. Three times the last basic salary.
Bantuan Beasiswa (Beasiswa-JKm) Scholarship Assistance (Beasiswa-JKm)	Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak dari Peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. Adapun ketentuan penerima Bantuan Beasiswa antara lain: • Masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan formal; • Berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; • Belum pernah menikah; dan • Belum bekerja. Provided to assist the education costs of children of Participants who died during active service status. The provisions for recipients of Scholarship Assistance include: • Still in school or officially registered at a formal educational institution; • Have a maximum age of 25 (twenty five) years; • Never married; and • Not yet working.	Rp15.000.000,- untuk 1 (satu) orang anak yang diberikan sekaligus dan maksimal dibayarkan untuk 2 (dua) orang anak. IDR15,000,000,- for 1 (one) child given at once and a maximum of 2 (two) children.

Program Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Iuran Program Pensiun, terdiri atas:
1. Iuran Peserta sebesar 4,75% dari penghasilan (gaji pokok dan tunjangan keluarga) setiap bulan.
2. Iuran pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Manfaat Program Pensiun, meliputi:
1. Jaminan Pensiun (JP), diberikan kepada penerima pensiun setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon

Pension Program

Pension is an income received by pension recipients every month based on laws and regulations.

Pension Program Contributions, consisting of:
1. Participant Contributions amounting to 4.75% of income (basic salary and family allowances) every month.
2. Employer contributions will be regulated by a separate Government Regulation.

Benefits of the Pension Program, including:
1. Pension Guarantee (JP), given to pension recipients every month based on the provisions of laws and regulations.
2. Cash Value of Pension Contribution (NTIP), given to Participants who are dismissed with honour or dishonour without pension rights, pension benefits, allowances or severance pay.

Tabel Penerima Manfaat Jaminan Pensiun
Table of Beneficiaries of Retirement Security

Program Program	Diberikan Kepada Given To
Pensiun Sendiri Self Retirement	Diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri, setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari dinas dan memenuhi persyaratan pensiun. Given as an award to TNI Soldiers, Police Members, Ministry of Defense and Polri Civil Servants, after the person concerned is honourably discharged from service and fulfils the retirement requirements.
Pensiun Warakawuri/ Janda/Duda Warakawuri/Widow/ Widower Pension	Diberikan kepada istri/suami dari penerima pensiun yang meninggal dunia dan masih menjadi istri/suami yang sah menurut Undang-undang. Provided to the wife/husband of a deceased pension recipient who is still the lawful wife/husband.
Tunjangan Yatim Piatu Orphan Allowance	Diberikan kepada anak sah dari Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri, atau pensiunan Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri yang setelah bapak dan ibunya meninggal dunia masih dalam status tunjangan. Given to the legitimate children of TNI Soldiers, Police Members, Ministry of Defence and Police Civil Servants, or retired TNI Soldiers, Police Members, Ministry of Defence and Police Civil Servants who after the father and mother died are still in the status of benefits.
Tunjangan Yatim/Piatu Orphan Allowance	Diberikan kepada anak sah dari Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri yang meninggal dunia, sedangkan janda/dudanya telah kehilangan haknya. Given to the legitimate children of TNI Soldiers, Polri Members, Ministry of Defense and Polri Civil Servants who died, while the widow/widower has lost their rights.
Tunjangan Orang Tua Parent Allowance	Bapak/ibu kandung dari Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri yang gugur/tewas/meninggal di dalam dan/atau karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak. The biological father/mother of TNI Soldiers, Polri Members, Ministry of Defense and Polri Civil Servants who killed/died/pass away in and/or because of service and did not leave a wife or husband and children.
Tunjangan Terbatas Limited Allowance	Diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berlaku dalam beberapa tahun sesudah diberhentikan dengan hormat dari dinas. Given as an award to TNI Soldiers and Polri Members that applies within a few years after being honourably discharged from service
Tunjangan Cacat Disability Allowance	Diberikan sebagai penghargaan Pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit TNI penyandang cacat yang diberhentikan karena kecacatannya sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya. Given as a Government award in the form of money given every month for life to a disabled TNI Soldier who is dismissed because of his disability according to the level and class of his disability.

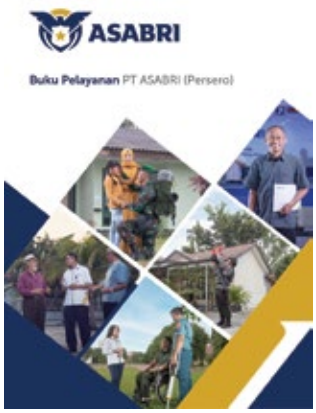
Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan
Products and/or Services Produced

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka ASABRI menjadi pengelola program asuransi sosial yang meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKm), serta Program Pensiun.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2020 dated September 30, 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 102 of 2015 concerning Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police, ASABRI is the manager of social insurance programs which include the Program Tabungan Hari Tua (THT), Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance Program (JKm), and Pension Program.

Dalam rangka meningkatkan layanan dan pengembangan manfaat program kepada para Peserta, ASABRI senantiasa mengembangan beberapa produk dan/jasa layanan. Pengembangan produk dan/atau jasa yang dihasilkan merupakan wujud transformasi dan sinergi ASABRI melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan. Produk dan/atau jasa yang berhasil diimplementasikan sampai dengan tahun 2022, di antaranya Buku Layanan ASABRI, Kartu Peserta ASABRI Elektronik (KPA-E), ASABRI Mobile Versi Terbaru, ASABRI Link, *Merchant Discount* yang terdiri atas *Food Benefit* (Kerja Sama ASABRI, Taspen dan Bulog), *Health Benefit* (Kerja Sama ASABRI dan Prodia), Mall Pelayanan Publik (Sinergi Klaster - *Sharing Service Point* ASABRI dan Taspen) dan ASABRI STAR. Berikut penjelasan lengkap mengenai produk/jasa yang dihasilkan tersebut.

In order to improve services and develop program benefits to Participants, ASABRI continues to develop several products and/or services. The development of products and/or services produced is a form of ASABRI transformation and synergy through cooperation with several companies. Products and/or services that have been successfully implemented until 2022, including the ASABRI Service Book, Electronic ASABRI Participant Card (KPA-E), ASABRI Mobile Latest Version, ASABRI Link, Merchant Discount consisting of Food Benefit (Cooperation between ASABRI, Taspen and Bulog), Health Benefit (Cooperation between ASABRI and Prodia), Public Service Mall (Cluster Synergy - Sharing Service Point ASABRI and Taspen) and ASABRI STAR. The following is a complete explanation of the products/services produced.



a. Buku Layanan ASABRI

Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan informasi mengenai produk dan layanan kepada para Peserta ASABRI membuat buku layanan. Buku Layanan ASABRI hadir dalam format cetak dan elektronik (yang bisa diakses melalui *website* ASABRI dan Aplikasi ASABRI Mobile). Buku Layanan ASABRI berisi informasi dan penjelasan mengenai manfaat program ASABRI, prosedur dan persyaratan pengajuan klaim, hak dan kewajiban Peserta, informasi mengenai jaringan kantor dan layanan ASABRI, dan informasi penting lainnya.

Buku Layanan ASABRI versi cetak hadir dalam bentuk buku saku, dan dijadikan sebagai salah satu media sosialisasi oleh ASABRI baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang kepada para Peserta.

a. Electronic ASABRI Participant Card (KPA-E)

As one of the measures to improve information about products and services to ASABRI Participants create a service book. The ASABRI Service Book comes in printed and electronic formats (which can be accessed through the ASABRI website and ASABRI Mobile Application). The ASABRI Service Book contains information and explanations about the benefits of the ASABRI program, procedures and requirements for submitting claims, rights and obligations of Participants, information about the ASABRI office and service network, and other important information.

The printed version of ASABRI Service Book comes in the form of a pocket book, and is used as one of the socialisation media by ASABRI both Head Office and Branch Office to the Participants.

b. Kartu Peserta ASABRI Elektronik (KPA-E)

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan pengembangan teknologi, ASABRI melakukan perubahan bentuk Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) konvensional menjadi Kartu Peserta ASABRI Elektronik (KPA-E). KPA-E merupakan kartu berbentuk virtual dengan menggunakan *Quick Response Code* (QR *Code*) sebagai tempat penyimpanan data secara elektronik yang tersedia melalui aplikasi ASABRI Mobile.

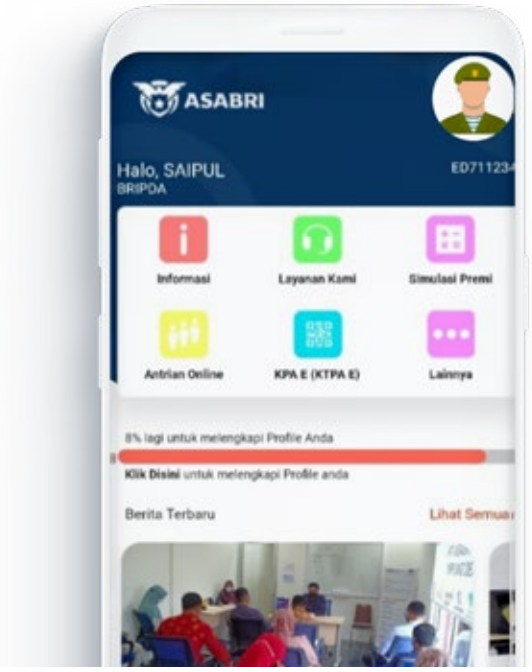


Fungsi KPA-E adalah sebagai berikut:
1. Penyimpanan identitas Peserta ASABRI;
2. Layanan klaim Peserta Aktif, pengendalian data, dan pengembangan program; dan
3. Memudahkan proses layanan kepada pensiunan dan keluarga atau ahli warisnya.

b. Electronic ASABRI Participant Card (KPA-E)

In order to support and implement technological development, ASABRI changed the form of the conventional ASABRI Participant Identity Card (KTPA) to the Electronic ASABRI Participant Card (KPA-E). KPA-E is a virtual card using a Quick Response Code (QR Code) as an electronic data storage area available through the ASABRI Mobile application.

The functions of KPA-E are as follows:
1. Storage of the identity of ASABRI Participants;
2. Active Participant claim services, data control, and program development; and
3. Facilitate the service process to retirees and their families or heirs.



c. Pengembangan Layanan ASABRI Mobile

ASABRI terus berupaya meningkatkan layanan kepada pesertanya di era digitalisasi dengan menyediakan Aplikasi ASABRI Mobile. Aplikasi ASABRI Mobile merupakan layanan digital yang didalamnya terdapat fitur Saldo *Individual Account* yakni akumulasi premi dan hasil pengembangannya bagi peserta. Aplikasi ASABRI Mobile telah diluncurkan pada 5 Juni 2020 yang dapat diunduh melalui aplikasi Android dengan *tagline* ASABRI *IN YOUR HAND*.

c. ASABRI Mobile Service Development

ASABRI continues to improve services to its participants in the digitalisation era by providing the ASABRI Mobile Application. The ASABRI Mobile Application is a digital service in which there is an Individual Account Balance feature, which is the accumulation of premiums and development results for participants. The ASABRI Mobile application was launched on June 5, 2020 which can be downloaded through the Android application with the tagline ASABRI IN YOUR HAND.

Pada 1 Desember 2021, ASABRI meningkatkan pengembangan Aplikasi ASABRI Mobile dengan meluncurkan pembaruan Aplikasi ASABRI Mobile untuk pengguna iOS dan Android. Pembaruan Aplikasi ASABRI Mobile membawa banyak perubahan penting dari mulai tampilan, fungsi, penambahan fitur, dan hadirnya versi iOS. Peluncuran ASABRI Mobile versi terbaru ini memiliki fitur yang lebih lengkap dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan Peserta ASABRI. Fitur baru tersebut di antaranya adalah registrasi aplikasi yang lebih mudah, antrean *online*, formulir klaim layanan dan SPTB *online*.

On December 1, 2021, ASABRI increased the development of the ASABRI Mobile application by launching an update to the ASABRI Mobile application for iOS and Android users. The ASABRI Mobile application update brings many important changes starting from the appearance, functions, additional features, and the presence of the iOS version. The launch of the latest version of ASABRI Mobile has more complete features with the aim of fulfilling the service needs of ASABRI Participants. The new features include easier application registration, online queues, service claim forms and online SPTB.

d. ASABRI Link

ASABRI Link merupakan program perluasan jaringan yang dapat mendekatkan akses layanan peserta aktif maupun pensiun agar tercipta layanan yang cepat dan akurat. ASABRI Link merupakan wujud implementasi kerja sama yang sinergis antara PT ASABRI (Persero) dengan 13 mitra kerja pembayaran yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, BSI, Bank Mantap, Bank BWS, Bank Bumi Arta, Bank KB Bukopin, Bank BTPN, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, dan Pos Indonesia. Dengan *tagline* "Lebih Dekat Melayani Peserta", pada tahun 2022 dilakukan perluasan ASABRI Link secara nasional di 33 Kantor Cabang ASABRI. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah terdapat 1.806 titik layanan.



d. ASABRI Link

ASABRI Link is a network expansion program that can bring access to services for active and retired participants closer in order to create fast and accurate services. ASABRI Link is a form of implementation of synergistic cooperation between PT ASABRI (Persero) and 13 payment partners, namely Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, BSI, Bank Mantap, Bank BWS, Bank Bumi Arta, Bank KB Bukopin, Bank BTPN, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Jateng, and Pos Indonesia. With the tagline "Closer to Serving Participants", in 2022 ASABRI Link expansion was carried out nationally in 33 ASABRI Branch Offices. As of December 31, 2022 there have been 1,806 service points.

e. *Merchant Discount*

Health Benefit – Kerja Sama ASABRI dan Prodia

ASABRI juga meningkatkan layanan kepada Peserta untuk manfaat kesehatan melalui kerja sama dengan Prodia. Dengan menunjukkan KPA-E, Peserta mendapatkan harga khusus dalam melakukan pengecekan kesehatan di laboratorium Prodia di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi pengecekan kesehatan yang disepakati antara ASABRI dan Prodia. Implementasi dan *update* mengenai layanan *discount* Prodia juga dapat dilihat melalui aplikasi ASABRI Mobile.

Food Benefit – Kerja Sama ASABRI, Taspen, dan Bulog

Pada tahun 2021 ASABRI melakukan sinergi dengan Perum Bulog dalam Program Rumah Pangan Kita. Program ini merupakan salah satu program peningkatan manfaat yang dapat dirasakan Peserta ASABRI dengan membeli paket sembako murah yang ada pada bazar yang dilakukan oleh Perum Bulog di Kantor Cabang ASABRI seluruh Indonesia. Optimalisasi *food benefit* ini dilakukan dengan integrasi promosi pada aplikasi ASABRI Mobile, sehingga peserta dapat mengetahui informasi mengenai layanan yang sedang dilakukan.

f. Mall Pelayanan Publik

Sinergi *Cluster* Asuransi – *Sharing Service Point* (ASABRI dan TASPEN)

Sharing service point melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) merupakan Program Pengembangan Klaster Asuransi Sosial antara PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero). Salah satu projek dalam pengembangan klaster Asuransi sosial tersebut adalah tersedianya Layanan Bersama antara PT ASABRI (Persero) dan PT Taspen (Persero) yang disebut dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Tahun 2022 PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero) telah lakukan peluncuran *sharing service point* di 11 titik layanan, yaitu:

e. Merchant Discount

Health Benefit - Cooperation between ASABRI and Prodia

ASABRI also improves services to Participants for health benefits through cooperation with Prodia. By showing KPA-E, Participants get a special price in conducting health checks at Prodia laboratories throughout Indonesia in accordance with the provisions and specifications of health checks agreed between ASABRI and Prodia. Implementation and updates on Prodia discount services can also be seen through the ASABRI Mobile application.

Food Benefit - Cooperation between ASABRI, Taspen, and Bulog

In 2021 ASABRI synergised with Perum Bulog in the Rumah Pangan Kita program. This program is one of the benefit enhancement Program that can be felt by ASABRI Participants by buying cheap food packages at the bazar held by Perum Bulog at ASABRI Branch Offices throughout Indonesia. Optimization of food benefits is achieved through the integration of promotions within the ASABRI Mobile application, allowing participants to access information about the ongoing services.

f. Public Service Mall

Insurance Cluster Synergy - Sharing Service Point (ASABRI and TASPEN)

Sharing service points through the Public Service Mall (MPP) is a Social Insurance Cluster Development Program between PT ASABRI (Persero) and PT Taspen (Persero). One of the projects in the development of the social insurance cluster is the availability of Shared Services between PT ASABRI (Persero) and PT Taspen (Persero) called the Public Service Mall (MPP). In 2022 PT Taspen (Persero) and PT ASABRI (Persero) have launched sharing service points at 11 service points, namely:

1. MPP Tasikmalaya;
2. MPP Badung;
3. MPP Tuban;
4. MPP Epicentrum;
5. MPP Pati;
6. MPP Purworejo;
7. MPP Banjarbaru;
8. MPP Tebing Tinggi;
9. MPP Maros;
10. MPP Banyuwangi; dan
11. MPP Bogor.

Sharing service point merupakan perluasan fungsi layanan terpadu dalam rangka menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman untuk peserta TASPEN dan ASABRI.

g. ASABRI STAR

1. MPP Tasikmalaya;
2. MPP Badung;
3. MPP Tuban;
4. MPP Epicentrum;
5. MPP Pati;
6. MPP Purworejo;
7. MPP Banjarbaru;
8. MPP Tebing Tinggi;
9. MPP Maros;
10. MPP Banyuwangi; dan
11. MPP Bogor.

Sharing service points are an expansion of integrated service functions in order to provide fast, easy, affordable, safe and convenient services for TASPEN and ASABRI participants.

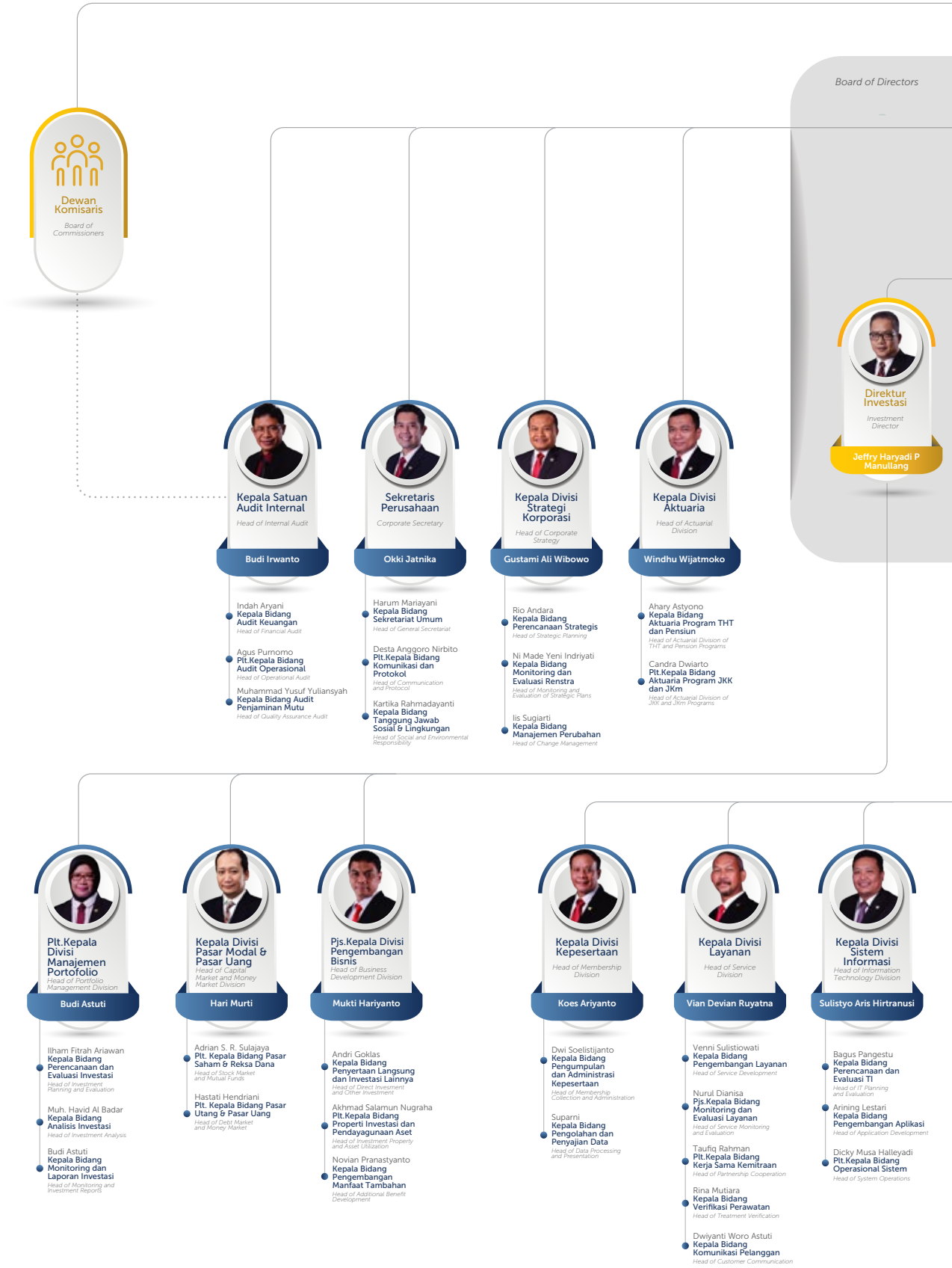
g. ASABRI STAR

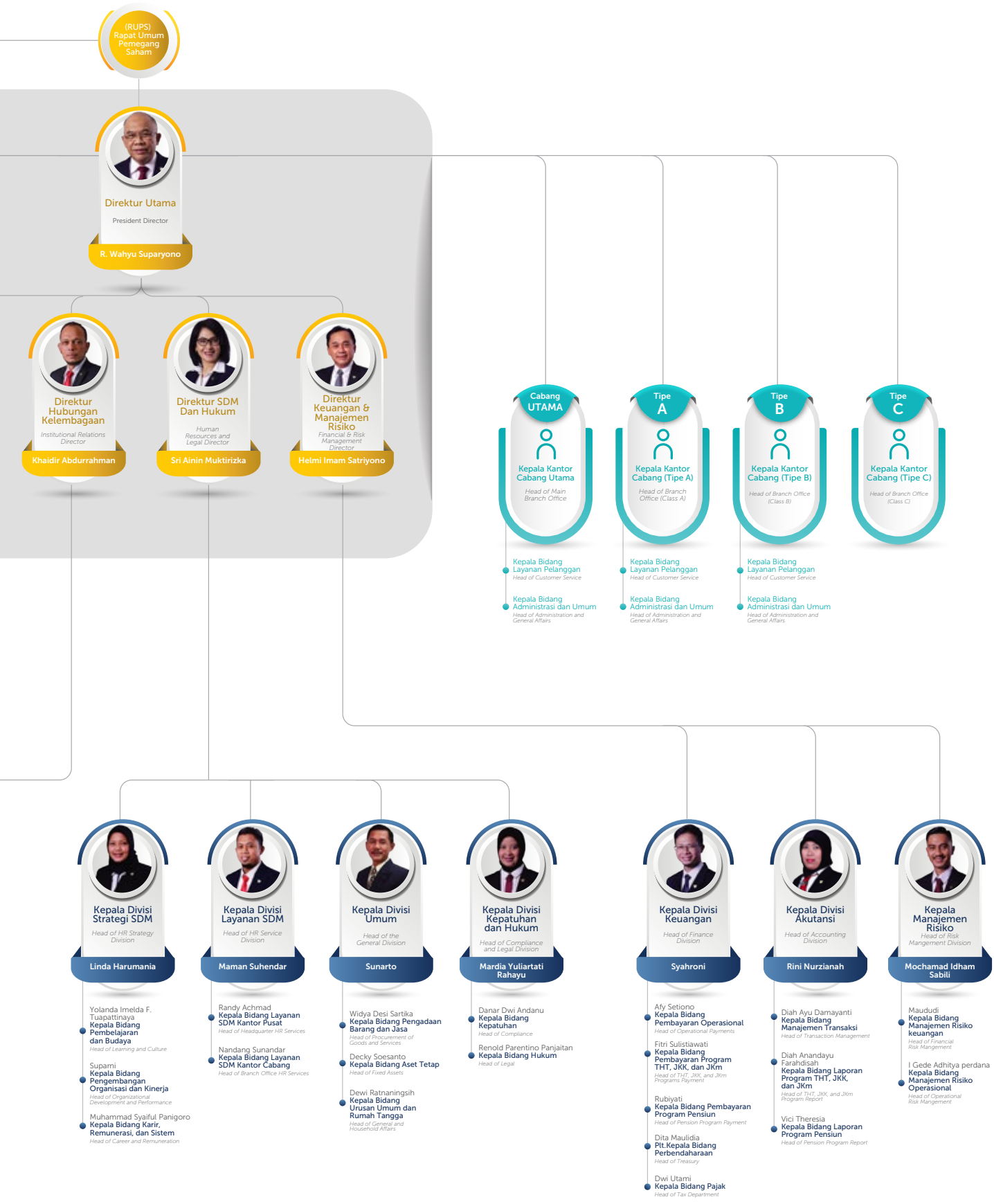
STAR
SISTEM AUTENTIKASI ASABRI

ASABRI terus bertransformasi dan berinovasi untuk memberikan layanan prima kepada seluruh Peserta ASABRI. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan dikembangkannya sistem aplikasi berbasis *Web Apps* dan *Mobile Apps* (Android dan iOS) untuk melaksanakan autentikasi secara digital. Melalui aplikasi STAR, Penerima Pensiun dapat melakukan autentikasi secara mandiri (*self service*) dimanapun dan kapanpun.

ASABRI continues to transform and innovate to provide excellent services to all ASABRI Participants. One of these innovations is the development of an application system based on Web Apps and Mobile Apps (Android and iOS) to carry out digital authentication. Through the STAR application, Pension Recipients can authenticate independently (self service) anywhere and anytime.

Struktur Organisasi
Organizational Structure




(RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham
Direktur Utama
President Director
R. Wahyu Suparyono
Direktur Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations Director
Khaidir Abdurrahman
Direktur SDM Dan Hukum
Human Resources and Legal Director
Sri Ainin Muktirizka
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
Financial & Risk Management Director
Helmi Imam Satriyono
Cabang UTAMA
Kepala Kantor Cabang Utama
Head of Main Branch Office
Kepala Bidang Layanan Pelanggan
Head of Customer Service
Kepala Bidang Administrasi dan Umum
Head of Administration and General Affairs
Tipe A
Kepala Kantor Cabang (Tipe A)
Head of Branch Office (Class A)
Kepala Bidang Layanan Pelanggan
Head of Customer Service
Kepala Bidang Administrasi dan Umum
Head of Administration and General Affairs
Tipe B
Kepala Kantor Cabang (Tipe B)
Head of Branch Office (Class B)
Kepala Bidang Layanan Pelanggan
Head of Customer Service
Kepala Bidang Administrasi dan Umum
Head of Administration and General Affairs
Tipe C
Kepala Kantor Cabang (Tipe C)
Head of Branch Office (Class C)
Kepala Divisi Strategi SDM
Head of HR Strategy Division
Linda Harumania
Yolanda Imelda F. Tuapattinaya
Kepala Bidang Pembelajaran dan Budaya
Head of Learning and Culture
Suparni
Kepala Bidang Pengembangan Organisasi dan Kinerja
Head of Organizational Development and Performance
Muhammad Syaiful Panigoro
Kepala Bidang Karir, Remunerasi, dan Sistem
Head of Career and Remuneration
Kepala Divisi Layanan SDM
Head of HR Service Division
Maman Suhendar
Randy Achmad
Kepala Bidang Layanan SDM Kantor Pusat
Head of Headquarter HR Services
Nandang Sunandar
Kepala Bidang Layanan SDM Kantor Cabang
Head of Branch Office HR Services
Kepala Divisi Umum
Head of the General Division
Sunarto
Widya Desi Sartika
Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Head of Procurement of Goods and Services
Decky Soesanto
Kepala Bidang Aset Tetap
Head of Fixed Assets
Dewi Ratnaningsih
Kepala Bidang Urusan Umum dan Rumah Tangga
Head of General and Household Affairs
Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum
Head of Compliance and Legal Division
Mardia Yuliartati Rahayu
Danar Dwi Andanu
Kepala Bidang Kepatuhan
Head of Compliance
Renold Parentino Panjaitan
Kepala Bidang Hukum
Head of Legal
Kepala Divisi Keuangan
Head of Finance Division
Syahroni
Afy Setiono
Kepala Bidang Pembayaran Operasional
Head of Operational Payments
Fitri Sulistiawati
Kepala Bidang Pembayaran Program THT, JKK, dan JKm
Head of THT, JKK, and JKm Programs Payment
Rubiyati
Kepala Bidang Pembayaran Program Pensiun
Head of Pension Program Payment
Dita Maulidia
Plt.Kepala Bidang Perbendaharaan
Head of Treasury
Dwi Utami
Kepala Bidang Pajak
Head of Tax Department
Kepala Divisi Akutansi
Head of Accounting Division
Rini Nurzianah
Diah Ayu Damayanti
Kepala Bidang Manajemen Transaksi
Head of Transaction Management
Diah Anandayu Farahdisah
Kepala Bidang Laporan Program THT, JKK, dan JKm
Head of THT, JKK, and JKm Program Report
Vici Theresia
Kepala Bidang Laporan Program Pensiun
Head of Pension Program Report
Kepala Manajemen Risiko
Head of Risk Mangement Division
Mochamad Idham Sabili
Maududi
Kepala Bidang Manajemen Risiko keuangan
Head of Financial Risk Mangement
I Gede Adhitya perdana
Kepala Bidang Manajemen Risiko Operasional
Head of Operational Risk Mangement

Profil Direksi
Profile of the Board of Directors



DIREKTUR UTAMA
President Director
WAHYU SUPARYONO

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 63 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
63 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Manajemen (S3) Universitas Brawijaya, 2014
- Magister Manajemen (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, 1997
- Sarjana Akuntansi (S1) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1990

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Utama

Pengalaman Kerja
- Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2017-2020)
- Direktur SDM dan Umum Perum BULOG (2016-2017)
- Komisaris Utama PT Jasa Prima Logistik (JPL) BULOG (2015-2018)
- Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG (2015-2016)
- Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2014-2015)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 4 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-264/MBU/08/2020.

Periode Menjabat
2020 s.d sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Doctor of Management (S3) Brawijaya University, 2014
- Master of Management (S2) IPWI College of Economics, 1997
- Bachelor of Accounting (S1) State College of Accountancy, 1990

Sertification
Principal Risk Management Certification

Work Experience
- President Director of PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (2017-2020)
- Director of Human Resources and General Affairs of Perum BULOG (2016-2017)
- President Commissioner of PT Jasa Prima Logistik (JPL) BULOG (2015-2018)
- Director of Operations and Public Services of Perum BULOG (2015-2016)
- President Director of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2014-2015)

Legal Basis for Appointment
Appointed as President Director since August 4, 2020 based on Decree of the Minister of SOEs Number SK-264/MBU/08/2020

Period of Office
2020 to present

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other companies or institutions

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 63 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
56 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

DIREKTUR INVESTASI
Director of Investment

JEFFRY HARYADI P. M.

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ekonomi (S1) STIE Swadaya, 2005

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Utama

Pengalaman Kerja
- Direktur Investasi Pelabuhan Indonesia Investama (2017-2020)
- Direktur Keuangan dan Administrasi RS Pelabuhan (2017)
- Direktur Investasi PT Jamsostek (Persero) (2012-2014)
- Komisaris Utama PT Binajasa Abadikarya (2010-2012)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Direktur Investasi sejak tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-36/MBU/01/2020.

Periode Menjabat
2020 s.d sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
Bachelor of Economics (S1) STIE Swadaya, 2005

Certifications
Principal Risk Management Certification

Work Experience
- Director of Investment of Pelabuhan Indonesia Investama (2017-2020)
- Director of Finance and Administration RS Pelabuhan (2017)
- Director of Investment of PT Jamsostek (Persero) (2012-2014)
- President Commissioner of PT Binajasa Abadikarya (2010-2012)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Investment Director since January 30, 2020 based on Decree of the Minister of SOEs Number SK-36/MBU/01/2020

Period of Office
2020 to present

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other companies or institutions.

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
Director of Finance and Risk Management

HELMI IMAM SATRIYONO

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 54 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
54 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Keuangan dan Perbankan (S2) Universitas Indonesia, 2000
- Sarjana Matematika (S1) Institut Teknologi Bandung, 1992

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Utama

Pengalaman Kerja
- Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Taspen sejak (2019-2020)
- Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) (2018-2020)
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018)
- Chief Executive Bank Mandiri (Europe) Limited London (2013-2016)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-36/MBU/01/2020. Kemudian dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-119/MBU/04/2021 tanggal 15 April 2021.

Periode Menjabat
2020 s.d sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Master of Financial Management and Banking (S2) University of Indonesia, 2000
- Bachelor of Mathematics (S1) Bandung Institute of Technology, 1992

Certifications
Principal Risk Management Certification

Work Experience
- President Commissioner of PT Asuransi Jiwa Taspen since (2019-2020)
- Director of Finance PT Taspen (Persero) (2018-2020)
- Director of Finance and Risk Management of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2016- 2018)
- Chief Executive of Bank Mandiri (Europe) Limited London (2013-2016)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Director of Finance since January 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-36/MBU/01/2020. Then a change in nomenclature was made to become Director of Finance and Risk Management based on the Decree of the Minister of SOEs SK-119/MBU/04/2021 dated April 15, 2021.

Period of Office
2020 to present

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other companies or institutions.

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 52 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
52 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

DIREKTUR SDM DAN HUKUM
Director of Human Resources and Legal

SRI AININ MUKTIRIZKA

Riwayat Pendidikan
- Magister International Management (S2) Universitas Indonesia, 1995
- Sarjana Teknik Industri (S1) Institut Pertanian Bogor, 1992

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Utama

Pengalaman Kerja
- Chief HR Officer dan HR Director JV Salim Group dengan Korea dan Jepang (2016-2021)
- Direktur di beberapa HR Consulting Firm (2014-2016)
- HR Director The Body Shop Indonesia (2012-2014)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Direktur SDM dan Hukum sejak tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-119/MBU/04/2021.

Periode Menjabat
2021 s.d sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Master of International Management (S2) University of Indonesia, 1995
- Bachelor of Industrial Engineering (S1) Bogor Agricultural University, 1992

Certifications
Principal Risk Management Certification

Work Experience
- Chief HR Officer and HR Director of JV Salim Group with Korea and Japan (2016-2021)
- Director in several HR Consulting Firm (2014-2016)
- HR Director of The Body Shop Indonesia (2012-2014)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Director of HR and Legal since April 15, 2021 based on Decree of the Minister of SOEs SK-119/MBU/04/2021

Period of Office
2021 to present

Concurrent Position
Does not have concurrent positions in other companies or institutions.

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN
Director of Institutional Relations

KHAIDIR ABDURRAHMAN

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 51 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
51 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Magister Manajemen Administrasi Publik (S2) Universitas Malikussaleh, 2019
- Sarjana Ilmu Politik (S1) Universitas Malikussaleh, 1992

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Riisiko: Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi

Pengalaman Kerja
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2014-2019)
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) (2014-2016)
- Project Officer Japanese Red Cross in Banda Aceh (2006-2009)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan sejak tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-39/MBU/01/2022

Periode Menjabat
2022 s.d sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Master of Public Administration Management (S2) Malikussaleh University, 2019
- Bachelor of Political Science (S1) Malikussaleh University, 1992

Certification
Risk Management Certification: Integrated Risk Governance Expert

Work Experience
- House of Representatives of the Republic of Indonesia (2014-2019)
- District House of Representatives (DPRK) (2014-2016)
- Project Officer Japanese Red Cross in Banda Aceh (2006-2009)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Director of Institutional Relations since January 25, 2022 based on Decree of the Minister of SOEs SK-39/MBU/01/2022.

Period of Office
2022 to present

Concurrent Position
Has no concurrent positions in other companies or institutions.

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 54 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
54 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner
FARY DJEMY FRANCIS

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Magister Manajemen (S2) Agribisnis Institut Pertanian Bogor, 1999
- Sariana Sosial Ekonomi Pertanian (S1) Universitas Timor Timur, 1989
- Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan (S3) Universitas Indonesia, 2009

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Riisiko: Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi

Pengalaman Kerja
- Ketua Komisi V DPR RI (2014-2019)
- Anggota DPR RI Komisi V, Anggota Badan Anggaran DPR-RI (2009 - 2014)
- National Expert Japan Cooperation Agency International (JICA)-BAPPENAS (2004-2007)
- Project Manager Community Empowerment Program (CEP) di Indonesia Timur (2002-2004)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/07/2020.

Periode Menjabat
2020 s.d. sekarang

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Master's Degree in Management (S2) in Agribusiness, Bogor Agricultural Institute, 1999
- Bachelor of Agricultural Social Economics (S1) University of East Timor, 1989
- Doctoral Candidate in Environmental Science (S3) University of Indonesia, 2009

Certification
Risk Management Certification: Integrated Risk Governance Expert

Work Experience
- Chairman of Commission V DPR RI (2014-2019)
- Member of DPR RI Commission V, Member of the Budget Committee Budget of DPR-RI (2009-2014)
- National Expert Japan International Cooperation Agency (JICA)-BAPPENAS (2004-2007)
- Project Manager of Community Empowerment Program (CEP) in Eastern Indonesia (2002-2004)

Legal Basis for Appointment
Appointed as President Commissioner since July 29, 2020 based on Decree of the Minister of SOEs Number SK-254/MBU/07/2020.

Period of Office
2020 to present

Concurrent Position
Has no concurrent positions in other companies or institutions.

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



WAKIL KOMISARIS UTAMA
Vice President Commissioner

LETJEN TNI BUDI PRIJONO

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 56 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
56 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

Riwayat Pendidikan
- Doktor Ilmu Ekonomi (S3) Universitas Trisakti
- Magister Manajemen (S2) Universitas Krisnadwipayana
- Sarjana Teknik Manajemen Industri (S1) Komando Pendidikan TI Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi

Sertifikasi
Sertifikasi Audit Forensik

Pengalaman Kerja
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (2022-sekarang).
- Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (2022).
- Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (2020-2022).

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN SK-172/MBU/08/2022.

Periode Menjabat
2022 s.d. sekarang

Rangkap Jabatan
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Doctor of Economics (S3) Trisakti University
- Master of Management (S2) Krisnadwipayana University
- Bachelor of Industrial Management Engineering (S1) Naval IT Education Command, College of Technology

Certification
Forensic Audit Certification

Work Experience
- Inspector General of the Ministry of Defence (2022-present).
- Director General of Defence Force Ministry of Defence (2022).
- Director General of Defence Planning Ministry of Defence (2020-2022).

Legal Basis for Appointment
Appointed as Deputy President Commissioner since August 11, 2022 based on Decree of the Minister of SOEs SK-172/MBU/08/2022

Period of Office
2022 to present

Concurrent Position
Inspector General of the Ministry of Defence

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or shareholders.



Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
berusia 56 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Bogor
56 years old as of December 2022
Domiciled in Bogor

KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioner

I NENGAH PUTRA WINATA

Riwayat Pendidikan
- Master of Business Administration (S2), Curtin University of Technology, Perth, Western Australia (1996)
- Sarjana Statistik (S1) Institut Pertanian Bogor (1989)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko: Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi

Pengalaman Kerja
- Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (2021 s.d. sekarang)
- Staf Khusus Wakil Menteri Pertahanan (2020-2021)
- Direktur Keuangan PT Lawangwangi (Agustus 2012-2019)
- Direktur Keuangan PT U Connectivity Services (2011-2019)
- Direktur Keuangan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama (2010-2019)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-288/MBU/09/2020.

Periode Menjabat
2020 s.d. sekarang

Rangkap Jabatan
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Master of Business Administration (S2), Curtin University of Technology, Perth, Western Australia (1996)
- Bachelor of Statistics (S1) Bogor Agricultural Institute (1989)

Certification
Risk Management Certification: Integrated Risk Governance Expert

Work Experience
- Special Staff to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries (2021 to present)
- Special Staff to the Deputy Minister of Defence (2020-2021)
- Director of Finance PT Lawangwangi (August 2012-2019)
- Director of Finance PT U Connectivity Services (2011-2019)
- Director of Finance PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama (2010-2019)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Independent Commissioner since September 15, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-288/MBU/09/2020.

Period of Office
2020 to present

Concurrent Position
Special Staff to the Minister of Maritime Affairs and Fisheries

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioner

ARIDONO SUKMANTO

Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 61 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Bekasi
61 years old as of December 2022
Domiciled in Bekasi

Riwayat Pendidikan
Sarjana Ilmu Hukum (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Pangkalan Raya (1998)

Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko Utama

Pengalaman Kerja
- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2018-2019)
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2016-2018)
- Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2016)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-33/MBU/02/2021.

Periode Menjabat
2021 s.d. sekarang

Rangkap Jabatan
- Komisaris Independen PT Astra Agro Lestari Tbk
- Komisaris Independen PT Astra Sedaya Finansial

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
Bachelor of Laws (S1) Tambun Bungai Pangkalan Raya College of Law (1998)

Certification
Principal Risk Management Certification

Work Experience
- Deputy Chief of the Indonesian National Police (2018-2019)
- Head of the National Police Criminal Investigation Agency (2016-2018)
- Deputy Head of the National Police Criminal Investigation Agency (2016)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Independent Commissioner since February 15, 2021 based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK- 33/MBU/02/2021

Period of Office
2021 to present

Concurrent Position
- Independent Commissioner of PT Astra Agro Lestari Tbk
- Independent Commissioner of PT Astra Sedaya Finansial

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.



Warga Negara Indonesia | Indonesian Citizen
Berusia 52 tahun per Desember 2022
Berdomisili di Jakarta
52 years old as of December 2022
Domiciled in Jakarta

KOMISARIS
Commissioner

ROFYANTO KURNIAWAN

Riwayat Pendidikan
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) Universitas Sains Malaysia, 2014
- Master of Business Administration (S2) Nanzan University, Jepang, 2003
- Sarjana Teknik Sipil (S1) Institut Teknologi Bandung, 1995

Sertifikasi
Sertifikasi Manaiemen Risiko: Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi

Pengalaman Kerja
- Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020-sekarang)
- Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2017-2020)
- Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2012-2017)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-251/MBU/10/2019.

Periode Menjabat
2019 s.d. sekarang

Rangkap Jabatan
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan pemegang saham.

Education History
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) University Sains Malaysia, 2014
- Master of Business Administration (S2) Nanzan University, Japan, 2003
- Bachelor of Civil Engineering (S1) Institute of Technology Bandung, 1995

Certification
Risk Management Certification: Integrated Risk Governance Expert

Work Experience
- Director of State Budget Preparation, Ministry of Finance (2020 to present)
- Head of State Revenue Policy Centre, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2017-2020)
- Head of the Center for State Revenue and Expenditure Budget Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2012-2017)

Legal Basis for Appointment
Appointed as Commissioner since October 17, 2019 based on Decree of the Minister of SOEs Number SK-251/MBU/10/2019

Period of Office
2019 to present

Concurrent Position
Director of State Budget Preparation Directorate General of Budget, Ministry of Finance

Affiliation Relationship
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors or shareholders.

Profil Pejabat Senior
Senior Officer Profile



KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL
Head of Internal Audit
BUDI IRWANTO



SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary
OKKI JATNIKA



KEPALA DIVISI STRATEGI KORPORASI
Head of Corporate Strategy
GUSTAMI A. WIBOWO



KEPALA DIVISI AKTUARIA
Head of Actuarial Division
WINDHU WIJATMOKO



KEPALA DIVISI PASAR MODAL DAN PASAR UANG
Head of Capital Market and Money Market Division
HARI MURTI



PJS KEPALA DIVISI PENGEMBANGAN BISNIS
Act. Head of Business Development Division
MUKTI HARIYANTO



KEPALA DIVISI LAYANAN
Head of Service Division
VIAN D. RUYATNA



PJS KEPALA DIVISI KEPESERTAAN
Act. Head of Membership Division
KOES ARIYANTO



KEPALA DIVISI SISTEM INFORMASI
Head of Information Technology Division
SULISTYO ARIS HIRTRANUSI



KEPALA DIVISI STRATEGI SDM
Head of HR Strategy Division
LINDA HARUMANIA



KEPALA DIVISI LAYANAN SDM
Head of HR Services Division
MAMAN SUHENDAR



KEPALA DIVISI UMUM
Head of General Division
SUNARTO



KEPALA DIVISI KEPATUHAN & HUKUM
Head of Compliance and Legal Division
MARDIA YULIARTI R.



KEPALA DIVISI AKUNTANSI
Head of Accounting Division
RINI NURZIANAH



KEPALA DIVISI KEUANGAN
Head of Finance Division
SYAHRONI



KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO
Head of Risk Management Division
MOCH. IDHAM SABILI



Plt. KEPALA DIVISI MANAJEMEN PORTOFOLIO
Act. Head of Portfolio Management Division
BUDI ASTUTI

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara di mana 100% (seratus persen) saham dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keputusan Para Pemegang Saham, untuk kepemilikan saham dapat dijelaskan sebagai berikut:

PT ASABRI (Persero) is a State-Owned Enterprise in which 100% (one hundred percent) of the shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia, which in this case is represented by the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia. In accordance with the Articles of Association of the Company (Persero) PT ASABRI Number 16 dated August 27, 2008 concerning the Decision of the Shareholders, the share ownership can be explained as follows:

Keterangan Description	**Nilai Nominal** Nominal Value
Modal Dasar | Authorized Capital	Rp500.000.000.000 | IDR500,000,000,000
Modal Disetor Penuh | Fully Paid-up Capital	Rp200.000.000.000 | IDR200,000,000,000

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Hingga 31 Desember 2022, Perusahaan belum melakukan pencatatan saham di bursa efek manapun sehingga komposisi kepemilikan saham Perusahaan ialah Negara Republik Indonesia sebesar 100%. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) tidak memiliki saham di PT ASABRI (Persero). Uraian serta verifikasinya disajikan dalam tabel berikut:

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Until December 31, 2022, the Company has not listed its shares on any stock exchange so that the composition of the Company's share ownership is the Republic of Indonesia by 100%. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) do not own shares in PT ASABRI (Persero). The description and verification are presented in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham di PT ASABRI (Persero)** Share Ownership in PT ASABRI (Persero)
Dewan Komisaris | Board of Commissioners		
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada None
Budi Prijono*	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Tidak Ada None
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None
Direksi | Board of Directors		
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Tidak Ada None
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Tidak Ada None
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Tidak Ada None
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Tidak Ada None
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Tidak Ada None

*Dalam proses uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK | In the process of fit and proper test by OJK

Kronologi Pencatatan Saham
Stock Listing Chronology

PT ASABRI (Persero) tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di bursa manapun. Seluruh kepemilikan saham berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak ada kronologi pencatatan saham, dan informasi saham lainnya yang dapat disampaikan.

PT ASABRI (Persero) did not conduct an Initial Public Offering on any stock exchange. All share ownership is under the Government of the Republic of Indonesia. As such, there is no chronology of share listing, and other share information that can be submitted.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Chronological Listing of Other Securities

PT ASABRI (Persero) tidak pernah menerbitkan efek yang diperdagangkan dalam bentuk apa pun sehingga informasi mengenai:
1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;
2. Nilai penawaran efek lainnya;
3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan
4. Peringkat efek.

Tidak dapat disampaikan karena aktivitas terkait tidak terjadi sehingga informasi dan dokumen tersebut tidak tersedia.

PT ASABRI (Persero) has never issued any form of traded securities so information regarding:

1. Name of other securities, year of issuance of other securities, interest/reward rate of other securities, and maturity date of other securities;
2. The offering value of the other security;
3. The name of the exchange where the other securities are listed; and
4. Securities rating.

Cannot be submitted because the related activities did not occur so that the information and documents are not available.

Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri
List of Industry Association Memberships

ASABRI ikut serta aktif dalam keanggotaan asosiasi, sebagai berikut:
1. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI);
2. Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI);
3. Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI);
4. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
5. Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (FKSPI);
6. Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

ASABRI actively participates in association membership, as follows:
1. Indonesian Social Security Insurance Association (AAJSI);
2. Association of Indonesian Insurance Management Experts (AAMAI);
3. Indonesian Actuary Association (PAI);
4. Indonesian Accountants Association (IAI);
5. Internal Supervisory Unit Communication Forum (FKSPI);
6. Member of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Centre (LAPS SJK).

Wilayah Operasional
Operational Area

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Address of Head Office and Branch Offices

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon Telephone
1	Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Head Office and Main Branch Office	Gedung Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11, Jakarta	Telp | Phone (021) 8094140, 8904135 Fax | Fac (021) 8012313
2	Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	Jalan Citarum Nomor 6 Kelurahan, Cihapit, Bandung	(022) 7103177
3	Kantor Cabang Serang Serang Branch Office	Jalan Maulana Yusuf, Ruko Taman Sari Nomor 2, Kelurahan Cimuncang	(0254) 201106
4	Kantor Cabang Cirebon Cirebon Branch Office	Jalan DR. Sudarsono Nomor 10, Kelurahan Kesambi, Cirebon	(0231) 8336668
5	Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3, Pudakpayung, Banyumanik, Semarang	(024) 7475049
6	Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	Ruko Grand Tlogoadi R-18, Jalan Kebon Agung, Kelurahan Tlogoadi, Kecamatan Mlati | Mlati District, Sleman, Yogyakarta	(0274) 869454
7	Kantor Cabang Surabaya Surabaya Branch Office	Jalan Gayungan PTT Nomor 43, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan | Gayungan District, Surabaya	(031) 8281461
8	Kantor Cabang Malang Malang Branch Office	Ruko Raden Intan Square Jalan Raden Intan Kavling 74/I, Arjosari, Blimbing Kota Malang | Malang City, Jawa Timur | East Java	(0341) 412645
9	Kantor Cabang Madiun Madiun Branch Office	Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 108, Kelurahan Manguharjo | Manguharjo Subdistrict, Madiun	(0351) 4472450
10	Kantor Cabang Aceh Aceh Branch Office	Jalan Cut Nyak Dien Nomor 27A, Kelurahan Ajun Besar | Ajun Besar Subdistrict – Banda Aceh	(0651) 43267
11	Kantor Cabang Batam Batam Branch Office	Jalan Sudirman Ruko Plamo Garden Blok D, Nomor 5, Kelurahan Baloi Permai Baloi | Permai Subdistrict, Batam Kota | Batam City	(0778) 468681
12	Kantor Cabang Bengkulu Bengkulu Branch Office	Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Cempaka Permai | Cempaka Subdistrict, Bengkulu	(0736) 5612725
13	Kantor Cabang Lampung Lampung Branch Office	Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 32D, Kelurahan Gedong Meneg | Gedong Meneg Subdistrict, Raja Basa, Bandar Lampung	(0721) 787302
14	Kantor Cabang Lhokseumawe Lhokseumawe Branch Office	Jalan Panglateh Nomor 5-6, Kelurahan Simpang Empat | Simpang Empat Subdistrict, Banda Sakti, Lhokseumawe	(0645) 49176
15	Kantor Cabang Medan Medan Branch Office	Komplek Griya Riatur Indah Jalan T. Amir Hamzah Blok B/4, Kelurahan Helvetia Timur | Helvetia Timur Subdistrict, Medan	(061) 8460675
16	Kantor Cabang Padang Padang Branch Office	Jalan Purus V Nomor 3, Kel. Purus, Padang Barat | West Padang, Kota Padang | Padang City	(0751) 30021
17	Palembang Cabang Palembang Bandung Branch Office	Jalan Radial Nomor 3 A-B, 24 Ilir, Palembang	(0711) 361114
18	Kantor Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch Office	Jalan Nenas Nomor 81-B, Sukajadi, Pekanbaru	(0761) 7891739
19	Kantor Cabang Balikpapan Balikpapan Branch Office	Jalan Sudirman Nomor 85, Kelurahan Damai Bahagia | Damai Bahagia Subdistrict, Balikpapan	(0542) 424737
20	Kantor Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch Office	Jalan A. Yani Km.33, Loktabat Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan | South Kalimantan	(0511) 4783820

Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang
Address of Head Office and Branch Offices

No	Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Telepon Telephone
21	Kantor Cabang Pontianak Pontianak Branch Office	Jalan Arteri Supadio KM.16, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat | West Kalimantan	(0561) 733083
22	Kantor Cabang Palangkaraya Palangkaraya Branch Office	Jalan G. Obos Ruko Nomor 21, Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah | Central Kalimantan	(0536) 4200160
23	Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office	Jalan A.P. Pettarani Nomor 21, Makassar	(0411) 432147
24	Kantor Cabang Kendari Kendari Branch Office	Jalan DI Panjaitan Kompleks Ruko Square Nomor 18, Wundudopi, Baruga, Kendari	(0401) 3197942
25	Kantor Cabang Palu Palu Branch Office	Jalan Tanjung Dako Nomor 22C, Palu, Sulawesi Tengah | Central Sulawesi	(0451) 421040
26	Kantor Cabang Manado Manado Branch Office	Jalan Pogidon Raya Nomor 58, Mahawu, Tuminting, Manado, Sulawesi Utara | North Sulawesi	(0431) 847094
27	Kantor Cabang Denpasar Denpasar Branch Office	Jalan Hang Tuah Nomor 8, Kelurahan Renon | Translate Renon Subdistrict, Denpasar, Bali	(0361) 238167
28	Kantor Cabang Mataram Mataram Branch Office	Jalan Panji Tilar Negara Nomor 97 B, Kekalik Jaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat | West Nusa Tenggara	(0370) 636400
29	Kantor Cabang Kupang Kupang Branch Office	Jalan Jend. Soeharto Nomor 110, Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur | East Nusa Tenggara	(0380) 8555133
30	Kantor Cabang Ambon Ambon Branch Office	Jalan dr. Kayadoe SK Nomor 20, Kelurahan Kudamati | Kudamati Subdistrict, Ambon	(0911) 311353
31	Kantor Cabang Ternate Ternate Branch Office	Jalan Raya Kayu Merah Ruko Nomor 1, Ternate Selatan, Maluku Utara | South Maluku	(0921) 3127853
32	Kantor Cabang Jayapura Jayapura Branch Office	Jalan Raya Sentani, Waena, Jayapura	(0967) 571209
33	Kantor Cabang Sorong Sorong Branch Office	Jalan Basuki Rahmat Nomor 39B, KM. 10,5 Sorong, Papua Barat | West Papua	(0951) 325886

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
Company Supporting Institutions and Professions

Lembaga dan Profesi Institutions and Professions	**Nama** Name	**Alamat dan Nomor Telepon** Address and Phone Number	**Jasa yang Diberikan** Services Provided	**Periode Penunjukan** Appointment Period	**Biaya** Fee
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | Partners	Plaza Asia Lantai 10 | 10th Floor Jalan Jend. Sudirman Kavling 59, Jakarta Selatan | South Jakarta 12190 (021) 51401340	1. Audit umum (General Audit) bertujuan khusus terhadap Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk Tahun Buku 2022, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan program Tabungan Hari Tua (LMPMD program THT) dan unsur-unsur laporan keuangan selain LMPMD program THT disusun berdasarkan standar audit yang berlaku di Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 2. Audit umum Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) periode Tahun Buku 2022 berdasarkan standar audit yang berlaku di Indonesia. 3. Audit umum terhadap Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) program Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atas pengelolaan penyelenggaraan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan PMK. 4. Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern. 5. Telaah *(review)* atas Laporan Kinerja termasuk di dalamnya *review* atas pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan. 6. Telaah *(review)* atas struktur pengendalian intern, identifikasi kelemahan dan masalah yang ada termasuk keandalan sistem teknologi informasi yang diterapkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional, *fraud risk assessment,* serta penyampaian usulan/rekomendasi perbaikan atau *area of improvement (Management Letter)* dalam hal ditemukan kelemahan. 7. Memberikan informasi (presentasi) terkait hasit audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 8. Menyiapkan data dan dokumen serta paparan dan diskusi untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2022 sebagai implementasi Standar Audit 600 dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 untuk PT ASABRI (Persero) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).	2022	

Lembaga dan Profesi Institutions and Professions	**Nama** Name	**Alamat dan Nomor Telepon** Address and Phone Number	**Jasa yang Diberikan** Services Provided	**Periode Penunjukan** Appointment Period	**Biaya** Fee
			1. General audit with the specific objective of PT ASABRI (Persero) Financial Statements for Financial Year 2022, consisting of statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, and notes to the financial statements prepared to comply with the provisions of the Minister of Finance Regulation (PMK) for Liability for Future Policy Benefits of the Program Tabungan Hari Tua (LMPMD of the THT program) and elements of financial statements other than LMPMD of the THT program prepared based on auditing standards applicable in Indonesia, namely the Public Accountant Professional Standards (SPAP) and State Financial Audit Standards (SPKN). 2. General audit of the Financial Statements of the Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding Program for the Financial Year 2022 period based on applicable audit standards in Indonesia. 3. General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) Accumulated Pension Plan (AIP) for the management of the Accumulated Pension Plan for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Civil Servants within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police in accordance with PMK. 4. Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. 5. Review of the Performance Report including a review of the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and the level of health. 6. A review of the internal control structure, identification of weaknesses and problems including the reliability of information technology systems implemented in the context of operational effectiveness and efficiency, fraud risk assessment, as well as the submission of proposals/ recommendations for improvement or areas of improvement (Management Letter) in the event that weaknesses are found. 7. Provide information (presentation) related to audit results to the Board of Directors and Board of Commissioners. 8. Preparing data and documents as well as exposure and discussion for the examination of the 2022 Financial Statements of State-Owned Enterprises as the implementation of Audit Standard 600 in the framework of the Audit of the 2022 Central Government Financial Statements for PT ASABRI (Persero) by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI).		

Lembaga dan Profesi Institutions and Professions	**Nama** Name	**Alamat dan Nomor Telepon** Address and Phone Number	**Jasa yang Diberikan** Services Provided	**Periode Penunjukan** Appointment Period	**Biaya** Fee
Aktuaris Actuary	Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin dan Rekan | Partners (d.h PT Quattro Asia Consulting)	Jalan Brigif No. 39 B Jagakarsa Jakarta Selatan | South Jakarta 12630	Jasa konsultan perhitungan premi imbalan paska kerja (Penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja) Consultancy services for post-employment benefit premium calculation (Application of PSAK 24 on employee benefits)	2022	
Notaris Notary	Anindya Rahayu Giandari S.H, M.Kn.	Cluster Green View Blok A7 No.14, Serpong	*Fit and Proper Test* Direktur SDM dan Hukum Fit and Proper Test for Director of HR and Legal	2022	
Notaris Notary	Hestyani Hassan S.H., M.Kn.	Jalan Otto Iskandar Dinata III No. 13A, Cipinang Cempedak	• Pengangakatan dan *Fit and Proper Test* Direktur Hubungan Kelembagaan • Pengangkatakan Komisaris Utama a.n. Budi Prijono • Appointment and Fit and Proper Test of Institutional Director of Institutional Relations • Appointment of President Commissioner a.n. Budi Prijono	2022	

Informasi pada *Website* Perusahaan
Information on the Company Website



Dalam menjunjung asas transparansi terhadap seluruh pemangku kepentingan, ASABRI menyediakan akses informasi berupa situs *web* resmi yang dapat diakses pada www.asabri.co.id. Informasi yang tersaji pada situs meliputi:

Formulir
- Formulir Pelayanan
- Formulir Pajak
- Formulir PUM KPR

Profil Perusahaan
- Sejarah
- Visi dan Misi
- Landasan Brand
- Struktur Organisasi
- Manajemen
- Jaringan Kantor
- Status ASABRI
- Mitra Kerja Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan ASABRI

Produk dan Persyaratan
- Program Sebelum 1 Juli 2015
- Program Mulai 1 Juli 2015
- Buku Layanan ASABRI
- Program Mulai 30 September 2020 (PP 54/2020)

Publikasi
- Berita Kegiatan
- Galeri
- Majalah Asabri
- Video

Kinerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan (Annual Report)

Produk Hukum
- Peraturan

Tata Kelola Perusahaan
- Tata Kelola Perusahaan

FAQ
- FAQ

Karier
- Penerimaan

In upholding the principle of transparency to all stakeholders, ASABRI provides access to information in the form of an official website that can be accessed at www.asabri.co.id. Information presented on the site includes:

Form
- Service Form
- Tax Forms
- KPR PUM Form

Company Profiles
- History
- Vision and Mission
- Brand Foundation
- Organization Structure
- Management
- Office Network
- ASABRI Status
- ASABRI Hospital/Health Facility Partners

Products and Requirements
- Program Before July 1, 2015
- Program Start July 1, 2015
- Buku Layanan ASABRI
- Program Starting September 30, 2020 (PP 54/2020)

Publikasi (Publications)
- Activity News
- Gallery
- Asabri Magazine
- Video

Performance
- Financial Report
- Annual Report

Legal Products
- Regulations

Corporate Governance
- Corporate Governance

FAQ
- FAQ

Careers
- Reception

Peristiwa Penting 2022
2022 Event Highlights

JANUARI | January



Kolaborasi ASABRI dengan BULOG dalam kegiatan bazar sembako
ASABRI collaboration with BULOG in food bazaar activities



Penyerahan Pensiun Pertama Letjen TNI (Purn) Tri Soeswandono (Sesmenko Polhukam)
First Retirement of Lieutenant General (Ret) Tri Soeswandono (Sesmenko Polhukam)



Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan ASABRI
Hearing Meeting (RDP) of Commission VI with ASABRI



Pelantikan Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero)
Inauguration of Director of Institutional Relations of PT ASABRI (Persero)



RUPS RKAP dan RKA TJSL PT ASABRI (Persero) Tahun 2022
GMS RKAP and RKA TJSL PT ASABRI (Persero) Year 2022



Penyerahan SRKK untuk 3 Prajurit TNI yang gugur di puncak Papua
Submission of SRKK for 3 TNI Soldiers who killed at the top of Papua

FEBRUARI | February



Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) ASABRI tahun 2022
Technical Coordination Meeting (RAKORNIS) ASABRI in 2022



Penyerahan Pensiun Pertama Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri
Submission of the First Retirement of Commissioner General of Police (Ret) Firli Bahuri

MARET | March



Dukungan Pendidikan untuk putra putri Prajurit TNI yang berprestasi
Education Support for the sons and daughters of TNI Soldiers who excel



Penyerahan Pensiun Pertama Wakil Komisaris Utama Asabri, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana
Submission of the First Pension of Asabri Deputy President Commissioner, Lieutenant General (Ret.) Ida Bagus Purwalaksana



PKB ASABRI dengan PERKASA
ASABRI PKB with Workers Union of ASABRI Employees (PERKASA)



Apresiasi ASABRI kepada Mitra Bayar dan Kantor Cabang ASABRI terbaik Tahun 2021
ASABRI Appreciation to the Best Paying Partner and ASABRI Branch Office in 2021

April | April



Penyerahan Pensiun Pertama Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto
Handover of First Pension to Marshal TNI (Ret.) Hadi Tjahjanto

Mei | May



Pembukaan *Cluster* Sinergi Layanan MPP
Opening of MPP Service Synergy Cluster

JUNI | June



ASABRI mendapat Juara I pertandingan *Volleyball* pada kegiatan Pekan Olahraga Kementerian Pertahanan
ASABRI won 1st place in the Volleyball match at the Ministry of Defence Sports Week activities

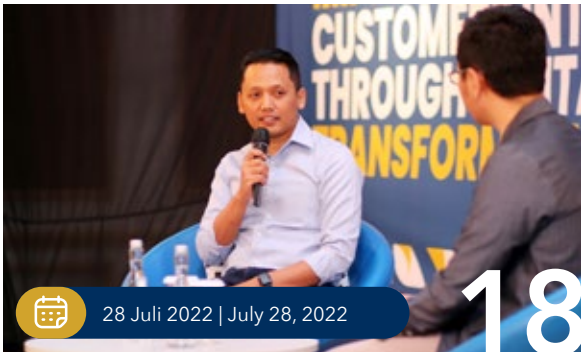


RUPS Tahun Buku 2021
GMS for Fiscal Year 2021

JULI | July



***Sharing Session* Gratifikasi bersama KPK narasumber Direktur Gratifikasi dan Pelayaran Publik KPK Bapak Herda Helmijaya**
Gratification Sharing Session with KPK with guest speaker Director of Gratification and Public Services of KPK Mr Herda Helmijaya



***Sharing Session Improving Customer Interction through Digital Transformation* oleh Direktur Transformasi dan Digital Office, Soleh Ayubi**
Sharing Session Improving Customer Interaction through Digital Transformation by Director of Transformation and *Digital Office*, Soleh Ayubi



ASABRI meraih penghargaa "The Best SDG's Program *Implementation*-2022" kategori *"Good Health & Well Being"*
ASABRI won the award for The Best SDG's Program Implementation-2022" category "Good Health & Well Being"

AGUSTUS | August



HUT ke-51 ASABRI memperkenalkan aplikasi Autentikasi Digital yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN
ASABRI 51st Anniversary introduced the Digital Authentication application attended by the Minister of Defence and Minister of SOEs



Perjanjian Kerja Sama ASABRI dengan Pegadaian tentang Penyediaan Produk, Layanan, dan Keagenan Pegadaian kepada Peserta ASABRI
ASABRI Cooperation Agreement with Pegadaian on the Provision of Pegadaian Products, Services and Agency to ASABRI Participants



ASABRI Meraih Penghargaan Indonesia *Human Capital Award* (IHCA) *"Building Sustainable People Strategy"*
ASABRI Receives Indonesia Human Capital Award (IHCA) "Building Sustainable People Strategy"

SEPTEMBER | September



ASABRI melaksanakan kegiatan *Week For Employee* (WFE) untuk seluruh karyawan
ASABRI conducted Week For Employee (WFE) activities for all Employees



ASABRI melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan
ASABRI conducted a Customer Satisfaction Survey

OKTOBER | October



Pembukaan *Cross Assignment* ASABRI-Taspen
Opening of ASABRI-Taspen Cross Assignment

NOVEMBER | November



Rapat Anggota Tahunan Koperasi Karyawan ASABRI Sejahtera (KKAS)
Annual Member Meeting of ASABRI Sejahtera Employee Cooperative (KKAS)



ASABRI memberikan bantuan Program TJSL non PUMK senilai Rp43 juta kepada Sekretaris Komandan Komplek Kemhan/TNI Kelapa Dua
ASABRI provided non PUMK TJSL Program assistance worth IDR43 million to the Secretary of the Commander of the Ministry of Defense/ TNI Kelapa Dua Complex



ASABRI melakukan sosialisasi manfaat Program ASABRI dan perekaman wajah *(enrollment)* kepada 75 anggota PPAD
ASABRI conducted socialisation of the benefits of the ASABRI Program and face recording (enrollment) to 75 PPAD members

DESEMBER | December



Manajemen ASABRI melantik Pejabat Manajerial
ASABRI Management inaugurated Managerial Officials



Penyerahan Manfaat Program THT dan JP kepada Wakil Menteri Pertahanan RI
Submission of THT and JP Program Benefits to the Deputy Minister of Defence of the Republic of Indonesia

Penghargaan dan Sertifikasi 2022
Awards and Certifications 2022

PENGHARGAAN
Awards



The Best SDGs Program Implementation-2022
Kategori *Good Health & Well Being*

28 Juli 2022 | July 28, 2022
Economic Review

1st The Best Human Capital 2022 kategori State Owned Enterprises Company (Non Tbk Finance)

31 Agustus 2022 | August 31, 2022
Economic Review



SERTIFIKASI

Certifications

Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2013

Information Security Management System Certification ISO/IEC 27001:2013

26 Juli 2021 – 25 Juli 2024
July 26, 2021 - July 25, 2024

PT British Standards Institution Group Indonesia

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Anti-bribery Management System Certification ISO 37001:2016

23 September 2020 – 22 September 2023
September 23, 2020 - September 22, 2023

PT British Standards Institution Group Indonesia





04



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS



Business Support Overview

Sumber Daya Manusia
Human Resources



Peningkatan kualitas SDM yang dijalankan Perseroan, selaras dengan Visi Perseroan, "Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan". Dalam misinya, ASABRI berkomitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berakhlak.

Improving the quality of human resources carried out by the Company is in line with the Company's Vision, "To become a professional National Social Insurance Company by transforming the Company's culture and business in a sustainable manner". In its mission, ASABRI is committed to developing human resources with integrity and morality.

RINGKASAN KINERJA 2022

Fokus pengelolaan *Human Capital* di tahun 2022 yaitu evaluasi organisasi, mendorong terciptanya organisasi pembelajar, penyempurnaan *performance management system*, dan pengelolaan karier dalam rangka mempersiapkan *future leader*. Inisiatif yang dilakukan antara lain:

1. *Redesign* struktur organisasi yang diselaraskan dengan strategi Perusahaan dalam melakukan perbaikan kondisi Perusahaan, dengan fokus pada fungsi Investasi, *Risk Management* dan *Human Capital;*
2. Menciptakan lingkungan yang terus belajar dan berkembang melalui aktivitas yang dilaksanakan bekerja sama, dengan mitra strategis Perusahaan, melalui program sebagai berikut:
   a. Meningkatkan sinergi dengan BUMN Klaster Asuransi dan Dana Pensiun dalam pengelolaan *human capital* melalui *Cross Assignment*, *Integrated Knowledge Management Platform*, dan *Integrated Modul* (*e-learning*).
   b. Program Pengembangan Talenta melalui *Officer Development Program* (ODP) untuk meningkatkan pemenuhan jumlah Karyawan sebagai suksesor pada level manajerial.
   c. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan Program Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Karyawan.

3. *Redesign* sistem manajemen kinerja dilakukan dengan menyusun *key performance indicator* (KPI) yang diturunkan secara berjenjang dari KPI Manajemen sampai dengan KPI Individu. Penyempurnaan juga dilakukan melalui perubahan skala penilaian, waktu penilaian, dan penambahan aspek penilaian prestasi kerja (inovasi) dan pelanggaran disiplin.
4. Menyempurnakan sistem remunerasi melalui reklasifikasi jenis penghasilan, *cashless benefit*, dan penyelarasan dengan kinerja Karyawan.
5. Menyempurnakan HR *Soft Structure* yang terdiri dari:
   a. Penyempurnaan kebijakan terkait *Grade* dan Karier Karyawan melalui penyusunan pedoman pengelolaan *Grade* dan Karier Karyawan;
   b. Menyusunan kebijakan terkait *talent mobility* yang tercantum pada Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan *Grade* dan Karier Karyawan, untuk mendukung program perputaran talenta untuk Kementerian BUMN;
   c. Penyusunan kebijakan Formasi SDM yang mengatur tentang perencanaan SDM dan tata cara pengisian formasi SDM (internal dan eksternal).

2022 PERFORMANCE SUMMARY

The focus of Human Capital management in 2022 is Organization evaluation, encouraging the creation of a learning Organization, improving the performance management system, and career management in order to prepare future leaders. Initiatives undertaken include:

1. Redesign of the Organization structure aligned with the Company's strategy in improving the Company's condition, with a focus on the Investment, Risk Management and Human Capital functions;
2. Creating an environment that continues to learn and develop through activities carried out in collaboration, with the Company's strategic partners, through the following Program:
   a. Enhancing synergies with Insurance Cluster SOEs and Pension Funds in human capital management through Cross Assignment, Integrated Knowledge Management Platform, and Integrated Modules (e-learning).
   b. Talent Development Program through Officer Development Program (ODP) to increase the number of employees as successors at managerial level.
   c. Improvement of the management policy of the Employee Learning and Competency Development Program.

3. Redesign of the performance management system by developing key performance indicators (KPIs) that are derived in stages from Management KPIs to Individual KPIs. Improvements were also made through changes in the assessment scale, assessment time, and the addition of aspects of work performance assessment (innovation) and disciplinary violations.
4. Improving the remuneration system through reclassification of income types, cashless benefits, and alignment with employee performance.
5. Refining the HR Soft Structure which consists of:
   a. Refinement of policies related to Employee Grade and Career through the preparation of guidelines for managing Employee Grade and Career;
   b. Drafting policies related to talent mobility as stated in the Board of Directors Regulation on Guidelines for Employee Grade and Career Management, to support the talent turnover program for the Ministry of SOEs;
   c. Preparation of HR Formation policies that regulate HR planning and procedures for filling HR formations (internal and external).

d. Penyusunan kebijakan Masa Percobaan Promosi yang mengatur tentang status, periode evaluasi, dan klasifikasi penilaian.
e. Penyempurnaan kebijakan Cuti Karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
f. Penyusunan kebijakan tentang Kewajiban Karyawan yang mengalami Mutasi dan PHK.

6. Dalam rangka peningkatan Internalisasi Budaya, telah dilakukan survei *core values* AKHLAK untuk mengukur tingkat pemahaman dan implementasi AKHLAK di lingkungan Perusahaan.

Melalui berbagai program inisiatif di atas, terdapat peningkatan hasil *employee engagement*, semula 79% dari skala 100% di tahun 2021 menjadi 86,54% di tahun 2022. Dan *employee* satisfaction, semula 77,62% menjadi 78,95% di tahun 2022.

Selain itu, dari aspek *human capital,* ASABRI juga telah mendapatkan penghargaan *The Best Human Capital* 2022 dan *The Best Human Capital Director* 2022 yang diselenggarakan oleh *Economic Review*.

Untuk melanjutkan rencana strategis *human capital* tersebut, pada tahun 2023, pengelolaan *Human Capital* ASABRI tetap dijalankan selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Aspirasi Pemegang Saham. Beberapa fokus utama kinerja *human capital* adalah:
1. Peningkatan jumlah talenta perempuan;
2. Peningkatan jumlah talenta muda;
3. *Talent Development* Program; dan
4. Pemenuhan Klasifikasi organ pengelola risiko.

STRATEGI MANAJEMEN SDM

Perusahaan telah melaksanakan program penyehatan keuangan mulai tahun 2020 melalui perbaikan tata kelola, optimalisasi sinergi klaster, penyesuaian bunga aktuaria, pengajuan UPSL, dan *asset recovery.* Dari beberapa program tersebut, kontribusi *Human Capital* dituntut untuk lebih adaptif dan efektif.

Penurunan nilai aset investasi Perusahaan tidak hanya berpengaruh terhadap produktivitas pekerja dan profitabilitas Perusahaan, namun juga pada *sustainability* Perusahaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, *Human Capital* ASABRI berperan aktif untuk melakukan perubahan dari segi manajemen SDM secara jangka panjang dan jangka pendek yang sejalan dengan arahan Kementerian BUMN digambarkan dalam HR *Architecture*, sebagai berikut:

d. Development of a Promotion Probationary Period policy governing status, evaluation periods, and grading classifications.
e. The refinement of Employee Leave policy in accordance with the Laws and Regulations; and
f. Preparation of policies on the Obligations of Employees who experience Mutations and Layoffs.

6. In order to improve Culture Internalisation, a survey on AKHLAK core values was conducted to measure the level of understanding and implementation of AKHLAK within the Company.

Through the various initiative Program above, there is an increase in employee engagement results, from 79% of a 100% scale in 2021 to 86.54% in 2022. And employee satisfaction, from 77.62% to 78.95% in 2022.

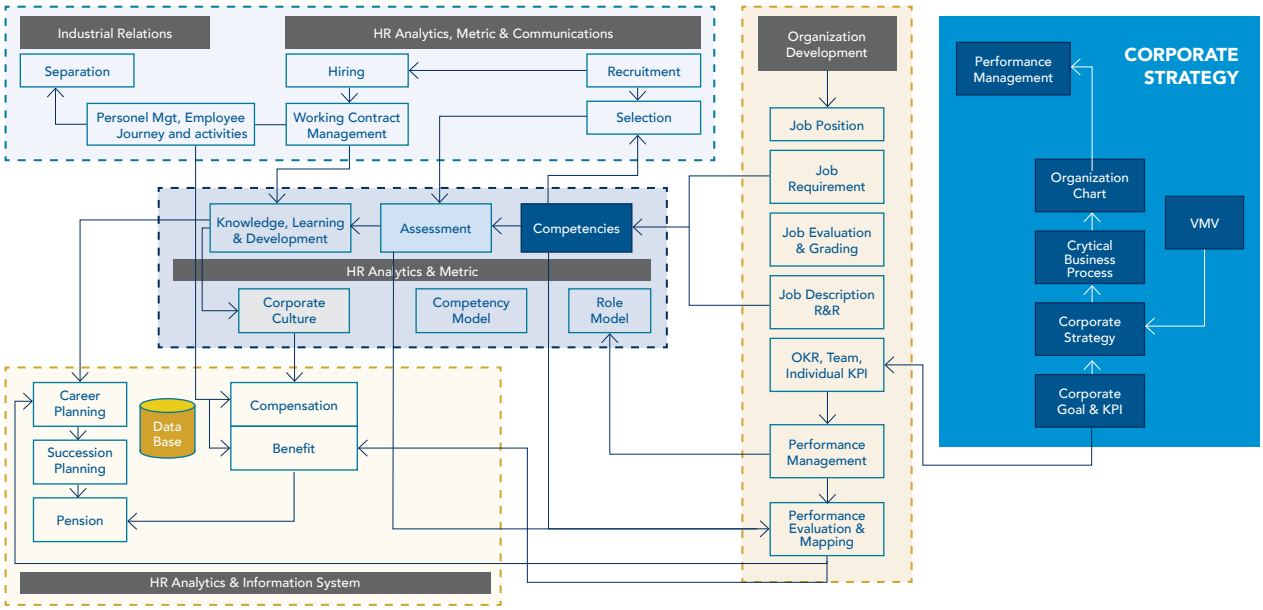
In addition, from the human capital aspect, ASABRI has also received The Best Human Capital 2022 and The Best Human Capital Director 2022 awards organised by Economic Review.

To continue the human capital strategic plan, in 2023, ASABRI Human Capital management will continue to be carried out in line with the Company's Long-Term Plan and Shareholder Aspirations. Some of the main focuses of human capital performance are:
1. Increasing the number of female talents;
2. Increasing the number of young talents;
3. Talent Development Program; and
4. Fulfilment of risk management organ classification.

HR MANAGEMENT STRATEGY

The company has implemented a financial restructuring program starting in 2020 through improved governance, cluster synergy optimisation, actuarial interest adjustment, UPSL submission, and asset recovery. From these Program, the contribution of Human Capital is required to be more adaptive and effective.

The depreciation of the company's investment assets not only affects employee productivity and profitability, but also the sustainability of the Company. To answer these challenges, ASABRI Human Capital actively plays a role in making changes in terms of long-term and short-term HR management in line with the direction of the Ministry of SOEs as described in the HR Architecture, as follows:



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SDM

Dalam rangka penguatan SDM, Perusahaan melaksanakan optimasi kapasitas Karyawan melalui penguatan *Human Capital Integrated System*, yang terdiri dari:

Rekrutmen

ASABRI memerlukan talenta unggul untuk kesuksesan eksekusi transformasi. Demi mendukung hal tersebut ASABRI telah menyusun kebijakan terkait perencanaan dan pengisian formasi sumber daya manusia, yang bersumber dari internal atau ekternal yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan sehingga pelaksanaan pengisian formasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien sebagai berikut:

Pengisian Formasi bersumber dari Internal

Strategi penting dalam mengoptimalkan potensi Karyawan internal yang telah berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang budaya serta operasional internal Perusahaan, akan membantu membangun stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan Perusahaan. Dalam implementasinya, Perusahaan telah melaksanakan Pengisian formasi melalui Rotasi atau Promosi dengan data sebagai berikut:

HR MANAGEMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

In order to strengthen human resources, the Company optimises employee capacity through strengthening the Human Capital Integrated System, which consists of:

Recruitment

ASABRI requires excellent talents for the successful execution of transformation. In order to support this, ASABRI has developed policies related to planning and filling human resource formations, which are sourced from internal or external sources that are adjusted to the competencies needed by the Company so that the implementation of filling formations is carried out effectively and efficiently as follows:

Filling of Internally Sourced Formations

An important strategy in optimising the potential of internal Employees who are experienced and have a deep understanding of the Company's culture and internal operations, will help build stability and sustainable growth within the Company. In its implementation, the Company has filled the formation through Rotation or Promotion with the following data:

Tahun Year	**Promosi** Promotion	**Rotasi** Rotation
2021	17	44
2022	52	181

Pengisian Formasi bersumber dari Eksternal

Langkah strategis dalam memperluas cakupan talenta yang bergabung ke dalam Perusahaan, dilakukan dengan membuka pintu bagi individu-individu yang membawa pengalaman, pandangan segar, keahlian baru, dan energi baru yang diperlukan untuk menjawab tantangan bisnis dan mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Pengisian formasi bersumber dari eksternal dilakukan dengan:

Multi Channel

ASABRI menciptakan jalur masuk yang beragam (*Multi Channel*), dengan 4 (empat) jalur masuk, yaitu:

1. Jalur Umum, dalam rangka mencari kandidat *fresh graduate* dengan pendidikan mulai dari Diploma IV sampai dengan Strata 2 (dua);
2. Jalur Profesional, dalam rangka mencari kandidat yang memiliki keahlian khusus/pengalaman/ manajerial;
3. Jalur khusus, dalam rangka mencari kandidat untuk tenaga kerja putra/putri daerah serta disabilitas; dan
4. Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL).

Filling of Externally Sourced Formations

The strategic move to broaden the scope of talent joining the Company is done by opening doors to individuals who bring experience, fresh perspectives, new skills, and new energy needed to address business challenges and achieve the Company's long-term goals, and new energy needed to address business challenges and achieve the Company's long-term goals. The filling of externally sourced formations is done by:

Multi Channel

ASABRI creates a diverse of entry channels (Multi Channel), with 4 (four) entry channels, namely:

1. General Pathway, in order to find fresh graduate candidates with education ranging from Diploma IV to Master's degree;
2. Professional Pathway, in order to find candidates who have special expertise/experience/managerial;
3. Special pathway, in order to find candidates for regional sons/daughters and disabled labour; and
4. Casual Daily Work Agreement (PKHL).

Jalur Pathway	**Jumlah** Total
Umum | General	25
Profesional | Professional	9
Khusus | Specialised	2
PKHL	-

Multi Platform

Selain jalur pencarian talent yang beragam (*multi channel*), untuk mencari SDM yang unggul ASABRI juga menggunakan media pencarian talent yang beragam (*multiplatform*) dengan:

1. FHCI *Integrated Recruitment System*
   Dilaksanakan melalui kegiatan Program Perekrutan Bersama (PPB) umum dan disabilitas dengan Kementerian BUMN dengan data sebagai berikut:

Multi Platform

In addition to various talent search channels (multi channel), to find superior human resources ASABRI also uses various talent search media (platforms) by:

1. FHCI Integrated Recruitment System
   Implemented through the general and disability Joint Recruitment Program (PPB) activities with the Ministry of Ministry of State Owned Enterprises with the following data:

Jenis | Type	**Jumlah |** Total
Umum | General	10
Disabilitas | Disability	2

2. *Job Posting*
   Dilaksanakan melalui internal Perusahaan baik menggunakan *website*, *headhunter, LinkedIn,* dan media lainnya.

2. Job Posting
   Implemented through the internal channels of the company, utilizing various mediums such as the website, headhunters, LinkedIn, and other media.

Pengembangan Kompetensi

Strategi Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Karyawan yang dilakukan oleh Perusahaan pada Tahun 2022 diawali dengan penyusunan *Learning Blueprint*. Dalam *Learning Blueprint,* ditetapkan 6 (enam) jenis program pengembangan sebagai berikut:

Competency Development

The Learning and Competency Development Strategy carried out by the Company in the year 2022 began with the formulation of a Learning Blueprint. In the Learning Blueprint, 6 (six) types of development Programs were determined as follows:



Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pencapaian Perusahaan dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi Karyawan tahun 2022 sesuai dengan *learning blueprint* sekaligus sebagai pencapaian KPI Manajemen Tahun 2022, yaitu terlaksananya Program Pengembangan Talenta *Level Staf* melalui Kegiatan *Officer Development Program* (ODP). Kegiatan *Officer Development Program* (ODP) bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan Karyawan Non Manajerial, membentuk Karyawan Non Manajerial yang *good performer,* dan tersedianya suksesor Karyawan Manajerial tingkat Kepala Bidang. Terdapat 51% (yang lulus program ODP) dari 214 Karyawan yang *eligible* mengikuti Program ODP Tahun 2022.

Implementation of Competency

The Company's achievement in the implementation of the Employee competency development program in 2022 is in accordance with the learning blueprint as well as the achievement of the Management KPI in 2022, namely the implementation of the Staff Level Talent Development Program through Officer Development Program (ODP) activities. The Officer Development Program (ODP) aims to accelerate the development of Non-Managerial Employees, form good performers of Non-Managerial Employees, and provide successors for Managerial Employees at the Department level. There were 51% (those who passed the ODP program) out of 214 eligible employees participating in the ODP program in 2022.

Ruang lingkup kegiatan/ tahapan program *Officer Development Program* (ODP) adalah Pre-ODP dan ODP *In-class*. Pada tahap *Pre-ODP* peserta mengikuti pembelajaran mandiri secara *online* dengan mengakses 5 (lima) modul *e-learning* dan standar kelulusan diperoleh dari *post test*. Peserta yang lulus Pre-ODP akan lanjut ke tahap ODP *In-Class* yang terdiri dari pembelajaran *online*, *Assignment, Coaching,* dan *Final Presentation*. Materi pembelajaran online yang diberikan. terdiri dari *Basic Leadership*, *Self Management*, *Communication & Collaborating*, *Customer Oriented*, *Goal Setting to Success*, *Planning, Organizing, Actuating & Controlling* (POAC), *Managing People*, *Time Management & Priority Setting* dan *Innovation for Growth.*

The scope of activities/stages of the Officer Development Program (ODP) are Pre-ODP and In-class ODP. In the Pre-ODP stage, participants follow online self-learning by accessing 5 (five) e-learning modules and the passing standard is obtained from the post test. Participants who pass the Pre-ODP will continue to the ODP In-Class stage which consists of online learning, Assignments, Coaching, and Final Presentation. The online learning materials provided include Basic Leadership, Self Management, Communication & Collaborating, Customer Oriented, Goal Setting to Success, Planning, Organising, Actuating & Controlling (POAC), Managing People, Time Management & Priority Setting, and Innovation for Growth.

Selain Program Pengembangan Talenta, program pembelajaran dan pengembangan kompetensi Karyawan yang dilaksanakan di Tahun 2022 dengan rincian program sebagai berikut:

In addition to the Talent Development Program, learning and competency development Program for employees were implemented in 2022 with the following program details:

No	Nama Kegiatan Activity Name	Realisasi Peserta Participant Realization
Program Wajib *Induction* Mandatory Induction Program		
1	*Onboarding Directorship* Angkatan 5 tahun 2022 Onboarding Directorship Batch 5 in 2022	1 Orang 1 Person
2	Program *Onboarding* Karyawan Tingkat Manajerial Tahun 2022 Managerial Level Employee Onboarding Program 2022	1 Orang 1 Person
3	*Onboarding* Karyawan Baru *Batch* 1 Tahun 2022 New Employee Onboarding Batch 1 Year 2022	7 Orang 7 Person
4	*Onboarding* Karyawan Baru *Batch* 2 Tahun 2022 New Employee Onboarding Batch 2 Year 2022	22 Orang 22 Person
5	Program Orientasi Karyawan Tingkat Manajerial PT ASABRI (Persero) PT ASABRI (Persero) Managerial Level Employee Orientation Program	2 Orang 2 Person
Program Reguler Individu Individual Regular Program		
Hard Kompetensi Hard Competence		
1	Webinar Aplikasi Penerapan PSAK 74 (Kontrak Asuransi) serta Perbedaan dengan PSAK 28, 36 dan 62 Webinar on the Application of PSAK 74 (Insurance Contracts) and Differences with PSAK 28, 36 and 62	5 Orang 5 Person
2	*Workshop* Manajemen Risiko Klaster BUMN Asuransi dan Dana Pensiun perihal "Penguatan Implementasi ERM Terintegrasi pada Perusahaan Konglomerasi Keuangan" Workshop on Risk Management for BUMN Insurance and Pension Fund Clusters regarding "Strengthening the Implementation of Integrated ERM in Financial Conglomerate Companies"	8 Orang 8 Person
3	Pelatihan dan uji Pemahaman Penerapan Manajemen Risiko Klaster Asuransi dan Dana Pensiun *Batch* II Batch II Insurance and Pension Fund Cluster Risk Management Awareness Training and test	3 Orang 3 Person
4	*Webinar* PAI CPD *Sweeping* 2021 PAI CPD Sweeping 2021 Webinar	1 Orang 1 Person
5	*Workshop* dan Pendampingan Penyusunan *Cascading* KPI Tahun 2022 Workshop and Assistance in Cascading KPIs in 2022	62 Orang 62 Person
6	Pelatihan dan *Workshop* Pengkinian Proses Bisnis Business Process Update Training and Workshop	17 Orang 17 Person
7	Pelatihan *Developing* API *Using* NodeJS Training on Developing API Using NodeJS	3 Orang 3 Person
8	Pelatihan dan uji Pemahaman Penerapan Manajemen Risiko Klaster Asuransi dan Dana Pensiun *Batch* I Batch I Insurance and Pension Fund Cluster Risk Management Awareness Training and test	3 Orang 3 Person

No	Nama Kegiatan Activity Name	Realisasi Peserta Participant Realization
9	Kegiatan *Sharing Session* Gratifikasi Gratification Sharing Session Activity	60 Orang 60 Person
10	Lokakarya Pengembang JOGET DX JOGET DX Developer Workshop	2 Orang 2 Person
11	*Workshop* Analisis Beban Kerja (ABK) Workload Analysis Workshop	18 Orang 18 Person
12	Pelatihan Mandiri SAI Tahun 2022 SAI Self-Training in 2022	16 Orang 16 Person
13	Seminar "*5th Indonesian Actuaries Summit*" Seminar "5th Indonesian Actuaries Summit"	3 Orang 3 Person
14	*Workshop* Audit Berbasis Manajemen Risiko Risk Management Based Audit Workshop	11 Orang 11 Person
15	*Strategic Discussion Forum & Critical Business Insight: "Investment Startegies and Portofolio Management"*	2 Orang 2 Person
16	*Sharing Session* Pembahasan Sita Atas Tanah/Bangunan Yang Dijadikan Jaminan Dalam Reksa Dana Sharing Session on Confiscation of Land/Buildings Used as Collateral in Mutual Funds	10 Orang 10 Person
17	*Webinar Credit Life Management*	1 Orang 1 Person
18	IAMI *Management Accountants Conference* 2022	1 Orang 1 Person
19	Forum Anti Gratifikasi Tahun 2022 Anti Gratification Forum in 2022	2 Orang 2 Person
20	Program *Reguler Corporate* Pengadaan Barang dan Jasa Corporate Regular Program on Goods and Services Procurement	93 Orang 93 Person
21	Program *Finance For Non Finance Manager* (BoD-2) Klaster Jasa Asuransi Dan Dana Pensiun Finance For Non Finance Manager (BoD-2) Program Insurance and Pension Fund Services Cluster	6 Orang 6 Person
22	Konferensi Nasional Profesional MR VIII - "ESG *Investing and Risk Mitigation*" MR VIII National Professional Conference - "ESG Investing and Risk Mitigation"	1 Orang 1 Person
23	Pelatihan *Certified Risk Management Officer* (CRMO) Certified Risk Management Officer (CRMO) Training	2 Orang 2 Person
24	Pelatihan PSAK 71 PSAK 71 Training	19 Orang 19 Person
Soft Kompetensi Soft Competence		
1	*Miniclass Training "Situasional Leadership"*	20 Orang 20 Person
2	Program CFO *School* Tahun 2022 CFO School Program in 2022	1 Orang 1 Person
3	*Webinar Digital Leadership* untuk Memperkuat Transformasi Digital Digital Leadership Webinar to Strengthen Digital Transformation	5 Orang 5 Person
4	*Sharing Session "Improving Customer interaction Through Digital Transformation"*	500 Orang 500 Person
5	BoD-2 *Development Program* Klaster Asuransi dan Dana Pensiun BoD-2 Insurance and Pension Fund Cluster Development Program	4 Orang 4 Person
6	*National Human Capital Conference & Indonesia Human Capital Award*-VIII-2022	5 Orang 5 Person
7	Webinar BUMN *Series "Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN)*	3 Orang 3 Person
8	Program Pengembangan BoD-1 Tahun 2022 BoD-1 Development Program Year 2022	50 Orang 50 Person
9	Pelatihan *Change Management For Professional* Change Management Training For Professionals	2 Orang 2 Person
10	*Halfday* Seminar *Leading Through Crisis For Young Leaders*	1 Orang 1 Person

No	Nama Kegiatan Activity Name	Realisasi Peserta Participant Realization
11	*Change Agent Development Program*	3 Orang 3 Person
12	Bimbingan Teknis Dan *Workshop* Pengukuran Dampak Program TJSL *Metode Social Return-on-Investment (SROI) Batch II* Technical Guidance and Workshop on Measuring the Impact of Social Return-on-Investment (SROI) Program Batch II	2 Orang 2 Person
13	*Workshop Program Digital Talent* BUMN	2 Orang 2 Person
14	Pelatihan *Managing People for Productivity* Training on Managing People for Productivity	2 Orang 2 Person
15	Pelatihan *Design Thinking for Business Innovation* Design Thinking for Business Innovation Training	1 Orang 1 Person
16	Pelatihan *Building Quality Into Processes and Digital Transformation* 4.0 Training on Building Quality Into Process and Digital Transformation 4.0	1 Orang 1 Person
17	Pelatihan *Problem Solving & Decision Making* Problem Solving & Decision Making Training	1 Orang 1 Person
18	Pelatihan *Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices* dengan Tema: *Optimizing The Future Role of Corporate Secretary "Challenge, Issues & Opportunities* Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices Training with the Theme: Optimising the Role of Corporate Secretary in the Future "Challenges, Issues & Opportunities	1 Orang 1 Person
19	Pelatihan *Effective Presentation Skill* Effective Presentation Skill Training	2 Orang 2 Person
20	Pelatihan *Strategic Corporate Culture* Strategic Corporate Culture Training	2 Orang 2 Person
21	Webinar BUMN Series "*Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise* (BUMN)	3 Orang 3 Person
22	*Event Mentorship* BUMN Muda Young SOE Mentorship Event	1 Orang 1 Person
23	*Leader's Talk* Indonesia *Insurance and Pension Fund Learning Institute*	2 Orang 2 Person
24	Pelatihan *Creativity & Innovation Development* Creativity & Innovation Development Training	2 Orang 2 Person
25	Pelatihan HR Expo HR Expo Training	6 Orang 6 Person
26	*Sharing Session Digital Mindset*	16 Orang 16 Person
27	Kegiatan *Building Indonesia's Future Through Learning* Building Indonesia's Future Through Learning	2 Orang 2 Person
28	Program Pengembangan Talenta Perempuan Manajerial BoD-1 BoD-1 Managerial Women Talent Development Program	8 Orang 8 Person
Program Reguler *Corporate* Regular Corporate Program		
1	Program *Reguler Corporate* Modul Pembelajaran "*Core Value* AKHLAK" Corporate Regular Program Learning Module "Core Value AKHLAK"	190 Orang 190 Person
2	*Program Reguler Corporate Modul Business Acumen* Corporate Regular Program Business Acumen Module	202 Orang 202 Person
3	Program *Reguler Corporate* Modul "Standar Layanan" Corporate Regular Program "Service Standard" Module	233 Orang 233 Person
4	Program *Reguler Corporate* Manajemen Risiko Corporate Regular Program Risk Management	67 Orang 67 Person
Program Pengembangan Talenta Talent Development Program		
1	*Officer Development Program*	131 Orang 131 Person

No	Nama Kegiatan Activity Name	Realisasi Peserta Participant Realization
Program Khusus Special Program		
Beasiswa Scholarship		
1	Strata S-2 Master's Degree	3 Orang 3 Person
Sertifikasi Certification		
1	Pelatihan dan Uji Sertifikasi *Certified Financial Planner* (CFP) Training and Certification Test for Certified Financial Planner (CFP)	1 Orang 1 Person
2	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen "*Certified Risk Governance Professional* (CRGP)" Management Training and Certification "Certified Risk Governance Professional (CRGP)"	6 Orang 6 Person
3	Ujian Sertifikasi Aktuaris Periode I April Tahun 2022 Actuary Certification Exam Period I April, 2022	2 Orang 2 Person
4	Pelatihan dan Sertifikasi *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP) Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) Training and Certification	1 Orang 1 Person
5	Sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Indonesian Death Insurance Association (AAJI) Certification	10 Orang 10 Person
6	Pelatihan dan Uji Sertifikasi Asesor Kompetensi BNSP BNSP Competency Assessor Training and Certification Test	1 Orang 1 Person
7	Ujian Profesi Sertifikasi Aktuaris Periode II Tahun 2022 Actuary Certification Professional Exam Period II Year 2022	3 Orang 3 Person
8	Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resource Management Professional Certification	1 Orang 1 Person
9	Sertifikasi Bidang SDM HR Field Certification	2 Orang 2 Person
10	Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (QIA) Qualified Internal Audit (QIA) Certification	2 Orang 2 Person
Program Wajib *Separation* Mandatory Separation Program		
1	Persiapan Masa Pensiun Retirement Preparation	10 Orang 10 Person

Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2022

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan kapasitas dan kapabilitas Karyawan demi meningkatkan daya saing Karyawan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi Karyawan, seperti pendidikan, pelatihan-pelatihan, *workshop*, seminar, *assignment, coaching, self learning* dan kegiatan konstruktif lainnya.

Perseroan menetapkan pengembangan kompetensi Karyawan sebagai program kerja utama. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam upaya melahirkan Karyawan yang andal dan berkompeten sehingga mampu bersaing di level nasional bahkan internasional, serta mampu menjawab tuntutan bisnis Perseroan dalam usaha mencapai target seperti yang diharapkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Adapun alokasi anggaran untuk program pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2022 sebesar 5% dari total biaya Karyawan yaitu ,-. Selama tahun 2022, realisasi biaya pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 49% dari alokasi anggaran Tahun 2022.

Competency Development Costs in 2022

The Company is committed to continuously developing the capacity and capability of its employees in order to improve their competitiveness. To realise this, the Company consistently allocates budget for Employee competency development activities, such as education, trainings, workshops, seminars, assignments, coaching, self-learning and other constructive activities.

The Company sets Employee competency development as a primary work program. This reflects The Company's commitment in an effort to produce reliable and competent employees who are able to compete at both the national and international levels, and are able to answer the Company's business demands in an effort to achieve targets as expected by shareholders and stakeholders. The budget allocation for the Human Resources development program in 2022 is 5% of the total Employee costs, which is . During 2022, the realised cost of implementing the Human Resources development program was 49% of the 2022 budget allocation.

Realisasi Anggaran
Budget Realization

2021	2022

Sesuai dengan data pada tabel di atas, terdapat peningkatan realisasi biaya sebesar 84,7% dari 2021. Hal ini disebabkan karena program pembelajaran lebih terarah sesuai dengan *learning blueprint* yang disusun dengan pelaksanaan yang fokus pada pemenuhan *gap* pengembangan kompetensi Karyawan.

In accordance with the data in the table above, there is an increase in cost realization of 84.7% from 2021. This is because the learning program is more focused aligned with accordance with the learning blueprint prepared with implementation that focuses on fulfilling the competency development gap of Employees.

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Karyawan dalam lima tahun terakhir
Employees in the last five years

Tahun Year	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total	**486**	**516**	**507**	**500**	**498**

Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employees Based on Organization Level

Level Organisasi Organization Level	2021			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Manajemen Tingkat Menengah Mid-level Management	38	8	46	39	8	47
Manajemen Lini Pertama First-line Management	32	26	58	36	27	63
Staf Staff	219	177	396	205	183	388
Jumlah Total	**289**	**211**	**500**	**280**	**218**	**498**

Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employees Based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2021			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
S3 | Postgraduate	0	0	0	0	0	0
S2 | Master Degree	22	14	36	22	17	39
S1 | Bachelor Degree	187	163	350	192	176	368
Akademi Academy	36	28	64	32	22	54
SLTA Senior High School	42	6	48	32	3	35
SLTP Junior High School	1	0	1	1	0	1
SD Elementary School	1	0	1	1	0	1
Jumlah Total	**289**	**211**	**500**	**280**	**218**	**498**

Karyawan Berdasarkan Usia
Employees Based on Age

Usia Age	2021			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
20-29	66	91	157	63	94	157
30-39	104	78	182	108	82	190
40-49	67	25	92	67	30	97
50-59	51	13	64	42	12	54
60 ke atas 60 and up	1	4	5	0	0	0
Jumlah | Total	**289**	**211**	**500**	**280**	**218**	**498**

Karyawan Berdasarkan Status
Employees Based on Status

Status Status	2021			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Karyawan Tetap Permanent Employees	284	211	495	262	201	463
Karyawan Tidak Tetap Non-permanent Employees	5	0	5	18	17	35
Jumlah | Total	**289**	**211**	**500**	**280**	**218**	**498**

Kesetaraan *Gender* dan Persamaan Hak

ASABRI menjamin kesempatan kerja dan karier yang sama tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, ras, jenis kelamin, status pernikahan, orientasi seksual, warna kulit, ataupun indikator lainnya yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk-bentuk diskriminasi. ASABRI menentukan peluang kerja dan karier Karyawan dengan melihat potensi, kinerja, dan perilaku individu.

1. Kesetaraan kesempatan bekerja di ASABRI dilihat dari data jenis kelamin berdasarkan jabatan tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Gender Equality and Equal Rights

ASABRI guarantees equal employment and career opportunities without discrimination based on ethnicity, religion, belief, race, gender, marital status, sexual orientation, skin colour, or other indicators that can be interpreted as forms of discrimination. ASABRI determines employment and career opportunities for employees based on individual potential, performance, and behaviour.

1. Equality of employment opportunities at ASABRI as seen from gender data based on positions in 2021 and 2022, is as follows:

Tabel Rekapitulasi Jenis Kelamin Karyawan Kantor Pusat
Table of Head Office Employee Gender Recapitulation

No	Jabatan Position	2021			2022		
		Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total
		Pria Male	Wanita Female		Pria Male	Wanita Female	
1	Kepala Divisi Head of Division	11	3	14	13	3	16
2	Kepala *Desk* Head of Desk	1	0	1	0	0	0
3	Kepala Bidang Head of Field	14	20	34	19	21	40
4	Staf Ahli/Staf Analis Expert Staff/Analyst Staff	1	1	2	3	0	3
5	Staf Staff	117	105	222	107	105	212
Jumlah | Total		**144**	**129**	**273**	**142**	**129**	**271**

Tabel Rekapitulasi Jenis Kelamin Karyawan Kantor Cabang
Table of Recapitulation of Branch Office Employee Gender

No	Jabatan Position	2021			2022		
		Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total	Jenis Kelamin Gender		Jumlah Total
		Pria Male	Wanita Female		Pria Male	Wanita Female	
1	Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	26	5	31	26	5	31
2	Kepala Bidang Head of Field	18	6	24	17	6	23
3	Staf Ahli/Staf Analis Expert Staff/Analyst Staff	1	0	1	2	0	2
4	Staf Staff	100	71	171	93	78	171
Jumlah | Total		**145**	**82**	**227**	**138**	**89**	**227**

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Badan Usaha Milik Negara wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah Karyawan. Sampai dengan tahun 2021, ASABRI telah merekrut 2 (dua) orang Karyawan dengan disabilitas pada tahun 2021 bekerja sama dengan Forum *Human Capital* Indonesia (FHCI) pada Program Perekrutan Bersama (PPB) BUMN 2021. Kesetaraan kesempatan bekerja di ASABRI dapat dilihat dari data Karyawan dengan disabilitas pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

In accordance with Law Number 8 of 2016 dated April 15, 2016 concerning Persons with Disabilities, State-Owned Enterprises are required to employ at least 2% of employees with disabilities. Until 2021, ASABRI has recruited 2 (two) employees with disabilities in 2021 in collaboration with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) in the 2021 BUMN Joint Recruitment Program (PPB). Equality of opportunity to work at ASABRI can be seen from the data of Employees with disabilities from 2019 to 2021 as follows:

Tabel Kesetaraan Karyawan Disabilitas
Table of Disabled Employee Equality

Karyawan Disabilitas Disabled Employees	Kantor Pusat Head Office			Kantor Cabang Branch Office		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Jumlah Total	**1**	**2**	**2**	**0**	**0**	**3**

2. Kesetaraan kesempatan bekerja di ASABRI dapat dilihat dari data keberagaman agama Karyawan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

2. Equal employment opportunities at ASABRI can be seen from the diversity of employees religions in 2020 and 2021, as follows:

Tabel Kesetaraan Karyawan Berdasarkan Keberagaman Agama
Table of Employee Equality Based on Religious Diversity

Agama Religion	Kantor Pusat Head Office		Kantor Cabang Branch Office	
	2021	2022	2021	2022
Islam	255	250	183	185
Hindu	3	3	9	8
Katolik	4	5	6	7
Protestan Protestant	11	13	29	27
Jumlah Total	**273**	**271**	**227**	**227**

Pengembangan Karier

Kebijakan

Dalam mengembangkan Karier Karyawan, Perusahaan telah menyusun ketentuan terkait jalur karier dan mekanisme pengelolaan *Grade* melalui Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PS.10/28-AS/XII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan *Grade* dan Karier Karyawan. Terdapat 2 (dua) jalur karier yang dapat dilalui Karyawan yaitu:

a. Jalur Karier Jabatan Struktural
   Jalur karier pada jabatan yang terdapat pada struktur organisasi
b. Jalur Karier Jabatan Fungsional
   Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Identifikasi Talenta

Talenta Perusahaan diidentifikasi ke dalam *talent box* yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan talenta Karyawan untuk menentukan suksesor jabatan manajerial. *Talent Box* terdiri dari 9 (sembilan) kuadran, sebagai berikut

Career Development

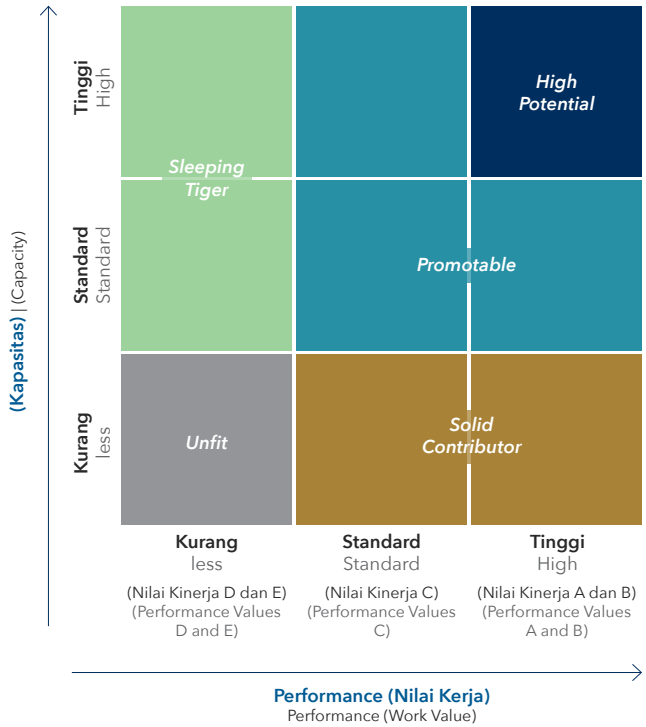
Policy

In developing Employee Careers, the Company has established provisions regarding career paths and the management mechanism of grades through the Board of Directors Decree of PT ASABRI (Persero) Number PER/PS.10/28-AS/XII/2022 concerning Guidelines for Grade Management and Employee Careers. There are 2 (two) career paths that can be travelled by Employees, namely:

a. Structural Position Career Path
   Career path within positions found in the Organizational structure
b. Functional Position Career Path
   A position that contains functions and duties based on certain expertise and skills.

Talent Identification

The Company's talents are identified into a talent box which is used as a reference in mapping Employee talents to determine successors for managerial positions. The Talent Box consists of 9 (nine) quadrants, as follows:



Pemetaan talenta dalam *Talent Box* ditentukan sesuai dengan:

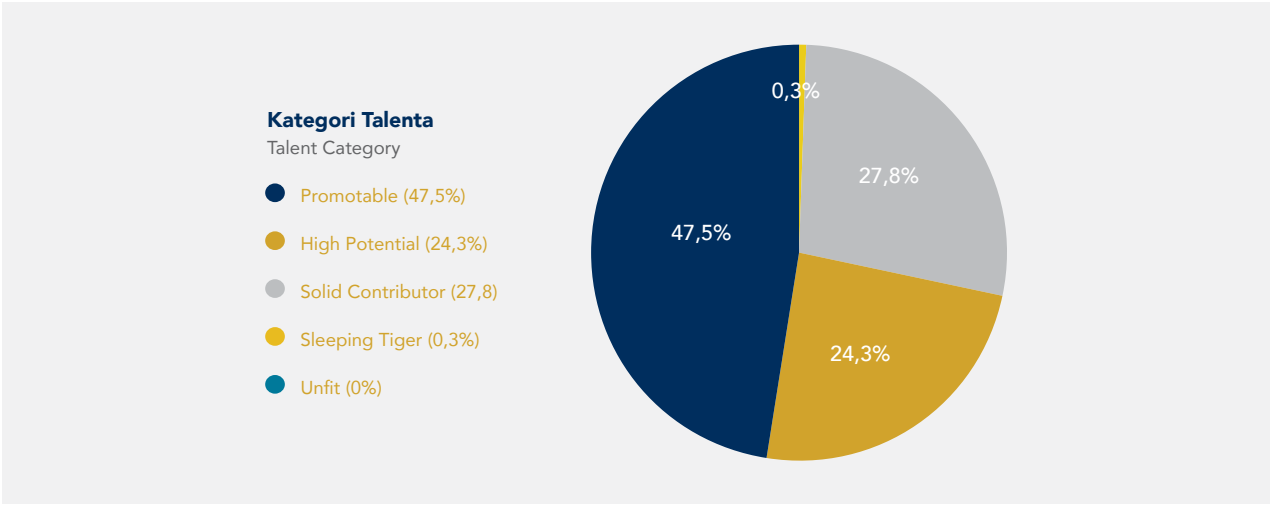
1. Tingkat kapasitas Karyawan, yang indikator pengukurannya ditetapkan dalam ketentuan terkait kriteria pengukuran kapasitas karyawan; dan
2. Klasifikasi Nilai Kinerja Karyawan, yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Karyawan.

Talent mapping in the Talent Box is determined in accordance with:

1. Employee capacity level, whose measurement indicators are stipulated in the provisions related to employee capacity measurement criteria; and
2. Classification of Employee Performance values, as regulated in the Board of Directors Regulation on Employee Performance Management System Guidelines.

Pada Tahun 2022, Perusahaan berhasil mengidentifikasi tingkat kapasitas Karyawan sebanyak 345 orang Karyawan dari total keseluruhan Karyawan yang berjumlah 498 orang. Sehingga dari data tingkat kapasitas dan nilai kinerja tahun 2022, Perusahaan telah mengidentifikasi talenta Karyawan sebagai berikut:

In 2022, the Company successfully identified the capacity level of 345 employees out of a total of 498 employees. Therefore, based on the data of capacity levels and performance value in 2022, the Company has identified Employee talents as follows:

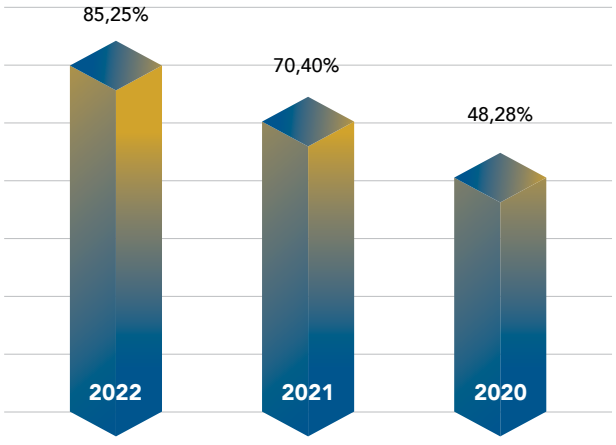


Talenta Perusahaan

Perusahaan saat ini secara bertahap melakukan optimasi proses kaderisasi dalam rangka pengisian jabatan manajerial melalui penyusunan *succession planning* untuk mempersiapkan Karyawan menjadi kader suksesi untuk mengisi jabatan manajerial yang lebih tinggi dengan pencapaian sebagai berikut:

Company Talent

The Company is currently undergoing a gradual optimization of the regeneration process for managerial position fulfillment through the development of succession planning to prepare employees to become succession cadres to fill higher managerial positions, with achievements as follows:



Dalam rangka persiapan pemenuhan talenta, tahun 2022, ASABRI telah melaksanakan program akselerasi bagi Karyawan level Staf dengan hasil sebesar 51% Karyawan level staf yang memenuhi syarat untuk masuk jalur karier Akselerasi.

In preparation for talent fulfillment, in 2022, ASABRI has implemented an acceleration program for staff-level Employees with the result of 51% of staff-level employees meeting the criteria to enter the Acceleration career path.

Penilaian Kinerja

ASABRI terus berupaya dalam mewujudkan *performance driven culture* yang berkelanjutan, menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Karyawan pada Tahun 2021 yang mengatur terkait aspek penilaian terdiri dari:

1. Hasil Kerja;
2. Perilaku Kerja;
3. Prestasi Kerja;
4. Pelanggaran Disiplin.

Pada Tahun 2022 Pelaksanaan sistem manajemen kinerja Karyawan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
   Perencanaan Kinerja dalam rangka penyusunan KPI Individu Karyawan disusun berdasarkan KPI Perusahaan yang diturunkan secara berjenjang mulai dari Direktorat, Unit Kerja sampai dengan Bidang.
2. Penilaian Kinerja
   Hasil Kerja, yang penilaiannya dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
3. Perilaku Kerja, yang penilaiannya dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
   Pelaksanaan *Feedback* dan *Coaching*, dilakukan setiap triwulan.

Pencapaian kinerja Perusahaan yang baik juga ditunjukkan dengan keselarasan pada penilaian KPI Individu Karyawan. Hasil penilaian kinerja karyawan tahun 2022 menunjukkan total pekerja yang mendapatkan penilaian *exceed* atau melebihi target adalah sebesar 68.07%.

Performance Assessment

ASABRI continues to strive towards achieving a sustainable performance driven culture by establishing the Board of Directors Regulation on Employee Performance Management System Guidelines in 2021, which regulates aspects of assessment, including:

1. Work Result;
2. Work Behaviour;
3. Work Achievement;
4. Disciplinary Offences.

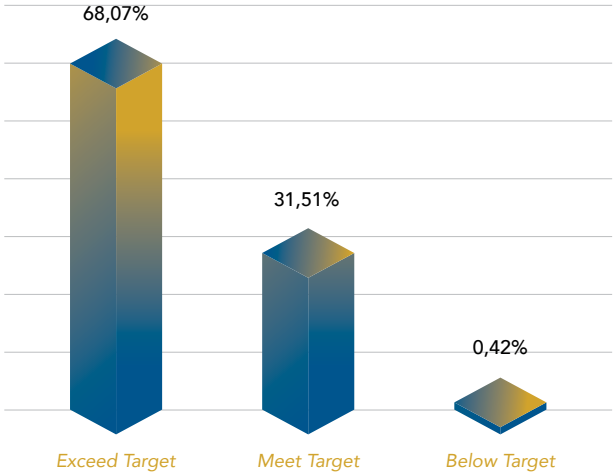
In 2022 Implementation of the Employee performance management system, as follows:

1. Performance Planning
   Performance Planning involves the formulation of individual employee KPIs is prepared based on the Company's KPIs, cascading from the Directorate, Work Units, to Departments.
2. Performance Assessment
   Work results are assessed annually.

3. Work Behaviour, is assessed every 6 (six) months.

   Implementation of Feedback and Coaching, conducted quarterly.

The Company's good performance achievement are also demonstrated with alignment in the assessment of Individual Employee KPIs. The results of the employee performance appraisal in 2022 showed that the total number of workers who received an assessment exceeding or exceeding the target was 68.07%.



Remunerasi

Kebijakan

Perusahaan telah menyusun dan memberlakukan Peraturan Direksi sebagai dasar pembayaran seluruh penghasilan yang diberikan kepada Karyawan yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PS.10/17-AS/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Struktur Penghasilan Karyawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PS.10/27-AS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Struktur Penghasilan Karyawan.

Jenis Penghasilan

1. Penghasilan Tetap
   a. Gaji Pokok
   b. Tunjangan Jabatan
   c. Tunjangan Komunikasi
   d. Tunjangan Transportasi
2. Pengahasilan Tidak Tetap
   a. Tunjangan Sertifikasi
   b. Tunjangan Kehadiran
   c. Insentif Kinerja
   d. Insentif Kerja Tambahan
   e. Tunjangan Hari Raya
   f. Tunjangan Kemahalan Daerah
   g. Tunjangan Mandat
   h. Tunjangan Lembur
   i. Tunjangan PPh 21
   j. Jasa Produksi

Manfaat

1. Bantuan Uang Cuti
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Jaminan Sosial Kesehatan
4. Jaminan Purna Tugas
5. Tunjangan Kematian
6. Jaminan Kesehatan Karyawan dan Keluarga
7. Tunjangan Penempatan
8. Tunjangan Kunjungan Keluarga
9. Bantuan Uang Sosial
10. Bantuan Uang Duka
11. Natura
12. Kendaraan Dinas
13. Penghargaan Purna Tugas
14. Pakaian Kerja

Sejalan dengan strategi remunerasi ASABRI tahun 2022, ASABRI memberikan insentif kepada Karyawan yang ditentukan berdasarkan kinerja tahun 2022, sehingga kompensasi yang diterima oleh Karyawan berbanding lurus dengan kontribusi Karyawan. Sementara dari aspek *compliance*, ASABRI telah menyesuaikan besaran upah Karyawan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Remuneration

Policy

The Company has prepared and implemented Director's regulations as the basis for payment of all income provided to Employees as stipulated in the Director's Regulations of PT ASABRI (Persero) Number PER/PS.10/17-AS/XII/2021 dated December 9, 2021 regarding Employee Income Structure as has been amended by the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/PS.10/27-AS/XII/2022 dated December 20, 2022 regarding Employee Income Structure.

Types of Income

1. Fixed Income
   a. Basic Salary
   b. Position Allowance
   c. Communication Allowance
   d. Transport Allowance
2. Non-permanent income
   a. Certification Allowance
   b. Attendance Allowance
   c. Performance Incentive
   d. Additional Work Incentive
   e. Holiday Allowance
   f. Regional Expense Allowance
   g. Mandate Allowance
   h. Overtime Allowance
   i. Income Tax 21 Allowance
   j. Production Services

Benefits

1. Holiday allowance
2. Labour Social Security
3. Health Social Security
4. After Duty Insurance
5. Death Benefits
6. Employee and Family Health Insurance
7. Placement Allowance
8. Family visit allowance
9. Social Money Support
10. Funeral Allowance
11. Natura
12. Service Vehicle
13. After Duty Award
14. Work Clothes

In line with ASABRI 2022 remuneration strategy, ASABRI provides incentives to employees determined based on performance in 2022, so the compensation received by employees is directly proportional to employee contributions. Meanwhile, from the compliance perspective, ASABRI has adjusted the salary of Employees to the Provincial Minimum Wage (UMP).

Employee Engagement

ASABRI menyadari sepenuhnya bahwa Karyawan merupakan aset utama Perseroan untuk mencapai kesinambungan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karenanya, ASABRI berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyempurnaan atas implementasi strategi pengelolaan SDM. Dalam rangka mendapatkan *feedback*, serta sarana bagi Karyawan untuk menyampaikan aspirasinya terkait implementasi strategi pengelolaan SDM, ASABRI secara konsisten melakukan pengukuran tingkat keterikatan Pekerja melalui *Employee Engagement Survey (EES).* Dari hasil survei dimaksud, data menunjukkan bahwa indeks *engagement* Karyawan ASABRI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

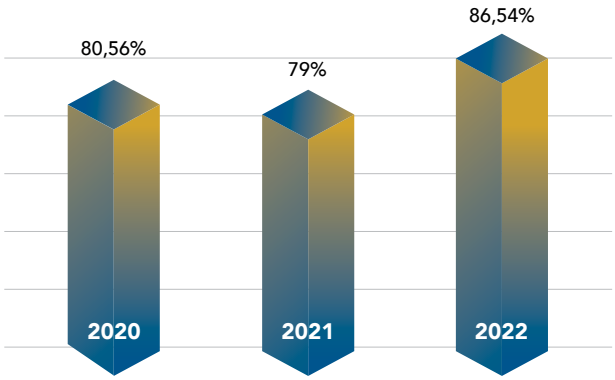
Di tahun 2022, indeks *engagement* 86,54 dari skala 100, meningkat dari tahun 2021 79 dari skala 100.

Employee Engagement

ASABRI fully realises that Employees are the Company's main asset to achieve sustainable performance. Therefore, ASABRI is committed to continuously refining the implementation of HR management strategies. In order to obtain feedback, and provide a platform for employees to express their aspirations regarding the implementation of HR management strategies, ASABRI consistently measures the level of Employee engagement through the Employee Engagement Survey (EES). From the survey results, the data indicates that the ASABRI Employee engagement index has increased from year to year.

In 2022, the engagement index was 86.54 on a scale of 100, an increase from 79 out of 100 in 2021.

Skor *Engagement* Karyawan
Employee Engagement Score



Internalisasi Budaya

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi penerapan *core values* AKHLAK dibuatlah Panduan Pelaksanaan AKHLAK *Culture Journey* oleh Kementerian BUMN yang memuat tahapan-tahapan yang sudah dilakukan Perusahaan BUMN terhadap penerapan AKHLAK di antaranya:

Tahap Awal *(Initial)*

1. Komunikasi oleh Para Pimpinan
2. Pembentukan Agen Perubahan
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pengenalan Budaya

Tahap Intervensi *(Intervention)*

1. Komitmen Pimpinan (*Leadership*)
2. Sistem (*System*)
3. Simbol (*Symbol*)

Tahap Penerimaan *(Acceptance)*

1. Memahami (*Knowing*)
2. Menerima (*Receiving*)
3. Memengaruhi (*Influencing*)

Culture Internalisation

In order to optimise the implementation of the core values of AKHLAK, the Ministry of State-Owned Enterprises has developed the Implementation Guide for the AKHLAK Culture Journey, which contains the stages that have been carried out by SOEs towards the implementation of AKHLAK including:

Initial Stage

1. Communication by Leaders
2. Formation of Change Agents
3. Organization of Culture Introduction Activities

Intervention Stage

1. Leadership Commitment
2. System
3. Symbol

Acceptance Stage

1. Understanding (Knowing)
2. Receiving
3. Influencing

Tahap Perubahan *(Behavior Change)*

merupakan tahap di mana SDM BUMN secara sadar telah menerapkan *core values* AKHLAK dalam kegiatan sehari-hari. Setiap individu diukur minimal oleh seluruh individu dalam unit terkecil yang telah saling mengenal sekurang-kurangnya minimal 3 (tiga) bulan.

Perusahaan telah mengimplementasikan AKHLAK *Culture Journey* sebagai berikut:

1. *Core Values* AKHLAK terkomunikasikan dengan baik oleh Pemimpin di Perusahaan dan mendukung implementasi AKHLAK di lingkungan PT ASABRI (Persero);
2. Memiliki *change agent* yang bertugas sebagai motor penggerak/inisiator dari transformasi budaya di unit kerjanya masing-masing;
3. Integrasi *Core Values* AKHLAK dengan Sistem Manajemen Kinerja Karyawan. Selain itu *Core Values* AKHLAK digunakan sebagai kompetensi dalam pengukuran Kapasitas Karyawan;
4. *Core Values* AKHLAK mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui kebijakan saing menghargai di lingkungan PT ASABRI (Persero) yang diterjemahkan dalam *Respectful Workplace Policy* (RWP);
5. Aktivasi Kegiatan Budaya melalui *gamification, webinar,* dan *competition* di lingkungan PT ASABRI (Persero).

Human Capital System dan *Infrastructure*

ASABRI terus melakukan pengembangan teknologi untuk mendukung digitalisasi *Human Capital* dengan membangun *integrated human capital information system* sebagai berikut:

Behavior Change Stage

is the stage where SOE HR has consciously apply the core values of AKHLAK in their daily activities. Each individual is measured at least by every individual in the smallest unit who has known each other for at least 3 (three) months.

The company has implemented the AKHLAK Culture Journey as follows:

1. The AKHLAK Core Values are well communicated by leaders in the Company and support the implementation of AKHLAK within PT ASABRI (Persero);
2. Having change agents responsible as the driving force/initiator of cultural transformation in their respective work units;
3. Integration of AKHLAK Core Values with Employee Performance Management System. In addition, AKHLAK Core Values are used as competencies in measuring Employee Capacity;
4. AKHLAK core values support the creation of an inclusive environment, respecting differences and equality, as well as upholding human rights through a respectful policy within PT ASABRI (Persero) which is translated into the Respectful Workplace Policy (RWP);
5. Activation of Cultural Activities through gamification, webinars, and competitions within PT ASABRI (Persero) environment.

Human Capital System and Infrastructure

ASABRI continues to develop technology to support the digitalisation of Human Capital by building an integrated human capital information system as follows:



Rencana Kerja SDM Tahun 2023

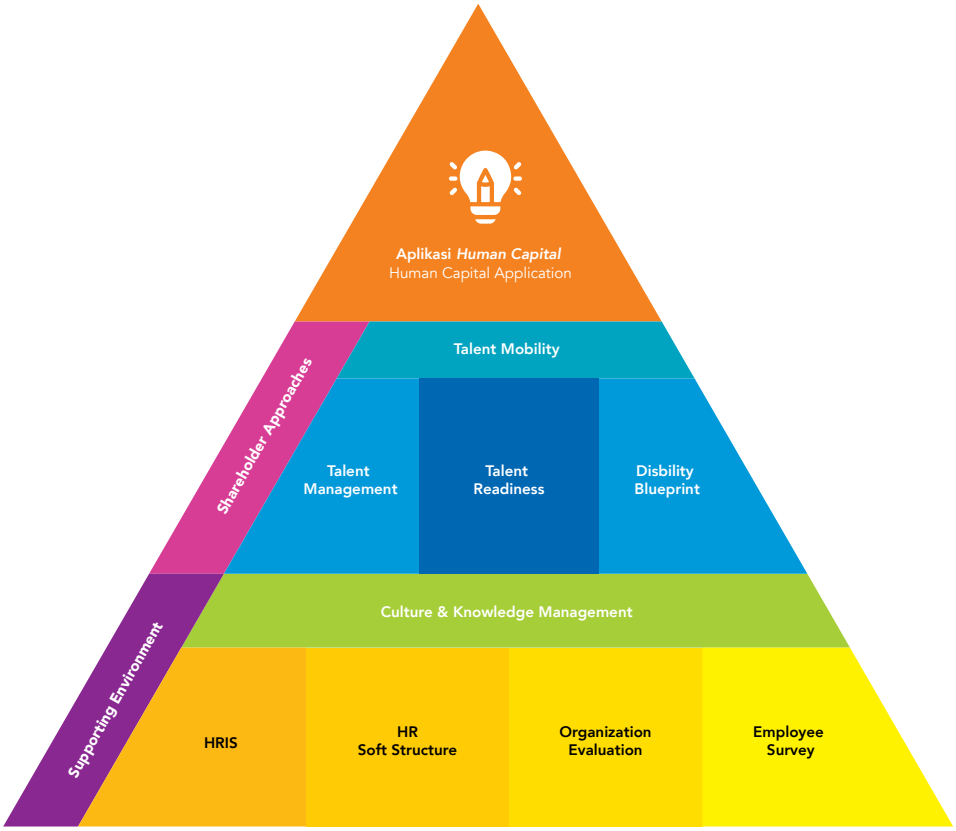
ASABRI memiliki rencana kerja SDM yang bertujuan untuk memastikan tersedianya *succession planning, knowledge management,* dan *culture* yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 dan *Shareholder Aspiration.* Pada tahun 2022, ASABRI telah berhasil melaksanakan percepatan *succession planning* melalui *accelerated development program* yang menghasilkan peningkatan pertumbuhan *internal leader* pada posisi BoD-1 yaitu pada tahun 2022 sebesar 61.11% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 31,25%.

Untuk mendukung program dan kinerja, Perusahaan akan membangun *strategic approaches* dengan *supporting environment* sebagai berikut:

HR Work Plan 2023

ASABRI has a human resources work plan aimed at ensuring the availability of succession planning, knowledge management, and culture aligned with the Long-Term Company Plan (RJPP) for 2020-2024 and Shareholder Aspiration. In 2022, ASABRI has successfully implemented accelerated succession planning through an accelerated development program resulting in a 61.11% increase in internal leader growth in the BoD-1 position, compared to 31.25% in 2021.

To support the program and performance, the Company will build strategic approaches with a supporting environment as follows:



Supporting Environment:

1. *Human Resource Information System* (HRIS): Mengembangkan HRIS berbasis *cloud database* untuk memudahkan dalam proses implementasi, menggunakan *platform mobile*, dan user *friendly interface*, sehingga memberikan kemudahan bagi Karyawan dalam memanfaatkannya. Selain itu HRIS juga akan terintegrasi dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang digunakan Perusahaan agar pengelolaan aspek keuangan SDM lebih efisien.

Supporting Environment:

1. Human Resource Information System (HRIS): Developed a cloud-based HRIS to facilitate the implementation process, utilizing a mobile platform, and user friendly interface, for ease of use by employees. additionally, HRIS will be integrated with the Enterprise Resource Planning (ERP) system used by the Company to enhance the efficiency of financial and HR management.

2. *HR Soft Structure*: melakukan pembaharuan *HR Soft Structure* agar selalu selaras dengan perkembangan kondisi Perusahaan dan kondisi eksternal. Kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam implementasi pengelolaan SDM di Perusahaan.
3. *Organization Evaluation*: Melakukan pengembangan organisasi dengan fokus pada struktur jabatan fungsional untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada karyawan dalam berkarier di Perusahaan.
4. *Employee Survey*: Melakukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan secara rutin untuk mendapatkan masukan yang berguna dalam perbaikan pengelolaan SDM. Tahun 2023 ASABRI akan berfokus pada tindak lanjut perbaikan pengelolaan *Human Capital* (HC) berdasarkan hasil rekomendasi pelaksanaan survei pada tahun 2022.

Strategic Approaches:

1. *Culture & Knowledge Management*: Mengoptimalkan program budaya dengan inisiatif seperti *reguler sharing session*, *quick win gamification*, dan aktivasi *culture change agent*. Selain itu, mengembangkan program *knowledge management* melalui pemetaan pengetahuan, panduan pelaksanaan *knowledge sharing*, kampanye *knowledge management*, kolaborasi dengan klaster asuransi dan dana pensiun, dan *Subject Matter Expert (SME)*.
2. *Talent Management*: Menerapkan program *talent development* yang meliputi program wajib, program reguler, program pengembangan talenta, dan program fleksi, beasiswa, dan sertifikasi. Selain itu, mengembangkan efektivitas pengelolaan karier dan *job grading* untuk mendorong pertumbuhan karier karyawan.
3. *Talent Readiness*: Mengembangkan talenta perempuan dan talenta muda melalui program akselerasi pengembangan karyawan.
4. *Disability Blueprint*: Menyusun *blueprint* penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas.
5. *Talent Mobility*: Menerapkan program *talent mobility* untuk pengembangan talenta BUMN dengan melakukan pengisian formasi jabatan, peningkatan *exposure* dan *leadership*, serta penajaman kompetensi.

Dengan rencana kerja ini, ASABRI berharap dapat meningkatkan pengelolaan SDM, membangun budaya yang kuat, mengembangkan talenta yang berkualitas, dan menyediakan lingkungan pendukung yang memungkinkan pencapaian tujuan Perusahaan.

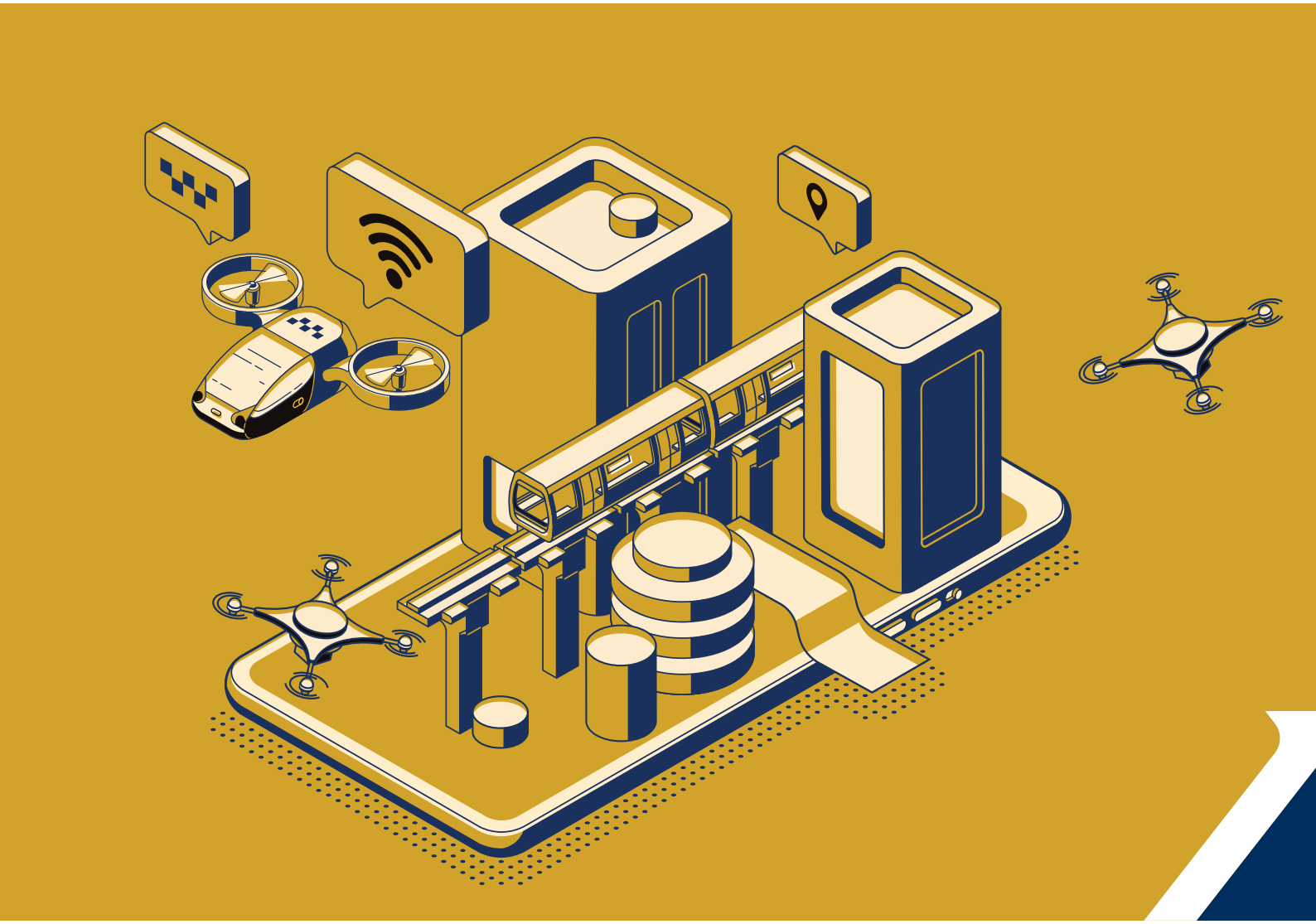
2. HR Soft Structure: updating the HR Soft Structure to align continuously with the Company's development and external conditions. This policy will serve as a guideline in implementing of HR management in the Company.
3. Organization Evaluation: Conducting Organization development with a focus on the structure of functional job structure to provide broader career opportunities for employees in the company
4. Employee Survey: Conducting regular employee satisfaction and engagement surveys to obtain valuable input for improving HR management. In 2023 ASABRI will focus on follow-up actions for improving HC management based on the results.

Strategic Approaches:

1. Culture & Knowledge Management: Optimising culture programs through initiatives such as regular sharing sessions, quick win gamification, and activating culture change agents. In addition, develop knowledge management programs through knowledge mapping, knowledge sharing guidelines, knowledge management campaigns, collaboration with insurance and pension fund clusters, and Subject Matter Expert (SME) involvement.
2. Talent Management: Implement talent development Program including mandatory programs, regular programs, talent development programs, and flexible programs, scholarships and certifications. Moreover enhancing the effectiveness of career management and job grading to promote employee career growth.
3. Talent Readiness: Developing female talents and young talents through an employee development acceleration program.
4. Disability Blueprint: Developing a disability blueprint to fulfil the company's obligation in employing employees with disabilities.
5. Talent Mobility: Implementing a talent mobility program for the development of SOE talents by filling position formations, increasing exposure and leadership, and refining competencies.

With this work plan, ASABRI hopes to enhance HR management, build a strong culture, develop high-quality talents, and provide a supportive environment that enables the achievement of the Company's goals.

Teknologi Informasi
Information Technology



Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, PT ASABRI (Persero) terus melakukan pengembangan TI dan evaluasi serta inovasi guna memastikan keberlanjutan layanan yang responsif sesuai dengan harapan dan kebutuh peserta

In the face of rapid technological advances, PT ASABRI (Persero) continues to develop IT and undergo evaluation and innovation to ensure the sustainability of responsive services in accordance with the participants expectations and needs.

ASABRI berupaya meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi (TI) guna mendukung efektivitas dan efisiensi roda operasional dalam mengemban fungsi untuk menunjang kebijakan Pemerintah, khususnya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri beserta keluarganya, dengan menyelenggarakan program Asuransi Sosial dan Pembayaran Pensiun sebagai penugasan tambahan dari Pemerintah.

ASABRI strives to improve Information Technology (IT) capabilities to support the effectiveness and efficiency of operational process in carrying out functions to support Government policies, particularly to enhance the well-being of TNI soldiers, Police Members, and Civil Servants in the Ministry of Defense and Police, along with their families. Social insurance and pension payment programs as an additional assignment d]from the government.

Melalui inovasi TI yang dilakukan secara berkesinambungan, ASABRI meyakini akan memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses kerja, proses layanan, dan penyediaan informasi yang tepat dan akurat. ASABRI terus melakukan pengembangan TI dan evaluasi serta inovasi guna meningkatkan layanan kepada Peserta beserta keluarganya dalam mewujudkan layanan prima dengan prinsip 5T (Tepat Waktu, Tepat Alamat, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Administrasi).

Through continuous IT innovations, ASABRI believes it will provide optimal contributions to work processes, service processes, and the provision of precise and accurate information. ASABRI continues to develop IT and evaluation and innovate to enhance services to Participants and their families in realising excellent services with the 5T principle (On Time, Right Address, Right Person, Right Amount, Right Administration).

Hal ini juga merupakan komitmen ASABRI terhadap kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan terbaik yang didukung dengan infrastruktur dan sarana/prasarana serta SDM, khususnya TI dengan menerapkan sistem *online* antar unit kerja, layanan kepada Peserta yang dapat diberikan di mana saja, sehingga kebutuhan informasi Manajemen dapat disajikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Selain itu dengan teknologi *Cisco* VPN, *Server* Kantor Pusat ASABRI dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet secara *private* yang mendukung fasilitas keamanan data terautentikasi dan terenkripsi.

This is also ASABRI commitment to customer satisfaction by providing the best services supported by infrastructure and facilities/infrastructure and human resources, especially in IT through the implementation of an online system between work units, services to Participants that can be provided anywhere, so that Management's information needs can be met presented quickly, precisely, and accurately. Additionally, with Cisco VPN technology the ASABRI Head Office Server can be accessed from anywhere through a private internet network that supports authenticated and encrypted data security facilities.

Dari sisi Sistem Informasi (SI), ASABRI telah mengimplementasikan *Enterprise Resources Planning* (ERP) menggunakan AXAPTA teknologi dari Microsoft, sehingga integrasi proses antar unit kerja bisa termonitor dengan baik. Untuk keamanan akses aplikasi, juga telah diterapkan *Single Sign On* (SSO) *Active Directory* sehingga *user id* dan *password* dapat dikelola oleh masing-masing *user* secara mandiri.

In terms of Information Systems (IS), ASABRI has implemented Enterprise Resources Planning (ERP) using Microsoft's AXAPTA technology, enabling effective monitoring of process integration between work units. For application access security, Single Sign On (SSO) using Active Directory has also been implemented allowing users to manage their user IDs and passwords independently.

Sistem automasi perkantoran, ASABRI mengimplementasikan teknologi Office 365 dari Microsoft. Sistem ini meliputi pemakaian:

- *Microsoft Office* untuk penggunaan Word, Excel, PowerPoint;
- *Exchange mail* untuk *Email*;
- *Sharepoint* untuk Portal *Knowledge Management*;
- Yammer sebagai Portal *Social Media Corporate*.

Office automation systems, ASABRI has implemented Microsoft's Office 365 technology from Microsoft. This system includes the use of:

- Microsoft Office for the use of Word, Excel, PowerPoint;
- Exchange mail for Email;
- Sharepoint for Knowledge Management Portal;
- Yammer as the Corporate Social Media Portal.

Pengelolaan perangkat server menggunakan teknologi *Hyper Converged Infrastructure* (HCI), yaitu teknologi virtualisasi dan sudah terimplementasikan dengan baik di *Data Center* (DC) atau di *Disaster Recovery Center* (DRC).

Server device management uses Hyper Converged Infrastructure (HCI) technology, which is virtualisation technology and has been well implemented in the Data Center (DC) or Disaster Recovery Center (DRC). With this

Dengan teknologi tersebut, maka ASABRI sudah menuju ke arah *Green Data Center* yang hemat ruangan (*space*) dan biaya dalam operasionalnya.

Saat ini tata kelola TI ASABRI sudah sesuai memasuki *maturity* level 3 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Peningkatan pengelolaan keamanan informasi di mana Direksi beserta jajaran PT ASABRI (Persero) berkomitmen untuk memastikan bahwa peran, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan keamanan informasi dapat diimplementasikan secara kontinu dan efektif, melalui kebijakan dan prosedur keamanan informasi, pengendalian risiko, dan pemantauan efektivitas sasaran Sistem Manajemen Keamanan Informasi. PT ASABRI (Persero) melalui *assessment* British Standard Institution (BSI), telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi ISO 27001:2013 per tanggal 30 Juli 2021, sebagai bagian dari peningkatan pengelolaan keamanan informasi yang diadopsi untuk keseluruhan aspek pengelolaan teknologi informasi, dengan *Certificate Number*: 741161.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Kebijakan Tata Kelola merupakan perwujudan dari visi teknologi informasi (TI) perusahaan, yaitu sebagai *strategic business partner* dalam memberikan layanan bisnis yang terpercaya bagi para *stakeholder*. Berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/TI.01.03/78-AS/XI/2019, kebijakan tata kelola teknologi informasi ASABRI merupakan dasar untuk meningkatkan dan pengembangan layanan produk TI yang dapat memperkuat peran dan fungsi teknologi informasi sebagai *business driver*.

Sesuai dengan Keputusan Direksi, kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi meliputi:

1. Prinsip Tata Kelola;
2. Kebijakan Strategis;
3. Kebijakan Operasional;
4. Analisis Konteks Bisnis Perusahaan;
5. Analisis Peran dan Strategi TI;
6. Analisis Dukungan Potensial TI;
7. Analisa dan Potensi Perbaikan TI;
8. Manajemen infrastruktur, aplikasi, dan layanan TI;
9. *Roadmap* Implementasi untuk potensi dukungan TI; dan
10. Perencanaan dan Evaluasi TI.

technology, ASABRI is moving towards a Green Data Centre that is space and cost-efficient in its operations.

Currently, ASABRI IT governance is in accordance with reaching maturity level 3 as required by the Ministry of SOEs in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-02/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 the Principles of Information Technology Governance for State-Owned Enterprises.

The improvement of information security management, where the Board of Directors and the ranks of PT ASABRI (Persero) are committed to ensuring that the roles, responsibilities and authority of information security management can be implemented continuously and effectively, through information security policies and procedures, risk controls, and monitoring the effectiveness of Information Security Management System goals. PT ASABRI (Persero) assessment by the British Standard Institution (BSI) assessment, has received a recommendation for ISO 27001:2013 certification as of July 30, 2021, as part of improving information security management adopted for all aspects of information technology management, with Certificate Number: 741161.

Information Technology Governance

Information Technology Governance Policy

The Governance Policy is a manifestation of the company's information technology (IT) vision, serving as a strategic business partner in providing reliable business services to stakeholders. Based on the Board of Directors Regulation of PT ASABRI (Persero) Number KEP/TI.01.03/78-AS/XI/2019, ASABRI information technology governance policy is the basis for improving and developing IT product services that can strengthen the role and function of information technology as a business driver.

In accordance with the Decree of the Board of Directors, the Information Technology Governance policy includes:

1. Governance Principles;
2. Strategic Policy;
3. Operational Policy;
4. Analysis of the Company's Business Context;
5. IT Role and Strategy Analysis;
6. Analysis of IT Potential Support;
7. Analysis and Potential IT Improvements;
8. Management of IT infrastructure, applications, and services;
9. Implementation Roadmap for potential IT support; and
10. IT Planning and Evaluation.

Penerapan tata Kelola TI disesuaikan dengan aturan yang berlaku, kerangka kerja, konteks bisnis, dan perencanaan strategis perusahaan yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel serta terukur yang mendorong perilaku yang diinginkan dalam pemanfaatan teknologi informasi baik untuk lingkungan internal dan para *stakeholder*. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menunjang proses bisnis perusahaan, maka tata kelola TI mendorong proses dan implementasi TI menjadi lebih sistematis, efektif, efisien, dan logis. Penerapan tata Kelola TI sendiri akan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan baik dengan secara bertahap dan keseluruhan sesuai dengan perencanaan strategis perusahaan.

Maksud ditetapkannya dan penerapan Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen TI adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan kewajiban Direksi dalam memberikan arahan terkait penerapan Tata Kelola TI sebagai salah satu bentuk realisasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan.
2. Memberikan referensi kepada seluruh komponen pelaksana tata kelola dan manajemen TI Perusahaan dalam Menyusun dan menetapkan prosedur operasional sehingga terjadi keselarasan pada tataran strategis, taktis, dan operasoinal dalam penyelenggaraan TI Perusahaan.

Tujuan ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen TI adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya arahan untuk merealisasikan *benefit* TI serta mengoptimalkan risiko dan sumber daya TI yaitu infrastruktur, aplikasi, SDM serta data dan informasi.

2. Tersedianya pedoman menuju terwujudnya pola standardisasi dalam pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen TI di Perusahaan.

Roadmap Teknologi Informasi ASABRI

Dalam melakukan program pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), ASABRI selalu mengacu pada tata kelola teknologi informasi (TI), yang biasanya tercantum dalam *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) 2020-2024. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan TI ASABRI bertujuan agar Teknologi dan Informasi dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan secara optimal, terukur, dan terarah. Dalam menyusun MPTI 2020-2024, ASABRI mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara. MPTI ASABRI periode tahun 2020-2024 akan digambarkan pada *roadmap* berikut ini:

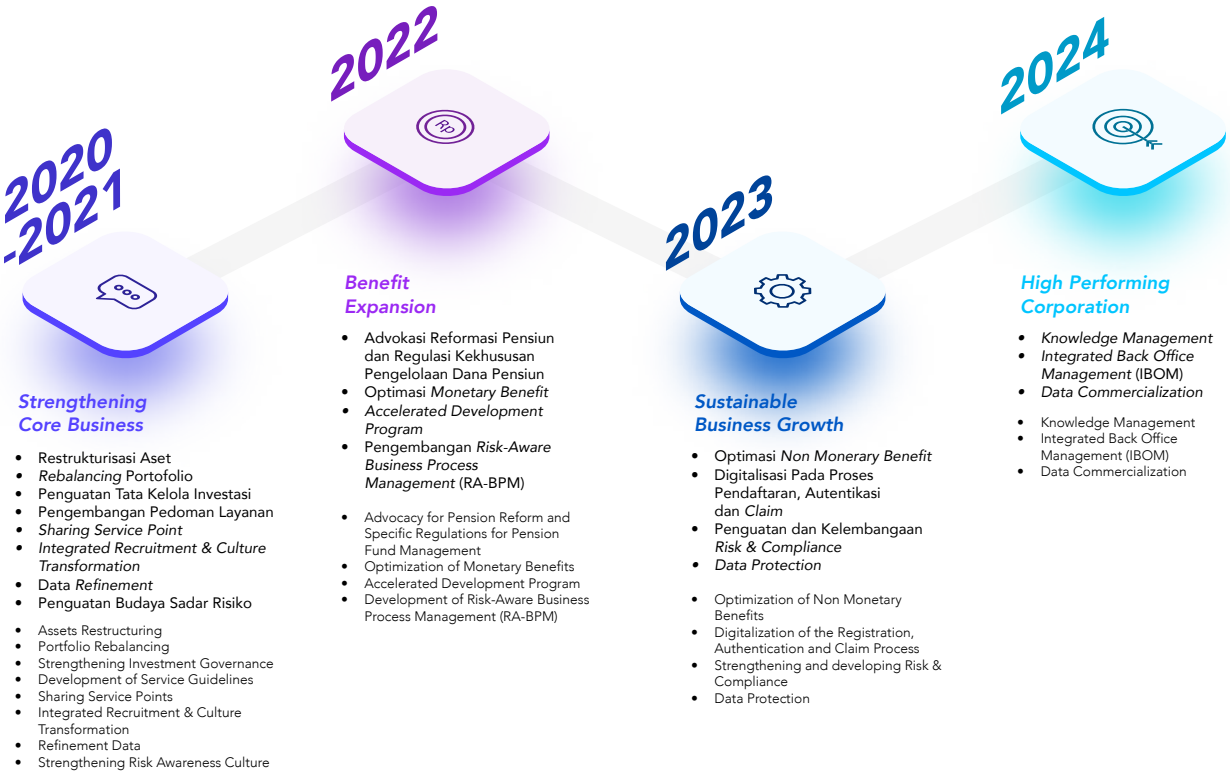
The implementation of IT Governance is in accordance with the applicable rules, frameworks, business context, and strategic planning of the company which is useful in supporting transparent, accountable and measurable decision making that encourages the desired behaviour in the use of information technology for both the internal environments and stakeholders. To achieve optimal results in supporting the company's business processes, IT governance encourages IT processes and implementation promotes a more systematic, effective, efficient, and logical. The implementation of IT Governance itself can be evaluated and continuously improved continuously both gradually and and comprehensively in accordance with the company's strategic planning.

The purpose of establishing and implementing the IT Governance and Management Policy is as follows:
1. Carrying out the obligation of the Board of Directors to provide guidance on the implementation of IT governance as one form of realization of Good Corporate Governance (GCG) in the Company.
2. Providing a reference for all components involved in the governance and management of the Company's IT in developing and establish operational procedures ensuring alignment at the strategic, tactical, and operational levels in the implementation of the Company's IT.

The objectives of the IT Governance and Management Policy are as follows:
1. Providing guidance to realise IT benefits and optimise IT risks and resources, including infrastructure, applications, human resources as well as data and information.
2. Providing guidelines towards achieving a standardized pattern in the implementation of IT governance and management processes in the Company.

The Information Technology Roadmap of ASABRI

In conducting Information Technology (IT) utilisation and development programs, ASABRI always refers to outlined in the Information Technology Master Plan (MPTI) 2020-2024. The implementation of ASABRI IT utilisation and development aims to ensure that Technology and Information can be utilised and applied optimally, measured, and directed. In formulating the MPTI 2020-2024, ASABRI refers to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2013 regarding Guidelines for the Preparation of Information Technology Management of State-Owned Enterprises. MPTI ASABRI for the period 2020-2024 will be depicted in the following roadmap:



Peran dan Strategi Teknologi Informasi

Sejalan dengan visi teknologi informasi yang tercantum dalam Master Plan TI 2020 – 2024 yaitu "Menjadi *Strategic Partner* dalam transformasi digital Perusahaan menjadi Perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional". Peran dan Strategi TI adalah sebagai berikut:

Information Technology Roles and Strategies

In line with the vision of information technology outlined in the IT Master Plan 2020 - 2024, namely "Becoming a Strategic Partner in the Company's digital transformation into a professional national social insurance company". IT roles and strategies are as follows:



Program dan Sasaran Strategis TI Tahun 2022

ASABRI memiliki tujuan untuk mempercepat transformasi digital dengan mengintegrasikan dan memanfaatkan data secara efektif. Dalam rangka ini, ASABRI memiliki program dan strategi TI untuk tahun 2022 yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Database Refinement

ASABRI melakukan perbaikan *database* agar dapat menciptakan salinan data yang sesuai dengan data peserta. Perusahaan melakukan optimasi fitur pembaruan data pada Aplikasi ASABRI Mobile dan menggunakan analitika data untuk memperbaiki data yang ada. Perusahaan juga telah membangun *dashboard* Data Kepesertaan yang digunakan untuk laporan rekapitulasi data peserta. Selain itu, Perusahaan telah menyelesaikan dan meluncurkan tugas terkait pembangunan pemantauan transaksi *database* yang melibatkan analitika data untuk perbaikan data pada tanggal 23 Maret 2022.

Database Commercialization

Perusahaan berencana melaksanakan komersialisasi *digital channel* pada pihak ketiga melalui kerja sama dengan Taspen untuk melakukan *co-marketing* pada *website/mobile apps* kedua Perusahaan.

Data Protection

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga kepatuhan dengan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data Peserta karena itu diperlukan pengembangan sistem yang dapat memonitor proses pengelolaan data yang didukung dengan SDM pengelola data yang bersertifikasi CDPSE. Sampai dengan saat ini, Perusahaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Teknologi Informasi untuk IT *Maturity* berdasarkan COBIT 2019;
2. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi CDPSE *based system* akan dilakukan setelah penyempurnaan Tata Kelola Teknologi Informasi.

Pencapaian Tahun 2022

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Peserta dan memperkuat peran teknologi informasi dalam mendukung efektivitas kegiatan operasional dan manajemen, Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan hingga tahun 2022, di antaranya:

1. Pembangunan Digitalisasi Autentikasi Penerima Pensiun Perusahaan telah melakukan pembangunan dan pengembangan sistem autentikasi digital di ASABRI sesuai dengan standar dan praktik terbaik. Pada Tahun 2022, Perusahaan telah berhasil meluncurkan uji coba versi Alpha pada tanggal 11 Agustus 2022 dan telah mentransfer pengetahuan serta melatih penggunaan aplikasi versi Alpha pada

IT Strategic Program and Goals for 2022

ASABRI aims to accelerate digital transformation by integrating and effectively utilizing data. To this end, ASABRI has IT programs and strategies for the year 2022 which include the following:

Database Refinement

ASABRI made improvements to the database to create a copy of the data that matches the participant data. The company optimised the data update feature on ASABRI Mobile Apps and used data analytics to improve existing data. The Company has also built a Participation Data dashboard that is used for participant data recapitulation reports. In addition, the Company has completed and launched the task related to the development of database transaction monitoring involving data analytics for data improvement on March 23, 2022.

Database Commercialization

The Company plans to commercialise its digital channels to third parties through cooperation with Taspen to conduct co-marketing on the websites/mobile apps of both Companies.

Data Protection

The Company is committed to maintaining compliance with regulations relating to data protection. Therefore, it is necessary to develop a system that can monitor the data management process supported by CDPSE-certified data management human resources. To date, the Company has done the following:

1. The Company has Information Technology Governance Policies and Procedures for IT Maturity based on COBIT 2019;
2. Monitoring and evaluation activities of CDPSE based system will be carried out after the improvement of Information Technology Governance.

Achievement Year 2022

In an effort to improve services to Participants and strengthen the role of information technology in supporting the effectiveness of operational and management activities, the Company has carried out various activities until 2022, including:

1. Development of Digitalisation of Pension Beneficiary Authentication The Company has carried out the construction and development of a digital authentication system in ASABRI in accordance with standards and best practices. In 2022, the Company has successfully launched the Alpha version trial on August 11, 2022 and has transferred knowledge and trained the use of the Alpha version application on

tanggal 12 Agustus 2022. Selain itu, Perusahaan juga telah melaksanakan uji coba versi Beta dan transfer pengetahuan pada tanggal 29 Agustus 2022. Perusahaan juga telah melaksanakan pendaftaran versi Alpha pada tanggal 15 hingga 19 Agustus 2022 yang didampingi oleh *Project Management Officer* (PMO) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Autentikasi Digital.

2. Pengembangan *Application Programming Interface* (API) *Manager* Perusahaan telah mengembangkan aplikasi API *Manager* yang bertujuan untuk mengelola pertukaran data dengan aman melalui proses perancangan, penerbitan, dokumentasi, dan analisis *Application Programming Interface* (API).
3. Pengembangan Aplikasi JOGET Perusahaan telah menggunakan *software* JOGET *Workflow* sejak Tahun 2019. JOGET *Workflow* merupakan *aplikasi* berbasis *web* yang digunakan untuk mengembangkan alur dan proses bisnis aplikasi. Dengan JOGET, pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman yang rumit.
4. Penambahan Kebutuhan Token *SMS Gateway* Perusahaan menggunakan Token *SMS Gateway* sejak Tahun 2018 untuk mengirimkan informasi kepada Peserta secara massal dengan nama pengirim ASABRI. Token *SMS Gateway* digunakan untuk mengirimkan informasi *One Time Password* (OTP) untuk registrasi Aplikasi Seluler dan juga untuk notifikasi SPTB *online*.
5. Penambahan Credit Layanan Whatsapp *API/Gateway* Perusahaan telah menambahkan layanan Whatsapp *API/Gateway* sebagai upaya untuk meningkatkan respons pelayanan yang lebih baik kepada Peserta yang mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi Seluler. Layanan ini memungkinkan komunikasi pelayanan yang terpusat melalui satu media komunikasi dengan dukungan teknologi informasi.
6. Pengadaan *Web Application Firewall* (WAF) untuk Perangkat *security appliance Next Generation Firewall + Web Application Firewall* (NGAF) Perusahaan telah melakukan pengadaan *Web Application Firewall* (WAF) sebagai modul keamanan pada perangkat *Security Appliance NGAF. WAF* berfungsi untuk memfilter, memantau, dan memblokir lalu lintas terhadap aplikasi berbasis web yang umum digunakan oleh Perusahaan.
7. Pengembangan IVR Aplikasi *Call Center* Perusahaan telah mengembangkan aplikasi *Call Center* berbasis *Interactive Voice Response* (IVR) yang menyediakan layanan informasi produk, persyaratan pengajuan, dan informasi kartu ASABRI baik untuk peserta aktif maupun peserta pensiun. Selain itu, Perusahaan juga telah mengembangkan *IVR Call Center* pada modul whatsapp business.

August 12, 2022. In addition, the Company has also conducted the Beta version trial and knowledge transfer on August 29, 2022. The Company has also carried out the registration of the Alpha version on August 15-19, 2022 accompanied by the Project Management Officer (PMO) of Digital Authentication System Construction and Development.

2. Development of Application Programming Interface (API) Manager The Company has developed an API Manager application that aims to securely manage data exchange through the process of designing, publishing, documenting, and analysing Application Programming Interface (API).
3. JOGET Application Development The company has been using JOGET Workflow software since 2019. JOGET Workflow is a web-based application used to develop application business flows and processes. With JOGET, application development can done quickly and easily without having to have knowledge of complicated programming languages.
4. Addition of SMS Gateway Token Needs The company has used SMS Gateway Tokens since 2018 to send information to Participants in bulk with the ASABRI sender name. SMS Gateway Tokens are used to send One Time Password (OTP) information for Mobile Application registration and also for online SPTB notifications.
5. Addition of Whatsapp API/Gateway Service Credit The Company has added Whatsapp API/Gateway service as an effort to improve better service response to Participants who experience problems in using the Mobile Application. This service allows centralised service communication through one communication media with the support of information technology.
6. Procurement of Web Application Firewall (WAF) for Next Generation Firewall + Web Application Firewall (NGAF) Security Appliance The Company has procured a Web Application Firewall (WAF) as a security module on the NGAF Security Appliance. WAF functions to filter, monitor, and block traffic to web-based applications commonly used by the Company.
7. IVR Call Centre Application Development The Company has developed an Interactive Voice Response (IVR) based Call Centre application that provides product information services, application requirements, and ASABRI card information for both active and retired participants. In addition, the Company has also develop IVR Call Centre on whatsapp business module.

8. Pembangunan Sistem Pemadanan data Yandu dengan Platform Knime Perusahaan telah membangun sistem *Extract, Transform, Load (ETL)* yang meliputi pembersihan data, koreksi data, penggantian data yang salah tulis, dalam rangka pemadanan dan analisis data Kepesertaan yang dinamis.
9. Pembangunan Integrasi Yandu dengan *Smart* AIP dan SKPP Kementerian Keuangan Perusahaan telah membangun sistem antarmuka layanan pertukaran data dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung sistem pelaporan AIP secara digital sesuai kesepakatan dengan Kementerian Keuangan.
10. Pengembangan Integrasi *Smart* AIP dengan Microsoft Dynamics Axapta Perusahaan sedang melakukan pengembangan dan penyempurnaan modul pada Microsoft Dynamics Axapta sebagai bagian dari dukungan untuk meningkatkan fungsionalitas dan modul pada sistem tersebut.
11. Pembangunan Modul perhitungan Premi Yandu Perusahaan sedang melakukan pembangunan digitalisasi modul perhitungan premi untuk memberikan kemudahan kepada Peserta dalam mengetahui akumulasi premi dan pengembangan Nilai Manfaat THT berbasis *Individual Account.*
12. Peningkatan sarana infrastruktur jaringan melalui pengadaan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak serta sistem informasi.

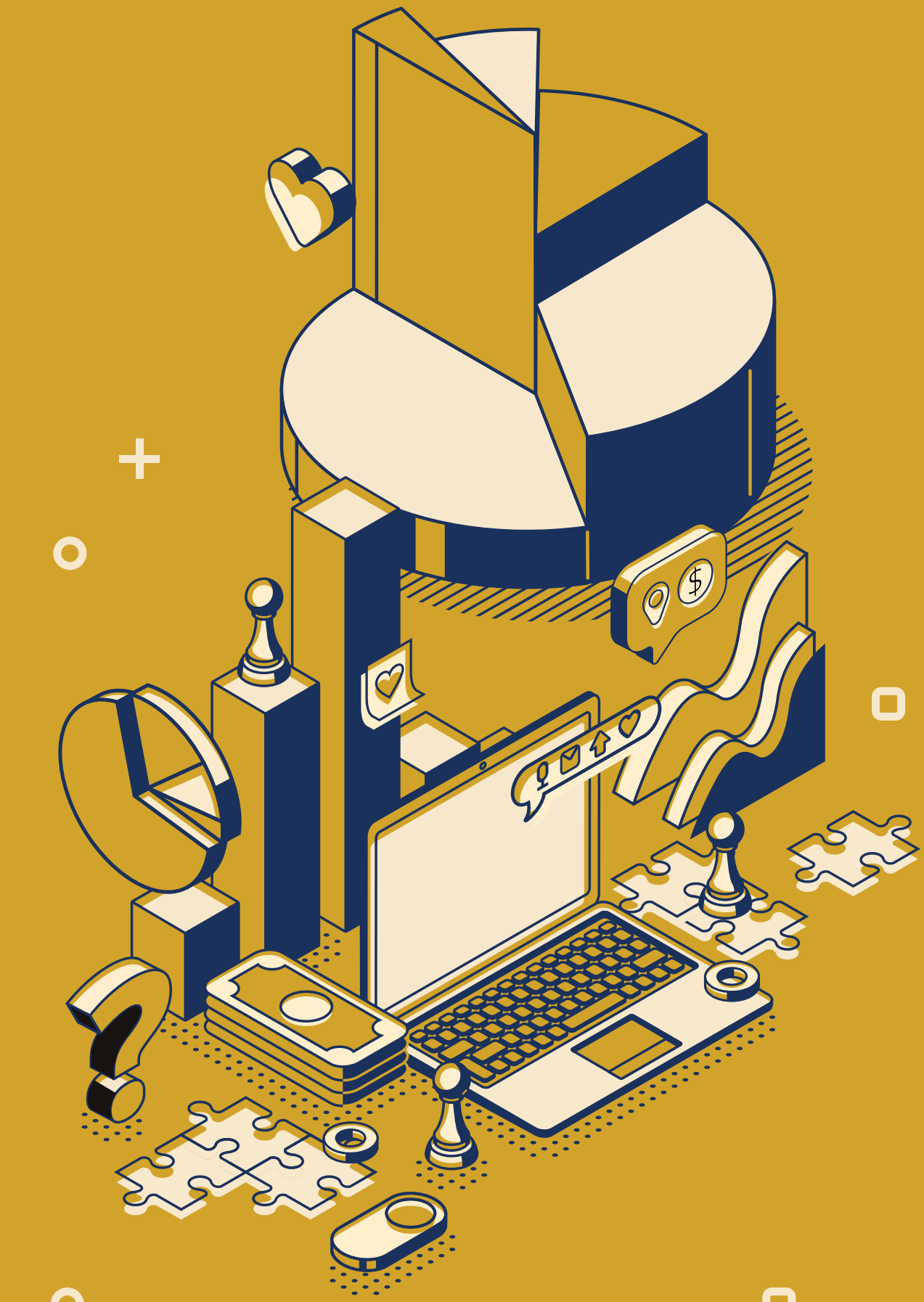
Semua langkah ini diambil untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta pelayanan kepada Peserta.

8. Development of Yandu Data Matching System with Knime Platform The company has built an Extract, Transform, Load (ETL) system that includes data cleaning, data correction, replacement of incorrectly written data, in order to match and analyse dynamic membership data.
9. Development of Yandu Integration with Smart AIP and SKPP Ministry of Finance The Company has built a data exchange service interface system with the Ministry of Finance to support the digital AIP reporting system as agreed with the Ministry of Finance.

10. Development of Smart AIP Integration with Microsoft Dynamics Axapta The Company is developing and refining modules in Microsoft Dynamics Axapta as part of the support to improve the functionality and modules in the system.

11. Development of Yandu Premium Calculation Module The Company is currently developing a digitalisation of the premium calculation module to provide convenience to Participants in knowing the accumulation of premiums and the development of THT Benefit Value based on Individual Account.
12. Improvement of network infrastructure facilities through procurement, installation, and maintenance of hardware and software and information systems.

All these steps are taken to continuously improve operational efficiency and effectiveness as well as services to Participants.



05

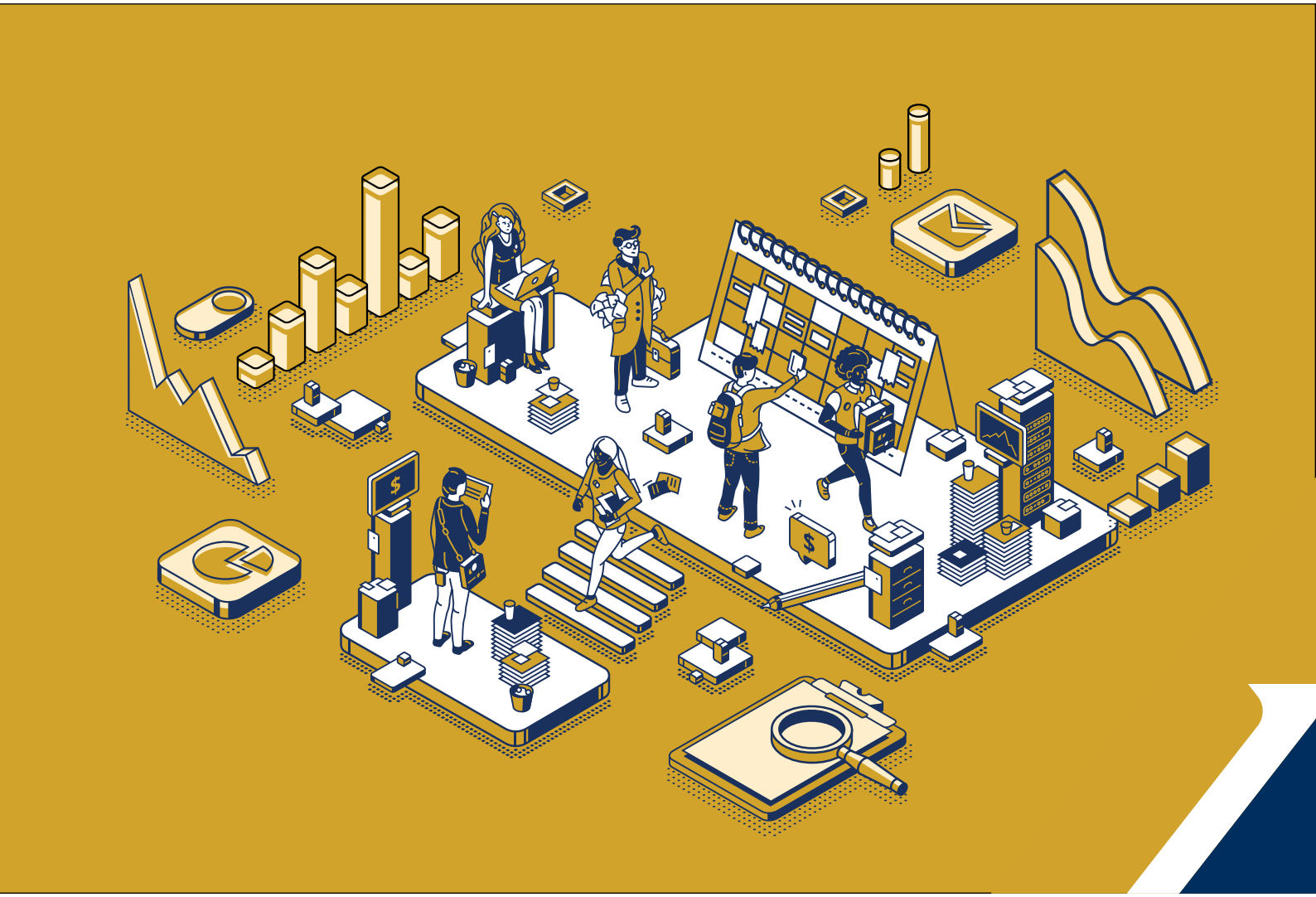


DAN ANALISIS PEMBAHASAN MANAJEMEN



Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri
Economic and Industry Overview



Kinerja ASABRI di tahun 2022 melalui strategi penyehatan keuangan perusahaan sudah memperlihatkan hasil yang baik dan tumbuh lebih baik dari tahun 2021. ASABRI juga dalam menjalankan operasionalnya, terus meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas kinerja.

ASABRI performance in 2022 through the company's financial restructuring strategy has shown good results and has grown better than 2021.
ASABRI also in carrying out its operations, continues to improve efficiency and maintain performance productivity.

Ekonomi Global

Pergerakan ekonomi global hingga akhir tahun 2022 masih mengalami tekanan yang cukup banyak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dari sisi kesehatan, tingkat penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan secara global. Beberapa Negara seperti China dan Jepang mulai melonggarkan kebijakan terkait COVID-19 termasuk Indonesia yang resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Relaksasi tersebut diperkirakan berpeluang menjadi katalis positif dalam pertumbuhan ekonomi global.

Dari sisi geopolitik, ketegangan Rusia-Ukraina masih terus berlanjut sehingga masih memberikan dampak terhadap pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, meningkatnya peluang resesi akibat inflasi global dan ketidakpastian pasokan energi. Akibatnya, ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 3,4% pada 2022 setelah tumbuh 6,0% pada 2021. Disisi lain, pada akhir tahun 2022 tingkat inflasi di Amerika Serikat dan Eropa mengalami penurunan masing-masing ke level 6,5% dan 10,1% secara tahun ke tahun setelah sebelumnya berada pada level tertingginya sebesar 9,1% dan 10,7%. Kondisi ekonomi yang masih sangat *volatile* tersebut menjadi penahan laju pemulihan ekonomi.

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* per Januari 2023 yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF), proyeksi ekonomi dunia pada 2022 diproyeksikan hanya mampu tumbuh 3,4% secara *year on year* (yoy) atau lebih tinggi dari proyeksi di Oktober 2022 sebesar 3,2% (yoy) tetapi tetap lebih rendah dari capaian di 2021 yang sebesar 6,2% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini disebabkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang juga diprediksi akan mengalami pelemahan masing-masingnya menjadi 2,7% dan 3,9% (yoy) di 2022, dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing mencapai 5,4% dan 6,7% (yoy).

Tingginya inflasi membuat bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mengambil kebijakan moneter yang cukup agresif. Tekanan inflasi di Amerika Serikat juga disebabkan oleh pasar tenaga kerja yang masih ketat. Sepanjang tahun 2022, suku bunga acuan telah mengalami kenaikan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang secara kumulatif yaitu naik 425 bps ke kisaran 4,25%-4,5% di akhir tahun 2022. Dalam rapat kebijakan di Desember 2022, mereka menegaskan tekad untuk menurunkan inflasi dengan mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk sementara waktu sehingga suku bunga bank sentral akan terus meningkat di tahun 2023 mengingat inflasi yang rata-rata masih diatas

Global Economy

The movement of the global economy until the end of 2022 is still under considerable pressure caused by various factors. In terms of health, the level of spread of the COVID-19 virus in 2022 has decreased significantly globally. Several countries such as China and Japan have begun to relax policies related to COVID-19, including Indonesia, which officially revoked the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). This relaxation is estimated to have the opportunity to be a positive catalyst in global economic growth.

In terms of geopolitics, Russia-Ukraine tensions continue to have an impact on weakening trade transactions, rising commodity prices, increasing chances of recession due to global inflation and uncertainty in energy supply. As a result, the world economy is expected to grow only 3.4% in 2022 after growing 6.0% in 2021. On the other hand, by the end of 2022 the inflation rate in the United States and Europe will decline to 6.5% and 10.1% respectively on a year-on-year basis after previously being at its highest levels of 9.1% and 10.7%. The economic conditions that are still very volatile are holding back the pace of economic recovery.

Based on the World Economic Outlook report as of January 2023 released by the International Monetary Fund (IMF), the projected world economy in 2022 is projected to only be able to grow 3.4% year on year (yoy) or higher than the projection in October 2022 of 3.2% (yoy) but still lower than the achievement in 2021 of 6.2% (yoy). This slowdown in global economic growth is due to the fact that economic growth in developed and developing countries is also predicted to weaken to 2.7% and 3.9% (yoy) respectively in 2022, compared to the previous year which reached 5.4% and 6.7% (yoy) respectively.

High inflation has led the US central bank, the Fed, to adopt a fairly aggressive monetary policy. Inflationary pressure in the US is also caused by a tight labour market. Throughout 2022, the benchmark interest rate has been increased 7 (seven) times, which cumulatively is an increase of 425 bps to a range of 4.25%-4.5% at the end of 2022. During the policy meeting in December 2022, they reiterated their determination to reduce inflation by keeping interest rates high for the time being so that central bank rates will continue to increase in 2023 given that inflation is still above target on average. Similarly, in Europe, the European Central Bank (ECB) interest

target. Hal yang sama juga terjadi di Eropa, suku bunga European Central Bank (ECB) yang pada Desember 2022 tercatat sebesar 3,50%, diperkirakan naik menjadi 4,25% pada tahun 2023.

Sedangkan di Tiongkok, penerapan *zero Covid policy* dan tekanan di sektor properti serta *heatwave* yang menyebabkan penutupan sementara industri di beberapa wilayah karena gangguan pasokan energi membuat negara perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut tidak bisa menghindari pelemahan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif oleh Tiongkok di tengah tekanan inflasi masih rendah diperkirakan mampu menahan perlambatan ekonomi lebih dalam. Prospek PDB India di 2022 juga diprakirakan lebih rendah, dipengaruhi oleh *spillover* pertumbuhan ekonomi AS yang lebih rendah pada 2022.

Ekonomi Nasional

Di sisi domestik, di tengah tekanan sentimen global, kondisi perekonomian Indonesia di akhir tahun 2022 berada dalam posisi yang baik dan stabil. Terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus selama 32 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, total surplus periode Januari hingga Desember 2022 mencapai USD54,46 miliar atau lebih besar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja ekspor tumbuh cukup baik sehingga mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022. Selain itu, defisit APBN 2022 tercatat sebesar Rp464,3 triliun atau turun 40,1% dibandingkan defisit APBN tahun lalu yang sebesar Rp775,1 triliun. Di sisi lain, PMI Indonesia tercatat berada di titik 50,9 pada bulan Desember 2022. Hal tersebut membuat PMI Manufaktur Indonesia bertahan dalam fase ekspansif selama enam belas (16) bulan berturut-turut sejak bulan September 2021.

Kinerja positif ini menunjukkan geliat industri manufaktur nasional terus mengalami perbaikan dan semakin pulih setelah terkena dampak pandemi COVID-19 dan ancaman resesi pada ekonomi global. Pada pasar saham domestik, kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2022 masih tumbuh positif meski diwarnai gejolak fluktuasi pasar diikuti pelemahan bursa secara global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 6.850,52 poin di bulan Desember 2022, tumbuh 4,09%, meski melambat dari pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 10%. Secara sektoral, sektor energi, sektor industri dan sektor *healthcare* tercatat sebagai 3 (tiga) sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sementara sektor teknologi, sektor infrastruktur dan sektor properti dan *real estate* adalah 3 (tiga) sektor yang mengalami koreksi terbesar.

rate, which in December 2022 was recorded at 3.50%, is expected to rise to 4.25% in 2023.

Whereas in China, the implementation of zero Covid policy and pressure in the property sector as well as heatwaves that caused temporary closure of industries in several regions due to disruption of energy supply made the world's second largest economy unable to avoid weakening economic growth. However, China's accommodative fiscal and monetary policies amidst low inflationary pressures are expected to cushion a deeper economic slowdown. India's GDP outlook in 2022 is also forecast to be lower, influenced by lower US economic growth spillovers in 2022.

National Economy

On the domestic side, amidst the pressure of global sentiment, Indonesia's economic condition at the end of 2022 is in a good and stable position. This can be seen from the trade balance which has continued to record a surplus for 32 consecutive months since May 2020. Cumulatively, the total surplus from January to December 2022 reached USD54.46 billion or greater than the same period in the previous year. Overall, export performance grew well enough to support the target of achieving Indonesia's economic growth in 2022. In addition, the 2022 state budget deficit was recorded at IDR464.3 trillion, down 40.1% compared to last year's state budget deficit of IDR775.1 trillion. On the other hand, Indonesia's Manufacturing PMI was recorded at 50.9 in December 2022. This made Indonesia's Manufacturing PMI stay in an expansionary phase for sixteen (16) consecutive months since September 2021.

This positive performance shows that the national manufacturing industry continues to improve and is recovering after being affected by the COVID-19 pandemic and the threat of recession in the global economy. In the domestic stock market, capital market performance Indonesia throughout 2022 still grew positively despite the turmoil of market fluctuations following the weakening of global markets. The Jakarta Composite Index (JCI) closed at 6,850.52 points in December 2022, growing 4.09%, albeit slower than last year's growth of 10%. Sectorally, the energy sector, industrial sector and healthcare sector were recorded as the 3 (three) sectors with the highest growth. Meanwhile, the technology sector, infrastructure sector and property and real estate sector were the 3 (three) sectors that experienced the largest correction.

Pada pasar obligasi Indonesia, *yield* Surat Utang Negara (SUN) seri *benchmark* mengalami kenaikan. Di tahun 2022, SUN *benchmark* seri FR0090 mencatatkan kenaikan *yield* paling besar hingga +121,98 basis poin dari level 4,93% menjadi 6,15%. Sedangkan kenaikan *yield* terendah dicatatkan SUN *benchmark* seri FR0092 sebesar +21,42 basis poin ke level 7,10% dari 6,88%. Adapun seri FR0091 naik sebesar +65,03 basis poin ke level 6,91% dari 6,26%, dan seri FR0093 naik +43,39 basis poin ke level 6,74% dari 6,31%. Kinerja IHSG maupun *yield* obligasi hingga akhir tahun 2022 diwarnai dengan kondisi volatilitas tinggi akibat lonjakan inflasi global karena peningkatan *demand*, pengetatan moneter oleh bank sentral negara-negara maju, dan tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina yang mengakibatkan krisis energi sehingga semakin mendorong naik inflasi.

In the Indonesian bond market, the yield of benchmark series Government Securities (SUN) has increased. In 2022, the FR0090 series benchmark SUN recorded the largest yield increase of +121.98 basis points from 4.93% to 6.15%. Meanwhile, the lowest yield increase was recorded by the FR0092 series benchmark SUN of +21.42 basis points to 7.10% from 6.88%. The FR0091 series rose by +65.03 basis points to 6.91% from 6.26%, and the FR0093 series rose by +43.39 basis points to 6.74% from 6.31%. The performance of JCI and bond yields until the end of 2022 was coloured by high volatility conditions due to a surge in global inflation due to increased demand, monetary tightening by the central banks of developed countries, and geopolitical tension between Russia and Ukraine which resulted in an energy crisis that further pushed up inflation.

Bank Indonesia menutup transaksi kurs Rupiah berada di posisi nilai tengah Rp15.731 per dolar Amerika Serikat (AS) saat perdagangan Jumat, 30 Desember 2022. Nilai tersebut melemah 28 poin atau 0,18% dari perdagangan hari sebelumnya. Kondisi nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, namun mengalami kondisi beragam pada mata uang dunia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), rupiah terhadap won Korea Selatan melemah 0,05 poin, yen Jepang melemah 24,56 poin, ringgit Malaysia melemah 6,37 poin, rupiah terhadap dolar Hong Kong melemah 2,36 poin, yuan China melemah 1,6 poin, rupiah terhadap dolar Singapura melemah 0,02 poin dan rupiah terhadap euro menguat 7,97 poin.

Bank Indonesia closed the Rupiah exchange rate transaction at the middle value of IDR15,731 per US dollar (US) during trading on Friday, December 30, 2022. This value weakened 28 points or 0.18% from the previous day's trading. The rupiah exchange rate weakened against the US dollar, but experienced mixed conditions in world currencies. Based on data from Bank Indonesia (BI), the rupiah against the South Korean won weakened 0.05 points, the Japanese yen weakened 24.56 points, the Malaysian ringgit weakened 6.37 points, the rupiah against the Hong Kong dollar weakened 2.36 points, the Chinese yuan weakened 1.6 points, the rupiah against the Singapore dollar weakened 0.02 points and the rupiah against the euro strengthened 7.97 points.

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi juga tercermin dari respon pemerintah saat periode pandemi. Melalui fleksibilitas APBN, pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi APBN untuk memperkuat program pemulihan ekonomi nasional. Alokasi APBN difokuskan untuk penanganan kesehatan melalui program vaksinasi yang luas, perlindungan masyarakat melalui program bantuan sosial, dan dukungan pembiayaan untuk dunia usaha. Setelah program vaksinasi, imunitas masyarakat terbentuk dan penyebaran kasus harian COVID-19 terkendali. Hal tersebut memungkinkan pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga aktivitas perekonomian kembali menggeliat. Sinergi kebijakan pemerintah dalam merespon pandemi mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Setelah terkontraksi 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian nasional mampu tumbuh positif 3,7 persen pada tahun 2021, dan terakselerasi 5,3 persen pada tahun 2022.

The effectiveness of the pandemic handling policy is also reflected in the government's response during the pandemic period. Through the flexibility of the state budget, the government refocused and reallocated the state budget to strengthen the national economic recovery program. The state budget allocation is focused on health management through a broad vaccination program, community protection through social assistance Program, and financial support for the business world. After the vaccination program, public immunity was established and the spread of daily COVID-19 cases was controlled. This allowed the government to lift the restrictions on community activities so that economic activity was revitalised. The synergy of government policies in responding to the pandemic was able to accelerate economic growth. After contracting by 2.1 per cent in 2020, the national economy was able to grow positively by 3.7 percent in 2021, and accelerated by 5.3 percent in 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,15% (mtm). Dengan

Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Consumer Price Index (CPI) in December 2022 experienced inflation of 0.66% (mtm) after experiencing deflation of 0.15% (mtm) in the previous month. With this

perkembangan tersebut, inflasi IHK Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 5,43% (yoy). Kenaikan lebih tinggi dari sasaran 3,0±1% dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Secara umum, sepanjang tahun 2022, Kenaikan laju inflasi juga disebabkan oleh oleh tekanan harga global dan gangguan *supply* pangan, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi.

development, CPI inflation December 2022 recorded 5.51% (yoy), lower than the previous month's inflation of 5.43% (yoy). The higher increase from the target of 3.0±1% was influenced by the impact of subsidised fuel oil (BBM) price adjustment. In general, throughout 2022, the increase in the inflation rate was also caused by global price pressures and food supply disruptions, as well as increased public demand with the improvement in pandemic conditions.

Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng pada semester I 2022. Gangguan cuaca yang terjadi di pertengahan tahun juga sempat mendorong naiknya volatilitas harga aneka cabai dan bawang merah meskipun kemudian mereda di akhir tahun. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam menurunkan laju inflasi.

Some of the dominant commodities driving inflation are petrol, household fuels, and air freight rates. Rising global CPO prices also pushed up cooking oil prices in the first half of 2022. Weather disturbances that occurred in the middle of the year also pushed up the price volatility of various chillies and shallots although it later subsided at the end of the year. Policy synergy between the Central and Regional Governments, Bank Indonesia, and various other strategic partners through the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP-TPID) and the National Food Inflation Control Movement (GNPIP) in various regions in reducing the inflation rate.

Seiring dengan peluang meningkatnya risiko global kedepan, pasar modal domestik dihadapkan situasi yang tidak menentu ke arah stagnansi bahkan berpeluang menurun kedepannya dan hal itu sangat berkaitan erat dengan kinerja portofolio investasi yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero). Terkait dengan hal tersebut maka PT ASABRI (Persero) terus menerapkan sikap berjaga-jaga dan berusaha untuk melihat situasi, kondisi serta momentum atas portofolio yang dimilikinya.

Along with the opportunity to increase global risks in the future, the domestic capital market is faced with an uncertain situation towards stagnation and even the opportunity to decline in the future and it is closely related to the performance of the investment portfolio owned by PT ASABRI (Persero). Related to this, PT ASABRI (Persero) continues to apply a precautionary attitude and tries to see the situation, conditions and momentum of its portfolio.

Tinjauan Industri Asuransi

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kinerja 58 Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia pada tahun 2022 secara konsisten jumlah tertanggung meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2022 total tertanggung industri asuransi jiwa berjumlah 85,01 juta orang, angka ini meningkat 30,4% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Insurance Industry Overview

Based on data from the Indonesian Death Insurance Association (AAJI), the performance of 58 Death Insurance Companies in Indonesia in 2022 consistently increased the number of insured. As of December 31, 2022 the total number of insured in the Death Insurance industry was 85.01 million people, this figure increased by 30.4% when compared to 2021.

Kenaikan tertanggung tersebut tidak di ikuti dengan kenaikan pendapatan, sampai dengan akhir Desember 2022 total pendapatan industri asuransi jiwa masih mengalami tekanan. Tercatat secara keseluruhan total pendapatan industri asuransi jiwa sebesar Rp223 triliun, menurun 7,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Selain itu sepanjang tahun 2022 Industri asuransi jiwa di Indonesia juga mengalami penurunan aset. Berdasarkan data OJK, aset industri asuransi jiwa

The increase in the insured was not followed by an increase in revenue, until the end of December 2022 the total revenue of the Death Insurance industry was still under pressure. It was recorded that the total revenue of the Death Insurance industry was IDR223 trillion, a decrease of 7.5% when compared to the same period in 2021. In addition, throughout 2022 the Death Insurance industry in Indonesia also experienced a decline in assets. Based on OJK data, Death Insurance industry assets

turun sebesar 2,39% secara tahunan menjadi Rp585,86 triliun pada Desember 2022 diikuti dengan pendapatan premi yang naik 10,69% atau sebesar Rp169,95 triliun. Posisi aset ini menjadi yang paling rendah sepanjang tahun 2022 meskipun demikian perusahaan asuransi asing masih mendominasi aset di industri asuransi jiwa.

Selain itu situasi ekonomi Indonesia saat ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan industri asuransi sosial yang dijalankan oleh oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari OJK per Desember 2022 aset industri asuransi sosial mengalami pertumbuhan yaitu naik 16,35% menjadi Rp757,95 triliun dari tahun sebelumnya dengan pendapatan premi bruto naik tipis menjadi sebesar Rp232,43 triliun atau 3,79% dari Tahun 2021. Kenaikan pendapatan premi tersebut juga diikuti dengan kenaikan klaim bruto yang signifikan sebesar yaitu sebesar Rp162,51 triliun per Desember 2022 atau naik 22,09% dari tahun sebelumnya.

Pada Industri Asuransi ASN, TNI/Polri, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan (*Insurance Program for Civil Servants, Armed Forced/Police, and Public Transportation Passenger and Road Traffic Accident*) yang saat ini dikelola oleh PT ASABRI (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Jasa Raharja (Persero) per Desember 2022 kemarin mengalami tren positif pada aset meskipun tren kenaikan klaim bruto masih lebih besar dari peningkatan tren pendapatan premi. Berdasarkan data dari OJK per Desember 2022 aset mengalami kenaikan 19,59% dari tahun sebelumnya atau menjadi sebesar Rp163,87 triliun. Optimisme kenaikan aset ini diikuti dengan tren kenaikan pendapatan premi bruto yang meningkat drastis sebesar Rp16,51 triliun atau mengalami kenaikan 41,72% dibanding dengan tahun 2021. Peningkatan pendapatan premi bruto tersebut sebesar Rp18,80 triliun.

decreased by 2.39% on an annual basis to IDR585.86 trillion in December 2022, followed by premium income which increased by 10.69% or IDR169.95 trillion. This asset position is the lowest throughout 2022 even though foreign insurance companies still dominate assets in the Death Insurance industry.

In addition, Indonesia's current economic situation also affects the growth of the social insurance industry run by BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan. Based on data from OJK as of December 2022, the assets of the social insurance industry experienced growth, up 16.35% to IDR757.95 trillion from the previous year with gross premium income rising slightly to IDR232.43 trillion or 3.79% from 2021. The increase in premium income was also followed by a significant increase in gross claims of IDR162.51 trillion as of December 2022, up 22.09% from the previous year.

The Insurance Program for Civil Servants, Armed Forced/Police, and Public Transportation Passenger and Road Traffic Accident which is currently managed by PT ASABRI (Persero), PT Taspen (Persero), and PT Jasa Raharja (Persero) as of December 2022 yesterday experienced a positive trend in assets even though the upward trend in gross claims was still greater than the upward trend in premium income. Based on data from OJK as of December 2022, assets increased 19.59% from the previous year or to IDR163.87 trillion. The optimism of this asset increase was followed by an upward trend in gross premium income which increased dramatically by IDR16.51 trillion or an increase of 41.72% compared to 2021. The increase in gross premium income was IDR18.80 trillion.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operating Review by Business Segment

Sebagai BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah, ASABRI mengelola program asuransi sosial yang meliputi Program THT, Program JKK, Program JKm, dan Program Pensiun bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung mulai tanggal 30 September 2020 terdapat perubahan besaran iuran/premi dan manfaat Program JKK dan JKm. Perubahan tersebut hanya berlaku pada Program JKK dan JKm sehingga ketentuan Program THT dan Pensiun masih mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015.

As a state-owned THTerprise assigned by the Government, ASABRI manages social insurance programs including the THT Program, JKK Program, JKm Program, and Pension Program for TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defence and the National Police. Based on Government Regulation Number 102 of 2015 as amended by Government Regulation Number 54 of 2020 concerning Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police, starting from September 30, 2020 there are changes in the amount of contributions/premiums and benefits for the JKK and JKm Programs. These changes only apply to the JKK and JKm Program so that the provisions of the THT and Pension Program still refer to the provisions of Government Regulation Number 102 of 2015.

Program Tabungan Hari Tua (THT)

Deskripsi Usaha

Tabungan Hari Tua (THT) adalah tabungan yang bersumber dari iuran Peserta dan iuran Pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar Peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. Manfaat Program THT meliputi:

1. Tabungan Asuransi (TA), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun saat peserta mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) normal.
2. Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA), diberikan kepada Peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, tanpa tunjangan bersifat pensiun, atau Peserta berhenti sebelum mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri, gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa.
3. Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP), diberikan apabila Peserta pensiunan meninggal dunia.
4. Biaya Pemakaman Istri/Suami (BPI/S), diberikan kepada ahli waris apabila istri/suami Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia dengan ketentuan istri/suami menikah sebelum peserta pensiun.
5. Biaya Pemakaman Anak (BPA), diberikan apabila anak Peserta aktif atau Peserta pensiunan meninggal dunia dengan ketentuan anak Peserta lahir sebelum Peserta pensiun.

Old Age Savings Program (THT)

Business Description

Old Age Savings (THT) is a savings account that is sourced from Participant contributions and Government contributions along with its development which is organised with the aim of ensuring that Participants receive cash when they retire, either because they reach retirement age or not because they reach retirement age. Benefits of the THT Program include:

1. Insurance Savings (TA), given to Participants who are dismissed with pension rights or pension benefits when the participant reaches the normal Retirement Age Limit (BUP).
2. Cash Value of Insurance Savings (NTTA), given to Participants who are dismissed without pension rights, without retirement benefits, or Participants quit before reaching the retirement age limit, resign, killed, died, and pass away.
3. Funeral Expenses for Retired Participants (BPPP), provided if a retired Participant dies.
4. Funeral Expenses for Wife/Husband (BPI/S), given to the beneficiary if the wife/husband of an active Participant or retired Participant dies, provided that the wife/husband was married before the Participant retired.
5. Child Funeral Expenses (BPA), given if the child of an active Participant or retired Participant dies provided that the Participant's child was born before the Participant retired.

Iuran/Premi Program THT, terdiri dari:
1. Iuran/Premi peserta sebesar 3,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak setiap bulan;
2. Iuran/Premi pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Produktivitas

Realisasi beban klaim dan manfaat program THT pada tahun 2022 tercatat senilai juta atau 98,15% dibandingkan dengan RKAP tahun 2022 senilai juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, beban klaim dan manfaat program THT tahun 2022 turun senilai juta atau -10,18%.

Pendapatan Premi program THT di tahun 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 1,84% dibandingkan dengan pendapatan premi THT pada tahun 2021 senilai . Selain itu, pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan premi THT *UPSL* senilai .

Profitabilitas/Rasio Klaim

Contributions/Premiums for THT Program, consisting of:
1. Participant dues/premiums of 3.25% of basic salary plus spouse and child allowances each month;
2. Employer contributions/premiums will be regulated by a separate Government Regulation.

Productivity

The realization of claims and benefits expenses for the THT program in 2022 was recorded at million or 98.15% compared to the 2022 RKAP of I million. When compared to 2021, the expense of claims and benefits for the THT program in 2022 decreased by million or -10.8%.

Premium income for the THT program in 2022 was recorded at n, an increase of or -10.18%. or 1.84% compared to THT premium income in 2021 of . In addition, in 2022, PT ASABRI (Persero) recorded THT UPSL premiums worth .

Profitability of the THT Program

Profitabilitas Program THT
Profitability of the THT Program

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2022
Penerimaan Premi Program THT Premium Receipts for THT Program		
Beban Klaim Program THT THT Program Claims Expense		
Rasio Klaim Program THT Claims Ratio for the THT Program		

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rasio klaim program THT tahun 2022 senilai 128,57% lebih rendah dibandingkan 2021 senilai 145,77%. Peningkatan rasio klaim disebabkan jumlah klaim yang jatuh tempo lebih besar dibandingkan jumlah premi yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa besaran klaim yang dibayarkan lebih besar dari premi yang diterima.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Manfaat program JKK meliputi:
1. Biaya Pengangkutan Kecelakaan Kerja.
2. Perawatan Kecelakaan Kerja.
3. Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB).
4. Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK).

Based on the table above, it is obtained that the claim ratio for the THT program in 2022 is 128.57%, which is lower than 2021 which is 145.77%. The increase in the claim ratio is due to the number of claims due being greater than the number of premiums received. This shows that the amount of claims paid is greater than the premium received.

Work Accident Insurance (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) is protection against the risk of accident or occupational disease during the period of service. Benefits of the JKK program include:
1. Transport costs for work accidents.
2. Treatment of work accident.
3. Ordinary Service Disability Benefit (SCDB).
4. Special Service Disability Benefit (SCDK).

5. Santunan Risiko Kematian Khusus – Gugur.
6. Santunan Risiko Kematian Khusus – Tewas.
7. Bantuan Beasiswa JKK bagi peserta yang mengalami cacat tingkat III/gugur/tewas, maksimum untuk 2 (dua) orang anak.

Iuran/Premi berasal dari Pemerintah selaku Pemberi Kerja sebesar 0,62% dari gaji pokok Peserta setiap bulan.

Produktivitas

Realisasi beban klaim dan manfaat program JKK pada tahun 2022 tercatat senilai atau 70,35% dibandingkan dengan RKAP tahun 2022 sebesar Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, beban klaim dan manfaat program JKK tahun 2022 turun senilai atau -24,56%. Pendapatan Premi program JKK di tahun 2022 tercatat senilai R , naik senilai atau 1,96% dibandingkan dengan pendapatan premi JKK pada tahun 2021 senilai .

Profitabilitas/Rasio Klaim

5. Special Death Risk Benefit - Killed.
6. Special Death Risk Compensation - Died.
7. JKK Scholarship Assistance for participants who experience level III disability/killed/died, maximum for 2 (two) children.

Contributions/Premiums come from the Government as the Employer in the amount of 0.62% of the Participant's basic salary every month.

Productivity

The realization of claims expense and benefits for the JKK program in 2022 was recorded at or 70.35% compared to the 2022 RKAP of I . When compared to 2021, claims and benefits expenses for the JKK program in 2022 decreased by or -24.56%. Premium income for the JKK program in 2022 was recorded at , an increase of or 1.96% compared to the JKK premium Income in 2021 of .

Profitability/Claims Ratio

Profitabilitas Program JKK
JKK Program Profitability

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2022
Penerimaan Premi Program JKK JKK Program Premium Receipt		
Beban Klaim Program JKK JKK Program Claims Expense		
Rasio Klaim Program JKK JKK Program Claims Ratio		

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rasio klaim program JKK tahun 2022 senilai 31,61% lebih rendah jika dibandingkan rasio klaim 2021 senilai 42,72% Secara keseluruhan penerimaan premi program JKK mencukupi untuk pembayaran klaim JKK.

Based on the table above, it is obtained that the JKK program claim ratio in 2022 is 31.61%, which is lower than the 2021 claim ratio of 42.72%. Overall, the JKK program premium income is sufficient for JKK claim payments.

Program Jaminan Kematian (JKm)

Deskripsi Usaha

Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. Manfaat program JKm meliputi:

1. Santunan Kematian Sekaligus (SKS):
   a. Tamtama/Bintara/Pegawai ASN Jabatan Pelaksana; dan
   b. Perwira/Pegawai ASN Jabatan Pimpinan.
2. Uang Duka Wafat (UDW).
3. Bantuan Beasiswa JKm maksimum untuk 2 (dua) orang anak.

Death Benefit Program (JKm)

Business Description

Jaminan Kematian (JKm) is a protection for the risk of death not due to work accidents and not due to special services provided to the heirs of participants who die normally in active service status. Benefits of the JKm program include:

1. Simultaneous Death Compensation (SKS):
   a. Enlisted/Non-Commissioned Officers/ASN Employees in Executive Positions; and
   b. Officers/ASN employees in leadership positions.
2. Death Benefit (UDW).
3. JKm Scholarship Assistance for a maximum of 2 (two) children.

Iuran/Premi berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 0,81% dari gaji pokok peserta setiap bulan.

Dues/Premiums come from the Government as an employer of 0.81% of the participant's basic salary every month.

Produktivitas

Realisasi beban klaim dan manfaat program JKm pada tahun 2022 tercatat senilai minus atau 95,11% dibandingkan dengan RKAP tahun 2022 senilai minus juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, beban klaim dan manfaat program JKm tahun 2022 turun senilai atau -8,44%.

Pendapatan Premi program JKm di tahun 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 1,96% dibandingkan dengan pendapatan premi JKm pada tahun 2021 senilai .

Productivity

The realization of claims expenses and benefits for the JKm program in 2022 was recorded at minus or 95.11% compared to the 2022 RKAP of minus . When compared to 2021, the claims and benefits expense for the JKm program in 2022 decreased by n or -8.44%.

Premium Income for the JKm program in 2022 was recorded at I , an increase of IDR5,075 million or 1.96% compared to the JKm premium income in 2021 of

Profitabilitas/Rasio Klaim

Profitability/Claims Ratio

Profitabilitas Program JKm
JKm Program Profitability

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Uraian Description	2021	2022
Penerimaan Premi Program JKm JKm Program Premium Receipts		
Beban Klaim Program JKm Claims Expense for Health Insurance Program		
Rasio Klaim Program JKm Claims Ratio of the Health Insurance Program		

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa rasio klaim program JKm tahun 2022 senilai 80,39% lebih rendah dibandingkan 2021 senilai 89,52%. Secara keseluruhan premi program JKm mencukupi untuk pembayaran klaim JKm.

Based on the table above, it is obtained that the JKm program claim ratio in 2022 is 80.39%, which is lower than 2021, which is 89.52%. Overall, the JKm premium is sufficient for the payment of JKm claims.

Program Pensiun

Retirement Program

Deskripsi Usaha

Program Jaminan Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manfaat Program Pensiun, meliputi:

1. Jaminan Pensiun
   Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat pensiun diberikan secara bulanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara *(pay as you go)* dengan jenis pensiun sebagai berikut:
   a. Pensiun sendiri.
   b. Pensiun terusan.
   c. Pensiun warakawuri/janda/duda.
   d. Tunjangan anak yatim/piatu/yatim-piatu.

Business Description

The Pension Guarantee Program is an income received by pension recipients every month based on statutory regulations. Benefits of the Pension Program include:

1. Pension Guarantee
   Pension is an income received by pension recipients every month based on applicable laws and regulations. Pension benefits are provided on a monthly basis sourced from the State Budget (pay as you go) with the following types of pensions:

   a. Own pension.
   b. Forward pension.
   c. Warakawuri/widow/widower pension.
   d. Allowance for orphans/widows/orphans.

e. Tunjangan orang tua.
f. Uang Duka Wafat.
g. Tunjangan cacat.

2. Nilai Tunai Iuran Pensiun
Nilai Tunai Iuran Pensiun diberikan kepada peserta yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.

Iuran/Premi Program Pensiun, terdiri atas:
1. Iuran/Premi peserta sebesar 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak setiap bulan;
2. Iuran/Premi pemberi kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Produktivitas
Sampai dengan akhir tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan layanan yang meliputi:
1. Layanan Pensiun, yang terdiri dari:
   a. Penyaluran Pembayaran Pensiun Dapem sebesar Rp16,09 triliun dengan jumlah pensiunan yang dibayar sebanyak .
   b. Pembayaran Pensiun Non Dapem:
      1. Pembayaran Pensiun Pertama telah disalurkan Rp224,81 miliar kepada Peserta penerima pensiun pertama 40.354 orang.
      2. Pembayaran Uang Kekurangan Pensiun (UKP) telah disalurkan Rp221,42 miliar kepada Peserta pensiun 33.739 orang.
      3. Pembayaran Uang Duka Wafat (UDW) telah disalurkan Rp139,57 miliar kepada Peserta pensiun 18.568 orang.

2. Pembayaran Nilai Tunai Iuran Pensiun
Sampai dengan Tahun 2022, pembayaran Nilai Tunai Iuran Pensiun mencapai Rp25,60 miliar yang dibayarkan kepada 880 Peserta.

Profitabilitas
Profitabilitas Program Pensiun tidak dapat dihitung karena berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, AIP merupakan dana milik Peserta secara kolektif yang dikuasai Pemerintah. Ketentuan terkait penggunaan dana AIP diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Parents' allowance.
f. Death benefits.
g. Disability allowance.

2. Cash value of pension contribution
Pension Contribution Cash Value is given to participants who are dismissed with honour or dishonour without the right to pension, pension benefits, allowances, or severance pay.

Pension Plan Contributions/Premiums, consisting of:
1. Participant contributions/premiums amounting to 4.75% of basic salary plus monthly spouse and child allowances;
2. Employer contributions/premiums will be regulated by a separate Government Regulation.

Productivity
Until the end of 2022, service activities have been carried out which include:
1. Pension Services, which consist of:
   a. Distribution of Dapem Pension Payments amounting to IDR16.09 trillion with a total of paid.
   b. Non Dapem Pension Payments:
      1. First Pension Payment has been disbursed IDR224.81 billion to 40,354 first pension recipients.
      2. Payment of Pension Shortfall (UKP) has been disbursed IDR221.42 billion to 33,739 pension participants.
      3. Payment of Death Benefit (UDW) has been disbursed IDR139.57 billion to 18,568 pension participants.

2. Payment of Cash Value of Pension Contributions
Until 2022, the payment of the Cash Value of Pension Contributions reached IDR25.60 billion paid to 880 Participants.

Profitability
Profitability of the Pension Plan cannot be calculated because based on Article 40 of Government Regulation Number 102 of 2015, AIP is a fund owned by Participants collectively controlled by the Government. Provisions related to the use of AIP funds are regulated in the applicable laws and regulations.

Alur Kerja/Produksi

ASABRI merupakan perusahaan asuransi yang fokus pada layanan bersifat jasa. Produk yang disampaikan kepada peserta berupa manfaat asuransi dan pensiun, bukan produk hasil industri. Penyampaian manfaat asuransi dan pensiun dilaksanakan langsung kepada Peserta yang mengajukan klaim ke Kantor Cabang ASABRI di seluruh Indonesia. Layanan ASABRI dilakukan secara desentralisasi di seluruh Kantor Cabang ASABRI baik Tipe A, B, dan C, serta bekerja sama dengan 13 (tiga belas) Mitra Perbankan dan PT Pos Indonesia sebagai Mitra Bayar ASABRI.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada para Peserta, ASABRI telah memiliki sistem layanan terpadu untuk proses klaim manfaat asuransi dan pensiun. Hal itu berarti bahwa untuk proses setiap jenis produk asuransi dan pensiun yang saling terkait peserta tidak perlu mengajukan klaim secara terpisah dengan persyaratan yang berbeda, namun cukup mengajukan klaim untuk satu jenis produk saja, otomatis produk lain yang terkait akan langsung diproses dan dibayarkan kepada Peserta yang bersangkutan.

Dengan adanya sistem layanan yang terpadu, kegiatan layanan semakin efisien dari segi pengajuan persyaratan administrasi dan kecepatan penyelesaian klaim. Jika persyaratan yang diajukan oleh Peserta telah lengkap dan tervalidasi maka dalam waktu 1 jam, peserta dapat langsung memperoleh surat pemberitahuan yang akan dibawa ke mitra bayar untuk proses pencairan. Kecepatan layanan, sistem layanan berkualitas, SDM yang kompeten serta desentralisasi layanan, ASABRI menjamin proses layanan kepada Peserta dapat terwujud secara tepat waktu, efektif, dan efisien.

Workflow/Production

ASABRI is an insurance company that focuses on services. Products delivered to participants in the form of insurance and pension benefits, not industrial products. The delivery of insurance and pension benefits is carried out directly to Participants who submit claims to ASABRI Branch Offices throughout Indonesia. ASABRI services are carried out in a decentralised manner in all ASABRI Branch Offices, both Type A, B and C, and in collaboration with 13 (thirteen) Banking Partners and PT Pos Indonesia as ASABRI Paying Partners.

In order to improve the quality of service to Participants, ASABRI has an integrated service system for the process of claiming insurance and pension benefits. This means that for the process of each type of insurance and pension product that is interrelated, participants do not need to submit claims separately with different requirements, but simply submit a claim for one type of product, automatically other related products will be directly processed and paid to the Participant concerned.

With an integrated service system, service activities are more efficient in terms of submitting administrative requirements and speed of claim settlement. If the requirements submitted by the Participant are complete and validated then within 1 hour, the participant can immediately get a notification letter which will be taken to the paying partner for the disbursement process. Speed of service, quality service system, competent human resources and decentralisation of services, ASABRI ensures that the service process to Participants can be realised in a timely, effective and efficient manner.

Tinjauan Operasional
Operational Overview

ASABRI Terpercaya, Melayani

Dari segi operasional, Perusahaan berupaya untuk terus melakukan transformasi ke arah digitalisasi, ASABRI telah melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta penerapan sistem autentikasi digital sesuai dengan standar dan *best practice*. Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan pengembangan sistem yang dapat memudahkan peserta dalam melakukan autentikasi secara digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi ASABRI STAR. Perseroan

ASABRI Trusted, Serving

In terms of operations, the Company strives to continue to transform towards digitalisation, ASABRI has carried out the construction and development and implementation of a digital authentication system in accordance with standards and best practices. In 2022, the Company developed a system that can facilitate participants in conducting digital authentication which can be accessed anytime and anywhere through the ASABRI STAR application. The Company also issued a Circular Letter

juga menerbitkan Surat Edaran terkait Tata Cara dan Pelaksanaan Autentikasi Digital telah disahkan dan disebar luaskan ke Kantor Cabang dan Mitra Bayar, sampai dengan tahun 2022, aplikasi tersebut telah digunakan oleh 184.655 peserta pensiun.

Sampai dengan tahun 2022, realisasi jumlah peserta ASABRI mencapai orang. Jumlah peserta tersebut terdiri dari peserta aktif orang dan Peserta pensiun . Dan jumlah klaim yang telah diselesaikan sebanyak 66.829 klaim dengan pencapaian jumlah klaim sesuai standar waktu proses selama 1 jam sebesar 99,12% dibandingkan dengan sasarannya yaitu 100%.

Adapun upaya lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas data peserta ASABRI, Perseroan terus mendorong pelaksanaan sosialisasi *enrollment* kepada peserta dalam bentuk perekaman wajah untuk *database* peserta dengan harapan agar data terkait peserta semakin valid dan akurat. Adapun sampai dengan Tahun 2022, pencapaian *enrollment* sebanyak 330.231 peserta pensiun atau telah mencapai 71,17% dari jumlah peserta pensiun sebanyak . Upaya peningkatan *database* kepesertaan telah dilakukan dan akan terus disempurnakan. Selain itu, ASABRI juga terus melakukan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait (TNI dan Polri).

Tak lupa, ASABRI juga memiliki Aplikasi ASABRI Mobile yang sudah dapat diunduh dan dipergunakan peserta untuk memberikan *update* data. Adapun selama tahun 2022, peserta yang telah melakukan registrasi sebanyak 342.071 peserta, meningkat 97,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya *database* yang baik, maka berdampak pada tingkat akurasi perhitungan liabilitas.

ASABRI terus melakukan upaya memperluas jangkauan layanan untuk mempercepat pengajuan klaim melalui ASABRI Link dengan metode *Office Channeling*. Sampai dengan Tahun 2022, terdapat 1.806 titik layanan di seluruh Indonesia dengan klaim yang terselesaikan sebanyak 56.332 klaim. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta dan *stakeholder* ASABRI di seluruh Indonesia atas program dan manfaat yang di terima, ASABRI melakukan sosialisasi baik secara luring dan daring. Sampai dengan Desember 2022, sosialisasi ASABRI telah dilaksanakan di wilayah Kantor Cabang sebanyak 617 kegiatan di seluruh Indonesia.

related to the Procedures and Implementation of Digital Authentication has been ratified and disseminated to Branch Offices and Paying Partners, until 2022, the application has been used by 184,655 pension participants.

Until 2022, the realization of the number of ASABRI participants reached people. The number of participants consists of active participants and pension participants. And the number of claims that have been resolved is 66,829 claims with the achievement of the number of claims according to the standard processing time of 1 hour of 99.12% compared to the target of 100%.

As for other efforts in order to improve the quality of ASABRI participant data, the Company continues to encourage the implementation of enrollment socialisation to participants in the form of face recording for the participant database in the hope that data related to participants will be more valid and accurate. As for up to 2022, the achievement of enrolment is 330,231 pension participants or 71.17% of the total number of pension participants of . Efforts to improve the membership database have been made and will continue to be refined. In addition, ASABRI also continues to communicate better with related agencies (TNI and Polri).

Not to forget, ASABRI also has ASABRI Mobile Apps which can be downloaded and used by participants to provide data updates. As for 2022, participants who have registered as many as 342,071 participants, an increase of 97.8% compared to the previous year. With a good database, it has an impact on the accuracy of the calculation of liabilities.

ASABRI continues to make efforts to expand service coverage to accelerate claim submission through ASABRI Link with the Office Channeling method. Until 2022, there were 1,806 service points throughout Indonesia with 56,332 claims resolved. In addition, in order to increase the understanding of ASABRI participants and stakeholders throughout Indonesia of the programs and benefits received, ASABRI conducts socialisation both offline and online. As of December 2022, ASABRI socialisation has been carried out in the Branch Office area as many as 617 activities throughout Indonesia.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan melalui Laporan Audit No. 00196/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ASABRI (Persero) tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK) dan intrepretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan.

Laporan keuangan PT ASABRI (Persero) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur laporan keuangan selain Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan ("LMPMD") dan pengukuran Piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu ("Piutang *PSL*") program Tabungan Hari Tua ("THT") adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. LMPMD program THT sesuai dengan PMK 66/2021 dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Piutang *PSL* program THT sesuai dengan PMK 66/2021 yang diukur berdasarkan nilai sisa tagihan.

This comprehensive financial performance analysis is based on information obtained from the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the period ended December 31, 2022 which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan through Audit Report No. 00196/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/II/2023 dated February 28, 2023 and obtained an unmodified opinion, in all material respects, on the financial position of PT ASABRI (Persero) dated December 31, 2022, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. December 31, 2022, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

During the year, the Company has adopted new and revised financial accounting standards (SAK) and interpretation of financial accounting standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants that are considered relevant to its operations and affect its financial statements.

The financial statements of PT ASABRI (Persero) for the period ended December 31, 2022 have been prepared and presented in accordance with the fair presentation financial reporting framework for the specific purpose of complying with the provisions of Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") concerning Management Procedures Contributions and Reporting on the Implementation of Program Tabungan Hari Tua, Work Accident and Death Insurance Program for State Apparatus Employees, Soldiers of the Indonesian National Army and Members of the Indonesian National Police, as follows:

1. The elements of the financial statements other than the Liability for Future Policy Benefits ("LMPMD") and the measurement of Dues Receivable for Past Liabilities ("PSL Receivable") of the Old Age Savings ("THT") program are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2. LMPMD of THT program is in accordance with PMK 66/2021 using the calculation method and assumptions approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.
3. PSL receivables for THT program are in accordance with PMK 66/2021 which is measured based on the residual value of the bills.

Laporan Laba Rugi Komprehensif
Statement of Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Pendapatan Premi Premium Income				
Hasil Investasi Investment Return				
Program THT, JKK, dan JKm THT, JKK, and JKm Program				
Program Akumulasi Iuran Pensiun Pension Contribution Accumulation Program				
Pendapatan Lain-lain - Bersih Other Income - Net				
Jumlah Pendapatan Total Revenue				
Pengembalian Hasil Investasi Program Akumulasi Iuran Pensiun Return on Investment of Accumulated Pension Contribution Program				
Jumlah Pendapatan Bersih Total Net Revenue				
Klaim dan Manfaat Claims and Benefits				
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (Increase) Decrease in Liability for Future Policy Benefits				
Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun Reimbursement of Operational Costs of Pension Implementation				
Umum dan Administrasi General and Administration				
Jumlah Beban Total Expenses				
Laba (Rugi) sebelum Pajak Profit (Loss) before Tax				
Beban Pajak Kini Current Tax Expense				
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefit (Expense)				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year				
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap Gain (Loss) on Revaluation of Fixed Assets				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca-Kerja Remeasurement of Benefits Post-Employment Benefits				

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Efek Pajak terkait Related Tax Effects				
Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi atas Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual Unrealised Gains (Losses) on Available-for-Sale Marketable Securities				
Efek Pajak terkait Related Tax Effect				
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year after Tax				
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year				

Pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah pendapatan bersih senilai , naik senilai atau 226,45% dibandingkan dengan jumlah pendapatan bersih pada tahun 2021 senilai PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah beban senilai , naik juta atau 140,80% jika dibandingkan dengan jumlah beban pada tahun 2021 sebesar .

In 2022, PT ASABRI (Persero) recorded total net income of , an increase of or 226.45% compared to the total net income in 2021 of . PT ASABRI (Persero) recorded total expenses of , an increase of or 140.80% when compared to the total expenses in 2021 of .

Berdasarkan jumlah pendapatan bersih dan beban di atas, PT ASABRI (Persero) mencatatkan laba tahun berjalan pada tahun 2022 senilai , turun senilai a atau -52,59% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun 2021 senilai juta. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai turun senilai atau -54,58% jika dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2021 senilai .

Based on the total net income and expenses above, PT ASABRI (Persero) recorded a profit for the year in 2022 of , a decrease of n or -52.59% compared to the profit for the year in 2021 of . The total comprehensive income for the year of PT ASABRI (Persero) in 2022 was valued at , a decrease of or -54.58% when compared to the total comprehensive income for the year 2021 of .

Pendapatan Premi

Pendapatan Premi per 31 Desember 2022 dan 2021

Premium Income

Premium Income as of December 31, 2022 and 2021

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Program THT UPSL UPSL THT Program				
Jumlah Total				

Pendapatan premi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 288,23% dibandingkan dengan pendapatan premi pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang memicu kenaikan tersebut adalah pengakuan premi UPSL senilai di bulan Februari 2022.

Sejak 30 September 2020, terdapat perubahan jumlah iuran program JKK dari semula sebesar 0,41% menjadi sebesar 0,62% dan program JKm dari semula sebesar 0,67% menjadi sebesar 0,81% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun besaran proporsi premi JKK dan JKm bila dibandingkan total penerimaan premi jika tanpa memperhitungkan *UPSL* pada tahun 2022 masing-masing sebesar 12,46% untuk JKK dan 16,28% untuk JKm. Di samping itu, peningkatan iuran program JKK dan JKm tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan jumlah manfaat asuransi program JKK dan JKm yang diterima oleh peserta ASABRI sehingga tidak berdampak signifikan ke laba Perusahaan tahun 2022 dan 2021. Sedangkan, iuran program THT sebesar 3,25% tidak mengalami perubahan sejak tahun 1975.

PT ASABRI (Persero)'s premium income in 2022 was recorded at , an increase of or 288.23% compared to premium income in 2021 of . The main thing that triggered the increase was the recognition of UPSL premium worth in February 2022.

Since September 30, 2020, there has been a change in the amount of contributions for the JKK program from 0.41% to 0.62% and the JKm program from 0.67% to 0.81% in accordance with Government Regulation Number 54 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 102 of 2015 concerning Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police. However, the proportion of JKK and JKm premiums when compared to the total premium revenue without taking into account UPSL in 2022 respectively 12.46% for JKK and 16.28% for JKm, respectively. In addition, the increase in JKK and JKm program contributions was followed by changes in the increase in the amount of JKK and JKm program insurance benefits received by ASABRI participants so that it did not have a significant impact on the company's profit in 2022 and 2021. Meanwhile, the THT program contribution of 3.25% has not changed since 1975.

Hasil Investasi

Hasil Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Investment Return

Investment Return as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT, JKK, dan JKm THT, JKK, and JKm Program				
Program AIP AIP Program				

Hasil investasi program THT, JKK, dan JKm PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , lebih rendah dibandingkan dengan hasil investasi program THT, JKK, dan JKm pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah turunnya hasil keuntungan penjualan dan dividen saham serta bunga deposito berjangka.

Hasil investasi program AIP PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai lebih rendah dibandingkan dengan hasil investasi program AIP pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah pelepasan investasi yang menurun dibandingkan dengan pelepasan investasi pada tahun 2021.

The investment return of PT ASABRI (Persero)'s THT, JKK, and JKm Program in 2022 was recorded at I , lower than the investment return of THT, JKK, and JKm Program in 2021 of . The main reason for the decrease was the decline in profit from sales and dividends on shares and interest on time deposits.

The investment return of PT ASABRI (Persero) AIP program in 2022 was recorded at , lower than the investment return of AIP program in 2021 of . The main thing that caused the decline was the release of investments which decreased compared to the release of investments in 2021.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Other Income

Other Income as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Imbal Jasa *Flagging* Flagging Service Fee				
Pendapatan Sewa Gedung Building Rental Income				
Jasa Giro Current Account Services				
Pendapatan Pinjaman Polis Policy Loan Income				
Pendapatan Hasil Lelang Auction Revenue				
Laba (Rugi) Selisih Kurs Gain (Loss) on Foreign Exchange				
Imbal Jasa Pengelolaan Investasi Investment Management Fee				
Pendapatan *Fee* Taspen Life Taspen Life Fee Income				
Lain-Lain Other				
Jumlah Total				

Pendapatan lain-lain PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan lain-lain pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah menurunnya imbal jasa pengelolaan investasi dari program AIP senilai dibandingkan imbal jasa pengelolaan investasi dari program AIP pada tahun 2021 karena turunnya hasil investasi AIP tahun 2022.

Other income of PT ASABRI (Persero) in 2022 was recorded at , lower than the other income in 2021 of . The main reason for the decline was the decrease in investment management fees from the AIP program amounting to compared to investment management fees from the AIP program in 2021 due to lower AIP investment returns in 2022.

Beban Klaim dan Manfaat

Beban Klaim dan Manfaat per 31 Desember 2022 dan 2021

Claims and Benefits Expenses

Claims and Benefits Expenses as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Jumlah Total				

Beban klaim dan manfaat PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat sebesar , turun senilai atau -10,59% dibandingkan dengan beban klaim dan manfaat pada tahun 2021 sebesar . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah meredanya COVID-19 di Indonesia sehingga jumlah klaim pensiun meninggal dunia program THT dan JKm di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Selain itu, pada program JKK tidak ada kejadian khusus di tahun 2022, tidak seperti di tahun 2021 ada kejadian khusus, yakni tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang menewaskan anggota TNI Angkatan Laut (AL) sebanyak 53 orang sehingga pengajuan klaim JKK meningkat.

Claims and benefits expenses of PT ASABRI (Persero) in 2022 were recorded at , a decrease of or -10.59% compared to claims and benefits expenses in 2021 of . The main reason for the decrease was the easing of COVID-19 in Indonesia so that the number of death pension claims for the THT and JKm Program in 2022 decreased compared to 2021. In addition, in the JKK program there were no special events in 2022, unlike in 2021 when there was a special event, namely the sinking of the KRI Nanggala 402 ship which killed 53 members of the Navy (AL) so that JKK claims increased.

Rasio beban klaim dan manfaat PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing senilai 108,64% dan senilai 123,79%. Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah penurunan rasio beban klaim dan manfaat program THT, JKK, dan JKm.

The ratio of claim expenses and benefits of PT ASABRI (Persero) in 2022 and 2021 was 108.64% and 123.79%, respectively. The main thing that caused the decline was a decrease in the ratio of claim expenses and benefits for the THT, JKK, and JKm Program.

Beban (Kenaikan) Penurunan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

Beban (Kenaikan) Penurunan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan per 31 Desember 2022 dan 2021

Expense (Increase) Decrease in Liability for Future Policy Benefits

Expense (Increase) Decrease in Liabilities for Future Policy Benefits as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Jumlah Total				

Beban (kenaikan) penurunan LMPMD PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai minus , naik senilai atau 107,56% dibandingkan dengan beban (kenaikan) penurunan LMPMD pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah penurunan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2022 untuk program THT, JKK, dan JKm masing-masing sebesar 9,50%, 7,35%, dan 7,35% dibandingkan dengan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 9,70%, 7,40%, dan 7,40% untuk program THT, JKK, dan JKm. Peningkatan LMPMD tersebut dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tahun 2022.

The expense (increase) of PT ASABRI (Persero) LMPMD decrease in 2022 was recorded at minus , an increase of or 107.56% compared to the expense (increase) of LMPMD decrease in 2021 of . The main reason for the increase was the decrease in actuarial interest rates as of December 31, 2022 for the THT, JKK, and JKm Program of 9.50%, 7.35%, and 7.35%, respectively, compared to the actuarial interest rates as of December 31, 2021 of 9.70%, 7.40%, and 7.40% for the THT, JKK, and JKm Program, respectively. The increase in LMPMD is recorded as an expense in the 2022 income statement.

Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun

Penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 1,59% dibandingkan dengan penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun pada tahun 2021 senilai . Penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 366/KMK.02/2022 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero) tahun 2022, penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022.

Reimbursement of Operational Costs of Pension Implementation

PT ASABRI (Persero)'s reimbursement of operational costs for pension provision in 2022 was recorded at , an increase of or 1.59% compared to the reimbursement of operational costs for pension provision in 2021 of n. Reimbursement of operational costs for pension administration is regulated in the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia number 366/KMK.02/2022 concerning the Amount of Operational Costs Implementation and Unit Costs of Payment of Pension Benefits carried out by PT ASABRI (Persero) in 2022, reimbursement of operational costs for pension administration using the State Budget for fiscal year 2022.

Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi per 31 Desember 2022 dan 2021

General and Administration Expenses

General and administrative expenses as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Gaji dan Tunjangan Pegawai Employee Salaries and Allowances				
Umum dan Administrasi General and Administration				
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortisation				
Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Bermotor Building and Vehicle Maintenance				
Jumlah Total				

Beban umum dan administrasi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat sebesar , turun sebesar juta atau -3,31% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tahun 2021 senilai minus . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah menurunnya biaya umum dan administrasi senilai atau -30,3% dibandingkan biaya umum dan administrasi pada tahun 2021.

PT ASABRI (Persero)'s general and administrative expenses in 2022 were recorded at , a decrease of or -3.31% compared to general and administrative expenses in 2021 of minus . The main thing that caused the decrease was the decrease in general and administrative expenses of or -30.3% compared to general and administrative expenses in 2021.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah penurunan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2022 untuk program THT, JKK, dan JKm masing-masing sebesar 9,50%, 7,35%, dan 7,35% dibandingkan dengan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 9,70%, 7,40%, dan 7,40% untuk program THT, JKK, dan JKm. Peningkatan LMPMD tersebut dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tahun 2022. Selain itu, disebabkan oleh hasil investasi program THT, JKK, dan JKm dari hasil penjualan investasi di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021.

Profit for the Year

PT ASABRI (Persero)'s profit for the year 2022 was recorded at , lower than the profit for the year 2021 of . The main things that caused the decline were. The decrease in actuarial interest rate as of December 31, 2022 for THT, JKK, and JKm plans was 9.50%, 7.35%, and 7.35% respectively compared to the actuarial interest rate as of December 31, 2022 of 9.70%, 7.40%, and 7.40% for THT, JKK, and JKm plans respectively. The increase in LMPMD is recorded as an expense in the 2022 income statement. In addition, it is due to the lower investment returns of the THT, JKK, and JKm Program from the sale of investments in 2022 compared to 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Other Comprehensive Income

Other Comprehensive Income as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap Gains (Losses) on Revaluation of Fixed Assets				
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca-Kerja Remeasurement of Benefits Post-Employment Benefits				
Efek Pajak terkait Related Tax effects				
Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi atas Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual Unrealised Gains (Losses) on Available-for-Sale Marketable Securities				
Efek Pajak terkait Related Tax effects				
Jumlah Total				

Penghasilan komprehensif lain PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai minus , lebih rendah jika dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021 senilai minus . Kenaikan tersebut disebabkan oleh pengukuran kembali imbalan pasca-kerja dan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing senilai atau -3,90%, dan a atau -77,53% dibandingkan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2021.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah penurunan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2022 untuk program THT, JKK, dan JKm masing-masing sebesar 9,50%, 7,35%, dan 7,35% dibandingkan dengan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 9,70%, 7,40%, dan 7,40% untuk program THT, JKK, dan JKm. Peningkatan LMPMD tersebut dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tahun 2022. Selain itu, disebabkan oleh hasil investasi program THT, JKK, dan JKm dari hasil penjualan investasi di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan yang disebabkan oleh pengukuran kembali imbalan pasca-kerja dan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual.

Other comprehensive income of PT ASABRI (Persero) in 2022 was recorded at minus I , lower when compared to other comprehensive income in 2021 of minus . The increase was due to the re-measurement of post-employment benefits and losses that unrealised gain on available-for-sale marketable securities amounted to or -3.90%, and or -77.53% compared to other comprehensive income in 2021.

Comprehensive Income for the Year

PT ASABRI (Persero)'s comprehensive income for the year 2022 was recorded at n, lower than the total comprehensive income for the year 2021 of The main reason for the decrease was a decrease in the actuarial interest rate as of December 31, 2022 for the THT, JKK, and JKm Program of 9.50%, 7.35%, and 7.35% respectively compared to the actuarial interest rate as of December 31, 2021 of 9.70%, 7.40%, and 7.40% for the THT, JKK, and JKm Program respectively. The increase in LMPMD is recorded as an expense in the 2022 income statement. In addition, it was due to the lower investment returns of the THT, JKK, and JKm Program from the sale of investments in 2022 compared to 2021. Other comprehensive income decreased due to the remeasurement of post-employment benefits and unrealised losses on available-for-sale marketable securities.

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021

Financial Position Report as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Aset Assets				
Liabilitas Liabilities				
Ekuitas Equity				

Sampai dengan akhir tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah aset senilai , naik senilai atau 13.17% dibandingkan akhir tahun 2021 senilai . Jumlah liabilitas PT ASABRI (Persero) tahun 2022 mengalami peningkatan senilai atau 2,04% menjadi dibandingkan akhir tahun 2021 senilai . Jumlah ekuitas PT ASABRI (Persero) tahun 2022 mengalami peningkatan senilai atau 69,86% menjadi minus dibandingkan akhir tahun 2021 senilai minus .

Until the end of 2022, PT ASABRI (Persero) recorded total assets of , an increase of or 13.17% compared to the end of 2021 of . The total liabilities of PT ASABRI (Persero) in 2022 increased by I or 2.04% to compared to the end of 2021 of . The total equity of PT ASABRI (Persero) in 2022 increased by or 69.86% to minus compared to the end of 2021 of minus n.

Aset
Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

Assets
Assets as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Kas dan Bank Cash and Bank				
Deposito Berjangka Time Deposits				
Efek-efek Marketable Securities				
Piutang Lain-lain Other Receivables				
Properti Investasi Investment Property				
Aset Tetap – Bersih Fixed Assets - Net				
Aset Tak Berwujud – Bersih Intangible Assets - Net				
Aset Pajak Tangguhan – Bersih Deferred Tax Assets - Net				
Akumulasi Iuran Pensiun Accumulated Pension Contributions				

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Aset Pembayaran Pensiun Pension Payment Asset				
Aset Lain-lain Other Assets				
Jumlah Total				

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah aset senilai , naik senilai atau 13,17% jika dibandingkan dengan jumlah aset pada 31 Desember 2021 senilai

Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah pengakuan piutang premi *Unfunded Past Service Liability (UPSL)* senilai dan naiknya nilai aset Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) senilai atau 1,08% dari nilai awal pada 31 Desember 2021. Pada tahun 2022, telah diterima sebagian realisasi atas *UPSL* yakni sebesar yang dialokasikan untuk membeli deposito dan obligasi.

As of December 31, 2022, PT ASABRI (Persero) recorded total assets of , an increase of n or 13.17% when compared to total assets as of December 31, 2021 of

The main reasons for the increase were the recognition of Unfunded Past Service Liability (UPSL) premium receivables worth n and an increase in the value of Accumulated Pension Contributions (AIP) assets worth or 1.08% from the initial value on December 31, 2021. In 2022, partial realization of UPSL of was received and allocated to purchase deposits and bonds.

Kas dan Bank

Kas dan Bank per 31 Desember 2022 dan 2021

Cash and Bank

Cash and Bank as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Kas Cash				
Kas pada Bank Cash in Bank				
Jumlah Total				

Kas dan Bank PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah kas dan Bank pada 31 Desember 2021 senilai . Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penempatan kas pada Bank senilai a atau -38,31% dari nilai awal pada 31 Desember 2021 senilai menjadi senilai pada 31 Desember 2022. Perusahaan berupaya untuk mengoptimalkan hasil investasi melalui penempatan dana kas dan bank ke instrumen investasi pendapatan tetap untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, dengan tetap memerhatikan kesesuaian kebutuhan likuiditas.

Cash and Bank of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 was recorded at , lower than the amount of cash and bank as of December 31, 2021 of I . The decrease was due to a decrease in cash placement with banks of or -38.31% from the initial value on 31 December 31, 2021 of to on December 31, 2022. The Company endeavours to optimise its investment through the placement of cash and bank funds into fixed income investment instruments to provide higher returns, while still paying attention to the suitability of liquidity needs.

Deposito Berjangka

Deposito Berjangka per 31 Desember 2022 dan 2021

Time Deposits

Time deposits as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Jumlah Total				

Deposito berjangka PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 50,91% dibandingkan dengan jumlah deposito berjangka pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya penempatan deposito berjangka program THT senilai atau 159,60% dari nilai awal pada 31 Desember 2021 senilai menjadi senilai pada 31 Desember 2022. Sumber dana penempatan deposito berjangka program THT berasal dari penerimaan *UPSL*. Sementara itu, deposito berjangka program JKK dan JKm mencatatkan penurunan masing-masing senilai atau -47,54% dan atau -75,00% dari nilai awal masing-masing pada 31 Desember 2021 senilai dan senilai Penurunan deposito berjangka program JKK dan JKm untuk diinvestasikan ke instrumen investasi pendapatan tetap lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, seperti obligasi jenis Surat Berharga Negara (SBN).

PT ASABRI (Persero)'s time deposits as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 50.91% compared to the total time deposits as of December 31, 2021 of . The increase was triggered by an increase in the placement of time deposits for the THT program of or 159.60% from the initial value on December 31, 2021 of to l on December 31, 2022. The source of funds for the placement of time deposits for the THT program comes from UPSL revenues. Meanwhile, time deposits of JKK and JKm Program recorded a decrease of million or -47.54% and or -75.00% respectively from their initial value as of December 31, 2021 of and l . Decrease in time deposits of JKK and JKm Program to be invested in other fixed income investment instruments that provide returns

Efek-Efek

Efek-efek per 31 Desember 2022 dan 2021

Marketable Securities

Marketable Securities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi Fair Value through Profit and Loss Statement				
Saham Shares				
Aset Tersedia untuk Dijual Available-for-sale Assets				
Saham Shares				
Obligasi Bonds				

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Medium Term Notes (MTN)				
Reksa Dana Mutual Funds				
Dana Investasi Real Estate (DIRE) Real Estate Investment Fund (REIT)				
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Securities Collective Investment Contract Asset-Backed Securities				
DINFRA				
Aset Dimiliki hingga Jatuh Tempo: Held to Maturity Assets:				
Obligasi Bonds				
Medium Term Notes (MTN)				
Jumlah Total				

Efek-efek yang dimiliki oleh PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 20,62% dibandingkan dengan jumlah efek-efek pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya aset tersedia untuk dijual dan aset dimiliki hingga jatuh tempo berupa obligasi yang mencatatkan kenaikan masing-masing senilai dan atau 23,13% dan 1822,85% dari nilai awal pada 31 Desember 2021. Obligasi yang mengalami peningkatan selama tahun 2022 adalah obligasi jenis SBN dan sukuk pemerintah.

Marketable securities held by PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 20.62% compared to the total marketable securities as of December 31, 2021 of . The increase was triggered by the increase in available-for-sale assets and held-to-maturity assets in the form of bonds, which recorded an increase of and or 23.13% and respectively 1822.85% of the initial value on December 31, 2021. Bonds that experienced an increase during 2022 were SBN and government sukuk.

Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Other receivables

Other Receivables as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Piutang Hasil Investasi Investment Return Receivable				
Pengelolaan Investasi Program AIP AIP Program Investment Management				
Piutang Premi Premiums Receivable				
Piutang Premi UPSL UPSL Premium Receivable				
Piutang Penjualan Reksa Dana Mutual Fund Sales Receivable				
Lain-Lain Other				
Jumlah Total				

Piutang lain-lain PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 2373,79% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut dipicu oleh adanya pengakuan piutang premi *UPSL* di tahun 2022.

Other receivables of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 2373.79% compared to the amount of other receivables as of December 31, 2021 of . The increase was triggered by the recognition of UPSL premium receivables in 2022.

Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Investment Property

Investment Property as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Tanah Land				
Bangunan Building				
Jumlah Total				

Properti investasi PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , turun senilai juta atau -5,98% dibandingkan dengan jumlah properti investasi pada 31 Desember 2021 senilai a. Penurunan tersebut disebabkan oleh beban penyusutan selama tahun 2022 dan reklasifikasi properti investasi ke aset lain-lain.

Investment property of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 was recorded at , a decrease of or -5.98% compared to the amount of investment property as of December 31, 2021 of . The decrease was due to depreciation expense during 2022 and reclassification of investment property to other assets.

Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

Fixed Assets

Fixed Assets as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	%
Bangunan Building				
Aset Hak-Guna Right-of-Use Assets				
Aset Tetap Lain-Lain Other Fixed Assets				
Jumlah Total				

Aset tetap PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 0,20% dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut dipicu oleh revaluasi nilai aset tetap.

PT ASABRI (Persero)'s fixed assets as of December 31, 2022 were recorded at I , an increase of n or 0.20% compared to the total fixed assets as of December 31, 2021 of . The increase was triggered by the revaluation of fixed assets.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 342,36% dibandingkan dengan jumlah aset takberwujud pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut dipicu oleh pembangunan dan pengembangan serta penerapan sistem autentikasi digital untuk peserta ASABRI.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 2,37% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2021 senilai .

Aset Akumulasi Iuran Pensiun

Aset Akumulasi Iuran Pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021

Intangible Assets

PT ASABRI (Persero)'s intangible assets as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 342.36% compared to the total intangible assets as of December 31, 2021 of . The increase was triggered by the construction and development and implementation of a digital authentication system for ASABRI participants.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 2.37% compared to the total deferred tax assets as of December 31, 2021 of .

Asset Accumulated Pension Contributions

Accumulated Pension Contributions as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Aset Investasi Investment Assets				
Saham Shares				
Deposito Berjangka Time Deposits				
Obligasi Bond				
Medium Term Notes (MTN)				
Reksa Dana Mutual Funds				
Aset bukan Investasi Non-Investment Assets				
Kas di Bank Cash at Bank				
Piutang Iuran Dues Receivable				
Piutang Hasil Investasi Investment Return Receivable				
Piutang BUM KPR BUM KPR Receivables				
Piutang PUM KPR PUM KPR Receivables				
Piutang Lain-Lain Other Receivables				
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net				
Jumlah Total				

Aset program AIP PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 1,08% dibandingkan dengan jumlah aset AIP pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aset investasi program AIP pada instrumen obligasi yang mencatatkan kenaikan senilai atau 12,00% dari nilai awal pada 31 Desember 2021. Obligasi yang mengalami peningkatan selama tahun 2022 adalah obligasi jenis SBN.

PT ASABRI (Persero) AIP program assets as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 1.08% compared to the total AIP assets as of December 31, 2021 of The increase was due to the increase in AIP program investment assets in bond instruments which recorded an increase of or 12.00% from the initial value on December 31, 2021. Bonds that experienced an increase during 2022 were SBN type bonds.

Aset Pembayaran Pensiun

Aset Pembayaran Pensiun per 31 Desember 2021 dan 2020

Pension Payment Assets

Pension Payment Assets as at December 31, 2021 and 2020

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Bank				
Titipan Uang Pensiun ke Mitra Bayar Entrust Retirement Money to Pay Partners				
Piutang dari Pemerintah Receivable from Government				
Jumlah Total				

Aset Pembayaran Pensiun PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah aset Pembayaran Pensiun pada 31 Desember 2021 senilai . Penurunan tersebut disebabkan menurunnya saldo titipan uang pensiun ke mitra bayar senilai atau -4,11% dari nilai awal pada 31 Desember 2021 .

PT ASABRI (Persero)'s pension payment assets as of December 31, 2022 were recorded at , lower than the total pension payment assets as of December 31, 2021 of . The decrease was due to a decrease in the balance of pension deposits to paying partners of or -4.11% of the initial value on December 31, 2021.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Other Assets

Other Assets as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Piutang Pinjaman Loan Receivables				
Uang Muka Pajak Tax Advances				
Piutang Pinjaman Polis dan Jasa *Flagging* Policy Loan Receivables and Flagging Services				
Lain-Lain Others				
Jumlah Total				

Aset lain-lain PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada 31 Desember 2021 senilai . Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang pinjaman polis dan jasa *flagging* senilai atau -68,16% dari nilai awal pada 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan belum diterimanya pembayaran atas utang jasa *flagging* sampa dengan 31 Desember 2022. Selain itu, penurunan terdapat pada uang muka pajak senilai atau -91,70% dari nilai awal pada 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 ada pemindahbukuan untuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) pajak penghasilan pasal 21 dan pajak badan serta SKP badan (beban pajak penghasilan kini).

Other assets of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , lower than the total other assets as of December 31, 2021 of . The decrease was due to a decrease in policy loan receivables and flagging services amounting to or -68.16% of the initial value on December 31, 2021. This was due to the non-receipt of payment for flagging services payable until December 31, 2022. In addition, the decrease was in advance tax amounting to or -91.70% of the initial value as of December 31, 2021. This is due to the overbooking in 2022 of tax assessment letters (SKP) for income tax article 21 and corporate tax and corporate SKP (current income tax expense).

Liabilitas

Liabilitas per 31 Desember 2022 dan 2021

Liabilities

Liabilities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Akrual dan Utang Lain-Lain Accruals and Other Payables				
Utang Investasi Investment Payable				
Utang Pajak Tax Payable				
Pendapatan Diterima di Muka Income Received in Advance				
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities				
Akumulasi Iuran Pensiun Accumulated Pension Contributions				
Liabilitas Pembayaran Pensiun Pension Payment Liability				
Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan Liability for Future Policy Benefits				
Estimasi Liabilitas Klaim Estimated Claims Liability				
Utang Klaim Claims Payable				
Jumlah Total				

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah liabilitas senilai , naik senilai atau 2,04% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah meningkatnya Liabilitas Manfaat

As of December 31, 2022, PT ASABRI (Persero) recorded total liabilities of , an increase of or 2.04% compared to total liabilities as of December 31, 2021 of . The main reason for the increase was the increase in Liabilities for Future Policy Benefits (LMPMD) resulting from the

Polis Masa Depan (LMPMD) yang berasal dari penurunan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2022 untuk program THT, JKK, dan JKm masing-masing sebesar 9,50%, 7,35%, dan 7,35% dibandingkan dengan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 9,70%, 7,40%, dan 7,40% untuk program THT, JKK, dan JKm senilai atau 4,55% dari nilai awal pada 31 Desember 2021.

decrease in actuarial interest rates as of December 31, 2022 for the THT, JKK, and JKm programs by 9.50%, 7.35%, and 7.35%, respectively, compared to the actuarial interest rates as of December 31, 2021 by 9.70%, 7.40%, and 7.40% for the THT, JKK, and JKm programs by or 4.55% from the initial value as of December 31, 2021.

Akrual dan Utang Lain-lain

Akrual dan Utang Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Accruals and Other Payables

Accruals and Other Payables as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Gaji dan Tunjangan Pegawai Employee Salary and Benefits				
BUM KPR BUM KPR				
Biaya Kantor Office Expenses				
Denda Pajak Tax Fines				
Lain-Lain Others				
Jumlah Total				

Akrual dan utang lain-lain PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , turun senilai atau -33,10% dibandingkan dengan jumlah akrual dan utang lain-lain pada 31 Desember 2021 senilai . Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya pencatatan BUM KPR karena adanya realisasi pembayaran utang BUM program khusus ke program AIP dan program reguler ke Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP).

Accruals and other payables of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , a decrease of or -33.10% compared to the total accruals and other payables as of December 31, 2021 of . The decrease was due to the decrease in the recording of BUM KPR due to the realization of payment of BUM special program debt to the AIP program and regular program to the Defence Resources Potential Development Foundation (YPPSDP).

Utang Investasi

Utang Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Investment Debt

Investment Payable as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Obligasi Bonds				
Properti Investasi Investment Property				
Jumlah Total				

Utang investasi PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 132,38% dibandingkan dengan jumlah utang investasi pada 31 Desember 2021 senilai R . Kenaikan tersebut disebabkan oleh pencatatan atas pembelian kembali properti investasi. Selain itu, adanya pembelian atas obligasi di akhir tahun 2022.

Investment payable of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 was recorded at , an increase of or 132.38% compared to the amount of investment payable as of December 31, 2021 of . The increase was due to the recording of the repurchase of investment property. In addition, there was a purchase of bonds at the end of 2022.

Utang Pajak

Utang pajak PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , turun senilai R atau -44,34% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada 31 Desember 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah turunnya PPh badan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Tax Payable

PT ASABRI (Persero)'s tax payable as of December 31, 2022 was recorded at , a decrease of or -44.34% compared to the amount of tax payable as of December 31, 2021 of . The main thing that caused the decrease was the decrease in corporate income tax in 2022 compared to 2021.

Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021

Income Received in Advance

Revenue Received in Advance as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Pihak Berelasi Related Party				
Pihak Ketiga Third Party				
Jumlah Total				

Pendapatan diterima di PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 57,64% dibandingkan dengan jumlah pendapatan diterima di muka pada 31 Desember 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah pengakuan penggantian premi.

Income received in PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 was recorded at n, an increase of n or 57.64% compared to the amount of income received in advance as of December 31, 2021 of n. The main reason for the increase was the recognition of premium reimbursement.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 14,40% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2021 senilai . Liabilitas imbalan kerja karyawan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dicatat berdasarkan Laporan Aktuaria Independen yang dilakukan oleh KKA Azwir Arifin dan Rekan dan PT Sienco Actuaries & Consultants dengan laporan Nomor 230178/LAAAAR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan Nomor 058/LA/IK/KKAICS/II-2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Employee Benefits Liability

Employee benefits liabilities of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 14.40% compared to the total employee benefits liabilities as of December 31, 2021 of . Employee benefits liabilities as of December 31, 2022 and 2021 were recorded based on the Independent Actuarial Reports conducted by KKA Azwir Arifin and Partners and PT Sienco Actuaries & Consultants with reports Number 230178/LAAAAR/II/2023 dated February 17, 2023 and Number 058/LA/IK/KKAICS/II-2022 dated February 2, 2022 using the projected unit credit method.

Liabilitas Akumulasi Iuran Pensiun

Liabilitas program AIP PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai naik senilai atau 1,08% dibandingkan dengan jumlah liabilitas program AIP pada 31 Desember 2021 senilai .

Accumulated Pension Contribution Liability

PT ASABRI (Persero)'s AIP program liabilities as of December 31, 2022 were recorded at , an increase of or 1.08% compared to the total AIP program liabilities as of December 31, 2021 of .

Liabilitas Pembayaran Pensiun

Liabilitas Pembayaran Pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021

Retirement Payment Liabilities

Pension payment liabilities as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Utang Pembayaran Pensiun Pension payment payable				
Kewajiban Penyaluran Dana Pensiun Pension Fund Disbursement Liability				
Liabilitas kepada Pemerintah Liability to Government				
Utang BPJS BPJS Debt				
Jumlah Total				

Liabilitas Pembayaran Pensiun PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , turun senilai atau -1,87% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Pembayaran Pensiun pada 31 Desember 2021 senilai .

Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah menurunnya liabilitas kepada pemerintah karena turunnya jumlah pengembalian ke kas negara atas *flagging* setor dan turunnya jumlah dana talangan untuk pembayaran pensiun Januari 2023 sebesar 0,60%.

PT ASABRI (Persero) Pension Payment Liability as of December 31, 2022 was recorded at a decrease of or -1.87% compared to the amount of Pension Payment Liability as of December 31, 2021 of .

The main reason for the decrease was the decrease in liabilities to the government due to a decrease in the amount of returns to the state treasury for flagging deposits and a decrease in the amount of bailout funds for pension payments in January 2023 by 0.60%.

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan per 31 Desember 2022 dan 2021

Liability for Future Policy Benefits

Liability for Future Policy Benefits as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT THT Program				
Jumlah Total				

LMPMD PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 4,55% dibandingkan dengan jumlah LMPMD pada 31 Desember 2021 senilai . Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2022 untuk program THT, JKK, dan JKm masing-masing sebesar 9,50%, 7,35%, dan 7,35% dibandingkan dengan tingkat bunga aktuaria pada 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 9,70%, 7,40%, dan 7,40% untuk program THT, JKK, dan JKm. Peningkatan LMPMD tersebut dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tahun 2022.

Pada 31 Desember 2022, perusahaan menerapkan perhitungan LMPMD tahun 2022 program THT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan tersebut, perusahaan menghitung LMPMD program THT dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tingkat bunga aktuaria sebesar 9,50%. Sedangkan, tingkat bunga aktuaria program THT sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku di Indonesia sebesar 7,35%. Dampak atas penerapan PMK 66/2021 telah disesuaikan ke LMPMD dan beban LMPMD.

PT ASABRI (Persero)'s LMPMD as of December 31, 2022 was recorded at n, an increase of or 4.55% compared to the total LMPMD as of December 31, 2021 of . The increase was due to a decrease in the actuarial interest rate as of December 31, 2022 for the THT, JKK, and JKm Program of 9.50%, 7.35%, and 7.35% respectively compared to the actuarial interest rate as of December 31, 2021 of 9.70%, 7.40%, and 7.40% for the THT, JKK, and JKm Program respectively. The increase in LMPMD is recorded as an expense in the 2022 income statement.

As of December 31, 2022, the company applied the calculation of LMPMD for 2022 for the THT program in accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of Tabungan Hari Tua, Work Accident and Death Insurance Program for Employees of the State Apparatus, Soldiers of the Indonesian National Army and Members of the Indonesian National Police. Based on the Regulation, the company calculates the LMPMD of the THT program by using the calculation method and assumptions approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with an actuarial interest rate of 9.50%. Meanwhile, the actuarial interest rate for the THT program is in accordance with the prevailing market interest rate in Indonesia of 7.35%. The impact of the implementation of PMK 66/2021 has been adjusted to LMPMD and LMPMD expenses.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi Liabilitas Klaim per 31 Desember 2022 dan 2021

Estimated Claims Liabilities

Estimated Claims Liabilities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Jumlah Total				

Estimasi liabilitas klaim PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 3,85% dibandingkan dengan jumlah estimasi liabilitas klaim pada 31 Desember 2021 senilai , yang berasal dari kenaikan estimasi liabilitas klaim pada Program JKK dan JKm.

The estimated claim liability of PT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022 was recorded at , an increase of or 3.85% compared to the estimated claim liability as of December 31, 2021 of , which came from an increase in the estimated claim liability for the JKK and JKm Programs.

Utang Klaim

Utang Klaim per 31 Desember 2022 dan 2021

Claims Payable

Claims Payable as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Program THT THT Program				
Program JKK JKK Program				
Program JKm JKm Program				
Jumlah Total				

Utang klaim PT ASABRI (Persero) pada 31 Desember 2022 tercatat senilai , turun senilai atau -19,15% dibandingkan dengan jumlah utang klaim pada 31 Desember 2021 senilai .

PT ASABRI (Persero)'s claim payable as of December 31, 2022 was recorded at , a decrease of or -19.15% compared to the total claim payable as of December 31, 2021 of I .

Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

Equity

Equity as at December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Modal Saham Share Capital				
Saldo Laba yang telah Dicadangkan Retained Earnings				
Telah ditentukan Penggunaannya Determined Usage				
Belum ditentukan Penggunaannya Undetermined Usage				
Kerugian yang belum Direalisasi atas Efek-Efek Tersedia untuk Dijual - setelah Pajak Unrealised Losses on Available-for-Sale Marketable Securities - net of Taxes				
Surplus Revaluasi Aset Revaluation Surplus Assets				
Jumlah Total				

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan jumlah ekuitas senilai minus , naik senilai atau 69,86% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 senilai minus . Hal utama yang membuat kenaikan tersebut adalah PT ASABRI (Persero) mencatatkan laba setelah pajak di tahun 2022 yang berasal dari pengakuan premi *UPSL*.

total equity of minus I , an increase of or 69.86% compared to total equity on December 31, 2021 of minus . The main thing that made this increase was that PT ASABRI (Persero) recorded a profit after tax in 2022 which came from the recognition of UPSL premiums.

Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

Cash Flow Statement as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flow provided by (used in) Operating Activities				
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flow provided by (used in) Investing Activities				
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows used in Financing Activities				
Penurunan Bersih Kas dan Bank Net decrease in cash and bank				
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year				
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year				

Laporan arus kas PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai lebih rendah jika dibandingkan dengan laporan arus kas pada tahun 2021 senilai Hal yang menyebabkan penurunan tersebut karena PT ASABRI (Persero) berupaya mengoptimalkan saldo kas dan bank yang ada agar dapat lebih produktif melalui penempatan pada instrumen investasi pendapatan tetap dengan tingkat risiko yang terukur. Saldo kas dan bank dioptimalkan dengan tetap memperhitungkan kebutuhan liabilitas.

The cash flow statement of PT ASABRI (Persero) in 2022 was recorded at lower than the cash flow statement in 2021 of The reason for the decline is because PT ASABRI (Persero) seeks to optimise existing cash and bank balances to be more productive through placement in fixed income investment instruments with a measurable level of risk. Cash and bank balances are optimised while still taking into account liability needs.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Net Cash Flow Used in Operating Activities

Net Cash Flow used in Operating Activities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Penerimaan Premi Premium Receipt				
Pembayaran Klaim Claims Payment				
Pembayaran Beban Usaha Payment of Operating Expenses				
Pembayaran Pajak Tax Payment				
Penerimaan dari Program AIP - BOP Receipt from AIP Program - BOP				
Lain-Lain Other				
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi Net Cash Flow used in Operating Activities				

Arus kas bersih aktivitas operasi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai , naik senilai atau 875,75% dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas operasi pada tahun 2021 senilai minus . Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah meningkatnya penerimaan premi program THT yang berasal dari realisasi sebagian premi *UPSL* pada bulan November dan Desember 2022 sebesar .

Net cash flow from operating activities of PT ASABRI (Persero) in 2022 was recorded at , an increase of or 875.75% compared to net cash flow from operating activities in 2021 of minus . The main reason for the increase was the increase in THT premium income from the partial realization of UPSL premiums in November and December 2022 amounting to

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Net Cash Flow Provided by Investing Activities

Net Cash Flow from Investing Activities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Penerimaan Hasil Investasi Receipt of Investment Return				
Penempatan Investasi Investment Placement				
Penempatan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Placement of Fixed Assets and Intangible Assets				
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi Net Cash Flow from Investing Activities				

Arus kas bersih aktivitas investasi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat senilai juta, turun senilai atau -889,49% dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas investasi pada tahun 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut karena adanya penempatan investasi atas realisasi sebagian premi UPSL yang diterima pada November dan Desember 2022.

The net cash flow of investment activities of PT ASABRI (Persero) in 2022 was recorded at minus , a decrease of or -889.49% compared to the net cash flow of investment activities in 2021 of The main reason for the decrease was due to the investment placement on the realization of part of the UPSL premium received in November and December 2022.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Net Cash Flow Used in Financing Activities

Net Cash Flow used in Financing Activities as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**2021**	**Pertumbuhan** Growth	
			Nominal Nominal	**%**
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities				
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Flow used in Financing Activities				

Arus kas bersih aktivitas pendanaan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 tercatat minus Rp4.367 juta, turun senilai atau -19,25% dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas pendanaan pada tahun 2021 senilai minus

PT ASABRI (Persero)'s net cash flow from financing activities in 2022 was recorded at minus IDR4,367 million, a decrease of or -19.25% compared to net cash flow from financing activities in 2021 of minus

Analisis Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya

Analysis of Debt Serviceability, Receivables Collectibility and Other Financial Ratios

Analisis Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas) per 31 Desember 2022 dan 2021

Analysis of Ability to Pay Short-Term Debt (Liquidity)

Ability to Pay Short-Term Debt (Liquidity) as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
Likuiditas Liquidity	Aset Lancar x 100 Liabilitas Lancar Current Assets x 100 Current Liabilities		529,22%		383,31%

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang akan segera jatuh tempo diukur menggunakan rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas adalah rasio lancar *(current ratio)*. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar. Pada tahun 2022, nilai rasio lancar PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 529,22% lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio lancar tahun 2021 senilai 383,31%. Hal ini dipicu oleh pengakuan premi *UPSL* senilai Rp4,55 triliun di bulan Februari 2022.

The company's ability to meet liabilities that will soon be due is measured using liquidity ratios. One of the liquidity ratios is the current ratio. The current ratio is used to measure the company's ability to pay liabilities that must be met immediately with current assets. In 2022, the current ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 529.22%, higher than the current ratio value in 2021 of 383.31%. This was triggered by the recognition of UPSL premiums worth IDR4.55 trillion in February 2022.

Analisis Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas) per 31 Desember 2022 dan 2021

Analysis of Ability to Pay Long-Term Debt (Solvency)

Ability to Pay Long-Term Debt (Solvency) as of December 31, 2022 and 2021

Rasio Pencapaian Solvabilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021

Solvency Achievement Ratio Based on Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
Rasio Pencapaian Solvabilitas Solvency Achievement Ratio	Jumlah Tingkat Solvabilitas x 100 Jumlah BTSM Total Solvency Level x 100 Total BTSM		74,26%		-1.210,48%

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas minimum sebesar 100% dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM).

Based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66/PMK.02/2021 dated June 14, 2021 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of Old Age Savings, Work Accident, and Death Insurance Program for Employees of the State Civil Apparatus, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the Indonesian National Police, the Company is required to meet a minimum solvency level of 100% of the Minimum

Perusahaan setiap tahun juga wajib menetapkan target tingkat solvabilitas internal minimum sebesar 100% dari BTSM. Pada tahun 2022, nilai rasio pencapaian solvabilitas PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 74,26% lebih baik jika dibandingkan dengan nilai rasio solvabilitas tahun 2021 senilai -1210,48%. Hal ini dipicu oleh kenaikan jumlah kekayaan yang diperkenankan Perusahaan pada tahun 2022 lebih tinggi dari pada tahun 2021.

Solvency Level Limit (BTSM) at all times. The Company is also required to annually set a minimum internal solvency level target of 100% of BTSM. In 2022, the solvency achievement ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 74.26%, better than the solvency ratio value in 2021 of -1210.48%. This was triggered by an increase in the amount of wealth allowed by the Company in 2022 higher than in 2021.

Profitabilitas

Profitabilitas per 31 Desember 2022 dan 2021

Profitability

Profitability as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Profitability	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
ROA	Laba Setelah Pajak x 100 Rata-rata Aset Profit After Tax x 100 Average Assets		35,04%		89,63%
ROE	Laba Sebelum Pajak x 100 Rata-rata Ekuitas Profit Before Tax x 100 Average Equity		113,41%		88,11%

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu diukur dengan melihat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas antara lain adalah *Return on Assest (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. *ROA* menggambarkan seberapa besar aset mampu menghasilkan laba. Sedangkan, *ROE* berfungsi untuk mengukur efisiensi pengelolaan modal sendiri oleh perusahaan guna menghasilkan laba bersih. Pada tahun 2022, nilai rasio *ROA* PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 35,04% lebih rendah dibandingkan dengan nilai rasio *ROA* tahun 2021 senilai 89,63%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) mencatatkan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai rasio *ROE* PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 113,41% lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rasio *ROE* tahun 2021 senilai 88,11%. Hal ini dipicu rata-rata ekuitas PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 meningkat menjadi senilai minus juta dibandingkan dengan rata-rata ekuitas pada tahun 2021 senilai juta.

The company's ability to generate profits during a certain period is measured by looking at profitability ratios. Profitability ratios include Return on Assest (ROA) and Return on Equity (ROE). ROA illustrates how much assets are able to generate profits. Meanwhile, ROE serves to measure the efficiency of managing the company's own capital to generate net income. In 2022, the ROA ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 35.04%, which was lower than the ROA ratio value in 2021 of 89.63%. This is because in 2022, PT ASABRI (Persero) recorded a lower profit before tax than in 2021. In 2022, the ROE ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 113.41%, higher than the ROE ratio value in 2021 of 88.11%. This was triggered by the average equity of PT ASABRI (Persero) in 2022 increasing to minus million compared to the average equity in 2021 of minus .

Rasio Pengeluaran

Rasio Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021

Expenditure Ratio

Expenditure Ratio as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
Rasio Pengeluaran Expenditure Ratio	Biaya Usaha x100 Pendapatan Premi Operating Expenses x100 Premium Income		2,74%		11,05%

Rasio pengeluaran digunakan untuk mengukur efisiensi *core business* asuransi. Secara umum, semakin kecil angka rasionya, semakin bagus karena operasional perusahaan lebih efisien. Pada tahun 2022, nilai rasio pengeluaran PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 2,74% lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rasio pengeluaran tahun 2021 senilai 11,05%.

The expense ratio is used to measure the efficiency of the insurance core business. In general, the smaller the ratio number, the better because the company's operations are more efficient. In 2022, the expense ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 2.74%, lower than the 2021 expense ratio value of 11.05%.

Rasio Kecukupan Investasi

Rasio Kecukupan Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Investment Adequacy Ratio

Investment Adequacy Ratio as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
RKI	(Jumlah Investasi + Piutang UPSL) x100 LMPMD Total Investment + UPSL Receivables LMPMD		87,51%		60,98%

Rasio kecukupan investasi merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi klaim yang mungkin terjadi. Pada tahun 2022, nilai rasio kecukupan investasi PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 87,51% lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rasio kecukupan investasi tahun 2021 senilai 60,98%. Hal ini disebabkan adanya pengakuan premi *UPSL*, yang sebagian telah dibayarkan pada tahun 2022 ditempatkan pada instrumen investasi dan sebagian yang belum dibayarkan dicatat sebagai piutang *UPSL*.

The investment adequacy ratio is a ratio to measure the company's ability to meet claims that may occur. In 2022, the investment adequacy ratio value of PT ASABRI (Persero) was recorded at 87.51%, higher than the investment adequacy ratio value in 2021 of 60.98%. This is due to the recognition of UPSL premiums, some of which have been paid in 2022 placed in investment instruments and some that have not been paid are recorded as UPSL receivables.

Yield on Investment

Yield on Investment per 31 Desember 2022 dan 2021

Yield on Investment

Yield on Investment as of December 31, 2022 and 2021

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	Formula Formula	2022	Hasil Result	2021	Hasil Result
YoI	Pendapatan Investasi x100 Rata-Rata Investasi Investment Income x100 Average Income		3,21%		3,66%

Pada tahun 2022, nilai *Yield on Investment (YoI)* investasi PT ASABRI (Persero) tercatat senilai 3,21% lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai *YoI* tahun 2021 senilai 3,66%. Hal ini disebabkan adanya *unrealized loss* dari instrumen investasi saham.

In 2022, the Yield on Investment (YoI) value of PT ASABRI (Persero)'s investment was recorded at 3.21%, lower than the YoI value in 2021 of 3.66%. This is due to unrealised losses from stock investment instruments.

Piutang

Receivables

Piutang Premi *Unfunded Past Service Liability (UPSL)*

Piutang premi *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) merupakan piutang kepada pemberi kerja yang timbul

Piutang Premi Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Unfunded Past Service Liability (UPSL) premium receivable is a receivable from employers arising from

atas kewajiban masa lalu sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah atau BUMN selaku pemberi kerja, seperti kebijakan atas kenaikan gaji pokok. Piutang *UPSL* diperoleh berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero) senilai Rp4.550.264 juta. Pada tanggal 24 November 2022 dan 12 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) telah menerima realisasi atas premi *UPSL* masing-masing senilai Rp1.000.000 juta dan Rp1.280.000 juta sehingga pada 31 Desember 2022, masih terdapat piutang premi *UPSL* yang tercatat sebesar Rp2.270.264 juta.

Piutang Hasil Investasi

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatat piutang hasil investasi senilai Piutang hasil investasi merupakan pengakuan pendapatan dari aktivitas investasi yang sudah menjadi hak PT ASABRI (Persero) dilihat dari segi waktu periode akuntansi, namun sampai dengan tanggal laporan diterbitkan belum diterima pembayarannya. Piutang hasil investasi terdiri dari pengakuan pendapatan kupon obligasi senilai , bunga deposito senilai kupon *MTN* senilai dan kupon KIK EBA senilai .

Pengelolaan Investasi Program AIP

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatat piutang pengelolaan investasi program AIP senilai juta. Piutang pengelolaan investasi program AIP merupakan piutang imbal jasa pengelolaan investasi yang dihitung berdasarkan 6,70% dari hasil investasi AIP dikurangi beban investasi AIP tahun berkenaan. Perhitungan imbal jasa pengelolaan investasi tersebut sesuai dengan PMK Nomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. PT ASABRI (Persero) tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang hasil investasi karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Piutang Premi

Pada 31 Desember 2022, PT ASABRI (Persero) mencatat piutang premi senilai Rp2.285 juta. Piutang premi merupakan piutang atas iuran dari peserta ASABRI yang disetorkan ke PT ASABRI (Persero) setiap bulannya oleh Kementerian Keuangan dan diakui berdasarkan *database* peserta setelah dilakukan rekonsiliasi antara PT ASABRI (Persero) dengan Kementerian Keuangan.

past obligations as a result of Government or SOE policies as employers, such as policies on basic salary increases. UPSL receivables were obtained based on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 regarding the Determination of Unfunded Past Service Liability for Old Age Savings Program at PT ASABRI (Persero) amounting to IDR4,550,264 million. On November 24, 2022 and December 12, 2022, PT ASABRI (Persero) has received realization of UPSL premiums amounting to IDR1,000,000 million and IDR1,280,000 million, respectively, so that as of December 31, 2022, there are still receivables from UPSL premiums amounting to IDR2,270,264 million.

Investment return receivable

As of December 31, 2022, PT ASABRI (Persero) recorded investment return receivables worth . Investment income receivable is the recognition of income from investment activities to which PT ASABRI (Persero) is in terms of accounting period, but until the date of the report issued, the payment has not been received. Investment return receivables consist of revenue recognition of bond coupons worth I , deposit interest worth , MTN coupons worth and KIK EBA coupons worth .

AIP Program Investment Management

As of December 31, 2022, PT ASABRI (Persero) recorded receivables from investment management of AIP program worth million. Receivables from investment management of the AIP program are receivables from investment management fees calculated based on 6.70% of the AIP investment return minus the AIP investment expense for the year. The calculation of investment management fees is in accordance with PMK Number 52/PMK.02/2021 dated May 31, 2021 concerning Management of Accumulated Pension Contributions of Civil Servants, State Officials, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the Indonesian National Police. PT ASABRI (Persero) does not provide allowance for impairment losses on investment receivables because management believes that all receivables are collectible.

Premiums Receivable

As of December 31, 2022, PT ASABRI (Persero) recorded premium receivables worth IDR2,285 million. Premium receivables are receivables for contributions from ASABRI participants which are deposited to PT ASABRI (Persero) every month by the Ministry of Finance and recognised based on the participant database after reconciliation between PT ASABRI (Persero) and the Ministry of Finance.

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur Modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/utang. Gambaran Struktur Modal pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Capital Structure is the balance between the use of own capital and loans/debt. The description of the Capital Structure as of December 31, 2022 is as follows:

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**2022**	**%**	**2021**	**%**
Liabilitas Liabilities				
Ekuitas Equity				

Struktur modal PT ASABRI (Persero) sampai dengan 31 Desember 2022 tercatat senilai atau naik senilai atau 69,86% dibandingkan dengan struktur modal pada 31 Desember 2021 senilai . Hal utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah PT ASABRI (Persero) mencatatkan laba setelah pajak di tahun 2022 yang berasal dari realisasi berjalannya strategi penyehatan keuangan Perusahaan, di antaranya pengakuan premi UPSL.

December 31, 2022 was recorded at minus or an increase of or 69.86% compared to the capital structure as of December 31, 2021 of minus The main thing that caused the increase was that PT ASABRI (Persero) recorded a profit after tax in 2022 which came from the realization of the Company's financial restructuring strategy, including the recognition of UPSL premiums.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PT ASABRI (Persero) mengelola permodalannya bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha agar dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, serta pemeliharaan optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional. Selama tahun 2022, PT ASABRI (Persero) tidak melakukan perubahan terkait struktur modalnya. Penambahan struktur modal terakhir kali dilakukan pada tahun 2008 berdasarkan akta notaris Muhani Salim, S.H. nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 terkait modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 terbagi atas 500.000 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000,00 dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara Republik Indonesia sebanyak 200.000 saham, atau sejumlah Rp200.000.000.000,00. Pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan atas arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASABRI (Persero) yang diadakan setiap tahun.

Management Policy on Capital Structure

PT ASABRI (Persero) manages its capital to maintain business continuity in order to provide returns to shareholders and benefits to other stakeholders, as well as maintenance of optimised capital structure to reduce operational costs. During 2022, PT ASABRI (Persero) did not make any changes to its capital structure. The last addition to the capital structure was made in 2008 based on notarial deed number 16 of Muhani Salim, S.H. dated August 27, 2008 related to the Company's authorised capital set at IDR500,000,000,000.00 divided into 500,000,000 shares, each share with a value of IDR1,000,000.00 from the authorised capital has been issued and fully paid by the Republic of Indonesia as many as 200,000 shares, or a total of IDR200,000,000,000.00. The selection of management policy on capital structure is based on the direction of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT ASABRI (Persero) held annually.

Ikatan Investasi untuk Investasi Barang Modal
Investment Bond for Capital Goods Investment

Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal di tahun 2022. Seluruh belanja modal dibiayai sendiri dan digunakan untuk operasional Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

The Company has no material commitments for investment in capital goods in 2022. All capital expenditures are self-financed and utilised for the Company's operations. Therefore, the Company does not have information on the name of the parties to the bonds, the purpose of the bonds, the expected source of funds to fulfil the bonds, the currency of denomination and the measures planned by the Company to hedge the risk of the related foreign currency position.

Informasi Realisasi Investasi Barang Modal
Information on Capital Goods Investment Realization

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**Nilai** Rate	**Tujuan** Purpose
Gedung Building	821	Mendukung kelancaran kegiatan operasional PT ASABRI (Persero) Supporting the smooth running of operational activities PT ASABRI (Persero)
Alat Mesin Kantor Office Machine Tools	420	
Komputer Computers	13.320	
Mebel Furniture	742	
Alat-Alat Rumah Tangga Household Appliances	103	
Kendaraan Dinas Service Vehicle	20	
Jumlah Total	**15.426**	

Selama tahun 2022, PT ASABRI (Persero) telah melakukan investasi barang modal senilai , dalam bentuk gedung, alat mesin kantor, komputer, mebel, alat-alat rumah tangga, dan kendaraan dinas. Tujuan investasi belanja modal tersebut untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional PT ASABRI (Persero) dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Realisasi terbesar belanja modal tahun 2022 adalah pada komputer senilai juta yang digunakan untuk keperluan pembelian *hardware, software,* dan pengembangan aplikasi.

During 2022, PT ASABRI (Persero) has invested in capital goods worth , in the form of buildings, office machinery, computers, furniture, household appliances, and official vehicles. The purpose of the capital expenditure investment is to support the smooth running of PT ASABRI (Persero)'s operational activities in providing best service for participants. The largest realization of capital expenditure in 2022 was on computers worth million which was used for the purchase of hardware, software, and application development.

Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Tahun 2022
Analysis of Target and Realization Achievement in 2022

PT ASABRI (Persero) secara berkala menganalisis realisasi pencapaian target yang telah ditentukan pada awal tahun dengan realisasi kinerja pada tahun tersebut. Pencapaian yang telah direalisasikan pada tahun 2022 menjadi acuan untuk penetapan target finansial pada tahun 2023. Berikut adalah uraian mengenai analisis pencapaian target tahun 2022.

PT ASABRI (Persero) periodically analyses the realization of the achievement of targets set at the beginning of the year with the realization of performance in that year. Achievements that have been realised in 2022 become a reference for setting financial targets in 2023. The following is a description of the analysis of target achievement in 2022.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Tahun 2022

Comparison of Target and Realization of Statement of Financial Position Year 2022

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2022** RKAP 2022	**Realisasi 2022** Realization 2022	**Pencapaian (%)** Achievements (%)
Aset Assets			
Liabilitas Liabilities			
Ekuitas Equity			

Jumlah aset PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai mencapai 90,63% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Hal ini utamanya berasal dari pengakuan piutang premi *UPSL* senilai Rp4,55 triliun di bulan Februari 2022, kenaikan nilai deposito dan obligasi program THT, JKK, dan JKm. Jumlah liabilitas PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai , mencapai 94,68% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Hal utama yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah peningkatan LMPMD di tahun 2022. Jumlah ekuitas PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai , mencapai -1357,54% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Tidak tercapainya RKAP 2022 dikarenakan laba setelah pajak PT ASABRI (Persero) di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan RKAP 2022.

Total assets of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to , reaching 90.63% of the 2022 RKAP target of . This mainly came from the recognition of UPSL premium receivables worth IDR4.55 trillion in February 2022, an increase in the value of deposits and bonds for THT, JKK, and JKm Program. Total liabilities of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to , reaching 94.68% of the 2022 RKAP target of . The main thing that caused this achievement was the increase in LMPMD in 2022. The total equity of PT ASABRI (Persero) in 2022 was minus , reaching -1357.54% of the 2022 RKAP target of IDR136,448 million. Not achieving the 2022 RKAP because PT ASABRI (Persero)'s profit after tax in 2022 is lower than the 2022 RKAP.

Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2022

Comparison of Target and Realization of Income Statement and Other Comprehensive Income Year 2022

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2022** RKAP 2022	**Realisasi 2022** Realization 2022	**Pencapaian (%)** Achievements (%)
Pendapatan Revenue			
Pendapatan Premi Premium Income			
Hasil Investasi Investment Return			
Program THT, JKK, dan JKm THT, JKK, and JKm Program			

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2022** RKAP 2022	**Realisasi 2022** Realization 2022	**Pencapaian (%)** Achievements (%)
Program Akumulasi Iuran Pensiun Accumulated Pension Contribution Program			
Pendapatan Lain-Lain Other Income			
Jumlah Pendapatan Total Income			
Pengembalian Hasil Investasi Program Akumulasi Iuran Pensiun Return on Investment of Pension Contribution Accumulation Program			
Jumlah Pendapatan Bersih Total Net Income			
Beban Expenses			
Klaim dan Manfaat Claims and Benefits			
(Kenaikan) Penurunan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (Increase) Decrease in Liability for Future Policy Benefits			
Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun Reimbursement of Operational Costs of Organising Pensions			
Umum dan Administrasi General and Administrative			
Jumlah Beban Total Expenses			
Laba (Rugi) sebelum Pajak Profit (Loss) before Tax			
Beban Pajak Kini Current Tax Expense			
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefit (Expense)			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year			
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income			
Keuntungan (Kerugian) Revaluasi Aset Tetap Gain (Loss) on Revaluation of Fixed Assets			
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca-Kerja Remeasurement of Benefits Post-Employment Benefits			
Efek Pajak terkait Related Tax Effects			
Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi atas Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual Unrealised Gains (Losses) on Available-for-Sale Marketable Securities			
Efek Pajak terkait Related tax effects			
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive Income for the Year after Tax			
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year			

Jumlah pendapatan premi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai , mencapai 97,12% dari target RKAP tahun 2022 senilai
Jumlah hasil investasi program THT, JKK, dan JKm PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai
juta, mencapai 68,94% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Jumlah pendapatan lain-lain PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai , mencapai 8,42% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Realisasi jumlah pendapatan bersih PT ASABRI (Persero) tahun 2022 terhadap RKAP 2022 mencapai 92,90%. Pendapatan bersih di tahun 2022 belum mencapai 100% disebabkan karena pengakuan premi *UPSL* di tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan pengakuan premi *UPSL* di RKAP 2022, belum terealisasinya restrukturisasi aset investasi non-produktif di tahun 2022, penurunan nilai wajar harga saham yang mempengaruhi hasil investasi program THT, JKK, dan JKm, serta hasil investasi program AIP tahun 2022 lebih rendah dari RKAP 2022 sehingga menyebabkan kecilnya pendapatan *fee* investasi dari program AIP ke program THT.

The total premium income of PT ASABRI (Persero) in 2022 was , reaching 97.12% of the 2022 RKAP target of The total investment return of PT ASABRI (Persero)'s THT, JKK, and JKm Program in 2022 was valued at , reaching 68.94% of the 2022 RKAP target of . The total other income of PT ASABRI (Persero) in 2022 was valued at , reaching 8.42% of the 2022 RKAP target of . The realization of total net income of PT ASABRI (Persero) in 2022 against the 2022 RKAP reached 92.90%. Net income in 2022 has not reached 100% due to the recognition of UPSL premiums in 2022 is smaller than the recognition of UPSL premiums in the 2022 RKAP, the restructuring of non-productive investment assets has not been realised in 2022, the decline in the fair value of stock prices that affect the investment returns of the THT, JKK, and JKm programs, and the investment returns of the AIP program in 2022 are lower than the 2022 RKAP, causing a small investment fee income from the AIP program to the THT program.

Jumlah klaim dan manfaat PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 sebesar mencapai 96,39% dari target RKAP tahun 2022 sebesar
Jumlah kenaikan penurunan LMPMD PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 sebesar , mencapai 109,32% dari target RKAP tahun 2022 senilai minus Jumlah penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai R , mencapai 92,99% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Jumlah biaya umum dan administrasi PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 sebesar mencapai 83,51% dari target RKAP tahun 2022 sebesar
Realisasi jumlah beban PT ASABRI (Persero) tahun 2022 terhadap RKAP 2022 mencapai 97,78%, hal utama yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah adanya kenaikan LMPMD tahun 2022.

The total claims and benefits of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to , reaching 96.39% of the 2022 RKAP target of The total increase in the decline in LMPMD of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to , reaching 109.32% of the 2022 RKAP target of minus . The total reimbursement of operational costs of PT ASABRI (Persero) pension administration in 2022 amounted to , reaching 92.99% of the 2022 RKAP target of . Total general and administrative expenses of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to , reaching 83.51% of the 2022 RKAP target of . The realization of total expenses of PT ASABRI (Persero) in 2022 against the 2022 RKAP reached 97.78%, the main thing that caused this achievement was the increase in LMPMD in 2022.

Laba rugi tahun berjalan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 sebesar , mencapai 90,20% dari target RKAP tahun 2022 senilai juta.

PT ASABRI (Persero)'s profit or loss for the year 2022 amounted to I , reaching 90.20% of the 2022 RKAP target of million.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 sebesar minus a, tercapai -335,02% dari target RKAP tahun 2022 senilai juta. Hal utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah PT ASABRI (Persero) mencatatkan kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual selama tahun 2022.

Other comprehensive income for the year after tax of PT ASABRI (Persero) in 2022 amounted to minus , achieving -335.02% of the 2022 RKAP target of million. The main thing that caused the decline was PT ASABRI (Persero) recorded unrealised losses on available-for-sale marketable securities during 2022.

Jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai
mencapai 81,88% dari target RKAP tahun 2022 senilai juta.

The total comprehensive income for the year of PT ASABRI (Persero) in 2022 was , reaching 81.88% of the 2022 RKAP target of million.

Perbandingan Target dan Realisasi Penempatan Dana Investasi Program THT, JKK, dan JKm Tahun 2022

Comparison of Target and Realization of Investment Fund Placement for THT, JKK, and JKm Programs in 2022

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Uraian Description	**RKAP 2022** RKAP 2022	**Realisasi 2022** Realization 2022	**Pencapaian (%)** Achievements (%)
Deposito Berjangka Time Deposits			
Saham Shares			
Obligasi Bonds			
Medium Term Notes (MTN)			
Reksa Dana Mutual Funds			
Dana Investasi Real Estate Real Estate Investment Fund			
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Asset-backed Securities Collective Investment Contract			
DINFRA			
Properti Investasi Investment Property			
Jumlah Total			

Penempatan dana investasi program THT, JKK, dan JKm PT ASABRI (Persero) pada tahun 2022 senilai , mencapai 117,93% dari target RKAP tahun 2022 senilai . Pencapaian tersebut dipicu oleh realisasi penerimaan sebagian premi *UPSL* di tahun 2022 dari Kementerian Keuangan senilai Rp2.280.000 juta yang dialokasikan untuk membeli deposito dan obligasi.

The placement of PT ASABRI (Persero)'s THT, JKK, and JKm program investment funds in 2022 was valued at , reaching 117.93% of the 2022 RKAP target of I . This achievement was triggered by the realization of partial receipt of UPSL premiums in 2022 from the Ministry of Finance amounting to IDR2,280,000 million which was allocated to purchase deposits and bonds.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Date of the Accountant's Report

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan tertanggal 28 Februari 2023 hingga disahkannya laporan tahunan ini tertanggal Agustus 2023.

There is no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report dated February 28, 2023 until the ratification of this annual report dated August 2023.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

Kepesertaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 4 huruf g dinyatakan bahwa kepesertaan bersifat wajib dan pada Pasal 5 ayat 3 (c) dinyatakan bahwa ASABRI ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk oleh Undang-Undang sebagai Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI yang selanjutnya disebut Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dan/atau anggota keluarganya.

Dari 2 (dua) ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa dikarenakan bentuk keasuransiannya bersifat wajib maka pangsa pasar atau Peserta asuransinya telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai pemegang saham yaitu seluruh Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Selain itu, pertumbuhan jumlah Peserta juga ditentukan oleh Pemerintah sebagai pemberi kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan personil baik TNI, Polri, maupun Pegawai ASN di setiap tahunnya.

Di tahun 2022, jumlah Peserta Aktif ASABRI tercatat sebanyak , sedangkan jumlah Peserta Pensiun tercatat sebanyak sehingga jumlah Peserta Aktif dan Pensiun di tahun 2022 tercatat sebanyak .

Kepesertaan ASABRI terbatas untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan/Polri, sehingga perkembangan-nya relatif tidak signifikan. Jumlah Peserta Aktif dan Pensiun ASABRI di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data historis, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2022 pertumbuhan jumlah Peserta ASABRI berada di rentang 0,39% sampai dengan 2,65%. Di tahun 2022, jumlah Peserta Aktif ASABRI didominasi oleh anggota Polri dengan komposisi sebesar 47,51% dan

Membership
In accordance with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN), Article 4 letter g states that participation is mandatory and in Article 5 paragraph 3 (c) it is stated that ASABRI is appointed as a Social Security Provider Agency established by Law as the Social Insurance of the Armed Forces of the Republic of Indonesia.

In Government Regulation Number 102 of 2015 as amended by Government Regulation 54/2020 in Article 1 paragraph 1, it is stated that Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police, hereinafter referred to as Social Insurance, is mandatory insurance to provide protection for socio-economic risks experienced by Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police and/or their family members.

From the 2 (two) provisions, it can be said that because the form of insurance is mandatory, the market share or insurance participants have been determined by the Government as a shareholder, namely all TNI Soldiers, Members of the Indonesian National Police, and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police. ASN employees within the Ministry of Defence and the National Police. In addition, the growth in the number of Participants is also determined by the Government as an employer adjusted to the needs of personnel both TNI, Polri, and ASN Employees each year.

In 2022, the number of ASABRI Active Participants was recorded at while the number of Retired Participants was recorded at , so that the total number of Active and Retired Participants in 2022 was

ASABRI membership is limited to TNI Soldiers, Police Members, and ASN of the Ministry of Defence/Police, so the development is relatively insignificant. The number of ASABRI Active and Retired Participants in 2022 has increased compared to 2021. Based on historical data, from 2017 to 2022 the growth in the number of ASABRI Participants was in the range of 0.39% to 2.65%. In 2022, the number of ASABRI Active Participants is dominated by members of the National Police with a composition of 47.51% and followed by participants of the Indonesian

diikuti oleh peserta prajurit TNI AD dengan komposisi sebesar 38,20%. Sedangkan Peserta prajurit TNI AL, TNI AU, Mabes TNI, dan Kemhan memiliki komposisi 14,29% dari jumlah keseluruhan Peserta Aktif ASABRI. Berikut adalah perkembangan jumlah Peserta ASABRI dari tahun 2017 – 2022.

Army soldiers with a composition of 38.20%. Meanwhile, participants of the Navy, Air Force, TNI Headquarters, and Ministry of Defence have a composition of 14.29% of the total number of ASABRI Active Participants. The following is the development of the number of ASABRI Participants from 2017 - 2022.

Unit Organisasi Organization Unit	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Peserta Aktif Active Participant						
TNI AD Indonesian Army						
TNI AL Indonesian Navy						
TNI AU Indonesian Air Force						
Polisi Police						
MABES						
KEMHAN Ministry of Defence						
Jumlah Total						
Peserta Pensiun Retirement Participants						
Jumlah Total						

Strategi Pemasaran

ASABRI merupakan perusahaan Asuransi Sosial yang mengelola Program THT, JKK, JKm, dan Pensiun bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang diberikan tugas dari Pemerintah untuk menjalankan kegiatan asuransi sosial. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2020, sosialisasi diberikan kepada Peserta ASABRI di seluruh Indonesia, baik yang masih aktif bekerja atau mereka yang telah memasuki masa pensiun maupun kepada keluarga peserta yang disebut ahli waris.

Berbeda dengan asuransi komersial yang melakukan pemasaran dengan melakukan promosi dan penjualan produk untuk menarik pelanggan baru, kegiatan sosialisasi yang dilakukan ASABRI merupakan bentuk *soft marketing* yang bersifat edukasi kepada seluruh Peserta. Dengan kegiatan tersebut diharapkan peserta dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

Marketing Strategy

ASABRI is a Social Insurance company that manages the THT, JKK, JKm, and Pension Programs for TNI Soldiers, Police Members, and ASN Employees within the Ministry of Defence and the Police who are given the task from the Government to carry out social insurance activities. In accordance with Government Regulation Number 54 of 2020, socialisation is provided to ASABRI Participants throughout Indonesia, both those who are still actively working or those who have retired and to the families of participants called heirs.

Unlike commercial insurance which conducts marketing by promoting and selling products to attract new customers, the socialisation activities carried out by ASABRI are a form of soft marketing that is educational in nature to all Participants. With this activity, it is hoped that participants can understand their rights and obligations in accordance with Government Regulation Number 54 of 2020 concerning Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and ASN Employees within the Ministry of Defence and the National Police.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada Peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa setiap Peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial yang diikuti.

In Law Number 40 of 2004 on the National Social Security System (SJSN) Article 15 paragraph 2 states that the Social Security Organising Agency is obliged to provide information about rights and obligations to Participants to follow the applicable provisions. Meanwhile, Article 16 states that each Participant has the right to obtain benefits and information about the implementation of the social security program.

Meskipun ASABRI adalah asuransi yang bersifat wajib yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan produk atau mencari pelanggan baru melalui kegiatan pemasaran, ASABRI memiliki sistem pemasaran yang berbeda dari asuransi komersial lainnya di mana Perusahaan berusaha mengenalkan ASABRI dan meningkatkan pemahaman tentang Program ASABRI kepada Peserta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Although ASABRI is a compulsory insurance that has no obligation to sell products or seek new customers through marketing activities, ASABRI has a marketing system that is different from other commercial insurance where the Company tries to introduce ASABRI and increase understanding of the ASABRI Program to Participants in particular and the public in general.

Adapun rekapitulasi komposisi pelaksanaan kegiatan sosialisasi per unit organisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari bulan Januari s.d Desember tahun 2022 sebagai berikut:

The recapitulation of the composition of the implementation of socialisation activities per Organizational unit implementing socialisation activities from January to December 2022 is as follows:

Unit Organisasi Organizational Unit	**2022**
Polri | Police	183
Angkatan Darat | Army	166
Angkatan Laut | Navy	26
Angkatan Udara | Air Force	18
Kemhan | Ministry of Defence	1
Pensiun | Retirement	174
Ahli Waris | Heirs	49
Jumlah | Total	617

Untuk Kegiatan Sosialisasi Program dan Non Program sampai dengan bulan Desember 2022 telah terlaksana sebanyak 617 kegiatan dari target keseluruhan.

For Program and Non-Program Socialisation Activities up to December 2022, 617 activities have been carried out from the overall target December 2022, 617 activities have been carried out from the overall target.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Alokasi laba diperuntukkan sebesar-besarnya untuk pemupukan dana dalam rangka peningkatan manfaat kepada peserta dan sustainability program, dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai pembagian dividen.

The allocation of profit is earmarked as much as possible for fund accumulation in order to increase benefits to participants and sustainability of the program, thus until the end of 2022, the Company does not have a policy regarding dividend distribution.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Sampai dengan akhir tahun 2022, Perseroan belum melaksanakan Penawaran Saham Umum di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perusahaan.

PT ASABRI (Persero) is a State-Owned THTerprise (SOE) whose shares are 100% owned by the State. Until the end of 2022, the Company has not conducted a Public Offering on any stock exchange. Thus, this Annual Report does not present information related to the total proceeds, plans use of funds, details of use of funds, balance of funds and date of approval by the General Meeting of Shareholders of the Company's Public Offering.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest or Transactions with Affiliated Parties

Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK Nomor 7 Revisi 2010, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Company has enters into transactions with related parties, in accordance with PSAK No. 7 Revised 2010, "Related Party Disclosures".

Sifat dan Hubungan dengan Pihak Berelasi

Nature and Relationship with Related Parties

Pihak Berelasi Related Party	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Sifat Transaksi** Nature of Transaction
Pemerintah Negara Republik Indonesia State Government of the Republic of Indonesia	Pemegang Saham dan Pemberi Kerja Shareholders and Employers	Piutang, Iuran Premi, dan Obligasi Pemerintah Receivables, Premium Contributions, and Government Bonds
Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises	Agen Pembayaran Manfaat Klaim dan Pensiun, serta Entitas Sepengendali Claims and Pension Benefits Paying Agent, and Jointly Controlled Entities	Rekening Giro, Deposito Berjangka, dan Efek-Efek Current Accounts, Time Deposits, and Marketable Securities
Badan Usaha Milik Daerah Regionally-Owned Enterprises	Agen Pembayaran Manfaat Klaim dan Pensiun, serta Entitas Sepengendali Claims and Pension Benefits Paying Agent, and Jointly Controlled Entities	Rekening Giro, Deposito Berjangka, dan Efek-Efek Current accounts, time deposits, and Marketable Securities
Manajemen Kunci Key Management	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan Utama Board of Commissioners, Board of Directors, and Key Employees	Beban gaji, Kompensasi dan Remunerasi, serta Imbalan kerja Salary expense, Compensation and Remuneration, and Employee benefits

Berikut adalah penempatan dana dan entitas pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2022.

The fund placement of funds and entities with related parties who are entities under common control on December 31, 2022.

Aset / Assets

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Kas di Bank Cash in Bank
Program THT THT Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Sub Jumlah Sub Total
Program JKK JKK Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Sub Jumlah Sub Total
Program JKm JKm Program
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pos Indonesia (Persero)
Sub Jumlah Sub Total

(dalam jutaan Rupiah) | (in millions Rupiah)

Mata Uang Asing Foreign Currency	
Program THT THT Program	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Jumlah Kas di Bank **Total Cash in Bank**	
Deposito Berjangka Time Deposits	
Program THT THT Program	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKK JKK Program	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKm JKm Program	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Jumlah Deposito Berjangka **Total Time Deposits**	
Efek-Efek Marketable Securities	
Saham Shares	
Nilai Wajar melalui Laba Rugi Fair Value through Profit or Loss	
Program THT THT Program	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Indofarma (Persero) Tbk	
PT Pelat Timah Nusantara Tbk	
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

Efek-Efek Marketable Securities	
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT PP Presisi Tbk	
PT PP (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Tersedia untuk Dijual Available for Sale	
Program THT THT Program	
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Jumlah Saham **Number of Shares**	
Obligasi Bonds	
Tersedia untuk Dijual Available for Sale	
Program THT THT Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKK JKK Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKm JKm Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Mata Uang Asing Foreign Currency	
Obligasi Negara Indonesia (USD) Indonesian Government Bonds (USD)	

Efek-Efek Marketable Securities	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Held to Maturity	
Program THT THT Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKK JKK Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Jumlah Obligasi **Total Bonds**	
Medium Term Note (MTN)	
Tersedia untuk Dijual Available for Sale	
Program THT THT Program	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	
PT Perkebunan Nusantara II	
Sub Jumlah Sub Total	
Jumlah MTN (MTN) **Total MTN (MTN)**	
Reksa Dana Mutual Funds	
Tersedia untuk Dijual Available for Sale	
Program THT THT Program	
PT Mandiri Manajer Investasi	
PT Bahana TCW Investment Management	
Jumlah Reksa Dana **Total Mutual Funds**	
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset Asset-backed securities collective investment contract	
Tersedia untuk Dijual Available for Sale	
Program THT THT Program	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset **Total Collective Investment Contracts of Asset Backed Securities**	
Jumlah Efek-Efek **Total Marketable Securities**	

Piutang Lain-lain Other Receivables	
Program THT THT Program	
Piutang Premi Premiums Receivable	
Piutang Premi UPSL UPSL Premium Receivable	
Piutang Bunga Deposito Berjangka: Term Deposit Interest Receivable:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
Piutang Bunga Obligasi: Bond Interest Receivable:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
Obligasi Negara Indonesia (USD) Indonesian Government Bonds (USD)	
Piutang Bunga Interest Receivable	
Medium Term Notes (MTN):	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	
PT Perkebunan Nusantara II	
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset: Asset-backed securities collective investment contract:	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
Jumlah Total	
Program JKK JKK Program	
Piutang Premi Premiums Receivable	
Piutang Bunga Deposito Berjangka: Time Deposit Interest Receivable:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Piutang Bunga Obligasi: Bond Interest Receivable:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Jumlah Total	
Program JKm JKm Program	
Piutang Premi Premiums Receivable	

Piutang Lain-lain Other Receivables	
Piutang Bunga Deposito Berjangka: Term Deposit Interest Receivable:	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia	
Piutang Bunga Obligasi: Bond Interest Receivable:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Jumlah **Total**	
Jumlah Piutang Lain-lain **Total Other Receivables**	
Aset Lain-lain Other Assets	
Program THT THT Program	
Piutang Jasa Flagging: Flagging Service Receivable:	
PT Bank Mandiri Taspen	
Jumlah Aset Lain-lain **Total Other Assets**	
Jumlah Aset dengan Pihak Berelasi **Total Assets with Related Parties**	

Liabilitas	**Liabilities**
Utang Investasi Investment Payable	
Program THT THT Program	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Jumlah Utang Investasi **Total Investment Debt**	
Pendapatan Diterima Di Muka Income Received in Advance	
Program THT THT Program	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Telekomunikasi Selular	
Sub Jumlah | Sub Total	
Program JKK JKK Program	
Pemerintah | Government	
Program JKm JKm Program	
Pemerintah | Government	
Jumlah Pendapatan Diterima di Muka **Total Revenue Received in Advance**	
Jumlah Liabilitas dengan Pihak Berelasi **Total Liabilities with Related Parties**	

Pendapatan	**Revenue**
Hasil Investasi – Bersih Investment Return - Net	
Program THT THT Program	
Keuntungan Penjualan dan Dividen Saham Stock Sales Profits and Dividends	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Pelat Timah Nusantara Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
PT PP Presisi Tbk	
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	
Bagi Hasil dan Keuntungan Penjualan Reksa Dana Profit Sharing and Mutual Fund Sales Profits	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN: Interest and Sale of Bonds and MTN:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Obligasi Negara Indonesia (USD) Indonesian Government Bonds (USD)	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT HK Realtindo	
PT Perkebunan Nusantara II	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	
Bunga dan Penjualan KIK EBA: Interest and Sales of KIK EBA:	
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
PT PLN (Persero)	
Bunga Deposito Berjangka: Interest on Time Deposits:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
Hasil Properti Investasi Investment Property Yield	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	
Kenaikan (Penurunan) Nilai Saham: Increase (Decrease) in Share Value:	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT PP (Persero) Tbk	

Hasil Investasi - Bersih Investment Return - Net	
PT PP Presisi Tbk	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	
PT Pelat Timah Nusantara Tbk	
PT Indofarma (Persero) Tbk	
Kenaikan (Penurunan) Nilai Obligasi: Increase (Decrease) in Bond Value:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKK JKK Program	
Bagi Hasil dan Keuntungan Penjualan Reksa Dana Profit Sharing and Mutual Fund Sales Profits	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN: Interest and Sale of Bonds and MTNs:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Bunga Deposito Berjangka: Interest on Time Deposits:	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKm JKm Program	
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN: Interest and Sale of Bonds and MTNs:	
Surat Berharga Negara Government Securities	
Bunga Deposito Berjangka: Interest on Time Deposits:	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Jumlah Hasil Investasi **Total Investment Return**	

Pendapatan Lain-lain Other Income	
Program THT THT Program	
Pendapatan Sewa Gedung Building Rental Income	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Telekomunikasi Selular	
Jasa Giro Current Account Services	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Imbal Jasa Flagging: Flagging Fee:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
Program THT THT Program	
Program JKK JKK Program	
Jasa Giro: Current Account Services:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
Pendapatan Fee Taspen Life: Taspen Life Fee Income:	
PT Asuransi Jiwa Taspen	
Sub Jumlah **Sub Total**	
Program JKm JKm Program	
Jasa Giro: Giro Services:	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	

Pendapatan Lain-lain Other Income	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Pendapatan Fee Taspen Life: Taspen Life Fee Income:	
PT Asuransi Jiwa Taspen	
Sub Jumlah Sub Total	
Jumlah Pendapatan Lain-lain Total Other Revenue	
Jumlah Pendapatan dengan Pihak Berelasi Total Revenue with Related Parties	

Beban	Expense
Klaim dan Manfaat Claims and Benefits	
Program JKK JKK Program	
PT Asuransi Jiwa Taspen	
Program JKm JKm Program	
PT Asuransi Jiwa Taspen	
Jumlah Klaim dan Manfaat Total Claims and Benefits	
Jumlah Beban dengan Pihak Berelasi Total Expenses with Related Parties	

Perjanjian Penting

PT ASABRI (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama pembayaran manfaat program THT, JKK, JKm termasuk Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan beberapa Mitra Bayar, yaitu:

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
4. PT Bank KB Bukopin Tbk
5. PT Bank Neo Commerce
6. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
7. PT Bank Bumi Arta Tbk
8. PT Bank BTPN Tbk
9. PT Bank Mandiri Taspen
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
12. PT Pos Indonesia (Persero)
13. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
14. PT Jasa Raharja (Persero)
15. BPJS Kesehatan

Important Agreements

PT ASABRI (Persero) signed a cooperation agreement for the payment of THT, JKK, JKm benefits including the Cash Value of Pension Contributions (NTIP) for soldiers of the Indonesian National Army (TNI), members of the Indonesian National Police (POLRI), and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police with several Paying Partners, namely:

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
4. PT Bank KB Bukopin Tbk
5. PT Bank Neo Commerce
6. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
7. PT Bank Bumi Arta Tbk
8. PT Bank BTPN Tbk
9. PT Bank Mandiri Taspen
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
12. PT Pos Indonesia (Persero)
13. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
14. PT Jasa Raharja (Persero)
15. BPJS Kesehatan

PT ASABRI (Persero) menandatangani perjanjian pembayaran pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan beberapa Mitra Bayar yaitu:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6. PT Bank Mandiri Taspen
7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
8. PT Pos Indonesia (Persero)
9. PT Bank KB Bukopin Tbk
10. PT Bank Neo Commerce
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
12. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
13. PT Bank Bumi Arta Tbk
14. PT Bank BTPN Tbk

PT ASABRI (Persero) signed a pension payment agreement for Indonesian National Army (TNI), members of the Indonesian National Police (POLRI), and employees of the State Civil Apparatus (ASN) within the Ministry of Defence and the Indonesian National Police with several Paying Partners, namely:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6. PT Bank Mandiri Taspen
7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
8. PT Pos Indonesia (Persero)
9. PT Bank KB Bukopin Tbk
10. PT Bank Neo Commerce
11. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
12. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
13. PT Bank Bumi Arta Tbk
14. PT Bank BTPN Tbk

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh terhadap Perusahaan

Changes in Legislation that Affect the Company

Sejalan dengan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) PT ASABRI (Persero) telah mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Bahwa pada tahun 2022 telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Desember 2022. Adapun latar belakang diundangkannya POJK 25 tahun 2022 yaitu:

1. Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang tidak lagi mengatur asuransi sosial menjadi dasar hukum terhadap pengawasan ASABRI oleh OJK;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 102 Tahun 2015, yang mengatur bahwa OJK termasuk sebagai salah satu pengawas eksternal ASABRI.

Sehingga keberadaan POJK 25 tahun 2022 mempertegas kedudukan dan mekanisme OJK dalam kerangka pengawasan terhadap PT ASABRI (Persero) sehingga disusunlah POJK 25 Tahun 2022.

Substansi pengaturan pada POJK 25 Tahun 2022 yaitu ketentuan umum, pengawasan, manajemen risiko, penegakan kepatuhan, ruang lingkup pengawasan, pelaporan, hingga penutup. Pengelolaan program dalam POJK berupa Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelekaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Pensiun. Pengawasan langsung OJK dilakukan melalui pemeriksaan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi PT ASABRI (Persero) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko.

Mekanisme pengawasan langsung dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemeriksaan berkala dilakukan berdasarkan penilaian atas kondisi PT ASABRI (Persero), rencana pemeriksaan, hasil koordinasi dengan Pengawas Eksternal lainnya, dan/atau informasi dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap PT ASABRI (Persero). Sedangkan pengawasan tidak langsung berdasarkan analisis atas laporan yang disampaikan PT ASABRI (Persero) dan pihak lain kepada OJK dan/atau Rapat dengan Pihak Utama PT ASABRI (Persero).

In line with Good Corporate Governance (GCG) practices, PT ASABRI (Persero) has reviewed the provisions of laws and regulations that affect company activities. Whereas in 2022, Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 25 of 2022 concerning Supervision of Social Insurance Program Managers for Indonesian National Army Soldiers, Members of the Indonesian National Police, and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defense and National Police of the Republic of Indonesia will be issued. by the Financial Services Authority on December 21, 2022. The background to the promulgation of POJK 25 of 2022 is:

1. Law 40 of 2014 concerning Insurance, which no longer regulates social insurance, is the legal basis for OJK's supervision of ASABRI;
2. Government Regulation Number 54 of 2020 concerning Amendments to PP Number 102 of 2015, which stipulates that the OJK is included as one of ASABRI external supervisors.

The existence of POJK 25 of 2022 emphasizes the position and mechanisms of the OJK in the framework of supervision of PT ASABRI (Persero) so that POJK 25 of 2022 was drafted.

The regulatory substance in POJK 25 of 2022 is general provisions, supervision, risk management, compliance enforcement, scope of supervision, reporting, and closing. Management of programs in POJK in the form of Old Age Savings (THT), Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKm), and Pension. OJK direct supervision is carried out through inspections to obtain an overview of the condition of PT ASABRI (Persero) regarding compliance with laws and regulations regarding Good Corporate Governance and Risk Management.

The direct supervision mechanism is carried out periodically, at least 1 (one) time in 1 (one) year. Periodic inspections are carried out based on an assessment of the condition of PT ASABRI (Persero), inspection plans, results of coordination with other External Supervisors, and/or information from other parties who have an interest in PT ASABRI (Persero). Meanwhile, indirect supervision is based on analysis of the reports submitted PT ASABRI (Persero) and other parties to the OJK and/or Meeting with the Main Party of PT ASABRI (Persero).

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Laporan keuangan PT ASABRI (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur laporan keuangan selain Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan ("LMPMD") dan pengukuran Piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu ("Piutang PSL") program Tabungan Hari Tua ("THT") adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. LMPMD program THT sesuai dengan PMK 66/2021 dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Piutang PSL program THT sesuai dengan PMK 66/2021 yang diukur berdasarkan nilai sisa tagihan.

The financial statements of PT ASABRI (Persero) for the year ended December 31, 2022 have been prepared and presented in accordance with the fair presentation financial reporting framework for the specific purpose of complying with the provisions of Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of Old Age Savings, Work Accident Insurance and Death Insurance for State Apparatus Employees, Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, and Members of the Armed Forces

1. The elements of the financial statements other than the Liability for Future Policy Benefits ("LMPMD") and the measurement of Dues Receivable for Past Liabilities ("PSL Receivable") of the Old Age Savings ("THT") program are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
2. LMPMD of THT program is in accordance with PMK 66/2021 using the calculation method and assumptions approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia;
3. PSL receivables for THT program are in accordance with PMK 66/2021 which is measured based on the residual value of the bills.

Menghadapi Tantangan Bisnis
Facing Business Challenges

Perkembangan digitalisasi telah terjadi demikian pesatnya sejak awal pandemi COVID-19. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif, Perusahaan harus memahami kebutuhan peserta dengan lebih baik untuk meraih *engagement* dari peserta. Masa pandemi COVID-19 ditandai dengan akselerasi penerapan solusi digital, pandemi turut mengedukasi dan mengubah gaya hidup peserta dan masyarakat Indonesia untuk lebih berbasis digital. Pasca pandemi, meskipun digitalisasi tetap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan peserta, ekosistem *offline* tetap menjadi bagian signifikan dari layanan ASABRI kepada peserta. ASABRI melihat adanya kebutuhan akan pelayanan secara *offline* di samping inovasi atas kanal digital dalam memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta. Sepanjang tahun 2022, kami melakukan ekspansi strategis pada kanal *online* maupun *offline* untuk melayani secara *hybrid* dan komprehensif dalam menjangkau peserta di seluruh Indonesia.

The development of digitalisation has happened so rapidly since the beginning of the COVID-19 pandemic. In the midst of increasing competition, the Company must understand the needs of participants better to gain engagement from participants. The COVID-19 pandemic is characterised by the acceleration of the implementation of digital solutions, the pandemic has also educated and changed the lifestyle of participants and the Indonesian people to be more digital-based. Post-pandemic, although digitalisation still plays an important role in meeting the needs of participants, the offline ecosystem remains a significant part of ASABRI services to participants. ASABRI sees the need for offline services in addition to innovation on digital channels in providing the best experience for participants. Throughout 2022, we are strategically expanding our online and offline channels to provide the best experience for our participants serve in a hybrid and comprehensive manner in reaching participants throughout Indonesia.

Dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan, ASABRI telah menyusun *Corporate plan* atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 – 2024, ASABRI berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan *Roadmap* BUMN 2020-2024 yang tertuang dalam 5 formulasi prioritas Kementerian BUMN secara konsisten dilaksanakan dengan baik.

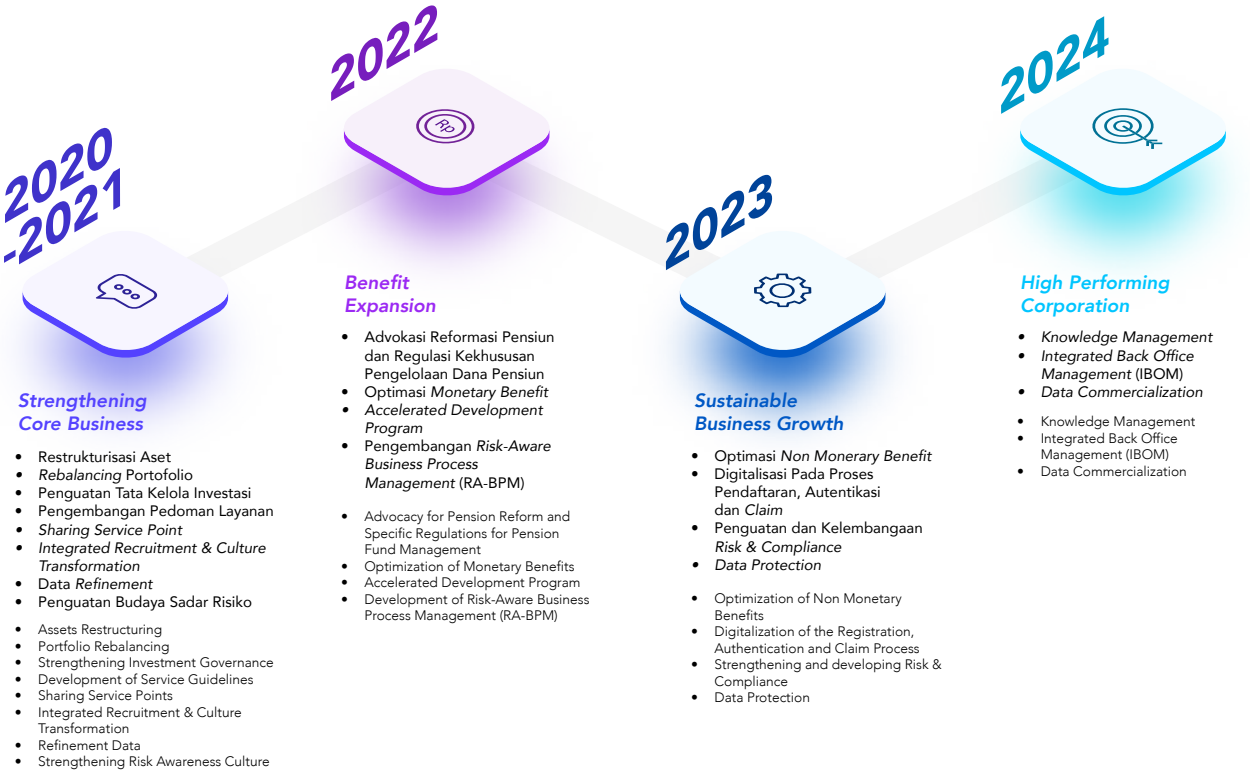
Dengan berorientasi pada aspirasi jangka panjang Perusahaan, strategi ASABRI ke depan akan berfokus pada 5 (lima) program penyehatan keuangan ASABRI yang telah dicanangkan dan dijalankan secara konsisten sejak tahun 2020. Perbaikan tata kelola perusahaan melalui penyempurnaan kebijakan dan prosedur pada area Investasi dan Aktuaria, penguatan Komite Investasi dan pembentukan Komite Produk dan Aktuaria, integrasi sistem investasi, sistem settlement dan akuntansi dan sistem manajemen risiko hingga penyesuaian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) terkait aktivitas investasi. Penguatan tata kelola akan terus dilakukan, termasuk area layanan dan teknologi informasi.

ASABRI akan berupaya mencapai visi dan misi dengan menjalankan 19 *strategic initiatives* yang tertuang pada RJPP dengan *roadmap* yang terbagi menjadi 4 (empat) fase transformasi yaitu:

In improving the company's capabilities in facing future business challenges, ASABRI has compiled a Corporate plan or Long-Term Company Plan (RJPP) for 2020 - 2024, ASABRI is guided by Presidential Regulation (Perpres) Number 18 of 2020 concerning the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the 2020-2024 BUMN Roadmap contained in the 5 priority formulations of the Ministry of BUMN which are consistently implemented well.

Oriented to the Company's long-term aspirations, ASABRI future strategy will focus on 5 (five) ASABRI financial restructuring Program that have been launched and carried out consistently since 2020. Improving corporate governance through improving policies and procedures in the Investment and Actuarial areas, strengthening the Investment Committee and establishing the Product and Actuarial Committee, integrating investment systems, settlement and accounting systems and risk management systems to adjusting the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) related to investment activities. Strengthening governance will continue, including service areas and information technology.

ASABRI will strive to achieve its vision and mission by implementing 19 strategic initiatives contained in the RJPP with a roadmap divided into 4 (four) transformation phases, namely:



Dalam implementasi *Corporate Plan* 2020-2024, diperlukan penguatan atas strategi *Corporate Plan* 2020-2024 ASABRI melalui 5 (lima) aspek kekuatan utama yaitu:

Aspek Investasi dan Keuangan

ASABRI melakukan inisiatif penguatan investasi dan keuangan melalui tiga strategi utama, yaitu restrukturisasi keuangan, *rebalancing* portofolio, dan penguatan tata kelola investasi.

1. Menjalankan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk restrukturisasi aset, yaitu pemulihan aset investasi non produktif, optimasi penjualan aset properti, dan penyesuaian liabilitas melalui perubahan bunga aktuaria.
2. Penyesuaian Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan yang sesuai dengan karakteristik asuransi sosial.
3. Optimasi portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan (*moderate*) dan optimasi *return* Investasi pada masing-masing instrumen untuk mengoptimalkan *return* investasi dengan risiko yang lebih *moderate*.
4. Penguatan Tata Kelola Perencanaan Investasi melalui pembentukan Komite Investasi dan Penerapan SAA dan ALMA.

Aspek Program

ASABRI mendorong terciptanya total *benefit* program untuk meningkatkan nilai dan varian manfaat bagi pesertanya. Total *benefit* yang dimaksud adalah penyediaan manfaat secara *end to end* sepanjang siklus peserta, baik yang sifatnya wajib maupun tambahan.

1. Advokasi Reformasi Pensiun dengan meningkatkan nilai manfaat yang diberikan kepada peserta.
2. Melakukan optimasi manfaat tambahan, selain melakukan optimasi manfaat wajib, total *benefit* terdiri dari *monetary* dan *non-monetary benefit*.

Aspek Layanan dan Operasional

Optimasi layanan dicapai melalui *integrated and digitalized services* dengan menyediakan seluruh fitur layanan baik melalui *channel* fisik maupun digital untuk menciptakan pengalaman secara *one stop services*.

1. Standardisasi layanan terdiri dari standardisasi persyaratan, prosedur, *Service Level Agreement (SLA)*, dan produk yang ditawarkan pada setiap titik layanan.
2. Implementasi *sharing branches* dan *integrated back office management* dengan Taspen untuk meningkatkan *coverage* layanan fisik dan *operational cost efficiency*.
3. Pengembangan aplikasi Aplikasi ASABRI Mobile baik fungsi, penambahan fitur, dan hadirnya versi iOS.

In implementing the Corporate Plan 2020-2024, it is necessary to strengthen ASABRI Corporate Plan 2020-2024 strategy through 5 (five) main strength aspects, namely:

Investment and Financial Aspects

ASABRI undertook investment and financial strengthening initiatives through three main strategies, namely financial restructuring, portfolio rebalancing, and strengthening investment governance.

1. Executed strategic steps taken for asset restructuring, namely recovery of non-productive investment assets, optimisation of property asset sales, and adjustment of liabilities through changes in actuarial interest.
2. Adjustment of future policy benefit liabilities in accordance with the characteristics of social insurance.
3. Optimisation of investment portfolio in accordance with the company's risk profile (moderate) and optimisation of investment return on each instrument to optimise investment return with more moderate risk.
4. Strengthening Investment Planning Governance through the establishment of an Investment Committee and Implementation of SAA and ALMA.

Program Aspect

ASABRI encourages the creation of a total benefit program to increase the value and variants of benefits for its participants. The total benefit in question is the provision of end-to-end benefits throughout the participant's cycle, both mandatory and additional.

1. Advocating Pension Reform by increasing the value of benefits provided to participants.
2. Optimising additional benefits, in addition to optimising mandatory benefits, total benefits consist of monetary and non-monetary benefits.

Service and Operational Aspects

Service optimisation is achieved through integrated and digitalised services by providing all service features through both physical and digital channels to create a one stop services experience.

1. Service standardisation consists of standardising requirements, procedures, Service Level Agreement (SLA), and products offered at each service point.
2. Implementation of sharing branches and integrated back office management with Taspen to improve physical service coverage and operational cost efficiency.
3. Development of the ASABRI Mobile App application in terms of functions, additional features, and the presence of the iOS version.

Aspek Teknologi Informasi

ASABRI mendorong integrasi dan kapitalisasi data untuk mendorong transformasi digital yaitu pengembangan *database*, *data security and commercialization*.

1. Implementasi *database refinement* melalui Integrasi data dan/atau data *mirroring* dengan peserta, dan penggunaan *data analytics* untuk perbaikan data.
2. Pengembangan *Certified Data Pivacy Solution Engineer* (CDPSE) *Based System* untuk memastikan *confidentiality* data peserta.

Aspek Sumber Daya Manusia

ASABRI menerapkan *human capital development* yang dapat memiliki dampak dalam pemenuhan *gap* kaderisasi yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem kerja yang seimbang, memperluas ruang kolaborasi dan meningkatkan kualitas SDM antar generasi sebagai pelaku proses bisnis perusahaan.

1. Pengembangan *talent pool system* (terutama untuk *professional hire*) dan transisi budaya menuju *entrepreneurship culture*.
2. Pengembangan talenta melalui program A*ccelerated development program* dengan dua strategi, yaitu *integrated training and cross assignment*, dan *coaching program*.
3. Melakukan kajian terhadap kebijakan remunerasi dan kesejahteraan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan dan kebutuhan karyawan saat ini.
4. Pertemuan rutin dengan Serikat Pekerja untuk menampung aspirasi karyawan dan mengkomunikasikan kondisi Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan *engagement* karyawan.

Aspek *Risk Management*

ASABRI mendorong penguatan tingkat *risk maturity* ASABRI menuju level *Managed*.

1. Penerapan *key risk indicator* untuk menjadi parameter yang dapat memberikan indikasi penyebab akan terjadinya risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.
2. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan cara penguatan fungsi komite, penguatan fungsi *risk officer*, dan integrasi *front-middle-back office*.
3. Meningkatkan pelatihan untuk membuat SDM di tingkat operasional berperan aktif mencegah terjadinya suatu risiko.

Aspects of Information Technology

ASABRI encourages data integration and capitalisation to drive digital transformation, namely database development, data security and commercialisation.

1. Implementation of database refinement through data integration and/or data mirroring with participants, and the use of data analytics for data improvement.
2. Development of Certified Data Pivacy Solution Engineer (CDPSE) Based System to ensure confidentiality of participant data.

Human Resource Aspects

ASABRI implements human capital development that can have an impact in fulfilling the regeneration gap which aims to create a balanced work ecosystem, expand collaboration space and improve the quality of human resources between generations as actors of the company's business processes.

1. Development of talent pool system (especially for professional hires) and cultural transition towards entrepreneurship culture.
2. Talent development through Accelerated development program with two strategies, namely integrated training and cross assignment, and coaching program.
3. Reviewing remuneration and welfare policies that are no longer in line with the Company's current conditions and employee needs.
4. Regular meetings with the Labour Union to accommodate employee aspirations and communicate the Company's conditions, so as to increase employee engagement.

Risk Management Aspects

ASABRI encourages the strengthening of ASABRI risk maturity level towards the Managed level.

1. Implementation of key risk indicators to become parameters that can provide an indication of the causes of risks that have an impact on the achievement of Organizational goals.
2. Institutional Strengthening and Improving the Effectiveness of Risk Management Implementation is carried out by strengthening the committee function, strengthening the risk officer function, and integrating the front-middle-back office.
3. Improving training to make human resources at the operational level play an active role in preventing the occurrence of a risk.

Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terkait *UPSL* sebesar Rp4,55 triliun sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero).

Perusahaan mengajukan permohonan pencairan *UPSL* kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor B/AP.01/410-AS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Permohonan Pelaksanaan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) Program THT PT ASABRI (Persero) dan Surat Nomor B/AP.01/2027-AS/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Permohonan Pelaksanaan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero).

Serta Perusahaan mengajukan permohonan dukungan pencairan *UPSL* kepada Kementerian BUMN melalui Surat Nomor B/AP.01/2265-AS/XI/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero) dan kepada Menteri Pertahanan pada audiensi tanggal 28 Juli 2023 yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Wakil Menteri BUMN II, Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero).

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-914/MK.02/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Rencana Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero). *UPSL* telah diterima oleh ASABRI dari Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan November 2022 dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
2. Bulan Desember 2022 dibayarkan sebesar Rp1.280.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Penyesuaian Liabilitas Melalui Perubahan Bunga Aktuaria

Persetujuan penggunaan bunga aktuaria khusus untuk PT ASABRI (Persero) di tahun 2021 dan di tahun 2022 didapat melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-8/MK.02/2022 tanggal 3 Januari 2022

Matters that could potentially have a significant impact on business continuity

Unfunded Past Service Liability (UPSL)

The Company has obtained approval from the Minister of Finance related to UPSL amounting to IDR4.55 trillion in accordance with the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 concerning Determination of Unfunded Past Service Liability for Old Age Savings Program at PT ASABRI (Persero).

The Company submitted a request for UPSL disbursement to the Ministry of Finance through Letter Number B/AP.01/410-AS/III/2022 dated March 4, 2022 regarding Request for Implementation of Unfunded Past Service Liability (UPSL) Payment for PT ASABRI (Persero) Old Age Savings and Letter Number B/AP.01/2027-AS/X/2022 dated October 5, 2022 regarding Request for Implementation of Unfunded Past Service Liability (UPSL) Payment for PT ASABRI (Persero) Old Age Savings Program.

As well as the Company submitted a request for support for the disbursement of UPSL to the Ministry of SOEs through Letter Number B/AP.01/2265-AS/XI/2022 dated November 2, 2022 concerning Request for Support for the Implementation of Unfunded Past Service Liability (UPSL) Payments for the PT ASABRI (Persero) Old Age Savings and to the Minister of Defence at an audience on July 28, 2023 which was attended by the Minister of Defence, Deputy Minister of SOEs II, the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero).

In accordance with the letter of the Minister of Finance Number S-914/MK.02/2022 dated November 4, 2022 regarding the Payment Plan for Unfunded Past Service Liability of the Old Age Savings of PT ASABRI (Persero). PT ASABRI (Persero). UPSL has been received by ASABRI from the Ministry of Finance with the following details:

1. November 2022 paid in the amount of IDR1,000,000,000,000.00 (one trillion rupiah);
2. December 2022 paid in the amount of IDR1,280,000,000,000.00 (one trillion two hundred eighty billion rupiah).

Liability Adjustment Through Change in Actuarial Interest

Approval for the use of special actuarial interest for PT ASABRI (Persero) in 2021 and in 2022 was obtained through the Letters of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-8/MK.02/2022 dated

dan S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 sebesar 9,7% dan 9,5%.

Penyertaan Modal Negara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk menjaga kecukupan modal PT ASABRI (Persero), Perseroan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung yang telah mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa Pemerintah memberikan PMN kepada PT ASABRI (Persero) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7) UU APBN 2023, yang berbunyi:

6. *Untuk menjaga kecukupan modal PT Asabri (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola eks kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kepada PT Asabri (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola eks kewajiban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diberikan PMN yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

7. *.... Pemberian PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa berdasarkan UU APBN 2023 tersebut, PT ASABRI (Persero) akan diberikan PMN yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi PT ASABRI (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Asumsi Dasar Kelangsungan Usaha

ASABRI menggunakan beberapa asumsi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian terhadap kelangsungan usaha di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat mampu mendorong stabilisasi sistem keuangan yang lebih kuat.
2. Kecukupan modal atau Tingkat ekuitas ASABRI yang saat ini tercatat masih namun ekuitas tersebut mengalami kenaikan sebesar atau 69,86% dibandingkan dengan ekuitas di 2021.
3. *Risk Based Capital* (RBC) sesuai dengan ketentuan PMK yaitu paling sedikit sesuai dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM), sebesar 2% dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK

January 3, 2022 and S-49/MK.02/2022 dated January 30, 2022 concerning Approval of Methods and Assumptions in the Calculation of Future Policy Benefit Obligations for PT ASABRI (Persero) THT Program in 2022 at 9.7% and 9.5%.

State Capital Participation

In accordance with Law Number 28 of 2022 concerning the State Budget for Fiscal Year 2023 to maintain the capital adequacy of PT ASABRI (Persero), the Company is given State Capital Injection (PMN) which comes from the receipt of confiscated or confiscated Attorney General's Office which has received a court decision with permanent legal force. That the Government provides PMN to PT ASABRI (Persero) as stated in Article 40 paragraph (6) and paragraph (7) of the 2023 State Budget Law, which reads:

6. To maintain the capital adequacy of PT Asabri (Persero) and State-Owned Enterprises that manage the former obligations of PT Asuransi Jiwasraya (Persero), to PT Asabri (Persero) and State-Owned Enterprises that manage the former obligations of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) are given PMN originating from the receipt of confiscated or confiscated proceeds of the Attorney General's Office related to the criminal acts of corruption of PT Asabri (Persero) and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which has received a court decision that has permanent legal force.
7. ... The provision of PMN as referred to in paragraph (6) is stipulated by Government Regulation.

Based on the 2023 State Budget Law, PT ASABRI (Persero) will be given PMN originating from the confiscated or confiscated proceeds of the Attorney General's Office related to the corruption crimes of PT ASABRI (Persero) and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) which have received a court decision that has been legally binding, which will then be stipulated by a Government Regulation.

Basic Business Continuity Assumptions

ASABRI uses several assumptions as considerations in assessing business continuity including:

1. Stronger economic growth can encourage stronger financial system stabilisation.
2. Capital adequacy or ASABRI equity level, which is currently recorded at , but the equity has increased by or 69.86% compared to equity in 2021.
3. Risk Based Capital (RBC) in accordance with the provisions of the PMK, which is at least in accordance with the Minimum Solvency Level Limit (BTSM), amounting to 2% of the total liability for future policy benefits and claims payable for the THT program plus

dan JKm. RBC ASABRI di tahun 2022 adalah sebesar 74,26% dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM), mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar -1210,48%.

4. *Yield on Investment* (YOI) atau tingkat pengembalian investasi pada tahun 2022 adalah 3,21%, di mana hasil investasi program THT, JKK, dan JKm senilai Miliar, terdiri dari *realized income* senilai Miliar dan *unrealized loss* atas penurunan nilai wajar investasi senilai Miliar. *Realized income* sebagian besar berasal dari hasil investasi pendapatan tetap, yaitu obligasi dan deposito serta keuntungan atas penjualan DINFRA.

ASABRI terus berupaya mempertahankan kepercayaan peserta dan *stakeholder* melalui penyediaan solusi layanan yang komprehensif dan berkualitas melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan melalui dukungan teknologi serta digitalisasi. Menyadari pentingnya aspek keamanan dan peningkatan risiko *cyber security*, ASABRI memastikan pelaksanaan 3 (tiga) aspek pokok keamanan teknologi informasi yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

ASABRI juga melakukan penerapan sistem manajemen dalam menjalankan proses bisnis, di mana kerangka kerja manajemen risiko mengacu kepada ISO 31000:2009 tentang *Risk Management Principles and Guidelines* yang telah diadopsi menjadi standar nasional SNI ISO 31000:2011 yang telah diperbaharui menjadi ISO 31000:2018. Penerapan manajemen risiko PT ASABRI (Persero) mendasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara.

Bersama dengan Taspen, ASABRI berkomitmen untuk membangun sinergi kerja sama yang sampai dengan saat ini terus dikembangkan, seperti pemberian Pinjaman Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah (PUM KPR), tersedianya potongan harga melalui kerja sama dengan BULOG, Kimia Farma, Prodia, Pegadaian, dan adanya program kewirausahaan yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian peserta pensiun. Selain itu, telah tersedia program Proteksi Beasiswa dan penjualan produk Proteksi Jiwa. Implementasi sinergi klaster bersama dengan Taspen juga di gencarkan melalui melalui layanan informasi bersama atau *sharing branches* pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah

technical reserves for the JKK and JKm programs. ASABRI RBC in 2022 was 74.26% of the Minimum Solvency Level Limit (BTSM), an increase from 2021 of -1210.48%.

4. Yield on Investment (YOI) or the rate of return on investment in 2022 was 3.21%, where the investment returns on the THT, JKK and JKm programs were billion, consisting of realised income of billion and unrealised loss on the decline in the fair value of investments of billion. Realised income mostly came from fixed income investment returns, namely bonds and deposits and gains on the sale of DINFRA.

ASABRI continues to strive to maintain the trust of participants and stakeholders through providing comprehensive and quality service solutions through the application of the precautionary principle and through technological support and digitalisation. Recognising the importance of security aspects and increasing cyber security risks, ASABRI ensures the implementation of 3 (three) main aspects of information technology security, namely human resources, processes, and technology.

ASABRI also implements a management system in carrying out business processes, where the risk management framework refers to ISO 31000:2009 concerning Risk Management Principles and Guidelines which has been adopted into the national standard SNI ISO 31000: 2011 which has been updated to ISO 31000:2018. The implementation of PT ASABRI (Persero) risk management is based on Financial Services Authority Regulation Number 44/POJK.05/2020 dated August 28, 2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-5/MBU/09/2022 dated September 2, 2022 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions

Together with Taspen, ASABRI is committed to building synergies of cooperation which until now continue to be developed, such as the provision of Housing Advance Loans (PUM KPR), the availability of discounts through cooperation with BULOG, Kimia Farma, Prodia, Pegadaian, and the existence of entrepreneurship Program which can certainly improve the economy of pension participants. In addition, there is a Scholarship Protection program and sales of Life Protection products. Implementation of cluster synergy together with Taspen is also intensified through joint information services or sharing branches at the Public Service Mall (MPP) which has been available at 11 service points, namely in Tasikmalaya, Bandung,

tersedia di 11 titik layanan yaitu di Tasikmalaya, Bandung, Pati, Purworejo, Epicentrum Jakarta, Tuban, Banjarbaru, Tebing Tinggi, Maros, Banyuwangi dan Bogor.

ASABRI juga turut meningkatkan kompetensi para karyawan terutama untuk mendukung inovasi layanan digital dan mempererat hubungan dengan peserta. Proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan dikelola sesuai dengan nilai-nilai perusahaan serta tata kelola yang sehat.

Pati, Purworejo, Epicentrum Jakarta, Tuban, Banjarbaru, Tebing Tinggi, Maros, Banyuwangi and Bogor.

ASABRI also improved the competence of employees, especially to support digital service innovation and strengthen relationships with participants. The process of regeneration and leadership succession is managed in accordance with corporate values and sound governance.

Strategi Bisnis Tahun 2023
Business Strategy 2023

Pelaksanaan Strategi bisnis Tahun 2023 didasarkan pada Program Kerja Inisiatif Strategis di tahun 2023 yang tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan merupakan lanjutan dari turunan Program Strategis yang berasal dari RJPP tahun 2020-2024 yang melanjutkan strategi dan capaian di tahun 2022.

Tahun 2023 perusahaan memasuki tahapan "*Sustainable Business Growth*". Sehingga untuk menjadi Perusahaan asuransi sosial nasional yang profesional dengan melakukan transformasi bisnis dan budaya perusahaan untuk mendukung target *positioning* di tahun 2023. PT ASABRI (Persero) akan melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui inisiatif-inisiatif strategis antara lain Optimasi *Non-Monetary Benefit*, Penguatan kelembagaan *risk and compliance* dan *data protection*. Melanjutkan kinerja di tengah ketidakpastian ekonomi yang penuh tantangan serta transformasi bisnis yang sedang jalankan oleh ASABRI, Perusahaan telah menetapkan 3 fokus utama di tahun 2023 yaitu:

Penyertaan Modal Negara (PMN)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk menjaga kecukupan modal PT ASABRI (Persero), Perseroan diberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari penerimaan hasil sitaan atau rampasan Kejaksaan Agung yang telah mendapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. PT ASABRI (Persero) terus melakukan koordinasi dengan seluruh *Stakeholders* terkait seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2022.

The implementation of the 2023 business strategy is based on the 2023 Strategic Initiative Work Program contained in the Company's Work Plan and Budget and is a continuation of the derivative Strategic Program derived from the RJPP 2020-2024 which continues the strategies and achievements in 2022.

In 2023 the company enters the "Sustainable Business Growth" stage. So as to become a professional national social insurance company by transforming business and corporate culture to support positioning targets in 2023. PT ASABRI (Persero) will accelerate business growth through strategic initiatives including Non-Monetary Benefit Optimisation, Institutional Strengthening of risk and compliance and data protection. Continuing performance in the midst of economic uncertainty full of challenges and business transformation that is being carried out by ASABRI, the Company has set 3 main focuses in 2023, namely:

State Capital Participation (PMN)
In accordance with Law Number 28 of 2022 concerning the State Budget for Fiscal Year 2023 to maintain the capital adequacy of PT ASABRI (Persero), the Company is given State Capital Injection (PMN) which comes from the receipt of confiscated or confiscated Attorney General's Office which has received a court decision with permanent legal force. PT ASABRI (Persero) continues to coordinate with all relevant Stakeholders such as the Attorney General's Office, Ministry of Finance, Ministry of BUMN, Ministry of Defence in the implementation of Law Number 28 of 2022.

Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Berdasarkan PMK Nomor 202 Tahun 2014, Pemerintah dapat mengakui *Unfunded Past Service Liability* (*UPSL*) akibat perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua, kenaikan besaran gaji pokok yang menjadi dasar pembayaran manfaat THT, dan penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Perusahaan telah mengajukan *UPSL* kepada Kementerian Keuangan dan telah disetujui melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang *Unfunded Past Service Liabilty* (*UPSL*) Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero) ditetapkan bahwa nilai *UPSL* sebesar Rp4,55 triliun. Perusahaan mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar pencairan *UPSL* dapat segera dilakukan di tahun 2022 dan/atau di tahun 2023. Dana *UPSL* yang diterima akan ditempatkan pada instrumen investasi yang dapat memperkuat *cahsflow* Perusahaan dengan tingkat risiko yang terukur untuk percepatan perbaikan solvabilitas dan penguatan likuiditas.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-914/MK.02/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Rencana Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua PT ASABRI (Persero), jadwal pencairan *UPSL* yang sudah di tetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Bulan November 2022 dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah);
2. Bulan Desember 2022 dibayarkan sebesar Rp1.280.000.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah).

Di tahun 2023 perusahaan akan mengupayakan untuk mendapatkan realisasi sisa dari pembayaran *UPSL* sebesar Rp1 triliun dan sisanya sebesar Rp1,27 triliun di tahun 2024, dengan tetap memperhatikan kondisi terkini APBN.

Autentikasi secara Digital

Perusahaan telah berhasil mengembangkan sistem autentikasi, yakni penggunakan perangkat *smartphone* melalui aplikasi yang menggunakan teknologi *face recognize* serta aplikasi berbasis *web* yang digunakan sebagai *monitoring* pelaksanaan autentikasi pada proses pembayaran pensiun. Dengan sistem ini, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang atau mitra bayar saat melakukan autentikasi, cukup menggunakan *smartphone*, dimanapun dan kapanpun. Tahun 2022 telah dilakukan perekaman biometrik atau *enrollment* kepada 330.231 peserta pensiun dan masih tetap berlanjut sampai seluruh peserta pensiun melakukan *enrollment* 100%. Tahun 2023 pelaksanaan autentikasi akan difokuskan menggunakan aplikasi ASABRI STAR.

Unfunded Past Service Liability (UPSL)

Based on PMK Number 202 Year 2014, the Government can recognise Unfunded Past Service Liability (UPSL) due to changes in the benefit formula of the Old Age Savings, an increase in the amount of basic salary which is the basis for payment of THT benefits, and the addition of new participants whose placement date is different from the date of appointment.

The Company has submitted UPSL to the Ministry of Finance and has been approved through the Minister of Finance's letter Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 regarding Unfunded Past Service Liabilty (UPSL) for the Old Age Savings at PT ASABRI (Persero), stipulating that the UPSL value is IDR4.55 trillion. The company submitted to the Ministry of Finance so that the UPSL disbursement can be made immediately in 2022 and/or in 2023. The UPSL funds received will be placed in investment instruments that can strengthen the Company's cahsflow with a measured level of risk to accelerate solvency improvement and liquidity strengthening.

In accordance with the letter of the Minister of Finance Number S-914/MK.02/2022 dated November 4, 2022 regarding the Payment Plan for the Unfunded Past Service Liability of PT ASABRI (Persero) Old Age Savings, the UPSL disbursement schedule set by the Ministry of Finance is as follows:

1. November 2022 is paid in the amount of IDR1,000,000,000,000 (one trillion rupiah);
2. December 2022 paid in the amount of IDR1,280,000,000,000 (one trillion two hundred eighty billion rupiah).

In 2023 the company will seek to obtain the realization of the remaining UPSL payment of IDR1 trillion and the remaining IDR1.27 trillion in 2024, while taking into account the current condition of the State Budget.

Digital Authentication

The company has successfully developed an authentication system, which uses a smartphone device through an application that uses face recognition technology and a web-based application that is used to monitor the implementation of authentication in the pension payment process. With this system, participants do not need to come to When authenticating at a branch office or pay partner, simply use a smartphone, anywhere and anytime. In 2022, biometric recording or enrollment has been carried out for 330,231 pension participants and will continue until all pension participants have 100% enrollment. In 2023 the implementation of authentication will be focused on using the ASABRI STAR application.

Target Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Tingkat Solvabilitas

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjamin Target Tingkat Kesehatan ASABRI Tahun 2023 adalah predikat penilaian "SEHAT-A" dengan nilai "71".
b. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Per-71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Target Rasio Pencapaian Solvabilitas di Tahun 2023 sebesar 66,41%. Target tersebut masih di bawah batas minimum yang dipersyaratkan sebesar 100%.
c. Sedangkan Target Rasio Tingkat Solvabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tanggal 14 Juni 2021 ASABRI harus mampu mencapai di 66,41%, target tersebut masih di bawah batas minimum yang dipersyaratkan sebesar 100%.

Targeted Corporate Health and Solvency Levels

a. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators of Health Level Assessment of Financial Services SOEs in the Insurance and Guarantee Services Business Field, ASABRI Health Level Target in 2023 is the assessment predicate "SEHAT-A" with a score of "71".
b. Meanwhile, in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number Per-71/POJK.05/2016 dated December 23, 2016 concerning the Financial Health of Insurance Companies and Reinsurance Companies, the Solvency Achievement Ratio Target in 2023 is 66.41%. The target is still below the required minimum limit of 100%.
c. Meanwhile, the Solvency Ratio Target based on the Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021 dated June 14, 2021 ASABRI must be able to reach 66.41%, the target is still below the required minimum limit of 100%.

Memasuki tahun 2023, ASABRI telah menetapkan sejumlah target antara lain:

Entering 2023, ASABRI has set a number of targets, among others:

Kategori Category	**Target** Target
Pertumbuhan Aset yang lebih baik Better Asset Growth	9,59%
Pertumbuhan Ekuitas Equity Growth	19,45%
Yield on Investment Yield on Investment	6,30%
Risk Based Capital Risk Based Capital	66,41%
Peningkatan *Fee Based Income* Increased Fee Based Income	5,00%
Pertumbuhan hasil Invetasi program THT, JKK, dan JKm Growth in Investment Return on THT, JKK and JKm Program	97,72%
Optimasi aset non produktif Optimisation of non-productive assets	2,27%

06





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

ASABRI berkomitmen tinggi menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Melalui penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan diharapkan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik dan benar serta mampu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan *(stakeholder)*, khususnya pemegang saham serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

ASABRI is deeply committed to applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) to ensure sustainable business growth to face the increasingly dynamic business competition. Through the application of GCG principles within the Company, it is expected that corporate governance is carried out properly and correctly, capable of protecting the interests of stakeholders, especially shareholders, and enhancing compliance with applicable legal regulations."

PT ASABRI (Persero) senantiasa berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* dalam menjamin pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha secara komprehensif, efektif, dan efisien sesuai dengan koridor kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku di seluruh tingkatan level organisasi. PT ASABRI (Persero) memahami bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan menjadi sebuah kebutuhan dan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan sehingga perlu dilakukan upaya serta dukungan dari seluruh organ perusahaan dalam mendorong perbaikan perusahaan, peningkatan kinerja serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT ASABRI (Persero) consistently commits to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) to ensure the comprehensive, effective, and efficient management of business activities in compliance with regulatory and legal requirements at all organizational levels. PT ASABRI (Persero) understands that the application of Corporate Governance is a necessity and a foundation for conducting the company's business activities. Therefore, efforts and support from all corporate organs are required to drive company improvement, performance enhancement, and the company's compliance with applicable legal regulations.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT ASABRI (Persero) bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi perusahaan menjadi Perusahaan Asuransi Sosial Nasional yang profesional dengan melakukan transformasi budaya dan bisnis Perusahaan secara berkelanjutan;
2. Mendukung Misi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan Peserta ASABRI melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi dan peningkatan manfaat asuransi sosial, didukung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berakhlak serta pengelola investasi yang tepat; dan
3. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan khususnya pemegang saham.

The implementation of Good Corporate Governance principles at PT ASABRI (Persero) aims to:

1. Support the company's vision of becoming a professional National Social Insurance Company by continuously transforming the company's culture and business.
2. Support the company's mission to enhance the welfare of ASABRI Participants through the development of technology-based service systems and the improvement of social insurance benefits. This is supported by the development of Human Resources with integrity and morals, as well as proper investment management.
3. Enhance the trust of stakeholders, especially shareholders.

Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Legal Basis for the Implementation of Corporate Governance

Landasan hukum penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT ASABRI (Persero), antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021.
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara PER-10/MBU/10/2020.
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

The legal basis for the application of Good Corporate Governance principles at PT ASABRI (Persero) includes:

1. Republic of Indonesia Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
2. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
3. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
4. Republic of Indonesia Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure.
5. Republic of Indonesia Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises. Also, Government Regulation No. 23 of 2022 amending Government Regulation No. 45 of 2005.
6. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-01/MBU/2011 concerning the Application of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-09/MBU/2012.
7. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-14/MBU/10/2021.
8. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-13/MBU/09/2021.
9. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Board of Supervisors of State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-10/MBU/10/2020.
10. Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Regulation No. 07 of 2016 concerning the Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth, as amended by Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2020.

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER/11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022.
13. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S/MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Regulasi Internal

1. Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI (Persero), yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/05/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH. 03/49-AS/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* PT ASABRI (Persero).
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/06/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.04/50-AS/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Standar Etika Perusahaan *(Code of Conduct)* PT ASABRI (Persero).
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero).
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VIII/2020; KEP/PH.08/54-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Gratifikasi PT ASABRI (Persero).

11. Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2019 concerning the Reporting of Gratification.
12. Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER/11/MBU/07/2021 concerning the Requirements, Procedures for the Appointment, and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation PER-7/MBU/09/2022.
13. Ministry of State-Owned Enterprises Secretary Decree No. SK-16/S/MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Internal Regulations

1. Articles of Association of PT ASABRI (Persero) as stated in Notarial Deed Number 16 dated August 27, 2008, regarding the Decision of Shareholders, last amended by Notarial Deed Number 10 dated July 15, 2021, regarding the Decision of Shareholders and Amendments to the Articles of Association of PT ASABRI (Persero), conducted before Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta.
2. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/05/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH.03/49-AS/VII/2019 dated July 17, 2019, concerning Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) at PT ASABRI (Persero).
3. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/06/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH.04/50-AS/VII/2019 dated July 17, 2019, concerning the Code of Conduct of PT ASABRI (Persero).
4. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH.05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, concerning the Board Manual of PT ASABRI (Persero).
5. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VIII/2020; KEP/PH.08/54-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020, concerning the Gratuities Guidelines of PT ASABRI (Persero).

6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/08/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.02/55-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Kepatuhan PT ASABRI (Persero).
7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/09/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.10/56-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT ASABRI (Persero).
8. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/10/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.06/57-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* PT ASABRI (Persero).
9. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PH.08/14-AS/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
10. Peraturan Direksi Nomor PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASABRI (Persero).
11. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PH.07/19-AS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di PT ASABRI (Persero).

6. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/08/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.02/55-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020, concerning the Compliance Guidelines of PT ASABRI (Persero).
7. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) NumberKEP/09/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.10/56-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020, concerning the Conflict of Interest Handling Guidelines of PT ASABRI (Persero).
8. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) No. KEP/10/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.06/57-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020, concerning the Violation Reporting and Management Guidelines (Whistleblowing System) of PT ASABRI (Persero).
9. PT ASABRI (Persero) Directorate Regulation Number PER/PH.08/14-AS/IX/2020 dated September 11, 2020, concerning the Anti-Bribery Management System Guidelines.
10. Directorate Regulation Number PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 dated August 4, 2020, concerning Risk Management Guidelines of PT ASABRI (Persero).
11. PT ASABRI (Persero) Directorate Regulation Number PER/PH.07/19-AS/XI/2020 dated November 23, 2020, concerning Guidelines for Managing and Submitting Reports of State Officials' Wealth at PT ASABRI (Persero).

Penerapan Prinsip GCG
Implementation of GCG Principles

Penerapan prinsip-prinsip GCG mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012.

The application of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT ASABRI (Persero) is guided by the Ministry of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, as amended by Ministry of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012.

Prinsip GCG GCG Principle	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di PT ASABRI (Persero)** Implementation at PT ASABRI (Persero)
Transparansi Transparancy	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan Openness in decision-making processes and disclosing material and relevant information about the company.	• Menyediakan informasi berbentuk *website* perusahaan yang memuat kebijakan sebagai implementasi tata kelola perusahaan yang baik; • Publikasi melalui brosur, pamflet, majalah, buletin, dan spanduk yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan dan informasi relevan lainnya. • Providing information in the form of a company website that includes policies as an implementation of good corporate governance. • Publication through brochures, pamphlets, magazines, bulletins, and banners related to the company's operational activities and other relevant information.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif Clarity of functions, implementation, and accountability of the Board so that company management is carried out effectively.	• Tersedia pedoman yang memuat kejelasan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite; • Organ Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang selaras dengan visi, misi perusahaan; • Memiliki *Key Performance Indicator* (KPI). • Guidelines are available that provide clarity on the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners, Directors, and committees. • The company's organs have tasks and responsibilities that align with the company's vision and mission. • Key Performance Indicators (KPIs) are in place.
Pertanggung jawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat Compliance with regulations and principles of sound corporate governance in managing the company	• Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; • Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. • The company consistently complies with applicable laws and regulations. • Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs in the form of partnership and environmental development programs as stipulated in relevant regulations.
Independensi Independency	Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat A state where the company is professionally managed without conflicts of interest and influence/pressure from any party that does not comply with legal regulations and sound corporate principles.	Memastikan setiap proses pengambilan keputusan diselenggarakan secara objektif demi kepentingan Perusahaan tanpa benturan kepentingan. Ensuring that every decision-making process is conducted objectively in the company's best interests without conflicts of interest.
Kesetaraan dan Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	• Menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. • Melakukan lelang atau seleksi terbuka melalui *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa • Ensuring that every decision-making process is conducted objectively in the company's best interests without conflicts of interest. • Conduct open auctions or selections via e-procurement in the goods/services procurement process

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2022
Implementation of Corporate Governance in 2022

Sebagai wujud komitmen PT ASABRI (Persero), Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui kegiatan:

Self Assessment GCG Tahun 2021
Pelaksanaan GCG di PT ASABRI (Persero) berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG dilaksanakan oleh Tim *Self Assessment* GCG yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Nomor SPRIN/PH.01/37-AS/I/2022-SDH. Kegiatan *Self Assessment* diselenggarakan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, Kementerian BUMN mendukung penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di BUMN guna mencegah terjadinya pelanggaran termasuk konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menciptakan persepsi positif sebagai perusahaan dengan etika bisnis yang tinggi, serta menciptakan prosedur baku internal perusahaan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kementerian BUMN selaku *stakeholder* menghimbau untuk segera menerapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha. Untuk menindaklanjuti himbauan tersebut, PT ASABRI (Persero) telah melakukan pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha dan KPPU telah melakukan identifikasi serta merekomendasikan PT ASABRI (Persero) untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan kegiatan tambahan guna memenuhi unsur program Kepatuhan Persaingan Usaha, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan/atau Pelatihan (SPP) terkait Persaingan Usaha.

As a manifestation of PT ASABRI (Persero)'s commitment, the company applies good corporate governance (GCG) through the following activities:

Self Assessment of GCG for the Year 2021
The implementation of GCG at PT ASABRI (Persero) is guided by the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Application of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), as amended by PER-09/MBU/2012. The Self Assessment of GCG is carried out by the GCG Self Assessment Team, established based on Decree No. SPRIN/PH.01/37-AS/I/2022-SDH. The Self Assessment activity is conducted with reference to the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 regarding Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.

Business Competition Compliance Program
With the issuance of the Indonesian Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Regulation No. 1 of 2022 regarding the Business Competition Compliance Program, the Ministry of State-Owned Enterprises supports the implementation of the Business Competition Compliance Program in SOEs to prevent violations, including the cost consequences arising from non-compliance with Law No. 5 of 1999, creating a positive perception as a company with high business ethics, and establishing internal company procedures in accordance with principles of healthy business competition. The Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), as a stakeholder, encourages the immediate implementation of the Business Competition Compliance Program. In response to this encouragement, PT ASABRI (Persero) has registered for the Business Competition Compliance Program, and KPPU has identified and recommended that PT ASABRI (Persero) make improvements and conduct additional activities to fulfill the elements of the Business Competition Compliance Program, including activities such as socialization, education, and/or training related to Business Competition.

Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas dalam jangka Panjang. ASABRI secara rutin melakukan penilaian kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Tujuan pelaksanaan penilaian kualitas penerapan Tata Kelola perusahaan, yaitu:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT ASABRI (Persero) dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori penerapannya;
2. Mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah *(gap)* antara kriteria GCG dan penerapan pada PT ASABRI (Persero);
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada PT ASABRI (Persero) dan memperoleh masukan untuk menyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* perusahaan.

Prosedur Pelaksanaan Asesmen GCG

Prosedur pelaksanaan penilaian GCG pada PT ASABRI (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012.

Assessment terhadap penerapan GCG pada PT ASABRI (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dan 153 parameter, adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup:

a. Komitmen terhadap penerapan tata Kelola secara berkelanjutan;
b. Pemegang Saham dan RUPS;
c. Dewan Komisaris;
d. Direksi;
e. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
f. Aspek Lainnya.

As a manifestation of the company's commitment to improving long-term business success and accountability, ASABRI routinely conducts an assessment of the quality of corporate governance implementation, guided by the Reference Framework for GCG Assessment developed by the Ministry of State-Owned Enterprises. The objectives of the assessment of the quality of corporate governance implementation are as follows:

1. To measure the quality of corporate GCG implementation through an assessment of the level of compliance with GCG criteria based on the actual conditions applied at PT ASABRI (Persero), with scores/ratings given for GCG implementation and its categories;
2. To identify the strengths and weaknesses of corporate GCG implementation and propose improvement recommendations to reduce gaps between GCG criteria and implementation at PT ASABRI (Persero);
3. To monitor the consistency of GCG implementation at PT ASABRI (Persero) and obtain input for the improvement and development of corporate governance policies.

Procedure for GCG Assessment Implementation

The procedure for conducting the GCG assessment at PT ASABRI (Persero) refers to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Application of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/2012.

The assessment of GCG implementation at PT ASABRI (Persero) is carried out based on the assessment method and procedure in accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, regarding Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises.

The aspects assessed are summarized in 43 indicators and 153 parameters. The aspects of GCG implementation assessed include:

a. Commitment to the sustainable implementation of corporate governance;
b. Shareholders and General Meetings of Shareholders.
c. Board of Commissioners;
d. Board of Directors;
e. Disclosure of Information and Transparency; and
f. Other Aspects.

Pelaksanaan prinsip-prinsip dan infrastruktur GCG yang ada merupakan tanggung jawab Manajemen Perusahaan. Pelaksanaan *assessment* penerapan GCG ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di PT ASABRI (Persero), sehingga hasil *assessment* ini sekaligus menjadi penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.

Berikut perbandingan hasil penilaian GCG Tahun Buku 2020, 2021, dan 2022 akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

The implementation of GCG principles and infrastructure is the responsibility of the company's management. The assessment of GCG implementation is part of the continuous GCG implementation process at PT ASABRI (Persero), and the assessment results also serve as an evaluation of the progress of GCG implementation to date.

The following table provides a comparison of the results of the GCG assessment for the fiscal years 2020, 2021, and 2022:

Tabel Perbandingan Hasil Penerapan GCG Tahun Buku 2020, 2021, dan 2022
Table of Comparison of GCG Implementation Results for the Fiscal Years 2020, 2021, and 2022

Aspek Pengujian GCG *Assessment* GCG Assessment Testing Aspect	**Bobot** Weight	**Capaian Tahun Buku 2020** Achievement 2020 Fiscal Year		**Capaian Tahun Buku 2021** Achievement 2021 Fiscal Year		**Capaian Tahun Buku 2022** Achievement 2022 Fiscal Year	
		Skor Score	**Capaian** Achievement	**Skor** Score	**Capaian** Achievement	**Skor** Score	**Capaian** Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,443	92,043%	6,639	94,839%	6,56	93,750
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	9	7,459	82,878%	8,308	92,306%	8,40	93,389
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	28,032	80,091%	32,009	91,454%	30,00	85,723
Direksi Board of Directors	35	28,543	81,551%	32,237	92,104%	30,66	87,590
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	6,310	70,111%	7,092	78,803%	6,88	76,402
Aspek Lain Other Aspects	5	(2,000)		0	-	0	-
Skor Keseluruhan Overall Score	**100**	**74,787**	**74,787%**	**86,284**	**86,284%**	**82,50**	**82,503%**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		CUKUP BAIK FAIR		SANGAT BAIK VERY GOOD		BAIK GOOD	

Perbandingan Hasil Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penilaian penerapan GCG Perseroan dilakukan oleh lembaga penilai independen, dan evaluasi (*self assessment)* terhadap penerapan GCG dilakukan oleh tim internal Perseroan yang dilaksanakan setiap tahunnya secara bergiliran.

Berikut ini adalah tabel perbandingan hasil evaluasi GCG tahun buku 2019 dan 2021 yang dilakukan oleh

Comparison of GCG Implementation Assessment and Evaluation Results

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), the assessment of the company's GCG implementation is conducted by an independent assessment institution, and the evaluation (self-assessment) of GCG implementation is carried out by the company's internal team, alternately conducted every year.

The following table provides a comparison of the GCG evaluation results for the fiscal years 2019 and 2021

tim internal Perseroan dan hasil *assessment* GCG yang dilakukan oleh lembaga penilai independen pada tahun 2020 dan 2022.

a. Hasil Perbandingan *Self Assessment* GCG Tahun Buku 2019 dan 2021 yang dilakukan oleh tim internal Perseroan *(self assessment).*

conducted by the company's internal team and the GCG assessment conducted by an independent assessment institution in the years 2020 and 2022.

a. Comparison of GCG Self-Assessment Results for the Fiscal Years 2019 and 2021 conducted by the company's internal team (self-assessment).

Aspek Pengujian *Assessment* GCG GCG Assessment Testing Aspect	**Bobot** Weight	**Capaian Tahun Buku 2019** Achievement 2019 Fiscal Year		**Capaian Tahun Buku 2021** Achievement 2021 Fiscal Year	
		Skor Score	**Capaian** Achievement	**Skor** Score	**Capaian** Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,62	94,57%	6,639	94,839%
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	9	8,83	98,16%	8,308	92,306%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	30,92	88,33%	32,009	91,454%
Direksi Board of Directors	35	31,52	90,06%	32,237	92,104%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	4,88	54,17%	7,092	78,803%
Aspek Lain Other Aspects	5	4,38	87,50%	0	-
Skor Keseluruhan Overall Score	**100**	**87,15**	**87,15%**	**86,284**	**86,284%**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		SANGAT BAIK VERY GOOD		SANGAT BAIK VERY GOOD	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan *assessment* GCG yang dilakukan oleh tim internal Perseroan *(self assessment)* untuk tahun buku 2021, yakni sebesar 86,284% mengalami penurunan sebesar 0,866% jika dibandingkan dengan hasil *assessment* tahun 2019 yakni sebesar 87,15%. Skor yang diperoleh baik pada tahun 2019 maupun tahun 2021 dapat diartikan bahwa ASABRI berhasil memperoleh predikat "Sangat Baik" dalam hal penerapan GCG di lingkungan Perseroan.

Based on the data in the table above, it can be concluded that the comparison of GCG assessment results conducted by the Company's internal team (self-assessment) for the fiscal year 2021, which was 86.284%, experienced a decrease of 0.866% compared to the assessment results for the year 2019, which was 87.15%. The scores obtained in both 2019 and 2021 can be interpreted as ASABRI successfully achieving the predicate "Very Good" in terms of implementing GCG within the Company.

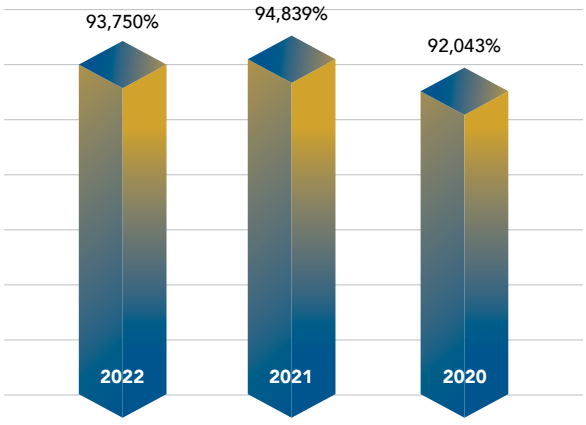
b. Hasil Perbandingan *Assessment* GCG Tahun Buku 2020 dan 2022 yang dilakukan oleh lembaga penilai independen.

b. Comparison of GCG Assessment Results for the Fiscal Years 2020 and 2022 conducted by an independent assessment agency.

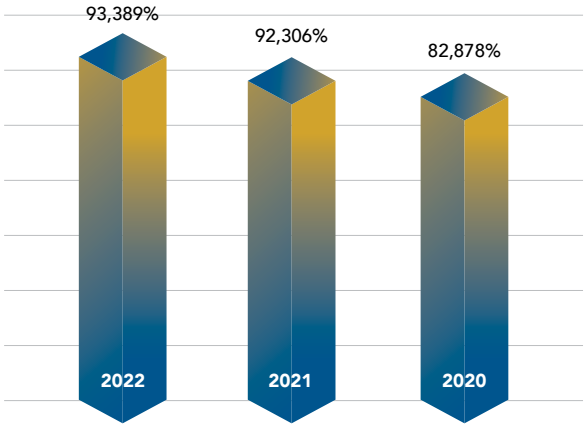
Aspek Pengujian *Assessment* GCG GCG Assessment Testing Aspect	**Bobot** Weight	**Capaian Tahun Buku 2020** Achievement 2020 Fiscal Year		**Capaian Tahun Buku 2022** Achievement 2022 Fiscal Year	
		Skor Score	**Capaian** Achievement	**Skor** Score	**Capaian** Achievement
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,443	92,043%	6,56	93,750
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	9	7,459	82,878%	8,40	93,389
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	28,032	80,091%	30,00	85,723
Direksi Board of Directors	35	28,543	81,551%	30,66	87,590
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	6,310	70,111%	6,88	76,402
Aspek Lain Other Aspects	5	(2,000)		0	-
Skor Keseluruhan Overall Score	**100**	**74,787**	**74,787%**	**82,50**	**82,503%**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		CUKUP BAIK VERY GOOD		BAIK GOOD	

Grafik Capaian Aspek Penilaian GCG ASABRI Tahun 2020-2022
Achievement Graph of ASABRI GCG Assessment Aspects for the Years 2020-2022

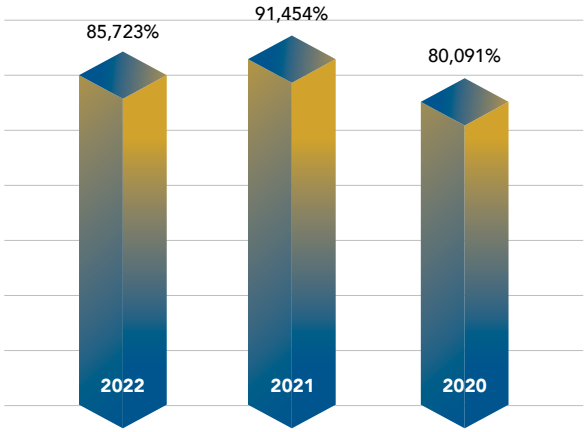
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan
Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance



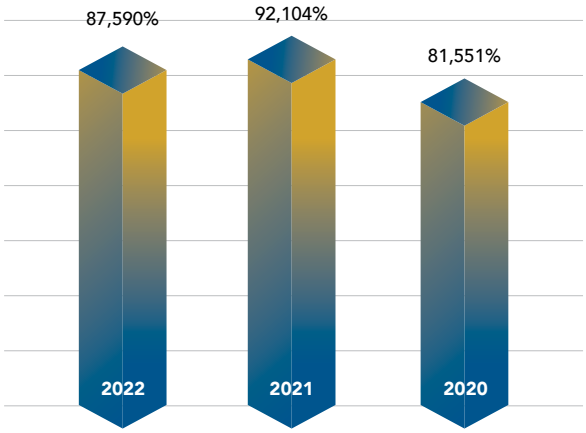
Pemegang Saham
Shareholders



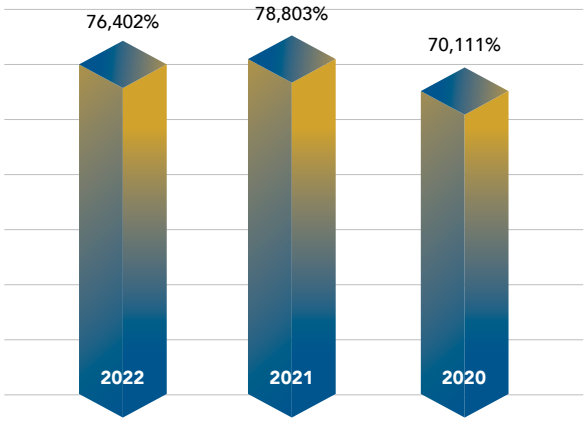
Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Direksi
Board of Directors



Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Disclosure of Information and Transparency



Ringkasan Hasil *Assessment* GCG ASABRI Tahun 2021

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah sebesar 6,64 dari bobot sebesar 7,00 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 94,839%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG dari Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan telah berjalan dengan Sangat Baik.
2. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham/ Pemilik Modal
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah 8,308 dari bobot sebesar 9,00 atau setara dengan realisasi sebesar 92,306%. Hal ini

Summary of ASABRI 2021 GCG Assessment Results

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
   Based on the assessment of the Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance, the score achieved is 6.64 out of a weight of 7.00, equivalent to an achievement percentage of 94.839%. This indicates that the overall implementation of GCG in terms of Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance has been performed excellently.

2. Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Owners of Capital
   Based on the assessment of the Shareholders and General Meeting of Shareholders/Owners of Capital, the score achieved is 8.308 out of a weight of 9.00, equivalent to a realization of 92.306%. This suggests that the overall implementation of GCG for the

menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal telah berjalan dengan Sangat Baik.

3. Dewan Komisaris
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, ASABRI memperoleh skor 32,009 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 91,454%. Hal ini berarti secara umum penerapan GCG dilihat dari Aspek Dewan Komisaris berjalan dengan Sangat Baik.
4. Direksi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 32,237 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 92,104%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi berjalan dengan Sangat Baik.
5. Pengungkapan Informasi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 7,092 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 78,803%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG dilihat dari Aspek Pengungkapan Informasi telah dijalankan dengan Baik.
6. Aspek Lainnya
   Aspek Lainnya tidak dinilai karena jumlah skor pada Aspek I sampai dengan Aspek V tidak mencapai skor 85.

Hasil *assessment* GCG menunjukkan kualitas penerapan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria melalui pemberian skor/nilai serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara GCG dengan penerapannya. Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2021, terdapat 23 rekomendasi perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

Shareholders and General Meeting of Shareholders/Owners of Capital aspects has been performed excellently.

3. Board of Commissioners
   Based on the assessment of the Board of Commissioners aspect, ASABRI obtained a score of 32.009 out of a weight of 35.000, equivalent to an achievement of 91.454%. This means that the overall implementation of GCG in terms of the Board of Commissioners aspect has been performed excellently.
4. Board of Directors
   Based on the assessment of the Board of Directors aspect, the score achieved is 32.237 out of a weight of 35.000, equivalent to an achievement of 92.104%. This indicates that the overall implementation of GCG for the Board of Directors aspect has been performed excellently.
5. Information Disclosure
   Based on the assessment of the Information Disclosure and Transparency aspect, the score achieved is 7.092 out of a weight of 9.000, equivalent to an achievement of 78.803%. This suggests that the overall implementation of GCG in terms of Information Disclosure has been carried out well.
6. Other Aspects
   Other Aspects were not evaluated because the scores for Aspects I to V did not reach a score of 85.

The GCG assessment results indicate the quality of the implementation of Good Corporate Governance through an evaluation of the level of compliance with criteria by assigning scores/values and recommending improvements to bridge the gap between GCG and its implementation. Based on the GCG assessment results for 2021, there are 23 improvement recommendations, detailed as follows:

Tabel Jumlah Rekomendasi Hasil *Self Assessment* GCG Tahun 2021
Table of the Number of Recommendations from the 2021 GCG Self-Assessment Results

Aspek Pengujian GCG *Assessment* GCG Assessment Testing Aspect	**Jumlah Rekomendasi** Total of Recommendations
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	1
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	2
Dewan Komisaris Board of Commissioners	7
Direksi Board of Directors	9
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	4
Aspek Lainnya Other Aspects	-

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Penilaian/ Evaluasi Atas Penerapan *Good Corporate Governance*

Sepanjang tahun 2022, ASABRI telah menindaklanjuti rekomendasi yang diperoleh dari Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan *Good Corporate Governance* ASABRI Tahun 2021 yang penilaiannya yang dilakukan oleh tim internal Perseroan *(self assessment)* dengan detail sebagai berikut:

Follow-up on Recommendations from the Assessment/Evaluation of Good Corporate Governance Implementation

Throughout the year 2022, ASABRI has followed up on the recommendations obtained from the Assessment/ Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance at ASABRI in 2021, which was assessed by the Company's internal team (self-assessment), with the following details:

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Penilaian/Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun 2021
Tabel of Follow-up on Recommendations from the Assessment/Evaluation of GCG 2021

Aspek Aspect	**Skor** Score	**Jumlah Rekomendasi** Total of Recommendations	**Status**		
			Ditindak lanjut Follow up	**Dalam Proses** In Progress	**Not Applicable**
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	6,639	1	1	0	0
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	8,308	2	1	1	0
Dewan Komisaris Board of Commissioners	32,009	7	7	0	0
Direksi Board of Directors	32,237	9	8	1	0
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	7,092	4	2	1	1
Aspek Lainnya Other Aspects	0,000	0	0	0	0
Jumlah Total	86,284	23	19	3	1

Ringkasan Hasil *Assessment* GCG ASABRI Tahun 2022

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah sebesar 6,563 dari bobot sebesar 7,00 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 93,750%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG dari Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan telah berjalan dengan Sangat Baik.
2. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham/ Pemilik Modal
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah 8,405 dari bobot sebesar 9,00 atau

Summary of ASABRI GCG Assessment Results for 2022

1. Commitment to Sustainable Good Corporate Governance
   Based on the assessment results for the aspect of Commitment to Sustainable Good Corporate Governance, the score achieved is 6.563 out of a weight of 7.00, or an equivalent achievement percentage of 93.750%. This indicates that overall, the implementation of GCG in terms of Commitment to Sustainable Good Corporate Governance has been Very Good.

2. Shareholders/General Meeting of Shareholders/ Owners of Capital
   Based on the assessment results for the aspect of Shareholders and General Meeting of Shareholders/ Owners of Capital, the score achieved is 8.405 out of a weight of 9.00, or an equivalent achievement

setara dengan realisasi sebesar 93,389%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal telah berjalan dengan Sangat Baik.

3. Dewan Komisaris
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, ASABRI memperoleh skor 30,003 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 85,723%. Hal ini berarti secara umum penerapan GCG dilihat dari Aspek Dewan Komisaris berjalan dengan Sangat Baik.
4. Direksi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 30,657 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 87,590%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi berjalan dengan Sangat Baik.
5. Pengungkapan Informasi
   Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 6,876% dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan pencapaian sebesar 76,402%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG dilihat dari Aspek Pengungkapan Informasi telah dijalankan dengan Baik.
6. Aspek Lainnya
   Aspek Lainnya tidak dinilai karena jumlah skor pada Aspek I sampai dengan Aspek V tidak mencapai skor 85.

Hasil *assessment* GCG menunjukkan kualitas penerapan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria melalui pemberian skor/nilai serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah antara GCG dengan penerapannya. Berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2022, terdapat 32 rekomendasi perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

of 93.389%. This indicates that overall, the implementation of GCG in terms of Shareholders and General Meeting of Shareholders/Owners of Capital has been Very Good.

3. Board of Commissioners
   Based on the assessment results for the aspect of the Board of Commissioners, ASABRI obtained a score of 30.003 out of a weight of 35.000, equivalent to an achievement of 85.723%. This means that overall, the implementation of GCG in terms of the Board of Commissioners is Very Good.
4. Board of Directors
   Based on the assessment results for the aspect of the Board of Directors, the score achieved is 30.657 out of a weight of 35.000, equivalent to an achievement of 87.590%. This indicates that overall, the implementation of GCG in terms of the Board of Directors has been Very Good.
5. Information Disclosure
   Based on the assessment results for the aspect of Information Disclosure and Transparency, the score achieved is 6.876 out of a weight of 9.000, equivalent to an achievement of 76.402%. This indicates that overall, the implementation of GCG in terms of Information Disclosure has been Good.
6. Other Aspects
   Other Aspects were not assessed because the total score for Aspects I to V did not reach a score of 85.

The GCG assessment results demonstrate the quality of the implementation of Good Corporate Governance through the evaluation of the level of compliance with criteria by assigning scores/values and proposing improvement recommendations to reduce the gap between GCG and its implementation. Based on the GCG assessment results for 2022, there are 32 improvement recommendations, as detailed below:

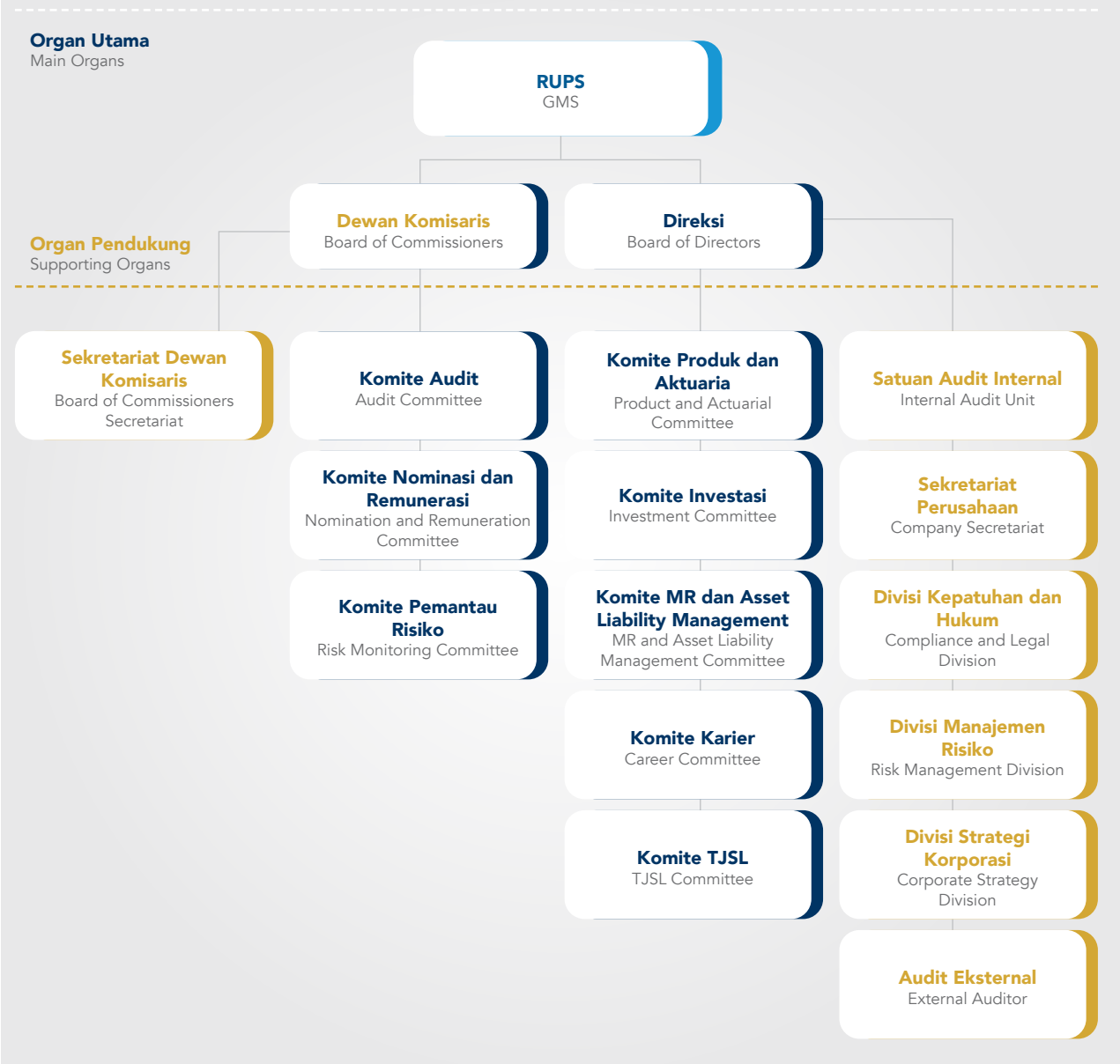
Tabel Jumlah Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Tahun 2022
Table of the Number of Recommendations from the 2022 GCG Self-Assessment Results

Aspek Pengujian GCG *Assessment* GCG Assessment Testing Aspect	**Jumlah Rekomendasi** Total of Recommendations
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	2
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholders/GMS/Capital Owners	3
Dewan Komisaris | Board of Commissioners	11
Direksi | Board of Directors	13
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	3
Aspek Lainnya | Other Aspects	-

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Guna menunjang efektivitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, ASABRI telah memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur Tata Kelola PT ASABRI (Persero) terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama meliputi RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Utama Perseroan bertugas untuk berkoordinasi dalam melaksanakan proses *check and balances* atas seluruh kegiatan usaha untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan

In order to support the effectiveness of good corporate governance implementation, ASABRI has established a corporate governance structure based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The corporate governance structure of PT ASABRI (Persero) consists of Main Organs and Supporting Organs. The Main Organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Main Organs of the Company are responsible for coordinating the check and balances processes for all business activities, which are subsequently accountable to Shareholders and stakeholders.



Seluruh tugas, tanggung jawab, hak, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam *Board Manual* PT ASABRI (Persero), Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap berada pada koridor visi, misi, dan tujuan ASABRI. Selain Organ Utama Perseroan, struktur tata kelola Perusahaan juga telah dilengkapi dengan Organ Pendukung yang terdiri dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Direksi, serta Sekretariat Perusahaan, Satuan Audit Internal, Divisi Strategi Korporasi, Divisi Kepatuhan dan Hukum, serta Divisi Manajemen Risiko. Setiap Organ Pendukung memiliki pembagian fungsi yang jelas serta independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan kepentingan Perusahaan.

All the duties, responsibilities, rights, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been regulated in the PT ASABRI (Persero) Board Manual, the Articles of Association, and applicable laws and regulations. The Board of Commissioners and the Board of Directors, as the Main Organs of the Company, have an obligation to carry out their duties and responsibilities while staying within the framework of ASABRI vision, mission, and objectives. In addition to the Main Organs, the corporate governance structure of the Company is also equipped with Supporting Organs, which consist of committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors, as well as the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Corporate Strategy Division, Compliance and Legal Division, and Risk Management Division. Each Supporting Organ has clear functions and independence in carrying out its duties and responsibilities for the benefit of the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perorangan

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ of the Company with rights and authorities that are not possessed by the Board of Directors and the Board of Commissioners within the limits specified in the regulations and the Company's Articles of Association

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham utama dan pengendali ASABRI adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham Perseroan.

RUPS memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang antara lain:
1. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab *(volledig acquit et de charge)* kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Memberikan persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris;
5. Menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan TJSL;
6. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian;
7. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS ASABRI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:
1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar.

Shareholders are individuals or legal entities who lawfully own shares in the Company. Shareholders do not intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The main shareholder and controller of ASABRI is the Republic of Indonesia, which holds 100% of the Company's shares.

GMS has the authority as regulated by the law, including:
1. Appointing and dismissing the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Approving the Annual Report, including the endorsement of financial statements, by providing settlement and full discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the previous fiscal year, to the extent that such actions are reflected in the annual report, including the financial statements, and are in accordance with applicable regulations.
3. Approving the Company's Work Plan and Budget.
4. Approving the determination of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorariums and other allowances for members of the Board of Commissioners.
5. Designating the Public Accountant Office (KAP) to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of TJSL.
6. Approving the use of net profit, including the amount set aside for loss reserves.
7. Approving other matters that require GMS approval for the Company's benefit and are not included in the Draft Work Plan and Budget.

The convening of ASABRI RUPS is conducted in accordance with provisions including:
1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Articles of Association.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Utama Perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan serta memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan ASABRI sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

The Board of Commissioners is one of the Company's Main Organs that oversee the management of the Company and provide advice and input to the Board of Directors in carrying out ASABRI management activities as stipulated in the applicable laws and the Company's Articles of Association

Dalam menunjang fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria integritas yang dibuktikan dengan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS di mana pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS yang disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip GCG. Kewajiban pelaporan atas tugas pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris dilakukan setiap akhir periode tutup buku kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka mengukuhkan dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja *(Board Manual)* yang mengatur tata laksana kerja secara terstruktur dan sistematis sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pedoman Kerja *(Board Manual)* telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.05/ 51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero). Di samping itu, Dewan Komisaris juga memiliki Pedoman Kerja Teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP/008/KOM/AS/XII/2021 tanggal 20

To support its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. All members of the Board of Commissioners must meet integrity criteria as evidenced by passing the Fit and Proper Test as stipulated in the applicable laws.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is accountable to GMS, where the accountability of the Board of Commissioners to GMS is presented in the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, referring to Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies and the principles of GCG. Reporting on the supervisory tasks performed by the Board of Commissioners is conducted at the end of each fiscal period to Shareholders through the GMS mechanism.

Board Manual for the Board of Commissioners

To strengthen and provide guidance for the implementation of its supervisory function, the Board of Commissioners has a Board Manual that regulates structured and systematic work procedures as a reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties. The Board Manual has been ratified and signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors based on Joint Decisions of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH.05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, concerning the Board Manual of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero). In addition, the Board of Commissioners also has Technical Working Guidelines as stated in the Board of Commissioners' Decision Number KEP/008/KOM/

Desember 2021 tentang Pedoman Kerja Teknis Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero).

Cakupan Pedoman Kerja Teknis Dewan Komisaris antara lain meliputi:
1. Karakteristik Dewan Komisaris.
2. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris.
5. Organ Pendukung Dewan Komisaris.
6. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG, termasuk di dalamnya memastikan bahwa Direksi mampu melaksanakan fungsi pengelolaan dengan baik. Dewan Komisaris turut memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar senantiasa sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Adapun bentuk pengawasan terhadap kebijakan Direksi dilakukan dengan memberikan tanggapan serta persetujuan atas RJPP dan Keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Dewan Komisaris
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal.
4. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Perseroan, sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
5. Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa *good corporate governance* telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

AS/XII/2021 dated December 20, 2021, concerning the Technical Working Guidelines of the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero).

The scope of the Technical Working Guidelines of the Board of Commissioners includes:
1. Characteristics of the Board of Commissioners.
2. Duties, Authorities, Obligations, and Responsibilities of the Board of Commissioners.
3. Implementation of the Board of Commissioners' Tasks.
4. Board of Commissioners Meetings.
5. Support Organs of the Board of Commissioners.
6. Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners carries out its duties and responsibilities independently to ensure the implementation of GCG, including ensuring that the Board of Directors can manage the Company's operations effectively. The Board of Commissioners also monitors the effectiveness of policy implementation, performance, and decision-making processes carried out by the Board of Directors to ensure that they are in line with the Shareholders' directives. Supervision of the Board of Directors' policies is done by providing feedback and approval of the Long-Term Plan and GMS Decisions in accordance with applicable regulations.

Obligations of the Board of Commissioners
1. In carrying out their duties, the Board of Commissioners must comply with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations and must adhere to the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness.
2. Act in good faith, with due care, and responsibly in performing supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the Company's benefit and in accordance with the Company's purposes and objectives.
3. The Board of Commissioners must provide information to GMS/the Minister regarding the reasons for the nomination and the amount of proposed fees or compensation for the external auditor.
4. Ensure that the external auditor, internal auditor, Audit Committee, and other committees if any, have access to accounting records, supporting data, and information about the Company as needed for their duties.
5. Monitor and ensure that good corporate governance is effectively and sustainably applied.

6. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah serta mendatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris mendatangani RJPP dan RKAP.
9. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
10. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
11. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
12. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
13. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
14. Membentuk Komite Audit, dan Komite lainnya jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang peraturan yang berlaku.
15. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS .
16. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
17. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
18. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
19. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan peundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

6. Provide advice to the Board of Directors in managing the Company.
7. Examine and review and sign the Long-Term Plan of the Company (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association.
8. Provide opinions and suggestions to GMS regarding the RJPP and RKAP, explaining the reasons why the Board of Commissioners signs the RJPP and RKAP.
9. Monitor the Company's activities, provide opinions and suggestions to GMS on any matters deemed important for the Company's management.
10. Report immediately to GMS in case of a decline in the Company's performance.
11. Examine and review periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports.
12. Provide explanations, opinions, and suggestions to GMS regarding the Annual Report, if requested.
13. Develop an annual work program included in the Work Plan and Budget of the Company.
14. Establish the Audit Committee and other committees if deemed necessary according to applicable regulations.
15. Propose the appointment of Public Accountants to GMS.
16. Prepare minutes of the Board of Commissioners meetings and keep copies.
17. Report to the Company regarding their ownership of shares and/or their families' ownership of shares in the Company and other companies.
18. Provide a report on the supervisory tasks carried out during the past fiscal year to GMS.
19. Fulfill other obligations in the context of supervision and advisory tasks, as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

Responsibilities of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the Company.
2. Each member of the Board of Commissioners must act in good faith, with due care, and responsibly in performing their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
3. Each member of the Board of Commissioners is personally liable for losses incurred by the Company if they are at fault or negligent in performing their duties.

4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 3 apabila dapat membuktikan:
   a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
   c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan, ke pengadilan negeri.
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 1 berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila dapat membuktikan:
   a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi, yang mengakibatkan kepailitan; dan
   d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

4. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibility as mentioned in point 3 applies collectively to each member of the Board of Commissioners.
5. Board members cannot be held accountable for losses as mentioned in point 3 if they can prove that they have:
   a. Conducted supervision in good faith and with due care for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
   b. Did not have a personal interest, directly or indirectly, in the actions of the Board of Directors that resulted in losses.
   c. Provided advice to the Board of Directors to prevent or mitigate such losses.
6. On behalf of the Company, shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total voting shares can sue members of the Board of Commissioners to the district court if they cause losses to the Company due to errors or negligence.
7. In the event of bankruptcy due to errors or negligence by the Board of Commissioners in supervising the management carried out by the Board of Directors, and the Company's assets are insufficient to pay all of the Company's obligations resulting from the bankruptcy, each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable with the members of the Board of Directors for the unpaid obligations.
8. The responsibility as mentioned in point 1 also applies to members of the Board of Commissioners who have not served for 5 (five) years before the bankruptcy declaration.
9. Board members cannot be held accountable for the Company's bankruptcy as mentioned in point 1 if they can prove that:
   a. The bankruptcy did not occur due to their errors or negligence.
   b. They conducted supervisory tasks in good faith and with due care for the benefit of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
   c. They did not have a direct or indirect personal interest in the actions of the Board of Directors that resulted in bankruptcy.
   d. They provided advice to the Board of Directors to prevent bankruptcy.
10. Provisions regarding the Board of Commissioners' liability for errors and negligence as stipulated in the Limited Liability Company Law do not reduce the provisions stipulated in criminal law.

Hak Dewan Komisaris

1. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, dan tepat waktu;
3. Menanyakan dan meminta penjelasan segala hal mengenai Perusahaan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
4. Menggunakan tenaga ahli untul hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas biaya Perseroan jika dianggap perlu;
5. Membentuk Komite Audit dan Komite lainnya jika diperlukan;
6. Membentuk Komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
   a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
   b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas Perseroan.
7. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perseroan;
8. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS;
9. Menerima tantiem atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibekali sejumlah wewenang yang meliputi:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala Persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Rights of the Board of Commissioners

1. Receive honorarium and allowances/facilities, including retirement benefits, the type and amount of which are determined by GMS, considering applicable regulations.
2. Obtain accurate and timely access to the Company's information.
3. Question and request explanations about everything related to the Company from the Board of Directors, and the Board of Directors must provide explanations.
4. Use experts for specific purposes and within a specific time frame at the Company's expense if deemed necessary.
5. Establish the Audit Committee and other committees if necessary.
6. Establish more than one other committee and/or determine the number of committee members who are not from the Board of Commissioners, more than 2 (two) people, if:
   a. Required by regulations, or
   b. Approved by the Minister based on the complexity and burden faced by the Board of Commissioners in carrying out the Company's tasks.
7. To assist in performing their duties, the Board of Commissioners can establish a Board of Commissioners Secretariat at the Company's expense.
8. Receive Company facilities as determined by GMS.
9. Receive bonuses for their performance, the amount of which is determined by GMS if the Company achieves a certain level of profit.

Authorities of the Board of Commissioners

In carrying out their supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners has several authorities, including:

1. Examine books, letters, and other documents, inspect cash for verification purposes, and other valuable papers, as well as inspect the Company's assets.
2. Enter the premises, buildings, and offices used by the Company.
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials concerning matters related to the Company's management.
4. Know all policies and actions that have been or will be carried out by the Board of Directors.
5. Request the presence of the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors' supervision to attend Board of Commissioners' meetings.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

8. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau Keputusan RUPS.
13. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

8. Establish other committees besides the audit committee if deemed necessary, considering the Company's capacity.
9. Use experts for specific purposes within a specified time frame at the Company's expense, if deemed necessary.
10. Take management actions for the Company under certain conditions for a specified period, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
11. Attend Board of Directors meetings and provide opinions on matters discussed.
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.
13. The Board of Commissioners is a council, and each member of the Board of Commissioners cannot act individually but based on the decisions of the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas masing-masing yang pembagiannya ditentukan secara mandiri dan dibentuk oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Pembagian tugas Dewan Komisaris disajikan dalam uraian sebagai berikut:

Assignment of Duties for Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has individual duties whose allocation is determined independently and established by the Secretary of the Board of Commissioners. The division of duties of the Board of Commissioners is presented in the description as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Fokus Pengawasan** Supervisory Focus
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Memimpin dan mengendalikan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris serta perangkat yang ada (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite). Di samping itu, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi juga mengawasi kegiatan Manajemen pada aspek *human capital* serta hubungan seluruh *stakeholders*. Lead and oversee the Board of Commissioners in carrying out their duties, responsibilities, and authorities, as well as the existing components (Board Secretary and Committees). Additionally, as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, oversee Management activities related to human capital. Also, manage relationships with all stakeholders.
Budi Prijono	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Tinjauan utama pada bidang pelayanan, serta hubungan *stakeholders* khususnya Kementerian Pertahanan dan TNI. Primary focus on the field of service, as well as stakeholder relationships, especially with the Ministry of Defense and the Indonesian National Armed Forces.
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Tinjauan utama pada bidang pengelolaan keuangan, termasuk perhitungan aktuaria, kecukupan liabilitas dan solvabilitas, serta penempatan dana investasi. Serta hubungan *stakeholders* khususnya Kementerian Keuangan. Primary focus on financial management, including actuarial calculations, liability and solvency adequacy, and investment fund placements. Also, manage relationships with stakeholders, especially with the Ministry of Finance.
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tinjauan utama pada bidang pengelolaan keuangan, termasuk penempatan dana investasi dengan mengkoordinir Komite Audit sebagai Ketua. Di samping itu, juga fokus pada pengawasan pengembangan digitalisasi baik dalam proses bisnis, hingga layanan. Primary focus on financial management, including coordinating the Audit Committee as Chairman for investment fund placements. Additionally, concentrate on supervising digitalization developments in both business processes and services.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Fokus Pengawasan** Supervisory Focus
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tinjauan utama pada bidang pelayanan. Di samping itu, juga fokus pada pengawasan pengembangan digitalisasi baik dalam proses bisnis, hingga layanan, serta hubungan *stakeholders* khususnya Kepolisian RI. Di samping itu, juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko mengkoordinir evaluasi implementasi manajemen risiko di Perusahaan. Primary focus on the service sector. Additionally, concentrate on supervising digitalization developments in both business processes and services, as well as stakeholder relationships, especially with the Indonesian National Police. Furthermore, as the Chairman of the Risk Monitoring Committee, coordinate the evaluation of risk management implementation in the Company.

Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui proses *fit and proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.
4. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Mengundurkan diri.

Program Pengenalan Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program Pengenalan Dewan Komisaris dilakukan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat guna memberikan pengetahuan mengenai Perusahaan serta gambaran mengenai tugas, tanggung, wewenang, dan fungsi yang dijalankan oleh anggota Dewan Komisaris terkait.

Materi orientasi yang diberikan di antaranya:

1. Pengetahuan mengenai ASABRI, yang meliputi visi, misi, strategi bisnis, kinerja operasional dan keuangan, RJPP, dan RKAP.

2. Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, fungsi, batasan wewenang, hubungan dengan Direksi, kebijakan dan peraturan yang berlaku di ASABRI, dan lain-lain.

Program Pengembangan Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa program pengembangan kompetensi, dengan data yang disajikan sebagai berikut:

Appointment of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders. The appointment of the Board of Commissioners follows a fit and proper test process in accordance with applicable regulations and GCG provisions. The removal of Board of Commissioners members can occur in the following circumstances:

1. Inability to perform their duties effectively.
2. Failure to comply with or violation of statutory regulations or the Articles of Association.
3. Involvement in actions detrimental to the Company and/or the State.
4. Being found guilty by a court decision with legal force.

5. Resignation.

Orientation Program for New Board of Commissioners Members

An orientation program is conducted for newly appointed Board of Commissioners members to provide them with knowledge about the Company and an overview of the duties, responsibilities, authorities, and functions of Board of Commissioners members.

The orientation program includes the following topics:

1. Knowledge about ASABRI, including its vision, mission, business strategy, operational and financial performance, Long-Term Business Plan (RJPP), and Annual Work Plan and Budget (RKAP).
2. Understanding of roles and responsibilities, functions, limits of authority, relationship with the Board of Directors, policies, and regulations applicable at ASABRI, and so on.

Board of Commissioners Development Program

During 2022, the Board of Commissioners has participated in several competency development programs, with the data presented as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Name	Tempat Location	Waktu Pelaksanaan Duration	Lembaga Penyelenggara Organizing Institution
Ida Bagus Purwalaksana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	*Onboarding Commissioner* Angkatan 4 tahun 2022 Onboarding Commissioner Batch 4 year 2022	Virtual melalui Zoom Virtual via Zoom	16 Maret 2022 s.d 28 April 2022 March 16, 2022, to April 28, 2022	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
I Nengah Putra Winata	Komisaris Indepeneden Independent Commissioner	Leveraging The Roles Of Audit Committee	Virtual melalui Zoom Virtual via Zoom	26-27 Januari 2022 January 26-27, 2022	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Direksi mengacu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero), di mana Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau Pemegang Saham dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai Dewan Komisaris yang memimpin rapat. Dalam hal Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin rapat Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Meeting

The policy for the Board of Commissioners meeting refers to the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, regarding the Board Manual of PT ASABRI (Persero), where the Board of Commissioners meeting must be held periodically at least once a month or upon the request of one or more members of the Board of Commissioners, or upon a written request from the Board of Directors or Shareholders, and in such meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. The Board of Commissioners meeting is valid and has the authority to make binding decisions when attended or represented by more than 1/2 of the total members of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners meeting is chaired by the Chairman of the Board, and in the event the Chairman of the Board is absent or unable to attend, one of the Commissioners appointed by the Chairman of the Board shall chair the Board of Commissioners meeting. In the event the Chairman of the Board does not make an appointment, the Commissioner with the longest term of office as a member of the Board of Commissioners shall chair the meeting. In the event there is more than one Commissioner who has served as a member of the Company's Board of Directors for more than 1 (one) person, the Commissioner with the longest term of office and the oldest in age shall act as the chairman of the Board meeting.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2022, tanggal dan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The implementation of the Board of Commissioners Meeting

In 2022, along with their respective dates, is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	4 Januari 2022 January 4, 2022	Pembahasan Komite atas Draft surat Dewan Komisaris perihal laporan pengawasan investasi bulan November 2021 dan Pembahasan Draft laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan tahun 2021 Committee discussion on the Draft Board of Commissioners Letter regarding the November 2021 investment supervision report and discussion of the Draft annual supervision report for 2021
2	5 Februari 2022 February 5, 2022	Pembahasan Dewan Komisaris atas draft laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan tahun 2021, Arahan Dewan Komisaris terkait Pengawasan tahun 2022, pergantian staf sekretaris komisaris The Board of Commissioners discussion on the draft annual supervision report for 2021, The Board of Commissioners directives related to 2022 supervision, and staff replacement in the secretariat

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
3	20 Mei 2022 May 20, 2022	Pembahasan usulan KAP 2022 dan Bahan Radirkom tentang manfaat tambahan serta penyesuaian premi dan otentikasi digital Discussion of the proposal for the 2022 Public Accounting Firm (KAP) and Radirkom's material on additional benefits, premium adjustments, and digital authentication
4	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Rapat Internal Dewan Komisaris Pembahasan Investasi dan Perkenalan Wakil Komisaris Utama Internal Commissioner Meeting: Investment Discussion and Introduction of Vice Commissioner
5	14 September 2022 September 14, 2022	Aoi tahun 2021 terkait kinerja Dewan Komisaris dan Target Capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 dan pembahasan Persetujuan Kep Bersama Dewan Komisaris dan Direksi perihal kebijakan saling menghargai di lingkungan kerja Review of 2021 Annual Report regarding the Board of Commissioners performance and Target Achievement KPI for 2022, and discussion of Joint Decisions between the Commissioners and Directors regarding workplace respect policies
6	16 September 2022 September 16, 2022	Target Capaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2022 dan Pembahasan Bahan Radirkom mengenai Investasi Target Achievement KPI for 2022 and Discussion of Radirkom's Investment Material
7	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Pembaruan Usulan Revisi RKAP tahun 2022 Discussion of the Board of Commissioners Response to the Revised 2022 RKAP Proposal
8	1 November 2022 November 1, 2022	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite pembahasan hal substansif terkait RKAP tahun 2022 Internal Board of Commissioners and Committee Meeting: Substantive discussions regarding the 2022 RKAP
9	6 Desember 2022 December 6, 2022	Internal Dewan Komisaris pembahasan Target dan Strategi RKAP 2023 Internal Commissioner Meeting: Discussion of Targets and Strategies for the 2023 RKAP
10	20 Desember 2022 December 20, 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Target Capaian KPI Dewan Komisaris Discussion of the Board of Commissioners Supervision Report and the Board of Commissioners KPI Achievement Targets
11	26 Desember 2022 December 26, 2022	Rapat Internal Dewan Komisaris dan Komite pembahasan hasil rapat Komite bersama dengan RSM dan Progres Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2022 Discussion of the Board of Commissioners Supervision Report and Target Achievement KPI for the Commissioner
12	27 Desember 2022 December 27, 2022	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners Supervision Report

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali pertemuan Rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners in Meetings

Throughout the year 2022, the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) held 12 (twelve) meetings of the Board of Commissioners with the attendance levels of each member as follows:

Periode 1 Januari 2022 - 11 Agustus 2022
Period: January 1, 2022, to August 11, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Rate Percentage
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%
Ida Bagus Purwalaksana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	3	3	100%
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100%
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	3	3	100%
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	3	3	100%

Periode 11 Agustus 2022 – 31 Desember 2022
Period: August 11, 2022, to December 31, 2022

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Attendance Frequency	**Persentase Tingkat Kehadiran** Attendance Rate Percentage
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	9	9	100%
Budi Prijono*	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	9	9	100%
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100%
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100%
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	9	9	100%

*efektif sejak 11 Agustus 2022 | effective since August 11, 2022

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2022, tanggal dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

In 2022, the dates and Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

No.	**Tanggal** Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda
1	25 Januari 2022 January 25, 2022	*Kick Off Meeting Assesment* Penerapan GCG PT ASABRI (Persero) Tahun 2021 Kick Off Meeting for the Assessment of GCG Implementation at PT ASABRI (Persero) for the Year 2021
2	27 Januari 2022 January 27, 2022	RUPS pengesahan RKAP Tahun 2022 Annual General Meeting (RUPS) for the Approval of the 2022 RKAP
3	9 Maret 2022 March 9, 2022	*Exit Meeting Self Assessment* GCG PT ASABRI (Persero) Tahun 2021 Exit Meeting for Self-Assessment of GCG Implementation at PT ASABRI (Persero) for the Year 2021
4	21 Maret 2022 March 21, 2022	Presentasi RSM kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait hasil audit Laporan Keuangan Presentation by RSM to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the audit results of the Financial Statements
5	20 April 2022 April 20, 2022	Permohonan Persetujuan SOP Program TJSL Request for Approval of the Standard Operating Procedures (SOP) for the TJSL Program
6	20 Mei 2022 May 20, 2022	Pembahasan inisiasi penurunan rasio klaim terkait pengelolaan program THT, JKK dan Jkm, Progres Digitalisasi Layanan (Otentikasi Digital), Program Manfaat Tambahan bagi Peserta Discussion on the initiative to reduce claim ratios related to the management of the THT, JKK, and JKM programs, Progress in Digital Service (Digital Authentication), and Additional Benefits Program for Participants
7	27 Juni 2022 June 27, 2022	RUPS tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun buku 2021 dan Laporan Pelaksanaan TJSL Tahun buku 2021 PT ASABRI (Persero) RUPS for the Approval of the Annual Report for the 2021 fiscal year and the Implementation Report of the TJSL for the 2021 fiscal year at PT ASABRI (Persero)
8	14 Juli 2022 July 14, 2022	Pembahasan Manfaat Tambahan bagi Peserta Discussion on Additional Benefits for Participants
9	8 Agustus 2022 August 8, 2022	*Kick Off Meeting* Pemeriksaan Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 Kick Off Meeting for the Examination of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the Year 2022
10	9 Agustus 2022 August 9, 2022	Usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 Proposal for the Revision of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2022
11	16 September 2022 September 16, 2022	Pembahasan Investasi Investment Discussion
12	30 September 2022 September 30, 2022	Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan RSM Meeting of the Board of Directors, Board of Commissioners, and RSM

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
13	25 Oktober 2022 October 25, 2022	Pembahasan pembaruan usulan revisi RKAP tahun 2022 Discussion on the update of the proposed revision of the RKAP for the year 2022
14	6 Desember 2022 December 6, 2022	Radirkom pembahasan terkait penjeleasan RKAP tahun 2023 dan Evaluasi RJPP Radirkom Meeting to discuss explanations on the RKAP for the year 2023 and Evaluation of the RJPP
15	27 Desember 2022 December 27, 2022	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan RSM pembahasan General Audit tahun 2022 Meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and RSM to discuss the General Audit for the year 2022

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali pertemuan atau rapat gabungan dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Directors in Joint Meetings

Throughout the year 2022, the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) held a total of 15 (fifteen) joint meetings with the attendance level of each member as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Periode 1 Januari 2022 - 11 Agustus 2022
Period: January 1, 2022, to August 11, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Rate Percentage
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	10	10	100%
Ida Bagus Purwalaksana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	10	10	100%
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	10	100%
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	10	10	100%

Periode 11 Agustus 2022 - 31 Desember 2022
Period: August 11, 2022, to December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Rate Percentage
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100%
Budi Prijono*	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	5	5	100%
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	5	5	100%

*efektif sejak 11 Agustus 2022 | effective since August 11, 2022

Direksi / Board of Directors

Periode 1 Januari 2021 - 25 Januari 2022
Period: January 1, 2021 to January 25, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Rate Percentage
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	1	1	100%
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	1	1	100%
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	1	1	100%
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	1	1	100%

Periode 25 Januari 2022 - 31 Desember 2022
Period: January 25, 2022, to December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency	Persentase Tingkat Kehadiran Attendance Rate Percentage
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	14	14	100%
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	14	14	100%
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	14	14	100%
Khaidir Abdurrahman*	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	14	14	100%

* efektif sejak 25 Januari 2022 | effective since January 25, 2022

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Gabungan antara lain:

1. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat meningkatkan upaya tindaklanjut terhadap strategi restrukturisasi aset-aset non produktif;
2. Dewan Komisaris meminta agar Direksi dapat terus mengupayakan strategi pemulihan keuangan perusahaan yang belum tercapai sesuai dengan yang selama ini direncanakan khususnya yang dapat memberikan kontribusi arus kas;
3. Dewan Komisaris mengarahkan agar Direksi dapat terus mengoptimalkan transformasi perusahaan menuju digitalisasi pada pelayanan sebagai salah satu Langkah dalam inovasi pelayanan;
4. Dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi pemanfaatan ASABRI Link, ASABRI Mobile dan STAR hendaknya dapat dievaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal;

Recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors and its staff during the Joint Meeting include:

1. The Board of Commissioners suggests that the Board of Directors enhance their efforts in following up on the restructuring of non-performing assets.
2. The Board of Commissioners requests that the Board of Directors continue their efforts to achieve the financial recovery of the company as planned, especially those initiatives contributing to cash flow.
3. The Board of Commissioners directs the Board of Directors to continue optimizing the company's digital transformation in its services as a step towards service innovation.
4. In implementing the digital transformation through ASABRI Link, ASABRI Mobile, and STAR, the Board of Commissioners recommends evaluating these efforts to improve service quality.

5. Direksi hendaknya dapat melakukan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merujuk pada kebutuhan rencana strategi Perusahaan.

Seluruh arahan yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi dan jajaran di bawahnya telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:
1. Direksi beserta jajarannya melakukan beberapa program guna meningkatkan penggunaan Aplikasi ASABRI Mobile, meningkatkan titik layanan ASABRI Link, serta meningkatkan kualitas *Call Center;*
2. Sepanjang tahun 2022, Direksi dengan dukungan Dewan Komisaris terus melakukan upaya dalam mewujudkan strategi perbaikan keuangan. Hasilnya telah diperoleh persetujuan penyesuaian tingkat bunga aktuaria khusus. Penerimaan UPSL juga terus dilakukan pembahasan intens dengan Kementerian Keuangan. Di samping itu, *progress Asset recovery* terus berjalan seiring dengan telah terbitnya putusan atas proses pengadilan;
3. Direksi telah melakukan perubahan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis perusahaan, serta memberikan kesempatan jenjang karir yang lebih baik.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun, dengan mengacu pada KPI secara garis besar dengan memberikan kontribusi dan dukungan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi PT ASABRI (Persero) dalam program kerja di tahun berjalan dan tetap berpegang pada nilai-nilai Perseroan, serta melakukan *monitoring* untuk tercipta dan perkembangannya di PT ASABRI (Persero) dengan terlebih dahulu:

1. Dewan Komisaris wajib mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) kepada RUPS untuk ditetapkan.
2. Indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham/Menteri.

Nasihat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi di antaranya melalui korespondensi, di mana sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan rekomendasi di antaranya:
1. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2022 dan RKAP Tahun 2023;

5. The Board of Directors is encouraged to focus on developing human resources (HR) aligned with the company's strategic plans.

All the guidance provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors and its staff has been followed up, with the following details:
1. The Board of Directors, along with its staff, implemented several programs to increase the use of ASABRI Mobile, improve ASABRI Link service points, and enhance Call Center quality.
2. Throughout 2022, the Board of Directors, with the support of the Board of Commissioners, made continuous efforts to achieve financial improvement strategies. Approvals were obtained for the adjustment of actuarial interest rates. Discussions on UPSL income continued with the Ministry of Finance, and progress was made in asset recovery following court rulings.

3. The Board of Directors restructured the organizational structure to align with business process needs and provide better career advancement opportunities.

Board of Commissioners' Performance Evaluation

The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted annually, with a broad focus on Key Performance Indicators (KPIs) that contribute to and support the implementation of PT ASABRI (Persero)'s Vision and Mission in the current year's work programs while adhering to the company's values. This includes monitoring to ensure the company's development and progress at PT ASABRI (Persero). The process involves the following steps:
1. The Board of Commissioners is required to propose Key Performance Indicators (KPIs) to the General Meeting of Shareholders for approval.
2. The KPIs serve as metrics for assessing the successful execution of the supervisory and advisory responsibilities of the Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations and/or the company's articles of association.
3. The Board of Commissioners is obligated to provide quarterly reports on the progress of KPI achievement to Shareholders/the Minister.

Advice and Recommendations from the Board of Commissioners:

The Board of Commissioners fulfills its supervisory and advisory functions through correspondence. In 2021, the Board of Commissioners provided advice and recommendations on various matters, including:

1. The Board of Commissioners' feedback on the RKAP for 2022 and 2023;

2. Tanggapan terhadap Laporan Manajemen Triwulan I hingga Triwulan III Tahun 2022;
3. Laporan pengawasan atas pengelolaan investasi perusahaan secara bulanan kepada Pemegang Saham;
4. Rekomendasi atas usulan keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 (*Audited*);
5. Rekomendasi atas Permohonan Perubahan Anggaran Dasar;
6. Penyampaian Usulan *Nominated Talent* dan Evaluasi Direksi;
7. Persetujuan atas Permohonan KPI Individual Direksi tahun 2022;
8. Tanggapan atas Penyampaian *Investment Universe* PT ASABRI (Persero);
9. Tanggapan terhadap Permasalahan Kepatuhan atas Transaksi Sewa Menyewa Gedung PT ASABRI (Persero) di Jalan Pintu Air Jakarta Pusat;
10. Persetujuan atas Permohonan SOP Program TJSL.
11. Persetujuan penghapusbukuan Aktiva Tetap Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2022;
12. Persetujuan penghapusbukuan Aktiva Tetap Kantor Cabang PT ASABRI (Persero);
13. Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Piagam Audit Internal Satuan Audit Internal (SAI) PT ASABRI (Persero)
14. Evaluasi atas pelaksanaan audit PT ASABRI (Persero) Tahun Buku 2021 serta Usulan Penerapan Kantor Akuntan Publik untuk jasa audit laporan keuangan PT ASABRI (Persero) tahun buku 2022.

Sasaran Kerja

Sasaran kerja Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sasaran Peseroaan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dan dalam rangka memenuhi harapan dan target Pemegang Saham. Sasaran Kerja Dewan Komisaris tahun 2022 yang telah dicapai dengan baik antara lain:

1. Meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya Perusahaan;
2. Meningkatnya kualitas hasil analisis dan kajian Dewan Komisaris terhadap realisasi pencapaian kinerja perusahaan tahun buku 2021 dan RKAP tahun 2022 sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham;
3. Melaksanakan pengembangan perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada peserta yang mengedepankan inovasi secara digital;
4. Terwujudnya perbaikan tata Kelola perusahaan yang baik;
5. Mendorong Direksi dalam mewujudkan strategi perbaikan kinerja perusahaan yang telah dicanangkan oleh Direksi;
6. Meningkatknya citra perusahaan di mata para *stakeholders*, dengan mewujudkan perbaikan kinerja perusahaan dan perbaikan pelayanan kepada para peserta;

2. Feedback on Management Reports for Quarters I to III of 2022;
3. Monthly oversight reports on investment management;
4. Recommendations for resolutions in the Annual General Meeting for the Audited Annual Report of 2022;
5. Recommendations for changes to the Articles of Association;
6. Submission of Nominated Talent and Director evaluations;
7. Approval of KPIs for individual Directors in 2022;
8. Feedback on the Investment Universe of PT ASABRI (Persero);
9. Feedback on Compliance Issues related to Lease Transactions for PT ASABRI (Persero) office buildings in Central Jakarta;
10. Approval of the SOP Program TJSL;
11. Approval for the disposal of Fixed Assets for PT ASABRI (Persero) Head Office in 2022;
12. Approval for the disposal of Fixed Assets for PT ASABRI (Persero) Branch Offices;
13. Feedback on the Internal Audit Charter Adjustment Proposal;
14. Evaluation of the 2021 audit of PT ASABRI (Persero) and the proposal for the appointment of an external audit firm for the financial statements of PT ASABRI (Persero) for the 2022 fiscal year.

Work Targets

The work targets of the Board of Commissioners are integrated into the overall objectives of the company, aiming to optimize the functions and responsibilities of the Board of Commissioners and meet the expectations and targets of the shareholders. Some of the successfully achieved work targets for the Board of Commissioners in 2022 include:

1. Increased effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function over company operations;
2. Improved quality of the Board of Commissioners' analyses and assessments of the company's performance in the 2021 fiscal year and the 2022 RKAP, leading to recommendations to the shareholders;
3. Implementation of company development initiatives to enhance the quality of services to participants, emphasizing digital innovation;
4. Achieving good corporate governance practices;
5. Encouraging the Board of Directors to realize their performance improvement strategies as planned;
6. Enhancing the company's image in the eyes of stakeholders by improving its performance and service to participants;

7. Mengoptimalkan peran perangkat Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
8. Perusahaan memiliki *nominated talent* dengan kualitas baik sehingga dapat ikut meningkatkan nama baik perusahaan.

Dalam rangka mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan

1. Program Kerja Bidang Tugas Rutin dan *Monitoring*
   a. Melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
   b. Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
   c. Melakukan kunjungan kerja ke kantor cabang dalam rangka melihat langsung kondisi layanan serta dalam rangka penilaian atas kinerja Kantor Cabang dan melihat pelaksaan proses sosialisasi pelayanan berbasis digitalisasi kepada peserta baik yang ada di mitra bayar ataupun di kantor cabang.

2. Program Kerja Bidang Administrasi, Pelaporan dan Rekomendasi kepada Pemegang Saham
   a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi laporan manajemen berkala atas pelaksanaan RKAP tahun 2022 yang meliputi tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2022;
   b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pencapaian KPI Dewan Komisaris tahun 2022 secara triwulan;
   c. Mengkaji dan membuat usulan remunerasi Direksi tahun 2022 dan melakukan evaluasi atas penilaian kinerja Direksi Tahun 2022 serta melakukan seleksi calon talenta BOD-1 untuk selanjutnya disampaikan kepada *Cluster Talent Committee* Kementerian BUMN ;
   d. Melaksanakan penyusunan RKA Dewan Komisaris tahun 2022;
   e. Memberikan pendapat dan tanggapan kepada RUPS mengenai rancangan RKAP tahun buku 2023 sebagai rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham untuk pengesahan RKAP tahun 2023;
   f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan investasi Perusahaan setiap bulan kepada Pemegang Saham.

3. Program Kerja Bidang Pengawasan dan Pemberian Nasihat
   a. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya;
   b. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya;

7. Optimizing the role of the Board of Commissioners' staff in supporting the Board of Commissioners' duties;
8. Ensuring the company has nominated talents of high quality to enhance the company's reputation.

To achieve these set targets, the Board of Commissioners has outlined programs in various areas of responsibility:

1. Routine Tasks and Monitoring Program:
   a. Conducting internal Board of Commissioners meetings at least once a month;
   b. Holding joint Board of Commissioners meetings at least once a month;
   c. Conducting field visits to branch offices to assess service conditions, evaluate branch office performance, and observe the implementation of digital-based service processes for participants, both at payment partners and branch offices.

2. Administration, Reporting, and Recommendations to Shareholders Program
   a. Monitoring and evaluating periodic management reports on the implementation of the 2022 RKAP, including the Board of Commissioners' feedback on Management Reports for Quarters I to III of 2022;
   b. Providing quarterly reports on the execution of supervisory tasks and the achievement of Board of Commissioners' KPIs for 2022;
   c. Assessing and proposing the remuneration of the Board of Directors in 2022, evaluating the performance of the Directors in 2022, and selecting BOD-1 talent candidates for submission to the Ministry of SOEs' Cluster Talent Committee;
   d. Preparing the Board of Commissioners' budget plan for 2022;
   e. Providing opinions and feedback to the Annual General Meeting regarding the draft RKAP for the 2023 fiscal year as recommendations to shareholders for approval;
   f. Monitoring and evaluating the company's investment activities on a monthly basis.

3. Supervision and Advisory Work Program
   a. Implementing supervision and advisory roles in the design and execution of internal control systems;
   b. Implementing supervision and advisory roles regarding the company's risk management policies and the execution;

c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan Sistem Informasi Perseroan dan pelaksanaannya;
d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan SDM dan manajemen karir;
e. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas pengadaan barang dan jasa;
g. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas peningkatan mutu dan layanan;
h. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan Direksi terhadap RKAP/RJPP;
i. Melaksanakan pemilihan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan menyampaikan usulan calon auditor eksternal kepada RUPS;
j. Melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan audit eksternal dan audit internal;
k. Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip GCG;
l. Menindaklajuti pengaduan masyarakat/parat *stakeholder* yang berkaitan dengan PT ASABRI (Persero) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;

4. Memberkan pendapat tertulis terhadap permohonan Direksi yang terkait dengan berbagai kegiatan Perseroan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero).

c. Implementing supervision and advisory roles regarding the company's Information System policies and the execution;
d. Implementing supervision and advisory roles regarding HR management and career development;
e. Implementing supervision and advisory roles regarding accounting policies and financial statement preparation;
f. Implementing supervision and advisory roles regarding procurement of goods and services;
g. Implementing supervision and advisory roles regarding quality improvement and services;
h. Implementing supervision and advisory roles regarding the Directors' compliance with the RKAP/RJPP;
i. Conducting the selection of external auditor candidates or reappointing external auditors and submitting proposals for external auditor candidates to the GMS;
j. Overseeing and executing external and internal audits;
k. Monitoring the implementation of GCG principles;
l. Following up on complaints from the public/stakeholders related to PT ASABRI (Persero) which were submitted to the Board of Commissioners;

4. Providing written opinions on requests from the Board of Directors related to various company activities within the scope of authority defined in PT ASABRI (Persero)'s Articles of Association.

Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Ownership of Shares by the Board of Commissioners

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham di PT ASABRI (Persero)** Share Ownership in PT ASABRI (Persero)	**Kepemilikan Saham di Peusahaan Lain** Share Ownership in Other Companies
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada None	PT Multi Dirgantara Hutama
Budi Prijono	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Tidak Ada None	Tidak Ada None
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	PT Multi Kreasi Investasma PT Armika Karya Teknik
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada None	PT Nuraga Mulia Sejahtera PT Sehaja Gasindo
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Tidak Ada None	PT Telkom Indonesia Tbk

Independensi Dewan Komisaris

Pada dasarnya semua Komisaris PT ASABRI (Persero) bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perseroan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Komisaris.

Pernyataan independensi yang dibuktikan dengan komitmen dan surat pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali pada setiap awal tahun dan telah ditandatangani oleh 1 (satu) orang Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Penentuan Komisaris Independen berasal dari luar Perusahaan dengan memperhatikan kriteria independensi, integritas, dan kompetensi yang dibutuhkan, bebas dari benturan kepentingan, serta mampu bertindak secara objektif dan independen. Keberadaan Komisaris Independen semata-mata ditujukan untuk menjamin mekanisme pengawasan yang efektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria penentuan Komisaris Independen mengacu pada kriteria Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kriteria yang dimaksud meliputi hal- hal sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya.
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara independen di lingkup BUMN.

Independence of the Board of Commissioners

Basically, all Commissioners of PT ASABRI (Persero) are considered independent, meaning they are expected to carry out their duties independently, solely in the interest of the company, and free from the influence of various parties with interests that may conflict with the interests of the Commissioners.

The declaration of independence is demonstrated by a commitment and a statement of no conflicts of interest made annually at the beginning of each year. This statement is signed by 1 (one) Commissioner who also serves as an Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 1 (one) Commissioner.

Criteria for Determining Independent Commissioners

The selection of Independent Commissioners is made from external candidates, considering criteria such as independence, integrity, and the required competence. They must be free from conflicts of interest and capable of acting objectively and independently. The presence of Independent Commissioners is solely intended to ensure an effective and objective supervision mechanism in accordance with applicable laws and regulations.

The criteria for selecting Independent Commissioners refer to the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number KEP-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002, regarding the Implementation of Good Corporate Governance Practices at State-Owned Enterprises (SOEs). The criteria include the following:

1. Not holding a position as a Director in affiliated companies.
2. Not working in the Government, including departments, institutions, and the military, in the last three years.
3. Not working in the relevant SOE or its affiliates in the last three years.
4. Having no financial connections, either directly or indirectly, with the relevant SOE or companies providing services and products to the relevant SOE and its affiliates.
5. Free from interests, activities, or other relationships that may hinder or interfere with the ability of an Independent Commissioner from outside the relevant SOE to act or think independently within the scope of the SOE.

Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris
Organs and Committees under the Board of Commissioners

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

In carrying out supervision over the Company, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners. The committees under the Board of Commissioners consist of the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, the Risk Monitoring Committee, and other committees deemed necessary, considering the company's capabilities.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris guna menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memenuhi kepatuhan dalam peraturan dan perundang-undangan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Komisaris Utama Nomor KEP/008/KOM/AS/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komirasi Berdasarkan ketetapan tersebut, Dewan Komisaris menunjuk Sdr. Togap Freddy Gultom sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

Secretary of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners appoints a Secretary of the Board of Commissioners to support the supervisory duties of the Board of Commissioners and to ensure compliance with regulations and the implementation of good corporate governance. The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners is based on the decision of the Chairman of the Board of Commissioners Number KEP/008/KOM/AS/VIII/2022 dated August 2, 2022, regarding the Dismissal of Nomination and Remuneration Committee Members and the Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners. Following this decision, the Board of Commissioners appointed Mr. Togap Freddy Gultom as the Secretary of the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Secretary of the Board of Commissioners
TOGAP FREDDY GULTOM

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
61 Tahun
61 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
2 Agustus 2022 – sekarang
August 2, 2022 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
Sarjana Ilmu Pemerintahan (2013)
Bachelor of Political Science (2013)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT ASABRI (Persero) (2020-2022)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT ASABRI (Persero) (2019-2020)
- Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (2015)
- Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT ASABRI (Persero) (2020-2022)
- Member of the Risk Monitoring Committee of PT ASABRI (Persero) (2019-2020)
- Senior Auditor at the Inspectorate General of the Ministry of Defense (2015)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Secara umum, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mengoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, baik terkait dengan Komite maupun Direksi dan Manajemen di bawah Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, menyiapkan materi rapat, serta menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.

Secara khusus, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sekretaris Dewan Komisaris turut menghadiri rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, kecuali rapat khusus yang hanya boleh dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap penyampaian informasi yang berkaitan dengan agenda yang akan dibahas dan bertanggung jawab dalam pembuatan, pengadministrasian, dan penyampaian risalah rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki kegiatan antara lain adalah mempersiapkan dan menghadiri RUPS ASABRI, rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi, rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan dokumentasi risalah rapat Dewan Komisaris.

Komite Audit

Komite Audit berfungsi sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas *monitoring*, evaluasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan.

Susunan Komite Audit

Anggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/12/KOM/AS/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Komposisi Komite Audit mengalami perubahan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/016/KOM/AS/VIII/2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai anggota komite, dan 2 (dua) orang anggota komite audit yang

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

In general, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for organizing administrative activities and coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners, both related to committees and the Board of Directors and Management under the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for organizing Board of Commissioners meetings, preparing meeting materials, and drafting minutes of meeting.

Specifically, the Secretary of the Board of Commissioners carries out administrative and secretarial tasks related to all activities of the Board of Commissioners in performing its supervisory functions. The Secretary of the Board of Commissioners attends Board of Commissioners meetings, both internal and joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, except for special meetings that may only be attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for conveying information related to the agenda to be discussed and for the preparation, administration, and distribution of minutes of meetings of the Board of Commissioners.

Activities of the Secretary of the Board of Commissioners

Throughout 2022, the Secretary of the Board of Commissioners had activities including preparing for and attending ASABRI General Meetings of Shareholders, internal meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee, meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and documentation of minutes of meetings of the Board of Commissioners.

Audit Committee

The Audit Committee functions as a supporting body that assists the Board of Commissioners. It is formed by and reports to the Board of Commissioners with the aim of aiding the Board of Commissioners in performing monitoring, evaluation, supervision, and oversight duties over the management of the Company.

Composition of the Audit Committee

The members of the Audit Committee were appointed based on the decision of the Board of Commissioners Number Kep/12/KOM/AS/XI/2020 dated November 2, 2020. The composition of the Audit Committee changed on August 30, 2022, with Decree of the Board of Commissioners Number Kep/016/KOM/AS/VIII/2022. The committee consists of 1 (one) member of the Board of Commissioners as the Chairperson, 1 (one) member of the Board of Commissioners as a committee member,

berasal dari luar ASABRI (pihak independen) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang audit, akuntansi, dan keuangan.

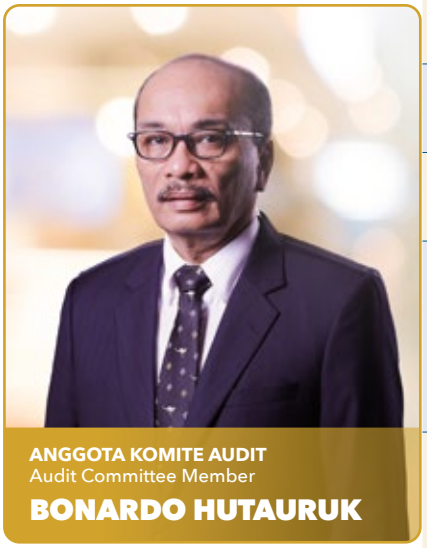
and 2 (two) committee members from outside ASABRI (independent parties) with knowledge and experience in the fields of audit, accounting, and finance.

Tabel Susunan Komite Audit
Table of Audit Committee Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Background** Background
I Nengah Putra Winata	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
Rofyanto Kurniawan	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Bambang Utoyo, CACP	Anggota Member	Mantan Kepala Perwakilan BPKP DKI Former Head of the BPKP DKI Representation Office
Bonardo Hutauruk, CACP	Anggota Member	Mantan Kepala Puslitbangwas BPKP Former Head of the Research and Development Center of BPKP

Profil Komite Audit

Audit Committee Profiles



ANGGOTA KOMITE AUDIT
Audit Committee Member
BONARDO HUTAURUK

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
62 Tahun
62 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
20 November 2020 - sekarang
November 20, 2020 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- Doktor (S3) Manajemen Pendidikan (2005)
- Magister (S2) Manajemen (1994
- Sarjana (S1) Akuntansi (1980)
- Doctorate (Ph.D.) in Educational Management (2005)
- Master's (M.Sc.) in Management (1994)
- Bachelor's (B.Sc.) in Accounting (1980)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, BPKP (2018-2020)
- Kepala Perwakilan BPKP, Provinsi Banten (2017-2018)
- Head of Research and Development Center for Supervision, BPKP (2018-2020)
- Head of the BPKP Representative Office, Banten Province (2017-2018)



ANGGOTA KOMITE AUDIT
Audit Committee Member
BAMBANG UTOYO

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesia Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
63 Tahun
63 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
25 Agustus 2020 - sekarang
August 25, 2020 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- Doktor (S3) Manajemen Strategi (2019)
- Magister (S2) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (2010)
- Sarjana (S1) Akuntansi (1987)
- Doctorate (Ph.D.) in Strategic Management (2019)
- Master's (M.Sc.) in Economics and Development Studies (2010)
- Bachelor's (B.Sc.) in Accounting (1987)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Direktur Pengawasan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Reformasi Birokrasi, Deputi Polhukam PMK, BPKP (2019-2020
- Kepala Perwakilan BPKP, Provinsi DKI Jakarta (2017-2019)
- Director of Supervision in the Field of Science and Technology, and Bureaucratic Reform, Deputy for Polhukam PMK, BPKP (2019-2020)
- Head of the BPKP Representative Office, DKI Jakarta Province (2017-2019)

Independensi Komite Audit

seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence of the Audit Committee

All members of the Audit Committee who come from independent parties do not have any financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

Aspek Indenpendensi Independence Aspect	Bambang Utoyo, CACP	Bonardo Hutauruk, CACP
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan dewan komisaris dan direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan No ownership of shares in the company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi, dan/atau sesama anggota komite audit No familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not holding positions in political parties or government offices	√	√

Pedoman Kerja Komite Audit

Guna menunjang pelaksanaan fungsi dan perannya dalam mendukung tugas Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki Pedoman Kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan. Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris memastikan efektivitas sistem pengendalian internal ASABRI, dan efektivitas pelaksanaan tugas Divisi SAI dan auditor eksternal/ KAP.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi SAI maupun auditor eksternal/KAP.
3. Memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan dan penyempurnaan sistem pengendalian Manajemen.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit, serupa namun tidak terbatas pada:

Audit Committee's Work Guidelines

To support the implementation of its functions and roles in assisting the Board of Commissioners, the Audit Committee has work guidelines established in the Audit Committee Charter. These guidelines are prepared based on applicable laws and regulations and are periodically reviewed.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee is independent both in the execution of its tasks and in reporting. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners. The tasks of the Audit Committee include:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of ASABRI internal control system and the effectiveness of the tasks performed by the Internal Audit Unit (SAI) and external auditors/ Public Accountant Firm (KAP).
2. Evaluating the implementation of activities and the results of audits conducted by the SAI and external auditors/KAP.
3. Providing recommendations regarding the implementation and improvement of the Management Control System.
4. Ensuring that there are satisfactory procedures for evaluating all information issued by the Company.
5. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.
6. The Board of Commissioners may assign other tasks to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter, similar but not limited to:

a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta RJPP, RKAP, Laporan Manajemen dan informasi lainnya.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
c. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
d. Mengkaji kecukupan fungsi Divisi SAI, termasuk jumlah auditor dan kompetensi yang dibutuhkan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan penugasan yang telah dilaksanakan.
e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit yang akan dilakukan oleh auditor eksternal/KAP termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor.

7. Melakukan dan mereviu proses seleksi dan penilaian atas kinerja auditor eksternal/KAP sebagaimana tertuang dalam *Board Manual.*
8. Melakukan *self assesssment* terhadap kinerja Komite Audit.

Dalam menjalankan tugas, Komite Audit harus memanfaatkan dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Direksi dan Divisi SAI serta auditor eksternal/KAP.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala oleh Komite Audit dengan mengacu pada Piagam Komite Audit. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali . Keputusan yang dihasilkan dari rapat Komite Audit dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai dengan alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Berikut frekuensi dan tingkat rapat anggota Komite Audit:

a. Reviewing information about the Company, as well as the RJPP, RKAP, Management Reports, and other information.
b. Reviewing the Company's compliance with laws and regulations related to its activities.
c. Reviewing complaints related to the Company.
d. Evaluating the adequacy of the SAI function, including the number of auditors and required competencies, the Annual Supervisory Work Plan (PKPT), and tasks that have been carried out.
e. Assessing the adequacy of the external auditor/ KAP audit, including audit planning and the number of auditors.

7. Conducting and reviewing the selection process and performance evaluation of the external auditor/KAP as outlined in the Board Manual.
8. Performing a self-assessment of the Audit Committee's performance.

In carrying out its tasks, the Audit Committee must utilize and maintain effective working relationships with the Board of Directors and the SAI, as well as external auditors/KAP.

Audit Committee Meetings

Audit Committee meetings are held periodically by the Audit Committee in accordance with the Audit Committee Charter. Throughout 2022, the Audit Committee conducted a total of 13 meetings. Decisions resulting from the Audit Committee meetings are recorded and well-documented in minutes of meeting signed by all attending members. Any dissenting opinions that arise during meetings will be clearly stated in the minutes of meeting, along with the reasons for such dissenting opinions.

Frequency and Attendance Rate of Audit Committee Meetings

The following is the frequency and attendance rate of Audit Committee members:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**%**
I Nengah Putra Winata	Ketua Chairman	13	13	100%
Rofyanto Kurniawan	Anggota Member	13	13	100%
Bambang Utoyo, CACP	Anggota Member	13	13	100%
Bonardo Hutauruk, CACP	Anggota Member	13	13	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2022

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero). Adapun kegiatan Komite Audit selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Diskusi Internal, Diskusi dengan unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite lainnya.
2. Menelaah laporan dan informasi keuangan baik *unaudited* maupun *audited* yang akan dipublikasikan.
3. Menelaah laporan/proposal/usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Laporan Manajemen, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM).

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan penyelenggaraannya bersamaan dengan pelaksanaan *assessment* GCG, khususnya bagian Komite Audit. Hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk membuat keputusan mengenai pengangkatan kembali dan/atau pemberhentian jabatan anggota Komite Audit untuk periode selanjutnya.

Remunerasi Komite Audit

Besaran remunerasi Komite Audit ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Implementation of Audit Committee Activities in 2022

The Audit Committee has carried out its duties and functions as stipulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, concerning the Board Manual of PT ASABRI (Persero). The activities of the Audit Committee during the year 2022 are as follows:

1. Conducting Internal Discussions, Discussions with related work units, and Joint Discussions with other Committees.
2. Reviewing unaudited and audited financial reports that will be published.
3. Reviewing reports/proposals/requests from the Board of Directors that require written approval from the Board of Commissioners and preparing recommendations, including Management Reports, Work Plans, and the Company Budget (RKAP).
4. Compiling 4 (four) quarterly reports on the Committee's activities and submmited them to the Board of Commissioners.
5. Evaluating the implementation of audit services for the 2021 Financial Statements by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM).

Performance Evaluation of the Audit Committee

The performance of the Audit Committee is assessed by the Board of Commissioners and is conducted concurrently with the GCG assessment, particularly the Audit Committee section. The results obtained from this evaluation serve as a consideration for the Board of Commissioners in making decisions regarding the reappointment and/or termination of Audit Committee members for the subsequent period.

Remuneration for the Audit Committee

The amount of remuneration for the Audit Committee is determined in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is established by and reports to the Board of Commissioners in assisting with the functions and duties of the Board of Commissioners related to the nomination and remuneration of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Kualifikasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:
1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama, atau perusahaan publik tersebut.
2. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi.
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki ASABRI.

Qualifications of Nomination and Remuneration Committee Members

Members of the Nomination and Remuneration Committee must meet certain qualifications, which include:
1. Not having an affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Major Shareholders, or the public company itself.
2. Having experience related to nominations and/or remuneration.
3. Not holding positions as members of other committees owned by ASABRI.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan apabila masa jabatan penggunaan yang bersangkutan telah berakhir serta berdasarkan keputusan dari Dewan Komisaris. Pemberhentian dapat dilakukan juga jika yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Termination of the Nomination and Remuneration Committee

The process of appointing and terminating members of the Nomination and Remuneration Committee is carried out by the Board of Commissioners. Termination of members of the Nomination and Remuneration Committee can be done when their term of office has ended and based on a decision by the Board of Commissioners. Termination can also occur if the individual fails to meet the established performance criteria and/or is incompetent in carrying out their duties.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/12/KOM/AS/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami perubahan komposisi pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/016/KOM/AS/VIII/2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Anggota 1 (satu) orang sekretaris Dewan Komisaris sebagai anggota, dan 2 (dua) orang anggota Komite yang berasal dari luar ASABRI (pihak independen).

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

The members of the Nomination and Remuneration Committee are determined based on the Decision of the Board of Commissioners Number Kep/12/KOM/AS/XI/2020 dated November 2, 2020. The composition of the Nomination and Remuneration Committee underwent changes on August 30, 2022, with Decree of the Board of Commissioners Number: KEP/016/KOM/AS/VIII/2022, consisting of 1 (one) member of the Board of Commissioners as Chairman, 1 (one) member of the Board of Commissioners as Member, 1 (one) secretary of the Board of Commissioners as a member, and 2 (two) members of the Committee from outside ASABRI (independent parties).

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 1 Januari – 30 Agustus 2022

Composition of the Nomination and Remuneration Committee for the Period January 1 - August 30, 2022

Nama Name	**Jabatan** Position	**Background** Background
Fary Djemy Francis	Ketua | Chairman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Rofyanto Kurniawan	Sekretaris | Secretary	Komisaris Commissioner
Budi Prijono	Anggota | Member	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Sri Juni Kuntari	Anggota | Member	*Human Capital Expert*
Togap F Gultom	Anggota | Member	Eks Auditor Kementerian Pertahanan Former Ministry Auditor

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 1 Agustus – 31 Desember 2022

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Nama Name	Jabatan Position	Background Background
Fary Djemy Francis	Ketua | Chairman	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Rofyanto Kurniawan	Sekretaris | Secretary	Komisaris | Commissioner
Budi Prijono	Anggota | Member	Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
Sri Juni Kuntari	Anggota | Member	*Human Capital Expert*
Nikson Silalahi	Anggota | Member	Direksi Perusahaan swasta Director of Private Companies

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members



NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
SRI JUNI KUNTARI

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
65 Tahun
65 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
23 April 2020 - sekarang
April 23, 2020 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- Magister (S2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (2006)
- Sarjana (S1) Psikologi Perkembangan (1981)
- Master's Degree (S2) in Human Resource Development (2006)
- Bachelor's Degree (S1) in Developmental Psychology (1981)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
Konsultan Proyek sebagai *Project Director Competency Model and Assessment for Job-People Mapping* (2014)
Project Director for Competency Model and Assessment For Job-People Mapping (2014)



NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEMBER
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
NIKSON SILALAHI

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
47 Tahun
47 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
2 Agustus 2022 - sekarang
August 2, 2022 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- Magister (S2) Ilmu Komunikasi (2014)
- Sarjana (S1) Teknik Sipil (2001)
- Master's Degree (S2) in Communication Science (2014)
- Bachelor's Degree (S1) in Civil Engineering (2001)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
Komisaris PT Hiztek (2010)
Commissioner at PT Hiztek (2010)

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee who originate from independent parties do not have any financial, managerial, share ownership, and/

dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

Aspek Indenpendensi Independence Criteria	**Sri Juni Kuntari**	**Nikson Silalahi**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan No ownership of shares in the company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit No familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not holding positions in political parties or government offices	√	√

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Guna menunjang pelaksanaan fungsi dan perannya dalam mendukung tugas Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman Kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Nomination and Remuneration Committee Working Guidelines

To support the implementation of its functions and roles in supporting the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee has established Working Guidelines as outlined in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee. These guidelines are formulated based on applicable laws and regulations and are periodically reviewed.

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee and Remuneration

The Nomination and Remuneration Committee is tasked with assisting the implementation of the Board of Commissioners' duties as follows:

1. Related to the Nomination function:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - Position composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
      - Policies and criteria required in the nomination process.
      - Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   b. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material.
   c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
   d. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

e. Membantu Dewan Komisaris sebagai *Talent Committee* untuk Eksekutif BUMN (Direksi dan Pejabat Satu Tingkat di bawah Direksi).

2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Struktur remunerasi.
      - Kebijakan atas remunerasi.
      - Besaran atas remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Penilaian kinerja termasuk tidak terbatas pada KPI Direksi dan Dewan Komisaris;
   c. Memberikan rekomendasi terkait remunerasi/penghasilan bagi Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris serta anggota Komite Dewan Komisaris; dan
   d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

e. Assist the Board of Commissioners as a Talent Committee for SOE's Executives (Directors and Officials One Level below the Directors).

2. Related to the Remuneration Function:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - Remuneration structure.
      - Policy on remuneration.
      - Amount of remuneration.
   b. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. Performance assessment including without limitation the KPI of the Board of Directors and Board of Commissioners;
   c. Provide recommendations regarding remuneration/income for the Secretary of the Board of Commissioners and staff of the Secretary of the Board of Commissioners as well as members of the Board of Commissioners Committees; and
   d. Carry out tasks assigned by the Board of Commissioners.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu pada Piagam Komite Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Keputusan yang dihasilkan dari rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai dengan alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee meetings are held periodically by the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the Charter of the Nomination and Remuneration Committee. Throughout the year 2022, the Nomination and Remuneration Committee conducted a total of 13 (thirteen) meetings. Decisions arising from the Nomination and Remuneration Committee meetings are properly recorded and documented in meeting minutes signed by all attending members. Any differences of opinion (dissenting opinions) occurring during the meetings will be clearly stated in the minutes of meeting, along with the reasons for the dissenting opinions.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut frekuensi dan tingkat rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

The following is the frequency and attendance level of meetings for the members of the Nomination and Remuneration Committee:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**%**
Fary Djemy Francis	Ketua | Chairman	13	13	100%
Rofyanto Kurniawan	Sekretaris | Secretary	13	13	100%
Budi Prijono	Anggota | Member	13	13	100%
Sri Juni Kuntari	Anggota | Member	13	13	100%
Nikson Silalahi	Anggota | Member	13	13	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero). Adapun kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Diskusi Internal, Diskusi dengan unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite lainnya.
2. Memberikan rekomendasi *Nominated Talent* kepada Dewan Komisaris dengan pertimbangan strategi percepatan transformasi teknologi dan penyehatan keuangan perusahaan serta ketepatan pemahaman yang mumpuni;
3. Mengevaluasi sistem remunerasi karyawan, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya;
4. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk diusulkan kepada RUPS;
5. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan penyelenggaraannya bersamaan dengan pelaksanaan *assessment* GCG, khususnya bagian Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk membuat keputusan mengenai pengangkatan kembali dan/atau pemberhentian jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk periode selanjutnya.

Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Besaran remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan kajian kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi. Dewan Komisaris

Activities in 2022

The Risk Monitoring Committee has carried out its duties and functions as regulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, concerning the Board of Commissioners and Directors' Work Guidelines (Board Manual) of PT ASABRI (Persero). The activities of the Risk Monitoring Committee during the year 2022 are as follows:

1. Conducted Internal Discussions, Discussions with related work units, and Joint Discussions with other Committees.
2. Provided recommendations for Nominated Talent to the Board of Commissioners, considering the strategy for accelerating technological transformation and financial health of the company as well as the appropriateness of their qualifications.
3. Evaluated the employee remuneration system, allowances, and other benefits.
4. Assisted the Board of Commissioners in formulating and determining remuneration policies in the form of salaries or honorariums, fixed allowances and facilities, and variable incentives for the Board of Commissioners and Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
5. Prepared four (4) quarterly reports on the committee's activities and submitted them to the Board of Commissioners.

Performance Evaluation of the Risk Monitoring Committee

The performance of the Risk Monitoring Committee is assessed by the Board of Commissioners, and this assessment is conducted simultaneously with the implementation of GCG assessments, particularly the part related to the Risk Monitoring Committee. The results of this assessment serve as the basis for the Board of Commissioners to make decisions regarding the reappointment and/or dismissal of members of the Risk Monitoring Committee for the subsequent period.

Remuneration for the Risk Monitoring Committee

The remuneration for the Risk Monitoring Committee is determined in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-12/ MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is established with the aim of assisting in the implementation of the Board of Commissioners' functions and tasks in conducting a review of risk management policies implemented by the

mengkaji kebijakan tersebut guna memastikan bahwa risiko-risiko yang dimiliki ASABRI dapat dikendalikan dan aset-aset berisiko tinggi telah diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko

Dalam menjadi anggota Komite Pemantau Risiko, berbagai persyaratan wajib dipenuhi baik persyaratan kemampuan maupun kepatutan. Persyaratan kemampuan terdiri dari profesional dalam bidang manajemen risiko, akuntansi, keuangan, dan seorang ahli di bidang usaha ASABRI serta bebas dari segala potensi benturan kepentingan sehingga objektivitas pendapat dalam menghadapi masalah tidak terganggu.

Selain persyaratan kemampuan, anggota Komite Pemantau Risiko diwajibkan memiliki sifat, sikap, dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan kepatutan yang terdiri dari:

Persyaratan Kompetensi
a. Memiliki integritas yang tinggi dan jujur, dengan kemampuan pengetahuan dan pengalamaan yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Anggota Komite Pemantau Risiko juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses manajemen risiko.
c. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perasuransian, perbankan, pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional.
d. Sekurang-kurangnya seseorang anggota yang merupakan pihak independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan asuransi.
e. Sekurang-kurangnya seseorang anggota yang merupakan pihak independen memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Persyaratan Independensi :
a. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham.
b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ASABRI.
c. Bukan merupakan Karyawan ASABRI dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
d. Bukan merupakan pihak internal KAP maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/atau konsultan non audit kepada ASABRI dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Directors. The Board of Commissioners reviews these policies to ensure that ASABRI risks can be controlled, and high-risk assets are insured in accordance with applicable provisions.

Qualifications of Risk Monitoring Committee Members

To become a member of the Risk Monitoring Committee, various qualifications must be met, including both competency and appropriateness requirements. Competency requirements include being a professional in the field of risk management, accounting, finance, and an expert in ASABRI business field, and being free from any potential conflicts of interest to ensure objectivity in addressing issues.

In addition to competency requirements, members of the Risk Monitoring Committee must possess commendable character, attitude, and behavior, and meet appropriateness requirements, including:

Competency Requirements
a. Having high integrity and honesty, with adequate knowledge and experience consistent with their educational background. Members of the Risk Monitoring Committee must also have good communication skills and be available to perform their duties.
b. Having sufficient knowledge of risk management principles and processes.
c. Having adequate knowledge of regulations in the fields of insurance, banking, capital markets, and other relevant legislation related to operational activities.
d. At least one independent member must have expertise in finance and insurance.
e. At least one independent member must have expertise in risk management.

Independence Requirements:
a. Do not have any business relationships or affiliations with the Company, Directors, Commissioners, or Major Shareholders.
b. Do not have any direct or indirect business relationships related to ASABRI business activities.
c. Have not been an ASABRI employee in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners as a member of the Risk Monitoring Committee.
d. Have not been an internal members of KAP or consultants providing audit and/or non-audit consulting services to ASABRI in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners as a member of the Risk Monitoring Committee.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko

Keberadaan Komite Pemantau Risiko dikehendaki oleh Dewan Komisaris dengan kedudukan berada di bawah Dewan Komisaris. Seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Komisaris. Anggota komite diberhentikan jika masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir atau mengundurkan diri dan/atau karena suatu hal tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Komposisi Komite Pemantau Risiko tidak mengalami perubahan sejak terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor Kep/003/KOM/AS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021. Komposisi komite Pemantau Risiko mengalami perubahan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP/016/KOM/AS/VIII/2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai anggota, dan 2 (dua) orang anggota Komite yang berasal dari luar ASABRI (pihak independen) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pengelolaan asuransi, dana pensiun, dan manajemen risiko.

Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2022

Nama Name	**Jabatan** Position	**Background**
Aridono Sukmanto	Ketua | Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
Budi Prijono	Anggota | Member	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Edi Timbul Hardiyanto, CACP	Anggota | Member	Mantan Auditor BPKP, dan Praktisi Manajemen Risiko Former Auditor at BPKP, and Risk Management Practitioner
Mustar Manurung	Anggota | Member	Irwasda Polri Regional Supervision Inspectorate of Police

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko



ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO
Risk Monitoring Committee Member
EDI TIMBUL HARDIYANTO

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesia Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
65 Tahun
65 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
28 Juni 2019 - sekarang
June 28, 2019 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- *Master of Business Administration* (MBA) *in General Business* (1993)
- Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1990)
- Master of Business Administration (MBA) in General Business (1993)
- Diploma IV Specialization in Accounting, State College of Accountancy Jakarta (1990)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
Konsultan GRC (2022 s.d. sekarang)
GRC Consultant (2022 - present)

Appointment and Termination of the Risk Monitoring Committee

The existence of the Risk Monitoring Committee is desired by the Board of Commissioners, with its position under the Board of Commissioners. The entire process of appointment and termination is carried out by the Board of Commissioners. Committee members are terminated if their term of office has expired or if they resign and/or for any reason cannot continue to perform their duties as members of the Risk Monitoring Committee.

Composition of the Risk Monitoring Committee

The composition of the Risk Monitoring Committee has not changed since it was last determined by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioners' Decision Number Kep/003/KOM/AS/III/2021 dated March 29, 2021. The composition of the Risk Monitoring Committee changed on August 30, 2022, with Decision Letter Board of Commissioners Number: KEP/016/KOM/AS/VIII/2022, consisting of 1 (one) member of the Board of Commissioners as the Chairman of the Committee, 1 (one) member of the Board of Commissioners as a member, and 2 (two) Committee members from outside ASABRI (independent parties) with knowledge and experience in insurance management, pension funds, and risk management.

Composition of the Risk Monitoring Committee as of December 2022

Profile of Risk Monitoring Committee Members



ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO
Risk Monitoring Committee Member

MUSTAR MANURUNG

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesia Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
62 Tahun
62 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
29 Maret 2021 - sekarang
March 29, 2021 - present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
Sarjana (S1) Ilmu Hukum (1995)
Bachelor's Degree (S1) in Law (1995)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Anjak Madya Bidang Manajemen Operasional Inspektorat Pengawasan Umum POLRI (2018)
- Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kepulauan Bangka Belitung (2016)
- Inspektur Pengawasan Daerah Polda Banten (2014)
- Anjak Madya in Operational Management at General Supervision Inspectorate POLRI (2018)
- Regional Supervision Inspectorate of Police at the Regional Police of Bangka Belitung Islands (2016)
- Regional Supervision Inspectorate of Police at the Regional Police of Banten (2014)

Independensi Komite Pemantau Risiko

seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence of Risk Monitoring Committee Members

all members of the Risk Monitoring Committee who come from independent parties do not have financial relationships, management relationships, ownership of shares, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently.

Aspek Indenpendensi Independence Criteria	Edi Timbul Hardiyanto, CACP	Mustar Manurung
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan dewan komisaris dan direksi No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan No ownership of shares in the company	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi, dan/atau sesama anggota komite audit No familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not holding positions in political parties or government offices	√	√

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Guna menunjang pelaksanaan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman Kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Risk Monitoring Committee Work Guidelines

To support the implementation of its functions and roles, the Risk Monitoring Committee has work guidelines established in the Committee Charter. These guidelines are based on applicable laws and are periodically reviewed.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko melakukan proses konsultasi kepada Desk Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada Dewan Komisaris guna memastikan kecukupan dalam hal pengelolaan risiko ASABRI.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee engages in consultation with the Risk Management Desk. The Risk Monitoring Committee is tasked with providing appropriate recommendations to the Board of Commissioners to ensure adequacy in managing ASABRI risks.

1. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

   Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab membantu Komisaris untuk mendorong dapat dicapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran, dengan memastikan kecukupan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang meliputi antara lain:
   a. Kesesuaian rancangan dan penerapan tata kelola *(governance)* manajemen risiko dengan sifat dan ciri operasional ASABRI.
   b. Cukup tersedianya infrastruktur manajemen risiko yang diperlukan untuk mendapatkan kapasitas yang diperlukan perorangan dan bagian organisasi dalam ASABRI, untuk menyelesaikan penugasannya.
   c. Dilaksanakannya proses manajemen risiko dalam kendala dan kerapatan waktu yang memadai, di seluruh pusat-pusat pertanggungjawaban ASABRI.

Tugas Komite Pemantau Risiko

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berkonsultasi kepada Divisi Kepatuhan dan Hukum dan Desk Manajemen Risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko–risiko perseroan. Penugasan ini meliputi:

a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Manajemen secara tahunan.
b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
c. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulan PT ASABRI (Persero) dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh ASABRI serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko–risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
d. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi POJK atau Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam langkah pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khusunya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
e. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha ASABRI agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
f. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan ASABRI terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruih perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK atau Bank Indonesia.

1. Responsibilities of the Risk Monitoring Committee include:
   The Risk Monitoring Committee is responsible for assisting the Commissioners in achieving goals and objectives, ensuring the application of risk management principles, which include:

   a. The appropriateness of the design and implementation of risk management governance with the nature and characteristics of ASABRI operations.
   b. Ensuring the availability of the necessary risk management infrastructure to acquire the required capacities for individuals and organizational units within ASABRI to carry out their duties.

   c. Executing the risk management process within constraints and timeframes that are adequate across all ASABRI responsibility centers.

Duties of the Risk Monitoring Committee

To fulfill its responsibilities, the Risk Monitoring Committee consults with the Compliance and Legal Division and the Risk Management Desk, providing recommendations to the Board of Commissioners to ensure the adequacy of the company's risk management. These assignments include:

a. Evaluating the risk management policies and strategies prepared by the Management on an annual basis.
b. Assessing the Directors' accountability reports on the implementation of risk management policies.

c. Evaluating the Risk Profile Reports of PT ASABRI (Persero) on a quarterly basis and the execution of the risk management process. The Committee then provides input to the Board of Commissioners regarding the risk conditions faced by ASABRI and proposals for mitigation measures. This enables the Board of Commissioners to provide input for any necessary improvements to the Directors.
d. Evaluating the steps taken by the Directors to fulfill the requirements of POJK or Bank Indonesia and other applicable regulations concerning the implementation of prudential principles, particularly those related to risk management.

e. Evaluating the results of the Directors' monitoring of ASABRI business activities to ensure compliance with applicable regulations.
f. Evaluating the results of the Directors' monitoring of ASABRI compliance with risk management implementation regarding all agreements and commitments made by the Directors to the OJK or Bank Indonesia.

g. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komsaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
   1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari *risk management*.
   2. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan.
   3. Memberikan masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen rsisiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.
   4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   5. Melakukan *self evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Pemantau Risiko.

g. Evaluating and providing input from a risk management perspective to the Commissioners regarding the requests or proposals from the Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Directors. This input serves as the basis for the Commissioners' decision-making.

h. Monitoring and evaluating the performance of the risk management committee and risk management unit, which includes:
   1. Reviewing the implementation of each component of risk management.
   2. Reviewing information related to risk management in reports that will be published.
   3. Providing input in the process of selecting and proposing independent risk management consultant candidates and overseeing the work of independent risk management consultants, including proposing their termination if their performance is deemed to not meet the standards or requirements in place.
   4. Performing other tasks assigned by the Commissioners in accordance with applicable regulations.
   5. Conducting self-evaluation of the effectiveness of task implementation and periodically updating the Charter of the Risk Monitoring Committee.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mengacu pada Piagam Komite Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Keputusan yang dihasilkan dari rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir. Perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai dengan alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

Meetings of the Risk Monitoring Committee

Meetings of the Risk Monitoring Committee are held regularly by the Risk Monitoring Committee, following the Charter of the Nomination and Remuneration Committee. Throughout the year 2022, the Nomination and Remuneration Committee held 13 (thirteen) meetings. Decisions resulting from the meetings of the Nomination and Remuneration Committee are recorded and documented appropriately in meeting minutes signed by all attending members. Dissenting opinions that arise during the meetings are clearly documented in the minutes of meeting, along with the reasons for the dissenting opinions.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Pemantau Risiko

Berikut frekuensi dan tingkat rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Frequency and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

The following is the frequency and attendance level of meetings for the members of the Nomination and Remuneration Committee:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendances	**%**
Aridono Sukmanto	Ketua | Chairman	13	13	100%
Budi Prijono	Anggota | Member	13	13	100%
Edi Timbul Hardiyanto, CACP	Anggota | Member	13	13	100%
Mustar Manurung	Anggota | Member	13	13	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2022

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero). Adapun kegiatan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Diskusi Internal, Diskusi dengan unit Kerja terkait, maupun Diskusi Gabungan dengan Komite lainnya;
2. Menelaah laporan/proposal/usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan menyusun rekomendasinya, antara lain Laporan Manajemen, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 oleh KAP Amar Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM);
4. melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
5. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
6. Menyusun 4 (empat) Laporan triwulanan kegiatan Komite dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Pemantau Risiko

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dan penyelenggaraannya bersamaan dengan pelaksanaan *assesment* GCG, khususnya bagian Komite. Hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk membuat keputusan mengenai pengangkatan kembali dan/atau pemberhentian jabatan anggota Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Besaran remunerasi Komite Pemantau Risiko ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Activities of the Risk Monitoring Committee in 2022

The Risk Monitoring Committee carried out its duties and functions in accordance with the Joint Decision of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, regarding the Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines (Board Manual) of PT ASABRI (Persero). The activities of the Risk Monitoring Committee in 2022 are as follows:

1. Conducted internal discussions, discussions with related work units, and joint discussions with other committees;
2. Reviewed reports/proposals/submissions from the Board of Directors that required written approval from the Board of Commissioners and provided recommendations, including Management Reports, Work Plans, and Corporate Budgets (RKAP);
3. Evaluated the implementation of the audit services for the 2021 Financial Statements by KAP Amar Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM);
4. Monitored and supervised the implementation of risk management;
5. Assessed the effectiveness of risk management, including evaluating the risk tolerance that the Company can take;
6. Prepared 4 (four) quarterly activity reports of the Committee and submitted them to the Board of Commissioners.

Performance Evaluation of the Risk Monitoring Committee

The performance of the Risk Monitoring Committee is assessed by the Board of Commissioners, and the assessment is conducted concurrently with the GCG assessment, specifically for the Committee section. The results obtained from this assessment serve as a basis for the Board of Commissioners to make decisions regarding the reappointment and/or termination of the Committee members' positions.

Remuneration for the Risk Monitoring Committee

The remuneration for the Risk Monitoring Committee is determined in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

ASABRI senantiasa mengupayakan pemberian penghargaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas peran pentingnya dalam organ Perseroan berupa pemberian remunerasi yang layak dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai motivasi dan dukungan dalam mendorong kinerja terbaik Dewan Komisaris dan Direksi.

ASABRI always strives to appreciate the Board of Commissioners and Board of Directors for their important roles in the company's organs by providing appropriate remuneration, which aligns with applicable laws and regulations, as a form of motivation and support in encouraging their best performance.

Dasar Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Basis of the Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs, which has been amended by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020, on the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi turut menyesuaikan dan mempertimbangkan sejumlah faktor, meliputi:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Faktor tingkat inflasi.
4. Faktor kinerja.
5. Tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

The determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors also adapts and considers some factors, including:

1. Business scale factors.
2. Business complexity factors.
3. Inflation rate factors.
4. Performance factors.
5. The general level of earnings in similar industries.

Pengungkapan Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Disclosure of Indicators to Determine the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration for the Board of Directors is determined based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020, on the Fifth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Prosedur dan Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Procedure and Mechanism to Determine the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The mechanism to determine the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors complies with the following procedures:

1. Gaji Direktur Utama ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan dengan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji Direktur Utama untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji Direktur Utama menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.
3. Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
   a. Wakil Direktur Utama: 90% dari Gaji Direktur Utama.
   b. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Gaji Direktur Utama.
4. Bagi Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi yang sudah ada (*existing*), dalam hal berdasarkan komposisi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji yang telah diterima pada tahun buku sebelumnya maka gaji Wakil Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang sudah ada (*existing*) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.
5. RUPS dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan Perusahaan.
6. Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:
   a. Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama.
   b. Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari Direktur Utama.
   c. Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 4, dan 5 *mutatis muntandis* berlaku bagi penetapan Honorarium Dewan Komisaris.
8. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari:
   a. Gaji.
   b. Tunjangan yang terdiri atas:
      1. Tunjangan Hari Raya.
      2. Tunjangan perumahan.
      3. Asuransi purna jabatan.
   c. Fasilitas yang terdiri atas:
      1. Fasilitas kendaraan.
      2. Fasilitas kesehatan.
      3. Fasilitas bantuan hukum.
      4. Fasilitas perumahan.

1. The salary of the President Director is annually decided by the GMS for one year, starting from January of the current year, by considering internal guidelines set by the Minister.
2. If GMS does not determine the amount of the President Director's salary for a certain year, then the amount of salary shall be the same as the most recent salary determined and implemented by the GMS.
3. The salaries of other Board of Directors shall be determined with the following composition of position factors:
   a. Vice President Director: 90% of the President Director's salary.
   b. Other members of the Board of Directors: 85% of the President Director's salary.
4. For the Vice President Director and existing members of the Board of Directors, based on the composition of the Position Factor as referred to in number 3, the salary received by the existing Vice President Director and Members of the Board of Directors is lower than their salary in the previous fiscal year, the salary of the existing Vice President Director and other Members of the Board of Directors shall use the salary received in the previous fiscal year.
5. The GMS may determine a different amount of position factors, as referred to in number 3, if it is considered to reflect more appropriateness and fairness for the Board of Directors members' duties and responsibilities as well as the Company's ability.
6. The honorarium of the Board of Commissioners is determined by the composition of the position factor as follows:
   a. President Commissioner: 45% of the President Director.
   b. Vice President Commissioner: 42.5% of the President Director.
   c. Members of the Board of Commissioners: 90% of the President Commissioner.
7. The provisions in numbers 1, 2, 4, and 5 shall, mutatis mutandis, apply to determining the Honorarium of the Board of Commissioners.
8. The income of members of the Board of Directors may include:
   a. Salary.
   b. Allowances consisting of:
      1. Religious holiday allowance.
      2. Housing allowance.
      3. Retirement insurance.
   c. Facilities consisting of:
      1. Transportation facility.
      2. Health facility.
      3. Legal assistance facility.
      4. Housing facility.

d. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*/LTI).

9. Penghasilan anggota Dewan Komisaris dapat terdiri dari:
   a. Honorarium.
   b. Tunjangan yang terdiri atas:
      1. Tunjangan Hari Raya.
      2. Tunjangan transportasi.
      3. Asuransi purna jabatan.
   c. Fasilitas yang terdiri atas:
      1. Fasilitas Kesehatan.
      2. Fasilitas bantuan hukum.
   d. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam Tantiem tersebut diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive*/LTI).

d. Tantieme/performance incentive, which can be given additionally as a long-term incentive (LTI).

9. The income of members of the Board of Commissioners may include:
   a. Honorarium
   b. Allowances consisting of:
      1. Religious holiday allowance
      2. Transportation allowance
      3. Retirement insurance
   c. Facilities consisting of:
      1. Health facility
      2. Legal assistance facility
   d. Tantieme/performance incentive, which can be given additionally as a long-term incentive (LTI).

Struktur dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Structure and Total Remuneration of the Board of Commissioners

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
Honorarium Salary/Honorarium		
Komisaris Utama President Commissioner	45% dari Gaji Direktur Utama 45% of the President Director's Salary	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	42,5% dari Direktur Utama 42.5% of the President Director's Salary	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Komisaris lainnya Other Commissioners	90% dari Honorarium Komisaris Utama 90% of the President Commissioner Honorarium	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali Honorarium 1 (One) Time of the Honorarium	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-255/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan THR, namun alokasi anggaran diperuntukkan untuk penanggulangan COVID-19.

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
		Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020. According to the Letter of the Minister of SOEs Number S-255/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, on Religious Holiday Allowance for the Board of Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises in 2020, the Board of Directors and Commissioners are not provided with this allowance. However, the budget is allocated for COVID-19 countermeasures.
Tunjangan transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium 20% of the honorarium	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Paling banyak 25% dari Honorarium setahun A maximum of 25% of the annual honorarium	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Fasilitas Facilities		
Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk penggantian biaya kesehatan yang berlaku bagi Direksi In the form of reimbursement of medical expenses as applicable to the Board of Directors	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar penggunaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang berlaku bagi Direksi The amount spent through the procurement mechanism of goods and services as applicable to the Board of Directors	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Tantiem		
Komisaris Utama President Commissioner	45% dari Tantiem Direktur Utama 45% of the President Director's Tantieme	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	42,5% dari tantiem Direktur Utama 42.5% of the President Director's Tantieme	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of the President Commissioner Tantieme	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.

Tabel Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris
Table of Total Remuneration of the Board of Commissioners

Nama Name	**Honorarium per bulan (Rp)** Monthly Honorarium (IDR)	**Tunjangan Transportasi per bulan (Rp)** Monthly Transportation Allowance (IDR)	**Tantiem** (Rp)	**Tunjangan Hari Raya (Rp)** Religious Holiday Allowance (IDR)	**Asuransi Purna Jabatan (Rp)** Retirement Insurance (IDR)	**Penghasilan per tahun (Rp)** Annual Income (IDR)
Komisaris Utama President Commissioner						
Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner						
Komisaris Commissioner						
Komisaris Independen Independent Commissioner						

*berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku RUPS tanggal 22 November 2022 hal Persetujuan Faktor di Luar Pengendalian Direksi dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) Tahun 2022.
Based on the Letter of the Minister of SOEs as the GMS dated November 22, 2022, on the Approval of Factors Outside the Control of the Board of Directors and Determination of Income of Directors and Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) in 2022.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Direksi
Structure and Total Remuneration of the Board of Directors

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
Honorarium Salary/Honorarium		
Direktur Utama President Director	100%	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Direksi
Structure and Total Remuneration of the Board of Directors

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
Direktur Lainnya Other Directors	85% dari Gaji Direktur Utama 85% of the President Director's Salary	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali Gaji 1 (One) Time of the Salary	Sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-255/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan THR, namun alokasi anggaran diperuntukkan untuk penanggulangan COVID-19. According to the Letter of the Minister of SOEs Number S-255/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, on Religious Holiday Allowance for the Board of Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises in 2020, the Board of Directors and Commissioners are not provided with this allowance. However, the budget is allocated for COVID-19 countermeasures.
Tunjangan Perumahan Housing Allowance		Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Paling banyak 25% dari Gaji setahun A maximum of 25% of the annual salary	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Fasilitas Facilities		
Fasilitas Kendaraan Transportation Facility	1 (satu) kendaraan serta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS 1 (one) vehicle as well as maintenance and operational costs with vehicle specifications and standards determined by the GMS.	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk penggantian biaya kesehatan In the form of reimbursement of medical expenses	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.

Struktur dan Jumlah Remunerasi Direksi
Structure and Total Remuneration of the Board of Directors

Uraian Details	**Keputusan** Decision	**Keterangan** Description
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar penggunaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa The amount spent through the procurement mechanism of goods and services	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Tantiem		
Direktur Utama President Director	100%	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.
Direktur lainnya Other Directors	85% dari Direktur Utama 85% of the President Director's Tantieme	Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, on the Determination of Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020.

Tabel Jumlah Remunerasi Direksi
Table of Total Remuneration of the Board of Directors

Nama Name	**Honorarium per bulan (Rp)** Monthly Honorarium (IDR)	**Tunjangan Transportasi per bulan (Rp)** Monthly Transportation Allowance (IDR)	**Tantiem** (Rp/IDR)	**Tunjangan Hari Raya (Rp)** Religious Holiday Allowance (IDR)	**Asuransi Purna Jabatan (Rp)** Retirement Insurance (IDR)	**Penghasilan per tahun (Rp)** Annual Income (IDR)
Direktur Utama President Director						
Direktur SDM dan Hukum Director of HR and Legal Affairs						
Direktur Keuangan Director of Finance						
Direktur Investasi Director of Investment						
Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations						

*berdasarkan Surat Menteri BUMN Selaku RUPS tanggal 22 November 2022 hal Persetujuan Faktor di Luar Pengendalian Direksi dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) Tahun 2022.
Based on the Letter of the Minister of SOEs as the GMS dated November 22, 2022, on the Approval of Factors Outside the Control of the Board of Directors and Determination of Income of Directors and Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) in 2022.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on the Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Sebagai entitas usaha yang menjunjung prinsip korporasi yang sehat, ASABRI terus mengupayakan penyesuaian dengan memperkuat kepatuhan terhadap perkembangan regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam pengaplikasian kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara untuk Dewan Komisaris dan PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk Direksi. Penerapan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlepas dari komitmen ASABRI dalam menciptakan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berprinsip pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As a business entity that upholds healthy corporate principles, ASABRI continues to strive for adjustments by strengthening compliance with the latest developments in applicable regulations and rules, including in applying a policy on the diverse composition of the Board of Commissioners and Directors, which is referred to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, on Requirements and Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises for the Board of Commissioners, and PER-03/MBU/02/2015 dated February 17, 2015, on Procedures for Appointing, and Dismissing Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises for the Board of Directors. The implementation of the policy on the diverse composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is inseparable from ASABRI commitment to maintaining effective, efficient, and compliant management with the prevailing laws and regulations.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan dan kompleksitas kebutuhan pengawasan dan pengelolaan ASABRI. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi kebijakan keberagaman komposisi dilihat dari aspek pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan guna memberikan alternatif pendekatan pengawasan yang beragam dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengurangi legitimasi bagi ASABRI dalam memberlakukan evaluasi kinerja dengan cara yang sama, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, ras, agama, dan suku. Uraian mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners and Directors has been determined by considering and fulfilling the needs and complexity of ASABRI supervision and management needs. All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have fulfilled the diversity policy in terms of knowledge, expertise, professional experience, and educational background to provide alternative approaches to diverse supervision and support the effectiveness of their duties and responsibilities. The implementation of the policy on the diversity the Board of Commissioners and Board of Directors composition does not reduce the legitimacy of ASABRI in applying performance evaluation in the most equal manner without discriminating against gender, race, religion, or ethnicity. A description of the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition is presented in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan Terakhir** Latest Education
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commission	54	Laki-laki Male	S1 Ekonomi Pertanian S2 Manajemen Agribisnis Bachelor Degree in Agricultural Economics Master Degree in Agribusiness Management

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan Terakhir** Latest Education
Budi Prijono	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	56	Laki-laki Male	S1 Teknik Manajemen Industri S2 Magister Manajemen S3 Doktor Ilmu Ekonomi Bachelor Degree in Industrial Management Engineering Master Degree in Management Doctoral Degree in Economics
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	56	Laki-laki Male	S1 Statistik S2 Administrasi Bisnis Bachelor Degree in Statistics Master Degree in Business Administration
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	61	Laki-laki Male	SI Ilmu Hukum Bachelor Degree in Laws
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	52	Laki-laki Male	S1 Teknik Sipil S2 Administrasi Bisnis S3 Filsafat Ekonomi Bachelor Degree in Civil Engineering Master Degree in Business Administration Doctoral Degree in Philosophy of Economics
Direksi Board of Directors				
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	63	Laki-laki Male	S1 Akuntansi S2 Manajemen S3 Ilmu Manajemen Bachelor Degree in Accounting Master Degree in Management Doctoral Degree in Management Science
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	56	Laki-laki Male	S1 Ekonomi Bachelor Degree in Economics
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	54	Laki-laki Male	S1 Matematika S2 Manajemen Keuangan dan Perbankan Bachelor Degree in Mathematics Master Degree in Finance and Banking Management
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and Legal	52	Perempuan Female	S1 Teknik Industri S2 Manajemen Internasional Bachelor Degree in Industrial Engineering Master Degree in International Management
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	51	Laki-laki Male	S1 Politik S2 Manajemen Administrasi Publik Bachelor Degree in Politics Master Degree in Public Administration Management

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Concurrent Position of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di ASABRI Position in ASABRI	Jabatan Lain Other Position	Instansi Institution	Bidang Usaha Business Field
Fary Djemy Francis	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commission	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Budi Prijono	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Inspektur Jenderal (Irjen) Inspector General	Kementerian Pertahanan Ministry of Defense	Instansi Pemerintahan Government Institution
I Nengah Putra Winata	Komisaris Independen Independent Commissioner	Asisten Khusus Menteri Special Assistant to the Minister	Kementerian Kelautan dan Perikanan Ministry of Marine Affairs and Fisheries	Instansi Pemerintahan Government Institution
Aridono Sukmanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Komisaris Independen 2. Komisaris Independen 1. Independent Commisioner 2. Independent Commissioner	1. PT Astra Agro Lestari Tbk 2. PT Astra Sedaya Finansial	1. Perkebunan dan Industri; 2. Pembiayaan Kendaraan 1. Plantation and Industry 2. Vehicle Financing
Rofyanto Kurniawan	Komisaris Commissioner	Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Director of State Budget Planning	Kementerian Keuangan Ministry of Finance	Instansi Pemerintah Government Institution

Rangkap Jabatan Direksi
Concurrent Position of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan di ASABRI Position in ASABRI	Jabatan Lain Other Position	Instansi Institution	Bidang Usaha Business Field
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Tidak Ada None	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas menjalankan fungsi pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegial dalam mengelola kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yakni memaksimalkan nilai Perseroan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal.

The Board of Directors is the company's organ responsible for performing the company's management function for the company's interests according to the company's purposes and objectives and representing the company, both inside and outside the court, as regulated in the provisions of the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Board of Directors is appointed and fully responsible collegially for managing the company's interests according to the company's purposes and objectives, which are to optimize the company's value by optimally utilizing all of its resources.

Fungsi pengurusan dan pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi meliputi penyusunan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan bisnis, RJPP, RKAP, penanganan risiko usaha dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha dan perwujudan visi misi Perusahaan. Direksi juga bertugas memastikan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko serta mengaplikasikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan dan rekomendasi Dewan Komisaris.

The company's management function performed by the Board of Directors includes preparing and implementing business strategies and policies, a Long-Term Business Plan (RJPP), the Work Plan and Corporate Budget (RKAP), handling business risks to ensure the achievement of business goals and objectives, and realizing the company's vision and mission. The Board of Directors is also responsible for ensuring the effectiveness of internal control and risk management and applying the necessary follow-up according to the direction and recommendations of the Board of Commissioners.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

In performing their duties, the Board of Directors is responsible for the GMS. The Board of Directors' responsibility to the GMS is a manifestation of accountability for the company's management under GCG principles. Each member of the BOD may perform duties and make decisions based on their division of duties and authority. However, the implementation of the duties of each member remains a shared responsibility.

Pedoman Kerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perseroan dikukuhkan dalam Pedoman Kerja *(Board Manual)* yang mengatur tata laksana kerja dalam pengurusan Perseroan dengan berlandaskan prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum korporasi, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik-praktik terbaik *(best practices)* GCG. Adapun cakupan tata laksana kerja yang diatur dalam Pedoman Kerja *(Board Manual)* meliputi:

1. Kebijakan Umum.
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi.

Board of Directors' Work Guidelines

The implementation of the duties and responsibilities of the company's management is outlined in the Board Manual, which regulates the work procedures in the management of the company based on GCG principles and prevailing laws and regulations.

The Board Manual is formulated by considering the principles of corporate law, the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and GCG best practices. The scope of work procedures regulated in the Board Manual includes:

1. General Policy.
2. Requirements and Composition, Membership, and Term of Office of the Board of Directors.

3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.
4. Independensi (Kemandirian) Direksi.
5. Etika Jabatan Direksi.
6. Susunan, Tugas dan Wewenang Direksi.
7. Rapat Direksi.
8. Evaluasi Kinerja Direksi.
9. Fungsi Pendukung.
10. Hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
3. Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.
5. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan secara lebih rinci diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero).

3. Introduction and Capability Enhancement Program.
4. Independence of the Board of Directors.
5. Ethics of the Board of Directors.
6. Composition, Duties, and Authorities of the Board of Directors.
7. Board of Directors Meeting.
8. Performance Evaluation of the Board of Directors.
9. Support Function.
10. Relationship between the company and its subsidiaries.

Board of Directors' Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Board of Directors of the Company are as follows:

1. The Board of Directors shall perform its duties with good faith in the company's interests and according to the company's purposes and objectives, as well as ensure that the company implements its social responsibility and takes into account the interests of various stakeholders according to the provisions of laws and regulations.
2. The Board of Directors is assigned to perform all actions related to the company management for the company's interests and according to the company's purposes and objectives and to represent the company both inside and outside the court on all matters and all events with restrictions as stipulated in the laws, the Articles of Association, and/or the Resolutions of the GMS.
3. The Board of Directors, as an organ of the company, is assigned and responsible collegially for managing the company. Each member of the Board of Directors may carry out duties and make decisions according to the division of duties and authority.
4. In carrying out their duties, the Board of Directors members must devote their full energy, thoughts, and attention to their duties, obligations, and the achievement of the company's objectives.
5. The Board of Directors is authorized to perform management as referred to in number 2 according to appropriate policies within the limits outlined in this law and/or the Articles of Association.

The detailed duties and responsibilities of the Board of Directors are regulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/07/KOM/AS/VII/2019 and Number KEP/PH. 05/51-AS/VII/2019 dated July 18, 2019, on the Board Manual of PT ASABRI (Persero).

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilik kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Board of Directors Authority

In performing its duties, the Board of Directors is authorized to:

1. Establish the company's management policy.
2. Arrange the transfer of power of the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the company in and out of court.
3. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or several company employees, either individually or jointly or to other persons, to represent the company in and out of court.
4. To regulate the provisions regarding the company's employment, including the determination of salaries, retirement or pension insurance, and other income for the company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, retirement or pension insurance, and other income for employees that exceed the obligations stipulated by laws and regulations must obtain prior approval from the GMS.
5. To appoint and dismiss the company's employees based on the company's personnel regulations and prevailing laws and regulations.
6. To appoint and dismiss the corporate secretary.
7. Perform all actions and other deeds regarding the management and ownership of the company's assets, binding the company with other parties and/or other parties with the company, as well as representing the company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolution.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut:

Division of the Board of Directors' Duties

In performing its duties, the Board of Directors is divided into the following areas of duties:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tugas Pokok** Main Duties
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Mengoordinasikan, mengarahkan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan, pengembangan, penetapan kebijakan umum Perusahaan selaras dengan misi, visi, tata nilai, dan tujuan Perusahaan, pengembangan kebijakan audit internal, sekretariat Perusahaan, dan perencanaan strategi korporasi, sesuai prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* serta pengelolaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Cabang. Coordinate, direct, decide, and be responsible for planning, developing, determining the Company's general policies (that are in line with the Company's mission, vision, values, and objectives), developing internal audit policies, the Company's secretariat, and corporate strategy planning according to the principles of good corporate governance as well as managing the implementation of Branch Office duties and functions.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tugas Pokok** Main Duties
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Mengoordinasikan, mengarahkan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan bersama dengan Anggota Direksi lainnya secara kolektif kolegial dalam menyelenggarakan perencanaan, penetapan, pengendalian dan implementasi kebijakan serta strategi fungsi Manajemen Portofolio, pasar modal dan pasar uang, serta pengembangan bisnis. Coordinate, direct, decide, and be responsible for joint activities with other Members of the Board of Directors in a collegial collective manner in organizing the planning, determination, control, and implementation of policies and strategies for the Portfolio Management function, capital and money markets, and business development.
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Mengoordinasikan, mengarahkan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan, penetapan, pengendalian dan implementasi kebijakan serta strategi keuangan, akuntansi, dan manajemen risiko. Coordinate, direct, decide, and be responsible for planning, determining, controlling, and implementing policies and strategies for finance, accounting, and risk management.
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Mengoordinasikan, mengarahkan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan, penetapan, dan pengendalian kebijakan, strategi serta layanan sumber daya manusia, urusan umum, kepatuhan dan hukum. Coordinate, direct, decide, and be responsible for planning, establishing, and controlling policies, strategies, and services for human resources, general affairs, compliance, and legal.
Khaidir Abdrurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Mengoordinasikan, mengarahkan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan, penetapan, dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan hubungan kelembagaan Perusahaan termasuk di dalamnya pengelolaan kepesertaan, layanan, dan sistem informasi. Coordinate, direct, decide, and be responsible for planning, establishing, and controlling policies and strategies for managing the Company's institutional relations, including membership management, services, and information systems.

Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Pada awal Januari 2022, jumlah anggota Direksi ASABRI adalah 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur. Seluruh anggota Direksi ASABRI telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari OJK. Seluruh anggota Direksi ASABRI berdomisili di Indonesia, dengan masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Pada tanggal 25 Januari 2022, terdapat penambahan anggota Direksi sehingga komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Number, Composition, and Appointment of the Board of Directors

At the beginning of January 2022, the number of ASABRI Board of Directors members was 4 (four), consisting of 1 (one) President Director and 3 (three) Directors. All ASABRI Board of Directors members have passed the Fit and Proper Test and obtained approval from FSA. All members of the ASABRI Board of Directors are domiciled in Indonesia, with the term of office of the members of the Board of Directors being 5 (five) years. On January 25, 2022, there were additional members of the Board of Directors, so the composition of the Board of Directors is as follows.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Nomor SK Menteri BUMN** Number of SOEs Minister Decree	**Nomor SK OJK** Number of FSA Decree
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	SK-264/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 SK-264/MBU/08/2020 dated August 4, 2020	S-41/D.05/2020 Tanggal 10 November 2020 S-41/D.05/2020 dated November 10, 2020
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 SK-36/MBU/01/2020 dated January 30, 2020	S-1/D.05/2021 Tanggal 5 Februari 2021 S-1/D.05/2021 dated February 5, 2021
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	SK-36/MBU/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 SK-36/MBU/01/2020 dated Januari 30, 2020	S-27/D.05/2020 Tanggal 1 Agustus 2021 S-27/D.05/2020 dated August 1, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Nomor SK Menteri BUMN Number of SOEs Minister Decree	Nomor SK OJK Number of FSA Decree
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	SK-119/MBU/04/2021 Tanggal 15 April 2021 SK-119/MBU/04/2021dated April 15, 2021	S-26/D.05/2021 Tanggal 22 Desember 2021 S-26/D.05/2021dated December 22, 2021
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	SK-29/MBU/01/2022 tanggal 25 Januari 2022 SK-29/MBU/01/2022 dated January 25, 2022	S-12/D.05/2022 Tanggal 4 Juli 2022 S-12/D.05/2022 dated July 4, 2022

Program Pengenalan Bagi Anggota Direksi Baru

Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Untuk periode tahun 2022, program pengenalan diadakan untuk Khaidir Abdurrahman selaku Direktur Hubungan Kelembagaan yang baru. Program pengenalan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27-28 Januari 2022. Kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan yang meliputi:

1. Profil singkat perusahaan.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perseroan.
3. Pengelolaan Layanan.

Introduction Program for New Members of the Board of Directors

An introduction program is held for new members of the Board of Directors so they can carry out their duties and responsibilities as members of the Board of Directors properly. For the 2022 period, an introduction program was held for Khaidir Abdurrahman as the new Director of Institutional Relations. The introduction program was held on January 27-28, 2022. The new members of the Board of Directors who are appointed for the first time shall be provided with an introduction program, which includes:

1. A brief profile of the company.
2. Implementation of the Company's GCG principles.
3. Service Management.

Kepemilikan Saham Direksi

Share Ownership of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham di PT ASABRI (Persero) Share Ownership in PT ASABRI (Persero)	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Tidak Ada None	1. PT Bukalapak Tbk 2. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Khaidir Abdurrahman*	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Tidak Ada None	Tidak Ada None

*Efektif sejak 25 Januari 2022 | Effective since January 25, 2022

Hubungan Afiliasi Direksi

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali Perseroan dalam bentuk:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
2. Hubungan kepengurusan atau pengelolaan pada Pemegang Saham Utama/Pengendali

Affiliation Relationship of the Board of Directors

Affiliation is the relationship between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders of the Company in the form of:

1. Family relationship due to marriage and descent to the second degree both horizontally and vertically.
2. Managerial or management relationship with the Majority/Controlling Shareholders.

3. Hubungan kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan sebagai badan hukum.

Direksi PT ASABRI (Persero) tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Hubungan afiliasi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

3. Share ownership relationship of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Majority and/or Controlling Shareholders of the Company as a legal entity.

The Board of Directors of PT ASABRI (Persero) has no financial relationship, management relationship, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders. Thus, they can perform their duties and responsibilities independently. Affiliations of the Board of Directors can be seen in the table below:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga dengan** Family Relationship with						**Hubungan Keuangan dengan** Financial Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham** Shareholders		**Dewan Komisaris** Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham** Shareholders	
		Ya	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director		√		√		√		√		√		√
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment		√		√		√		√		√		√
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management		√		√		√		√		√		√
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal		√		√		√		√		√		√
Khaidir Abdurrahman	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations		√		√		√		√		√		√

Program Pengembangan Direksi

Selamat tahun 2022, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pengembangan dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengelolaan Perseroan. Daftar program pengembangan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Board of Directors Development Program

During 2022, the Company's Board of Directors members have participated in several development programs to support their duties and responsibilities in managing the Company. The list of development programs that were attended is as follows.

Nama Name	**Nama Program** Name of Programs	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu Pelaksanaan** Time
Wahyu Suparyono	*Sharing Session* Gratifikasi Sharing Session on Gratification	PT ASABRI (Persero)	13 Juli 2022 July 13, 2022
Helmi Imam Satriyono	Program *CFO School* Tahun 2022 CFO School Program in 2022	FHCI BUMN	23 Februari -25 Mei 2022 February 23 – May 25, 2022
	Sharing Session Gratifikasi Sharing Session on Gratification	PT ASABRI (Persero)	13 Juli 2022 July 13, 2022
	Webinar *Digital Leadership* untuk Memperkuat Transformasi Digital Digital Leadership Webinar to Strengthen Digital Transformation	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	28 Juli 2022 July 28, 2022
	IAMI Management Accountants Conference 2022	IAMI	25 - 26 November 2022 November 25–26, 2022
Sri Ainin Muktirizka	*Sharing Session* Gratifikasi Sharing Session on Gratification	PT ASABRI (Persero)	13 Juli 2022 July 13, 2022
	Pelatihan *Building Quality Into Processes* dan *Digital Transformation 4.0* Training on Building Quality Into Processes and Digital Transformation 4.0	SBM ITB	29 - 30 Oktober 2022 5 - 6 November 2022 26 - 27 November 2022 October 29–30, 2022 November 5–6, 2022 November 26–27, 2022
	Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia Human Resources Professional Certification	LSP MSDM	30 November 2022 November 30, 2022
Jeffry Haryadi P Manullang	*Sharing Session* Gratifikasi Sharing Session on Gratification	PT ASABRI (Persero)	13 Juli 2022 July 13, 2022
Khaidir Abdurrahman	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen "*Certified Risk Governance Professional (CRGP)*" Management Training and Certification on "Certified Risk Governance Professional (CRGP)"	PT RAP	15-18 dan 22 Maret 2022 March 15–18 and March 22, 2022
	Onboarding Directorship Angkatan 5 tahun 2022 Onboarding Directorship Batch 5 in 2022	BUMN Leadership & Management Institute dan FHCI BUMN Leadership & Management Institute and FHCI	Mei 2022 May 2022
	Sharing Session Gratifikasi Sharing Session on Gratification	PT ASABRI (Persero)	13 Juli 2022 July 13, 2022

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi mengacu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/07/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.05/51-AS/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT ASABRI (Persero), di mana Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Direksi. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak

Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting Policy is governed by the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero), numbered KEP/07/KOM/AS/VII/2019 and KEP/PH.05/51-AS/VII/2019, dated July 18, 2019, as outlined in the Board Manual of PT ASABRI (Persero). This policy mandates regular Board of Directors Meetings, scheduled at least once a month or whenever deemed necessary upon the request of one or more members of the Board of Directors, or through a written request from the Board of Commissioners or Shareholders. A Board of Directors Meeting is considered valid and empowered to make binding decisions if attended or represented by more than half of the Board of Directors members. The President Director presides over the meeting. In the President Director's absence, one of the Directors, appointed in writing by the President Director, leads the meeting. In case the President Director doesn't make an

melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin rapat. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin rapat Direksi:

appointment, the Director with the longest tenure as a member of the Board of Directors assumes leadership. If there is more than one Director with the longest tenure, the Director who has served the longest in office and is the oldest in age acts as the chairperson of the Board of Directors meeting.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Pada tahun 2022, tanggal dan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Implementation of the Board of Directors Meeting

In 2022, the dates and Board of Directors Meetings are as follows.

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	3 Januari 2022 January 3, 2022	*Courtesy Call* dengan Direksi BRI Courtesy Call with the Board of Directors of BRI
2	4 Januari 2022 January 4, 2022	• Pembahasan Kendala Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan terkait Pelayanan Perawatan JKK • Laporan Satgas COVID • Discussion of Constraints of Cooperation with BPJS Health related to JKK Care Services • COVID Task Force Report
3	5 Januari 2022 January 5, 2022	• Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres Pemulihan Aset Investasi • Authentication Digitalization Progress • Investment Asset Recovery Progress
4	11 Januari 2022 January 11, 2022	• Progres Pemilihan Kancab Terbaik • Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres Pemulihan Aset Investasi • Progress of Best Branch Selection • Progress of Authentication Digitalization • Investment Asset Recovery Progress
5	20 Januari 2022 January 20, 2022	Penyampaian Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SAI PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 Presentation of Annual Audit Work Program (PKAT) SAI PT ASABRI (Persero) Year 2022
6	24 Januari 2022 January 24, 2022	• Pembahasan Materi RDP dengan Komisi VI DPR RI • Pembahasan tentang BUM KPR YPPSDP • Perkembangan Renovasi KCU dan Lobby, serta Rencana • Renovasi Tahap II • Pembahasan tentang Laporan Survei Karyawan • Pembahasan tentang Pengembangan Karyawan • Discussion of RDP Material with Commission VI of the DPR RI • Discussion on BUM KPR YPPSDP • Progress of KCU and Lobby Renovation, as well as the Plan • Renovation Phase II • Discussion on Employee Survey Report • Discussion on Employee Development
7	31 Januari 2022 January 31, 2022	• Perkembangan Renovasi Ruang Layanan KCU dan Renovasi Tahap II • Pembahasan Jawaban atas Pertanyaan RDP Komisi VI DPR • Laporan Satgas COVID • Progress of KCU Service Room Renovation and Renovation Phase II • Discussion of Answers to Questions from the Commission VI of DPR • COVID Taskforce Report
8	2 Februari 2022 February 2, 2022	• Perkembangan Renovasi Ruang Layanan KCU dan Renovasi Tahap II • Laporan Satgas COVID • Progress of KCU Service Room Renovation and Renovation Phase II • COVID Taskforce Report
9	17 Februari 2022 February 17, 2022	Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Tahun 2022 Technical Coordination Meeting (RAKORNIS) Year 2022
10	22 Februari 2022 February 22, 2022	• Laporan Satgas COVID • Progres Digitalisasi Autentikasi • COVID Taskforce Report • Authentication Digitalization Progress

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	25 Februari 2022 February 25, 2022	• Pembahasan Surat Jawaban kepada Dirjen Anggaran • Pembahasan Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Individual Direksi Tahun 2021 dan Penyusunan KPI Individual Direksi Tahun 2022 • Discussion of Letter of Reply to Director General of Budget • Discussion on the Achievement of Individual Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors in 2021 and Preparation of Individual KPI of the Board of Directors in 2022
12	1 Maret 2022 March 1, 2022	• Laporan Satgas COVID • Pembahasan Persiapan Rekrutmen • Pra-exit meeting *Self Assessment* GCG PT ASABRI (Persero) Tahun 2021 dan Penyampaian Hasil Sementara pada *Area of Improvement* oleh Tim *Self Assessment* • COVID Taskforce Report • Discussion on Recruitment Preparation • Pre-exit meeting of PT ASABRI (Persero) GCG Self Assessment 2021 and Submission of Interim Results on Areas of Improvement by the Self Assessment Team
13	10 Maret 2022 March 10, 2022	• Rencana Pemulihan Aset • Laporan Satgas COVID • Persetujuan Direksi atas Rencana Rekrutmen • Asset Recovery Plan • COVID Taskforce Report • Board of Directors Approval of Recruitment Plan
14	15 Maret 2022 March 15, 2022	Progres Digitalisasi Autentikasi Authentication Digitalization Progress
15	21 Maret 2022 March 21, 2022	• Pembahasan Remunerasi Karyawan • Pembahasan TJSL • Discussion on Employee Remuneration • Discussion on CSR
16	23 Maret 2022 March 23, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
17	25 Maret 2022 March 25, 2022	Pembahasan Rencana Rapat Koordinasi Mitra Bayar dan *Awarding* Kancab Terbaik Discussion of Plan for Pay Partner Coordination Meeting and Awarding the Best Branch Office
18	29 Maret 2022 March 29, 2022	• Penyampaian Hasil Pendapat Hukum atas Perjanjian Sewa Menyewa Gedung ASABRI di Pintu Air, Jakpus • Pembahasan Tindak Lanjut Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Dalam Pembangunan Ruko di Perumahan Bulan Terang Utama Malang • Legal Opinion Presentation Legal Opinion on the Lease Agreement of ASABRI Building at Pintu Air, Central Jakarta • Discussion on the Follow-up of the Minutes of the Agreement on the Settlement of Obligations in the Construction of Shophouses in Bulan Terang Utama Housing Malang
19	7 April 2022 April 7, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
20	12 April 2022 April 12, 2022	• Progres Penyusunan Annual Report Tahun Buku 2021 • Tindak Lanjut Pembahasan Program TJSL • Pembahasan Persiapan Rencana Rekrutmen • Progress of Annual Report Preparation for Financial Year 2021 • Follow-up Discussion on the CSR Program • Discussion of Recruitment Plan Preparation
21	18 April 2022 April 18, 2022	Permasalahan Penggantian Panel Listrik Gedung Kanpus ASABRI dan Persiapan Pembayaran THR Peserta Problems with the Replacement of the Electric Panel of the Kanpus ASABRI Building and Preparation for the Payment of Participants' THR
22	19 April 2022 April 19, 2022	• Pembahasan Remunerasi Karyawan • Pembahasan Evaluasi Kerja Sama Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) dengan Taspen Life • Discussion of Employee Remuneration • Discussion on the Evaluation of Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) Cooperation with Taspen Life
23	25 April 2022 April 25, 2022	Penyampaian Laporan Rekrutmen Recruitment Report Presentation
24	26 April 2022 April 26, 2022	• Progres Pemulihan Aset • Progres Digitalisasi Autentikasi • Penyampaian Pemetaan Risiko BUMN • Penyampaian Laporan Profil Risiko • Asset Recovery Progress • Authentication Digitalization Progress • Submission of SOE Risk Mapping • Submission of Risk Profile Report

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
25	27 April 2022 April 27, 2022	• Progres Pemulihan Aset • Progres Digitalisasi Autentikasi • Laporan Satgas COVID • Asset Recovery Progress • Authentication Digitalization Progress • COVID Taskforce Report
26	11 Mei 2022 May 11, 2022	Laporan Satgas COVID-19 COVID-19 Taskforce Report
27	17 Mei 2022 May 17, 2022	• Progres Digitalisasi Autentikasi • Pembahasan *Individual Account* • Pembahasan Kajian Kesejahteraan Peserta • Progres Pemulihan Aset • Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemetaan Korporasi • Pembahasan Evaluasi KAP
28	18 Mei 2022 May 18, 2022	Laporan Rekrutmen Recruitment Report
29	24 Mei 2022 May 24, 2022	• Progres *Individual Account* • Proyeksi Kinerja 2022 • Individual Account Progress • 2022 Performance Projection
30	25 Mei 2022 May 25, 2022	• Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres Pemulihan Aset • Laporan Satgas COVID • Authentication Digitalization Progress • Asset Recovery Progress • COVID Taskforce Report
31	2 Juni 2022 June 2, 2022	• Progres Digitalisasi Autentikasi • *Individual Account* • Progres Pemulihan Aset • Authentication Digitalization Progress • Individual Account • Asset Recovery Progress
32	7 Juni 2022 June 7, 2022	• Pembahasan Renovasi Eks BNC Lantai 1 • Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres *Individual Account* • Laporan Pelaksanaan Rekutmen • Discussion on Renovation of the 1st Floor of Former BNC • Authentication Digitalization Progress • Individual Account Progress • Recruitment Implementation Report
33	10 Juni 2022 June 10, 2022	• Progres Pemulihan Aset • Pembahasan Awal Rencana Kegiatan HUT ASABRI • Asset Recovery Progress • Preliminary Discussion of ASABRI Anniversary Activity Plan
34	15 Juni 2022 June 15, 2022	• Pembahasan Renovasi Eks BNC • Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sementara oleh Kementerian Keuangan RI • Discussion on Renovation of Former BNC • Discussion of the results of a temporary Specific Purpose Examination by the Indonesian Ministry of Finance
35	16 Juni 2022 June 16, 2022	• Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres *Individual Account* • Pembahasan Pemilihan Kancab Terbaik • Progres Pemulihan Aset • Authentication Digitalization Progress • Individual Account Progress • Discussion on Best Branch Selection • Asset Recovery Progress
36	21 Juni 2022 June 21, 2022	• Pengelolaan SDM • Progres *Individual Account* • Progres Digitalisasi Autentikasi • HR Management • Individual Account Progress • Authentication Digitalization Progress

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
37	22 Juni 2022 June 22, 2022	• Pembahasan Kajian THT • Progres Pemulihan Aset • THT Review Discussion • Asset Recovery Progress
38	23 Juni 2022 June 23, 2022	Laporan Rekrutmen Tenaga Kerja PT ASABRI (Persero) Tahun 2022 Tahap 4 (MCU) PT ASABRI (Persero) Workforce Recruitment Report 2022 Phase 4 (MCU)
39	28 Juni 2022 June 28, 2022	• Finalisasi Kajian THT, JKK, dan JKm • Progres Digitalisasi Autentikasi • Progres *Individual Account* • Finalization of THT, JKK, and JKm Studies • Authentication Digitalization Progress • Individual Account Progress
40	29 Juni 2022 June 29, 2022	• Laporan Satgas COVID-19 • Pemilihan KancabTerbaik Tahun 2022 • COVID-19 Taskforce Report • Selection of the Best Branch Office in 2022
41	29 Juni 2022 June 29, 2022	Expose Laporan Hasil Audit SAI dalam rangka Penutupan *Strategic Business Unit* (SBU) SAI Audit Report Expose in the Context of Strategic Business Unit (SBU) Closing
42	5 Juli 2022 July 5, 2022	• Pembahasan Kegiatan HUT ASABRI • Progres *Individual Account* • Progres Pemulihan Aset • Discussion of ASABRI Anniversary Activities • Individual Account Progress • Asset Recovery Progress
43	6 Juli 2022 July 6, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
44	13 Juli 2022 July 13, 2022	• Pembahasan Revisi RKAP 2022 dan RJPP • Pembahasan Penyesuaian Peta Proses Bisnis • Discussion of the Revision of Work Plan and Corporate Budget 2022 and Long-Term Business Plan • Discussion of the Business Process Map Adjustment
45	20 Juli 2022 July 20, 2022	Permohonan Persetujuan RUPS Emiten PCAR dan ICON Application for Approval of GMS of Issuers PCAR and ICON
46	26 Juli 2022 July 26, 2022	• Progress Digitalisasi Autentikasi • Progress *Individual Account* • Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2022 • Pembahasan Pemasaran Kembali Produk Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) JKK JKm di Seluruh Kantor Cabang ASABRI dan Penyampaian Progress Kerja Sama *Merchant* • Authentication Digitalization Progress • Individual Account Progress • Discussion on the Revision of Work Plan and Corporate Budget 2022 • Discussion of Remarketing Taspen Proteksi Beasiswa (TPB) JKK JKm Products in All ASABRI Branch Offices and Submission of Merchant Cooperation Progress
47	3 Agustus 2022 August 3, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
48	5 Agustus 2022 August 5, 2022	Rapat dengan Koperasi Karyawan ASABRI Sejahtera Meeting with ASABRI Sejahtera Employee Cooperative
49	9 Agustus 2022 August 9, 2022	• Pembahasan Revisi RKAP 2022 • Progres Digitalisasi Autentikasi • Discussion of the Revision of the Work Plan and Corporate Budget 2022 • Authentication Digitalization Progress
50	10 Agustus 2022 August 10, 2022	• Pembahasan *Master Plan* TI • Pembahasan Gugatan Pembatalan Kesepakatan Bersama dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Antara PT ASABRI (Persero) dengan Sutrisno Lukito Disastro • Progres Pemulihan Aset • Discussion of IT Master Plan • Discussion of Lawsuit on Cancellation of Joint Agreement and Acknowledgment of Debt with Guarantee Between PT ASABRI (Persero) and Sutrisno Lukito Disastro • Asset Recovery Progress

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
51	16 Agustus 2022 August 16, 2022	Program Pengenalan Perseroan kepada Wakil Komisaris Utama Company Introduction Program to the Vice President Commissioner
52	16 Agustus 2022 August 16, 2022	• Pelaksanaan Kegiatan *Risk Maturity Assessment* Tahun 2022 • Progres Digitalisasi Autentikasi • Laporan Satgas COVID • Laporan Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2022 • Implementation of Risk Maturity Assessment Activities in 2022 • Progress of Authentication Digitalization • COVID Taskforce Report • Employee Recruitment Progress Report 2022
53	19 Agustus 2022 August 19, 2022	Pembahasan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 PT ASABRI (Persero) Discussion on the Revision of the Company Work Plan and Budget 2022 of PT ASABRI (Persero)
54	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Tindak Lanjut Usulan Revisi RKAP Tahun 2022 Follow-up of the proposed revision of Work Plan and Corporate Budget 2022
55	23 Agustus 2022 August 23, 2022	• Laporan Rekrutmen; Progres Digitalisasi Autentikasi; • Progres *Individual Account;* • Perkembangan Perjanjian Kerja Sama dengan YPPSDP. • Recruitment Report; Authentication Digitalization Progress • Individual Account Progress • Progress of Cooperation Agreement with YPPSDP
56	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Tindak Lanjut Revisi RKAP 2022 Follow-up of the revision of Work Plan and Corporate Budget 2022
57	30 Agustus 2022 August 30, 2022	Digitalisasi Autentikasi Authentification Digitalization
58	6 September 2022 September 6, 2022	Digitalisasi Autentikasi Authentification Digitalization
59	7 September 2022 September 7, 2022	Pembahasan *Week for Employee* Discussion on Week for Employee
60	20 September 2022 September 20, 2022	Laporan Risk Maturity Assesment Tahun 2022 Risk Maturity Assessment Report of 2022
61	23 September 2022 September 23, 2022	Pembahasan Pengambilan Keputusan Terhadap RDPST Asia Raya Kapital Discussion on Resolution on Asia Raya Kapital RDPST
62	27 September 2022 September 27, 2022	Digitalisasi Autentikasi Authentification Digitalization
63	29 September 2022 September 29, 2022	• Laporan Satgas COVID • Pembahasan Komite Manajemen Risiko dan ALM • COVID Taskforce Report • Risk Management and ALM Committee Discussion
64	5 Oktober 2022 October 5, 2022	Strategi Pencapaian Kinerja Keuangan 2022 dan Pembahasan Kontributor Signifikan untuk RKAP 2023 Strategy to Achieve the 2022 Financial Performance and Discussion of Significant Contributors for the 2023 Work Plan and Corporate Budget
65	11 Oktober 2022 October 11, 2022	Digitalisasi Autentikasi Authentification Digitalization
66	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Perkembangan Kinerja Koperasi Karyawan ASABRI Sejahtera Performance Development of ASABRI Sejahtera Employee Cooperative
67	14 Oktober 2022 October 14, 2022	Pembahasan Sikap ASABRI dalam RUPUP RDPST Asia Raya Kapital Performance Development of ASABRI Sejahtera Employee Cooperative
68	18 Oktober 2022 October 18, 2022	• Transaksi Sewa-Menyewa Aset Tetap • Pembahasan Program TJSL Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun 2022 • Evaluasi Integrasi Investpro-Axapta • *Review* Dana Pensiun Karyawan • Kesejahteraan Karyawan • Pola Karier. • Lease Transaction of Fixed Assets • Discussion of CSR Program for Funding Micro and Small Enterprises (PUMK) in 2022 • Evaluation of Investpro-Axapta Integration • Review of Employee Pension Fund • Employee Welfare • Career Pattern

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
69	19 Oktober 2022 October 19, 2022	Strategi Pemenuhan Karyawan Tahun 2022 Tahap 2 Employee Fulfillment Strategy 2022 Phase 2
70	25 Oktober 2022 October 25, 2022	• *Self Assessment* Pemetaan Klasifikasi Risiko PT ASABRI terhadap Permen BUMN PER- 5/MBU/09/2022; • Penyampaian BCM *Charter*. • Self Assessment of PT ASABRI Risk Classification Mapping towards SOE Regulation PER- 5/MBU/09/2022 • Presentation of BCM Charter
71	7 November 2022 November 7, 2022	• Tindak Lanjut Hasil Audit Gedung Kancab Semarang; • Pembahasan Gedung Pintu Air; • Evaluasi Surat Perjanjian antara ASABRI dengan PT MCO Jaya tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan serta Penerapan Sistem Autentikasi Digital. • Follow-up on Audit Results of Semarang Branch Building • Discussion on the Water Gate Building • Evaluation of the Agreement Letter between ASABRI and PT MCO Jaya regarding the Development and Implementation of Digital Authentication System
72	8 November 2022 November 8, 2022	Tindak Lanjut Gugatan Perkara Perdata Sutrisno Lukito Disastro Follow-up of Sutrisno Lukito Disastro's Civil Case Lawsuit
73	14 November 2022 November 14, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
74	15 November 2022 November 15, 2022	Progres Digitalisasi Autentikasi & Pembahasan *Executive Summary* Tata Kelola Teknologi Informasi Progress of Authentification Digitalization & Discussion of Executive Summary of Information Technology Governance
75	18 November 2022 November 18, 2022	Laporan Satgas COVID COVID Taskforce Report
76	5 Desember 2022 December 5, 2022	Strategi Rekrutmen Tahun 2023 dan Usulan Besaran BOP dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2023 Recruitment Strategy for 2023 and Proposed Amount of BOP and Unit Cost of Retirement Benefit Payment for 2023
77	6 Desember 2022 December 6, 2022	Rapat Direksi dengan Agenda: Pembahasan Lanjutan Strategi Rekrutmen Tahun 2023 Board of Directors Meeting with Agenda: Continued Discussion of Recruitment Strategy for 2023
78	6 Desember 2022 December 6, 2022	Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 PT ASABRI (Persero) Discussion of the Proposed Work Plan and Corporate Budget (RKAP) 2023 of PT ASABRI (Persero)
79	13 Desember 2022 December 13, 2022	• Finalisasi Adendum Kontrak Autentikasi Digital • Pembahasan Manajemen SDM • Penyesaian RDT MNC *Asset Management* • Finalization of Digital Authentication Contract Addendum • HR Management Discussion • MNC Asset Management RDT Completion
80	16 Desember 2022 December 16, 2022	• Pembahasan Persiapan dan Pengajuan Saksi dan Ahli dalam Gugatan Sutrisno Lukito Disastro untuk Perkara 437/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM • Laporan Perkembangan Persidangan atas Gugatan Masdawaty Silitonga kepada PT ASABRI (Persero) selaku Tergugat VII di PN Sibolga Nomor 22 • Discussion of Preparation and Submission of Witnesses and Experts in Sutrisno Lukito Disastro's Lawsuit for Case 437/Pdt.G/2022/PN.JKT.TIM • Progress Report on the Trial of Masdawaty Silitonga's Lawsuit against PT ASABRI (Persero) as Defendant VII in Sibolga District Court Number 22
81	29 Desember 2022 December 29, 2022	Pembahasan Usulan PMN Discussion of PMN Proposal

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja *(Board Manual),* Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun pelaksanaan rapat meliputi rapat internal dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat ini juga berperan sebagai forum pengambilan keputusan demi mencapai keputusan dan kesepakatan yang kolektif dengan agenda pembahasan berpusat pada tindak lanjut rencana dan evaluasi bisnis yang dijalankan.

Seluruh agenda dan keputusan rapat akan dituang ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* untuk kemudian ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi baik yang menghadiri rapat maupun berhalangan untuk hadir. Sepanjang tahun 2022, Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak 81 (delapan puluh satu) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Frequency and Attendance of the Board of Directors in Meetings

As outlined in the Board Manual, the Board of Directors is required to hold regular meetings at least once a month. These meetings include both internal discussions and joint sessions with the Board of Commissioners. They serve as a platform for making collective decisions and reaching agreements, focusing on business plan follow-ups and evaluations.

All meeting agendas and decisions are recorded in meeting minutes. In cases of dissenting opinions, these are documented and signed by the meeting chairperson. The minutes are then distributed to all Board of Directors members, whether they attended the meeting or not. Throughout 2022, the Board of Directors held a total of 81 meetings, with the following attendance details:

Periode 1 Januari 2021 - 25 Januari 2022
Period of January 1, 2022 – January 25, 2022

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Frequency of Attendance	**Persentase Tingkat Kehadiran** Percentage of Attendance Rate
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	6	6	100%
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	6	6	100%
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	6	6	100%
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	6	6	100%

Periode 25 Januari 2022 - 31 Desember 2022
Period of January 25, 2022–December 31, 2022

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Frekuensi Kehadiran** Frequency of Attendance	**Persentase Tingkat Kehadiran** Percentage of Attendance Rate
Wahyu Suparyono	Direktur Utama President Director	75	75	100%
Jeffry Haryadi P. Manullang	Direktur Investasi Director of Investment	75	75	100%
Helmi Imam Satriyono	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	75	75	100%
Sri Ainin Muktirizka	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	75	75	100%
Khaidir Abdurrahman*	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	75	75	100%

* efektif sejak 25 Januari 2022 | Effective since January 25, 2022

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan.
5. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara tersebut.
6. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
8. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
9. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif hasil dan pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan suara terbanyak dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Suara blanko *(abstain)* dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara dan yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.
    a. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi. Standar waktu tersebut ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler.

Decision-Making Mechanism in the Board of Directors Meeting

1. All decisions by the Board of Directors are made during their meetings.
2. Decisions can also be reached outside of meetings if all members agree on the method and content of the resolution.
3. For voting, a Board member may be represented at the meeting only by another Board member with written authorization for that purpose.
4. A Board of Directors meeting is valid and can make binding decisions when attended by more than half of the total members of the Board of Directors or their authorized representatives.
5. Regarding other agenda items, the Board of Directors meeting cannot make decisions unless all members or their authorized representatives are present and approve adding the item to the agenda.
6. All decisions at Board of Directors meetings are reached through consensus and deliberation.
7. If consensus cannot be reached, decisions are made by a simple majority vote.
8. In case of an equal number of votes in favor and against, the decision aligns with the Chairman's opinion, considering accountability provisions.
9. If more than two alternative proposals are considered, and no proposal receives more than half of the total votes, a re-election is conducted with the top two proposals.
10. Abstaining votes are counted as approval of meeting resolutions.
11. Invalid votes are disregarded in determining the total votes cast at the meeting.
12. The Board of Directors establishes the decision-making mechanism for corporate actions in compliance with legal regulations and in a timely manner.
    a. A time standard is in place for the promptness of Board of Directors decision-making. This standard is initiated when a proposed action, along with all relevant supporting documents and information, is presented in a Board of Directors Meeting or submitted in writing for circular decisions.

b. Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal tujuh hari sejak disahkan/ditandatangani.

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan ketentuan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS untuk kemudian memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk menilai kinerja Direksi selama tahun buku dengan memperhatikan batasan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun individual berdasarkan target pencapaian dari aspek operasional, keuangan, dan administrasi yang tertuang dalam KPI yang sudah disusun dan disepakati bersama pada awal tahun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

KPI Manajemen dihitung berdasarkan lima perspektif yaitu Nilai Sosial dan Ekonomi untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Penilaian KPI Manajemen sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 94,18. Penilaian kinerja Direksi turut diukur dari hasil *assessment* GCG di mana salah satu aspek penilaiannya adalah Direksi. Hasil *self assessment* GCG tahun 2021 aspek Direksi menunjukkan capaian skor sebesar 32,237 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 92,104%.

b. There is also a provision regarding the timeliness of communicating such decisions to the organizational levels below the Board of Directors. This communication should occur within a maximum of seven days from the time it is authorized or signed.

In cases where the Board of Directors makes a binding decision during a physical Board of Directors Meeting, the decision must be approved in writing by all Board members. Such a decision holds the same legal weight as decisions made in physical Board of Directors Meetings.

Assessment of the Performance of the Board of Directors

The execution of the Company's management responsibilities by the Board of Directors must be accounted for in the General Meeting of Shareholders (GMS). This provides an opportunity for Shareholders to evaluate the performance of the Board of Directors during the fiscal year, in accordance with the limits and provisions set forth in the applicable laws and regulations.

The assessment of individual and collective performance of Board of Directors members is conducted by the Board of Commissioners. It is based on achievement targets from operational, financial, and administrative perspectives, which are outlined in the Key Performance Indicators (KPIs). These KPIs are established and agreed upon at the beginning of the year, aligning with the specific duties and responsibilities of each Board of Directors member.

The Management KPI is calculated based on five perspectives: Social and Economic Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Enhancement, and Talent Development. The Management KPI assessment as of the end of 2021 stands at 94.18. Additionally, the performance of the Board of Directors is also evaluated through the Corporate Governance (GCG) assessment. One aspect of this assessment focuses on the Board of Directors. The results of the self-assessment for the year 2021 in the aspect of the Board of Directors indicate a score of 32.237, with a weight of 35.000, equivalent to an achievement percentage of 92.104%.

Adapun indikator-indikator yang dinilai dalam pelaksanaan tugas Direksi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana strategis Perseroan secara akurat.
2. Pemenuhan target kinerja yang ditetapkan.
3. Pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
4. Pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
5. Menjalin hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan GCG.
6. Pengelolaan potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan Manajemen di bawah Direksi.
7. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal yang berkualitas.
8. Pelaksanaan fungsi Sekretariat Perusahaan secara efektif.

Pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan selanjutnya menjadi dasar penilaian bagi RUPS untuk memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge)* dan penentuan besaran remunerasi Direksi.

The performance of the Board of Directors is assessed based on various aspects, including:

1. Accurate formulation of the Company's strategic plans.
2. Achievement of predefined performance targets.
3. Oversight of operational and financial controls in line with the Company's plans and policies.
4. Compliance with prevailing laws, regulations, and the Articles of Association in managing the Company.
5. Establishment of value-added relationships for the Company and its stakeholders, following GCG regulations.
6. Management of potential conflicts of interest among Board of Directors members and Management under the Board of Directors.
7. Implementation of a high-quality internal control function.
8. Effective execution of the Company Secretariat function.

The reporting on management accountability serves as the basis for assessment during the General Meeting of Shareholders (GMS). It determines whether to grant a release of responsibility (acquit et de charge) and sets the remuneration of the Board of Directors.

Komite dan Organ di bawah Direksi
Committees and Organs under the Board of Directors

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. ASABRI memiliki Komite di bawah Direksi sebanyak 5 (lima) Komite antara lain Komite Investasi, Komite Produk dan Aktuaria, Komite Manajemen Risiko dan *Asset Liability Management*, Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Komite Karier

The Board of Directors is supported by the Corporate Secretary and various Committees. These Committees are responsible for providing advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors. ASABRI has established 5 (five) Committees under the purview of the Board of Directors, including the Investment Committee, Product and Actuarial Committee, Risk Management and Asset Liability Management Committee, Social and Environmental Responsibility Committee, and Career Committee.

Komite Investasi

Komite Investasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas sistem perencanaan, pengalokasian, transaksi, dan evaluasi penyelenggaraan Investasi Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Direksi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KEP/IN.01/49-AS/IV/2022 yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata kerja, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan Komite Investasi.

Investment Committee

The Investment Committee is formed to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the Company's investment planning, allocation, transaction, and evaluation system. In carrying out its duties, the Committee refers to the Decree of the Board of Directors Number KEP/IN.01/49-AS/IV/2022, which regulates the position, duties and responsibilities, authority, work procedures, and decision-making principles of the Investment Committee.

Struktur Keanggotaan Komite Investasi / **Membership Structure of the Investment Committee**

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
1	Direktur Investasi Director of Investment	Ketua Chairman
2	Kepala Manajemen Portofolio Head of Portfolio Management	Sekretaris (merangkap Anggota Inti) Secretary (and Core Member)
3	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Anggota Inti Core Member
4	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Anggota Inti Core Member
5	Kepala Divisi Pasar Modal dan Pasar Uang Head of Capital Market and Money Market Division	Anggota Inti Core Member
6	Kepala Divisi. Pengembangan Bsinis Head of Business Development Division	Anggota Inti Core Member
7	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Head of Compliance and Legal Division	Anggota Inti Core Member
8	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Anggota Inti Core Member
9	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Anggota Non Inti Non-Core Member
10	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division	Anggota Non Inti Non-Core Member

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
11	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Anggota Non Inti Non-Core Member
12	Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division	Anggota Non Inti Non-Core Member

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Investasi

Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Melakukan *review* terhadap rencana dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
2. Melakukan *review* dan menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan atas proposal investasi strategis kepada Direksi;
3. Memonitor dan memberikan masukan terhadap dinamika kegiatan pengelolaan investasi agar senantiasa sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi Perusahaan;
4. Melakukan *review* dan evaluasi atas portofolio dan pencapaian investasi secara berkala, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan hasil *review* dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Direksi;
6. Melakukan pembahasan usulan kebijakan investasi, *strategic asset allocation* dan *tactical asset allocation* dari Direktur Investasi.

Wewenang Komite Investasi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi mempunyai wewenang untuk:
1. Mengakses dan meminta data, catatan, dan informasi tentang aktivitas pengelolaan dana investasi;
2. Memberikan pendapat secara tertulis atas kegiatan pengelolaan dana investasi;
3. Melibatkan/menunjuk konsultan investasi yang profesional dan independen, di luar anggota Komite Investasi, apabila diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
4. Menyetujui atau menolak rencana investasi yang dibahas dalam Rapat Komite Investasi;
5. Membahas dan memutuskan penanganan masalah instrumen investasi yang masuk dalam pengawasan khusus.

Rapat Komite Investasi

Komite Investasi mengadakan rapat secara berkali paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2022, Komite Investasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Investment Committee

The Investment Committee has the following duties and responsibilities:
1. Review the Company's established investment plans and policies.
2. Evaluate and provide recommendations, suggestions, or proposals on strategic investment initiatives to the Board of Directors.
3. Monitor and offer input on the dynamics of investment management activities, ensuring alignment with the Company's investment policies and strategies.
4. Regularly assess the investment portfolio and achievements, with a minimum frequency of once every three months.
5. Report the findings of reviews and evaluations and offer recommendations on matters requiring the Board of Directors' attention.
6. Discuss investment policy proposals, strategic asset allocation, and tactical asset allocation as presented by the Investment Director.

Authority of the Investment Committee:

In performing its duties, the Investment Committee has the authority to:
1. Access and request data, records, and information regarding investment fund management activities.
2. Provide written opinions on investment fund management activities.
3. Engage or appoint professional and independent investment consultants, separate from the Investment Committee members, as needed to assist in fulfilling their responsibilities.
4. Approve or reject investment plans discussed in Investment Committee Meetings.
5. Discuss and make decisions concerning the management of investment instruments under special security.

Investment Committee Meeting

The Investment Committee holds meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year and/or at any time as needed. In 2022, the Investment Committee held 7 (seven) meetings with the following details:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	3 Februari 2022 February 3, 2022	Pembahasan Skema Restrukturisasi Aset Non Produktif Discussion on the Non-Productive Asset Restructuring Scheme
2	7 Juli 2022 July 7, 2022	Pembahasan Mengenai Prognosa Dana dan Hasil Q3 dan Q4 2022 Discussion on Prognosis of Funds and Results in the Q3 and Q4 of 2022
3	25 Juli 2022 July 25, 2022	Pembahasan Rencana Penjualan Tanah Jimbaran Hijau di Bali Discussion on Jimbaran Hijau Land Sales Plan in Bali
4	5 Agustus 2022 August 5, 2022	Pembahasan *Engagement Letter* Mandiri Sekuritas terkait Jasa Konsultasi Restrukturisasi Aset Non Produktif Discussion on Engagement Letter from Mandiri Sekuritas concerning Non-Productive Assets Restructuring Consulting Services
5	29 Agustus 2022 August 29, 2022	Pembahasan Penyempurnaan Metodologi Evaluasi Saham Discussion on the Refinement of Stock Evaluation Methodology
6	7 November 2022 November 7, 2022	Pembahasan Mengenai Usulan Penetapan Harga Penjualan Cassie Rukos Discussion on the Proposed Sales Price of Cassie Rukos
7	1 Desember 2022 December 1, 2022	Tindak Lanjut Rapat Lanjutan Pengelolaan Dana UPSL Tahap I Follow-up Meeting on UPSL Fund Management Phase I

Komite Produk dan Aktuaria

Komite Produk dan Aktuaria merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas sistem perencanaan, analisis, dan evaluasi terhadap produk atau program asuransi yang dikelola termasuk potensi pengembangannya, serta hal-hal strategis pada aspek aktuaria. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Produk dan Aktuaria mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KEP/AP.01/43-AS/IV/2022 yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata kerja, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan Komite Produk dan Aktuaria.

Product and Actuarial Committee

The Product and Actuarial Committee is formed to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the planning system, analysis, and evaluation of insurance products or programs managed, including their potential development and strategic matters on actuarial aspects. In carrying out its duties, the Product and Actuarial Committee refers to the Decree of the Board of Directors Number KEP/AP.01/43-AS/IV/2022, which regulates the position, duties and responsibilities, authority, work procedures, and decision-making principles of the Product and Actuarial Committee.

Struktur Keanggotaan Komite Produk dan Aktuaria

Membership Structure of the Product and Actuarial Committee

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
1	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Ketua Chairman
2	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division	Sekretaris (merangkap Anggota Inti) Secretary (and Core Member)
3	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Anggota Inti Core Member
4	Direktur Investasi Director of Investment	Anggota Inti Core Member
5	Kepala Divisi Layanan Head of Service Division	Anggota Inti Core Member
6	Kepala Divisi Kepesertaan Head of Participation Division	Anggota Inti Core Member
7	Kepala Divisi Manajemen Portofolio Head of Portfolio Management Division	Anggota Inti Core Member
8	Kepala Divisi Pengembangan Bsinis Head of Business Development Division	Anggota Inti Core Member
9	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Anggota Inti Core Member

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
10	Direktur SDM dan Hukum Director of HR and Legal Affairs	Anggota Non Inti Non-Core Member
11	Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division	Anggota Non Inti Non-Core Member
12	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Anggota Non Inti Non-Core Member
13	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Kepala Head of Compliance and Legal Division Kepatuhan dan Hukum	Anggota Non Inti Non-Core Member

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk dan Aktuaria

Komite Produk dan Aktuaria memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan analisis atau *review* terhadap produk atau program asuransi yang diselenggarakan Perusahaan baik peraturan pelaksanaan, penetapan harga, *monitoring experience* serta potensi pengembangannya;
2. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Perusahaan dalam hal kesesuaian antara aset dan liabilitas;
3. Melakukan analisis terhadap proyeksi keuangan Perusahaan termasuk perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa depan;
4. Melakukan penilaian dan rencana tindak lanjut atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal Perusahaan;
5. Melakukan penilaian kualitas data statistik Perusahaan (data kepesertaan, premi, dan klaim);
6. Melakukan penilaian atas Aspek Aktuaria antara lain namun tidak terbatas pada asumsi terkait tingkat bunga aktuaria dan tingkat bunga pengembangan serta metode perhitungan.

Wewenang Komite Produk dan Aktuaria

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Produk dan Aktuaria mempunyai wewenang untuk:

1. Mengakses dan meminta data, catatan, dan informasi terkait, antara lain namun tidak terbatas pada produk atau program asuransi yang diselenggarakan oleh Perusahaan, pengelolaan keuangan, dan data kepesertaan;
2. Memberikan pendapat secara tertulis atas permasalahan strategis di bidang Produk dan Aktuaria;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melibatkan tenaga ahli, konsultan, atau pihak independen lainnya di luar Komite Produk dan Aktuaria guna membantu pelaksanaan tugas Komite Produk dan Aktuaria dengan persetujuan tertulis dari Direktur Utama yang akan dibebankan pada biaya Perusahaan; dan

Duties and Responsibilities of the Product and Actuarial Committee

The Product and Actuarial Committee has the following duties and responsibilities:

1. To analyze or review insurance products or programs held by the Company, including implementation regulations, pricing, monitoring experience, and potential development;
2. To evaluate the Company's financial management in terms of the suitability between assets and liabilities;
3. To analyze the Company's financial projections, including to estimate the Company's ability to fulfill future obligations;
4. To make assessments and follow-up plans on the Company's financial health level and capital adequacy;
5. To assess the quality of the Company's statistical data (membership, premium, and claims data);
6. To assess the Actuarial Aspects, including but not limited to assumptions related to actuarial interest rates, development interest rates, and calculation methods.

Authority of Product and Actuarial Committee

In carrying out its duties, the Product and Actuarial Committee has the authority to:

1. Access and request data, records, and related information, including but not limited to financial management, membership data, and insurance products or programs organized by the Company;
2. Provide written opinions on strategic issues on Products and Actuarial matters;
3. Recommend the Board of Directors to involve experts, consultants, or other independent parties outside the Product and Actuarial Committee members to assist them in the implementation of the duties of the Product and Actuarial Committee with written approval from the President Director, which will be charged at the Company's expense; and

4. Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk membentuk tim kelompok kerja guna membantu pelaksanaan tugas Komite Produk dan Aktuaria dalam rangka terdapat penyelesaian program kerja yang bersifat strategis dan bertujuan untuk peningkatan kinerja Perusahaan.

4. Recommend the Board of Directors to form a working group team to assist them in implementing their duties if there is completion of strategic work programs that aim to improve the Company's performance.

Rapat Komite Produk dan Aktuaria

Komite Produk dan Aktuaria mengadakan rapat secara berkali paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2022, Komite Produk dan Aktuaria telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

Product and Actuarial Committee Meeting

The Product and Actuarial Committee holds meetings at least 2 (two) times in 1 (one) year and/or at any time as needed. In 2022, the Product and Actuarial Committee has held 6 meetings with the following details.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	5 April 2022 April 5, 2022	Pembahasan *Individual Account* Discussion of Individual Account
2	20 April 2022 April 20, 2022	Pembahasan *Individual Account* Discussion of Individual Account
3	21 Oktober 2022 October 21, 2022	Kajian dan Tindak Lanjut PKS dengan Taspen Life tentang Produk TPB Review and Follow-up of Cooperative Agreement with Taspen Life on TPB Products
4	2 November 2022 November 2, 2022	Pembahasan Taspen Proteksi Beasiswa Discussion of Taspen Scholarship Protection
5	2 Desember 2022 December 2, 2022	Pembahasan Produk Taspen Dwiguna Sejahtera Discussion of Taspen Dwiguna Sejahtera Products
6	14 Desember 2022 December 14, 2022	Pembahasan Produk Taspen Dwiguna Sejahtera dan Housing Benefit Discussion of Taspen Dwiguna Sejahtera and Housing Benefit Products

Komite Manajemen Risiko dan *Asset Liability Management* (ALM)

Komite Manajemen Risiko dan *Asset Liability Management* (ALM) merupakan komite yang dibentuk dalam rangka untuk:

1. membantu Direksi dalam melaksanakan tanggung jawab terkait pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko termausk kebijakan, prosedur, profil risiko, dan kecukupan manajemen bisnis.
2. Membantu Direksi dalam mengelola aser dan liabilitas perusahaan terkait pemantauan dan optimalisasi pengelolaan aset dan liabilitas, termasuk penentuan kebijakan dan *contigency plan*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko dan ALM mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER/MR.04.02/20-AS/IX/2022 yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata kerja, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan Komite Manajemen Risiko dan ALM.

Risk Management and Asset Liability Management (ALM) Committee

The Risk Management and Asset Liability Management (ALM) Committee is formed to:

1. Assist the Board of Directors in carrying out its responsibilities related to monitoring the implementation of risk management, including policies, procedures, risk profiles, and the adequacy of business management;
2. Assist the Board of Directors in managing the company's assets and liabilities related to monitoring and optimizing the management of assets and liabilities, including determining policies and contingency plans.

In carrying out its duties, the Risk Management and ALM Committee refers to the Board of Directors Regulation Number PER/MR.04.02/20-AS/IX/2022, which regulates the position, duties and responsibilities, authority, work procedures, and decision-making principles of the Risk Management and ALM Committee.

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan ALM

Membership Structure of Risk Management and ALM Committee

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
1	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Ketua Chairman
2	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Sekretaris (merangkap Anggota Tetap) Secretary (and Permanent Member)
3	Direktur Investasi Director of Investment	Anggota Tetap Permanent Member
4	Direktur SDM dan Hukum Director of Human Resources and Legal	Anggota Tetap Permanent Member
5	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Anggota Tetap Permanent Member
6	Kepala Divisi Manajemen Portofolio Head of Portfolio Management Division	Anggota Tetap Permanent Member
7	Kepala Divisi Pasar Modal dan Pasar Uang Head of Capital Market and Money Market Division	Anggota Tetap Permanent Member
8	Kepala Divisi Aktuaria Head of Actuarial Division	Anggota Tetap Permanent Member
9	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Anggota Tetap Permanent Member
10	Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division	Anggota Tetap Permanent Member
11	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Head of Compliance and Legal Division	Anggota Tetap Permanent Member
12	Kepala Divisi Layanan Head of Service Division	Anggota Tetap Permanent Member
13	Kepala Divisi Pengembangan Bsinis Head of Business Development Division	Anggota Tetap Permanent Member
14	Kepala Divisi Strategi SDM Head of HR Strategy Division	Anggota Tetap Permanent Member
15	Kepala Divisi Strategi Korporasi Head of Corporate Strategy Division	Anggota Tetap Permanent Member
16	Kepala Divisi Layanan SDM Head of HR Services Division	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
17	Kepala Divisi Kepesertaan Head of Membership Division	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
18	Kepala Divisi Umum Head of General Division	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
19	Kepala Divisi Sistem Informasi Head of Information System Division	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
20	Kepala Divisi Umum Head of General Division	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
21	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member
22	Kepala Satuan Audit Internal Head of Internal Audit Unit	Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Member

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko dan ALM

Komite Manajemen Risiko dan ALM memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen risiko dan *asset liability* management perusahaan antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas penyusunan kebijakan, pedoman, strategi manajemen risiko dan *asset liability* management Perusahaan;
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dan menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis di luar prosedur normal;
4. memberikan pendapat atas profil risiko pada kategori Risiko Keuangan dan Risiko Non-Keuangan di antaranya namun tidak terbatas pada aspek Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi;
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi terhadap limit-limit setiap indikator risiko dan apabila terdapat pelampauan limit;
6. Memberikan pendapat atas skenario stress testing dan dampaknya terhadap kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan;
7. Melakukan pembahasan-pembahasan lainnya yang berhubungan dengan aset dan liabilitas.

Wewenang Komite Manajemen Risiko dan ALM

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko dan ALM mempunyai wewenang untuk:

1. Mengakses dan meminta data, catatan, dan informasi tentang aktivitas pengelolaan manajemen risiko, dan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.
2. Memberikan pendapat secara tertulis atas kegiatan pengelolaan manajemen risiko dan/atau pengelolaan aset dan liabilitas;
3. Melibatkan pihak lain di luar anggota Komite Manajemen Risiko dan ALM jika diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Rapat Komite Manajemen Risiko dan ALM

Komite Manajemen Risiko dan ALM mengadakan rapat secara berkali paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2022, Komite Manajemen Risiko dan ALM telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda Pembahasan Pengelolaan Dana UPSL Tahap 1.

Duties and Responsibilities of the Risk Management and ALM Committee

The Risk Management and ALM Committee has duties and responsibilities in managing the company's risk management and asset liability management, including:

1. To provide recommendations to the Board of Directors on the preparation of policies, guidelines, risk management strategies, and asset liability management of the company;
2. To provide recommendations to the Board of Directors on the improvement or refinement of risk management implementation based on the results of the evaluation of risk management implementation;
3. To provide recommendations to the Board of Directors and determine matters related to business decisions outside normal procedures;
4. To provide opinion on the risk profile in the category of Financial Risk and Non-Financial Risk, including but not limited to aspects of Strategic Risk, Operational Risk, Insurance Risk, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk;
5. To provide opinions and recommendations to the Board of Directors on the limits of each risk indicator and if there is a limit exceedance;
6. To provide opinion on stress testing scenarios and their impact on capital adequacy, liquidity, and profitability, as well as to recommend necessary corrective actions;
7. To conduct other discussions related to assets and liabilities.

Authority of the Risk Management and ALM Committee

In carrying out its duties, the Risk Management and ALM Committee has the authority to:

1. Access and request data, records, and information on risk management activities, company assets, and liabilities management.
2. Provide a written opinion on risk management activities and/or asset and liability management;
3. Involve other parties outside the Risk Management and ALM Committee members, if necessary, to assist in implementing its duties.

Risk Management and ALM Committee Meetings

The Risk Management and ALM Committee holds meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year and/or at any time as needed. In 2022, the Risk Management and ALM Committee held 1 (one) meeting with the agenda of Discussion of UPSL Fund Management Phase 1.

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan komite yang dibentuk dalam rangka untuk membantu Direksi dalam memastikan efektivitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TJSL mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER/MB.01/10-AS/VIII/2021 yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, tata kerja, dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan Komite TJSL

Social and Environmental Responsibility Committee

The Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) Committee is formed to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the Company's CSR planning, implementation, supervision, monitoring, and evaluation system. In carrying out its duties, the CSR Committee refers to the Board of Directors Regulation Number PER/MB.01/10-AS/VIII/2021, which regulates the position, duties and responsibilities, authority, work procedures, and decision-making principles of the CSR Committee.

Struktur Keanggotaan Komite TJSL

Membership Structure of the CSR Committee

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
1	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Ketua Chairman
2	Kapala Bidang TJSL Head of CSR Division	Sekretaris (merangkap Anggota Non Inti) Secretary (and Non-Core Member)
3	Kepala Divisi Strategi Korporasi Head of Corporate Strategy Division	Anggota Inti Core Member
4	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Head of Compliance and Legal Division	Anggota Inti Core Member
5	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	Anggota Inti Core Member
6	Kepala Divisi Umum Head of General Division	Anggota Non Inti Non-Core Member
7	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Anggota Non Inti Non-Core Member
8	Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division	Anggota Non Inti Non-Core Member

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TJSL

Komite TJSL memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan reviu, menyampaikan rekomendasi dan saran terhadap rencana keria dan kebijakan Program TJSL yang disusun oleh Perusahaan;
2. Melakukan analisis dan kajian proposal TJSL yang bersifat strategis untuk disampaikan kepada Direktur yang membawahi fungsi TJSL;
3. Memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan strategi TJSL Perusahaan kepada Direktur yang membawahi fungsi TJSL;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Duties and Responsibilities of the CSR Committee

The CSR Committee has the following duties and responsibilities:

1. To review and submit recommendations and suggestions on the work plan and policies of the CSR Programs prepared by the Company;
2. To analyze and review CSR proposals that are strategic in nature to be submitted to the Director in charge of the CSR function;
3. To provide recommendations on the Company's CSR policies and strategies to the Director in charge of the CSR function;
4. To monitor and evaluate the implementation of the CSR Program at least 1 (one) time in 1 (one) year.

Wewenang Komite TJSL

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TJSL mempunyai wewenang untuk:

1. Mengakses dan meminta data, catatan, dan informasi tentang aktivitas pengelolaan dana TJSL;
2. Memberikan pendapat secara tertulis atas kegiatan pengelolaan dana TJSL

Authority of the CSR Committee

In carrying out its duties, the CSR Committee has the authority to:

1. Access and request data, records, and information on the activities of the CSR fund management;
2. Provide a written opinion on the activities of the CSR fund management;

Rapat Komite TJSL

Komite TJSL mengadakan rapat secara berkali paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2022, Komite TJSL telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

CSR Committee Meeting

The CSR Committee holds meetings at least 2 (two) times in 1 (one) year and/or at any time as needed. In 2022, the CSR Committee held 5 (five) meetings with the following details:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	18 April 2022 April 18, 2022	Rapat Komite TJSL CSR Committee Meeting
2	21 Juli 2022 July 21, 2022	Pembahasan Dinamika Program TJSL 2022 dan RKA TJSL 2023 Discussion on Dynamics of CSR Program 2022 and Work Plan and Budget of CSR 2023
3	2 Desember 2022 December 2, 2022	Pembahasan PKS Program PUMK Kolaborasi ASABRI - BRI Discussion of the Cooperative Agreement on the ASABRI-BRI Collaboration for Micro Small Business Funding Program (PUMK
4	15 Desember 2022 December 15, 2022	Pembahasan PKS Program PUMK Kolaborasi ASABRI-BRI Discussion of the Cooperative Agreement on the ASABRI-BRI Collaboration for Micro Small Business Funding Program (PUMK)
5	28 Desember 2022 December 28, 2022	Pembahasan Berita Acara Penyaluran Dana Program PUMK Kolaborasi ASABRI-BRI Discussion of Minutes of Fund Distribution of the ASABRI-BRI Collaboration for Micro Small Business Funding Program (PUMK)

Komite Karier

Komite Karier memiliki tugas memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Direksi terkait penilaian kandidat yang akan diusulkan, sebagai berikut:

- Promosi dalam level manajerial untuk jabatan tujuan setingkat Kepala Bidang dan Kepala Kantor Cabang Tipe C;
- Demosi.

  Saran, pertimbangan,dan rekomendasi disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Karier mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER/PS.02/07-AS/IV/2022 yang mengatur tentang perencanaan dan pengisian formasi Sumber Daya Manusia.

Career Committee

The Career Committee has to provide advice, consideration, and recommendations to the Board of Directors regarding the assessment of candidates to be proposed, as follows:

- Promotion to managerial level for an objective position at the level of Head of Division and Head of Type C Branch Office;
- Demotion

  Suggestions, considerations, and recommendations are submitted to the Board of Directors.

In carrying out its duties, the Career Committee refers to the Board of Directors Regulation Number PER/PS.02/07-AS/IV/2022, which regulates the planning and filling of Human Resources formations.

Struktur Keanggotaan Komite Karier

Membership Structure of the Career Committee

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
1	Direktur SDM dan Hukum Director of HR and Legal Affairs	Pengarah Director
2	Kepala Divisi Strategi SDM Head of HR Strategy Division	Ketua Chairman
3	Kepala Bidang Karier, Remunerasi, dan Sistem Head of Career, Remuneration, and System Division	Sekretaris Secretary
4	Kepala Divisi Layanan SDM Head of HR Services Division	Anggota Member

No	Struktur Keanggotaan Membership Structure	Jabatan Position
5	Kepala Satuan Audit Internal Head of Internal Audit Unit	Anggota Member
6	Kepala Divisi Keuangan Head of Finance Division	Anggota Member
7	Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum Head of Compliance and Legal Division	Anggota Member

Rapat Komite Karier

Selama tahun 2022, Komite Karier mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Career Committee Meeting

In 2022, the Career Committee held 13 (thirteen) meetings, with the following details:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	27 Januari 2022 January 27, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
2	19 Mei 2022 May 19, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
3	20 Mei 2022 May 20, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
4	31 Mei 2022 May 31, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
5	17 Juni 2022 June 17, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
6	22 Juni 2022 June 22, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
7	24 Juni 2022 June 24, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
8	30 Juni 2022 June 30, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
9	8 Agustus 2022 August 8, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
10	12 September 2022 September 12, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
11	27 Oktober 2022 October 27, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
12	15 November 2022 November 15, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions
13	18 November 2022 November 18, 2022	Kandidat Pengisian Jabatan Manajerial Candidates to Fill Managerial Positions

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas operasional ASABRI, yakni sebagai pihak penghubung antara ASABRI dengan pihak luar atau eksternal terkait dengan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam menyediakan dan menyampaikan informasi penting mengenai ASABRI yang ditujukan kepada pihak seperti masyarakat umum atau untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham. Sebagai ujung tombak ASABRI, Sekretaris Perusahaan membawa citra Perusahaan di mata publik, sehingga perannya tersebut dapat mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan dengan pengelolaan program komunikasi yang efektif, baik komunikasi internal maupun eksternal kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi secara umum dengan kepada Direktur Utama secara langsung. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bidang Sekretariat Umum, serta Bidang Komunikasi dan Protokoler sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Seluruh cakupan tersebut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero).

The Corporate Secretary plays a crucial role in supporting ASABRI operational activities by serving as a liaison between ASABRI and external stakeholders in matters involving both parties. The Corporate Secretary is responsible for providing and disseminating essential information about ASABRI, addressing parties such as the general public, and meeting the needs of shareholders.As the face of ASABRI, the Corporate Secretary projects the company's image to the public, ensuring the consistent and sustainable establishment of a positive corporate image. This role is manifested through the management of an effective communication program, encompassing both internal and external communication with all stakeholders. In carrying out their duties, the Corporate Secretary reports to the Board of Directors in general, with a direct reporting line to the President Director. The responsibilities of the Corporate Secretary cover several areas, including Social and Environmental Responsibility, General Secretariat, and Communication and Protocol, in alignment with the requirements of task execution. The entire scope of responsibilities is conducted in compliance with the regulations specified in the Board of Directors' Regulation of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022, dated February 2, 2022, concerning the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero).

Profil Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan Sekretaris Perusahaan yakni dijabat oleh Edison Sianipar yang kemudian digantikan oleh Okki Jatnika, dengan keterangan sebagai berikut:

Corporate Secretary Profile

In 2022, there was 1 (one) change in Corporate Secretary. This role was previously occupied by Edison Sianipar and later replaced by Okki Jatnika, with the following information:



SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary
EDISON SIANIPAR

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
55 Tahun
55 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
1 Januari 2022 – 1 Agustus 2022
January 1, 2022 – August 1, 2022

Riwayat Pendidikan | Educational Background
Sarjana (S1) Manajemen (2013)
Bachelor's Degree in Management (2013)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Kepala Divisi Kepesertaan PT ASABRI (Persero) (2021-2022)
- Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Balikpapan (2018-2021)
- Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Cirebon (2017-2018)
- Head of Participation Division of PT ASABRI (Persero) (2021–2022)
- Head of PT ASABRI (Persero) Balikpapan Branch Office (2018–2021)
- Head of PT ASABRI (Persero) Cirebon Branch Office (2017–2018)

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 Perseroan mengangkat Okki Jatnika sebagai Sekretaris Perusahaan

Then, on August 2, 2022, the Company appointed Okki Jatnika as the Corporate Secretary.



SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary
OKKI JATNIKA

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
35 Tahun
35 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
2 Agustus 2022 – sekarang
August 2, 2022 – present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- *Master* (S2) *of Business Administration* (2019)
- Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen (2009)
- Master's Degree in Business Administration (2019)
- Bachelor's Degree in Management Economics (2009)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Sekretaris Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) (2019-2022)
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT ASABRI (Persero) (2017-2019)
- *Marketing Analyst* PT Bank DKI (2013 – 2017)
- *Senior Account Officer* PT Bank Bukopin Tbk (2010-2013)
- Secretary of the Board of Commissioners of PT ASABRI (Persero) (2019–2022)
- Member of the Risk Monitoring Committee of PT ASABRI (Persero) (2017–2019)
- Marketing Analyst PT Bank DKI (2013–2017)
- Senior Account Officer PT Bank Bukopin Tbk (2010–2013)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas Pokok

Mengoordinasikan, Mengarahkan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan strategi, kebijakan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi, serta improvisasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Perusahaan, komunikasi dan hubungan kelembagaan serta Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).

Uraian Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan kesekretariatan Perusahaan antara lain standarisasi tata persuratan, korespondensi, pemilahan kerahasiaan dan kepentingan surat, kegiatan produksi serta pendistribusian dokumen, arsip dan dokumen.
2. Mengoordinasikan, Mengarahkan, dan *monitoring* arus persuratan, pelaksanaan pendistribusian kebijakan Perusahaan serta pengelolaan arsip dan dokumen Perusahaan.
3. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan penyusunan Annual Report dan penilaiannya.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Main Duties

To coordinate, direct, and be responsible for the management of strategic planning, policy, implementation, monitoring and evaluation, and improvisation of the implementation of the Company's secretarial activities, communication, and institutional relations as well as the Social and Environmental Responsibility Program (CSR), and the Micro and Small Business Funding Program (UMK).

Job Description of Corporate Secretary

The Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. To coordinate and direct the company's secretarial activities, including standardization of correspondence, sorting confidentiality and importance of letters, production activities, and distribution of documents, archives, and documents.
2. To coordinate, direct, and monitor the flow of correspondence, the implementation of the distribution of company policies, and the management of company archives and documents.
3. To coordinate and direct the preparation of the Annual Report and its assessment.

4. Mengoordinasikan dan Mengarahkan penyelesaian laporan Perusahaan yang bersifat prioritas serta penyampaian materi dan kegiatan rapat Direksi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
5. Mengoordinasikan dan Mengarahkan pelaksanaan *fit and proper* test Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Mengoordinasikan dan Mengarahkan pelaksanaan pembinaan administrasi Sekretaris Direksi dan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris.
7. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka keterbukaan informasi publik, antara lain: strategi, fungsi komunikasi, dan digital, serta konten informasi media cetak dan digital.
8. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan hubungan kelembagaan dan konsolidasi komunikasi dengan seluruh *Stakeholders*.
9. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan *press conference, press tour, press gathering,* jumpa pers dan kegiatan lainnya yang terkait dengan *liaison officer.*
10. Mengoordinasikan dan Mengarahkan kegiatan publikasi, komunikasi, dokumentasi internal dan eksternal Perusahaan serta implementasi dan pemeliharaan identitas Perusahaan *(branding).*
11. Mengoordinasikan dan Mengarahkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi krisis Perusahaan.
12. Mengoordinasikan, Mengarahkan dan mendokumentasikan kegiatan Perusahaan, pelaksanaan administrasi kegiatan protokol Direksi.
13. Mengoordinasikan dan Mengarahkan penyampaian informasi dan program pengenalan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau yang baru bergabung di Perusahaan.
14. Mengoordinasikan dan Mengarahkan tindak lanjut atas pertanyaan, saran, dan/atau pengaduan yang diterima melalui media cetak dan digital.
15. Merencanakan dan mengkaji pengembangan sistem dan kebijakan terkait pengelolaan dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
16. Mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).
17. Mengoordinasikan dan memastikan penyaluran, pengembalian pinjaman serta penanganan pemulihan pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).

4. To coordinate and direct the completion of the company's priority reports and the delivery of materials and activities of the Board of Directors meetings with internal and external parties.
5. To coordinate and direct the implementation of the fit and proper test of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. To coordinate and direct the implementation of administrative guidance for the Secretary of the Board of Directors and coordination with the Secretariat of the Board of Commissioners.
7. To coordinate and direct the company's communication activities in the context of public information disclosure, including strategy, communication function, and digital, as well as print and digital media information content.
8. To coordinate and direct institutional relations and communication consolidation activities with all Stakeholders.
9. To coordinate and direct press conferences, press tours, press gatherings, press conferences, and other activities related to the liaison officer.
10. To coordinate and direct the company's publications, communications, internal and external documentation, as well as the implementation and maintenance of the company's identity (branding).
11. To coordinate and direct strategies and policies in managing the company's crisis communications.
12. To coordinate, direct, and document the Company's activities and administration of the Board of Directors' protocol activities.
13. To coordinate and direct the delivery of information and introduction programs to the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and/or those who have just joined the company.
14. To coordinate and direct the follow-up of questions, suggestions, and/or complaints received through print and digital media.
15. To plan and review the development of systems and policies related to managing Social and Environmental Responsibility Program (CSR) funds.
16. To manage the planning, implementation, monitoring, evaluation, and accountability report of the Social and Environmental Responsibility (CSR) Program and Micro and Small Business Funding (UMK).
17. To coordinate and ensure the distribution, loan repayment, and handling of loan recovery of the Micro and Small Business Funding Program (UMK)

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun Buku 2022

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* PT ASABRI (Persero), Sekretaris Perusahaan telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi melalui Nota Dinas Nomor B/ND/SM.05.03/57/II/2023-SEKPER.

Report on the Implementation of Corporate Secretary Duties for the 2022 Fiscal Year

As stated in the Board Manual of PT ASABRI (Persero), the Corporate Secretary has prepared a periodic report at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding the implementation of the corporate secretary function to the Board of Directors through Service Memorandum Number B/ND/SM.05.03/57/II/2023-SEKPER.

No	Tugas Duties	Realisasi Realization
1	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan Perusahaan antara lain standardisasi tata persuratan, korespondensi, pemilahan kerahasiaan dan kepentingan surat, kegiatan produksi serta pendistribusian dokumen, arsip dan dokumen To coordinate and direct the company's secretarial activities, including standarization of correspondence, sorting confidentiality and importance of letters, production activities, and distribution of documents, archives, and documents.	• Standardisasi Tata Persuratan (Pedoman Tata Naskah Dinas, Surat Edaran) direviu dan dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja terbaru dan sesuai arahan dari Pimpinan. • Pembaruan Peraturan terkait Jadwal Retensi Arsip dengan menyesuaikan kondisi saat ini, dengan dterbitkannya Peraturan Direksi • Korespondensi dan pendistribusian dokumen dilakukan sesuai ketentuan. • Produksi dalam bentuk penggandaan dan penjilidan dokumen dilaksanakan sesuai permintaan unit kerja. • Pembaruan *Standard Operating Procedures* (SOP) • Standardization of correspondence procedures (Manual of Office Manuscripts, Circular Letters) was reviewed and updated according to the latest Organization and Work Procedure Regulations and according to the direction of the Chairman. • Renewal of Regulations related to the Archive Retention Schedule by adjusting the current conditions, with the issuance of the Board of Directors Regulation. • Correspondence and document distribution were carried out according to the provisions. • Production in the form of duplication and binding of documents was carried out according to the request of the work unit. • Standard Operating Procedures (SOP) was updated.
2	Mengoordinasikan, mengarahkan, dan *monitoring* arus persuratan, pelaksanaan pendistribusian kebijakan Perusahaan serta pengelolaan arsip dan dokumen Perusahaan To coordinate, direct, and monitor the flow of correspondence, the implementation of the distribution of company policies, and the management of company archives and documents.	• Surat masuk dan surat keluar, serta Naskah Dinas sejenisnya disampaikan melalui Aplikasi Disposisi (elektronik) yang sekaligus digunakan sebagai alat pemantauan. • Pemeliharaan arsip melalui fumigasi dan pemusnahan arsip di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dilakukan sesuai ketentuan. • Penyesuaian fitur pada aplikasi disposisi sesuai kebutuhan saat ini. • Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk pendistribusian dokumen dan barang. • Incoming letters, outgoing letters, and similar Office Manuscripts were submitted through the Disposition Application (electronic), which was also used as a monitoring tool. • Archive maintenance through fumigation and destruction of archives at the Head Office and Branch Offices was done according to the provisions. • Adjustment of features in the disposition application was done according to current needs. • Renewal of the Cooperation Agreement with PT Pos Indonesia (Persero) to distribute documents and goods.
3	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan penyusunan *Annual Report* dan penilaiannya To coordinate and direct the preparation of the Annual Report and its assessment.	• Penyusunan *Annual Report* Tahun 2021 telah selesai dibuat dan sudah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. • Pendistribusian *Annual Report* Tahun 2021 kepada pihak internal terkait sesuai kebutuhan. • The preparation of the 2021 Annual Report has been completed and authorized by the Board of Commissioners and Board of Directors in English and Bahasa Indonesia versions. • Distribution of the 2021 Annual Report to relevant internal parties as needed.

No	Tugas Duties	Realisasi Realization
4	Mengoordinasikan dan mengarahkan penyelesaian laporan Perusahaan yang bersifat prioritas serta penyampaian materi dan kegiatan rapat Direksi baik dengan pihak internal maupun eksternal To coordinate and direct the completion of the company's priority reports and the delivery of materials and activities of the Board of Directors meetings with internal and external parties.	• Penyelesaian laporan atau pemenuhan data dilakukan dengan menginformasikan kepada unit kerja terkait agar dapat disampaikan pada kesempatan pertama. • Memonitor laporan Perusahaan yang bersifat prioritas agar diterima oleh pihak yang berkepentingan. • Penyampaian materi dan kegiatan rapat Direksi disampaikan kepada masing-masing Direksi dan melalui Sekretaris Direksi. • Reports or data fulfillment was completed by informing the relevant work unit so it could be submitted at the first opportunity. • Monitor the company's priority reports to be received by interested parties. • Materials and activities of the Board of Directors meeting were submitted to each Director and through the Secretary of the Board of Directors.
5	Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan *fit and proper test* Direksi dan Dewan Komisaris To coordinate and direct the implementation of the fit and proper test of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	• Asistensi untuk *fit and proper test* Direksi dan Dewan Komisaris • Menyampaikan laporan kepada OJK terkait susunan Direksi dan ASABRI telah memperoleh surat tanggapan dari OJK. • Assistance for the fit and proper test of the Board of Directors and Board of Commissioners. • Submitted a report to OJK regarding the composition of the Board of Directors, and ASABRI has obtained a response letter from OJK.
6	Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pembinaan administrasi Sekretaris Direksi dan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris To coordinate and direct the implementation of administrative guidance for the Secretary of the Board of Directors and coordination with the Secretariat of the Board of Commissioners.	• Pembinaan Sekretaris Direksi dilakukan terbatas pada *briefing* pada awal penugasan serta pada waktu-waktu tertentu. • Koordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan baik. • Coaching of the Secretary of the Board of Directors was limited to briefings at the beginning of the assignment and at certain times. • Coordination with the Board of Commissioners Secretariat was implemented well.
7	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka keterbukaan informasi publik, antara lain: strategi, fungsi komunikasi, dan digital, serta konten informasi media cetak dan digital To coordinate and direct the company's communication activities in the context of public information disclosure, including strategy, communication function, and digital, as well as print and digital media information content.	• Strategi komunikasi yang disusun dibahas dalam forum "Agenda Setting" yang diadakan oleh Kementerian BUMN yang juga diikuti oleh BUMN lain. • Penyusunan konsep "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). • Perencanaan dan desain Konten Media Sosial. • Publikasi media sosial dan pengelolaan *website* www.asabri.co.id. • Pengisian dan merespons konten dari Portal lapor.go.id. • The communication strategy was discussed in the "Agenda Setting" forum held by the Ministry of SOEs, which was also attended by other SOEs. • Drafting of "Information and Documentation Management Officer (PPID). • Social Media Content planning and design. • Social media publication and website management (www.asabri.co.id). • Filling and responding to content from the portal lapor.go.id.
8	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan hubungan kelembagaan dan konsolidasi komunikasi dengan seluruh *stakeholders* To coordinate and direct institutional relations and communication consolidation activities with all Stakeholders.	Menghadiri rapat-rapat hubungan kelembagaan yang diinisiasi oleh kementerian BUMN seperti Agenda Setting dan KIP. Attending institutional relations meetings initiated by the Ministry of SOEs, such as Agenda Setting and KIP.
9	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan *press conference, press tour, press gathering*, jumpa pers dan kegiatan lainnya yang terkait dengan *liaison officer.* To coordinate and direct press conferences, press tours, press gatherings, press conferences, and other activities related to the liaison officer.	Pelaksanaan *Press Gathering* pada 21 April 2022 di Gedung ASABRI Jakarta, yang dihadiri 35 orang perwakilan media nasional. Press Gathering on April 21, 2022, at ASABRI Building Jakarta, attended by 35 national media representatives.
10	Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan publikasi, komunikasi, dokumentasi internal dan eksternal Perusahaan serta implementasi dan pemeliharaan identitas perusahaan *(branding)* To coordinate and direct the company's publications, communications, internal and external documentation, as well as the implementation and maintenance of the company's identity (branding).	Dokumentasi dilakukan untuk berbagai kegiatan perusahaan baik di lingkungan perusahaan, maupun dalam *events* di luar kantor, seperti penyerahan Santunan, Pensiun Pertama, dan Bantuan CSR. Format dokumentasi dalam bentuk foto dan video, termasuk *editing* dilakukan oleh internal Bidang Kompro dan disimpan di OneDrive Perusahaan. Documentation was carried out for various company activities, both within the company and in events outside the office, such as the delivery of compensation, first pensions, and CSR assistance. The format of documentation in photos and videos, including editing, was done by the internal Kompro Division and stored on the Company's OneDrive.

No	Tugas Duties	Realisasi Realization
11	Mengoordinasikan dan mengarahkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi krisis Perusahaan. To coordinate and direct strategies and policies in managing the company's crisis communications	Pengelolaan krisis manajemen belum dilakukan secara sistematis. Crisis management has not been done systematically
12	Mengoordinasikan, mengarahkan, dan mendokumentasikan kegiatan Perusahaan, pelaksanaan administrasi kegiatan protokol Direksi. To coordinate, direct, and document the Company's activities and administration of the Board of Directors' protocol activities.	• Kegiatan yang berkaitan dengan protokoler Direksi dimulai dari komunikasi dengan *stakeholders*; dan mengoordinasikan jadwal pelaksanaannya • Untuk kegiatan tertentu, aktivitas protokoler juga mencakup persiapan dan pendampingan Direksi. • Activities related to the protocol of the Board of Directors, including communicating with stakeholders and coordinating the implementation schedule. • Protocol activities also included preparation and assistance to the Board of Directors for certain activities.
13	Mengoordinasikan dan mengarahkan penyampaian informasi dan program pengenalan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau yang baru bergabung di Perusahaan. To coordinate and direct the delivery of information and introduction programs to the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and/or those who have just joined the company.	Program Pengenalan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: • Direktur Hubungan Kelembagaan pada tanggal 27 Januari 2022; • Wakil Komisaris Utama pada tanggal 16 Agustus 2022. The Company Introduction Program to the Board of Commissioners and Directors was held 2 (two) times with the following details: • Director of Institutional Relations on January 27, 2022; • Vice President Commissioner on August 16, 2022.
14	Mengoordinasikan dan mengarahkan tindak lanjut atas pertanyaan, saran, dan/atau pengaduan yang diterima melalui media cetak dan digital. To coordinate and direct the follow-up of questions, suggestions, and/or complaints received through print and digital media.	Pertanyaan, pengaduan, dan saran direspon sebagai berikut: • Pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan atau yang bersifat umum langsung dijawab oleh Bidang Kompro; • Pertanyaan dan Pengaduan yang memerlukan data atau penjelasan lebih lanjut dikoordinasikan dengan Divisi Layanan; Questions, complaints, and suggestions were responded to as follows: • The Kompro Division directly answered questions related to the company or of a general nature; • Questions and complaints that required further data or explanation were coordinated with the Service Division;
15	Merencanakan dan mengkaji pengembangan sistem dan kebijakan terkait pengelolaan dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) To plan and review the development of systems and policies related to managing Social and Environmental Responsibility Program (CSR) funds.	• Membuat SOP dalam rangka pelaksanaan Program TJSL • Membuat kebijakan terkait Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2022 yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE/MB.12/02-AS/III/2022-UT tanggal 9 Maret 2022 • Membuat pembagian pembinaan Program TJSL PUMK yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Nomor Sprin/MB.01/236-AS/VIII/2022-SDH. • Creating SOP to implement the CSR Program • Making policies for implementing the CSR Program in 2022 as outlined in Circular Letter Number SE/MB.12/02-AS/III/2022-UT dated March 9, 2022. • Making the distribution of guidance for the PUMK CSR Program as outlined in the form of an Order Number Sprin/MB.01/236-AS/VIII/2022-SDH.
16	Mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). To manage the planning, implementation, monitoring, evaluation, and accountability report of the Social and Environmental Responsibility (CSR) Program and Micro and Small Business Funding (UMK).	• Perencanaan Perencanaan Program TJSL Tahun 2022 telah dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Kementerian BUMN Nomor RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TJSL Tahun 2022. • Pelaksanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi PUMK dan Non PUMK • Pelaporan Laporan pertanggungjawaban Program TJSL dituangkan dalam: 1. Laporan Manajemen Program TJSL setiap bulan 2. Laporan Manajemen Program TJSL Ke Kementerian BUMN setiap Triwulan 3. Laporan Tahunan Program TJSL 4. Laporan Keuangan Audited Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

No	Tugas Duties	Realisasi Realization
		• Planning Planning for the 2022 CSR Program has been outlined in the Minutes of Meeting of the Ministry of SOEs Number RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 dated December 28, 2021, and the 2022 CSR Work Plan and Budget (RKA). • Implementation, Monitoring, and Evaluation of PUMK and Non-PUMK • Reporting The accountability report for the CSR Program was stated in: 1. CSR Program Management Report every month 2. CSR Program Management Report to the Ministry of SOEs every Quarter 3. Annual Report on the CSR Program 4. Audited Financial Report of Micro and Small Business Funding Program
17	Mengoordinasikan dan memastikan penyaluran, pengembalian pinjaman serta penanganan pemulihan pinjaman Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). To coordinate and ensure the distribution, loan repayment, and handling of loan recovery of the Micro and Small Business Funding Program (UMK)	• Melaksanakan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan pelaksana kegiatan TJSL di Kantor Cabang dalam hal ini Program PUMK dalam rangka memastikan kegiatan *monitoring* kepada Mitra Binaan. • Melakukan strategi pemulihan piutang macet melalui restrukturisasi yaitu *Rescheduling, Reconditioning,* serta pengelompokan piutang bermasalah. • Memberikan *report* pencapaian program TJSL PUMK dan meminta arahan Direksi terkait kebijakan pelaksanaan Program PUMK dalam Rapat Direksi. • Carrying out FGD (Focus Group Discussion) activities with the CSR activity organizers at the Branch Office, in this case, the PUMK Program, to ensure monitoring activities to the Fostered Partners. • Performing bad debt recovery strategies through restructuring, which included Rescheduling, Reconditioning, and grouping problematic receivables. • Providing a report on the achievement of the PUMK CSR program and request direction from the Board of Directors regarding the implementation policy of the PUMK Program in the Board of Directors Meeting.

Press Release **Press Release**

No	Tanggal Date	***Press Release***
1	24 – 26 Januari 2022 January 24–26, 2022	ASABRI Berbagi di Jayapura ASABRI is Sharing in Jayapura
2	29 – 31 Januari 2022 January 29–31, 2022	ASABRI Serahkan SRKK untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Puncak Papua ASABRI handed over SRKK to 3 killed TNI (Indonesian Army) in Puncak Papua
3	21 – 22 Maret 2022 March 21–22, 2022	Tingkatkan Layanan, Asabri akan Perluas Keria Sama dengan Rumah Sakit Improving its Services, Asabri will Expand Cooperation with Hospitals.
4	24 – 25 Maret 2022 March 24–25, 2022	ASABRI Salurkan Bantuan 2.000 Masker untuk Pasar Induk Kramat Jati ASABRI Distributed 2,000 Masks to Kramat Jati Main Market.
5	28 – 31 Maret 2022 March 28–31, 2022	Asabri Serahkan Santunan untuk 2 Prajurit TNI yang Gugur di Papua Akibat Ulah KKB Asabri Provided Compensation for 2 TNI Soldiers who killed in Papua due to KKB's actions.
6	31 Maret 2022 March 31, 2022	Apresiasi ASABRI kepada Mitra Bayar dan Kantor Cabang ASABRI Terbaik Tahun 202 ASABRI Appreciation to the Best Paying Partner and ASABRI Branch Office in 202
7	29 – 30 April 2022 April 29–30, 2022	ASABRI Catatkan Perbaikan Tingkat Permodalan dan Solvabilitas di 2021 ASABRI Recorded Improvement in Capital and Solvency Levels in 2021.
8	19 – 20 Mei 2022 May 19–20, 2022	ASABRI Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia ASABRI Expanded 1,000 Service Points Across Indonesia
9	25 – 26 Mei 2022 May 25–26, 2022	ASABRI Resmikan *Sharing Branches* DenganTaspen Di Enam Titik MPP ASABRI Inaugurated Sharing Branches with Taspen at Six MPP Points.
10	30 Mei – 2 Juni 2022 May 30 – June 2, 2022	ASABRI Lakukan Penanaman Pohon Di Kawasan SPN Polda Riau ASABRI Planted Trees in SPN Polda Riau Area.

No	Tanggal Date	*Press Release*
11	4 – 6 Juni 2022 June 4–6, 2022	ASABRI dan 9 BUMN Gelar Pasar Rakyat dan Bazar UMKM di Kuningan ASABRI and 9 SOEs Hold People's Market and UMKM Bazar in Kuningan
12	10 Juni 2022 June 10, 2022	ASABRI Renovasi Gedung Layanan Polsek Bantarbolang, Pemalang ASABRI Renovated Bantarbolang Police Station Service Building, Pemalang
13	17 – 18 Juni 2022 June 17–18, 2022	ASABRI Gelar Sosialisasi Program dan Penanaman Pohon Di Polresta Serang Kota ASABRI Held Program Socialization and Tree Planting at Serang City Police Station
14	1 – 2 Juli 2022 July 1–2, 2022	ASABRI Peringati HUT ke-76 Bhayangkara dengan Program Pelestarian Alam ASABRI Commemorated the 76th Bhayangkara Anniversary with the Nature Conservation Program.
15	5 – 6 Juli 2022 July 5–6, 2022	Peserta Pensiun Kini Bisa Lapor SPTB via ASABRI Mobile Pension Participants Can Report SPTB via ASABRI Mobile
16	25 – 26 Juli 2022 July 25–26, 2022	ASABRI Serahkan SRKK pada Ahli Waris Pilot T-501 *Golden Eagle* ASABRI Handed Over SRKK to the Heirs of the T-501 Golden Eagle Pilot
17	28 Juli 2022 July 28, 2022	ASABRI Meraih Penghargaan CSR *Award* 2022 ASABRI Received CSR Award 2022
18	1 Agustus 2022 August 1, 2022	Peringatan HUT ASABRI ASABRI Anniversary Commemoration
19	16 Agustus 2022 August 16, 2022	Pengangkatan Wakil Komisaris ASABRI Appointment of Vice Commissioner of ASABRI
20	25 Agustus 2022 August 25, 2022	Kerja Sama ASABRI dengan Pegadaian ASABRI Cooperation with Pegadaian
21	4 September 2022 September 4, 2022	ASABRI Berikan Pelatihan Purna Bhakti Bagi Peserta ASABRI Provided After-Service Training for Participants
22	30 September 2022 September 30, 2022	ASABRI Serahkan SRKK kepada Ahli Waris Serda Khodir ASABRI Handed Over SRKK to the Heirs of Serda Khodir
23	13 Oktober 2022 October 13, 2022	Asabri Salurkan Bantuan Pembangunan Ruang Layanan Polsek Bodeh Asabri Distributed Assistance for the Construction of the Bodeh Police Service Room
24	17 Oktober 2022 October 17, 2022	Program TJSL BUMN Tingkatkan Daya Saing UMKM Untuk Naik Kelas SOEs CSR Program Improved the Competitiveness of UMKM to Advance to the Next Grade.
25	25 Oktober 2022 October 25, 2022	ASABRI Perpanjang Kerja Sama dengan Kemhan ASABRI Extended Cooperation with the Ministry of Defense.
26	11 November 2022 November 11, 2022	ASABRI Lakukan Digital Autentikasi Kepada Wisudawan Purnawira Perwira Tinggi TNI AD ASABRI Conducted Digital Authentication for Graduates of High Army Officers of TNI AD.
27	15 Desember 2022 December 15, 2022	ASABRI dan Kementerian Keuangan Lakukan Kerja Sama Pertukaran Data Peserta ASABRI and the Ministry of Finance Cooperated to Exchange Participant Data
28	23 Desember 2022 December 23, 2022	UMKM ASABRI Jayapura Hadir di Papua Akhlak Festival UMKM ASABRI Jayapura was Present in the Papua Akhlak Festival
29	27 Desember 2022 December 27, 2022	ASABRI Perbaiki Sarana Olahraga Markas Yonko 461 Kopasgat ASABRI Improved Sports Facilities at Yonko 461 Kopasgat Headquarters
30	31 Desember 2022 December 31, 2022	ASABRI Serahkan Bantuan Beasiswa Anak TNI-Polri Berprestasi ASABRI Provided Scholarship Assistance for Outstanding TNI-Polri Children
31	31 Desember 2022 December 31, 2022	ASABRI serahkan Bantuan korban Gempa Cianjur ASABRI assisted Cianjur earthquake victims

Buletin / Bulletin

No	Bulan Month	Judul Title
1	Januari January	*Pareto*
2	Februari February	*Mindset*
3	Maret March	*Transform to Perform*
4	April April	Lingkungan Kerja Bebas Diskriminasi Discrimination-Free Work Environment
5	Mei May	*Evolution of The Employee*
6	Juni June	*Creativity and Critical Thinking*
7	Juli July	*Hustle Culture*
8	Agustus August	*Quiet Quitting*
9	Oktober October	Resesi Global Global Recession
10	November November	*Officer Development Program*
11	Desember December	Yang Dicintai Gen Z di Instagram What Gen Z Loves on Instagram

Satuan Audit Internal
Internal Audit Unit

Satuan Audit Internal memiliki fungsi untuk mengevaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan Perseroan, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

The Internal Audit Unit has a function to evaluate the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes following laws and regulations and company policies, as well as conducting examinations and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, information technology, and other activities

Struktur dan Kedudukan Satuan Audit Internal

Berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II-2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero), Satuan Audit Internal (SAI)/*Internal* Audit berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. Auditor Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Audit Internal (Ka SAI). Kepala Satuan Audit Internal (Ka SAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Auditor yang duduk dalam SAI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Audit Internal (Ka SAI).

Structure and Position of Internal Audit Unit

Based on the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II-2022 dated February 2, 2022, on the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero), the Internal Audit Unit (SAI)/Internal Audit is directly under the President Director. The Internal Auditor is led by a Head of the Internal Audit Unit (Ka SAI). The Head of Internal Audit Unit (Ka SAI) is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Auditors in the SAI are directly responsible to the Head of Internal Audit.

Profil Kepala Satuan Audit Internal

Profile of the Head of the Internal Audit Unit



KEPALA SATUAN AUDIT INTERNAL
Head of Internal Audit
BUDI IRWANTO

Kewarganegaraan | Nationality
Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Usia per 31 Desember 2022 | Age as of December 31, 2022
59 Tahun | 59 Years Old

Periode Jabatan | Term of Office
10 Mei 2021 – sekarang
May 10, 2021 – present

Riwayat Pendidikan | Educational Background
- Magister (S2) Manajemen (2014)
- Diploma 4 (D4) Akuntansi (1992)
- Master's Degree in Management (2014)
- Diploma 4 in Accounting (1992)

Pengalaman Bekerja | Work Experience
- Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara I pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (2019-2021)
- Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara II pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta (2016-2019)
- Associate Auditor as Supervisory Coordinator of the Auditor Functional Position Group for State Accountants I at the BPKP Representative of West Java Province (2019-2021)
- Associate Auditor as Supervisory Coordinator of the Auditor Functional Position Group for State Accountants II at the BPKP Representative of DKI Jakarta Province (2016-2019)

Pedoman Kerja Satuan Audit Internal

Dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, Satuan Audit Internal mengacu kepada Piagam Audit Internal, Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor KEP/009/KOM/AS/XII/2021; KEP/PW.01/109-AS/XII/2021 tentang Kebijakan Audit Internal PT ASABRI (Persero), dan Peraturan Direksi Nomor PER/PW.01/22-AS/XII/2020 tentang Standar Pelaksanaan Audit Internal dan Program Pengembangan Audit.

Isi dari Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup

1. Melaksanakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas *good corporate governance*, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Melakukan analisa dan evaluasi yang independen atas capaian kinerja perusahaan, implementasi kebijakan dan peraturan perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pendampingan, saran, dan *review* pada manajemen unit kerja dalam perumusan metode kerja yang lebih baik.
4. Melaksanakan program *Quality Assurance* dan Improvement Program untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan audit internal sudah sesuai dengan standar, kode etik, dan peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab

1. Menyusun rencana audit internal berbasis risiko.
2. Melaksanakan audit internal, *review,* konsultansi, dan pemberian rekomendasi serta melakukan investigasi sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan pelaporan atas hasil audit internal, *monitoring*, dan mendorong tindak lanjut rekomendasi.
4. Memberikan saran kepada Manajemen terkait dinaminak pengelolaan perusahaan.
5. Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada auditor eksternal.
6. Melaksanakan *early warning system* untuk mendukung kegiatan audit internal.
7. Menyusun Piagam Audit Internal untuk disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dan meninjau Piagam Audit Internal secara berkala sesuai kebutuhan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Internal Audit Unit Work Guidelines

In carrying out internal audit activities, the Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter and Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors Number KEP/009/KOM/AS/XII/2021; KEP/PW.01/109-AS/XII/2021 on the Internal Audit Policy of PT ASABRI (Persero), and Board of Directors Regulation Number PER/PW.01/22-AS/XII/2020 on the Internal Audit Implementation Standards and Audit Development Program.

The contents of the Internal Audit Charter are as follows:

Scope

1. To assess the adequacy and effectiveness of good corporate governance, risk management, and internal control.
2. To conduct independent analysis and evaluation of the company's performance achievements, implementation of company policies and regulations, and provisions of laws and regulations.
3. To provide assistance, advice, and review to work unit management to formulate better work methods.
4. To implement a Quality Assurance and Improvement Program to ensure the internal audit implementation follows the standards, code of conduct, and applicable regulations.

Responsibilities

1. To develop a risk-based internal audit plan.
2. To conduct internal audits, reviews, and consultancies, provide recommendations, and conduct necessary investigations.
3. To report the results of internal audits, monitor, and encourage follow-up recommendations.
4. To provide advice to management regarding the management of the company.
5. To coordinate and assist external auditors.
6. To implement an early warning system to support internal audit activities.
7. To prepare an Internal Audit Charter to be approved and ratified by the President Director and President Commissioner, and review the Internal Audit Charter periodically as needed.
8. To report the results of implementing supervisory duties to the President Director and the Board of Commissioners.

Akuntabilitas

1. Melaporkan hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen dalam mengendalikan kegiatannya dan mengelola risiko.
2. Melaporkan hal penting berkaitan dengan proses audit internal, termasuk kemungkinan melakukan peningkatan jenis audit.
3. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.
4. Kinerja aktivitas audit internal dinilai oleh tim independen yang memiliki kualifikasi memadai paling sedikit satu kali dalam lima tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris.

Wewenang

1. Menyusun dan merealisasikan kebijakan dan prosedur audit internal dengan memperhatikan perubahan/ dinamika lingkungan perusahaan dan kebutuhan audit internal.
2. Mengakses seluruh data, keterangan, dokumen, informasi, dan sumber daya unit kerja perusahaan untuk keperluan penugasan.
3. Meminta data keterangan dan penjelasan dari setiap karyawan, unit kerja, dan manajemen mulai tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran proses bisnis, baik dalam rangka kegiatan audit maupun dalam rangka konsultansi.
4. Melaporkan dan mengkonsultasikan hail audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta berkoordinasi dengan Komite Audit.
5. Meminta saran dan pendapat dari tenaga profesional eksternal sesuai kebutuhan perusahaan.
6. Memberikan saran dalam rangka pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Independensi dan Objektivitas

1. SAI harus independen dan objektif dalam melaksanakan tugasnya serta auditor internal menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
2. Kepala Satuan Audit Internal (Ka SAI) dan para auditor internal tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada aktivitas operasional perusahaan yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor.
3. Auditor internal harus memiliki integritas untuk membentuk keyakinan dan menjadi dasar kepercayaan *stakeholders* terhadap pertimbangan auditor internal.
4. Auditor internal harus menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam setiap penugasan audit.
5. Auditor internal bersikap proaktif dan memberikan evaluasi berupa pandangan baru yang mempertimbangkan dampak masa depan perusahaan.

Accountability

1. To report the results of assessing the adequacy and effectiveness of management processes in controlling its activities and managing risks.
2. To report important matters related to the internal audit process, including the possibility of increasing the type of audit.
3. To report on the progress and results of implementing the annual audit plan and the adequacy of audit resources.
4. The internal audit activity's performance is assessed by an independent team with sufficient qualifications at least once every five years, and the results are reported to the Board of Directors and Commissioners.

Authority

1. To develop and realize internal audit policies and procedures by considering changes/dynamics in the company's environment and internal audit needs.
2. To access all data, documents, information, and resources of the company's work units for the assignment.
3. To request information and explanation data from each employee, work unit, and management from the planning stage to the end of the business process, both in audit activities and consulting.
4. To report and consult the audit results to the Board of Directors and Board of Commissioners and coordinate with the Audit Committee.
5. To seek advice and opinions from external professionals as needed by the company.
6. To provide advice to make strategic decisions for the company.

Independence and Objectivity

1. SAI must be independent and objective in carrying out its duties, and internal auditors avoid the possibility of conflicts of interest.
2. The Head of Internal Audit Unit (Ka SAI) and internal auditors do not perform concurrent duties and positions in the company's operational activities that can interfere with the independence and objectivity of auditors.
3. Internal auditors must have integrity to form confidence and become the basis for stakeholders' trust in the judgment of internal auditors.
4. Internal auditors must apply the necessary knowledge, skills, and experience in each audit assignment.
5. Internal auditors are proactive and provide evaluations in the form of new views that consider the future impact of the company.

Standar Profesi dan Kode Etik

Auditor di jajaran Satuan Audit Internal (SAI) melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada pengertian audit internal, prinsip-prinsip dasar, standar profesi dan kode etik yang ditetapkan ole Asosiasi Profesi Auditor Internal sebagaimana telah diadopsi ole PT ASABRI (Persero).

Pelaksanaan Tugas Satuan Audit Internal 2022

Pelaksanaan audit tahunan mengacu kepada Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/PW.02/106-AS/XII/2021 tentang Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Audit Internal (SAI) PT ASABRI (Persero) Tahun 2022. Program audit 2022 terealisasi 100% dengan total 32 audit, 16 unit kerja Kantor Pusat dan 16 unit kerja Kantor Cabang dengan rincian sebagai berikut:

Professional Standards and Code of Conduct

Auditors in the Internal Audit Unit (SAI) carry out activities concerning the definition of internal audit, basic principles, professional standards, and code of conduct established by the Internal Auditor Professional Association as adopted by PT ASABRI (Persero).

Implementation of Internal Audit Unit Duties 2022

The annual audit refers to the Decree of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/PW.02/106-AS/XII/2021 on the Annual Audit Work Program (PKAT) of the Internal Audit Unit (SAI) of PT ASABRI (Persero) in 2022. The 2022 audit program was 100% realized with a total of 32 audits, 16 Head Office work units, and 16 Branch Office work units with the following details:

No	Tanggal Date	Lokasi Audit/Reviu Audit/Review Location	Jumlah Temuan Audit/Hasil Reviu Number of Audit Findings/Review Results	Status Temuan Audit/Hasil Reviu Status of Audit Findings/Review Results	
				Selesai Completed	Dalam Proses In Process
1.	10 - 18 Januari 2022 January 10-18, 2022	Divisi Kepatuhan dan Hukum Compliance and Legal Affairs Division	6	6	-
2.	24 - 28 Januari 2022 January 24-28, 2022	Kantor Cabang Jayapura Jayapura Branch Office	11	11	-
3.	24 - 28 Januari 2022 January 24-28, 2022	Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office	7	7	-
4.	8 - 11 Maret 2022 March 8-11, 2022	Kantor Cabang Palu Palu Branch Office	7	7	-
5.	8 - 11 Maret 2022 March 8-11, 2022	Kantor Cabang Sorong Sorong Branch Office	9	9	-
6.	21 - 4 Maret 2022 March 21-4, 2022	Divisi Strategi Korporasi Corporate Strategy Division	9	9	-
7.	7- 11 Maret 2022 March 7-11, 2022	Kantor Cabang Medan Medan Branch Office	6	6	-
8.	7- 11 Maret 2022 March 7-11, 2022	Kantor Cabang Balikpapan Balikpapan Branch Office	7	7	-
9.	16 - 19 Maret 2022 March 16-19, 2022	Kantor Cabang Bengkulu Bengkulu Branch Office	5	5	-
10.	23 -31Maret 2022 March 23-31, 2022	Divisi Aktuaria Actuarial Division	2	2	-
11.	4-8 April 2022 April 4-8, 2022	Kantor Cabang Utama Jakarta Jakarta Branch Office	9	9	-
12.	13-22 April 2022 April 13-22, 2022	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	5	5	-
13.	9-25 Mei 2022 May 9-25, 2022	Divisi Strategi SDM HR Strategy Division	11	11	-
14.	9-25 Mei 2022 May 9-25, 2022	Divisi Layanan SDM HR Services Division	5	5	-
15.	6-10 Juni 2022 June 6-10, 2022	Kantor Cabang Pontianak Pontianak Branch Office	8	8	-
16.	6-10 Juni 2022 June 6-10, 2022	Kantor Cabang Ambon Ambon Branch Office	7	7	-

No	Tanggal Date	Lokasi Audit/Reviu Audit/Review Location	Jumlah Temuan Audit/Hasil Reviu Number of Audit Findings/Review Results	Status Temuan Audit/Hasil Reviu Status of Audit Findings/Review Results	
				Selesai Completed	Dalam Proses In Process
17.	6-10 Juni 2022 June 6–10, 2022	Kantor Cabang Ternate Ternate Branch Office	4	4	-
18.	20-30 Juni 2022 June 20–30, 2022	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	7	7	-
19.	20-30 Juni 2022 June 20–30, 2022	Audit Kinerja Bidang TJSL CSR Performance Audit	9	9	-
20.	4-13 Juli 2022 July 4–13, 2022	Divisi Kepesertaan Membership Division	5	5	-
21.	18-22 Juli 2022 July 18–22, 2022	Kantor Cabang Surabaya Surabaya Branch Office	14	14	-
22.	18-21 Juli 2022 July 18–21, 2022	Kantor Cabang Madiun Madiun Branch Office	5	5	-
23.	27 Juli–4 Agustus 2022 July 27–August 4, 2022	Divisi Sistem Informasi Information Systems Division	10	10	-
24.	8-11 Agustus 2022 August 8–11, 2022	Kantor Cabang Serang Serang Branch Office	7	7	-
25.	22-26 Agustus2022 August 22–26, 2022	Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office	10	10	-
26.	22-26 Agustus 2022 August 22–26, 2022	Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office	8	8	-
27.	5-16 September 2022 September 5–16, 2022	Divisi Menpo & PMPU Menpo and PMPU Dision	6	6	-
28.	22-30 September 2022 September 22–30, 2022	Divisi Layanan Service Division	4	4	-
29.	6-14 Oktober 2022 October 6–14, 2022	Divisi Keuangan Finance Division	3	3	-
30.	20-28 Oktober 2022 October 20–28, 2022	Divisi Akuntansi Accounting Division	3	3	-
31.	7-15 November 2022 November 7–15, 2022	Divisi Umum General Affairs Division	17	4	13
32.	21 November – 2 Desember 2022 November 21 – December 2, 2022	Divisi Pengembangan Bisnis Business Development Division	3	3	-
Jumlah Total			**229**	**216**	**13**

Akuntan Publik (Auditor Eksternal)
Public Accountant (External Auditor)

Dalam melaksanakan proses audit, ASABRI menunjuk KAP sebagai pihak auditor eksternal. Rincian mengenai KAP yang melakukan audit perusahaan pada tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:

In the audit process, ASABRI appoints the Public Accountant Office (KAP) as the external auditor. Details of the KAP that conducted the company's audit in 2020 – 2022 are as follows:

No	**Tahun Buku** Fiscal Year	**Nama KAP** Name of Public Accountant Office	**Akuntan** Accountant	**Lingkup Audit** Audit Scope	**Jasa Audit Lain** Other Audit Services	**Opini** Opinion
1	2020	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Dedy Sukrisnadi Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0645 Public Accountant License No. AP.0645	Audit umum atas Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk tahun buku 2020 General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the fiscal year 2020	• Audit umum *(General Audit)* terhadap Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk Tahun Buku 2020. • Audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2020. • Audit umum sebagaimana dimaksud di atas, termasuk Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun (AlP). • Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal. • Reviu atas Laporan Kinerja termasuk di dalamnya reviu atas pencapaian KPI dan tingkat kesehatan. • Reviu atas struktur pengendalian intern, identifikasi kelemahan dan masalah yang ada termasuk keandalan sistem teknologi informasi yang diterapkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional, serta penyampaian usulan/ rekomendasi perbaikan *(Management Letter)* dalam hal ditemukan kelemahan. • General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the 2020 Financial Year. • General audit of the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the 2020 fiscal year. • As mentioned above, the general audit included the Financial Statements of Accumulated Pension Contributions (ALP). • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. • Review of the Performance Report, including a review of the achievement of KPIs and health levels. • Review of the internal control structure, identification of weaknesses and existing problems, including the reliability of the information technology system implemented in the context of operational effectiveness and efficiency, and submission of proposals/ recommendations for improvement (Management Letter) if weaknesses are found	Wajar Tanpa Modifikasi Reasonable Without Modification

No	Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of Public Accountant Office	Akuntan Accountant	Lingkup Audit Audit Scope	Jasa Audit Lain Other Audit Services	Opini Opinion
2	2021	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan	Dedy Sukrisnadi Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0645 Public Accountant License No. AP.0645	Audit umum atas Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk tahun buku 2021 General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the fiscal year 2021	• Audit umum *(General Audit)* terhadap Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk Tahun Buku 2021, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas taporan keuangan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan standar audit yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); • Audit umum Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Periode Tahun Buku 2021 berdasarkan standar audit yang berlaku di Indonesia • Audit umum sebagaimana dimaksud di atas, termasuk Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) atas pengelolaan penyelenggaraan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia • Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian InternTelaah *(review)* atas Laporan Kinerja termasuk di dalamnya *review* atas pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan tingkat kesehatan • Telaah *(review)* atas struktur pengendalian intern, identifikasi kelemahan dan masalah yang ada termasuk keandalan sistem teknologi informasi yang diterapkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional, *fraud risk assessment,* serta penyampaian usulan/rekomendasi perbaikan atau *area of improvement (Management Letter)* dalam hal ditemukan kelemahan; dan • Memberikan informasi (presentasi) terkait hasit audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pihak Kesatu	Wajar Tanpa Modifikasi Reasonable Without Modification
					• General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the 2021 Financial Year, which consists of a statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows and notes to financial statements based on Public Accountant Professional Standards (SPAP) and auditing standards applicable in Indonesia, namely State Financial Audit Standards (SPKN); • General audit of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2021 Fiscal Year Period based on applicable audit standards in Indonesia;	

No	Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of Public Accountant Office	Akuntan Accountant	Lingkup Audit Audit Scope	Jasa Audit Lain Other Audit Services	Opini Opinion
					• General audit as referred to above, including the Financial Statements of Accumulated Pension Contributions (ALP) for the management of the implementation of Accumulated Pension Contributions for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Civil Servants within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control Review (review) of the Performance Report, including a review of the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and health levels • Review of the internal control structure, identification of weaknesses and existing problems, including the reliability of information technology systems implemented in the context of operational effectiveness and efficiency, fraud risk assessment, and submission of proposals/ recommendations for improvement or areas of improvement (Management Letter) if weaknesses are found; and • Provide information (presentation) related to audit results to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the First Party.	
3	2022	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Chairul Wismoyo Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1698 Public Accountant License No. No. AP.1698	Audit umum atas Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk tahun buku 2022 General audit of the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for the fiscal year 2022	• Audit umum *(General Audit)* bertujuan khusus terhadap Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) untuk Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Keuangan Akumulasi luran Pensiun (AlP) Tahun Buku 2022 atas pengetolaan • penyelenggaraan Akumulasi luran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sesuai dengan PMK. • Audit umum Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2022 berdasarkan standar audit yang berlaku di Indonesia. • Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian • Intern. • Telaah *(review)* atas Laporan Kinerja termasuk di dalamnya review atas pencapaian *Key Performance Indicator* (KPl) dan tingkat Kesehatan. • Telaah *(review)* atas struktur pengendalian intern, identifikasi kelemahan dan masalah yang ada termasuk keandalan sistem teknologi informasi yang diterapkan • dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional, *fraud risk assessment,* serta penyampaian usulan rekomendasi perbaikan atau *area of improvement* (Management Letter) dalam hal ditemukan kelemahan. • Memberikan informasi (presentasi) terkait hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	

No	Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of Public Accountant Office	Akuntan Accountant	Lingkup Audit Audit Scope	Jasa Audit Lain Other Audit Services	Opini Opinion
					• General audit with a special purpose on the Financial Statements of PT ASABRI (Persero) for Fiscal Year 2022, including the Financial Statements of Accumulated Pension (ALP) for Fiscal Year 2022 for the management of the • administration of the Accumulated Pension of Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Civil Servants within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police, in accordance with the PMK. • General audit of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2022 based on applicable audit standards in Indonesia. • Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control. • Internal Control. • Review of the Performance Report, including a review of the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and the level of Health. • Review of the internal control structure, identification of weaknesses and existing problems, including the reliability of the information technology system implemented by the Bank. • In the context of operational effectiveness and efficiency, fraud risk assessment, as well as the submission of proposed recommendations for improvement or areas of improvement (Management Letter) if weaknesses are found. • Provide information (presentation) related to audit results to the Board of Directors and the Board of Commissioners.	

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang dan diterapkan Perusahaan untuk melindungi aset, memastikan akurasi dan keandalan informasi keuangan, serta memaksimalkan efisiensi operasional. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi risiko kecurangan, kesalahan, atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

The Internal Control System is a set of procedures, policies, and practices designed and implemented by the company to protect assets, ensure financial information's accuracy and reliability, and maximize operational efficiency. This system aims to reduce the risk of fraud, errors, or law violations that may affect the company's performance.

Sistem Pengendalian Internal (SISDALIN) adalah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan semua insan ASABRI, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan perusahaan berkaitan dengan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Sistem Pengendalian Intern tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi (*integrated system*) dengan seluruh sistem dan proses yang dibangun dan diterapkan oleh perusahaan; dengan kata lain konsepsi dan elemen-elemen Sistem Pengendalian Internal tercakup dan tercermin pada setiap sistem dan proses yang ada.

Dalam Sistem Pengendalian Internal, dengan merujuk ke *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision* (COSO) terdiri dari lima unsur pengendalian, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Penjelasan atas setiap unsur adalah sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*
Lingkungan pengendalian merupakan kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran akan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar komponen pengendalian internal lainnya

Sub Komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pemahaman terhadap lingkungan pengendalian adalah:
1. Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika
   a. Mengembangkan "*tone at the top*";

The Internal Control System (SISDALIN) is a process influenced by the Board of Commissioners, management, and all ASABRI people, which is designed to provide reasonable assurance to achieve company objectives related to operations, reporting, and compliance. The Internal Control System is an integrated system with all systems and processes built and implemented by the company; in other words, the conception and elements of the Internal Control System are covered and reflected in every existing system and process.

The Internal Control System, based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), consists of five control elements, namely:
1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activity;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring

The explanation of each element is as follows:

Control Environment
The control environment is the condition of the organizational environment that sets the tone for an organization and affects awareness of control. The control environment is the basis for other internal control components.

Important sub-components that need to be considered in understanding the control environment are:
1. Commitment to Integrity and Ethical Values
   a. Developing a "tone at the top";

b. Standar perilaku sebagai pedoman yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*);
c. Kode Etik tersebut disosialisasikan dan terpahami oleh seluruh karyawan perusahaan;
d. Seluruh karyawan perusahaan berkomitmen untuk berperilaku sesuai dengan Kode Etik;
e. Bertindak dengan jujur dan adil dalam hubungan dengan *stakeholders* perusahaan;
f. Tersedia mekanisme untuk memantau pelaksanaan penegakan Kode Etik;
g. Seluruh karyawan perusahaan memperoleh kesamaan perlakuan dalam penegakan Kode Etik dan kebijakan perusahaan lainnya;
h. Terdapat mekanisme pemberian sanksi apabila terdapat pelanggaran kebijakan perusahaan;
i. Manajemen puncak menghindari intervensi atas pelaksanaan tugas manajemen di bawahnya.

2. Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan secara independen
   a. Dewan Komisaris menetapkan tanggung jawab pengawasan;
   b. Menetapkan keahlian yang relevan;
   c. Bertindak secara independen;
   d. Melakukan pengawasan (*oversight*) atas sistem pengendalian intern.
3. Manajemen membangun, dengan pengawasan Dewan Komisaris, Struktur Organisasi, garis pelaporan, dan kewenangan serta tanggung jawab untuk pencapaian tujuan perusahaan
   a. Struktur organisasi sesuai dengan strategi dan tuntutan perusahaan;
   b. Manajemen menetapkan jalur Pelaporan;
   c. Mengidentifikasi, menetapkan dan membatasi kewenangan dan tanggung jawab.
4. Komitmen untuk memperoleh, mengembangkan dan mem-pertahankan individu yang kompeten dalam upaya pencapaian tujuan organisasi
   a. Menetapkan kebijakan dan praktik;
   b. Mengevaluasi kompetensi dan memperhatikan kekurangan;
   c. Memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan Karyawan;
   d. Merencanakan dan mempersiapkan suksesi.
5. Setiap Insan ASABRI wajib mengemban akuntabilitas atas tanggung jawabnya dalam hal pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan
   a. Menetapkan akuntabilitas melalui struktur, otoritas dan tanggung jawab;
   b. Menetapkan pengukuran kinerja, insentif dan penghargaan;
   c. Evaluasi Pengukuran Kinerja, Insentif dan penghargaan untuk menjaga relevansinya;
   d. Mempertimbangkan tekanan yang berlebihan;
   e. Mengevaluasi kinerja dan memberikan imbalan atau disiplin.

b. Standards of behavior as guidelines set out in the Code of Conduct;
c. The Code of Conduct is socialized and understood by all company employees;
d. All company employees are committed to behaving following the Code of Conduct;
e. Acting honestly and fairly in relationships with the company's stakeholders;
f. There is a mechanism to monitor the implementation of the Code of Conduct enforcement;
g. All company employees receive equal treatment in enforcing the Code of Conduct and other company policies;
h. There is a mechanism for imposing sanctions if there is a violation of company policy;
i. Top management avoids intervention in the implementation of the duties of lower management.

2. The Board of Commissioners carries out its supervisory responsibilities independently
   a. The Board of Commissioners determines its supervisory responsibilities;
   b. Determine relevant expertise;
   c. Act independently;
   d. Supervise the internal control system.
3. Management establishes, with the supervision of the Board of Commissioners, an Organizational Structure, reporting lines, and authorities and responsibilities for the achievement of the company's objectives.
   a. The organizational structure is following the strategy and demands of the company;
   b. Management establishes reporting lines;
   c. Identify, define, and limit authorities and responsibilities.
4. Commitment to acquire, develop, and retain competent individuals to achieve organizational goals.
   a. Establish policies and practices;
   b. Evaluate competencies and address deficiencies;
   c. Acquire, develop, and retain employees;
   d. Planning and preparing for succession.
5. Every ASABRI employee must carry out accountability for their responsibilities in terms of internal control to achieve company objectives
   a. Establish accountability through structure, authority, and responsibility;
   b. Establish performance measurement, incentives, and rewards;
   c. Evaluate performance measurements, incentives, and rewards to maintain relevance;
   d. Consider excessive pressure;
   e. Evaluate performance and provide rewards or discipline.

Penilaian Risiko *(Risk Assesment)*

Penilaian Risiko yang dilaksanakan secara efektif akan mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan sampai pada level minimal yang dapat ditoleransikan oleh perusahaan.

1. Penetapan Tujuan
   Sebelum penerapan dalam langkah-langkah pengendalian intern melalui komponen yang ditetapkan, perlu adanya bangunan penetapan tujuan perusahaan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
   a. Tujuan Operasional
      - Mencerminkan pilihan Manajemen terhadap tujuan operasional perusahaan yang harus dicapai;
      - Mempertimbangkan toleransi risiko;
      - Mencakup tujuan Operasi dan Kinerja Keuangan;
      - Membentuk dasar untuk mengalokasikan Sumber Daya.

   b. Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal
      - Mematuhi standar akuntansi yang berlaku;
      - Mempertimbangkan materialitas;
      - Mencerminkan aktivitas entitas.

   c. Tujuan Pelaporan Non Keuangan Eksternal
      - Mematuhi Standar dan *Frameworks* eksternal yang berlaku;
      - Mempertimbangkan Tingkat Persisi yang diharapkan;
      - Menyajikan Aktivitas Entitas.

   d. Tujuan Pelaporan Internal (keuangan dan non keuangan)
      - Mencerminkan pilihan Manajemen;
      - Mempertimbangkan Tingkat Persisi yang diharapkan;
      - Mencerminkan Aktivitas Entitas.

   e. Tujuan Kepatuhan
      - Mencerminkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
      - Mempertimbangkan Toleransi Risiko.

2. Identifikasi Risiko
   Manajemen melakukan identifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan, dan melakukan analisis risiko sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola.
   a. Identifikasi risiko mencakup perusahaan secara keseluruhan dan unit-unit kerja;
   b. Analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal;
   c. Melibatkan manajemen di tingkatan yang sesuai;
   d. Melakukan estimasi atas signifikansi dari risiko yang teridentifikasi;
   e. Menetapkan bagaimana merespon risiko tersebut.

3. Risiko *Fraud*
   Dalam melalukan asesmen terhadap risiko pencapaian tujuan, manajemen mempertimbangkan adanya potensi *fraud*. Mempertimbangkan berbagai jenis *fraud* dan faktor pemicu terjadinya dengan menggunakan model "*triangle fraud*" sebagai berikut:

Risk Assessment

An effectively implemented Risk Assessment will reduce risks that can hold the achievement of objectives to the minimum level the company can tolerate.

1. Determination of Objectives
   Before the implementation of internal control measures through the established components, it is necessary to establish the company's objectives, which include the following:
   a. Operational Objectives
      - Reflect Management's choice of the company's operational objectives that must be achieved;
      - Consider risk tolerance;
      - Includes both Operating and Financial Performance objectives;
      - Form the basis to allocate resources.

   b. External Financial Reporting Objectives
      - Comply with applicable accounting standards;
      - Consider materiality;
      - Reflect the entity's activities.

   c. External Non-Financial Reporting Objectives
      - Comply with applicable external Standards and Frameworks;
      - Consider the expected level of precision;
      - Present the entity's activities.

   d. Internal Reporting Objectives (financial and non-financial)
      - Reflect Management's choices;
      - Consider the expected level of precision;
      - Reflect the activities of the entity.

   e. Compliance Objectives
      - Reflect the provisions of applicable laws and regulations;
      - Considering Risk Tolerance.

2. Risk Identification
   Management identifies risks faced in achieving overall objectives and conducts risk analysis as a basis for determining how these risks are managed.
   a. Risk identification covers the company as a whole and work units;
   b. Analysis of internal and external factors;
   c. Involve management at the appropriate level;
   d. Estimate the significance of the identified risks;
   e. Determine how to respond to the risk.

3. Fraud Risk
   In assessing the risk of achieving objectives, management considers the potential for fraud. Considering the various types of fraud and the factors that trigger their occurrence by using the "triangle fraud" model as follows:

a. Melakukan asesmen atas insentif dan tekanan;
b. Melakukan asesmen atas kesempatan;
c. Melakukan asesmen atas tingkah laku dan rasionalisasi.

4. Perubahan
Manajemen mengidentifikasi dan melakukan asesmen atas perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal.
a. Melakukan asesmen atas perubahan-perubahan di lingkungan eksternal;
b. Melakukan asesmen atas perubahan-perubahan dalam model bisnis;
c. Melakukan asesmen atas perubahan-perubahan dalam kepemimpinan.

a. Conduct an assessment of incentives and pressures;
b. Conduct an assessment of opportunities;
c. Assessing behavior and rationalization.

4. Change
Management identifies and assesses changes that could significantly affect the internal control system.

a. Assess changes in the external environment;

b. Assess changes in the business model;

c. Assess leadership changes.

Aktivitas Pengendalian *(control activities)*

Aktivitas pengendalian adalah penetapan kebijakan dan prosedur serta implementasinya untuk menjamin pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan ini memungkinkan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada. Para manajer di lingkungan PT ASABRI (Persero), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat bisnis perusahaan.

1. Pemilihan dan Pengembangan Aktivitas Pengendalian
Manajemen melakukan pemilihan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang akan berkontribusi dalam mitigasi risiko pencapaian tujuan ke tingkatan yang dapat diterima.
a. Terintegrasi dengan asesmen atas risiko;
b. Mempertimbangkan faktor-faktor yang spesifik di perusahaan;
c. Menentukan proses bisnis yang relevan;
d. Melakukan evaluasi atas jenis-jenis aktivitas pengendalian yang saling berkaitan;
e. Mempertimbangkan tingkatan aktivitas penerapannya;
f. Memperhatikan pemisahan tugas.
2. Pemilihan dan Pengembangan Pengendalian Umum
Manajemen melakukan pemilihan dan mengembangkan aktivitas Pengendalian Umum atas teknologi untuk menunjang pencapaian tujuan.
a. Menentukan saling ketergantungan antara penggunaan tekonologi dalam proses bisnis dan teknologi pengendalian umum;
b. Membangun aktivitas pengendalian insfrastruktur teknologi yang relevan;
c. Membangun aktivitas pengendalian proses manajemen keamanan;
d. Membangun aktivitas pengendalian proses pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi.

Control Activities

Control activities are establishing policies and procedures and their implementation to ensure the achievement of company objectives. This activity enables taking various actions necessary to manage risks to achieve company objectives. Control activities occur throughout the organization, at all levels, and in all existing functions. PT ASABRI (Persero) managers organize control activities under the size, complexity, and nature of the company's business.

1. Selection and Development of Control Activities
Management selects and develops control activities to mitigate the risk of achieving objectives to an acceptable level.
a. Integrated with the assessment of risk;
b. Consider company-specific factors;
c. Determine relevant business processes;
d. Evaluate the types of control activities that are interrelated;
e. Consider the level of implementation activities;
f. Pay attention to the separation of duties.
2. Selection and Development of General Control
Management selects and develops General Control activities over technology to support goal achievement.
a. Determine the interdependence between the use of technology in business processes and general control technology;
b. Establish relevant technology infrastructure control activities;
c. Establish control activities of the security management process;
d. Establish control activities for technology procurement, development, and maintenance.

3. Penyusunan kebijakan rinci
   Manajemen menurunkan/merinci aktivitas pengendalian menjadi kebijakan yang menggambarkan apa yang diharapkan dan prosedur untuk menjalankan kebijakan tersebut.
   a. Membangun kebijakan dan prosedur untuk menjelaskan arahan manajemen;
   b. Membangun pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur;
   c. Pelaksanaan yang tepat waktu;
   d. Adanya tindakan koreksi;
   e. Pelaksanaan oleh personil yang kompeten;
   f. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur.

Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication)*

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan atas hal-hal yang terkait dengan operasional, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Informasi diidentifikasi, diperoleh, diproses, dan dilaporkan oleh sistem informasi. Sumber informasi dapat berasal dari internal dan eksternal, yang antara lain meliputi industri, ekonomi, dan peraturan.

1. Informasi yang relevan dan berkualitas
   Manajemen mendapatkan dan menggunakan infomasi yang relevan dan berkualitas untuk menunjung berfungsinya pengendalian internal.
   a. Mengidentifikasi kebutuhan informasi;
   b. "Menangkap" sumber data internal dan eksternal;
   c. Memproses data yang relevan menjadi informasi;
   d. Menjaga kualitas data yang diproses;
   e. Memperhitungkan biaya dan manfaat.
2. Komunikasi internal
   Informasi dikomunikasikan secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab.
   a. Mengidentifikasi informasi tentang pengendalian internal;
   b. Komunikasi dengan Direksi;
   c. Menyediakan jalur komunikasi yang terpisah sesuai kebutuhan;
   d. Memilih metode komunikasi yang relevan.
3. Komunikasi dengan eksternal
   Manajemen berkomunikasi dengan pihak eksternal yang relevan tentang hal-hal penting yang berpengaruh kepada pengendalian internal.
   a. Berkomunikasi dengan pihak eksternal yang relevan;
   b. Membangun komunikasi yang interaktif;
   c. Berkomunikasi dengan Dewan Komisaris;
   d. Menyediakan jalur komunikasi yang terpisah sesuai kebutuhan;
   e. Memilih metode komunikasi yang relevan.

3. Detailed policy development
   Management reduces/details control activities into policies that describe what is expected and the procedures for carrying out these policies.
   a. Develop policies and procedures to explain management directives;
   b. Establish responsibility and accountability for carrying out policies and procedures;
   c. Timely implementation;
   d. Corrective action is in place;
   e. Implementation by competent personnel;
   f. Evaluation of policies and procedures.

Information and Communication

Information and communication is the identification, capture, and exchange of information that enables people to carry out their responsibilities. Information systems generate reports on operations, finance, and regulatory compliance matters. Information is identified, obtained, processed, and reported by information systems. Sources of information can be internal and external, which include industry, economy, and regulations.

1. Relevant and quality information
   Management obtains and uses relevant and quality information to support the functioning of internal control.
   a. Identify information needs;
   b. "Capture" internal and external data sources;
   c. Processing relevant data into information;
   d. Maintain the quality of the processed data;
   e. Taking into account costs and benefits.
2. Internal communication
   Information is communicated internally, including objectives and responsibilities.
   a. Identifying information on internal control;
   b. Communication with the Board of Directors;
   c. Provide separate communication channels as needed;
   d. Select relevant communication methods.
3. Communication with external parties
   Management communicates with relevant external parties on important matters affecting internal control.
   a. Communicate with relevant external parties;
   b. Establish interactive communication;
   c. Communicate with the Board of Commissioners;
   d. Provide separate communication channels as needed;
   e. Select relevant communication methods.

Pemantauan *(Monitoring)*

Untuk meyakinkan terciptanya SISDALIN yang berkualitas pemantauan atau pengawasan yang berkesinambungan perlu dilakukan. Aktivitas pengawasan yang berkesinambungan dapat menemukan kelemahan dan dapat segera diperbaiki untuk peningkatan efektivitas SISDALIN.

Setiap unit kerja di lingkungan PT ASABRI (Persero) wajib menyelenggarakan pemantuan Pengendalian Intern (SISDALIN). Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, meliputi penilaian atas desain dan pengoperasian pengendalian. Pemahaman atas pemantauan meliputi pemahaman bagaimana entitas memiliki strategi untuk menjamin pelaksanaan pemantauan berkelanjutan, bagaimana manajemen entitas menetapkan ruang lingkup, evaluasi pengendalian intern, metodologi evaluasi, dan kelemahan dalam evaluasi.

1. Meyakinkan bahwa Pengendalian Internal Berfungsi
   Manajemen menentukan, mengembangkan dan melakasanakan evaluasi yang berkelanjutan dan/atau evaluasi secara tersendiri untuk memberikan keyakinan bahwa komponen-komponen pengendalian internal sudah dibangun dan berfungsi.
   a. Pertimbangkan untuk mengkombinasikan evaluasi interaktif dan evaluasi terpisah/tersendiri;
   b. Pertimbangkan tingkat perubahan yang terjadi;
   c. Membangun pemahaman yang menjadi suatu acuan;
   d. Gunakan personel yang memiliki pengetahuan cukup;
   e. Integrasi dengan proses bisnis;
   f. Lakukan penyesuaian atas lingkup dan frekuensi pemantauan;
   g. Evaluasi secara obyektif.
2. Penanganan atas kelemahan dalam pengendalian internal
   Manajemen melakukan evaluasi dan mengomunikasikan penyimpangan atas pengendalian internal dalam waktu yang tepat kepada pihak-pihak yang berwenang melakukan tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan Dewan Komisaris, jika memang diperlukan.
   a. Asesmen atas hasil pemantauan;
   b. Komunikasikan penyimpangan yang terjadi;
   c. Pemantauan atas tindak lanjut;
   d. Gunakan personel yang memiliki pengetahuan cukup.

Monitoring

Continuous monitoring or supervision must be carried out to ensure the creation of a quality SISDALIN. Continuous supervisory activities can find weaknesses and be immediately corrected to increase the effectiveness of SISDALIN.

Every work unit within PT ASABRI (Persero) is required to organize Internal Control monitoring (SISDALIN). Monitoring is the process of assessing the quality of internal control performance over time, including an assessment of the design and operation of controls. Understanding monitoring includes understanding how the entity has a strategy to ensure the implementation of continuous monitoring, how the entity's management determines the scope, evaluation of internal control, evaluation methodology, and weaknesses in the evaluation.

1. Assuring that Internal Control Works
   Management determines, develops, and conducts ongoing and/or discrete evaluations to ensure the internal control components are established and functioning.
   a. Consider combining interactive evaluations and separate evaluations;
   b. Consider the degree of change;
   c. Build an understanding that becomes a baseline;
   d. Use personnel with sufficient knowledge;
   e. Integration with business processes;
   f. Make adjustments to the scope and frequency of monitoring;
   g. Evaluate objectively.
2. Addressing weaknesses in internal control
   If necessary, management promptly evaluates and communicates deviations from internal control to those authorized to take corrective action, including senior management and the Board of Commissioners.
   a. Assessment of monitoring results;
   b. Communicate deviations that occur;
   c. Monitoring of follow-up actions;
   d. Use personnel with sufficient knowledge.

Manajemen Risiko
Risk Management

Penerapan manajemen risiko berperan sebagai mekanisme deteksi dini dengan meminimalisir eksposur risiko serta mempersiapkan upaya mitigasinya. Dalam menjamin efektivitas manajemen risiko yang berkelanjutan, ASABRI mengkaji dan mengevaluasi manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan profil-profil risiko yang dimiliki dan memastikan kecukupan perangkat kebijakan yang di miliki

The implementation of risk management acts as an early detection mechanism by minimizing risk exposure and preparing mitigation efforts. In ensuring the effectiveness of sustainable risk management, ASABRI periodically reviews and evaluates risk management by considering its risk profiles and ensuring the adequacy of its policy tools

Kehadiran ASABRI sebagai entitas usaha yang menyediakan jasa asuransi dan jaminan sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri senantiasa dituntut untuk mengaplikasikan praktik-praktik dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel dalam menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang. Namun dalam pelaksanaannya, ASABRI selalu dihadapkan dengan eksposur risiko dalam proses bisnisnya. Memahami hal tersebut, ASABRI menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan efisien yang disusun dalam manajemen risiko yang logis, cermat, dan terstruktur sebagai bagian dari pengupayaan praktik terbaik (*best practices*) GCG. ASABRI menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan risiko dapat terwujud bila didukung oleh lingkungan dan iklim bisnis yang menerapkan budaya sadar risiko. Untuk itu, ASABRI senantiasa mendorong pengupayaan penerapan budaya risiko secara komprehensif di seluruh jajaran Perusahaan sehingga pengelolaan risiko dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

The existence of ASABRI as a business entity that provides insurance and social security services for TNI Soldiers, Polri Members, and Civil Servants of the Ministry of Defense/Polri (ASN Kemhan/Polri) is always required to apply healthy and accountable corporate practices and principles in ensuring long-term business sustainability. However, in its implementation, ASABRI is always faced with risk exposure in its business processes. Understanding this, ASABRI realizes the importance of effective and efficient risk management structured in logical, careful, and structured risk management as part of the pursuit of GCG best practices. ASABRI realizes that the success of risk management can be realized if it is supported by an environment and business climate that applies a risk-aware culture. For this reason, ASABRI always encourages efforts to implement a comprehensive risk culture at all levels of the Company so that risk management can run consistently and sustainably.

Dasar Hukum Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko ASABRI dilakukan dengan bersandar pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pengawasan Pengelolaan Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan;

Legal Basis for Risk Management Implementation

ASABRI risk management implementation is carried out by relying on applicable regulations and laws, which include:

1. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 25 of 2022 dated December 20, 2022, on the Supervision of the Management of the Social Insurance Program for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police by the Financial Services Authority;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/05/KOM/AS/VII/2019; Nomor KEP/PH.03/49-AS/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT ASABRI (Persero);
5. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero);
6. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASABRI (Persero).

Struktur Pengelola Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko yang baik merupakan komitmen ASABRI dalam menjamin keberhasilan usahanya dan menjadi salah satu esensi dari tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan manajemen risiko ASABRI dapat memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengurus Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian Perusahaan. Sejalan dengan pentingnya fungsi pengelolaan risiko Perusahaan, sejak tahun 2012 ASABRI telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, hukum, dan manajemen risiko dalam wadah organisasi Divisi Kepatuhan, Hukum, dan Manajemen Risiko yang mengacu pada Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/161-AS/XI/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja ASABRI. Pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian organisasi menjadi unit kerja *Desk* Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/04-AS/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero). Perubahan organisasi pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero)

2. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 44/POJK.05/2020 dated August 28, 2020, on the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
4. Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/05/KOM/AS/VII/2019; Number KEP/PH.03/49-AS/VII/2019 dated July 17, 2019, on Good Corporate Governance Guidelines of PT ASABRI (Persero);
5. Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 dated February 2, 2022, on Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero) as amended by Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 dated July 29, 2022, on Business Process Map of PT ASABRI (Persero);
6. Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 dated August 4, 2020, on Risk Management Guidelines of PT ASABRI (Persero).

Risk Management Management Structure

Good risk management is ASABRI commitment to ensuring the success of its business and is one of the essences of good corporate governance. The implementation of ASABRI risk management can provide a comprehensive picture to stakeholders and Company management regarding the potential opportunities and losses of the Company. In line with the importance of the Company's risk management function, since 2012, ASABRI has established a work unit that carries out compliance, legal, and risk management functions within the organization of the Compliance, Legal, and Risk Management Division, which refers to the Decree of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number Kep/161-AS/XI/2011 dated November 21, 2011, on ASABRI Organization and Work Procedures. In 2020, organizational adjustments were made to the Risk Management Desk work unit following the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/04-AS/III/2020 dated March 27, 2020, on the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero). Organizational changes in 2022 as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI

Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) di mana unit kerja *Desk* Manajemen Risiko menjadi Divisi Manajemen Risiko hingga saat ini.

(Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 dated February 2, 2022, on Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero) in which the Risk Management Desk work unit became the Risk Management Division until now.



Berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero), Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam pengelolaan perencanaan strategi, kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta improvisasi manajemen risiko keuangan dan operasional/non-keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif oleh Direksi, ASABRI juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko Dan *Asset Liability Management* yang sebagai komite pendukung Direksi dengan tugas memberikan rekomendasi dan pendapat atas pengelolaan risiko, pengelolaan aset dan liabilitas, serta perumusan kebijakan dan strategi, berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/MR.04.02/20-AS/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Komite Manajemen Risiko Dan *Asset Liability Management*

Based on the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 dated February 2, 2022, on the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero) as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 dated July 29, 2022, on the Business Process Map of PT ASABRI (Persero), the Risk Management Division is responsible for managing strategic planning, policy, implementation, monitoring and evaluation, and improvisation of financial and operational/non-financial risk management based on risk management principles, frameworks and processes. To support effective decision-making by the Board of Directors, ASABRI has also established the Risk Management and Asset Liability Management Committee as a supporting committee of the Board of Directors with the task of providing recommendations and opinions on risk management, asset and liability management as well as formulating policies and strategies, based on the Decree of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/MR.04.02/20-AS/IX/2022 dated September 30, 2022, on the Risk Management and Asset Liability Management Committee.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko dan Penerapan *Three Lines Model*

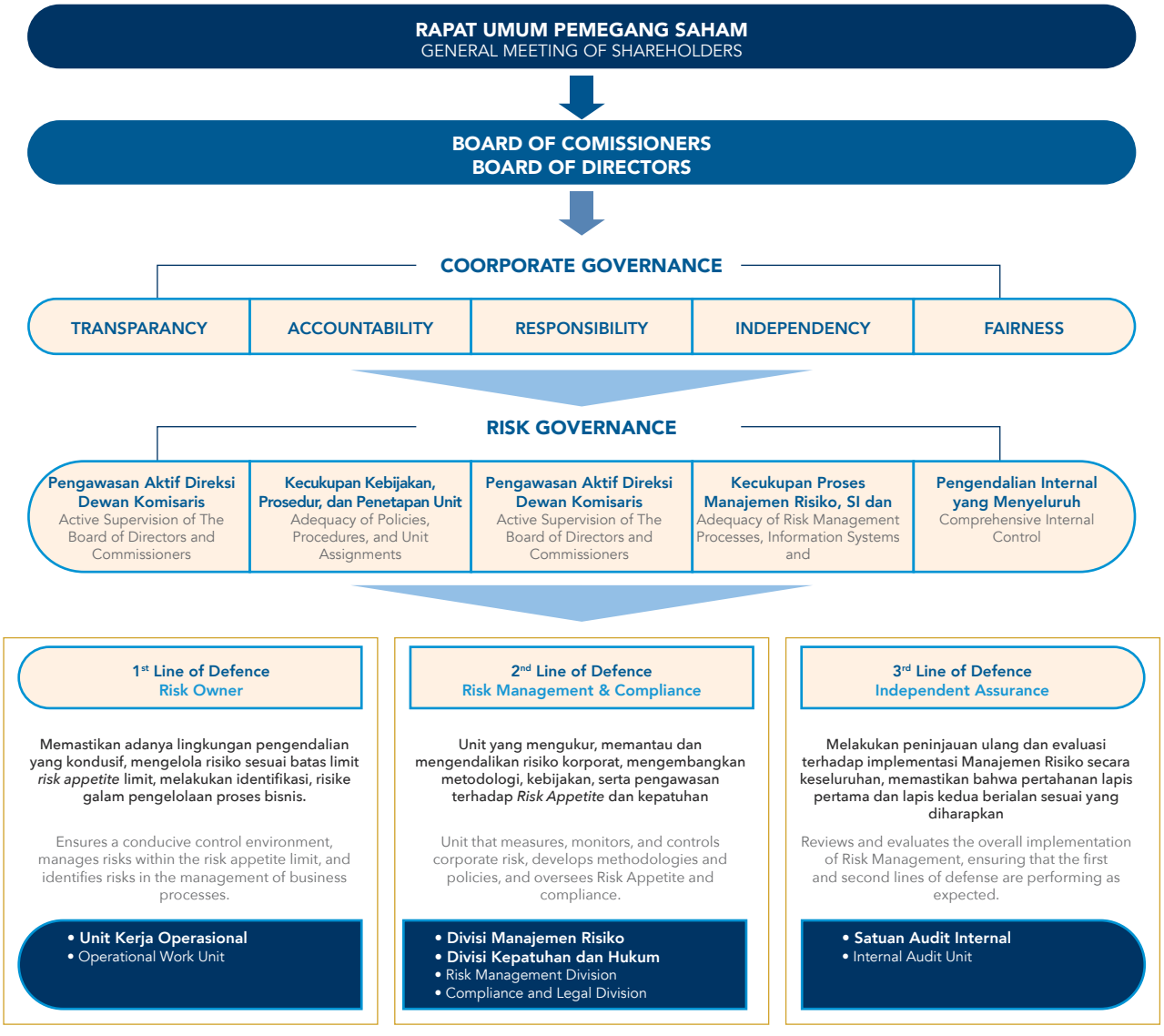
ASABRI menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) dalam melaksanakan Manajemen Risiko. Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata Kelola Risiko tiga lini (*three lines model*) adalah sebagai berikut:

1. Lini pertama sebagai unit pemilik Risiko merupakan unit bisnis/operasional yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnisnya;
2. Lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, merupakan unit yang mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
3. Lini ketiga, sebagai fungsi independent assurance merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif oleh Perusahaan.

Risk Management Governance Structure and Implementation of Three Lines Model

ASABRI applies the three lines model in implementing Risk Management. The functions and roles of each line in the three lines model are as follows:

1. The first line, as the Risk owner unit, is a business/operational unit that directly identifies and manages risks in its business processes;
2. The second line, as the Risk Management and Compliance function, is a unit that measures, monitors, and controls risks in the aggregate, develops methodologies and the Company's Risk Management Policy;
3. The third line, as an independent assurance function, is that the Company effectively implements a unit that ensures governance and risk control.



Standar Praktik Manajemen Risiko

Manajemen risiko menjadi bagian dalam proses bisnis di ASABRI yang mulai dibangun sejak tahun 2012. Sistem manajemen risiko yang digunakan mengacu kepada ISO 31000:2018 tentang *risk management principles and guidelines*. Kerangka kerja ISO 31000:2018 diturunkan kedalam Pedoman Manajemen Risiko ASABRI yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko PT ASABRI (Persero) yang mengatur lingkup ketentuan prinsip, kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen risiko, konteks bisnis korporat, serta implementasi proses manajemen risiko.

Dalam ISO 31000:2018, sistem Manajemen Risiko terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:
1. Prinsip-prinsip manajemen risiko;
2. Kerangka kerja manajemen risiko;
3. Proses manajemen risiko.

Area Pengelolaan Risiko

Perusahaan membagi area pengelolaan risiko atas tiga bagian besar, yaitu:
1. Pengelolaan risiko di tingkat Korporat;
2. Pengelolaan risiko di tingkat Divisi/Cabang;
3. Pengelolaan risiko di tingkat Bidang.



Risk Management Standard of Practice

Risk management is a part of the business process in ASABRI, which began to be built in 2012. The risk management system refers to ISO 31000: 2018 concerning risk management principles and guidelines. The ISO 31000: 2018 framework is derived from the ASABRI Risk Management Guidelines stipulated in the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/MR.03.03/06-AS/VIII/2020 dated August 4, 2020, on Risk Management Guidelines of PT ASABRI (Persero), which regulates the scope of principle provisions, risk management framework, and risk management processes, corporate business context, and implementation of risk management processes.

In ISO 31000: 2018, the Risk Management system consists of 3 (three) components, namely:
1. Risk management principles;
2. Risk management framework;
3. Risk management process.

Risk Management Areas

The Company divides the risk management area into three major parts as follows:
1. Risk management at the Corporate level;
2. Risk management at the Division/Branch level;
3. Risk management at the Field level.



Area pengelolaan risiko ASABRI menunjukkan bahwa setiap sasaran pengelolaan risiko di tingkat korporat/ Direktorat harus dijabarkan (*cascading*) menjadi sasaran di tingkat Divisi/Cabang dan kemudian sasaran di tingkat Divisi/Cabang dijabarkan menjadi sasaran di tingkat Bidang. Sebaliknya, informasi risiko dari tingkat Bidang diagregasikan (*aggregating*) menjadi informasi risiko Divisi/Cabang dan informasi risiko Divisi/Cabang diagregasikan menjadi informasi risiko korporat/ Direktorat.

Kategori Risiko yang Dikelola

Kategori risiko yang digunakan oleh Perusahaan sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tanggal 02 September 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yaitu:

1. Risiko Strategis
   Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Risiko Operasional
   Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.
3. Risiko Asuransi
   Risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
4. Risiko Kredit
   Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.
5. Risiko Pasar
   Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
6. Risiko Likuiditas
   Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.
7. Risiko Hukum
   Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

ASABRI risk management area shows that each risk management target at the corporate/directorate level must be cascaded into targets at the Division/Branch level, and then targets at the Division/Branch level are translated into targets at the Field level. Conversely, risk information from the Division level is aggregated into Division/Branch risk information, and Division/Branch risk information is aggregated into corporate/Directorate risk information.

Risk Categories Managed

The risk categories used by the Company as in the Financial Services Authority Regulation Number 44/ POJK.05/2020 dated September 02, 2020, on the Implementation of Risk Management for Non-bank Financial Services Institutions are:

1. Strategic Risk
   Risks due to inaccuracies in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.
2. Operational Risk
   Risks resulting from inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external events affecting the operations of the LJKNB.
3. Insurance Risk
   The risk of failure of insurance companies, reinsurance companies, sharia insurance companies, and sharia reinsurance companies to fulfill obligations to policyholders, insureds, or participants as a result of the inadequacy of the risk selection process (underwriting), determination of premiums or contributions, use of reinsurance, and/or handling of claims.
4. Credit Risk
   Risk due to the failure of other parties to fulfill obligations to LJKNB.
5. Market Risk
   Risk in the position of assets, liabilities, equity, and/ or administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions.
6. Liquidity Risk
   Risk resulting from the inability of an LJKNB to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or liquid assets that can be easily converted into cash without disrupting the activities and financial condition of the LJKNB.
7. Legal Risk
   Risks arising from lawsuits and/or weaknesses in legal aspects.

8. Risiko Kepatuhan
   Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.
9. Risiko Reputasi
   Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.

8. Compliance Risk
   Risks resulting from LJKNB not complying with and/or not implementing laws, regulations, and provisions applicable to LJKNB.
9. Reputation Risk
   Risk due to a decrease in stakeholders' trust level stemming from negative perceptions of the LJKNB.

Taksonomi Risiko

ASABRI menetapkan taksonomi risiko yang terdiri dari tema risiko (T1), kategori risiko (T2), dan kelompok peristiwa risiko agregasi (T3). Penetapan tema risiko (T1), dan kategori risiko (T2) mendasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, yaitu :

Risk Taxonomy

ASABRI establishes a risk taxonomy consisting of risk themes (T1), risk categories (T2), and aggregation risk event groups (T3). The determination of risk themes (T1) and risk categories (T2) is based on the Financial Services Authority Regulation Number 44/POJK.05/2020 on the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions as follows:

Level	**Taksonomi Risiko** Risk Taxonomy		
Level 1	Risiko *Governance* Governance Risk	Risiko Keuangan Financial Risk	Risiko Bisnis Business Risk
Level 2	• Risiko Hukum • Risiko Kepatuhan • Risiko Reputasi • Legal Risk • Compliance Risk • Reputation Risk	• Risiko Kredit • Risiko Pasar • Risiko Likuiditas • Risiko Operasional • Credit Risk • Market Risk • Liquidity Risk • Operational Risk	• Risiko Strategis • Risiko Asuransi • Strategic Risk • Insurance Risk

Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2022

Pengembangan manajemen risiko Perusahaan dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai Perusahaan tetap terjaga serta berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kebutuhan Perusahaan terkini. Untuk mendukung hal tersebut Divisi Manajemen Risiko telah menyusun dan merealisasikan program kerja yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan kajian risiko keuangan untuk transaksi investasi dan kajian risiko operasional dalam pengembangan kegiatan operasional Perusahaan;
2. Penyusunan *Blueprint Early Warning System*;
3. Pelaksanaan *Risk Maturity Assement* oleh pihak independen;
4. Penerbitan Surat Edaran Peningkatan Budaya Sadar Risiko di Lingkungan PT ASABRI (Persero);
5. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Kebijakan *Asset Liability Management*
6. Penerbitan Peraturan Direksi tentang Komite Manajemen Risiko dan *Asset Liability Management;*
7. Evaluasi secara berkala integrasi sistem investpro & Axapta;
8. Peningkatan kompetensi manajemen risiko untuk pegawai dengan melaksanakan pelatihan, *workshop*, dan sertifikasi manajemen risiko.

Risk Management Work Program for 2022

The development of the Company's risk management is carried out on an ongoing basis so that the Company's values are maintained and developed following the needs and conditions of the Company's current needs. To support this, the Risk Management Division has compiled and realized the work program implemented during 2022 as follows:

1. Implementation of financial risk assessment for investment transactions and operational risk assessment in the development of the company's operational activities;
2. Preparation of Early Warning System Blueprint;
3. Implementation of Risk Maturity Assessment by an independent party;
4. Issuance of Circular Letter on Increasing Risk Awareness Culture within PT ASABRI (Persero);
5. Issuance of Board of Directors Regulation on Asset Liability Management Policy
6. Issuance of Board of Directors Regulation on Risk Management and Asset Liability Management Committee;
7. Periodic evaluation of investpro & Axapta system integration;
8. Improvement of risk management competencies for employees by conducting training, workshops, and risk management certification.

Top Risks Profil Risiko RKAP 2022

Dalam rangka memberikan keyakinan terhadap pencapaian sasaran Perusahaan yang tertuang dalam RKAP Tahun 2022, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan risiko secara terstruktur dan terintegrasi serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi potensi kerugian bagi Perusahaan. Penerapan implementasi manajemen risiko merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan menjadi bagian integral dalam pelaksanaan sistem manajemen Perusahaan.

Sebanyak 16 (enam belas) sasaran yang tertuang dalam *Key Performance Indicators* pada RKAP 2022 telah teridentifikasi risikonya dan telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) risiko utama. Berikut nilai risiko awal dan nilai risiko akhir:

Top Risks of 2022 RKAP Risk Profile

To ensure the achievement of the company's goals, as stated in the 2022 RKAP, the company is committed to conducting structured and integrated risk management and establishing appropriate mitigation measures to reduce potential losses for the company. The implementation of risk management is an important pillar in realizing good corporate governance and is an integral part of the implementation of the company's management system.

A total of 16 (sixteen) targets in the Key Performance Indicators in RKAP 2022 have been identified, and 5 (five) main risks have been determined. The following are the initial risk value and final risk value:

No	Sasaran Kinerja Performance Objective	Target Target	Pencapaian Achievement	Nama/Peristiwa Risiko Risk Name/Event	Nilai Risiko Awal Initial Risk Value	Nilai Risiko Akhir Final Risk Value
1	Solvabilitas Solvency	375,23%	74,26%	Nilai UPSL yang disetujui lebih rendah daripada usulan. The approved UPSL value is lower than the proposal.	Sedang Tinggi Medium-High	Sedang Tinggi Medium-High
2.	*YOI*	5,42%	3,21%	Terjadinya penurunan hasil investasi Decrease in investment returns	Sedang Tinggi Medium-High	Sedang Tinggi Medium-High
3	Rasio Kecukupan Investasi The Investment Adequacy Ratio	98,64%	87,51%	Terdapat peningkatan liabilitas yang tidak diimbangi dengan peningkatan aset An increase in assets does not offset an increase in liabilities.	Sedang Tinggi Medium-High	Sedang Medium
4	Hasil Underwriting Bersih Net Underwriting Result	j l		Terjadi peningkatan negatif underwriting There was an increase in negative underwriting.	Sedang Medium	Sedang Medium
5	Pemberdayaan Platform Aplikasi Application Platform Enablement	200.000 unduhan downloads	456.551 unduhan downloads	Peserta tidak melakukan pengunduhan dan pengkinian data pada aplikasi ASABRI Mobile Participants do not download and update data on the ASABRI Mobile application.	Sedang Medium	Rendah Low

Keterangan:

1. Sasaran kinerja *Solvabilitas* pada tahun 2022 sebesar positif 74,26% dari target sebesar positif 375,23% dengan telah disetujuinya usulan Perusahaan terhadap penerimaan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4,5 triliun dari pengajuan awal sebesar Rp6,2 triliun. Pencapaian solvabilitas mengalami koreksi dengan adanya penurunan tingkat suku bunga aktuaria yang sebelumnya sebesar 9,7%, menjadi sebesar 9,5%. Atas hal tersebut level risiko tetap pada Sedang Tinggi.

Description:

1. Solvency performance target in 2022 amounted to positive 74.26% of the target of positive 375.23% with the approval of the Company's proposal to receive Unfunded Past Service Liability (UPSL) from the Ministry of Finance amounting to IDR4.5 trillion from the initial submission of IDR6.2 trillion. The solvency achievement was corrected by a decrease in the actuarial interest rate from 9.7% to 9.5%. For this reason, the risk level remains at Medium-High.

2. Sasaran kinerja *Yield on Investment* sebesar positif 3,21% dari target sebesar positif 5,42% pada tahun 2022 dengan menjalankan rencana mitigasi yaitu melakukan *rebalancing* portfolio ke arah yang lebih produktif dan pemilihan instrumen investasi yang dapat meningkatkan kinerja investasi sesuai dengan SAA. Atas hal tersebut level risiko tetap pada Sedang Tinggi.
3. Sasaran kinerja Rasio Kecukupan Investasi pada tahun 2022 sebesar 87,51% dari target sebesar 98,64% dengan menjalankan rencana mitigasi yaitu melakukan *rebalancing* portfolio ke arah yang lebih produktif dan pemilihan instrumen investasi yang dapat meningkatkan kinerja investasi sesuai dengan SAA. Rencana mitigasi tersebut mampu menurunkan level risiko dari Sedang Tinggi ke Sedang;
4. Sasaran hasil *underwriting* bersih pada tahun 2022 tidak tercapai di mana realisasi sebesar
   lebih rendah dibandingkan target sebesar negatif
   dengan menjalankan rencana mitigasi yaitu melakukan *rebalancing* portfolio ke arah yang lebih produktif dan pemilihan instrumen investasi yang dapat meningkatkan kinerja investasi sesuai dengan SAA. Atas hal tersebut level risiko tetap pada Sedang;
5. Sasaran pemberdayaan platform aplikasi pada tahun 2022 sebesar 456.551 aplikasi yang diunduh dari target sebesar 200.000 aplikasi yang diunduh, dengan mitigasi yaitu penetapan target per Kancab. Rencana mitigasi tersebut mampu menurunkan level risiko dari Sedang ke Rendah.

Peringkat Risiko Komposit Tahun 2022

Perusahaan menyusun profil risiko komposit untuk tahun 2022 yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Asuransi Sosial. Peringkat komposit untuk Sembilan jenis risiko di PT ASABRI (Persero) tahun 2022 ada pada tingkat sedang rendah dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Yield on Investment performance target of positive 3.21% from a target of positive 5.42% in 2022 by implementing a mitigation plan, including rebalancing the portfolio towards a more productive direction and selecting investment instruments to improve investment performance following the SAA. For this reason, the risk level remains at Medium-High.
3. The Investment Adequacy Ratio performance target in 2022 amounted to 87.51% of the target of 98.64% by implementing a mitigation plan, including rebalancing the portfolio towards a more productive direction and selecting investment instruments that can improve investment performance following the SAA. The mitigation plan can reduce the risk level from Medium-High to Medium;
4. The net underwriting result target in 2022 was not achieved where the realization was negative
   , lower than the target of negative I
   by implementing the mitigation plan, including rebalancing the portfolio towards a more productive direction and selecting investment instruments that can improve investment performance following the SAA. For this reason, the risk level remains Medium;
5. The target of application platform empowerment in 2022 is 456,551 applications downloaded from a target of 200,000 applications downloaded, with mitigation, including setting targets per Branch. The mitigation plan can reduce the risk level from Medium to Low.

Composite Risk Rating for 2022

The Company prepares a composite risk profile for 2022, which refers to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 1/SEOJK.05/2021 on Health Level Assessment of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies tailored to the needs of Social Insurance Companies. The composite rating for nine types of risks at PT ASABRI (Persero) in 2022 is at a Mediumly low level with the following explanation.

Penilaian Tingkat Risiko
Risk Level Assessment

Nama Perusahaan	: PT ASABRI (Persero)	Company Name	: PT ASABRI (Persero)
Tahun Posisi Laporan	: 2022	Year of Report Position	: 2022

Profil Risiko Risk Profile	**Peringkat Risiko Inheren** Inherent Risk Rating	**Peringkat KPM R** KPM Rating R	**Nilai Komposit** Composite Value
Risiko Strategis Strategic Risk	Sedang Rendah Medium-low	Agak Kuat Quite Strong	Sedang Rendah Medium-low
Risiko Operasional Operational Risk	Sedang Medium	Agak Kuat Quite Strong	Sedang Rendah Medium-low
Risiko Kredit Credit Risk	Sedang Tinggi Medium-High	Agak Kuat Quite Strong	Sedang Medium

Penilaian Tingkat Risiko
Risk Level Assessment

Nama Perusahaan : PT ASABRI (Persero)
Tahun Posisi Laporan : 2022

Company Name : PT ASABRI (Persero)
Year of Report Position : 2022

Profil Risiko Risk Profile	Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating	Peringkat KPM R KPM Rating R	Nilai Komposit Composite Value
Risiko Asuransi Insurance Risk	Sedang Tinggi Medium-High	Cukup Fair	Sedang Tinggi Medium-High
Risiko Pasar Market Risk	Tinggi High	Cukup Fair	Sedang Tinggi Medium-High
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Tinggi High	Agak Kuat Quite Strong	Sedang Medium
Risiko Hukum Legal Risk	Rendah Low	Kuat Strong	Rendah Low
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Rendah Low	Kuat Strong	Rendah Low
Risiko Reputasi Reputation Risk	Rendah Low	Kuat Strong	Rendah Low
Profil Risiko Komposit Composite Risk Profile			Sedang Rendah Medium-Low

Nilai komposit pada setiap jenis risiko di PT ASABRI (Persero) tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis
   Peringkat *inheren* risiko strategis pada tahun 2022 berada pada tingkat sedang rendah, indikator komposit yang menyebabkan tingkat risiko sedang rendah antara lain dalam pencapaian target RKAP perusahaan masih terpengaruh dari beberapa kondisi seperti penerimaan premi yang lebih kecil dari kewajiban pembayaran klaim. Kinerja portfolio sebelum tahun 2020 yang cenderung tidak membaik. Namun perusahaan cukup siap dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro dengan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.

   Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan telah menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti pelaksanaan kerja sama pertukaran data Peserta dan koordinasi untuk pemuktahiran dan kelengkapan data Peserta dengan TNI, POLRI, Dukcapil, BKN, dan *stakeholder* terkait lainnya sehingga Perusahaan memiliki data kepesertaan yang akurat untuk mendorong penerimaan iuran dengan jumlah yang sesuai. Pemutakhiran data peserta juga didorong melalui penggunaan ASABRI Mobile dan aplikasi autentikasi digital. Perusahaan juga mengupayakan adanya penyesuaian premi pada program THT dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. KPMR pada Risiko Strategis secara implementasi harus tetap konsisten untuk meningkatkan improvement sehingga pencapaian strategis Perusahaan dapat selalu tercapai.

The composite value of each type of risk at PT ASABRI (Persero) in 2022 can be explained as follows.

1. Strategic Risk
   The inherent rating of strategic risk in 2022 is at a medium-low level; composite indicators that cause a medium-low-risk level include the achievement of the company's RKAP target, which is still affected by several conditions, such as premium receipts that are smaller than claim payment obligations. Portfolio performance before 2020 tends not to improve. However, the company is ready to face macroeconomic changes with some weaknesses that need improvement.

   For the inherent risk rating, the company has implemented quality risk management implementation (KPMR) with several control activities, such as the implementation of cooperation in the exchange of Participant data and coordination for the updating and completeness of Participant data with the TNI, POLRI, Dukcapil, BKN, and other relevant stakeholders so that the company has accurate membership data to encourage the receipt of contributions in the appropriate amount. Updating participant data is also encouraged through the use of ASABRI Mobile and digital authentication applications. The company also seeks premium adjustments in the THT program in coordination with the Ministry of Finance. KPMR on Strategic Risk in implementation must remain consistent to improve improvements so that the company's strategic achievements can always be achieved.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko strategis berada pada tingkat sedang rendah.

2. Risiko Operasional
Peringkat *inheren* risiko operasional pada tahun 2022 berada pada tingkat sedang, beberapa indikator komposit yang menyebabkan tingkat risiko sedang antara lain belum menyeluruhnya prosedur administrasi yang dimiliki Perusahaan, namun prosedur yang ada cukup mudah dipahami dengan tingkat kesalahan dan penyimpangan SLA yang rendah yang didukung dengan pemenuhan kuantitas dan kualitas karyawan yang memadai dengan dilaksanakannya program pelatihan terencana dalam satu tahun untuk setiap karyawan.

Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan telah menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas penguatan seperti pemutakhiran SOP dan *Business Continuity Management* (BCM), pemantauan pelaksanaan administrasi di Kantor Cabang melalui aplikasi YANDU, dan dilaksanakannya program rekrutmen untuk pemenuhan formasi di Kantor Pusat dan Kantor Cabang baik dari jalur umum, jalur professional, maupun jalur khusus penyandang disabilitas. Dalam penguatan kompetensi Perusahaan menjalankan beberapa program, yaitu diklat kategori *softskill*, diklat kategori *hardskill*, dan Pendidikan sertifikasi profesi karyawan. KPMR pada Risiko Operasional secara implementasi masih perlu ditingkatkan mengingat dinamisnya perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi proses bisnis Perusahaan. Sehingga kesalahan-kesalahan proses maupun tumpang tindihnya SOP dapat diminimalisir dan juga terkait dengan penerapan pengendalian internal yang menyeluruh pada setiap proses bisnis.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko operasional berada pada tingkat sedang rendah.

3. Risiko Kredit
Peringkat *inheren* risiko kredit pada tahun 2022 berada pada tingkat sedang tinggi, nilai aset berisiko di atas 10%, serta adanya investasi pada pihak yang "bermasalah" yang secara otomatis menurunkan tingkat kredibilitas *counterpart* mitra investasi. Akan tetapi secara umum aset investasi yang dikelola Perusahaan telah terdiversifikasi pada instrumen-instrumen investasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan

From the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation, the risk level for strategic risk is medium-low.

2. Operational Risk
The inherent operational risk rating in 2022 is at a medium level. Several composite indicators that cause a medium risk level include the lack of comprehensive administrative procedures owned by the company. However, the existing procedures are quite easy to understand with a low level of errors and SLA deviations supported by the fulfillment of adequate quantity and quality of employees by implementing a planned training program in one year for each employee.

For the inherent risk rating, the Company has implemented quality risk management (KPMR) implementation with several strengthening activities such as updating SOPs and Business Continuity Management (BCM), monitoring the implementation of administration at Branch Offices through the YANDU application, and implementing recruitment programs to fulfill formations at the Head Office and Branch Offices both from general channels, professional channels, and special channels for people with disabilities. The Company runs several programs to strengthen competence: soft skill category training, hard skill category training, and employee professional certification education. KPMR's Operational Risk implementation still needs to be improved, considering the dynamic internal and external changes that can affect the Company's business processes. So that process errors and overlapping SOPs can be minimized and also related to the implementation of comprehensive internal controls in each business process.

From the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation, the risk level for operational risk is medium-low.

3. Credit Risk
The inherent credit risk rating in 2022 is at a medium-high level, the value of assets at risk is above 10%, and investments in "problematic" parties automatically reduce the credibility of counterpart investment partners. However, in general, the investment assets managed by the Company have been diversified into investment instruments as stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 66/PMK.02/2021 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting on the Implementation of the Program Tabungan Hari Tua, Work Accident Insurance, and Death Insurance for

Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti pelaksanaan strategi pemulihan aset, baik aset sitaan maupun non aset sitaan, pengajuan UPSL ke Kementerian Keuangan, Realokasi portofolio investasi ke arah yang lebih *moderate* melalui optimasi pendapatan *fixed income*, dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko kredit berada pada tingkat risiko sedang.

4. Risiko Asuransi
   Peringkat *inheren* risiko asuransi pada tahun 2022 berada pada tingkat sedang tinggi. Secara tren nilai penerimaan premi umumya lebih rendah dibandingkan dengan pembayaran klaim, hal ini menyebabkan nilai rasio klaim umumnya berada pada level di atas 100%, selain itu hal ini juga menyebabkan cadangan teknis tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset investasi, dikarenakan perlunya likuidasi aset untuk memenuhi pembayaran klaim.

   Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti pemantauan rasio klaim oleh komite produk dan aktuaria dan penyesuaian liabilitas Perusahaan melalui perubahan bunga aktuaria sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT PT ASABRI (Persero). Dalam implementasinya, Perusahaan telah menyampaikan kajian untuk penyesuian premi program THT ke *stakeholder*, dan proses untuk penyesuaian premi saat ini masih berlangsung, sehingga menjadi tantangan dalam mengelola risiko asuransi.

   Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko asuransi berada pada tingkat risiko sedang tinggi.

5. Risiko Pasar
   Peringkat inheren risiko pasar pada tahun 2022 berada pada tingkat tinggi, dari portfolio investasi yang dimiliki Perusahaan sebagian besar terekspose risiko pasar, selain itu permasalahan hukum terkait pengelolaan investasi Perusahaan menyebabkan beberapa aset investasi yang dimliki Perusahaan

Employees of the State Civil Apparatus, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the Indonesian National Police.

For the inherent risk rating, the Company implements quality risk management (KPMR) implementation with several control activities such as the implementation of asset recovery strategies, both confiscated and non-confiscated assets, submission of UPSL to the Ministry of Finance, reallocation of investment portfolios to a more moderate direction through optimization of fixed income, from the combination of inherent risk and quality of risk management implementation, the risk level for credit risk is medium.

4. Insurance Risk
   The inherent insurance risk rating in 2022 is at a Medium-High level. In the trend, the value of premium income is generally lower than the payment of claims. It causes the value of the claim ratio to be at a level above 100% generally. It also causes technical reserves to grow higher than the growth of investment assets due to the need for asset liquidation to meet claim payments.

   For the inherent risk rating, the Company implements quality risk management (KPMR) with several control activities, such as monitoring the claim ratio by the product and actuarial committees and adjusting the Company's liabilities through changes in actuarial interest in accordance with the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-49/MK.02/2022 dated January 30, 2022, on Approval of Methods and Assumptions in the Calculation of Future Policy Benefit Obligations of PT ASABRI (Persero)'s THT Program. In its implementation, the Company has submitted a study for the adjustment of the THT program premium to stakeholders, and the process for adjusting the premium is currently ongoing, thus becoming a challenge in managing insurance risk.

   From the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation, the risk level for insurance risk is Medium-High.

5. Market Risk
   The inherent market risk rating in 2022 is at a high level from the investment portfolio owned by the company, most of which is exposed to market risk, in addition to legal issues related to the company's investment management, causing some of the investment assets owned by the company not to be valued based on

tidak dapat dinilai berdasarkan harga pasar, hal ini juga menjadi penghambat *rebalancing* aset investasi. Akan tetapi tujuan dan strategi investasi telah dirumuskan dengan jelas baik pada pedoman pelaksanaan investasi, maupun pada RKAP dan RJPP Perusahaan, serta portfolio investasi yang dimiliki sudah terdiversifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

market prices, this is also an obstacle to rebalancing investment assets. However, investment objectives and strategies have been formulated both in the investment implementation guidelines and in the Company's RKAP and RJPP, and the investment portfolio has been diversified per the provisions in the Minister of Finance Regulation.

Atas peringkat risiko inheren tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti pemantauan kegiatan investasi perusahaan melalui komite investasi, penerapan *four eye's principle* dalam pengambilan keputusan investasi, serta pemanfaatan teknologi informasi, akan tetapi nilai aset non produktif yang masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam pencapaian *Yield on Investment*, serta nilai pembayaran klaim lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan premi, yang menyebabkan adanya *gap cashflow negative* sehingga diperlukan likuidasi aset produktif.

For the inherent risk rating, the company applies the quality of risk management (KPMR) implementation with several control activities such as monitoring the company's investment activities through the investment committee, applying the four eyes principle in making investment decisions, and utilizing information technology. However, the value of non-productive assets, which is still quite high, is an obstacle to achieving Yield on Investment. The value of claim payments is higher than premium income, which causes a negative cash flow gap, so the liquidation of productive assets is needed.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko pasar berada pada tingkat risiko sedang tinggi.

From the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation, the risk level for market risk is medium-high.

6. Risiko Likuiditas
   Peringkat inheren risiko likuiditas pada tahun 2022 berada pada tingkat tinggi, nilai *cash flow* dari kegiatan operasi Perusahaan membukukan angka negatif, hal ini dikarenakan nilai pembayaran klaim lebih tinggi dari pada penerimaan premi, kondisi ini mengakibatkan perlu adanya likuidasi aset untuk memenuhi pembayaran klaim, sehingga nilai pertumbuhan aset lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan cadangan teknis, yang berakibat pada tren nilai rasio kecukupan investasi yang menurun, di sisi lain kualitas aset lancar yang digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar mayoritas terdiri dari instrumen saham dan deposito, di mana instrumen saham mayoritas bukan saham likuid, sehingga berpotensi kesulitan likuidasi untuk instrumen saham.

6. Liquidity Risk
   The inherent rating of liquidity risk in 2022 is at a high level, and the cash flow value of the Company's operating activities recorded a negative number. This is because the value of claim payments is higher than premium income. This condition results in the need for liquidation of assets to meet claim payments so that the value of asset growth is lower than the growth of technical reserves, which results in a downward trend in the value of the investment adequacy ratio, on the other hand, the quality of current assets used to meet current liabilities consists mostly of stock instruments and deposits, where the majority of stock instruments are not liquid stocks, resulting in potential liquidation difficulties for stock instruments.

Atas peringkat risiko inheren tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti pengawalan penanganan permasalahan hukum terkait penurunan aset yang ditangani Aparatur Penegak Hukum, pengajuan UPSL ke Kementerian Keuangan, realokasi portofolio investasi ke arah yang lebih *moderate* melalui optimasi pendapatan *fixed income*, serta pemantauan kegiatan investasi oleh komite investasi, akan tetapi dalam portfolio investasi masih ada aset yang masuk kategori aset berisiko, di

For the inherent risk rating, the Company implements quality risk management (KPMR) implementation with several control activities such as escorting the handling of legal issues related to asset decline handled by Law Enforcement Officials, submitting UPSL to the Ministry of Finance, reallocating the investment portfolio to a more moderate direction through optimizing fixed income, and monitoring investment activities by the investment committee. However, in the investment portfolio, some assets still fall into the category of risky assets, and some are experiencing bankruptcy

mana di antaranya sedang mengalami permasalahan pailit, serta tidak likuidnya instrumen saham menjadi tantangan dalam mengalola risiko likuiditas.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko likuiditas berada pada tingkat risiko sedang.

7. Risiko Hukum
Peringkat *inheren* risiko hukum pada tahun 2022 berada pada tingkat rendah, beberapa indikator komposit yang menyebabkan tingkat risiko rendah, yaitu dari 2 (dua) proses hukum yang dijalankan oleh Perusahaan tidak signifikan mengganggu kondisi keuangan Perusahaan dan tidak berdampak besar bagi reputasi Perusahaan.

Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan beberapa aktivitas pengendalian seperti komitmen dari Direksi untuk menerapkan perjanjian kerja sama yang *prudent* dengan cara meningkatkan peran komite-komite yang ada pada Perusahaan dalam penyusunan kontrak kerja sama.

Dari kombinasi risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko hukum berada pada tingkat rendah.

8. Risiko Kepatuhan
Peringkat *inheren* risiko kepatuhan pada tahun 2022 berada pada tingkat rendah, beberapa indikator komposit yang menyebabkan tingkat risiko rendah antara lain atas hasil audit Akuntan Publik (RSM) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang membuktikan bahwa perusahaan berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan aktivitas pengendalian seperti menetapkan unit kerja yang berfungsi dalam memastikan kepatuhan Perusahaan terahadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko kepatuhan berada pada tingkat rendah.

9. Risiko Reputasi
Peringkat *inheren* risiko reputasi pada tahun 2022 berada pada tingkat rendah, indikator komposit yang menyebabkan tingkat risiko rendah antara lain rendahnya berita negatif tetang Perusahaan. Berita

problems. The illiquidity of stock instruments is a challenge in managing liquidity risk.

From the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation, the risk level for liquidity risk is medium.

7. Legal Risk
The inherent legal risk rating in 2022 is at a low level. Several composite indicators cause a low-risk level that is from 2 (two) legal processes carried out by the company that do not significantly disrupt the company's financial condition and do not have a major impact on the company's reputation.

For the inherent risk rating, the company applies the quality of risk management implementation (KPMR) with several control activities, such as a commitment from the Board of Directors to implement prudent cooperation agreements by increasing the role of committees in the company in the preparation of cooperation contracts.

From the combination of inherent risk and quality of risk management implementation, the risk level for legal risk is low.

8. Compliance Risk
The inherent rating of compliance risk in 2022 is at a low level. Several composite indicators that cause a low-risk level include the results of the Public Accountant (RSM) audit from 2019 to 2021, which succeeded in reducing the level of violations of the provisions, which proves that the company has succeeded in building a culture of compliance in decision making and in the company's operational activities.

For the inherent risk rating, the company applies the quality of risk management implementation (KPMR) with control activities such as establishing a work unit to ensure compliance with applicable laws and regulations.

The risk level for compliance risk is low from the combination of inherent risk and quality of risk management implementation.

9. Reputation Risk
The inherent reputation risk rating in 2022 is at a low level. Composite indicators that cause low-risk levels include low negative news about the company. The current negative news originates from the judicial

negatif yang ada saat ini bersumber dari proses peradilan kasus korupsi yang menjerat pengurus Perusahaan yang sebelumnya, di mana berita yang diangkat tidak menitikberatkan kepada Perusahaan namun terhadap tersangka kasus korupsi yang sedang diadili.

Atas peringkat risiko *inheren* tersebut, Perusahaan menerapkan kualitas penerapaan manajemen risiko (KPMR) dengan melaksanakan aktivitas pengendalian seperti komitmen dari Direksi untuk peningkatkan kinerja Perusahaan yang dibuktikan dengan peningkatan kepercayaan dari *shareholder* dan *stakeholder* pada perbaikan kinerja Perusahaan yang ditandai dengan hadirnya Menteri BUMN, dan Menteri Pertahanan pada ulang tahun Perusahaan dalam rangka memberikan apresiasi atas kinerja Perusahaan.

Dari kombinasi risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko maka level risiko untuk risiko reputasi berada pada tingkat rendah.

process of corruption cases that ensnare the previous management of the company, where the news does not focus on the company but on the suspects of corruption cases being tried.

For the inherent risk rating, the company applies the quality of risk management implementation (KPMR) by carrying out control activities such as the commitment of the Board of Directors to improve the company's performance as evidenced by the increased trust of shareholders and stakeholders in improving the company's performance marked by the presence of the Minister of BUMN. The Minister of Defense on the company's birthday to give appreciation for the company's performance.

The risk level for reputation risk is low due to the combination of inherent risk and the quality of risk management implementation.

Hasil Pengukuran Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Periode Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perusahaan melaksanakan kegiatan penilaian tingkat kematangan manajemen risiko. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa penerapan manajemen risiko Perusahaan telah memadai.

Penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko menggunakan kriteria dari RIMS *Risk Maturity Model* yang memiliki 5 (lima) tingkatan yaitu *Ad-hoc*, *Initial*, *Repeatable*, *Managed* dan *Leadership*. Dari hasil penilaian tersebut, Perusahaan memperoleh maturity Level skor 4,29 dengan maturity level berada pada posisi "*Managed*" dan efektivitas penerapan sebesar 71,45%. Tingkat kematangan Laporan penilaian ini telah disampaikan dihadapan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 19 Oktober 2022.

Adapun rangkuman capaian tingkat efektivitas dan kematangan manajemen risiko berdasarkan 7 (tujuh) atribut pernilaian sebagai berikut:

1. *Adoption of ERM-Based Approach* (Level:*Managed*, Efektivitas: 72,09%)
2. *ERM Process Management* (Level: *Managed*, Efektivitas: 69,84%)
3. *Performance Management* (Level: *Managed*, Efektivitas: 72,39%)
4. *Resiliency and Sustainability* (Level: *Managed*, Efektivitas: 67,79%)
5. *Risk Appetite Management* (Level: *Managed*, Efektivitas: 75,89%)
6. *Root Cause Discipline* (Level: *Managed*, Efektivitas: 68,01%)
7. *Uncovering Risk* (Level: *Managed*, Efektivitas: 76,09%)

Results of Risk Management Maturity Level Measurement for the 2022 Period

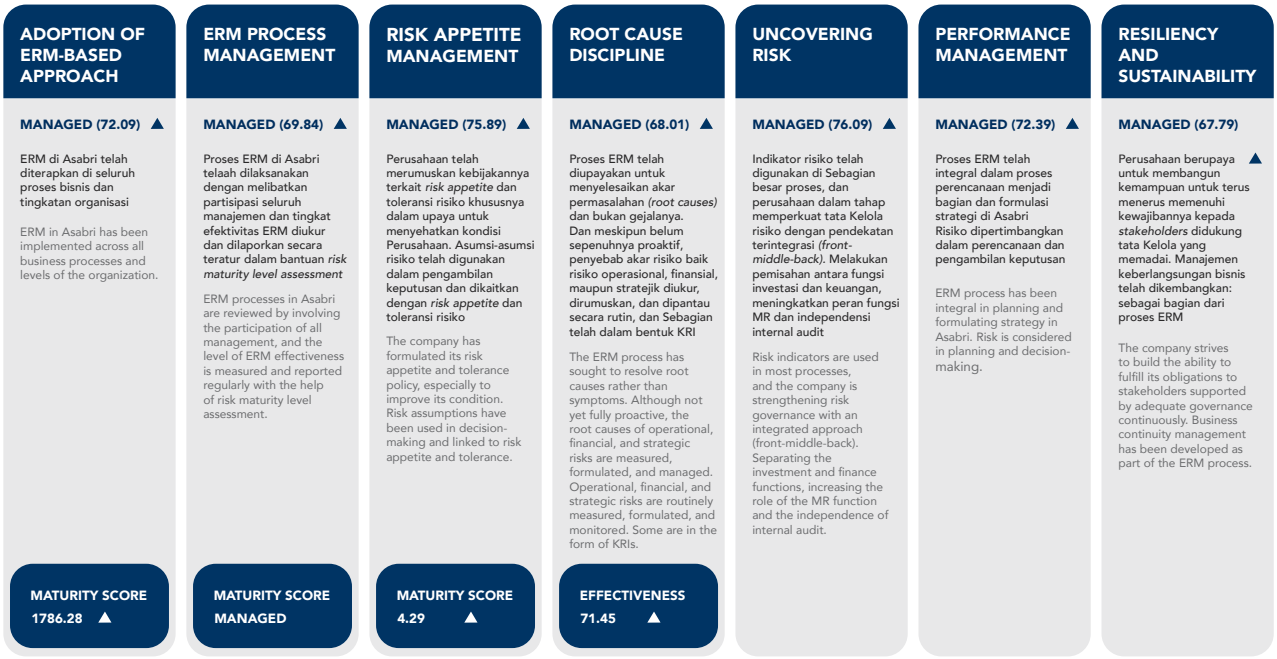
In 2022, the company assessed the maturity level of risk management. This activity is intended to assure stakeholders that the company's risk management implementation is adequate.

The assessment of the maturity level of risk management implementation uses criteria from the RIMS Risk Maturity Model, which has 5 (five) levels: Ad-hoc, Initial, Repeatable, Managed, and Leadership. From the assessment, the company obtained a maturity level score of 4.29 with a maturity level in the "Managed" position and implementation effectiveness of 71.45%. The maturity level of this assessment report was presented to the Board of Directors and Board of Commissioners on October 19, 2022.

The summary of the achievement of the level of effectiveness and maturity of risk management based on 7 (seven) assessment attributes is as follows:

1. Adoption of ERM-Based Approach (Level: Managed, Effectiveness: 72.09%)
2. ERM Process Management (Level: Managed, Effectiveness: 69.84%)
3. Performance Management (Level: Managed, Effectiveness: 72.39%)
4. Resiliency and Sustainability (Level: Managed, Effectiveness: 67.79%)
5. Risk Appetite Management (Level: Managed, Effectiveness: 75.89%)
6. Root Cause Discipline (Level: Managed, Effectiveness: 68.01%)
7. Uncovering Risk (Level: Managed, Effectiveness: 76.09%)

Rangkuman Capaian Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko pada 7 Atribut
Achievement Summary of Risk Management Effectiveness Level on 7 Attributes



Klasifikasi Risiko Perusahaan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara, PT ASABRI (Persero) masuk dalam klasifikasi risiko pada kuadran Sistemik-B. Penentuan kuadran Sistemik-B mendasar pada jumlah aset kelolaan sebesar Rp33,8 triliun dan memiliki kompleksitas tinggi. Berdasarkan analisis, terdapat dua ukuran yang menempatkan Perusahaan pada kuadran Sistemik-B yaitu:

Memiliki hubungan strategis dengan beberapa Kementerian teknis yaitu:

Kementerian Keuangan

Sebagai pemilik program THT, JKK, JKm dan AIP, Kementerian Keuangan memiliki hubungan strategis dengan ASABRI dalam hal pembayaran pensiun, penerimaan premi yang bersumber dari APBN, penggantian Biaya Operasional Pensiun, penetapan batasan Investasi yang diperkenankan, penetapan penerimaan premi dan manfaat, kecukupan pembentukan cadangan premi, metode dan asumsi yang digunakan, pertanggungjawaban pengelolaan program Asuransi dan Pensiun, serta merupakan bagian dari pengawasan.

Company Risk Classification

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-5/MBU/09/2022 on the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, PT ASABRI (Persero) is included in the risk classification in the Systemic-B quadrant. The determination of the Systemic-B quadrant is based on the amount of assets under management of IDR33.8 trillion and has high complexity. Based on the analysis, two measures place the Company in the Systemic-B quadrant, including:

Has strategic relationships with several technical Ministries, as follows:

Ministry of Finance

As the owner of the THT, JKK, JKm, and AIP programs, the Ministry of Finance has a strategic relationship with ASABRI in terms of pension payments, receipt of premiums sourced from the APBN, reimbursement of Pension Operational Costs, setting limits on allowable investments, determining premium receipts and benefits, adequacy of premium reserve formation, methods and assumptions used, accountability for the management of Insurance and Pension programs, and is part of supervision.

Kementerian Pertahanan dan POLRI

Sebagai sumber peserta ASABRI, Kementerian Pertahanan dan POLRI memiliki hubungan strategis dengan ASABRI di antaranya dalam hal pelayanan dan klaim Peserta, penetapan manfaat, penetapan jumlah peserta, sumber *database* data kepesertaan serta merupakan bagian dari pengawasan. Dalam pelaksanaan pengelolaan program, ASABRI mengoptimalkan pengelolaan atas aset dan liabilitas sehingga diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masa pensiun prajurit TNI, POLRI serta ASN di bawah Kemenhan dan POLRI.

Kementerian BUMN

Sebagai pemegang saham ASABRI, Kementerian BUMN memiliki hubungan strategis dengan ASABRI dalam hal pemilihan pengurus, pengesahaan strategi bisnis, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, pertanggungjawaban kinerja keuangan dan operasional, serta merupakan bagian dari pengawasan.

ASABRI mengelola program yang tidak dapat disubstitusi dengan program lain dari sektor swasta. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ASABRI merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini anggota TNI, POLRI, serta ASN di bawah Kemenhan dan POLRI. Program yang diketola ASABRI merupakan program wajib pemerintah yang tertuang dalam PP 102 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam PP 54 tahun 2020 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Program tersebut yaitu THT, JKK, dan JKm.

Ministry of Defense and POLRI

As a source of ASABRI participants, the Ministry of Defense and the National Police (POLRI) have a strategic relationship with ASABRI, including services and claims of Participants, determining benefits, determining the number of participants, the source of membership data database, and part of the supervision. In the implementation of program management, ASABRI optimizes the management of assets and liabilities so that it is expected to impact the welfare of the retirement of TNI, POLRI, and ASN under the Ministry of Defense and POLRI.

Ministry of SOEs

As a shareholder of ASABRI, the Ministry of SOEs has a strategic relationship with ASABRI regarding selecting management, approving business strategies, assessing the company's health level, accountability for financial and operational performance, and supervision.

ASABRI manages programs that cannot be substituted with other programs from the private sector. According to the mandate of Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System, ASABRI is a Social Security Provider Agency that aims to provide social protection to ensure all Indonesian people, in this case, members of the TNI, POLRI, and ASN under the Ministry of Defense and POLRI. The program managed by ASABRI is a mandatory government program as stipulated in PP 102 of 2015 as amended in PP 54 of 2020 concerning Social Insurance for Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and State Civil Apparatus Employees within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police. The programs are THT, JKK, and JKm.

Pengelolaan Kepatuhan
Compliance Management

Pengelolaan kepatuhan diperlukan untuk memastikan bahwa Perusahaan, Unit Kerja, dan seluruh Insan ASABRI melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal ASABRI.

Compliance management is needed to ensure that the Company, Work Units, and all ASABRI personnel carry out their main duties and functions following statutory provisions and ASABRI internal regulations.

Kepatuhan atau ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI serta didukung dengan adanya kesadaran dalam melaksanakan asas Kepatuhan dalam kegiatan bisnis sehari-hari menjadi wujud cerminan pelaksanaan GCG. Seluruh Insan ASABRI wajib melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Internal ASABRI secara taat dan patuh (*comply*), sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pedoman Kepatuhan.

Sebagai entitas bisnis yang mengedepankan pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik dan keberlangsungan daya saing, ASABRI menyadari pentingnya Kepatuhan perusahaan terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI. Melalui aktivitas Kepatuhan tersebut, tergambar komitmen dan inisiatif ASABRI untuk menjadi lembaga yang taat hukum, taat regulasi, dan berupaya membangun Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bekal untuk membangun institusi yang sehat, kuat, dan memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan. Mengacu pada pengertian dan fungsi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di ASABRI berfungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan terhadap penetapan kebijakan, keputusan operasional, atau aktivitas bisnis yang menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI;
2. Sebagai sarana evaluasi terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang berpotensi melanggar atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI;
3. Pencegahan terhadap timbulnya potensi kerugian yang lebih besar bagi ASABRI; dan
4. pencegahan terhadap terjadinya proses bisnis perusahaan yang dapat menimbulkan risiko strategis, risiko operasional, risiko asset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata Kelola, risiko dukungan dana, dan risiko asuransi.

Compliance or adherence to the provisions of laws and regulations and ASABRI Internal Regulations and supported by awareness in implementing the principle of compliance in daily business activities is a form of reflection of GCG implementation. All ASABRI personnel are required to implement all provisions of the ASABRI Internal Regulations in an obedient and compliant manner, as mandated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors regarding Compliance Guidelines.

As a business entity that prioritizes the importance of good corporate governance and sustainability of competitiveness, ASABRI realizes the importance of corporate compliance with various statutory provisions and ASABRI Internal Regulations. Through these Compliance activities, ASABRI commitment and initiative to become a law-abiding institution, obey regulations, and strive to build good Corporate Governance as a provision for building a healthy, strong institution and a sustainable competitive advantage. Referring to the definition and function above, it can be concluded that the implementation of the Compliance Function in ASABRI functions as follows:

1. As a prevention of the establishment of policies, operational decisions, or business activities that deviate from or violate statutory provisions and ASABRI Internal Regulations;
2. As a means of evaluating every policy and decision that has the potential to violate or deviate from statutory provisions and ASABRI Internal Regulations;
3. Prevention of the emergence of greater potential losses for ASABRI; and
4. Prevention of the occurrence of company business processes that can lead to strategic, operational, asset and liability, management, governance, funding support, and insurance risks.

Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan *(Compliance)*

ASABRI sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan seluruh kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Perusahaan tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi berperan sebagai penunjang kelancaran proses bisnis dalam satu kesatuan pencapaian visi dan misi ASABRI guna mengoptimalkan efektivitas kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkungan ASABRI. ASABRI terus meningkatkan nilai kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai cerminan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

Penerapan kepatuhan sebagai salah satu wujud integritas Insan ASABRI dijalankan untuk mewujudkan fungsi perusahaan dan kegiatan bisnis secara berkesinambungan, dengan tetap taat terhadap prinsip kehati-hatian yang pengelolaannya didasarkan pada budaya kepatuhan. Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) mengatur nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI. Dalam menunjang komitmen tersebut, ASABRI telah menyusun Pedoman Kepatuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/08/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.02/55-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Kepatuhan PT ASABRI (Persero).

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka pengelolaan Kepatuhan, Direktur SDM dan Hukum selaku direktur yang bertanggung jawab atas Fungsi Kepatuhan, mengarahkan pengelolaan Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan dan Hukum selaku unit kerja teknis, yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum (Kadiv Tuhkum). Terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Kadiv Tuhkum dibantu oleh unit Kepatuhan, dalam hal ini Bidang Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum.

Prosedur Kepatuhan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bidang Kepatuhan telah menyusun suatu prosedur kepatuhan dalam rangka memastikan memastikan adanya kebijakan internal serta aktivitas perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan internal ASABRI, sebagai berikut:

1. *Self Compliance*
   Self Compliance merupakan bentuk tahapan atau tindakan yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja, agar kegiatan usaha Perusahaan senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI.
2. Uji Kepatuhan
   Uji Kepatuhan merupakan suatu proses yang memastikan bahwa setiap objek yang diuji telah

Compliance Management Policy

ASABRI is fully aware that the existence of all policies and regulations that apply within the company is not just a complement but acts as a support for the smooth running of business processes in the unity of achieving ASABRI vision and mission to optimize the effectiveness of policies and regulations that apply within ASABRI. ASABRI continues to increase the value of compliance and adherence to statutory provisions as a reflection of the implementation of GCG in the company.

The implementation of compliance as a form of the integrity of ASABRI personnel is carried out to realize the company's functions and business activities on an ongoing basis while adhering to the precautionary principle, whose management is based on a culture of compliance. Compliance Culture regulates values, behaviors, and actions that support the creation of compliance with statutory provisions and ASABRI Internal Regulations. In supporting this commitment, ASABRI has prepared Compliance Guidelines which are stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/08/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.02/55-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020, on Compliance Guidelines of PT ASABRI (Persero).

Director in Charge of Compliance Function

In the context of Compliance management, the HR and Legal Director, as the director in charge of the Compliance Function, directs Compliance management to the Compliance and Legal Division as the technical work unit, led by the Head of Compliance and Legal Division (Kadiv Tuhkum). Regarding implementing the Compliance Function, Kadiv Tuhkum is assisted by the Compliance unit, in this case, the Compliance Division of the Compliance and Legal Division.

Compliance Procedures

In the context of implementing Good Corporate Governance, the Compliance Division has developed a compliance procedure to ensure that internal policies and company activities are following the provisions of laws and regulations and ASABRI internal regulations, as follows:

1. Self Compliance
   Self-compliance is a stage or action that must be fulfilled by each work unit so that the Company's business activities always comply with laws and regulations and ASABRI Internal Regulations.

2. Compliance Test
   Compliance Test is a process that ensures that each object tested follows the laws and regulations and

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Internal ASABRI, melalui pemberian status "*COMPLY*" dan pemberian catatan kepatuhan *(compliance note)* dari Divisi Kepatuhan dan Hukum, sebelum diputuskan oleh Direksi. Adapun yang menjadi objek Uji Kepatuhan, antara lain:
a. kebijakan;
b. peraturan;
c. keputusan;
d. proses;
e. Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
f. kontrak.

3. *Compliance Note*
Compliance Note merupakan pendapat atau opini dari Unit Kepatuhan atas analisa terhadap:
a. setiap kebijakan dan/atau keputusan strategis tertentu yang memerlukan pendapat/masukan aspek kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian;
b. setiap peraturan dan keputusan yang akan diterbitkan;
c. proses bisnis dan transaksi operasional; dan
d. kontrak termasuk perjanjian kerja sama.

4. *Compliance Index*
Compliance Index digunakan sebagai sarana bagi unit Kepatuhan dalam melakukan pemantauan terhadap pemenuhan Kepatuhan. Indikator pemenuhan Kepatuhan diukur berdasarkan presentase (0% sampai dengan 100%).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2022

Peningkatan Budaya Kepatuhan

1. Kegiatan Budaya Kepatuhan dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan sosialisasi khususnya pada kegiatan *on boarding* karyawan baru tahun 2022.
2. Peningkatan Budaya Kepatuhan melalui kegiatan sosialisasi internal di seluruh Kantor Cabang di mana sebanyak 33 Kantor Cabang telah menyampaikan Laporan Sosialisasi Internal *Softstructure GCG* Tahun 2022 dengan pencapaian sebesar 100% atau bobot tahunan sebesar 3%, dengan penerimaan 163 laporan.

Peningkatan Infrastruktur dan Sistem Fungsi Kepatuhan

Pembaharuan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Proses Pelaksanaan Uji Kepatuhan Nomor SOP-ASA-TKM-H1-02.

Pelaksanaan Uji Kepatuhan

Pelaksanaan kegiatan uji kepatuhan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta mekanisme pada SOP tentang Proses Pelaksanaan Uji Kepatuhan Nomor SOP-ASA-TKM-H1-02.

ASABRI Internal Regulations through the provision of "COMPLY" status and compliance notes from the Compliance and Legal Division before being decided by the Board of Directors. The objects of the Compliance Test are as follows:

a. policy;
b. regulations;
c. decision;
d. process;
e. Cooperative Agreement (PKS); and
f. contract.

3. Compliance Note
Compliance Note is an opinion from the Compliance Unit on the analysis of:
a. every policy and/or certain strategic decision that requires an opinion/input on the Compliance aspect of the prudential principle;
b. any regulations and decisions that will be issued;
c. business processes and operational transactions; and
d. contracts, including cooperation agreements.

4. Compliance Index
The Compliance Index is used as a tool for the Compliance Unit in monitoring compliance. Compliance fulfillment indicators are measured by percentage (0% to 100%).

Implementation of Compliance Work Plan Year 2022

Improvement of Compliance Culture

1. Compliance Culture activities are carried out in socialization activities, especially in new employee onboarding activities in 2022.
2. Improvement of Compliance Culture through internal socialization activities in all Branch Offices where as many as 33 Branch Offices have submitted GCG Softstructure Internal Socialization Reports in 2022 with an achievement of 100% or an annual weight of 3%, with the receipt of 163 reports.

Infrastructure and System Improvement of Compliance Function

Updates to the Standard Operating Procedure (SOP) on the Compliance Test Implementation Process Number SOP-ASA-TKM-H1-02.

Implementation of Compliance Test

Compliance test activities are implemented with due observance of the applicable provisions and mechanisms in the SOP on the Compliance Test Implementation Process Number SOP-ASA-TKM-H1-02.

Kode Etik
Code of Conduct

ASABRI sebagai BUMN senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai *Good Corporate Governance* senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Code of Conduct serta berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan pada tiap tingkatan agar bertanggung jawab dalam memastikan *Code of Conduct* dipatuhi dan dijalankan dengan baik dalam unit kerja masing-masing.

ASABRI, as one of the SOEs, always upholds the values of good corporate governance, encourages compliance with the Code of Conduct and is committed to implementing it, and requires all leaders at each level to be responsible for ensuring that the Code of Conduct is adhered to and carried out properly in their respective work units.

Perusahaan telah menyusun dan merumuskan Pedoman Perilaku atau Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai sekumpulan komitmen yang berlaku untuk seluruh individu, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh Karyawan yang mengatur kesesuaian perilaku dan budaya kerja yang sejalan dengan koridor pencapaian visi dan misi ASABRI.

Implementasi standar etika berlaku di seluruh tingkatan dalam Perusahaan tanpa terkecuali yang diwujudkan melalui kewajiban penandatanganan Pernyataan Komitmen secara tahunan. Dengan demikian, komitmen penerapan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) dapat berjalan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Pokok-pokok Kode Etik

Etika Usaha

Beberapa aspek kritikal yang dipandang perlu diatur dalam *Code of Conduct* sebagai pedoman perilaku insan ASABRI dalam berinteraksi dengan *stakeholders*, baik secara internal maupun eksternal ASABRI yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan dengan Karyawan
2. Hubungan dengan Pemegang Saham
3. Hubungan dengan Pemasok/Penyedia Barang dan Jasa
4. Hubungan dengan Pemerintah
5. Hubungan dengan KPK
6. Hubungan dengan Media Massa
7. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

The Company has compiled and formulated the Code of Conduct as a set of commitments that apply to all individuals, both the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Employees, which regulates the suitability of behavior and work culture in line with the corridor of achieving ASABRI vision and mission.

Implementation of ethical standards applies at all levels within the Company without exception, which is realized through the obligation to sign a Statement of Commitment annually. Thus, the commitment to implementing the principles contained in the Code of Conduct can run and provide benefits on an ongoing basis.

Principles of the Code of Conduct

Business Ethics

Some critical aspects that are deemed necessary to be regulated in the Code of Conduct as a guide to the behavior of ASABRI people in interacting with stakeholders, both internally and externally, include the following matters:

1. Relationship with Employees
2. Relationship with Shareholders
3. Relationship with Suppliers / Providers of Goods and Services
4. Relationship with The Government
5. Relationship with KPK
6. Relationship with Mass Media
7. Relationship with the surrounding community

Etika Kerja

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2. Integritas Informasi Keuangan
3. Menghindari Benturan Kepentingan
4. Kerahasiaan Informasi
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
7. Menerima dan Memberi
8. Kesempatan Kerja yang Adil
9. Pengawasan dan Penggunaan Aset
10. Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia
11. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik
12. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, dan Perjudian
13. Etika Pemanfaatan Fasilitas Teknologi Informasi

Sosialisasi Kode Etik *(Code Of Conduct)*

Dalam menjamin implementasi kode etik secara efektif dan menyeluruh bagi Insan ASABRI, ASABRI memberlakukan kebijakan sosialisasi dan internalisasi *Code of Conduct* secara berkala melalui komite atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi etika usaha dan tata perilaku usaha kepada seluruh jajaran ASABRI. Internalisasi didukung dengan pemberian penjelasan atau pertanyaan oleh Karyawan ASABRI terkait dengan etika usaha dan tata perilaku kepada atasan langsung atau kepada fungsi kepatuhan.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen PT ASABRI (Persero) untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja ASABRI melakukan kegiatan operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh Insan ASABRI, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Penerapan Kode Etik diharapkan dapat mendorong seluruh Insan ASABRI memiliki perilaku yang sesuai nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan serta menjalankan hubungan dengan para *stakeholder*.

Work Ethics

1. Compliance with Laws and Regulations
2. Integrity of Financial Information
3. Avoidance of Conflict of Interest
4. Confidentiality of Information
5. Occupational Safety and Health
6. Intellectual Property Rights (HAKI)
7. Receiving and Giving
8. Fair Employment Opportunities
9. Oversight and Use of Assets
10. Equality and Respect for Human Rights
11. Involvement in Political Activities
12. Immoral Behavior, Narcotics, Drugs, and Gambling
13. Ethical Utilization of Information Technology Facilities

Socialization of Code of Conduct

In ensuring the effective and comprehensive implementation of the code of conduct for ASABRI Employees, ASABRI enforces a policy of socialization and internalization of the Code of Conduct periodically through a committee or designated function in charge of carrying out socialization and internalization of business ethics and business conduct to all levels of ASABRI. Internalization is supported by providing explanations or questions by ASABRI Employees related to business ethics and code of conduct to direct superiors or the compliance function.

Compliance with the Code of Conduct

The Code of Conduct is a form of PT ASABRI (Persero)'s commitment to comply with legal provisions and the highest ethical standards wherever ASABRI conducts its operations. In addition to following the applicable laws and regulations, the management of the Company must also uphold ethical norms and values. The Code of Conduct applies to all ASABRI personnel, including the Board of Commissioners, Directors, and all Employees. Implementing the Code of Conduct is expected to encourage all ASABRI personnel to behave according to AKHLAK values (Trust, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) in working activities and stakeholder relationships.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Dalam menjamin implementasi kode etik secara efektif dan menyeluruh bagi Insan ASABRI, perusahaan melaksanakan upaya-upaya dalam menerapkan serta menegakkan *Code of Conduct* melalui kegiatan seperti sosialisasi dan internalisasi etika usaha dan tata perilaku usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Efforts to Implement and Enforce the Code of Conduct

In ensuring the effective and comprehensive implementation of the code of conduct for ASABRI personnel, the company makes efforts to implement and enforce the Code of Conduct through activities such as socialization and internalization of business ethics and business conduct, with the following details.

Upaya Penegakkan Enforcement Efforts	**Keterangan** Description	**Pelaksanaan Kegiatan** Implementation of Activities
Internalisasi Internalization	Program internalisasi, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Internalization program, both at head office and branch offices.	Sosialisasi internal dengan pembahasan seputar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Code of Conduct,* atau pedoman *Softstructure* GCG lainnya di lingkungan kantor cabang. Setiap kantor cabang mengirimkan minimal 4 laporan dalam setahun, laporan tersebut digunakan sebagai salah satu penilaian KPI Kancab. Pada tahun 2022 seluruh Kancab telah memenuhi target atau pencapaian sebesar 100% dengan perolehan total laporan sebanyak 163 laporan sosialisasi internal GCG. Internal socialization with discussions about Good Corporate Governance, Code of Conduct, or other GCG Softstructure guidelines in the branch office environment. Each branch office sends a minimum of 4 reports a year. The report is used as one of the Branch Office KPI assessments. In 2022, all branch offices met the target or achievement of 100% by acquiring 163 GCG internal socialization reports.
Sosialisasi Socialization	Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi internal secara berkala Organizing internal socialization activities regularly	Penyelenggaraan sosialisasi *Code of Conduct* pada kegiatan *on boarding* pada karyawan baru dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2022. The implementation of the Code of Conduct socialization in onboarding activities for new employees was carried out in July and August 2022.
Publikasi Publication	Penyampaian informasi kepada masyarakat Delivering information to the public	Pedoman *Code of Conduct* ASABRI telah dimuat pada *website* perusahaan The ASABRI Code of Conduct has been posted on the company's website.

Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik mengacu kepada Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *(Whistleblowing Policy)* ASABRI. Dalam hal ditemukan pelanggaran maka dapat disampaikan melalui saluran pelaporan pelanggaran yang tersedia baik melalui *website* pengaduan pelanggaran atau *Whistleblowing System* ASABRI, email ataupun surat. Insan ASABRI yang diduga melanggar atau melakukan penyimpangan kode etik diberikan hak untuk didengar penjelasannya sebelum diputuskan pemberian sanksi tindakan atau hukuman disiplin.

Alleged code of conduct violations are handled based on the ASABRI Whistleblowing Policy. If a violation is found, it can be submitted through the violation reporting channel available either through the violation complaint website or the ASABRI Whistleblowing System, email, or letter. ASABRI personnel suspected of violating or deviating from the code of conduct are given the right to be heard for an explanation before a decision is made to impose sanctions or disciplinary penalties.

Pakta Integritas

Dalam rangka menegakkan dan menerapkan kepatuhan terhadap kode etik di seluruh lini, Perusahaan menyusun Pernyataan Komitmen yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Karyawan ASABRI.

Integrity Pact

To enforce and implement compliance with the code of conduct at all levels, the Company has prepared a Statement of Commitment, which has been signed by all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, and ASABRI Employees.

Seluruh Insan ASABRI harus memiliki komitmen dalam menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di ASABRI. Oleh karena itu, seluruh Insan ASABRI wajib untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan *Code of Conduct*. Sebagai wujud komitmen, maka seluruh Insan ASABRI menandatangani formulir Pakta Integritas. Pada Tahun 2022 seluruh karyawan telah menandatangani Pakta Integritas Tahun 2022.

All ASABRI personnel must commit to aligning themselves with the value system and work culture of ASABRI. Therefore, all ASABRI personnel must equalize and unite beliefs to apply work attitudes and behaviors following the Code of Conduct. All ASABRI personnel signed the Integrity Pact form as a form of commitment. In 2022, all employees have signed the 2022 Integrity Pact.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Pelanggaran Kode Etik di PT ASABRI (Persero) dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin.

Types of Sanctions for Code of Conduct Violations

Sanctions for violations of the Code of Conduct at PT ASABRI (Persero) are categorized into 3 (three) types: minor, medium, and heavy sanction. Any violation of the Code of Conduct will be subject to sanctions in accordance with the Disciplinary Regulations.

Jenis Pelanggaran Kode Etik:

Types of Code of Conduct Violations:

Jenis Pelanggaran Types of Violations	**Sanksi** Sanctions
Sanksi ringan Minor sanction	Teguran Tertulis Written Reprimand
Sanksi sedang Medium sanction	Peringatan Tertulis Kesatu First Written Warning
Sanksi berat Heavy sanction	Peringatan Tertulis Ketiga (PHK) Third Written Warning (PHK)

Di tahun 2022, telah terjadi 10 (sepuluh) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

In 2022, there have been 10 (ten) violations of the code of conduct with the following details:

Jenis Pelanggaran Type of Violations	**Sanksi** Sanction
Teguran Tertulis Written Reprimand	6
Peringatan Tertulis Kesatu First Written Warning	3
Peringatan Tertulis Ketiga Third Written Warning	1
Jumlah Total	**10**

Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program

Dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh Insan ASABRI dalam mencegah adanya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), ASABRI memiliki beberapa kebijakan antara lain Peraturan Disiplin Karyawan, Pedoman Gratifikasi, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta Pedoman penanganan benturan kepentingan.

In providing understanding and awareness for all ASABRI personnel in preventing the practice of Collusion, Corruption, and Nepotism (KKN), ASABRI has several policies, including Employee Discipline Regulations, Gratification Guidelines, Anti-Bribery Management System Guidelines, and Guidelines for handling conflicts of interest.

Tindakan-tindakan yang dilakukan ASABRI untuk mengatasi praktik KKN antara lain sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Larangan untuk menyalahgunakan jabatan, menggunakan fasilitas jabatan dan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan dan/atau memberikan akses khusus kepada Pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang sesungguhnya;
3. Menolak segala bentuk pemberian yang diberikan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Actions taken by ASABRI to overcome KKN practices include the following:
1. Carrying out duties and obligations professionally and following the provisions of the applicable laws and regulations;
2. A prohibition to abuse position, use position facilities and Company assets for personal/group interests, and/or provide special access to certain parties without following actual procedures;
3. Rejecting all gifts from parties suspected of having a relationship with the position and contrary to their obligations and duties.

Kebijakan Gratifikasi
Gratification Policy

ASABRI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di seluruh lini dan fungsi Perusahaan sehingga disusun Pedoman Gratifikasi sebagai pedoman dalam mengelola gratifikasi dan tuntutan terhadap sikap dan Tindakan setiap Insan ASABRI terkait dengan Gratifikasi.

Dengan ditetapkannya Pedoman Gratifikasi maka diharapkan pedoman ini menjadi pedoman bagi seluruh Karyawan dalam mengelola gratifikasi serta terhindar dari praktik gratifikasi yang dapat merugikan diri sendiri maupun ASABRI. Gratifikasi yang diatur pada pedoman dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.

ASABRI is committed to implementing gratification control in all lines and functions of the Company so that the Gratification Guidelines are prepared as guidelines for managing gratification and demands for the attitudes and actions of every ASABRI Personnel related to gratification.

With the establishment of the Gratification Guidelines, it is expected that these guidelines will become a guideline for all Employees in managing gratification and avoiding gratification practices that can harm themselves and ASABRI. The gratification regulated in the guidelines is divided into 2 (two) categories: gratification that must be reported and not required to be reported.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi:
1. Gratifikasi dari Mitra Kerja atau pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
2. Gratifikasi terkait Kedinasan yang dapat diduga sebagai bentuk Gratifikasi yang dilarang
3. Gratifikasi yang ditujukan kepada ASABRI atau unit kerja dari pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan.

Gratification that must be reported includes:
1. Gratification from work partners or parties suspected of having a relationship with the position and contrary to their obligations or duties.
2. Office-related gratification that can be suspected of being a form of prohibited gratification
3. Gratification addressed to ASABRI or the work unit of the party who has a Conflict of Interest

Sedangkan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

Meanwhile, gratification that are not required to be reported include:

No	Bentuk Gratifikasi Form of Gratifications	Batasan Limitation
1	Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan Gifts due to family relationships, including grandparents, fathers/mothers/parents-in-law, husbands/wives, children/children-in-law, adopted children/legal guardians, grandchildren, in-laws, uncles/aunts, brothers/sisters/nephews, cousins and nieces/nephews	Tidak Memiliki benturan kepentingan No conflict of interest
2	Pemberian dalam bentuk uang atau barang dalam penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis atau sejenisnya, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya Gifts in the form of money or goods in the organization of engagement parties, weddings, births, aqiqah, baptisms or the like, circumcisions, tooth cutting, or other traditional/religious ceremonies	Batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi The limited amount is IDR1,000,000 (one million rupiah) per giver
3	Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi Gifts related to calamities or disasters experienced by the recipient of the Gratification, husband, wife, child, father, mother, father-in-law, and/or son-in-law of the recipient of the Gratification	Tidak terdapat Benturan Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan No Conflict of Interest, and fulfill fairness or appropriateness
4	Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya Gifts from coworkers in the context of farewells, retirements, job transfers, or birthdays that are not in the form of money or other means of exchange	Paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan A maximum of IDR300,000 (three hundred thousand rupiah) per gift per person, with a total gift not exceeding IDR1,000,000 (one million rupiah) in 1 (one) year from the same giver. As long as there is no conflict of interest
5	Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan Gifts from coworkers that are not in the form of money or other means of exchange and are not related to the office	Paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; A maximum of IDR200,000 (two hundred thousand rupiah) per gift per person, with a total gift not exceeding IDR1,000,000 (one million rupiah) in 1 (one) year from the same donor;
6	Hidangan atau sajian Dishes or meals	Berlaku umum Generally applicable

No	Bentuk Gratifikasi Form of Gratifications	Batasan Limitation
7	Hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi Prizes, appreciation, or awards from championships, races, or competitions	Biaya sendiri atau tidak terkait dengan kedinasan Own expenses or not related to the office
8	Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi Gains or interest from private placements, investments, or stock ownership	Berlaku umum Generally applicable
9	Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan Benefits from a cooperative, staff organization, or similar organization based on membership	Berlaku umum Generally applicable
10	Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan Equipment or supplies provided to participants in official activities.	Berlaku umum Generally applicable
11	Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja Awards in the form of money or goods that are related to improving work performance	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku In accordance with applicable laws and regulations
12	Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban Compensation or honorarium for professions outside of official activities which are not related to duties and obligations	Tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan There is no conflict of interest, and it does not violate the rules/code of conduct of the employee/official concerned.
13	Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara Bouquets of flowers as a greeting given at the event	-
14	Pemberian cendera mata/plakat kepada ASABRI dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri Provision of souvenirs/plaques to ASABRI in the context of official and state relations, both domestically and abroad.	Tidak diberikan untuk individu Insan ASABRI Not given to individual ASABRI personnel

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendorong upaya praktik bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memberikan komitmen dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Perusahaan berkomitmen menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dengan:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenisnya di lingkungan Perusahaan;
2. Mematuhi setiap peraturan perudangan-undangan dan peraturan lain terkait dengan anti penyuapan;
3. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
4. Menetapkan sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selaras dengan tujuan Perusahaan;
5. Memastikan ketersediaan sumber daya dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
6. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan kepada para pemangku kepentingan *(stakeholder)*;
7. Memastikan setiap unit kerja melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan;
8. Menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan;

Anti-Bribery Management System

To encourage efforts for business practices that are clean from corruption, collusion, and nepotism within State-Owned Enterprises (SOEs) and to provide a commitment to the prevention of corruption, collusion, and nepotism, the company is committed to implementing ISO 37001: 2016 concerning the Anti-Bribery Management System (ABMS), by:

1. Prohibiting bribery and similar practices within the company;
2. Complying with all laws and regulations related to anti-bribery;
3. Establishing the duties, responsibilities, and authority of the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP);
4. Establishing the objectives of the Anti-Bribery Management System (ABMS) in line with the company's objectives;
5. Ensuring the availability of resources in the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS);
6. Communicating the anti-bribery policy to stakeholders;
7. Ensuring each work unit conducts bribery risk assessment and control;
8. Providing a reporting system for indications of bribery;

9. Memberikan sanksi tegas kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
10. Mereviu efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara periodik dalam rangka peningkatan berkelanjutan; dan
11. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan telah berjalan dengan baik.

PT ASABRI (Persero) telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan oleh BSI Group Indonesia pada tanggal 23 September 2020, dengan ruang lingkup operasional pengelolaan Asuransi Sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN Kemhan/Polri di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero).

Sebagai bentuk tindak lanjut atas penerapan SMAP, perusahaan telah menetapkan pedoman SMAP beserta SOP serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan lingkup implementasi SMAP. Pada Pedoman SMAP telah disusun sasaran anti penyuapan sebagai hal-hal penting yang terukur dan dianggap representatif sebagai potret kinerja dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan, antara lain:

9. Providing strict sanctions to violators of the provisions in the Anti-Bribery Management System (ABMS) policy;
10. Reviewing the effectiveness of the implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) periodically in the context of continuous improvement; and
11. Ensure the company's anti-bribery strategies and policies are in place.

PT ASABRI (Persero) has obtained ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification issued by BSI Group Indonesia on September 23, 2020, with the operational scope of managing Social Insurance for TNI, Police Members, and ASN Employees of the Ministry of Defense/Polri at the Head Office of PT ASABRI (Persero).

As a form of follow-up to the implementation of SMAP, the company has established SMAP guidelines along with SOPs and other documents related to the scope of SMAP implementation. In the SMAP Guidelines, anti-bribery targets have been prepared as important things that are measurable and considered representative of a performance portrait of the Anti-Bribery Management System, including:

No	Sasaran Goals	Indikator Penilaian Assessment Indicators	Target Target
1	Tingkat kesadaran karyawan terkait SMAP Employee awareness level related to SMAP	Hasil *Survey* Kesadaran SMAP. SMAP Awareness Survey Results.	75%
2	Tingkat kemutakhiran register risiko penyuapan Level of update of bribery risk register	Register Risiko Penyuapan Termutakhiran sesuai waktu yang ditentukan. Bribery Risk Register Updated according to the specified time.	100%
3	Tingkat ketepatan waktu pelaporan gratifikasi Level of timeliness of gratification reporting	Setiap gratifikasi yang diterima dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu maksimum pelaporan gratifikasi yang berlaku. Any gratification received is reported in accordance with the applicable maximum deadline for reporting gratification.	100%
4	Tingkat uji kelayakan anti penyuapan Anti-bribery due diligence rate	Uji Kelayakan *(due diligent)* telah dilakukan pada karyawan baru, rekanan bisnis baru, perencanaan proyek baru, dan/atau perencanaan bisnis baru. Due diligent has been conducted on new employees, new business partners, new project planning, and/or new business planning.	80%
5	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP Number of major SMAP certification audit findings	Jumlah temuan major audit sertifikasi SMAP, baik sertifikasi awal, *surveillance* maupun re-sertifikasi. Number of major findings from SMAP certification audits, both initial certification, surveillance and re-certification.	0

Pelaksanaan Kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Selama tahun 2022, telah diselenggarakan agenda kegiatan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di antaranya adalah:

Implementation of Anti-Bribery Management System Activities

In 2022, an agenda of activities related to the Anti-Bribery Management System was held, including:

Awareness SMAP dan Pengelolaan Gratifikasi

Kegiatan dalam meningkatkan pemahaman Insan ASABRI terkait *soft structure* dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* melalui kegiatan sosialisasi kepada Karyawan baru, baik dengan metode *E-Learning* maupun dengan metode *online* yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Juni 2022.

Pengukuran tingkat pemahaman Karyawan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan untuk memenuhi sasaran anti penyuapan, pengukuran tersebut diselenggarakan mulai tanggal 14 s.d 22 Juni 2022. Sebanyak 473 karyawan telah mengikuti uji pemahaman dan mendapatkan skor penilaian di atas 75 dengan rata-rata perolehan nilai sebesar 93,3 dari 100.

Surveillance SMAP Tahun 2022

Penyelenggaraan kegiatan *Surveillance* SMAP di PT ASABRI (Persero) dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh PT BSI Group Indonesia. Pada kegiatan *Surveillance* tersebut diperoleh hasil yaitu tidak terdapat temuan major dan minor, namun terdapat 4 OFIs *(Opportunity For Improvement)*, antara lain:

1. Notulen Tinjauan Manajemen Puncak lebih *representative*, jika notulen tersebut menjelaskan semua agenda yang dipersyaratkan ISO 37001:2016 yang sudah dibahas termasuk agenda yang dibahas/ dilaporkan kepada *Top Management* pada *meeting* yang berbeda.
2. Pada proses pengelolaan sewa menyewa asset tetap dan property investor, peningkatan dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pengendalian informasi analisis harga sewa ruang supaya tidak bocor dan *Tenant* akan diinfomasikan untuk mengirimkan surat penawaran tertinggi melalui telepon, dapat dipertimbangkan untuk menyampaikan hal melalui email atau surat.
3. Evaluasi Kinerja Mitra Bank sudah dilakukan secara berkala/periode, namun perlu dikembangkan dalam suatu kebijakan/SOP.
4. Perlu segera dipertimbangkan untuk merevisi SOP/ Prosedur, sesuai atau mengacu kepada perubahan nama divisi/bidang.

Setelah melaksanakan kegiatan *Surveillance* SMAP, Pada tahun 2023 PT ASABRI (Persero) akan melakukan re-sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Kantor Pusat PT ASABRI (Persero).

Pengelola Kebijakan Anti Gratifikasi

Dalam rangka menunjang efektivitas pengendalian Gratifikasi di lingkungan ASABRI, dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) berdasarkan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/PH.08/85-AS/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Tim Pengendali Gratifikasi PT ASABRI (Persero), Adapun Tim Pengendali

SMAP Awareness and Gratification Management

This is an activity to increase the understanding of ASABRI personnel related to soft structures and the implementation of good corporate governance through socialization activities for new employees, both with the E-Learning and online methods, held from June 14 to 17, 2022.

The level of understanding of employees related to the Anti-Bribery Management System (SMAP) was measured to meet anti-bribery targets. The measurement was held from June 14 to 22, 2022. Four hundred seventy-three employees have taken the comprehension test and received an assessment score above 75, with an average score of 93.3 out of 100.

SMAP Surveillance in 2022

SMAP Surveillance activities at PT ASABRI (Persero) were implemented on August 26, 2022, by PT BSI Group Indonesia. In the surveillance activity, the results obtained were that there were no major and minor findings, but there were 4 OFIs (Opportunity For Improvement), including:

1. The Top Management Review minutes are more representative if the minutes explain all the agenda required by ISO 37001: 2016 that has been discussed, including the agenda discussed/reported to Top Management at different meetings.
2. In managing leases for fixed assets and investor property, improvements can be made by establishing a mechanism for controlling information on space rental price analysis so that it does not leak. Tenants will be informed to send the highest offer letter by telephone. It can be considered to convey matters via email or letter.
3. Performance Evaluation of Bank Partners has been carried out periodically but needs to be developed in a policy/SOP.
4. Immediate consideration should be given to revising the SOP/Procedure following or referring to the change in the name of the division/field.

After undertaking SMAP Surveillance activities, in 2023, PT ASABRI (Persero) will re-certify ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System for the scope of the Head Office of PT ASABRI (Persero).

Anti Gratification Policy Manager

To support the effectiveness of Gratification control in the ASABRI environment, a Gratification Control Team (TPG) was formed based on the Decree of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/PH.08/85-AS/IX/2022 dated September 1, 2022, on the Gratification Control Team of PT ASABRI (Persero) in coordinating

Gratifikasi bertugas dalam melakukan koordinasi ke KPK serta merupakan kepanjangan tangan dari KPK untuk menangani pengelolaan dan pelaporan Gratifikasi di ASABRI. Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua TPG.

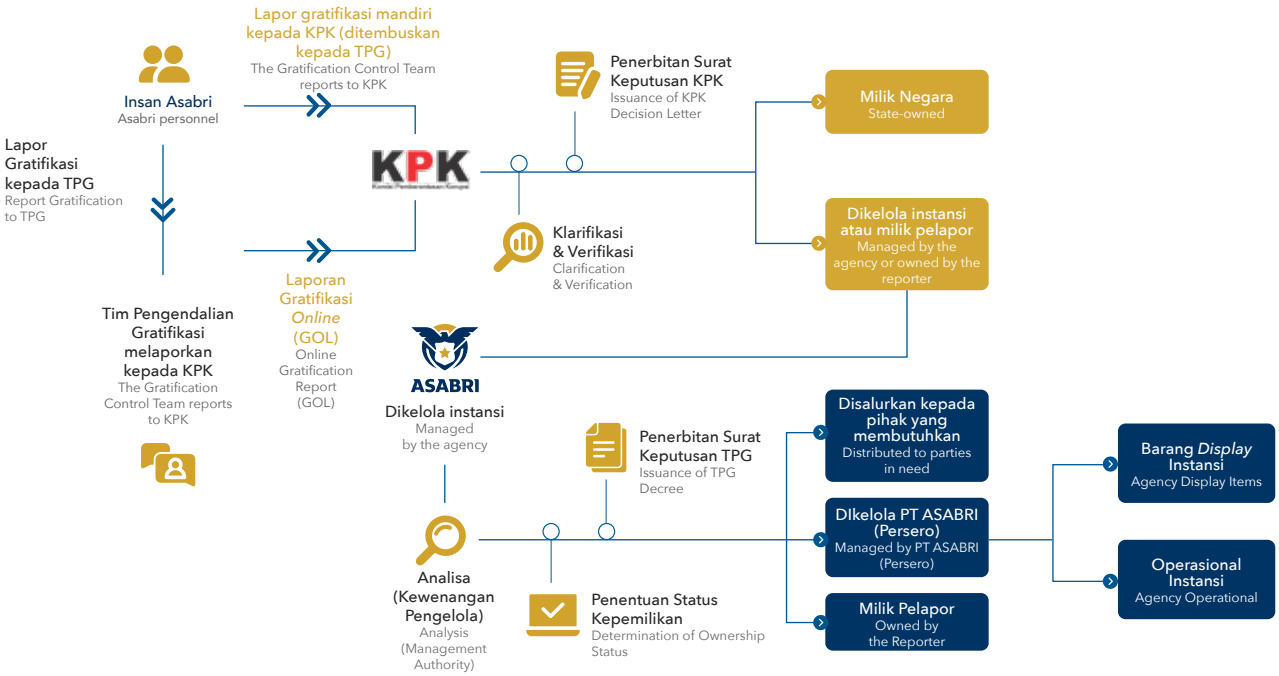
with the KPK and is an extension of the KPK to handle Gratification management and reporting in ASABRI. The Head of Compliance and Legal Division ex officio serves as Chairman of the TPG.

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

PT ASABRI (Persero) memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi dengan alur sebagai berikut:

Gratification Reporting Procedure

PT ASABRI (Persero) has a gratification reporting mechanism with the following flow.



Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi

Dalam rangka mengendalikan gratifikasi di ASABRI, maka ASABRI berkomitmen untuk menerapkan pengendalian di seluruh lini dan fungsi perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Selama tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi baik secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh karyawan kepada Unit Kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, serta para peserta. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara internal dan eksternal, sebagai berikut:

Implementation of Gratification Socialization

To control gratification in ASABRI, ASABRI is committed to implementing controls in all lines and functions of the company. One form of control is by conducting socialization activities. In 2022, socialization activities were carried out directly and indirectly to all employees in Work Units at the Head Office and Branch Offices and participants. Socialization activities. Implemented internally and externally, as follows:

Sosialisasi Internal / Internal Socialization

No	Kegiatan Activity
1.	Media Sosialisasi pesan antigratifikasi dalam bentuk wallpaper pada desktop PC/Laptop seluruh Karyawan PT ASABRI (Persero) Media Socialization of antigratification messages in the form of wallpapers on the desktop PC/Laptop of all PT ASABRI (Persero) Employees
2.	*E-Learning Awareness* SMAP & Pengendalian Gratifikasi E-Learning SMAP Awareness & Gratification Control
3.	Mengikuti pembelajaran Bimbingan Teknis Aplikasi GOL Following the GOL Application Technical Guidance learning

No	Kegiatan Activity
4.	Mengikuti *E-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi tanggal 14 Agustus 2022 Participating in E-Learning to Increase Understanding of Gratification on August 14, 2022
5.	*Sharing Session:* Pengendalian Gratifikasi Yang Dihadiri oleh Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK dan jajaran Direksi PT ASABRI (Persero) pada tanggal 13 Juli 2022 Sharing Session: Gratification Control Attended by the Director of Gratification and Public Services of KPK and the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) on July 13, 2022
6.	Penyampaian Surat Edaran tentang Larangan Menerima Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Lingkungan PT ASABRI (Persero) tanggal 8 April 2022 Delivering the Circular Letter on the Prohibition of Receiving Gratification Towards Eid Al-Fitr 1443 H within PT ASABRI (Persero) on April 8, 2022
7.	Penyampaian Surat Edaran tentang Larangan Penerimaan Atau Permintaan Bantuan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun PT ASABRI (Persero) tanggal 29 Juli 2022 Delivering the Circular Letter on Prohibition of Receiving or Requesting Assistance in the Context of PT ASABRI (Persero) Anniversary on July 29, 2022
8.	Webinar KPK - Peran Media Sosial Dalam Pencegahan Praktik Gratifikasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik KPK Webinar - The Role of Social Media in Preventing Gratification Practices through Strengthening Public Participation
9.	Forum Anti Gratifikasi (FAG) Tahun 2022 tanggal 23-25 November – Meninjau Konsistensi Implementasi dan Pemenuhan Asas Kepentingan Umum Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Anti-Gratification Forum (FAG) 2022 on November 23– 25 Reviewing the Consistency of Implementation and Fulfillment of the Public Interest Principle of KPK Regulation Number 2 of 2019

Sosialisasi Eksternal — External Socialization

No	Kegiatan Activity
1.	Diseminasi pesan antigratifikasi melalui Media Sosial terkait penolakan gratifikasi di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Instagram, Facebook, dan Twitter) Dissemination of antigratification messages through Social Media related to rejecting gratification in Ramadan and Eid al-Fitr (Instagram, Facebook, and Twitter)
2.	Penyampaian Pesan Antigratifikasi pada website ASABRI "ASABRI tolak Gratifikasi" Submission the Antigratification Messages on the ASABRI website "ASABRI rejects Gratification"
3.	Penyampaian Surat Edaran Kepada Mitra Kerja tentang Larangan Memberikan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Lingkungan PT ASABRI (Persero) tanggal 8 April 2022 Submission the Circular Letter to Working Partners regarding the Prohibition of Giving Gratification Towards Eid Al-Fitr 1443 H within PT ASABRI (Persero) dated April 8, 2022
4.	Penyampaian Surat Edaran tentang Larangan Pemberian Bantuan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun PT ASABRI (Persero) tanggal 29 Juli 2022 Submission the Circular Letter on Prohibition of Providing Assistance in the Context of PT ASABRI (Persero) Anniversary dated July 29, 2022
5.	Penyampaian Surat Edaran Kepada Mitra Kerja tentang Larangan Memberikan Gratifikasi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 tanggal 14 Desember 2022 Submission the Circular Letter to Working Partners regarding Prohibition of Giving Gratification for Christmas and New Year 2023 dated December 14, 2022
6.	Mengidentifikasi 15 (lima belas) titik rawan gratifikasi yang telah teridentifikasi Identify 15 (fifteen) gratification hotspots that have been identified

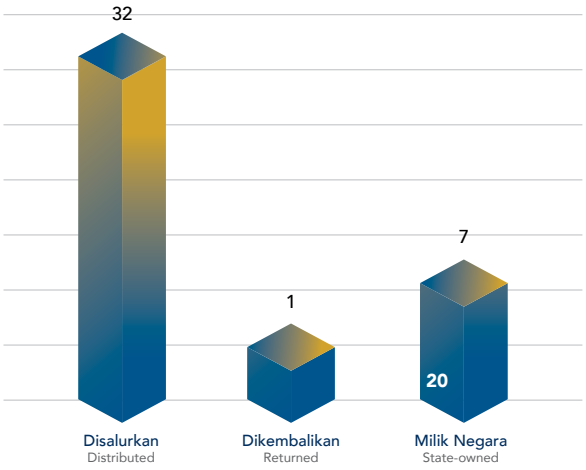
Laporan Gratifikasi Tahun 2022

Insan ASABRI yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan atau penolakannya secara langsung kepada UPG atau langsung kepada KPK. Selama tahun 2022, jumlah laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diterima UPG sebanyak 40 (empat puluh) laporan, penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi yang wajib dilaporkan, makanan/barang mudah rusak, dan honorarium sebagai narasumber, dengan rincian sebagai berikut:

Gratification Report 2022

ASABRI personnel who receive/reject gratification must report their acceptance or rejection directly to the UPG or the KPK. During 2022, the number of reports of acceptance/rejection of gratification received by UPG was 40 (forty) reports. The reported gratification included gratification that must be reported, food/perishable goods, and honorarium as a resource person, with details as follows:

Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi Tahun 2022
Gratification Reporting Management in 2022



Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN

Dalam rangka mempertegas dan memberi pemahaman para Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan ASABRI, ASABRI telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/PH.07/19-AS/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di PT ASABRI (Persero).

Management of State Organizer's Asset Report LHKPN Reporting

To reinforce and provide understanding of LHKPN Obligatory Officials in the ASABRI environment, ASABRI has a policy regarding the management of the State Organizer's Asset Report based on the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/PH.07/19-AS/XI/2020 dated November 23, 2020, on Guidelines for the Management and Submission of State Organizer's Asset Reports at PT ASABRI (Persero).

Tingkat Kepatuhan LHKPN Perusahaan

Bahwa tingkat pelaporan/penyampaian LHKPN di PT ASABRI (Persero) Tahun 2021 mencapai 100% atau sejumlah 105 (seratus lima) Wajib Lapor. Seluruh Wajib Lapor LHKPN PT ASABRI (Persero) telah melaporkan LHKPN sebelum tanggal 31 Maret 2022, dengan ketepatan waktu pelaporan 100%.

Company LHKPN Compliance Level

The LHKPN reporting/submission level at PT ASABRI (Persero) in 2021 reached 100% or 105 (one hundred and five) Mandatory Reporters. All PT ASABRI (Persero) LHKPN Mandatory Reporters have reported LHKPN before March 31, 2022, with 100% reporting timeliness.

Tahun Pelaporan Reporting Year	**Jumlah Wajib Lapor LHKPN** Number of Mandatory LHKPN Reporters	**Ketepatan Waktu Pelaporan** Timeliness of Reporting
2021	105	100%

Penanganan Benturan Kepentingan

PT ASABRI (Persero) telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor KEP/09/KOM/AS/VIII/2020; Nomor KEP/PH.10/56-AS/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Pedoman ini disusun untuk menciptakan budaya Perusahaan yang dapat menangani situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien, serta menyediakan ketentuan bagi seluruh karyawan untuk mengenal, mengatasi dan menangani konflik kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan dapat diunduh pada situs web bagian Tata Kelola https://www.asabri.co.id/page/192/Tata_Kelola_Perusahaan.

Handling Conflict of Interest

PT ASABRI (Persero) has a Conflict of Interest Policy based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT ASABRI (Persero) Number KEP/09/KOM/AS/VIII/2020; Number KEP/PH.10/56-AS/VIII/2020 dated August 31, 2020. This guideline is prepared to create a corporate culture that can handle conflict of interest situations transparently and efficiently and provide provisions for all employees to recognize, address, and handle conflicts of interest. The Conflict of Interest Policy can be downloaded on the website of the Governance section: https://www.asabri.co.id/page/192/Tata_Kelola_Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*
Whistleblowing System

Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi/pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi atau tindakan pelanggaran dan kecurangan *(fraud)*, dan perilaku melawan hukum yang terjadi di lingkungan ASABRI. Kebijakan ini berperan sebagai mekanisme deteksi dini *(early warning system)* guna mencegah tindakan pelanggaran dan kecurangan serta perilaku melawan hukum yang merugikan ASABRI sekaligus upaya penegakan kedisiplinan dan kepatuhan bagi seluruh Insan ASABRI.

The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for witnesses/reporters to submit information regarding indications or acts of violation, fraud, and unlawful behavior that occur within ASABRI. This policy acts as an early detection mechanism (early warning system) to prevent acts of violation, fraud, and unlawful behavior that harm ASABRI, as well as efforts to enforce discipline and compliance for all ASABRI personnel.

Mekanisme Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran

Kebijakan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* merupakan salah satu bentuk upaya atas penerapan GCG dan termasuk di dalamnya pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan praktik kecurangan lainnya, dengan menjunjung asas kerahasiaan, anonim, dan mandiri. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran, antara lain sebagai berikut:

1. *Whistleblower* menyampaikan dugaan pelanggaran secara tertulis sesuai dengan syarat dan melalui sarana yang telah ditetapkan;
2. Unit Pengelola *Whistleblowing System* menerima pelaporan dan melakukan verifikasi;
3. Unit Pengelola *Whistleblowing System* menyusun berita acara hasil verifikasi dan menentukan apakah akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak;
4. Apabila ditindaklanjuti ke tahap investigasi, maka dibentuk Tim Investigasi dengan mekanisme sesuai dengan Pelaporan Pelanggaran;
5. Apabila diputuskan untuk ditutup karena tidak cukup bukti, maka disampaikan kepada *Whistleblower;*
6. Apabila hasil investigasi terbukti, maka Terlapor akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Internal ASABRI;
7. Apabila hasil investigasi tidak terbukti, maka Terlapor dinyatakan tidak bersalah; dan
8. Dalam hal hasil Investigasi menyimpulkan bahwa Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu dan/atau fitnah tanpa dasar yang jelas, maka *Whistleblower* dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Whistleblowing Management Mechanism

The Whistleblowing Management Policy is one form of efforts to implement GCG. It also includes eradicating Corruption, Collusion, Nepotism, and other fraudulent practices by upholding the principles of confidentiality, anonymity, and independence. The mechanism for reporting violations is as follows.

1. The whistleblower submits allegations of violations in writing based on the requirements and through the means that have been determined;
2. The Whistleblowing System Management Unit receives the report and conducts verification;
3. The Whistleblowing System Management Unit prepares minutes of verification results and determines whether to follow up to the next stage or not;
4. If it is followed up to the investigation stage, an Investigation Team is formed with a mechanism according to the report;
5. If it is decided to be closed due to insufficient evidence, it is conveyed to the Whistleblower;
6. If the results of the investigation are proven, the Reporting Party will be sanctioned based on ASABRI Internal Regulations;
7. If the results of the investigation are not proven, the Reporting Party is declared innocent, and
8. If the investigation results conclude that the Violation Report submitted is a false and/or slanderous report without a clear basis, the Whistleblower may be counter-sued or subject to sanctions according to applicable regulations.

Media Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Media
Website
www.asabri.co.id/pengaduan
Email
pengaduan@asabri.co.id

Surat | Letter

- Ditujukan kepada Tim WBS, dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Karyawan
- Ditujukan kepada Direksi, dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Organ Pendukungnya
- Ditujukan kepada Dewan Komisaris, dalam hal pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi
- Addressed to the WBS Team, if the violation is committed by an Employee
- Addressed to the Board of Directors, if the violation is committed by the Board of Commissioners or its Supporting Organs
- Addressed to the Board of Commissioners, if the violation is allegedly committed by the Board of Directors

Tata Cara Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan indikasi pelanggaran dapat berasal dari pihak internal dan/atau pihak eksternal Perusahaan. Dalam melaporkan adanya tindakan, maka pelapor harus melihat dan mendengar sendiri kejadian, atau jika tidak melihat dan mendengar sendiri maka melampirkan bukti surat-surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dan lain sebagainya) yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pelanggaran. Dalam menyampaikan pelaporan, pelapor wajib mengikuti ketentuan tata cara pelaporan sebagai berikut:

1. Mencantumkan kelengkapan data seperti identitas diri (nama, alamat rumah/kantor, nomor telepon, nomor faksimili, dan/atau alamat *e-mail*) atau Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan secara anonim;
2. *Whistleblower* dalam Pelaporan Pelanggaran harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti, meliputi:
   a. masalah apa yang dilaporkan *(what)*, dalam hal ini menjelaskan secara jelas dan selengkap mungkin Pelaporan Pelanggaran yang ingin diungkapkan;
   b. pihak yang terlibat *(who)*, dalam hal ini diungkapkan siapa saja pihak yang terlibat atau bertanggung jawab atas kejadian tersebut serta saksi (jika ada);
   c. tempat kejadian *(where)*, dalam hal ini harus disebutkan tempat di mana indikasi adanya Pelanggaran tersebut terjadi, dengan spesifik menyebutkan nama tempat atau daerah tempat kejadian;
   d. waktu kejadian *(when)*, dalam hal ini tanggal, bulan, dan tahun saat terjadinya pelanggaran harus disebutkan;
   e. bagaimana terjadinya *(how)*, dalam hal ini perlu dijelaskan bagaimana pelanggaran terjadi dan apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya; dan
   f. dokumen pendukung atas kasus yang diadukan (jika ada).

Procedure for Reporting Violations

Reporting indications of violations can come from internal and/or external parties of the company. In reporting an action, the reporters must see and hear the incident themselves, or if they do not see and hear it themselves, they shall attach evidence of letters or evidence of instructions (recordings, pictures, and so on) to prove that a violation has occurred. In submitting a report, the reporter must follow the provisions of the reporting procedure as follows:

1. Include complete data, such as personal identity (name, home/office address, telephone number, facsimile number, and/or e-mail address) or report can be done anonymously;
2. The whistleblower must provide initial indications that can be accounted for so that they can be traced or followed up, including:
   a. what issues are reported (what), in this case, the violation should be explained clearly and as completely as possible;
   b. parties involved (who), in this case, the parties involved or responsible for the incident and witnesses (if any);
   c. place of occurrence (where), in this case, mentioning the place where the indicated violation occurred, with the specific name of the place or area;
   d. time of occurrence (when), in this case, the date, month, and year when the violation occurred
   e. how it happened (how), in this case, it is necessary to explain how the violation occurred and whether this incident has occurred before; and
   f. supporting documents for the case (if any).

Pihak Pengelola *Whistleblowing System*

Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran ASABRI adalah Direktur Utama, dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional menunjuk Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum sebagai pengelola *Whistleblowing System*. Terkait pelaksanaan fungsinya, pengelola *Whistleblowing System* dibantu oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System* yang memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengelola aktivitas harian *Whistleblowing System*. Unit Pengelola *Whistleblowing System* secara *ex officio* dikelola oleh Bidang Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan Hukum.

Pelaksana tugas Pengelola *Whistleblowing System* adalah Unit Pengelola *Whistleblowing System* yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengelola secara khusus kasus-kasus pelanggaran serta menjalankan aktivitas harian *Whistleblowing System*. Pengelola *Whistleblowing System* merupakan penanggung jawab teknis dari pelaksanaan *Whistleblowing System* di ASABRI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Tugas Unit Pengelola *Whistleblowing System* meliputi:

1. Menerima Pelaporan Pelanggaran dan melakukan verifikasi Pelaporan Pelanggaran terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh *Whistleblower*;
2. Mengoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System;*
3. Menyusun berita acara hasil verifikasi yang di dalamnya antara lain memuat risalah dan rekomendasi kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris, sesuai jalur pelaporan;
4. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap *Whistleblower*, Terlapor, dan Tim Investigasi;
5. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*; dan
6. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas *Whistleblowing System.*

Kewenangan Unit Pengelola *Whistleblowing System* meliputi:
1. Menindaklanjuti laporan pelanggaran; dan
2. Melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksana *Whistleblowing System.*

Perlindungan Bagi Pelapor *(Whistleblower)*

ASABRI berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi pelapor sebagai wujud pencegahan upaya balas dendam dan diskriminasi di lingkungan Perusahaan. Perlindungan yang diberikan ASABRI terhadap pelapor, meliputi:

The Whistleblowing System Management

The Person in Charge of ASABRI Whistleblowing Management is the President Director. In implementing this duty, the President Director operationally appoints the Head of the Compliance and Legal Division as the Whistleblowing System manager. The Whistleblowing System manager is assisted by the Whistleblowing System Management Unit, which has sufficient competence and integrity to manage the daily activities of the Whistleblowing System. This unit is ex officio managed by the Compliance Division of the Compliance and Legal Division.

The Whistleblowing System Manager is a part of the Whistleblowing System Management Unit that has sufficient competence and integrity to specifically manage violation cases and carry out the daily activities of the Whistleblowing System. The Whistleblowing System Manager is the technical person in charge of implementing the Whistleblowing System in ASABRI and is responsible to the President Director.

The duties of the Whistleblowing System Management Unit include:
1. Receiving Violation Reports and verifying Violation Reports based on supporting documents submitted by Whistleblower;
2. Coordinating the handling of follow-up on reports submitted through the Whistleblowing System;
3. Preparing minutes of verification results, which include minutes and recommendations to the President Director, or Board of Commissioners, according to the reporting line;
4. Coordinating the provision of protection to the Whistleblower, the Reported Party, and the Investigation Team;
5. Monitoring the handling of the settlement of incoming reports through the Whistleblowing System; and
6. Conducting evaluation and corrective action on the effectiveness of the Whistleblowing System.

The authority of the Whistleblowing System Management Unit includes:
1. Following up on reports of violations; and
2. Taking other necessary actions in implementing the Whistleblowing System.

Protection for Whistleblowers

ASABRI is committed to protecting whistleblowers as a form of prevention of retaliation and discrimination within the company. The protection provided by ASABRI for whistleblowers includes:



Penanganan Pengaduan

Pengelolaan pelaporan pelanggaran ASABRI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Penerimaan Pengaduan

Unit Pengelola *Whistleblowing System* menerima pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor baik lisan ataupun tertulis dengan harus memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Sebagai upaya dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran maka dibentuk Tim Investigasi untuk melaksanakan tugas mengumpulkan dan menemukan data-data/bukti terkait pelanggaran. Adapun susunan tim investigasi yang diduga dilakukan oleh karyawan, meliputi sebagai berikut:

1. Apabila terduga terlapor berasal dari karyawan Perusahaan maka tindak lanjut pengelolaan pelanggaran adalah Tim Investigasi *Whistleblowing System* dengan ketua Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum.
2. Jika Terlapor merupakan pejabat setingkat kepala unit kerja, maka Tim Investigasi terdiri atas Karyawan ASABRI yang ditunjuk oleh Direksi dan diketuai oleh Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum serta salah satu anggota Direksi sebagai penanggung jawab.

Complaint Handling

Management of ASABRI violation reporting is carried out with the following mechanism:

Acceptance of Complaints

The Whistleblowing System Management Unit receives complaints of violations submitted by whistleblowers either orally or in writing with clear evidence, information, or indications of the occurrence of the reported violation so that it can be traced or followed up. As an effort to follow up on reports of alleged violations, an Investigation Team was formed to carry out the task of collecting and finding data/evidence related to violations. The composition of the investigation team allegedly committed by employees includes the following:

1. If the alleged reported party is an employee of the company, the Whistleblowing System Investigation Team, headed by the Head of Compliance and Legal Division, will follow up on the alleged violation.
2. If the Reported Party is an official at the level of the head of the work unit, the Investigation Team consists of ASABRI Employees appointed by the Board of Directors, chaired by the Head of the Compliance and Legal Division, and one of the members of the Board of Directors as the person in charge.

3. Jika terduga terlapor berasal dari Karyawan Perusahaan yang merupakan Tim Pengelola *Whistleblowing System* maka Tim Investigasi terdiri atas anggota Direksi dan Karyawan ASABRI yang ditunjuk berdasarkan kompetensi dan keahliannya, yang diketuai oleh Direktur Utama.
4. Jika terduga terlapor adalah Dewan Komisaris, maka tindak lanjut pengelolaan pelanggaran adalah RUPS.
5. Jika terduga terlapor adalah Direksi, maka tindak lanjut pengelolaan pelanggaran adalah Dewan Komisaris.
6. Jika diperlukan maka investigasi dapat menggunakan Eksternal Investigator yang independen.

Administrasi Pengaduan

Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan dengan baik oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System* yang memuat nomor registrasi, tanggal penerimaan laporan, petugas Unit Pengelola *Whistleblowing System* yang menerima, dan deskripsi singkat laporan pelaporan yang disampaikan.

Investigasi

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. Tim investigasi melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi Pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para pihak terkait yang diperlukan guna memastikan apakah telah terjadi Pelanggaran atau tidak. Terlapor akan diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui. Selanjutnya Tim Investigasi menyampaikan hasil investigasi kepada Direktur Utama atau Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi dilakukan oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System* dan Unit Pengelola *Whistleblowing System* menginformasikan Pelaporan Pelanggaran yang masuk, yang telah diverifikasi, yang telah diinvestigasi, dan yang dianggap selesai setiap saat jika diperlukan.

Penyampaian Tanggapan

ASABRI melalui Unit Pengelola *Whistleblowing System* dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pelaporan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan para Pemangku Kepentingan yang meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai pelaporan pelanggaran yang diajukannya.

3. If the alleged reported party comes from a company employee who is a part of the Whistleblowing System Management Team, the Investigation Team consists of members of the Board of Directors and ASABRI employees appointed based on their competence and expertise, chaired by the President Director.
4. If the alleged reported party is the Board of Commissioners, then the follow-up to the management of the violation is through GMS.
5. If the alleged reported party is the Board of Directors, the follow-up management of the violation is by the Board of Commissioners.
6. If necessary, the investigation can use an independent External Investigator.

Complaint Administration

The entire process of reporting violations is properly administered by the Whistleblowing System Management Unit, which contains the registration number, the date of receipt of the report, the Whistleblowing System Management Unit officer who received it, and a brief description of the submitted report.

Investigation

If the verification results indicate a violation supported by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage. The investigation team conducts further investigations into the substance of the reported violation to seek and collect evidence and information from the relevant parties needed to ascertain whether a violation has occurred. The reported party will be fully able to explain the evidence found. Furthermore, the Investigation Team submits the investigation results to the President Director, or Board of Commissioners for further decision.

Monitoring Follow-up

The Whistleblowing System Management Unit monitors investigation results, and the Whistleblowing System Management Unit informs the Whistleblowing which has been verified, investigated, and considered completed at any time if needed.

Delivering Response

ASABRI, through the Whistleblowing System Management Unit, can inform and/or respond to the status of the violation reporting resolution process to stakeholders and/or representatives of stakeholders who request explanations from the company regarding the violation reporting submitted.

Sosialisasi terkait *Whistleblowing System*

Selama tahun 2022, telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan beberapa cara antara lain sosialisasi kepada seluruh karyawan melalui kegiatan *Self Learning re-design* Aplikasi *Whistleblowing System* dan Uji pemahaman karyawan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember s.d 26 Desember 2022. Adapun target uji pemahaman WBS Tahun 2022 yaitu skor 8, dengan hasil sebagai berikut:

Socialization Related to the Whistleblowing System

In 2022, socialization activities were held in several ways, including socialization to all employees through Self-Learning activities on re-designing the Whistleblowing System Application and employee understanding tests held from December 21 to December 26, 2022. The WBS understanding test target score for 2022 is 8, and the results are as follows.

Responden Respondent	**Populasi** Population	**Sampel** Sample	**Kembali** Returned	**Realisasi %** Realization %
BoD-1	45	40	44	110%
BoD-2 and Staff	460	210	411	195,7%

*Penentuan jumlah sampel berdasarkan Tabel Krejcie dan Morgan 1970 | Determination of number of sample based on Krejcie and Morgan Table 1970

Hasil dari uji pemahaman:

Results of the comprehension test:

Nilai Value	**Jumlah Responden** Number of Respondents	**Rata-Rata Nilai Keseluruhan** Overall Grade Average
Nilai <8	85	8,58
Nilai >8	370	

Berdasarkan capaian rata-rata nilai pemahaman sebesar 8,58 dan telah melebihi nilai yang ditargetkan sebelumnya.

Based on the average understanding score of 8.58, it has exceeded the previously targeted value.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dan diproses pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Number of Violation Complaints

The number of violation complaints issued and processed in 2022 is as follows.

Periode Period	**Jumlah Kasus** Number of Cases	**Status**
Januari January	0	-
Februari February	0	-
Maret March	0	-
April April	0	-
Mei May	0	-
Juni June	2	Permintaan Keterangan, pemeriksaan Berkas, dan Penyusunan laporan telah selesai. Request for information, examination of files, and preparation of reports have been completed.
Juli July	2	Permintaan Keterangan, pemeriksaan Berkas, dan Penyusunan laporan telah selesai. Request for information, examination of files, and preparation of reports have been completed.
Agustus August	2	Permintaan Keterangan, pemeriksaan Berkas, dan Penyusunan laporan telah selesai. Request for information, examination of files, and preparation of reports have been completed.
September September	2	Permintaan Keterangan, pemeriksaan Berkas, dan Penyusunan laporan telah selesai. Request for information, examination of files, and preparation of reports have been completed.
Oktober October	1	Permintaan Keterangan, pemeriksaan Berkas, dan Penyusunan laporan telah selesai. Request for information, examination of files, and preparation of reports have been completed.
November November	0	-
Desember December	1	Proses Verifikasi Verification Process

Perkara Hukum Tahun 2022
Legal Cases in 2022

Selama tahun 2022 terdapat beberapa perkara hukum baik kasus perdata maupun kasus pidana, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

In 2022, there were some legal cases, both civil and criminal cases, as stated in the following table:

Kasus Perdata / Civil Cases

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter of the Case/ Defense	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Effect on Company Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang dikenakan Sanctions	Nilai Perkara Case Value
1		Dalam Proses Pemeriksaan di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan In the process of examination at the appeal level of the Medan High Court		PT ASABRI (Persero) mengajukan upaya hukum Banding PT ASABRI (Persero) filed a legal appeal.		

No	Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter of the Case/ Defense	Status Penyelesaian Settlement Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Effect on Company Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang dikenakan Sanctions	Nilai Perkara Case Value
2		Dalam Proses Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur In the process of appeal to the DKI Jakarta High Court through the East Jakarta District Court		PT ASABRI (Persero) mengajukan upaya hukum Banding PT ASABRI (Persero) filed a legal appeal.		

Kasus Pidana / Criminal Cases

No	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Completion Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Effect on Company Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang dikenakan Sanctions	Nilai Perkara Case Value
1		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Assist and oversee the issuance of Government Regulations as implementing regulations of Law	-	-
2		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Assist and oversee the issuance of Government Regulations as implementing regulations of Law Number 28 of 2022	-	-

No	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Completion Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Effect on Company Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang dikenakan Sanctions	Nilai Perkara Case Value
3.		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Assist and oversee the issuance of Government Regulations as implementing regulations of Law Number 28 of 2022	-	-
4.		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Assist and oversee the issuance of Government Regulations as implementing regulations of Law Number 28 of 2022.	-	-
5.		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		1. Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 2. melakukan upaya koordinasi atau korespondensi dengan Kemenkeu selaku Pengelola Barang Milik Negara 1. Assist and oversee the issuance of Government Regulations as implementing regulations of Law Number 28 of 2022 2. make efforts to coordinate or correspond with the Ministry of Finance as the State Property Manager	-	-

No	Pokok Perkara Subject Matter	Status Penyelesaian Completion Status	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan Effect on Company Condition	Upaya Manajemen Management Efforts	Sanksi yang dikenakan Sanctions	Nilai Perkara Case Value
6.		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Assist and oversee the issuance of a Government Regulation as an implementing regulation of Law Number 28 of 2022	-	-
7.		Putusan Kasasi Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) Cassation Decision already enforceable (inkracht van gewijsde)		Membantu dan mengawal agar diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022	-	-
8.	t	Putusan masih dalam tingkat pertama The decision is still in the first instance.		Memantau persidangan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Monitor the trial until there is a legally binding verdict (inkracht van gewijsde)	-	-


07



TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Social and Environmental Responsibility

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility

Sebagai BUMN yang menyelenggarakan asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan dan Polri, PT ASABRI (Persero) memiliki komitmen dalam menjalankan Program TJSL yang memiliki nilai pendekatan bisnis inti kepada Perusahaan. Pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) telah merealisasikan Program TJSL sebesar melalui berbagai kegiatan TJSL yang memberikan manfaat kepada Peserta ASABRI maupun masyarakat umum.

As the SOE that organizes social insurance for TNI, Polri Members, and ASN within the Ministry of Defense and Polri, PT ASABRI (Persero) is committed to carrying out the CSR/TJSL Program, which has a core business approach value to the Company. In 2022, PT ASABRI (Persero) realized a CSR Program of through various CSR activities that benefit ASABRI Participants and the general public.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN adalah bentuk komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata Kelola. Program TJSL dilaksanakan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

The SOE's Social and Environmental Responsibility (CSR) Program is a form of the company's commitment to sustainable development by providing benefits to the economy, society, environment, law, and governance. The CSR program is implemented with more integrated, directed, measurable impact, and accountable principles and is part of the company's business approach.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainability Development Goals* (SDGs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan berpedoman pada ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* sebagai panduan pelaksanaan program.

The implementation of the SOE CSR Program is oriented toward the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) as stipulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 on the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility as a guide for program implementation.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, disebutkan bahwa Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan.
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta akuntabel.

Based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-05/MBU/04/2021 dated April 8, 2021, on the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises, as amended by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-06/MBU/09/2022 dated September 15, 2022, it is stated that the SOE CSR Program aims to:

1. Provide benefits for the company's economic, social, environmental, legal, and governance development.
2. Contribute to creating added value for the company with integrated, directed, and measurable principles in impact and accountability.

3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perusahaan.

Pilar TJSL

Setiap Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengacu pada 4 (empat) Pilar Utama, yaitu:



Dasar Penerapan TJSL

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022;
4. Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 hal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama PUMK");
5. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/MB.01/09-AS/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT ASABRI (Persero);

3. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent as well as communities around the company.

Pillars of CSR

Each SOE's CSR Program is implemented based on the Sustainable Development Goals (SDGs), which refer to 4 (four) Main Pillars, including:

Basis for CSR Implementation

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation;
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOEs Number PER-05/MBU/04/2021 on the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises, as amended by Regulation of the Minister of SOEs Number PER-06/MBU/09/2022;
4. Letter of the Minister of SOEs Number S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, on Cooperation of Micro and Small Business Funding Program ("PUMK Cooperation");
5. Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/MB.01/09-AS/VIII/2021 dated August 27, 2021, on the Social and Environmental Responsibility Program of PT ASABRI (Persero);

6. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/MB.01/10-AS/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT ASABRI (Persero);
7. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero);
8. Surat Edaran Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor SE/MB.12/02-AS/III/2022-UT tanggal 09 Maret 2022 tentang Fokus Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022;
9. Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 Nomor RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT ASABRI (Persero) Tahun 2022;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL PT ASABRI (Persero) Tahun 2022.

Struktur Pengelola TJSL

Sesuai dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Peta Proses Bisnis PT ASABRI (Persero), program TJSL dikelola oleh unit kerja Sekretariat Perusahaan melalui Bidang TJSL. Sekretariat Perusahaan tergabung dalam Direktorat Utama, sehingga berada di bawah pengawasan Direktur Utama. Dalam pelaksanaan hariannya, Direktur SDM dan Hukum bertindak sebagai Pembina Harian TJSL, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama kepada Direktur SDM dan Hukum Nomor SK/MB.01/64-AS/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Selain itu, dalam rangka membantu Direksi dalam memastikan efektivitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan TJSL Perusahaan, serta sebagai bentuk dari upaya Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Direksi membentuk Komite TJSL.

6. Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/MB.01/10-AS/VIII/2021 dated August 31, 2021, on the Social and Environmental Responsibility Committee of PT ASABRI (Persero);
7. Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 dated February 02, 2022, on the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero), as amended by Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 dated July 29, 2022, on the Business Process Map of PT ASABRI (Persero);
8. Circular Letter of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number SE/MB.12/02-AS/III/2022-UT dated March 09, 2022, on the Focus of Implementation of the Social and Environmental Responsibility Program in 2022;
9. Minutes of Meeting to Discuss the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program for 2022 Number RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 dated December 28, 2021;
10. Work Plan and Budget of PT ASABRI (Persero) Company for 2022;
11. Work Plan and Budget of PT ASABRI (Persero) Social and Environmental Responsibility Program for 2022.

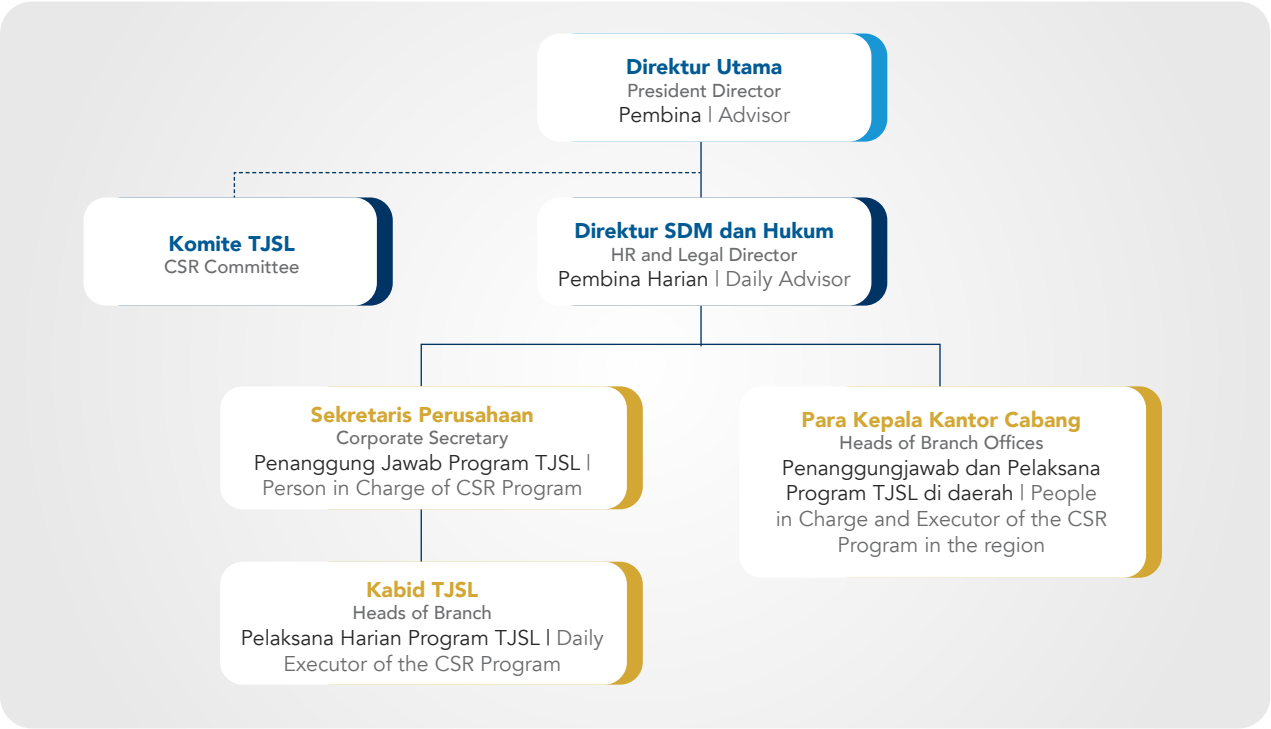
TJSL Management Structure

According to the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.01.01/01-AS/II/2022 dated February 2, 2022, on the Organization and Work Procedures of PT ASABRI (Persero), as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT ASABRI (Persero) Number PER/OT.02.02/13-AS/VII/2022 dated July 29, 2022, on the Business Process Map of PT ASABRI (Persero), the Corporate Secretariat work unit manages the CSR program through the CSR Division. The Corporate Secretariat is a part of the Main Directorates, so it is under the supervision of the President Director. In its daily implementation, the Director of HR and Law acts as the Daily Supervisor of CSR, based on the President Director's Power of Attorney to the Director of HR and Law Number SK/MB.01/64-AS/VIII/2021 dated August 31, 2021.

In addition, to assist the Board of Directors in ensuring the effectiveness of the planning, implementation, supervision, monitoring, and evaluation system for the implementation of the company's CSR program and as a form of the company's efforts to implement the principles of good corporate governance, the Board of Directors established the CSR Committee.

Adapun susunan Struktur Organisasi Pengelola Program TJSL PT ASABRI (Persero) sebagai berikut:

The composition of the CSR Program Management Organization Structure of PT ASABRI (Persero) is as follows.



Kinerja Program TJSL 2022

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pelaksanaan program TJSL Tahun 2022

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pelaksanaan program TJSL Tahun 2022 sebesar , dengan rincian sebagai berikut:

Performance of CSR Program 2022

Work Plan and Budget (RKA) for the Implementation of the CSR Program in 2022

The Work Plan and Budget (RKA) for the implementation of the CSR program in 2022 amounted to with the following details.

Pilar TPB SDG Pillars	**RKA Tahun 2022 (Rp)** RKA 2022 (IDR)
Pilar Sosial | Social Pillar	
Pilar Ekonomi | Economic Pillar	
Pilar Lingkungan | Environment Pillar	
Jumlah | Total	

Pelaksanaan atas 3 (tiga) pilar TPB sebagaimana dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Program TJSL Non PUMK yang dijalankan oleh unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/ Community Involvement and Development (CID) dalam hal ini Bidang TJSL bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan tahun 2022 sebesar .
2. Program TJSL Non PUMK yang dijalankan oleh PT ASABRI (Persero) di luar unit CID dalam hal ini Divisi Strasum yang bersumber dari Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada Laporan RKA Tahun 2022 sebesar .

The implementation of the 3 (three) SDG pillars can be explained as follows;

1. The Non-PUMK CSR program run by the Community Involvement and Development (CID) unit, in this case, the CSR Division, is sourced from the budget calculated as company costs in 2022 was
2. Non-PUMK CSR program run by PT ASABRI (Persero) outside the CID unit, in this case, the Strasum Division, from the budget which is calculated as a cost in the 2022 RKA Report was .

3. Program TJSL Pendanaan UMK (PUMK) yang bersumber dari dana bergulir sampai dengan tahun 2022 sebesar .

Realisasi Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2022

Realisasi Pelaksanaan Program TJSL Tahun 2022 sebesar Rp23,895 miliar, atau sebesar 118,76% dari RKA 2022, dengan rincian berdasarkan Pilar TPB sebagai berikut:

3. CSR Program for the UMK Funding (PUMK) sourced from revolving funds until 2022 was

Realization of TJSL Program Implementation in 2022

The realization of the implementation of the CSR Program in 2022 amounted to IDR23.895 billion, or 118.76% of the 2022 RKA, with details based on the SDG Pillars as follows:

Pilar TPB SDG Pillars	**RKA Tahun 2022 (Rp)** RKA 2022 (IDR)	**Realisasi Tahun 2022** Realization in 2022
Pilar Sosial | Social Pillar		
Pilar Ekonomi | Economic Pillar		
Pilar Lingkungan | Environment Pillar		
Jumlah | Total		

Dalam pelaksanaannya, realisasi kegiatan Program TJSL yang dilakukan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan Program Non PUMK, dengan rincian sebagai berikut;

1. Realisasi Program TJSL non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau *Community Involvement and Development* (CID) dalam hal ini bidang TJSL bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan Tahun 2022 sebesar atau 94,71% dari RKA TJSL 2022 sebagaimana tercantum pada RKAP Tahun 2022 pada unit CID.
2. Realisasi Program TJSL Non PUMK yang dijalankan di luar unit CID dalam hal ini Divisi Strasum yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada RKA Perusahaan Tahun 2022 sebesar atau 49.21% dari RKA TJSL 2022 sebagaimana tercantum pada RKAP Tahun 2022 yang dijalankan di luar unit CID.
3. Realisasi Program Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2022 sebesar Rp18.583.000.000 atau 171,29% dari RKA TJSL 2022 yang disalurkan secara kolaborasi melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

CSR Program activities were realized through the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non PUMK Program, with the following details;

1. The realization of the non-PUMK CSR Program carried out by the Community Involvement and Development (CID) unit, in this case, the CSR program, was sourced from the budget calculated as the Company's 2022 costs of or 94.71% of the 2022 RKA for CSR as stated in the 2022 RKAP for the CID unit.

2. Realization of the Non-PUMK CSR Program carried out outside the CID unit, in this case, the Strasum Division, which came from the budget calculated as a cost in the Company's 2022 RKA was or 49.21% of the 2022 CSR Program RKA as stated in the 2022 RKAP carried out by outside the CID unit.

3. Realization of the UMK Funding Program sourced from the revolving fund of the UMK Funding Program in 2022 amounted to IDR18,583,000,000 or 171.29% of the 2022 RKA for CSR, which was distributed collaboratively through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Pencapaian TJSL 2022

Sepanjang tahun 2022, program yang dicanangkan dapat dijalankan dengan baik, di samping sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, kegiatan TJSL juga mampu mendukung bisnis inti Perusahaan. Atas kondisi tersebut, pada tahun 2022, PT ASABRI (Persero) khususnya unit kerja TJSL berhasil mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Indonesia CSR Award-V-2022, kategori *The Best SDG'S Program Implementation*–2022 *"Good Health & Well Being"*, yang diberikan oleh Economic Review pada tanggal 28 Juli 2022

Achievement of CSR 2022

Throughout 2022, the planned program could be carried out well. In addition to being a form of the company's concern for sustainable development goals, CSR activities were also able to support the company's core business. For these conditions, in 2022, PT ASABRI (Persero), especially the CSR work unit, managed to get an appreciation in the form of the Indonesia CSR Award-V-2022 with the category of The Best SDG'S Program Implementation - 2022 "Good Health & Well Being", given by the Economic Review on July 28, 2022.

Realisasi Program Non PUMK dan PUMK
Realization of Non-PUMK and PUMK Programs

Program TJSL Non PUMK
Rincian Realisasi Program TJSL Non PUMK CID dan Non CID tahun 2022 sebagai berikut:

Non PUMK CSR Program
Details of the Realization of Non-CID and Non-PUMK CSR Programs in 2022 are as follows:

No	Nama Program Name of Program	Kegiatan Activity	Nomor TPB Number of SDG	Target Capaian Tahun 2022 Achievement Target in 2022	RKA Tahun 2022 (Rp) RKA 2022 (IDR)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp) Realization in 2022 (IDR)	Realisasi Capaian Tahun 2022 (Rp) Realization of Achievement in 2022 (IDR)	Keterangan Description
	Anggaran CID CID Budget							
Program Sosial Social Program								
1	Beasiswa Anak Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri Scholarships for Children of TNI, Polri Members, and Civil Servants of the Ministry of Defense/Polri	Bantuan yang diberikan kepada Siswa SD, SMP, SMA anak dari TNI/POLRI/ASN Support provided to elementary, junior high, and high school students who are children of TNI/POLRI/ASN.	4 (Pendidikan Berkualitas) 4 (Quality Education)	100% dari Anggaran 100% of Budget			100,00%	
2	Pembinaan Olahraga Sports Development	Bantuan yang diberikan dalam rangka pembinaan sektor olahraga Assistance provided in the context of developing the sports sector	4 (Pendidikan Berkualitas) 4 (Quality Education)	100% dari Anggaran 100% of Budget			100,00%	
3	Beasiswa Yayasan BUMN Untuk Indonesia SOE Foundation Scholarship for Indonesia	Bantuan bidang Pendidikan bersinergi dengan Yayasan BUMN Untuk Indonesia Education assistance in synergy with the SOE Foundation for Indonesia	4 (Pendidikan Berkualitas) 4 (Quality Education)	100% dari Anggaran 100% of Budget			0,00%	Berdasarkan Informasi KBUMN, Program ini di *hold* untuk sementara sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut Based on KBUMN information, this program is temporarily suspended until further notice.

No	Nama Program Name of Program	Kegiatan Activity	Nomor TPB Number of SDG	Target Capaian Tahun 2022 Achievement Target in 2022	RKA Tahun 2022 (Rp) RKA 2022 (IDR)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp) Realization in 2022 (IDR)	Realisasi Capaian Tahun 2022 (Rp) Realization of Achievement in 2022 (IDR)	Keterangan Description
4	Pelatihan Purna Bhakti *Stakeholder* TNI/Polri Retirement Training for TNI/Polri Stakeholders	Bantuan Pelatihan yang diberikan kepada *Stakeholder* TNI/Polri dalam rangka masa persiapan pensiun Training assistance to TNI/Polri Stakeholders in preparation for retirement	4 (Pendidikan Berkualitas) 4 (Quality Education)	100% dari anggaran 100% of Budget			100,00%	
5	Program Sehat dan Sejahtera *Stakeholder* TNI/Polri Healthy and Prosperous Program for TNI/Polri Stakeholders	Bantuan untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan *Stakeholders*TNI/Polri Assistance to improve the health and welfare of StakeholdersTNI/Polri	3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) 3 (Good health and well-being)	100% dari anggaran 100% of Budget			100,00%	
Program Lingkungan Environment Program								
6	Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Donation	Pemberian bantuan yang disalurkan kepada Masyarakat yang terdampak Bencana Alam Provision of donations distributed to communities affected by natural disasters.	11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) 11 (Sustainable Cities and Communities)	80% dari Anggaran 80% of Budget			94,75%	
7	Bantuan Sarana Ibadah Assistance for Religious Facilities	Bantuan untuk Sarana Ibadah Donations for Religious Facilities	11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) 11 (Sustainable Cities and Communities)	100% dari anggaran 100% of Budget			100,00%	
8	Pelestarian Alam Nature Preservation	Penanaman pohon untuk lahan kritis Tree planting for critical land	11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) 11 (Sustainable Cities and Communities)	100% dari anggaran 100% of Budget			100,00%	
Program Pemberdayaan UMK UMK Empowerment Program								
9	Peningkatan Kapasitas Mitra Binaan Capacity Building of Assisted Partners	Program Pendukung Pelaksanaan Pendanaan UMK UMK Funding Implementation Support Program	8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) 8 (Decent work and economic growth)	100% dari anggaran 100% of Budget			100,00%	

No	Nama Program Name of Program	Kegiatan Activity	Nomor TPB Number of SDG	Target Capaian Tahun 2022 Achievement Target in 2022	RKA Tahun 2022 (Rp) RKA 2022 (IDR)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp) Realization in 2022 (IDR)	Realisasi Capaian Tahun 2022 (Rp) Realization of Achievement in 2022 (IDR)	Keterangan Description
10	Pasar Digital UMK ASABRI Digital Market for ASABRI UMK	Bantuan yang diberikan kepada UMK untuk membantu pemasaran produk melalui digital Assistance provided to UMK to help market their products digitally.	8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) 8 (Decent work and economic growth)	80% dari anggaran 80% of Budget			100,00%	
11	Ekshibisi UMK UMK Exhibition	Program Pendukung Pelaksanaan Pendanaan UMK UMK Funding Implementation Support Program	8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) 8 (Decent work and economic growth)	80% dari anggaran 80% of Budget			100,00%	
Anggaran Non CID Non-CID Budget								
Program Sosial Social Program								
1	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Employee Training and Development	Pelatihan dan Pengembangan Karyawan dalam rangka mendorong ketersediaan SDM Profesional sebagai talenta perusahaan Employee Training and Development to encourage the availability of Professional Human	4 (Pendidikan Berkualitas) 4 (Quality Education)	50% dari anggaran 50% of Budget			49,21%	Divisi Strategi Sumber Daya Manusia Division of Human Resource Strategies

Program TJSL PUMK

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2022

Realisasi Program Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2022 sebesar atau 171,29% dari RKA TJSL 2022 yang disalurkan secara kolaborasi melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama PUMK") yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. dengan PT ASABRI (Persero), dan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran

PUMK CSR Program

Realization of Work Plan Year 2022

The realization of the UMK Funding Program sourced from the revolving fund of the UMK Funding Program in 2022 amounted to or 171.29% of the 2022 RKA CSR, which was collaboratively distributed through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, which was carried out based on the Letter of the Minister of SOEs Number S-72/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 on the Cooperation of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK Cooperation"), which was followed up with a Cooperation Agreement between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. with PT ASABRI (Persero), and Minutes of Meeting for Discussion of the

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 Nomor RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Sumber Dana Program Pendanaan UMK Tahun 2022 (Audited)

Sumber dana Program Pendanaan UMK Tahun 2022, terdiri dari saldo awal tahun 2022 ditambah penerimaan pengembalian pokok pinjaman Mitra Binaan dan jasa administrasi pinjaman serta jasa giro tahun 2022. Sumber Dana Program Pendanaan UMK s.d. 31 Desember 2022 sebesar ,-, dengan rincian sebagai berikut:

Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program for 2022 Number RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 dated December 28, 2021.

Source of Funds for UMK Funding Program in 2022 (Audited)

The source of funds for the UMK Funding Program 2022 consists of the initial balance in 2022 plus the receipt of repayment of the principal of the Assisted Partners' loans and loan administration services and current account services in 2022. Funding Sources of the UMK Funding Program up to December 31, 2022, amounted to with details as follows:

No	Uraian Details	RKA 2022 (Rp) RKA 2022 (IDR)	AUDITED 2022 (Rp) AUDITED 2022 (IDR)	AUDITED 2021 (Rp) AUDITED 2021 (IDR)
1	Saldo awal tahun Balance at the beginning of the year			
2	Penerimaan dari Perusahaan Receipt from the Company			
3	Pengembalian Pinjaman Pokok Principal Loan Refund			
4	Pengembalian Jasa pinjaman Return of loan service			
5	Pendapatan Jasa Giro Current Account Service Income			
Sumber Dana Funding Source				

Dana Tersedia dan Penggunaan Program Pendanaan UMK *(Audited)*

Available Funds and Usage of UMK Funding Program (Audited)

Uraian Details	RKA 2022 (Rp) RKA 2022 (IDR)	AUDITED 2022 (Rp) AUDITED 2022 (IDR)	AUDITED 2021 (Rp) AUDITED 2021 (IDR)
Dana tersedia Funds available			
Penggunaan Dana Use of Funds			
• Hibah Penyaluran Program Pendanaan UMK melalui Sinergi BUMN • Program Distribution through SOE Synergy			
• Penyaluran Kerja sama - BRI • Cooperation distribution - BRI			
• Biaya Adm. Bank • Adm. fee Bank			
• Beban Pajak • Tax Expenses			
• Bayar Kelebihan Angsuran • Pay excess installment			
• Pengeluaran lainnya-Pembayaran Bagian Jasa Administrasi Kolaborasi PUMK PTPN X • Other Expenses-Payment of Administrative Services Section of PUMK PTPN X Collaboration			
Saldo Akhir Tahun Year End Balance			

Pencapaian Efektivitas dan Kolektibilitas Dana PUMK

1. Tingkat Efektivitas Penyaluran Dana (Audited)

Achievement of Effectiveness and Collectibility of PUMK Funds

1. Effectiveness Level of Fund Disbursement (Audited)

Uraian Details	**AUDITED 2022 (Rp)** AUDITED 2022 (IDR)	**AUDITED 2021 (Rp)** AUDITED 2021 (IDR)
Dana Tersedia Available Funds		
Saldo Awal Dana Tersedia Beginning Balance of Available Funds		
Bagian Penyisihan Laba Yang Diterima Share of Profit Allowance Received		
Pengembalian Pokok Pinjaman Loan Principal Refund		
Pengembalian Jasa Pinjaman Return of Loan Services		
Penerimaan Jasa Giro Current Account Service Receipt		
Jumlah Dana Tersedia Total Available Funds		
Penyaluran Disbursement		
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan Disbursement of Assisted Partner Loans		
Hibah Grant		
Penyaluran PUMK Kolaborasi - BRI PUMK Collaboration - BRI		

2022	**2021**
Efektivitas / Effectiveness = Jumlah Dana yang Disalurkan / Total Funds Disbursed ÷ Jumlah Dana Tersedia / Total Funds Available	Efektivitas / Effectiveness = Jumlah Dana yang Disalurkan / Total Funds Disbursed ÷ Jumlah Dana Tersedia / Total Funds Available
= 18.583.000.000 / 19.041.942.757 X 100	= 11.195.000.000 / 13.422.309.949 X 100
= 97,59%	= 83,41%
Skor | Score = 3	Skor | Score = 1

Penyerapan % | Absorption%	**Skor | Score**
>90	3
>85 s.d 90	2
80 s.d 85	1
<80	0

Penyaluran Program Pendanaan UMK tahun 2022 sebesar R yang sepenuhnya disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tidak masuk ke dalam rekap kualitas tersebut, hal ini dikarenakan penyaluran Program Pendanaan UMK tahun 2022 disalurkan secara kolaborasi melalui kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sesuai dengan arahan

The UMK Funding Program 2022, amounting to I , fully distributed through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., was not included in the quality recap. It is because the distribution of the UMK Funding Program in 2022 was distributed collaboratively through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Based on the direction of Ministry of BUMN as stated in the

Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 Nomor RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Kementerian BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 Hal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK"), perhitungan efektivitas dan kolektibilitas penyaluran Program Pendanaan UMK dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.

Minutes of the Meeting to Discuss the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program for 2022 Number RIS-56/DSI.MBU.B/12/2021 dated December 28, 2021, and Letter from the Ministry of SOEs Number S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, on the Cooperation of the Micro and Small Business Funding Program ("PUMK Program Cooperation"), the calculation of the effectiveness and collectibility of the distribution of the UMK Funding Program is carried out by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

2. Loan Repayment Collectibility Rate

Nama Kualitas Quality Name	**Nilai Kualitas (Audited 2022)** Quality Score (Audited 2022)	**Nilai Kualitas (Audited 2021)** Quality Score (Audited 2021)	**Bobot Kolektibilitas** Collectability Weight (%)	**Total Kolektibilitas (Audited 2022)** Total Collectability (Audited 2022)	**Total Kolektibilitas (Audited 2021)** Total Kolektibilitas (Audited 2021)
Lancar Current					
Kurang Lancar Substandard					
Diragukan Doubtful					
Macet Loss					
Jumlah Total					

2022	**2021**
Efektivitas / Effectiveness = Rata-rata Tertimbang / Weighted Average ÷ Saldo Pinjaman / Loan Balance	Efektivitas / Effectiveness = Rata-rata Tertimbang / Weighted Average ÷ Loan Balance
= 27.506.279.694,50 / 34.171.170.281 X 100	= 18.597.384.158,50 / 32.459.368.862 X 100
= 80,5%	= 57,29%
Skor | Score = 3	Skor | Score = 2

Penyerapan % | Absorption%	**Skor | Score**
>90	3
>85 s.d 90	2
80 s.d 85	1
<80	0

Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, disampaikan bahwa untuk indikator Efektivitas dan Kolektibilitas pengembalian pinjaman Mitra Binaan, Kementerian BUMN memberikan Skor penuh atau 3 (Tiga) bagi seluruh BUMN yang menyelenggarakan Program PUMK pada Tahun 2022. Hal ini, berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN

Based on the Letter of the Minister of SOEs Number S-170/MBU/03/2023 dated March 21, 2023, on the Health Level Assessment on the Performance of the Micro and Small Business Funding Program for Fiscal Year 2022, it is conveyed that for indicators of Effectiveness and Collectibility of Assisted Partners' loan repayments, the Ministry of SOEs provides a full score or 3 (three) for all SOEs that carry out the PUMK Program in 2022. It is due to the process of structuring and simplifying the Regulation of the Minister of SOEs, including

termasuk penyelarasan ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang didalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN.

Untuk itu, Skor Efektivitas dan Kolektibilitas PUMK PT ASABRI (Persero) pada Tahun 2022 sebesar Skor 3 (Tiga), dengan persentase Efektivitas sebesar 97,59% dan Kolektibilitas sebesar 80,50%.

harmonizing the provisions regarding the assessment of SOE performance, which includes an assessment of the health level of SOEs.

For this reason, the PUMK Effectiveness and Collectibility Score of PT ASABRI (Persero) in 2022 was 3 (Three), with a percentage of Effectiveness of 97.59% and Collectibility of 80.50%.

Laporan Keuangan Program PUMK

Financial Report of PUMK Program

Laporan Posisi Keuangan *(Audited)*

Statement of Financial Position (Audited)

Uraian Details	RKA 2022 (Rp) 2022 RKA (IDR)	AUDITED 2022 (Rp) AUDITED 2022 (IDR)	AUDITED 2021 (Rp) AUDITED 2021 (IDR)
1	2	3	4
Aset | Assets			
Aset Lancar | Current Assets			
Kas dan setara Kas Cash and cash equivalents			
Piutang | Receivables			
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Assisted Partner Loan Receivables			
Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan Allocation of Allowance for Assisted Partner Loan Receivables			
Jumlah Aset Lancar (1) Total Current Assets (1)			
Aset Tidak Lancar | Non-current Assets			
Piutang BUMN Penyalur - BRI Receivables from BUMN Distributors - BRI			
Aset Lain lain Other Assets			
Piutang Bermasalah Outstanding Receivables			
Jumlah Aset Tidak Lancar (2) Total Non-Current Assets (2)			
Jumlah Aset (3) = (1)+ (2) Jumlah Aset (3) = (1) + (2)			
Liabilitas dan Aset Neto Liabilities and Net Assets			
Liabiltas | Liabilities			
Kelebihan Pembayaran Angsuran Excess Installment Payments			
Jumlah Liabilitas (4) Total Liabilities (4)			
Aset Neto | Net Assets			
Aset Neto Bersih Tidak Terikat Unrestricted Net Assets			
Aset Neto Bersih Terikat Restricted Net Assets			
Jumlah Aset Neto (5) Total Net Assets (5)			
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto (6) = (4) + (5) Total Liabilities and Net Assets (6) = (4) + (5)			

Laporan Posisi Keuangan Program PUMK disajikan untuk mengetahui posisi Aset dan Liabilitas dan Aset Neto yang dijalankan oleh Unit TJSL pada Program PUMK *(Audited)* periode 31 Desember 2022 dan 2021. Pada periode 31 Desember 2022, jumlah aset senilai naik atau 135,55% dibandingkan dengan jumlah aset di 31 Desember 2021.

Pada periode *(Audited)* 31 Desember 2022, jumlah Liabilitas dan Aset Neto senilai naik atau 135,55% dibandingkan dengan jumlah Liabilitas dan Aset Neto 31 Desember 2021. Faktor utama yang mempengaruhi yakni Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan tahun 2022 turun sebesar 48,99% menjadi , sebagai hasil dari dilaksanakannya restrukturisasi yang baik pada tahun 2022. Di samping itu, dana yang tersedia seluruhnya disalurkan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar .

The PUMK Program Financial Position Report is presented to determine the position of Assets and Liabilities and Net Assets carried out by the CSR Unit in the PUMK Program (Audited) for December 31, 2022 and 2021. On December 31, 2022, the total assets were increased by or 135.55% compared to the total assets on December 31, 2021.

In the period (Audited) December 31, 2022, total liabilities and net assets were increased by or 135.55% compared to total liabilities and net assets on December 31, 2021. The main influencing factor, or the Allocation of Allowance for Assisted Partners' Loan Receivables in 2022, decreased by 48.99% to minus due to the implementation of good restructuring in 2022. In addition, the available funds were entirely distributed through collaboration with PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., amounting to

Laporan Aktivitas *(Audited)* **Activity Report (Audited)**

Uraian Details	**RKA 2022 (Rp)** 2022 RKA (IDR)	**Realisasi 2022** Realization in 2022	**Audited 2022** Audited 2022	**Audited 2021** Audited 2021
1	2	3		4
Penerimaan, Pendapatan, dan Penyisihan Receipts, Income, and Appropriations				
Penerimaan Receipts				
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Profit Share Allocation from Supervising SOEs				
Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit TJSL Lain Receipt of Funds Transfer from Other CSR Units				
Jumlah Penerimaan (1) Total Receipts (1)				
Pendapatan Income				
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income				
Pendapatan Bunga/Jasa Giro Interest Income/Current Account Fee				
Pemulihan Penyisihan Penurunan nilai piutang Pinjaman Recovery of Allowance for Impairment of Loan Receivables				
Jumlah Pendapatan (2) Total Income (2)				
Penyisihan Appropriations				
Alokasi Dana BUMN SOE Fund Allocation				
Jumlah Penyisihan (3) Total Appropriations (3)				

Uraian Details	RKA 2022 (Rp) 2022 RKA (IDR)	Realisasi 2022 Realization in 2022	Audited 2022 Audited 2022	Audited 2021 Audited 2021
1	2	3		4
Jumlah Penerimaan, Pendapatan, dan Penyisihan (4) = (1) + (2) + (3) Total Receipts, Income, and Appropriations (4) = (1) + (2) + (3)				
Penyaluran, Beban, dan Pengeluaran Disbursement, Expenses, and Expenditures				
Penyaluran Disbursement				
Dana Pembinaan UMK (Hibah) UMK Development Fund (Grant)				
Jumlah Penyaluran (5) Total Disbursement (5)				
Beban dan Pengeluaran Expenses and Expenditures				
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Expenses				
Beban Penyisihan Piutang Allowance for Receivables Expense				
Beban Hibah Grant Expenses				
Beban dan Pengeluaran Lainnya Other Expenses and Charges				
Beban Pengembalian Alokasi Dana dari Perusahaan Expenses for Refund of Fund Allocation from Company				
Jumlah Beban dan Pengeluaran (6) Total Expenses and Expenditures (6)				
Jumlah Penyaluran, Beban, dan Pengeluaran (7) = (5)+ (6) Total Disbursement, Expenses, and Expenditures (7) = (5) + (6)				
Pos Luar Biasa Extraordinary Items				
Pendapatan Luar Biasa Extraordinary Income				
Jumlah Pos Luar Biasa (8) Total Extraordinary Items (8)				
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat (9) = (4) - (7) + (8) Increase/(Decrease) in Unrestricted Net Assets (9) = (4) - (7) + (8)				
Penyisihan BUMN Appropriations for SOEs				
Aset Neto Terikat Temporer - Terbebaskan Temporarily Restricted Net Assets - Exempt				
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto Terikat (10) Increase/(Decrease) Restricted Net Assets (10)				
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto (11) = (9) + 10) Increase/(Decrease) In Net Assets (11) = (9) + (10)				
Aset Neto Pada Awal Periode (12) Net Assets at The Beginning of the Period (12)				
Aset Neto Pada Akhir Periode (13) = (11) + (12) Net Assets at The End of The Period (13) = (11) + (12)				

Jumlah Pendapatan *(Audited)* pada Tahun 2022 sebesar 0 terdapat kenaikan sebesar atau 274,22% dibandingkan dengan jumlah pendapatan Tahun 2021. Pada akun Pendapatan Tahun 2022 terdiri atas jumlah Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman sebesar . Pendapatan Bunga/Jasa Giro sebesar dan Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang sebesar .

Total Revenue (Audited) in 2022 was . There was an increase of or 274.22% compared to the total revenue in 2021. The 2022 Revenue account includes the Loan Administration Service Revenue of I . Interest Income /Current Account Services was I , and Recovery of Allowance for Impairment of Receivables was .

Jumlah beban *(Audited)* pada tahun 2022 sebesar terdapat penurunan sebesar atau 30,27% dibandingkan dengan vnilai beban penyisihan piutang pinjaman sebesar .

Total expenses (Audited) in 2022 were There was a decrease of IDR1,108,549,150.00 or 30.27% compared to the total expenses in 2021 due to a decrease in the value of the allowance for loan receivables of IDR1,568,453,000.00.

Terdapat kenaikan Aset Neto Tidak Terikat *(Audited)* pada tahun 2022 sebesar atau 570% dari Tahun 2021 hal ini dikarenakan terdapat perhitungan dari pendapatan dan beban.

There was an increase in Unrestricted Net Assets (Audited) in 2022 of or 570% from 2021 due to the calculation of income and expenses.

Terdapat kenaikan aset neto *(Audited)* pada akhir periode 31 Desember 2022 sebesar yang berasal dari perhitungan laporan aktivitas.

There is an increase in net assets (Audited) at the end of the period as of December 31, 2022, of , which comes from the calculation of the activity report.

Laporan Arus Kas *(Audited)*

Cash Flow Statement (Audited)

Uraian Details	**Audited 2022** Audited 2022	**Audited 2021** Audited 2021
1	**2**	
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities		
Kas Diterima dari Cash Received from		
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Loan Refunds from Partners		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Service Income		
Pendapatan Bunga/Jasa Giro Interest Income/Current Account Fee		
Kelebihan Pembayaran Angsuran Overpayment of Installment		
Sub Jumlah Sub Total		
Kas Dikeluarkan untuk Cash Issued for		
Penyaluran Pinjaman Pendanaan UMK Disbursement of UMK Funding Loans		
Penyaluran Kerja sama - BRI BRI Cooperation Disbursement		
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Expenses		
Pembayaran Pajak Tax Payment		

Uraian Details	Audited 2022 Audited 2022	Audited 2021 Audited 2021
1	2	
Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya Payment of other expenses and expenditures		
Liabilitas Lain-lain Other Liabilities		
Pengembalian Alokasi Dana dari Perusahaan Refund of Fund Allocation from the Company		
Sub Jumlah Sub Total		
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan) untuk Aktivitas Operasi (1) Net Cash Received (Disbursed) for Operating Activities (1)		
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities		
Kas Diterima dari Cash Received from		
Penerimaan Pokok Bagi Hasil Basic revenue of profit sharing		
Sub Jumlah Sub-Total		
Kas Dikeluarkan Untuk Cash Issued for		
Pembiayaan Bagi Hasil Profit Sharing Financing		
Sub Jumlah Sub-Total		
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan) untuk Aktivitas Investasi (2) Net Cash Received (Disbursed) for Investing Activities (2)		
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities		
Kas Diterima dari Cash Received from		
Pengembalian Pelimpahan Dana PUMK ke BRI Refund of PUMK Fund to BRI		
Sub Jumlah Sub-Total		
Kas Dikeluarkan untuk Cash Issued for		
Hibah Grants		
Sub Jumlah Sub-Total		
Kas Bersih yang Diterima (Dikeluarkan) untuk Aktivitas Pendanaan (3) Net Cash Received (Disbursed) For Financing Activities (3)		
Kenaikan / (Penurunan) Bersih dalam Kas dan Setara Kas (4) = (1) + (2) + (3) Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (4) = (1) + (2) + (3)		
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode (5) Cash and Cash Equivalents at The Beginning of The Period (5)		
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode (6) = (4) + (5) Cash and Cash Equivalents at The Ending of The Period (6) = (4) + (5)		

Jumlah Kas dari Aktivitas Operasi (*Audited*) yang diterima pada tahun 2022 sebesar terdapat kenaikan sebesar atau 196,31% dibandingkan Tahun 2021 (*Audited*). Kas dari Aktivitas Operasi yang diterima pada Tahun 2022 (*Audited*) terdiri atas Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan sebesar , Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman sebesar dan Pendapatan Bunga sebesar

Total Cash from Operating Activities (Audited) received in 2022 was . There was an increase of or 196.31% compared to 2021 (Audited). Cash from Operating Activities received in 2022 (Audited) consisted of Assisted Partner Loan Refunds of , Loan Administration Service Income of , and Interest Income of .

Jumlah Kas dari Aktivitas Operasi (*Audited*) yang dikeluarkan pada tahun 2022 sebesar terdapat kenaikan sebesar atau 168,32% dibandingkan Tahun 2021. Kas dari Aktivitas Operasi yang dikeluarkan pada tahun 2022 terdiri atas Penyaluran Kerja sama-BRI sebesar , Beban Administrasi dan Umum sebesar , Pembayaran Pajak Pembayaran dan Pengeluaran Lainnya sebesar yang merupakan pembayaran bagian Jasa Admnistrasi PTPN X dan Liabilitas Lain-lain sebesar Terdapat penurunan pada Kas dan Setara Kas pada tahun 2022 (*Audited*) untuk Aktivitas Operasi sebesar 5 atau 77,40% dibandingkan Tahun 2021. Terdapat penurunan Kas dan Setara Kas (*Audited*) pada tahun 2022 sebesar atau 7,35% dibandingkan tahun 2021.

Total Cash from Operating Activities (Audited) issued in 2022 was . There was an increase of or 168.32% compared to 2021. Cash from Operating Activities incurred in 2022 consisted of Cooperation Disbursement - BRI of , Administrative and General Expenses of , Tax Payment of , Other Payments and Expenses of which is the payment of PTPN X's share of Administrative Services, and Other Liabilities of . There was a decrease in Cash and Cash Equivalents in 2022 (Audited) for Operating Activities of or 77.40% compared to 2021. There was a decrease in Cash and Cash Equivalents (Audited) in 2022 of or 7.35% compared to 2021.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Social Responsibility for the Environment

Kebijakan
Dalam rangka mendukung kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, PT ASABRI (Persero) mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk menjaga lingkungan salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/PL.05/26-AS/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penghematan Energi di Lingkungan PT ASABRI (Persero) dan bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawaran Rutin Mesin Pompa Air Bersih, *Ground Water Tank*, Bak Penampungan Air Bersih (*Torn*) dan Mesin Pompa Limbah (STP). Hal ini dilakukan secara berkelanjutan, dengan harapan dapat membawa perubahan positif pada lingkungan PT ASABRI (Persero) ataupun Masyarakat di sekitar Kantor PT ASABRI (Persero).

Policy
To support Social Responsibility activities and preserve the environment, PT ASABRI (Persero) implements several policies to protect the environment, one of which is by issuing Circular Letter Number SE/PL.05/26-AS/2021 dated October 05, 2021, on Energy Saving within PT ASABRI (Persero) and cooperating with Third Parties in the implementation of Routine Maintenance and Bidding of Clean Water Pumping Machines, Ground Water Tanks, Clean Water Storage Tubs (Torn), and Waste Pumping Machines (STP). It is done regularly to positively impact the PT ASABRI (Persero) environment or the community around the PT ASABRI (Persero) Office.

Kegiatan
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya khususnya air dan listrik serta penggunaan kertas. Karyawan dianjurkan untuk meminimalisir penggunaan energi dan kertas sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Kegiatan sederhana ini diharapkan mampu mendorong kesadaran karyawan terhadap lingkungan kemudian menerapkan hal tersebut di wilayah yang lebih besar dan memberikan pemahaman kepada karyawan akan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:

Activities
This Social Responsibility activity focuses on the efficiency and effectiveness of the use of resources, especially water, electricity, and paper. Employees are encouraged to minimize the use of energy and paper as a form of concern for preserving nature. This simple activity is expected to encourage employee awareness of the environment and then apply it to a larger area and provide employees with an understanding of the importance of effectiveness and efficiency in resource utilization. The activities carried out include the following.

Penghematan Energi
1. Penghematan Penerangan, dilakukan dengan menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya Mematikan lampu ruangan jika tidak dipergunakan dan memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
2. Penghematan alat pendingin ruangan atau *Air Conditioner* (AC) dilakukan dengan Menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari, mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional (SNI) dan mengatur waktu pengoperasian AC Central;
3. Penghematan dan pembatasan penggunaan sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik dilakukan dengan pembatasan penggunaan Sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik yang bukan untuk menunjang kegiatan kantor;

Energy Saving
1. Lighting Saving was carried out using energy-efficient lamps based on their designation, turning off room lights when not in use, and utilizing natural light (sun) during the day by opening window curtains sufficiently so that the light level is adequate to carry out work activities;
2. Saving on air conditioning (AC) is done by placing the AC compressor unit in a location that is not directly exposed to sunlight, adjusting the temperature and relative humidity according to National Standards (SNI), and regulating the operating time of the Central AC;
3. Saving and limiting the use of facilities/equipment/equipment that use electrical energy is done by limiting the use of facilities/equipment/equipment that use electrical energy that is not to support office activities;

4. Penghematan dan pembatasan energi pada hari/jam libur atapun jam lembur, salah satunya dengan pemanfataan *co-working space* di Lantai 1 (satu) Gedung Kantor Pusat:
5. Penghematan air dilakukan dengan mematikan keran air yang tidak perlu setelah selesai dipergunakan dan memberikan dukungan air mineral pada kegiatan rapat baik internal ataupun eksternal dalam bentuk sajian gelas dan pitcher (*non* kemasan).

4. Saving and limiting energy on days/hours off or overtime hours, one of which is by utilizing the co-working space on the 1st Floor (one) of the Head Office Geudng:
5. Water savings are carried out by turning off unnecessary water taps after use and providing mineral water support for internal and external meeting activities in the form of glass and pitcher (non-packaged).

Penghematan Kertas

Dalam rangka mendukung kegiatan tanggung jawab sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, Perusahaan terus berupaya untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, salah satunya penggunaan kertas. Pada periode Tahun Anggaran 2022, Perusahaan telah mengimplementasikan sejumlah langkah guna mencapai tujuan ini. Beberapa langkah tersebut meliputi:

1. Perusahaan mengimplementasikan penghematan dengan beralih menggunakan kertas standar 80 gsm untuk kebutuhan cetak dan dokumentasi. Langkah ini mengurangi penggunaan kertas yang lebih tebal dan berkontribusi pada pengurangan biaya pembelian kertas secara signifikan. Selain itu, penggunaan kertas yang lebih tipis juga berpotensi mengurangi dampak lingkungan melalui penghematan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi kertas.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan dan distribusi dokumen internal, perusahaan mengadopsi sistem berbasis digital. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pencetakan fisik, tetapi juga mempercepat alur kerja dan mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pengiriman dan arsip dokumen. Penggunaan solusi digital juga berdampak pada pengurangan konsumsi kertas dan tinta printer, mendukung tujuan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Paper Saving

To support social responsibility activities and preserve the environment, the company continues to strive to make efficient use of resources, one of which is the use of paper. In Fiscal Year 2022, the company implemented some steps to achieve this goal. Some of these steps include:

1. The Company implemented savings by switching to standard 80 gsm paper for printing and documentation needs. This step reduced the use of thicker paper and contributed to a significant reduction in paper purchasing costs. In addition, using thinner paper also has the potential to reduce environmental impact through savings in natural resources used in paper production.
2. The company adopted a digital-based system to improve efficiency in preparing and distributing internal documents. It reduces reliance on physical printing, speeds up workflow, and reduces the risk of human error in document delivery and archiving. Using digital solutions also reduces the consumption of paper and printer ink, supporting the company's goal of environmental sustainability.

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendukung kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan menjaga kelestarian lingkungan periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

The costs incurred to support Social Responsibility activities and maintain environmental sustainability for Fiscal Year 2022 are as follows.

Kegiatan Activity	**Biaya** Costs
Penggunaan Energi Listrik Electricity Energy Usage	
Penggunaan Sumber Daya Air Water Resource Usage	
Beban Penanganan Limbah Waste Handling Load	
Penggunaan Kertas Paper Usage	
Jumlah Total	

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peserta
Social Responsibility to Participants

Kebijakan
Bagi ASABRI, Peserta merupakan ujung tombak dalam mencapai kegiatan usaha yang berkelanjutan di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu, ASABRI senantiasa berkomitmen untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan Peserta terhadap ASABRI. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan yang baik kepada Peserta.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial, ASABRI melakukan berbagai kebijakan terkait tanggung jawab Perusahaan kepada Peserta dengan mengacu *Code of Conduct* tentang hubungan dengan Peserta. Agar pemberian layanan kepada seluruh Peserta dapat dilakukan secara optimal, maka ASABRI membentuk Unit Kerja Divisi Layanan yang bertugas untuk meningkatkan kualitas layanan demi mewujudkan kepuasan dan kepercayaan Peserta.

Sasaran dan Rencana Kegiatan
Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi, kepuasan, dan kepercayaan Peserta menjadi target utama yang ingin dicapai oleh ASABRI. Jika jumlah Peserta yang merasa puas atas layanan yang diberikan ASABRI semakin meningkat, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis Perusahaan. Target ini dapat tercapai apabila ASABRI mampu memenuhi kebutuhan para Peserta lebih dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kepercayaan para Peserta, ASABRI berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab terhadap Peserta melalui pemberian layanan terbaik kepada para peserta.

Program Kegiatan
Dalam rangka mendukung tata kelola Perusahaan yang baik, ASABRI senantiasa berkomitmen dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Sepanjang tahun 2022, program yang dilaksanakan ASABRI terkait tanggung jawab kepada Peserta adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan pusat pengaduan konsumen melalui fasilitas *call center* yang berada di Kantor Pusat ASABRI. *Call center* Perusahaan dikelola oleh Divisi Layanan bagian Komunikasi Pelanggan. Adapun biaya yang telah dikeluarkan selama tahun 2022 untuk mendukung hal tersebut sebesar . Rincian sebagai berikut:
   a. Pembelian *headset call center*
   b. Pengembangan IVR *call center*
   c. Tunjangan Admin Portal, *Website* dan *Call Center*

Policy
For ASABRI, participants are the spearhead in achieving sustainable business activities during increasingly competitive competition. Therefore, ASABRI is always committed to achieving participant satisfaction and trust in ASABRI. This commitment is realized through the provision of good services to participants.

In realizing the implementation of social responsibility, ASABRI conducts various policies related to the company's responsibility to participants by referring to the Code of Conduct regarding relationships with participants. To provide services to all participants optimally, ASABRI established the Service Division Work Unit to improve service quality to realize Participant satisfaction and trust.

Target and Activity Plan
As a company engaged in insurance services, participant satisfaction and trust are the main targets to be achieved by ASABRI. If the number of participants satisfied with the services provided by ASABRI increases, it will positively impact the company's business growth. This target can be achieved if ASABRI can meet the needs of participants more than expected. Therefore, to increase the satisfaction and trust of the participants, ASABRI is committed to fulfilling its responsibility by providing the best service to them.

Activity Program
To support good corporate governance, ASABRI is always committed to protecting consumers. In 2022, the programs implemented by ASABRI related to responsibilities to participants are as follows.

1. Establish a consumer complaint center through a call center facility at the ASABRI Head Office. The Service Division of the Customer Communication section manages the company's call center. The costs incurred in 2022 to support this program was . The details are as follows.
   a. Purchase of call center headset
   b. IVR call center development
   c. Portal, Website, and Call Center Admin Allowance

2. Optimalisasi Aplikasi ASABRI Mobile berbasis andrioid dan iOS dengan meningkatkan fitur/menu antrian *online*. Perusahaan juga melaksanakan sosialisasi kepada peserta tentang pemanfaatan ASABRI Mobile Apps. Adapun biaya yang dikeluarkan sebesar .
3. Peluncuran ASABRI STAR sebagai aplikasi autentikasi digital peserta dan pembangunan sistem *enrollment* peserta pensiun melalui biometrik dengan jumlah biaya sebesar .
4. Perluasan titik layanan dengan metode *office chanelling* melalui ASABRI Link, telah tersedia di 1.806 titik layanan di mitra bayar dan tidak ada biaya yang dikeluarkan.
5. Sinergi Bersama Taspen untuk layanan bersama melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang telah terlaksana di 11 titik layanan yaitu Tasikmalaya, Badung, Pati, Purworejo, Epicentrum Jakarta, Tuban, Banjarbaru, Tebing Tinggi, Maros, Banyuwangi dan Bogor dengan jumlah biaya sebesar

2. Optimization of the ASABRI Mobile Apps application based on Android and iOS by improving the online queue features/menus. The company also conducted socialization to participants about the use of ASABRI Mobile Apps. The costs incurred were

3. The launch of ASABRI STAR as a participant digital authentication application and the development of a pension participant enrollment system through biometrics with a total cost of .
4. Expansion of service points with the office channeling method through ASABRI Link has been available at 1,806 service points at paying partners, and no costs have been incurred.
5. Synergy with Taspen for joint services through the Public Service Mall (MPP), which has been implemented at 11 service points, including Tasikmalaya, Badung, Pati, Purworejo, Epicentrum Jakarta, Tuban, Banjarbaru, Tebing Tinggi, Maros, Banyuwangi and Bogor with a total cost of 0.

Penanganan Keluhan Peserta

Untuk memberikan layanan terbaik kepada Peserta, ASABRI senantiasa memperhatikan setiap keluhan Peserta. Penyampaian keluhan Peserta dilakukan melalui berbagai media yang tersedia, yaitu sebagai berikut:

Handling Participant Complaints

To provide the best service to Participants, ASABRI always pays attention to every participant's complaint. Submission of participant complaints is carried out through various available media, as follows.

Jenis Media Type of Media	**Keterangan** Description
Facebook	PT Asabri-Persero
Twitter	asabri_official
Instagram	asabri_official
YouTube	Asabri Official
E-mail	asabri@asabri.co.id
Call center	1500043
WA asuransi (di luar jam kerja) WA for insurance (out of office hours)	081282371518
WA pensiun (di luar jam kerja) WA for pension (out of office hours)	081282371519
WA perawatan JKK WA for Work Accident Insurance treatment	08111622133

Setiap tahunnya, ASABRI melakukan survei kepuasan Peserta guna mengetahui tingkat kepuasan dan tingkat keterikatan Peserta atas layanan yang diberikan oleh ASABRI. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan *feedback* atas unsur-unsur layanan yang masih harus ditingkatkan atau dilakukan perbaikan.

Every year, ASABRI conducts a participant satisfaction survey to determine the satisfaction level and the attachment level to the services provided by ASABRI. It aims to get feedback on service elements that still have to be improved or made improvements.

Tabel Tingkat Kepuasan Peserta
Table of Participant Satisfaction Level

Tahun Years	Tingkat Kepuasan Satisfaction Level	Klasifikasi Classification	Tingkat Keterikatan Attachment Level	Klasifikasi Classification
2022	91,23%	Sangat Puas Very Satisfied	91,94%	Sangat Puas Very Satisfied
2021	91,50%	Sangat Puas Very Satisfied	90,25%	Sangat Puas Very Satisfied
2020	89,57%	Sangat Puas Very Satisfied	89,63%	Sangat Puas Very Satisfied
2019	87,88%	-	90,77%	-

Perseroan melakukan Survei Peserta yang bertujuan untuk:
1. Mengetahui/mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan;
2. Mengetahui/mengukur tingkat ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan;
3. Mengetahui/mengukur tingkat keterikatan (*engagement*) pelanggan terhadap layanan perusahaan;
4. Mendapatkan *feedback* (masukan) dari pelanggan atas unsur-unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan/ dilakukan perbaikan sebagai bagian dari tindak lanjut yang berkelanjutan (*continuous improvement*);
5. Mendapatkan referensi atau acuan dalam menyusun program kerja ke depan.

Informasi Keluhan

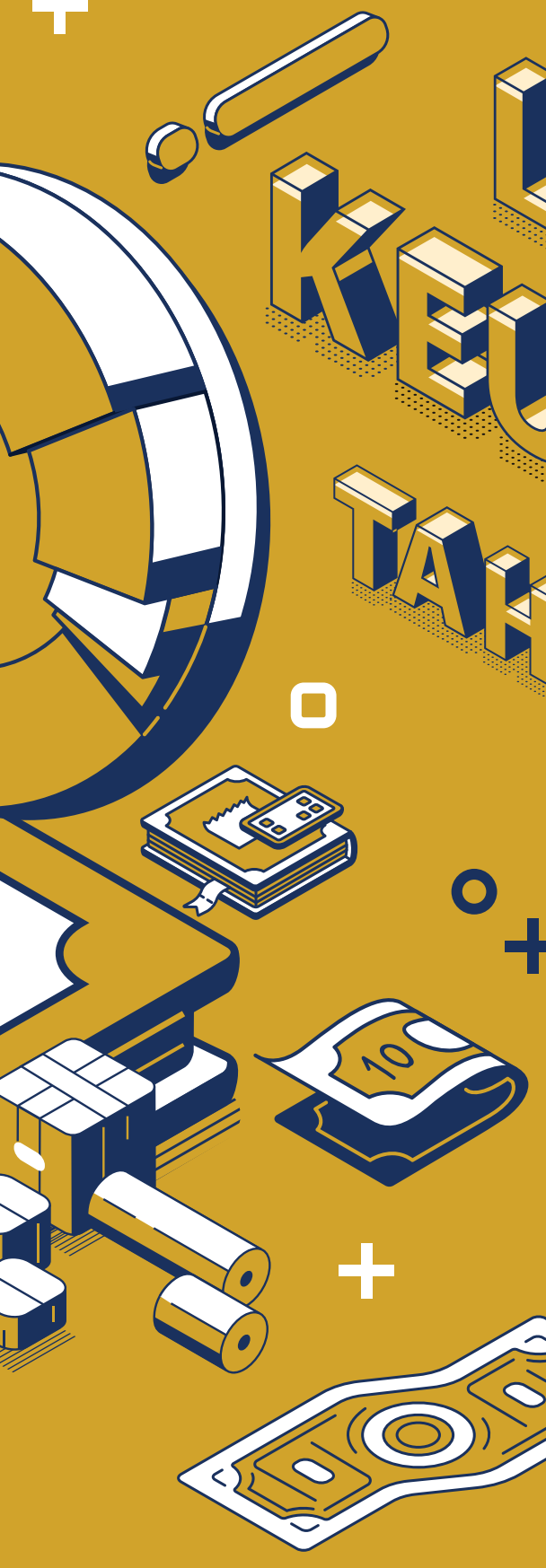
Selama tahun 2022, sebanyak 20 komplain Peserta telah masuk dan ditindaklanjuti oleh PT ASABRI (Persero). Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14% dari jumlah keluhan pada 2021 sebanyak 15 komplain. Dari total keluhan peserta di tahun 2022 disampaikan melalui layanan *Call Center* 1500043. Komplain yang telah disampaikan oleh Peserta menjadi masukan bagi ASABRI sehingga ASABRI mampu memberikan layanan terbaik.

The company conducted a Participant Survey which aims to:
1. Know/measure the level of customer satisfaction with the company's services;
2. Identify/measure the level of customer dissatisfaction with the company's services;
3. Know/measure the level of customer engagement with the company's services;
4. Obtain feedback (input) from customers on service elements that still need to be improved/made improvements as part of continuous improvement;
5. Obtain references or references in preparing future work programs.

Complaint Information

In 2022, 20 Participant complaints have been received and followed up by PT ASABRI (Persero). This number increased by 14% from the number of complaints in 2021, which was 15. The complaints in 2022 were submitted through the 1500043 Call Center service. These complaints become the input for ASABRI so that ASABRI can provide the best service.


08



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

2022 Financial Report

PT ASABRI (PERSERO)

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
Dan Laporan Auditor Independen

PT ASABRI (PERSERO)

Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
And Independent Auditors' Report

Daftar Isi **Halaman/ *Page*** ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		***Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	3	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	4	*Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	5	*Notes to the Financial Statements*

PT ASABRI (PERSERO)
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Wahyu Suparyono
Alamat Kantor	:	Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta, 13630
Jabatan	:	Direktur Utama
Nama	:	Helmi I. Satriyono
Alamat Kantor	:	Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta, 13630
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT ASABRI (Persero);

2. Laporan keuangan PT ASABRI (Persero) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

   a. Unsur-unsur laporan keuangan selain Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan ("LMPMD") dan pengukuran Piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu ("Piutang *PSL*") program Tabungan Hari Tua ("THT") adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

   b. LMPMD program THT sesuai dengan PMK 66/2021 dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;

   c. Piutang *PSL* program THT sesuai dengan PMK 66/2021 yang diukur berdasarkan nilai sisa tagihan.

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT ASABRI (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan PT ASABRI (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

PT ASABRI (PERSERO)
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

We the undersigned:

Name	:	*Wahyu Suparyono*
Office Address	:	*Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11* *Jakarta, 13630*
Title	:	*President Director*
Name	:	*Helmi I. Satriyono*
Office Address	:	*Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11* *Jakarta, 13630*
Title	:	*Finance and Risk Management Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT ASABRI (Persero);*

2. *The financial statements of PT ASABRI (Persero) for the year ended December 31, 2022 are prepared and presented in accordance with the fair presentation financial reporting framework with the specific objective of meeting the provisions of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Concerning the Procedures for Managing Contribution and Reporting on the Implementation of Civil Servant's Old Age, Saving Program, and Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police, as follows:*

   a. *The elements of the financial statements other than the Liabilities for Future Policy Benefits ("LMPMD") and Premium Receivables for Past Service Liability ("PSL Receivables") of Old Age Savings ("THT") program are in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;*

   b. *LMPMD THT program is in accordance with PMK 66/2021 which using the calculation method and assumptions approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia;*

   c. *PSL receivable THT program is in accordance with PMK 66/2021 which is measure based on the unearned value of receivable.*

3. a. *All information in the financial statements of PT ASABRI (Persero) have been fully and correctly disclosed;*

   b. *The financial statements of PT ASABRI (Persero) do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT ASABRI (Persero).

4. *We are responsible for internal control system of PT ASABRI (Persero).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/*February* 2023

Atas nama dan mewakili Perseroan/*For and on behalf of the Company,*

ASABRI
DIREKSI

METERAI TEMPEL
10000
9A88AAKX343372317

WAHYU SUPARYONO
Direktur Utama/
President Director

HELMI I. SATRIYONO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00196/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/II/2023

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT ASABRI (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ASABRI (Persero) ("Perseroan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan dasar penyusunan laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ASABRI (Persero) tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan sebagaimana dijabarkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir.

Basis untuk opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT ASABRI (Persero) ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The financial statements are prepared using the basis of measurement as stated in Note 2b of the accompanying financial statements.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position ofPT ASABRI (Persero) as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the basis for preparation of the financial statements as described in Note 2b of the accompanying financial statements.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Penekanan Suatu Hal - Basis Akuntansi dan Pembatasan Penggunaan

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir, yang menjelaskan tentang dasar penyusunan laporan keuangan Perseroan yang disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, laporan keuangan terlampir belum tentu cocok untuk tujuan lain. Laporan kami ditujukan hanya untuk digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan meskipun dapat didistribusikan kepada pihak lain selain yang telah disebutkan di atas, laporan kami belum tentu cocok untuk digunakan oleh pihak lain tersebut. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut

Emphasis of Matter - Basis of Accounting and Limitation of Use

As disclosed in Note 2b of the accompanying financial statements, which describe the basis for preparation of the financial statements which are prepared to comply with the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Concerning the Procedures for Managing Contribution and Reporting on the Implementation of Civil Servant's Old Age Saving Program, Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police. As a result, the accompanying financial statements are not necessarily suitable for other purposes. Our report is intended only for the use of the Government of the Republic of Indonesia, the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, the Ministry of Stated-Owned Enterprise of Republic Indonesia, Indonesia National Armed, the Indonesian National Police, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of the Republic of Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia, Shareholders, Board of Commissioners and Directors of the Company, and although it can be distributed to parties other than the above mentioned parties, our report is not necessarily suitable for the use of these other parties. Our opinion is not modified with respect to these matter

Hal-hal Lain

Kami membawa perhatian ke Catatan 39 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Perseroan pada beberapa perusahaan dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, proses pemeriksaan tipikor masih berlangsung. Dampak dari proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Perseroan belum dapat diperkirakan. Kerugian finansial dan non-finansial Perseroan masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Other matters

We draw attention to Note 39 to the accompanying financial statements which explains the legal case of alleged corruption in the management of the Company's financial and investment funds in several companies in the period of 2012 to 2019. Until the completion date of financial statements, the corruption case investigation process is still ongoing. The impact of the legal process of alleged corruption in the management of Company's financial management and investment funds has yet to be estimated. Financial and non-financial lossess for the Company are still waiting for a final and binding decision (inkracht van gewijsde).

Sebagai pengelola program akumulasi iuran pensiun, PT ASABRI (Persero) telah menyusun laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun ("laporan keuangan AIP") prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terpisah pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdiri dari laporan dana bersih, perubahan dana bersih dan arus kas. Laporan keuangan AIP tersebut disusun sesuai

As an accumulated of pension contribution program manager, PT ASABRI (Persero) has prepared a separately of financial statements of Accumulated of Pension Contributions' financial statements ("AIP' financial statements") of TNI forces, members of Polri, and ASN officer in the Ministry of Defense and the Indonesia National Police as of December 31, 2022 and for the year then ended consist of statement of net funds, changes of net funds, and cash flows. AIP financial statements have been prepared in accordance with accounting policies that

dengan kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait laporan keuangan AIP yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami telah mengaudit atas laporan keuangan AIP tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00187/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/II/2023 pada tanggal 28 Februari 2023 dengan opini bahwa laporan keuangan AIP tahun 2022 tersebut telah sesuai basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk tujuan penyajian dalam laporan keuangan terlampir, beberapa pos investasi AIP telah diukur kembali nilai wajarnya agar sesuai dengan basis pengukuran yang digunakan PT ASABRI (Persero).

are based on Minister of Finance Regulations on the AIP' financial statements which represents the comprehensive basis of accounting other than Financial Accounting Standards in Indonesia. We have audited AIP's financial statements as of December 31, 2022 and for the year then ended and have issued independent auditor's report No. 00187/2.1030/AU.6/08/1698-1/1/II/2023 on February 28, 2023 for an opinion that the 2022 AIP' financial statements were prepared in accordance with the comprehensive basis of accounting other than Financial Accounting Standards in Indonesia. For the purposes of the presentation in the accompanying financial statements, some of AIP's investment account have been remeasured at fair value in accordance with the basis of measurement used by PT ASABRI (Persero)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perseroan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perseroan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perseroan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Chairul Wismoyo
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1698/
Public Accountant License Number: AP.1698

Jakarta, 28 Februari/ *February 28,* 2023

00196

PT ASABRI (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASABRI (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022 and 2021
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022 Rp	2021 Rp	
ASET				***ASSETS***
Kas dan bank				*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Efek-efek				*Marketable securities*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Properti investasi				*Investment properties*
Aset tetap dan aset hak-guna - bersih				*Fixed assets and right-of-used assets - net*
Aset takberwujud				*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan - bersih				*Deferred tax assets - net*
Akumulasi iuran pensiun				*Accumulation of pension contribution*
Aset pembayaran pensiun				*Pension payment assets*
Aset lain-lain				*Other assets*
JUMLAH ASET				***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Akrual dan utang lain-lain				*Accrued expenses and other payables*
Utang investasi				*Investment payables*
Utang pajak				*Taxes payables*
Pendapatan diterima di muka				*Deferred income*
Liabilitas imbalan kerja				*Employee benefit liabilities*
Akumulasi iuran pensiun				*Accumulation of pension contribution*
Liabilitas pembayaran pensiun				*Pension payment liabilities*
Liabilitas kepada pemegang polis:				*Liabilities to policyholders:*
Liabilitas manfaat polis masa depan				*Liabilities for future policy benefits*
Estimasi liabilitas klaim				*Estimated claim liabilities*
Utang klaim				*Claim payables*
Jumlah liabilitas kepada pemegang polis				*Total liabilities to policyholders*
JUMLAH LIABILITAS				***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham - modal dasar 500.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 200.000 lembar saham				*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share - authorised 500,000 shares, issued and fully paid 200,000 share*
Saldo laba yang telah dicadangkan:				*Appropriated retained earnings:*
- Telah ditentukan penggunaannya				*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya				*Unappropriated -*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek tersedia untuk dijual - setelah pajak				*Unrealized loss on available-for-sale marketable securities - net*
Surplus revaluasi aset				*Assets revaluation surplus*
JUMLAH EKUITAS				***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS				***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT ASABRI (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASABRI (PERSERO)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2022 and 2021
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022 Rp	2021 Rp	
PENDAPATAN				***INCOME***
Pendapatan premi				*Premium income*
Hasil investasi - bersih:				*Investment income - net:*
Program THT, JKK, JKm				*THT, JKK, JKm Program*
Program akumulasi iuran pensiun				*Accumulation of pension program*
Pendapatan lain-lain - bersih				*Other income - net*
JUMLAH PENDAPATAN				***TOTAL INCOME***
Pengembalian hasil investasi iuran pensiun				***Return on investment income of pension***
JUMLAH PENDAPATAN BERSIH				***TOTAL INCOME NET***
BEBAN				***EXPENSES***
Klaim dan manfaat				*Claims and benefits*
Penurunan (kenaikan) liabilitas manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim				*Decrease (increase) in liabilities for future policy benefits and estimated claim liabilities*
Penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun				*Reimbursement of pension operation cost*
Beban umum dan administrasi				*General and administrative expenses*
JUMLAH BEBAN				***TOTAL EXPENSES***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak kini				*Income tax expense*
Manfaat pajak tangguhan				*Deferred tax benefit*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN				***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:*
Keuntungan (kerugian) revaluasi aset tetap				*Gain (loss) on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja				*Remeasurements of post employment benefit*
Efek pajak terkait				*Related tax effect*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual				*Unrealised loss on available-for-sale marketable securities*
Efek pajak terkait				*Related tax effect*
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak				*Other comprehensive income for the year, net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT ASABRI (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASABRI (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital* Rp	Saldo laba (defisit) / *Retained earnings (deficit)*		Surplus revaluasi aset/ *Assets revaluation surplus* Rp	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual/ *Unrealised gain (loss) on available for sale marketable securities* Rp	Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
		Yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Yang telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020							***Balance as of December 31, 2020***
Laba bersih tahun berjalan							*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:							*Other comprehensive income:*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual							*Unrealised loss on available-for-sale marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja							*Remeasurement of post employment benefit*
Kerugian revaluasi aset tetap							*Loss on revaluation of fixed assets*
Efek pajak terkait							*Related tax effect*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021							***Balance as of December 31, 2021***
Penyesuaian tahun berjalan							*Current year adjustment*
Laba bersih tahun berjalan							*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:							*Other comprehensive income:*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual							*Unrealised loss on available-for-sale marketable securities*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja							*Remeasurement of post employment benefit*
Keuntungan revaluasi aset tetap							*Gain on revaluation of fixed assets*
Efek pajak terkait							*Related tax effect*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022							***Balance as of December 31, 2022***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT ASABRI (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ASABRI (PERSERO)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022 Rp	2021 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan premi			*Proceeds from premium*
Pembayaran klaim			*Payment of claim*
Pembayaran beban usaha			*Payment of operating expense*
Pembayaran pajak			*Payment of tax*
Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP)			*Operational Cost Reimbursement Pension Administration (BOP)*
Pendapatan *flagging*			*Flagging income*
Pendapatan pinjaman polis			*Proceeds from policy loans*
Penerimaan imbalan jasa AIP			*Proceeds from AIP*
Lain-lain			*Others*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi			*Net cash flows provided from (used in) operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan hasil investasi			*Investment income*
Penempatan investasi - bersih			*Placement of investments-net*
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud			*Purhcase of fixed assets and intangible assets*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi			*Net cash flows provided from (used in) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa			*Payment of lease liabilities*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan			*Net cash flows used in financing activities*
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK			***NET DECREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN			***CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

1. Informasi Umum

PT ASABRI (Persero) (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1971 tanggal 31 Juli 1971. Pada tahun 1991, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, status Perseroan berubah dari PERUM menjadi Perseroan (PERSERO). Perubahan ini telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88. Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan Akta Notaris Muhani Salim, S.H., No. 201 tanggal 30 Desember 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6500-HT.01.01.Th.93 tertanggal 24 Juli 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sesuai dengan Akta Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-74528.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2008 No. 97, Tambahan Nomor 26153/2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., No. 77 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Persero) PT ASABRI. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0056161 tanggal 19 September 2022.

Perseroan diberi tugas oleh Pemerintah Indonesia untuk bergerak dalam bidang usaha asuransi sosial prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perseroan

1. General Information

PT ASABRI (Persero) (hereinafter "the Company") was established by the Indonesian Government Regulation No. 45 of 1971 dated 31 July 1971. In 1991, in accordance with the Indonesian Government Regulation No. 68 of 1991 dated 17 December 1991 the status the Public Company (PERUM) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia was changed into a Limited Liability Company (PERSERO). This change was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 88. The Company's Article of Association was amended based on the Notarial Deed of Muhani Salim, S.H., No. 201, dated 30 December, 1992 and was approved by the decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-6500-HT.01.01.Th.93 dated 24 July 1993.

The Company's Articles of Association have been amended to comply with Limited Liabilities Companies Law Number 40 Year 2007 with the Notarial Deed No.16 year 2008 dated 27 August 2008, made before Muhani Salim S.H., M.Hum., M.Kn, Notary in Jakarta. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia trough its decision letter No.AHU-74528.AH.01.02 year 2008 dated October 16, 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 97, Supplement No. 26153/2008 dated December 2, 2008.

The Company's Article of Association have been amended several times including the amendment of the Company's Article of Association. The last amendment was made based on Deed of Notary Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., No. 77 dated August 29, 2022 concerning Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (Persero) PT ASABRI. This deed was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.09-0056161 dated September 19, 2022.

The Company was assigned by the Government of the Republic of Indonesia to engage in social insurance business for Indonesian National Army (TNI), members of the Indonesian National Police (POLRI) and Civil Government Officer (ASN) of Administrative State in the Minister of Defence and the Indonesian National Police. The Company held a social insurance program,

menyelenggarakan program asuransi sosial yang meliputi:
1) Tabungan Hari Tua (THT)
2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3) Jaminan Kematian (JKm)
4) Pensiun:
   - Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP)
   - Pembayaran Pensiun

which includes:

1) Tabungan Hari Tua (THT)
2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
3) Jaminan Kematian (JKm)
4) Pension:
   - *Managing Accumulation of Pension Contribution (AIP)*
   - *Pension Payment*

Perseroan berdomisili di Jakarta. Kantor Pusat Perseroan terletak di Jl. Mayjen Soetoyo No. 11 Jakarta, 13630 dan memiliki 1 kantor cabang utama, dan 32 kantor cabang di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan memiliki 498 dan 500 karyawan (tidak diaudit).

The Company is domiciled in Jakarta. The Company's head office is located in Jl. Mayjen Soetoyo No. 11 Jakarta, 13630 and has 1 main branch office and 32 branch offices in Indonesia. The Company has 498 and 500 employees as at December 31, 2022 and 2021 (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021 the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company are as follows:

	2022	2021	
Dewan Komisaris:			***Board of Commissioners:***
Komisaris Utama	Fary Djemy Francis	Fary Djemy Francis	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama	Budi Prijono*	Ida Bagus Purwalaksana	*Vice President Commissioner*
Komisaris Independen	I Nengah Putra Winata	I Nengah Putra Winata	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ari Dono Sukmanto	Ari Dono Sukmanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Rofyanto Kurniawan	Rofyanto Kurniawan	*Commissioner*
Dewan Direksi:			***Board of Directors:***
Direktur Utama	Wahyu Suparyono	Wahyu Suparyono	*President Director*
Direktur SDM dan Hukum	Sri Ainin Muktirizka	Sri Ainin Muktirizka	*HR and Legal Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Helmi I. Satriyono	Helmi I. Satriyono	*Finance and Risk Management Director*
Direktur Investasi	Jeffry Haryadi P. Manullang	Jeffry Haryadi P. Manullang	*Investment Director*
Direktur Hubungan Kelembagaan	Khaidir Abdurrahman	-	*Institutional Relations Director*

*) Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**) In the process of fit and proper test by Financial Service Authority (OJK)*

2. Kebijakan Akuntansi yang Signifikan / *2. Significant Accounting Policies*

a. Pernyataan Kepatuhan / *a. Statement of Compliance*

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang dijelaskan pada Catatan 2b di bawah ini.

The Company's financial statements as of December 31, 2022 and for the year ended on that date have been prepared and presented in accordance with the basis for preparation of the financial statements as described in Note 2b below.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The Company's financial statements as of December 31, 2021 and for the year ended on that date have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Accountants Association (IAI).

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan 2022 dan 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar bertujuan khusus untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur laporan keuangan selain Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan ("LMPMD") dan pengukuran piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu ("PSL") program Tabungan Hari Tua ("THT") adalah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Berdasarkan PMK 66/2021 tersebut, Perseroan menghitung LMPMD Program THT dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; dan pengukuran piutang Iuran atas Kewajiban Masa Lalu ("PSL") program Tabungan Hari Tua ("THT") dicatat berdasarkan nilai sisa tagihan.

   Perseroan menghitung LMPMD program THT pada tahun 2022 dan 2021 menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 dan Nomor S-8/MK.02/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai suatu Perseroan Terbatas, Perseroan berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada di atas, Perseroan menyusun laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut hanya sesuai

b. Basis of measurement and preparation of the financial statements

The 2022 and 2021 financial statements are prepared and presented in accordance with the fair presentation financial reporting framework with the specific objective of meeting the provisions of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Concerning the Procedures for Managing Contribution and Reporting on the Implementation of Civil Servant's Old Age Saving Program, Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police, as follows:

1. The elements of the financial statements other than the Liabilities for Future Policy Benefits ("LMPMD") and the measurement of premium receivables for Past Service Liability ("PSL") of Old Age Savings ("THT") program are in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

2. Based on PMK 66/2021, the Company calculates the THT Program LMPMD using the calculation method and assumptions approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia; and the measurement of premium receivables for Past Service Liability ("PSL") of Old Age Savings ("THT") program are recorded based on the residual value of the invoice.

   The company calculates the LMPMD of the THT program in 2022 and 2021 using the calculation method and assumptions approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through Letter Number S-49/MK.02/2022 dated January 30, 2022 and Number S-8/MK.02/2022 dated January 3, 2022.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, as a Limited Liability Company, the Company is obliged to prepare financial reports in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. As explained above, Company prepared the financial statements as of December 31, 2022 dan 2021 and for the years ended on that date only in accordance with the basis for preparing

dengan dasar penyusunan laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2b di atas.

the financial statements as described in Note 2b above.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas termasuk kas dan kas di bank.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and cash in banks.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Company.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendment and improvements to standards which became effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the above standards has no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

d. Instrumen keuangan

d. Financial instruments

i. Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; pinjaman yang diberikan dan piutang; aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo; dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories of financial assets measured at fair value through profit or loss; loans and receivables; held-to-maturity financial assets; and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

<u>*Financial assets measured at fair value through profit or loss*</u>

This category comprises of two sub-categories: financial assets classified as held for trading, and financial assets sdesignated by the Company as at fair value measured through profit or loss upon initial recognition.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat sebagai hasil investasi.

Financial instruments included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are taken directly to the profit or loss. Gains or losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in the profit or loss and are reported as investment income.

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang diperdagangkan termasuk di dalam hasil investasi. Pendapatan/(kerugian) investasi diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan/ (kerugian) selisih kurs atas investasi dilaporkan sebagai hasil investasi.

Interest income on financial instruments held for trading are included in investment income. Investment income/ (loss) is recognised on an accrual basis. Foreign exchange gains/(losses) on investments are reported in investment income.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; and*
- *those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration.*

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. In case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables and recognised in the profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Pendapatan bunga atas aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang termasuk di dalam hasil investasi. Pendapatan bunga diakui dengan basis akrual. Keuntungan/ (kerugian) selisih kurs dicatat dalam hasil investasi.

Interest income on financial assets classified as loans and receivables are included in investment income. Interest income is recognised on an accrual basis. Foreign exchange gains/(losses) in investments are recorded in investment income.

Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi sebagai hasil investasi.

Pengakuan
Perseroan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)
Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Available-for-sale financial assets
Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, foreign exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value measured through profit or loss.

Available-for-sale financial asset are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised as other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss. Interest income is calculated using the effective interest method, and foreign currency gains or losses on monetary assets which classified as available-for-sale are recorded in profit or loss as investment income.

Recognition
The Company uses trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest rate.

ii. Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Financial liabilities

The Company classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised costs.

Financial liabilities measured at amortised costs

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Company measures all financial liabilities measured at amortised cost using effective interest rate method.

iii. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

iii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

iv. Klasifikasi instrumen keuangan

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

iv. Classification financial instruments

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and takes into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/*Category as defined by PSAK 55 (Revised 2014)*		**Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/*Classes (as determined by the Compay)***	**Sub-Golongan/*Sub-classes***
Aset keuangan/*Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi/*Financial assets measured at fair value through profit or loss*	Efek-efek/*Marketable securities*	Saham/*Shares*
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Kas dan bank/*Cash on hands and in banks*	
		Deposito berjangka/*Time deposits*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	
		Aset lain-lain/*Other assets*	
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/*Financial assets available for sale*	Efek-efek/*Marketable securities*	Reksa dana/*Mutual Funds*
			Obligasi/*Bonds*
	Dimiliki hingga jatuh tempo/*Held to maturity*	Efek-efek/*Marketable securities*	Obligasi/*Bonds*
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities measured at amortised cost*	Akrual dan utang lain-lain/*Accrued expenses and other payables*	
		Utang investasi/*Investment payables*	

v. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak ketiga.

v. Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

vi. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

vi. Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated.

vii. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antar pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari *Interdealer Market Association* ("IDMA"), *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), atau harga kuotasi broker untuk obligasi, harga saham dari indeks harga saham yang ada Bursa Efek Indonesia untuk saham, dan nilai aset bersih untuk reksadana.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

vii. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at the date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

Fair value of financial instruments traded in active *markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date. This includes IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices, IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price, or broker's quoted price for bonds, shares price from share prices indexes on Indonesia Stock Exchange for shares, and net asset value for mutual funds.*

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry company, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications of an inactive market are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bidoffer spread and there are few recent transactions.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net assets based of the financial instruments.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan *input* yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value is estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the statement of financial position.

Investasi dalam reksadana dinyatakan pada nilai pasar berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki Perseroan adalah harga penawaran (*bid price*).

Investment in mutual funds is stated at market value in accordance *with the net asset value at the statement of financial position date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the bid price.*

e. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

e. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at statement of financial position date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing adalah Rp15.731 dan Rp14.269 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (“Dolar AS”).

As of December 31, 2022 and 2021, the exchange rate used are the Bank Indonesia middle rate of Rp15,731 and Rp14,269 respectively, for 1 United States Dollar (“USD”).

f. Kontrak asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi yang signifikan adalah kemungkinan untuk membayar manfaat yang signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

Perseroan mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan Perseroan menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian di masa depan tertentu yang tidak pasti berdampak pada pemegang polis. Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian diamendemen.

Produk-produk dari Perseroan dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

f. Insurance contract

Insurance contract is contract issued by insurance company which accepts significant insurance risk from policyholder upon the issuance of the policy.

Significant insurance risk is the possibility of paying significantly more benefit to the policyholder upon the occurrence of insured event compared to the minimum benefit payable in a scenario where the insured event does not occur. Scenarios considered are those with commercial substance.

The Company defines significant insurance risk as the possibility of the Company agrees to compensate policy holders of the contract for the specified uncertain future events that adversely affect the policyholder. Once a contract has been classified as an insurance contract, no reclassification is subsequently performed unless the terms of the agreement are later amended.

The Company's products are divided into the following main categories:

Tipe polis/ ***Policy type***	**Deskripsi manfaat/** ***Description of benefit***
Produk tradisional/ *Traditional products*	Produk tradisional adalah produk yang memberikan perlindungan untuk menutupi risiko kematian, kecelakaan dan cacat tubuh dari pemegang polis. Jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada saat terjadinya risiko yang ditanggung./*Traditional product is a product which provide protection to cover the risk of death, accident, and disability of the insured. The basic sum assured will be paid upon the occurence of the risks covered.*

Pengujian kecukupan liabilitas

Pengujian kecukupan liabilitas dilakukan pada tanggal pelaporan untuk setiap kontrak asuransi ditentukan sesuai dengan cara Perseroan memperoleh, memelihara, dan mengukur profitabilitas dari kontrak asuransi tersebut.

Liability adequacy tests

Liability adequaty testing is performed at reporting date for every insurance contract, determined in accordance with the Company's manner of acquiring, maintaning, and measuring the profitability of its insurance contract.

Perseroan menilai liabilitas asuransi pada setiap akhir periode pelaporan untuk meyakinkan apakah liabilitas asuransi yang dicatat cukup untuk menutup kerugian yang diperkirakan pada akhir periode pelaporan, dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi. Jika penilaian tersebut menunjukan kekurangan antara nilai tercatat liabilitas asuransi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut dicatat dalam laporan laba rugi. Pada tanggal pelaporan, keseluruhan jumlah aset dan kewajiban asuransi yang dicatat telah diestimasi dan manajemen meyakini bahwa jumlah tersebut telah memadai.

The Company measures the insurance liabilities at the end of reporting period to ensure whether the insurance liabilities recorded is sufficient to cover expected losses at the end of the reporting period, by using present value of future cash flow based on insurance contracts. If the valuation shows deficiency between insurance liabilities recorded with estimation of future cash flow, the deficiency will be recorded to statement of income. As at reporting date, all insurance assets and liabilities have been estimated and management believes that the amount recorded is adequate.

Pengakuan pendapatan premi

Pendapatan premi dan iuran merupakan pendapatan yang berasal dari iuran peserta yang disetorkan ke Perseroan setiap bulannya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Premium income recognition

Premium and contribution income represents revenue from participants deposited each month to the Company by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Manfaat program

1. Tabungan Hari Tua (THT)
   Iuran program THT terdiri atas:
   a. Iuran Peserta sebesar 3,25% dari penghasilan setiap bulan.
   b. Iuran Pemberi Kerja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   Iuran JKK ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,62% dari gaji pokok peserta setiap bulan.

3. Jaminan Kematian (JKm)
   Iuran JKm ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,81% dari gaji pokok peserta setiap bulan.

Benefits program

1. *Tabungan Hari Tua (THT)*
   Contribution THT program consists of:
   a. Participants Contribution amounting to 3.25% of monthly salary.
   b. Employer Contribution will be governed by a separate Government Regulation.

2. *Jaminan Kecelakaan (JKK)*
   JKK's contribution borne by the employer amounting to 0.62% of the participants' monthly basic salary.

3. *Jaminan Kematian (JKm)*
   JKm's contribution borne by the employer amounting to 0.81% of the participants' monthly basic salary.

Klaim dan manfaat

Beban klaim dan manfaat terdiri dari klaim yang telah diselesaikan, klaim dalam proses penyelesaian, dan estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (“IBNR”). Klaim dan manfaat diakui sebagai beban pada saat terjadinya liabilitas untuk memberikan proteksi.

Claims and benefits

Claims and benefits consist of settled claims, claims that are still in process of completion, and estimated of claims incurred but not yet reported (“IBNR”). Claims and benefits are recognised as expenses when the liabilities to cover claims are incurred.

Total klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan, dinyatakan berdasarkan estimasi menggunakan teknik perhitungan teknis oleh aktuaris. Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim, sebagai hasil dari evaluasi lebih lanjut dan perbedaan antara estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai biaya tambahan atau pengurang biaya pada periode terjadinya perubahan.

Total claims in process, including claims incurred but not yet reported, are stated at estimated amounts determined based on the actuarial technical insurance calculations. Changes in estimated claims liabilities as a result of further evaluation and the difference between estimated claims and paid claims are recognised as addition to or deduction from expenses in the period the changes occurred.

Liabilitas manfaat polis masa depan
Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau ahli warisnya dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus tertentu oleh aktuaris Perseroan.

Liabilities for future policy benefits
The liabilities for future policy benefits represent the present value of estimated future policy benefits to be paid to policyholders or their heirs less present value of estimated future premiums to be received from the policyholders and recognised consistently with the recognition of premium income. The liabilities for future policy benefits are determined and computed based on certain formula by the Company's actuary.

Untuk tahun 2022 dan 2021, Perseroan menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK No. 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

For 2022 and 2021, the Company calculates the liability for future policy benefits using the method and assumptions approved by the Minister of Finance as stipulated in PMK No. 66/PMK.02/2021 concerning Management Procedures Contribution and Reporting on the implementation of Civil Servant's Old Age Saving Program, and Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Increase/(decrease) for future policy benefits is recognised in the current year's profit or loss.

g. Investasi

g. Investments

Deposito berjangka
Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

Time deposits
Time deposits are stated at nominal value.

Efek-efek
Efek-efek terdiri dari saham, obligasi dan reksadana. Efek-efek diklasifikasikan atas dasar tujuan investasi atau intensi dari manajemen Perseroan.

Marketable securities
Marketable securities consist of shares, bonds and mutual funds. Marketable securities are classified based on management's purpose or intention of maintaining such investments.

Perseroan mengkonsolidasikan reksadana terproteksi dimana Perseroan mempunyai pengendalian secara langsung atau tidak langsung terhadap reksa dana tersebut.

The Company consolidates protected mutual funds which the Company has direct or indirect control over the respective mutual funds.

Pada tanggal pelaporan, Perseroan menyajikan reksadana yang dikonsolidasikan berdasarkan *underlying assets* atas reksadana yang dimiliki Perseroan dan sebagai investasi pada reksadana untuk bagian yang dimiliki oleh pihak ketiga.

At the reporting date, the Company presents the mutual funds based on mutual funds' underlying assets for mutual funds directly held by the Company and as investment in mutual fund for portion owned by third parties.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

All marketable securities are classified as financial assets at fair value through profit and loss, available-for-sale, and held-to-maturity financial assets. See Note 2d for the accounting policies of financial assets at fair value through profit and loss, available-for-sale and held-to-maturity.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 66/PMK.02/2021, penilaian atas aset dalam bentuk investasi saham yang diperdagangkan bursa efek, dinilai dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek. Sehingga, kenaikan atau penurunan nilai investasi atas instrumen saham diakui masing-masing pada aset akumulasi iuran pensiun dan liabilitas akumulasi iuran pensiun.

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 147/PMK.02/2017 concerning Procedures for Managing Dues and Reporting of the Implementation of Old Age Savings Program, Guarantee of Work Accidents, and Death Guarantee for State Civil Servants, Soldiers of the Indonesian National Army, and Members of the National Police of the Republic of Indonesia as amended by Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 66/PMK.02/2021, the valuation of assets in the form of stock exchange-traded stock investments, assessed using the information of the last closing price on the stock exchange. Thus, the increase or decrease in the value of investments in stock instruments is recognized respectively on the assets accumulated pension contributions and pension contribution accumulation liabilities.

Properti investasi
Properti investasi dicatat sesuai dengan PSAK 13 "Properti investasi".

Investment properties
Investment properties is recorded in accordance with PSAK 13 "Investment properties".

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif. Properti

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in providing service or for administrative purpose. Investment properties comprising of land and office buildings are treated as a long-term

investasi yang terdiri atas tanah dan gedung perkantoran diperlakukan sebagai investasi jangka panjang. Properti investasi disusutkan dan tidak dikelompokkan sebagai bagian dari aset tetap.

investment. They are depreciated and are not classified as part of fixed assets.

Properti investasi dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dalam jumlah material dikapitalisasi.

The investment properties are recorded at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses on assets. The cost of maintenance and repairs are charged to the income statement as incurred, while renewals and betterments are capitalized when the amount is material.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama dengan 20 tahun. Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi.

Depreciation of buildings are computed using the straight-line method based on the estimated useful life of 20 years. Land is stated at cost and not amortised.

h. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods of benefit using the straight line method.

i. Aset tetap

Berdasarkan PSAK 16, Perseroan memilih menggunakan metode revaluasi untuk tanah dan bangunan.

i. Fixed assets

Under PSAK 16, the Company has chosen the revaluation method for land and buildings.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada). Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Land and buildings are presented at fair value less accumulated depreciation for buildings and accumulated impairment loss (if any). Valuation of land and buildings are performed by certified external independent valuers. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the fixed asset.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perseroan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Selisih penilaian kembali aset tetap dikreditkan ke akun "cadangan revaluasi aset" yang disajikan pada bagian ekuitas, jika nilai tercatat ance tetap tersebut lebih rendah dibandingkan nilai wajar. Jika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai wajar, selisih tersebut diakui pada laporan laba rugi.

The difference resulting from the revaluation of such fixed assets is credited to the "assets revaluation reserve" account presented in the equity section, if the asset's carrying amount is lower than its fair value. If the asset's carrying amount is higher than its fair value, the difference shall be recognised in the profit or loss.

Aset tetap, selain tanah dan bangunan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut. Aset tetap selain tanah didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

Fixed assets besides land and buildings are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets. Fixed assets other than land are depreciated using the straight line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan kantor	20	*Buildings*
Kendaraan kantor	5	*Office vehicles*
Peralatan kantor	5	*Office equipments*
Perabot kantor	5	*Office furnitures and fixtures*
Perlengkapan kantor	5	*Office inventories*
Perlengkapan lain-lain	4	*Other inventories*
Komputer dan perangkat keras	5	*Computer and hardware*

Pekerjaan dalam penyelesaian merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Construction in progress consist of assets that are still in progress of construction and not yet ready for use and are intended to be used in business activity. This account is recorded based on the amount paid.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Repair and maintenance expenses are charged to the statement of income during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the profit or loss.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa

PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi penyewa tunggal dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan pengecualian sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui aset hak-guna yang mewakili haknya untuk menggunakan aset sewaan dan liabilitas sewa yang mewakili kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. PSAK 73 secara substansial masih menggunakan persyaratan akuntansi atas pesewa (*lessor*) sesuai PSAK 30 Sewa. Oleh karena itu, penyewa masih akan menggunakan klasifikasi sewa dalam sewa operasi atau pembiayaan, dan perlakuan atas kedua tipe sewa tersebut.

Right-of-use-assets and lease liabilities

PSAK 73 introduces a single lessee accounting model and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with the exemptions of short-term leases and the underlying asset is of low value. A lessee is required to recognise a right-of-use asset representing its right-of-use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make lease payments. PSAK 73 substantially carries forward the lessor accounting requirements in PSAK 30 Leases. Accordingly, a lessor continues to classify its leases as operating leases or finance leases, and to account for those two types of leases differently.

Perseroan mengakui liabilitas sewa, sebagai pembayaran sewa yang tersisa termasuk atas opsi perpanjangan dimana perpanjangan hampir dapat dipastikan, didiskontokan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Sedangkan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

The Company recognised a lease liability, being the remaining lease payments including extensions options where renewal is reasonably certain, discounted using the incremental borrowing rate at the date of initial application. Meanwhile, rights-of-use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease, less rental incentives received. Rights-of-use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

Beban keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset-hak guna sewa (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Finance expense is recorded in the profit or loss. Leased right-of-use assets (presented under fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term, if there is no reasonable certainty that Company will obtain ownership by the end of the lease term.

j. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari program piranti lunak komputer dan perpanjangan Hak Guna Bangunan ("HGB").

Program piranti lunak komputer dan perpanjangan Hak Guna Bangunan ("HGB") diakui saat aset tersebut siap digunakan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dari biaya perolehan.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program peranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian peranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perseroan diakui sebagai aset takberwujud.

j. Intangible assets

Intangible assets are computer software program and a renewal certificate of Land Use Title ("HGB").

Computer software program and renewal certificate of Land Use Title ("HGB") are recognised when they are ready to be used at cost less accumulated amortisation.

Amortisation is computed using straight line method of the cost.

Cost associated with maintaining software program are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

k. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Untuk tahun 2022, liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja, seperti pensiun, uang pisah, uang penghargaan, dan imbalan lainnya dihitung berdasarkan peraturan Perseroan dan persyaratan minimum Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 (UU 11/2020).

Perseroan memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan membayar kontribusi tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (meliputi program dana pensiun) dan Perseroan tidak lagi memiliki liabilitas konstruktif untuk berkontribusi lebih lanjut. Perseroan dan karyawan masing-masing berkontribusi sebesar 8% dari penghasilan bulanan.

k. Employee benefit liabilities

Short term employee benefits are recognised when they become due to the employees.

For 2022, long-term and post employment benefits, such as pension, severance *payments, service payments, and other benefits are calculated in accordance with the Company's Regulation and the minimum requirements of Job Creation Law No. 11/2020 (Law 11/2020).*

The Company has a defined contribution plan. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (includes pension fund program) and the Company has no legal or constructive obligation to pay *further contributions. The Company and employees contribute 8%, respectively of preset monthly earnings.*

Perseroan diwajibkan menyediakan jumlah minimum imbalan pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11/2020. Secara substansi program pensiun dalam UU No.11/2020 merupakan program imbalan pasti karena Undang-Undang telah menetapkan formula dalam menentukan jumlah minimum imbalan.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Job Creation Law No. 11/2020 ("Law 11/2020"). Since the Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under Law 11/2020 represent defined benefit plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an *amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service or compensation.*

Liabilitas atas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan nilai wajar aset program, bersamaan juga dengan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui dan beban jasa masa lalu. Liabilitas imbalan pasti dihitung secara tahunan oleh aktuaris independen menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*. Nilai kini dari liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas yang dikeluarkan di masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah di mana imbalan tersebut akan dibayarkan, serta memiliki kriteria jatuh tempo yang mendekati dengan kriteria liabilitas pensiun tersebut.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service cost. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the "Projected Unit Credit" method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high quality long-term bonds that are denominated in Rupiah in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial (pengukuran kembali) langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions (remeasurement) charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Kebijakan Perseroan terkait dengan imbalan kerja dan imbalan pascakerja dituangkan dalam Nota Dinas No. B/ND/PS.06/543/XII/2021-SDM tanggal 14 Desember 2021 tentang perhitungan imbalan pascakerja. Imbalan kerja kepada karyawan diberikan dalam bentuk jaminan purna tugas yang merupakan manfaat yang diberikan kepada karyawan atau ahli warisnya yang berhenti karena diberhentikan, mengundurkan diri, memasuki masa usia pensiun, atau

The Company's policy related to employee benefits are set forth in Official Memo No. B/ND/PS.06/543/XII/2021-SDM dated December 14, 2021 regarding employee benefit. Employee benefits are provided in the form of post duty insurance which are benefits given to employees or their heirs who are terminated, resigned, reached the age of retirement, or passed away. Whereas death insurance is benefit provided to the beneficiary who passed away on duty.

meninggal dunia, sedangkan jaminan kematian merupakan manfaat yang diberikan kepada ahli waris yang berhenti karena meninggal dunia dalam masa dinas.

Siaran Pers DSAK IAI tentang PSAK 24: Imbalan Kerja
Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perseroan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Perseroan, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada periode berjalan.

Press Release of DSAK IAI regarding PSAK 24: Employee Benefits
Regarding the press release of DSAK IAI "Attributing Benefits to the Service Period" in April 2022, the company changed its policy regarding the attribution of pension benefits to the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for the general fact pattern of pension programs based on the Job Creation Law No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Company, so that it is fully recorded in the financial statements for the current period.

l. Perpajakan
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen Perseroan mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk evaluasi terhadap surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability,* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

l. Taxation
The tax expenses comprise current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. The Company's management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan waktu yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the timing differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumption and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

m. Transaksi dengan pihak – pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

m. Transaction with related parties

The Company enter into transactions with related parties. In these financial statements, the term related parties are defined under PSAK 7: "Related Party Disclosures".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

i) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

i) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has control or joint control of the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

ii) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i);
   g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to others);
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c) Both entities are joint ventures of the same third party;
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in i);
   g) A person identified in i) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
   h) Entities, or members of the group to which the entity is part of the group, providing services to the entity's key management personnel or to the parents entity of the reporting entity.

The transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with non-related parties.

n. Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Pensiun

Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Pensiun merupakan penggantian biaya operasional dari Akumulasi Iuran Pensiun dalam rangka pembayaran manfaat Pensiun.

Sejak 2021, atas kegiatan penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, kepada Perseroan diberikan penggantian biaya penyelenggaraan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero).

n. Reimbursement of Pension Expenses

Reimbursement of operating cost is the reimbursable operational cost of pension payment from Accumulated Contribution PNS Fund in order to manage the PNS pension program.

Since 2021, for the implementation of pension benefit payment activities, the Company will be reimbursed for the cost of operation, the amount of which is determined based on the Regulation of the Minister of Finance Number 39/PMK.02/2021 dated April 7, 2021 concerning Operational Costs for the Implementation of Pension Benefit Payments carried out by PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero).

o. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

o. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;*
- *Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;*
- *Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijarah.*

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perseroan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract; and*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the addoption of new standards, amendaments to standards and interpretations of these standars.

3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting

3. Critical Accounting Estimates and Judgements

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with financial accounting standards are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan teknis

Cadangan teknis dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam cadangan teknis adalah liabilitas manfaat polis masa depan dan estimasi liabilitas klaim (lihat Catatan 2f dan 12).

The main sources of estimation uncertainty:

a. Technical reserves

Technical reserves are recorded in the statement of financial position is based on the actuarial calculation using actuarial assumptions. Included in the technical reserves are liabilities for future policy benefits dan estimated claims liabilities (see Notes 2f and 12).

b. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2k dan 17).

b. Employee benefits liabilities

Employee benefits liabilities are determined based on actuarial calculations. Actuarial calculations using assumptions such as discount rates, investment returns, salary increase rate, mortality rate, rate of resignation and others (see Notes 2k and 17).

c. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Jika nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam neraca tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian termasuk model matematika, seperti teknik penilaian analisa arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, Manajemen mempertimbangkan masukan dan asumsi diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup *feedback* model atas likuiditas volatilitas untuk transaksi derivatif dan tingkat diskonto yang berjangka waktu panjang, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

c. Determining fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and liabilities recorded on the balance sheet cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques, including mathematical models, such as discounted future cash flows analysis by using prevailing market rate.

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. The above considerations include liquidity and volatility feedback model for derivative transactions and long term discount rate, the level of early payment and the level of default assumption.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Perseroan meninjau kembali piutang yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

d. Allowances for impairment losses

The Company reviews receivables reinsurers at each reporting date to assess whether impairment should be recognised in the statements of income. In particular, justification made by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment.

Dalam estimasi arus kas ini, Perseroan membuat justifikasi tentang situasi keuangan tertanggung atau perusahaan asuransi. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, seperti yang tercermin dalam perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tersebut di masa datang.

In the estimation of cash flows, the Company makes the justification of the insurer's financial situation. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the provision for impairment in the future.

e. Pengujian kecukupan liabilitas

Pengujian kecukupan liabilitas asuransi yang meliputi reviu atas cadangan premi dan cadangan klaim telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan teknik aktuaria dimana digunakan asumsi dan estimasi aktuaria masa depan.

Berdasarkan hasil tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan, liabilitas yang dicatat oleh Perseroan telah memadai. Oleh karena itu tidak terdapat kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

e. Liability adequacy testing

The liability adequacy testing consist of review on premium reserve and claim reserve has been performed using actuary technical method which using the future actuarial assumptions and estimations.

Based on liability adequacy testing at the reporting date, the Company's liabilities are adequate. Therefore, no insurance liability deficiency to be charged into the current year's profit or loss.

f. Nilai wajar dari aset tetap dan properti investasi

Perseroan menggunakan jasa penilai independen dalam penentuan nilai wajar aset tetap dan properti investasi berupa tanah dan bangunan. Dalam menentukan nilai wajar tersebut, penilai independen menggunakan metode yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana terdapat estimasi-estimasi tertentu (lihat Catatan 2i, 9, dan 10) dibuat oleh penilai independen yang telah direviu oleh Direksi.

f. Fair value of fixed assets and investment properties

Management appoints an independent valuer to calculate the fair value of the land and buildings of fixed assets and investment properties. In determining the fair value, independent valuer is using method as required by the regulation which contains certain estimations (see Notes 2i, 9, and 10) made by the independent valuer and reviewed by the Directors.

4. Kas dan Bank / *4. Cash on Hand and in Banks*

	2022 Rp	2021 Rp	
Kas			***Cash***
Program THT, JKK, dan JKm			*THT, JKK, JKm Program*
Kantor Pusat			*Head Office*
Kantor Cabang			*Branch Office*
Jumlah Kas			***Total Cash***
Kas pada Bank			***Cash in Banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Jumlah			*Total*

	2022 Rp	2021 Rp	
Kas pada Bank			***Cash in Banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
PT Bank Mega Tbk			*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Bumi Artha Tbk			*PT Bank Bumi Artha Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Jumlah			*Total*
Program JKK			*JKK Program*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Jumlah			*Total*
Program JKm			*JKm Program*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank Bumi Artha Tbk			*PT Bank Bumi Artha Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
Jumlah			*Total*
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Jumlah Bank			***Total Banks***
Jumlah Kas dan Bank			***Total Cash and Banks***

5. Deposito Berjangka / *5. Time Deposits*

	2022 Rp	2021 Rp	
Deposito Berjangka			***Time Deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Jumlah			*Total*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk			*PT Bank Mayapada Internasional Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank Mega Tbk			*PT Bank Mega Tbk*

	2022 Rp	2021 Rp	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program JKK			*Program JKK*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Mega Tbk			*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Program JKm			*JKm Program*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Mega Tbk			*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Jumlah Deposito			***Total Time Deposits***

Tingkat bunga deposito berjangka selama tahun 2022 berkisar 3,5% sampai dengan 6,25% dan tahun 2021 berkisar 2,5% sampai dengan 8,25% per tahun. Jangka waktu penempatan deposito berjangka berkisar antara 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

The interest rate on time deposits during 2022 ranges from 3.5% to 6.25% and in 2021 it ranges from 2.5% to 8.25% per year. The period of time deposit placement ranges from 1 (one) month to 12 (twelve) months.

6. Efek-Efek / *6. Marketable Securities*

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai wajar melalui laba rugi:			*Fair value through profit or loss:*
Rupiah			*Rupiah*
- Saham			*Shares -*
Tersedia untuk dijual:			*Available-for-sale:*
Rupiah			*Rupiah*
- Obligasi			*Bonds -*
- Reksadana			*Mutual funds -*
- *Medium Term Notes (MTN)*			*Medium Term Note (MTN) -*
- Saham			*Share -*
- Dana Investasi Real Estate			*Real Estate Investment Funds -*
- Dana Investasi Infrastruktur			*Infrastructure Investment Funds -*
- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset			*Collective Investment Contract - Asset Backed Securities*
Mata uang asing			*Foreign currency*
- Obligasi			*Bonds -*
Dimiliki hingga jatuh tempo:			*Held-to-maturity:*
Rupiah			*Rupiah*
- Obligasi			*Bonds -*
- *Medium Term Notes (MTN)*			*Medium Term Notes (MTN) -*
Jumlah			***Total***

Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari:

Marketable securities at fair value through profit or loss consist of the followings:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saham			***Shares***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Hanson International Tbk			*PT Hanson International Tbk*
PT Trada Alam Minera Tbk			*PT Trada Alam Minera Tbk*
PT Inti Agri Resources Tbk			*PT Inti Agri Resources Tbk*
PT Hartadinata Abadi Tbk			*PT Hartadinata Abadi Tbk*
PT Alfa Energi Investama Tbk			*PT Alfa Energi Investama Tbk*
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk			*PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk*
PT SMR Utama Tbk			*PT SMR Utama Tbk*
PT Bali Towerindo Sentra Tbk			*PT Bali Towerindo Sentra Tbk*
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk			*PT Prima Cakrawala Abadi Tbk*
PT Sidomulyo Selaras Tbk			*PT Sidomulyo Selaras Tbk*
PT Pool Advista Finance Tbk			*PT Pool Advista Finance Tbk*
Lainnya (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)			*Others (each below Rp10 Billion)*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah Saham			***Total Shares***

Efek-efek tersedia untuk dijual terdiri dari:

Available for sale securities consist of the followings:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saham			***Shares***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Notes 31)*
Program THT			*THT Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Hanson International Tbk			*PT Hanson International Tbk*
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk			*PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk*
PT Rimo Catur Lestari Tbk			*PT Rimo Catur Lestari Tbk*
PT Sanurhasta Mitra Tbk			*PT Sanurhasta Mitra Tbk*
PT Bali Towerindo Sentra Tbk			*PT Bali Towerindo Sentra Tbk*
PT Sitara Propertindo Tbk			*PT Sitara Propertindo Tbk*
PT Armidian Karyatama Tbk			*PT Armidian Karyatama Tbk*
PT Hartadinata Abadi Tbk			*PT Hartadinata Abadi Tbk*
PT Inti Agri Resources Tbk			*PT Inti Agri Resources Tbk*
PT Ayana Land International Tbk			*PT Ayana Land International Tbk*
PT SMR Utama Tbk			*PT SMR Utama Tbk*
PT Meta Epsi Tbk			*PT Meta Epsi Tbk*
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk			*PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk*
PT Hotel Mandarine Regency Tbk			*PT Hotel Mandarine Regency Tbk*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah Saham			***Total Shares***

	2022 Rp	2021 Rp	
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Program THT			*Program THT*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Medco Energi International Tbk			*PT Medco Energi International Tbk*
Program JKK			*JKK Program*
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk			*PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk*
Program JKm			*JKm Program*
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk			*PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah Obligasi			***Total Bonds***
Medium Term Notes (MTN)			***Medium Term Notes (MTN)***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
PT Hartadinata Abadi Tbk			*PT Hartadinata Abadi Tbk*
Jumlah *Medium Term Notes* (MTN)			***Total Mediun Term Notes (MTN)***

	2022 Rp	2021 Rp	
Reksadana			***Mutual Funds***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Pihak Ketiga			***Third Parties***
Program THT			*THT Program*
PT Insight Investment Management			*PT Insight Investment Management*
PT Asia Raya Kapital			*PT Asia Raya Kapital*
PT EMCO Asset Management			*PT EMCO Asset Management*
PT Mega Capital Investama			*PT Mega Capital Investama*
PT Pool Advista Aset Manajemen			*PT Pool Advista Aset Manajemen*
PT Recapital Asset Management			*PT Recapital Asset Management*
PT Oso Manajemen Investasi			*PT Oso Manajemen Investasi*
PT Aurora Asset Management			*PT Aurora Asset Management*
PT Victoria Manajemen Investasi			*PT Victoria Manajemen Investasi*
PT Lautandhana Investment Management			*PT Lautandhana Investment Management*
PT Syailendra Capital			*PT Syailendra Capital*
PT Danareksa Investment Management			*PT Danareksa Investment Management*
PT Treasure Fund Investama			*PT Treasure Fund Investama*
PT Millenium Capital Management			*PT Millenium Capital Management*
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia			*PT Manulife Aset Manajemen Indonesia*
PT Corfina Capital			*PT Corfina Capital*
PT MNC Asset Management			*PT MNC Asset Management*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Reksadana			***Total Mutual Fund***

	2022 Rp	2021 Rp	
Dana Investasi Real Estate			***Real Estate Investment Funds***
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia			*DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia*
Jumlah Dana Investasi Real Estate			***Total Real Estate Investment Funds***
Dana Investasi Infrastruktur			***Infrastructure Investment Funds***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Jumlah Dana Investasi Infrastruktur			***Total Infrastructure Investment Funds***
Kontrak Investasi Kolektif			***Collective Investment Contract***
Efek Beragun Aset			***Asset Backed Securities***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset			***Total Collective Investment Contract Asset Backed Securities***

Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari:

Held to maturity securities consist of the followings:

	2022 Rp	2021 Rp	
Obligasi			***Bonds***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Medco Energi Internasional Tbk			*PT Medco Energi Internasional Tbk*
PT Voksel Electric Tbk			*PT Voksel Electric Tbk*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah Obligasi			***Total Bonds***
Medium Term Notes (MTN)			***Medium Term Notes (MTN)***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Party (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Jumlah *Medium Term Notes (MTN)*			***Total Medium Term Notes (MTN)***

Berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Based on maturity as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Tidak memiliki kontrak jatuh tempo			*No contractual maturity*
Lebih dari 1 - 5 tahun			*More than 1 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun			*More than 5 years*
Jumlah			***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Based on remaining period of maturity as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Tidak memiliki kontrak jatuh tempo			*No contractual maturity*
Lebih dari 3 - 12 bulan			*More than 3 - 12 months*
Lebih dari 1 - 5 tahun			*More than 1 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun			*More than 5 years*
Jumlah			***Total***

Tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

The average interest rate per year are as follows:

	2022 %	2021 %	
Rupiah			***Rupiah***
Obligasi Pemerintah			*Government Bonds*
Obligasi Korporasi			*Corporate Bonds*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
Kontrak Investasi Kolektif			*Collective Investment Contract*
Efek Beragunan Aset			*Asset Backed Securities*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Obligasi Pemerintah			*Government Bonds*

Rincian peringkat obligasi dan *medium term notes* (MTN) yang dimiliki Perseroan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai berikut:

Ratings of obligation and medium term notes (MTN) owned by the Company based on PT Pemeringkat Efek Indonesia are as follows:

	2022	2021	
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	idBBB+ (cg)	idBBB	*PT Perkebunan Nusantara II (Persero)*
PT Medco Energi Internasional Tbk	idAA-	idA+	*PT Medco Energi Internasional Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	idBBB	idBBB	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Voksel Electric Tbk	-	idBBB+	*PT Voksel Electric Tbk*
PT Hartadinata Abadi Tbk	-	idA- (sy)	*PT Hartadinata Abadi Tbk*
PT Waskita Beton Precast Tbk	idD	idBBB-	*PT Waskita Beton Precast Tbk*
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	idD	idD	*PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	idAAA	-	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*

Berikut ini adalah rincian saldo efek-efek dalam bentuk surat berharga yang dimiliki secara langsung maupun kepemilikan tidak langsung melalui reksadana:

Below is the details balances of the Company's marketable securities which directly owned or indirectly owned through mutual fund:

	2022 Rp	2021 Rp	
Dimiliki langsung			*Directly owned*
Dimiliki melalui reksadana			*Owned through mutual fund*
Jumlah			***Total***

7. Piutang Lain-lain / *7. Other Receivables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Piutang premi			*Premium receivables*
Piutang premi UPSL			*Premium UPSL receivables*
Piutang bunga deposito berjangka			*Interest receivables of time deposits*
Piutang bunga obligasi			*Interest receivables of bonds*
Piutang bunga *Medium Term Notes* (MTN)			*Interest receivables of Medium Term Notes (MTN)*
Piutang bunga kontrak investasi kolektif efek beragun aset			*Interest receivables of collective investment contract Asset backed securities*
Piutang sewa gedung			*Receivables from rent of building*
Program JKK			*JKK Program*
Piutang premi			*Premium receivables*
Piutang bunga deposito berjangka			*Interest receivables of time deposits*
Piutang bunga obligasi			*Interest receivables of bonds*
Piutang pendapatan fee *Taspen Life*			*Receivables from fee of Taspen Life*
Program JKm			*JKm Program*
Piutang premi			*Premium receivables*
Piutang bunga deposito berjangka			*Interest receivables of time deposits*
Piutang bunga obligasi			*Interest receivables of bonds*
Piutang pendapatan fee *Taspen Life*			*Receivables from fee of Taspen Life*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Pengelolaan investasi program AIP			*Managing investment of AIP*
Piutang bunga			*Interest receivables*
Lain-lain			*Others*
Program JKK			*JKK Program*
Piutang pengembalian JKK pemegang polis			*Policyholder's JKK return receivables*
Piutang bunga			*Interest receivables*
Program JKm			*JKm Program*
Piutang bunga			*Interest Receivables*
Jumlah			***Total***

Piutang premi *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) diakui berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan *Unfunded Past Service Liability Program* Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero) senilai Rp4.550.264. Pada tanggal 24 November 2022 dan 12 Desember 2022, Perseroan menerima realisasi atas piutang premi UPSL masing-masing senilai Rp1.000.000 dan Rp1.280.000. Sehingga piutang premi UPSL per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.270.264.

Premium Unfunded Past Service Liability (UPSL) receivables was recognized based on the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 regarding the Determination of Unfunded Past Service Liability for THT Program at PT ASABRI (Persero) amounted Rp4,550,264. On November 24, 2022 and December 12, 2022, the Company received the realization of UPSL premium receivable of Rp1,000,000 and Rp1,280,000. So that, the UPSL premium receivables as of December 31, 2022 is amounted to Rp2,270,264.

8. Aset Lain-lain / *8. Other Assets*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Party (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Piutang pinjaman			*Loan receivables*
Piutang atas properti terbengkalai			*Receivable of abandoned property*
Uang muka pajak			*Tax advance*
Biaya dibayar di muka			*Prepaid expenses*
Piutang jasa *flagging*			*Flagging services receivables*
Piutang pinjaman polis			*Policy loan receivables*
Lain-lain			*Others*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih			***Total - net***

Piutang pinjaman sebesar Rp19.964 merupakan pembelian condotel di Bali dengan harga pembelian sebesar kepada PT Danau Winata Indah pada tahun 2015. Pada akhir tahun 2017, PT Danau Winata Indah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan tidak dapat melanjutkan progres pembangunan condotel. Berdasarkan putusan pailit tersebut, Perseroan melakukan penurunan nilai pembelian tersebut menjadi sebesar sesuai dengan nilai yang dapat dipulihkan atas aset tersebut. Pada tahun 2017, Perseroan melakukan reklasifikasi aset tersebut dari properti investasi ke aset lain-lain.

Loan receivables amounting to Rp19.964 represented acquisition of condotel in Bali with purchase price of to PT Danau Winata Indah in 2015. At the end of 2017, PT Danau Winata Indah has been declared banckupt by court and could not continue to build the condotel. Due to bankrupcy announcement, the Company has impaired the purchase price down to according to its recoverable amount. In 2017, the Company has reclassified the asset for investment property to other asset.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, kondisi terkini atas hal-hal yang berkaitan dengan PT Danau Winata Indah (dalam pailit), sebagai berikut:

1. Telah terdapat 3 (tiga) kali upaya penjualan di muka umum (lelang) oleh Tim Kurator PT Danau Winata Indah (dalam pailit), pada tanggal 14 Desember 2021, 23 Maret 2022, dan 9 Agustus 2022 pada KPKNL Denpasar dengan hasil lelang Tidak Ada Peminat (TAP);
2. Tim Kurator PT Danau Winata Indah (Dalam Pailit) telah mendapatkan penetapan tanggal pelaksanaan lelang ulang dari KPKNL Denpasar, yaitu pada 13 Januari 2023;
3. Pada 5 Agustus 2022, Perseroan digugat oleh saudara Sutrisno Lukito melalui Pengadilan Jakarta Timur terkait dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 03 tahun 2019 dan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan Nomor 04 tahun 2019, kedua akta tersebut merupakan cacat hukum dan perlu dibatalkan demi

As of the issuance date of the financial statements, the current condition of matters related to PT Danau Winata Indah (in bankruptcy), as follows:

1. *There have been 3 (three) public sales attempts (auctions) by the Curator Team of PT Danau Winata Indah (In Bankruptcy), on December 14, 2021, March 23, 2022, and August 9, 2022 at the Denpasar KPKNL with the results of the No Interest (TAP) auction;*
2. *The Curator Team of PT Danau Winata Indah (in bankruptcy) has obtained a determination of the date for the re-auction from KPKNL Denpasar, which is on January 13, 2023;*
3. *On August 5, 2022, the Company was sued by Sutrisno Lukito through the East Jakarta Court related to Deed of Mutual Agreement Number 03 of 2019 and Deed of Debt Recognition with Guarantee Number 04 of 2019, both deeds are legal defects and need to be cancelled for the sake of law because the related deeds were*

hukum karena akta terkait dibuat setelah PT Danau Winata Indah diputuskan kepailitannya; dan

4. Persidangan atas gugatan pada poin 3 (tiga) telah berlangsung hingga sidang ke-15 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi tergugat.

Piutang atas properti terbengkalai merupakan pembelian Apartemen Paragon Square sebanyak 33 unit Satuan Rumah Susun Hunian Paragon Square Mall, Apartment Adanami dan Hotel di Jalan Jenderal Sudirman KM 13 No. 71 Kota Tangerang dengan status Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Bpk. Frid Razalee dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2016 dengan nilai investasi sebesar . Pada tahun 2017, PT Broadbiz Asia selaku developer Apartemen Paragon Square diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta sehingga apartemen tersebut tidak dapat beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan putusan pailit tersebut, Perseroan mengakui rugi penurunan nilai atas piutang sebesar sesuai dengan nilai yang tidak dapat dipulihkan dan melakukan reklasifikasi aset tersebut dari properti investasi ke aset lain-lain (Catatan 8).

Uang muka pajak merupakan pajak penghasilan pasal 28 (a) untuk tahun 2018.

Pada tahun 2022, atas uang muka pajak tersebut telah dilakukan pemindahbukuan antara lain:

1. Pemindahbukuan sebesar Rp389 untuk SKP Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Badan (beban denda pajak) dengan nomor PBK-00151/II/WPJ.19/KP.0403/2022 dan PBK-00135/II/WPJ.19/KP.0403/2022;
2. Pemindahbukuan sebesar Rp431 untuk SKP Badan (beban pajak penghasilan kini) dengan PBK-00135/ II/WPJ.19/KP.0403/2022;
3. Pemindahbukuan sebesar Rp102 dengan nomor PBK-00842/VIII/WPJ.19/KP.0403/ 2022;
4. Pemidahbukuan sebesar Rp2.152 dengan nomor PBK-00083/I/WPJ.19/KP.0403/2022;
5. Pemindahbukuan sebesar Rp106 dengan nomor PBK-00820/VIII/WPJ.19/KP.0403/ 2022.

made after PT Danau Winata Indah was decided on bankruptcy; and

4. *The trial of the suit in point 3 (three) has lasted until the 15th hearing with the agenda of the hearing of the examination of the defendant's witnesses.*

Receivbles of abandoned properties represent the purchase of Paragon Square Apartments for 33 units of Paragon Square Mall Residential Flats, Adanami Apartments and Hotels on Jalan Jenderal Sudirman KM 13 No. 71 Kota Tangerang with the status of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) between Mr. Frid Razalee with the Company which was signed on June 20, 2016 with a total investment value of In 2017, PT Broadbiz Asia as the developer of the Paragon Square Apartment was declared bankrupt by the Commercial Court at the Jakarta District Court so that the apartment cannot operate until now. Based on the bankruptcy decision, the Company recognized impairment loss on receivables amounting of in accordance with the non-recoverable amount and reclassified the assets from investment property to other assets (Note 8).

Tax advance represent income tax article 28 (a) of year 2018.

In 2022, the prepaid taxes have been transferred, as follows:

1. *Overbooking of Rp389 for SKP Income Tax Article 21 and Corporate tax (tax penalty expense) with numbers PBK-00151/II/WPJ.19/ KP.0403/2022 and PBK-00135/II/WPJ.19 /KP.0403/2022;*
2. *Book-entry of Rp431 for Corporate SKP (tax expense current income) with PBK-00135/II/WPJ.19/KP.0403/2022;*
3. *Overbooking of Rp102 with the number PBK-00842/VIII/WPJ.19/KP.0403/2022;*
4. *Overbooking of Rp2,152 with number PBK-00083/I/WPJ.19/KP.0403/2022;*
5. *Overbooking of Rp106 with the number PBK-00820/VIII/WPJ.19/KP.0403/2022.*

9. Properti Investasi / *9. Investment Properties*

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo awal tahun			*Beginning balance of the year*
Pengurangan			*Deduction*
Penjualan			*Sell*
Penyusutan (Catatan 29)			*Depreciation (Note 29)*
Reklasifikasi			*Reclassification*
Jumlah			***Total***

	2022 Rp	2021 Rp	
Tanah dan bangunan			*Land and buildings*
Bangunan			*Buildings*
Tanah			*Land*
Jumlah			***Total***

Properti investasi yang dimiliki Perseroan berupa gedung, apartemen, perumahan, villa, kondotel, perkantoran dan tanah.

Investment properties owned by the Company are buildings, apartments, housing, villas, condotels, offices, and vacant land.

Pada tahun 2022, terdapat pelepasan properti investasi berupa 10 unit ruko kepada PT Bulan Terang Utama sebagai bentuk penyelesaian kewajiban investasi dalam pembangunan ruko di perumahan Bulan Terang Utama, Malang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama nomor SPKS/PU.01.08/139-AS/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penyelesaian Kewajiban Investasi dalam Pembangunan Ruko di Perumahan Bulan Terang Utama, Malang. Atas pelepasan ini, Perseroan mencatat laba pelepasan sebesar pada pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi.

In 2022, there is a disposal of investment properties in the form of 10 shophouses to PT Bulan Terang Utama as a form of settlement of investment obligations in the construction of shophouses in the Bulan Terang Utama housing, Malang in accordance with the Cooperation Agreement number SPKS/PU.01.08/139-AS/VIII/ 2022 dated August 31, 2022 concerning Settlement of Investment Obligations in Construction of Shophouses in Bulan Terang Utama Housing, Malang. On this disposal, the Company recorded a gain on disposal amounted to in other income in the income statement.

Pada tahun 2022, terdapat reklasifikasi atas properti investasi Apartemen Paragon Square ke aset lain-lain sebesar nilai buku (Catatan 8).

In 2022, there is a reclassification of the Paragon Square Apartment investment property to other assets amounted to (Note 8).

Pada tahun 2021, terdapat reklasifikasi berupa cessie atas Rukos Puri Sentosa dari properti investasi ke piutang lain-lain sebesar nilai buku .

In 2021, there is a reclassification of cessie for Rukos Puri Sentosa from investment properties to other receivables amounted to .

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00085/2.0069-01/PI/08/0256/1/II/2023 - 00096/2.0069-01/PI/08/0256/1/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan nilai total sebesar .

The fair value of investment properties as of December 31, 2022 was determined based on assessment of the independent appraiser of Firman, Azis, dan Rekan through its report No. 00085/2.0069-01/PI/08/0256/1/II/2023 - 00096/2.0069-01/PI/08/0256/1/II/2023 dated February 1, 2023 with a total value of .

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Wawat,

The fair value of investment properties as of December 31, 2021 was determined based on assessment of the independent appraiser of

Jatmika, dan Rekan dalam laporan No. 0041/2.0133-01/PI/08/0363/1/II/2022 pada tanggal 5 Februari 2022 dengan nilai sebesar .

Wawat, Jatmika, dan Rekan through its report No. 0041/2.0133-01/PI/08/0363/1/II/2022 dated February 5, 2022 amounted to

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti investasi.

Management believes that there is no indication of impairment on that investment properties.

10. Aset Tetap dan Aset Hak Guna – Bersih / *10. Fixed Assets and Right-of-Use Assets – Net*

31 Desember 2022/*December 31, 2022*

	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan:							***Acquisition cost:***
Tanah							*Land*
Bangunan kantor							*Buildings*
Kendaraan kantor							*Office vehicles*
Peralatan kantor							*Office equipment*
Perabot kantor							*Office furniture and fixtures*
Perlengkapan kantor							*Office inventories*
Perlengkapan lain-lain							*Other inventories*
Komputer dan perangkat keras							*Computer and hardware*
Pekerjaan dalam penyelesaian							*Construction in progress*
Aset Hak Guna							***Right of Use Asset***
Kendaraan							*Vehicles*
Peralatan kantor							*Office inventories*
Jumlah biaya perolehan							*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan:							***Accumulated depreciation:***
Bangunan kantor							*Buildings*
Kendaraan kantor							*Office vehicles*
Peralatan kantor							*Office equipment*
Perabot kantor							*Office furniture and fixtures*
Perlengkapan kantor							*Office inventories*
Perlengkapan lain-lain							*Other inventories*
Komputer dan perangkat keras							*Computer and hardware*
Aset Hak Guna							***Right of Use Asset***
Bangunan							*Vehicles*
Peralatan kantor							*Office inventories*
Jumlah akumulasi penyusutan							*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih							***Net book value***

31 Desember 2021/*December 31, 2021*

	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifications* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan:							***Acquisition cost:***
Tanah							*Land*
Bangunan kantor							*Buildings*
Kendaraan kantor							*Office vehicles*
Peralatan kantor							*Office equipment*
Perabot kantor							*Office furniture and fixtures*
Perlengkapan kantor							*Office inventories*
Perlengkapan lain-lain							*Other inventories*
Komputer dan perangkat keras							*Computer and hardware*
Pekerjaan dalam penyelesaian							*Construction in progress*
Aset Hak Guna							***Right of Use Asset***
Kendaraan							*Vehicles*
Jumlah biaya perolehan							*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan:							***Accumulated depreciation:***
Bangunan kantor							*Buildings*
Kendaraan kantor							*Office vehicles*
Peralatan kantor							*Office equipment*
Perabot kantor							*Office furniture and fixtures*
Perlengkapan kantor							*Office inventories*
Perlengkapan lain-lain							*Other inventories*
Komputer dan perangkat keras							*Computer and hardware*
Aset Hak Guna							***Right of Use Asset***
Bangunan							*Vehicles*
Jumlah akumulasi penyusutan							*Total accumulated depreciation*
Nilai buku bersih							***Net book value***

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai bagian beban umum dan administrasi (Catatan 29).	*Depreciation of fixed assets is presented as part of general and administrative expenses (Note 29).*
Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2022 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00032/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023 - 00072/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023 tanggal 26 Januari 2023.	*The fair value of land and buildings as of December 31, 2022 was determined based on the assessment of the independent appraiser of Firman, Azis, dan Rekan through its report No. 00032/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023 - 00072/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2023 dated January 26, 2023.*
Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Firman, Azis, dan Rekan dalam laporan No. 00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022.	*The fair value of land and buildings as of December 31, 2021 was determined based on the assessment of the independent appraiser of Firman, Azis, dan Rekan through its report No. 00034/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 - 00074/2.0069-01/PI/08/0256/1/I/2022 dated January 28, 2022.*
Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain: a) Jenis dan hak yang melekat pada properti; b) Kondisi pasar; c) Lokasi; d) Karakteristik fisik; e) Karakteristik tanah.	*Valuations are performed based on Indonesian Valuation Standards, based on reference to recent market transactions. The valuation methods used are market data approach and cost approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets among others are as follows:* *a) Type and right on property;* *b) Market condition;* *c) Location;* *d) Physical characteristic;* *e) Land characteristic.*
Perseroan mengasuransikan seluruh aset tetapnya atas bangunan, dengan jenis pertanggungan gempa bumi, kebakaran, kerusuhan, banjir, serta semua risiko kepada pihak ketiga yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Tri Pakarta, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional, PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Bhakti Bayangkara, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika dengan total nilai pertanggungan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar	*The Company insures all of its fixed assets on buildings, with the types of coverage for earthquakes, fires, riots, floods, and all risks to third parties, namely PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Jasindo Syariah, PT Asuransi Tri Pakarta, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Etiqa Internasional, PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Bhakti Bayangkara, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasaraharja Putera, and PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika with a total coverage value as of Desember 31, 2022 and 2021 amounted*
Berdasarkan evaluasi Manajemen, tidak terdapat kejadian berjalan atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.	*Based on Managements' assessment, there have been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at December 31, 2022 and 2021.*

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*		
	Nilai tercatat sebelum revaluasi/ *Carrying amount before revaluation* Rp	**Nilai tercatat setelah revaluasi/ *Carrying amount after revaluation* Rp**	**Keuntungan revaluasi/ *Gain on revaluation* Rp**
Tanah			
Bangunan			

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*		
	Nilai tercatat sebelum revaluasi/ *Carrying amount before revaluation* Rp	**Nilai tercatat setelah revaluasi/ *Carrying amount after revaluation* Rp**	**Kerugian revaluasi/ *Loss on revaluation* Rp**
Tanah			
Bangunan			

Kenaikan (penurunan) nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat di dalam penghasilan komprehensif lain.

The increase (decrease) in the carrying amount of land and buildings is recorded in other comprehensive income.

Manajemen berpendapat bahwa nilai revaluasi tanah dan bangunan di atas adalah wajar dan telah sesuai dengan metode penilaian yang berlaku.

Management believe the revaluation value of land and buildings above are reasonable and in accordance with applicable revaluation method.

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen non-keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

The table below analyses non-financial instrument carried at fair value, by level of valuation method. The different levels of valuation method defines as follows:

- Tingkat 1
  Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2
  Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3
  Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

- *Level 1*
  Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- *Level 2*
  Input other than quoted prices included within level 1 that are observable for asset and liabilities, either directly (that is, as a price) or indirectly (derived from price).
- *Level 3*
  Input for asset or liability that is not based on observable market data (unobservable inputs).

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
	Tingkat 1/ *Level 1* Rp	**Tingkat 2/ *Level 2* Rp**	**Tingkat 3/ *Level 3* Rp**	**Jumlah/ *Total* Rp**
Tanah				*Land*
Bangunan				*Buildings*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Tingkat 1/ ***Level 1*** **Rp**	**Tingkat 2/** ***Level 2*** **Rp**	**Tingkat 3/** ***Level 3*** **Rp**	**Jumlah/** ***Total*** **Rp**	
Tanah					*Land*
Bangunan					*Buildings*

Nilai wajar tingkat 2 dari tanah dan bangunan dihitung dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga pasar, estimasi biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru, dan estimasi pendapatan dan biaya yang dihasilkan oleh aset. Harga pasar dari tanah dan bangunan yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut utama seperti ukuran aset, lokasi dan penggunaan aset. Input yang paling signifikan dalam pendekatan penilaian ini adalah asumsi harga per meter.

Level 2 fair values of land and buildings are calculated using the comparable market value approach, cost reproduction or cost replacement approach and asset generated income approach. The approximate market prices of comparable land and buildings are adjusted for differences in key attributes such as property size, location and use of an asset. The most significant input into this valuation approach is price per square meter assumptions.

11. Aset Takberwujud – Bersih / *11. Intangible Assets – Net*

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*					
	Saldo awal/ ***Beginning balance*** **Rp**	**Penambahan/** ***Additions*** **Rp**	**Pengurangan/** ***Deductions*** **Rp**	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications*** **Rp**	**Saldo akhir/** ***Ending balance*** **Rp**	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Piranti lunak komputer						*Computer software*
Aset dalam penyelesaian						*Asset in progress*
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Piranti lunak komputer						*Computer software*
Nilai buku bersih						***Net book value***

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Saldo awal/ ***Beginning balance*** **Rp**	**Penambahan/** ***Additions*** **Rp**	**Pengurangan/** ***Deductions*** **Rp**	**Reklasifikasi/** ***Reclassifications*** **Rp**	**Saldo akhir/** ***Ending balance*** **Rp**	
Biaya perolehan:						***Acquisition cost:***
Piranti lunak komputer						*Computer software*
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Piranti lunak komputer						*Computer software*
Nilai buku bersih						***Net book value***

Penyusutan aset takberwujud disajikan sebagai bagian beban umum dan administrasi (Catatan 29).

Depreciation of intangible assets is presented as part of general and administrative expenses (Note 29).

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset dalam penyelesaian terdiri dari *Project Management Offficer (*PMO), pembangunan dan pengembangan sistem autentikasi digital, pembangunan sistem aplikasi pemadanan data KNIME, dan pengembangan aplikasi API Management. Persentase rata-rata penyelesaian aset dalam penyelesaian tersebut adalah sekitar 41% dengan perkiraan penyelesaian sampai akhir tahun 2023. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian terkait aset dalam penyelesaian.

As of December 31, 2022, asset in progress consisted of a Project Management Officer (PMO), construction and development of a digital authentication system, construction of a KNIME data matching application system, and development of an API Management application. The average percentage of completion of asset in progress is around 41% with an estimated completion by the end of 2023. There is no constraint in the completion of related asset in progress.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai signifikan atas aset takberwujud.

The Management believe there is no indication of significant impairment on such intangible assets.

12. Liabilitas pada Pemegang Polis / *12. Liabilities to Policyholders*

a. Liabilitas manfaat polis masa depan / *a. Liability for future policy benefits*

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup semua liabilitas yang dijamin berdasarkan kondisi pada polis asuransi yang masih berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liability for future policy benefits represents the amounts provided for all obligations guaranteed under the terms of the policies in force at statement of financial position date.

Liabilitas manfaat polis masa depan kepada pemegang polis untuk kontrak asuransi untuk produk-produk tradisional dengan masa pertanggungan lebih dari satu tahun dan tidak dapat diperbaharui, dihitung menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang dihitung dengan cara mendiskontokan nilai kini arus kas keluar masa depan termasuk semua manfaat polis, biaya-biaya, dan komisi dikurang nilai kini semua arus kas masuk yang akan terjadi dimasa yang akan datang seperti pendapatan premi ataupun pendapatan lainnya (jika ada) yang didapat dari pemegang polis.

The liabilities for future policy benefits for insurance contract for traditional products with coverage period more than one year and non renewable, are computed using Gross Premium Reserve method, which is calculated using the discounted of the actuarial present value of the future cash outflow, including insurance benefits, expenses and commissions less the present value of the future cash inflow, which will occur in the future i.e. premiums income and other income (if any) to be collected from policyholders.

Kebijakan besaran manfaat asuransi yang diperoleh Peserta dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2020.

The policy of benefits amounts received by Participants described in the Government Regulation No. 102 Year 2015 regarding Social Insurance for Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police as amended by the Government Regulation No. 54 Year 2020.

Liabilitas kepada pemegang polis masa depan telah dihitung menggunakan metode dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The future liability to policyholders has been computed using the following assumptions and methods:

	2022	2021		
a. Jumlah peserta (orang)			*Participants (people)*	*a.*
b. Jumlah istri/suami (orang)			*Spouse (people)*	*b.*
c. Jumlah anak (orang)			*Children (people)*	*c.*
d. Jumlah Peserta Pensiunan (Orang)			*Total Pension Participants (People)*	*d.*
e. Tingkat bunga (%)			*Discount Rate (%)*	*e.*
f. Tingkat Bunga Program JKK dan JKm (%)			*Discount Rate JKK and JKm Program (%)*	*f.*
g. Jumlah gaji dasar			*Basic salary*	*g.*
h. Jumlah penghasilan			*Current salary*	*h.*
i. Tabel mortalita			*Mortality table*	*i.*
j. Variabel gugur			*Variable of killed in actions*	*j.*
k. Variabel tewas			*Variable of death*	*k.*
l. Variabel Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)			*Variable of SCDB*	*l.*
m. Variabel Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)			*Variable of SCDK*	*m.*
n. Variabel Perawatan			*Variable of treatment*	*n.*

Perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan (LMPMD) dihitung oleh Aktuaris Perseroan menggunakan aplikasi atau software aktuaria Prophet dengan dukungan *modelling* perhitungan oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Riana dan Rekan (d.h PT Padma Radya Aktuaria).

Calculation of Liability for Future Policy Benefits (LMPMD) is calculated by a Company Actuary using the application or actuarial software Prophet with support for modeling calculations by the Actuarial Consultant Office (KKA) Riana and Partners (formerly PT Padma Radya Aktuaria).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai LMPMD adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022 and 2021, LMPMD is amounted to as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Program THT			*THT Program*
Jumlah			***Total***

Sejak 2021, Perseroan menerapkan perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan program THT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan tersebut, Perseroan menghitung liabilitas manfaat polis masa depan program THT dengan menggunakan metode perhitungan dan asumsi yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Since 2021, the Company calculated the Lliabilities for Future Policy Benefits of THT program accordance with the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021 concerning the Procedures for Managing Contribution and on the Implementation of Civil Old Age Saving Program, Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police. Based on this regulation, the Company calculates the liabilities for future policy benefits of the THT program using the calculation method and assumptions approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT pada PT ASABRI (Persero) Tahun 2022. Pada surat tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyetujui penggunaan metode Gross *Premium Valuation* (GPV) dan asumsi bunga aktuaria sebesar 9,50%. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan melakukan perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan program THT tahun 2022 dengan menggunakan tingkat bunga aktuaria yang telah disetujui tersebut. Jika perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan program THT menggunakan tingkat suku bunga pasar kini per 31 Desember 2022 sebesar 7,35%, maka liabilitas meningkat menjadi

The Company received a letter from the Minister of Finance Number S-49/MK.02/2022 dated January, 30 2022 regarding to Approval for the Use of Methods and Assumptions in the calculation of the THT Program Liabilities for Future Policy Benefits at PT ASABRI (Persero) for year of 2022. The letter stated that the Minister of Finance approved the use of the Gross Premium Valuation (GPV) method and assumed an actuarial interest rate for 9.50%. In accordance with the letter, the Company calculated the liabilities for future policy benefits of THT program year 2022 by using the approved interest rate. If the calculation of Liabilities for Future Policy Benefits used current market interest rate for 7.35% as of December, 31 2022, hence the liabilities will increase to .

Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor S-8/MK.02/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Persetujuan Metode dan Asumsi dalam perhitungan LMPMD Program THT Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI untuk tahun 2021. Pada surat tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyetujui penggunaan metode *Gross Premium Valuation* (GPV) dan asumsi bunga aktuaria sebesar 9,70%. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan melakukan perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan program THT tahun 2021 dengan menggunakan tingkat bunga aktuaria yang telah disetujui tersebut. Jika perhitungan Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan program THT menggunakan tingkat suku bunga pasar kini per 31 Desember 2021 sebesar 7,40%, maka liabilitas meningkat menjadi .

The Company received a letter from the Minister of Finance Number S-8/MK.02/2022 dated January 3, 2022 regarding toApproval for the Use of Methods and Assumptions in the calculation of the THT Program LMPMD of TNI Soldiers, POLRI Members, and SCS in the Ministry of Defense and POLRI for year of 2021. The letter stated that the Minister of Finance approved the use of the Gross Premium Valuation (GPV) method and assumed an actuarial interest rate for 9.70%. In accordance with the letter, the Company calculated the liabilities for future policy benefits of THT program year 2021 by using the approved interest rate. If the calculation of Liabilities for Future Policy Benefits used current market interest rate for 7.40% as of December, 31 2021, hence the liabilities will increase to

Dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disesuaikan ke liabilitas manfaat polis masa depan dan beban liabilitas manfaat polis masa depan (Catatan 2.b). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan.

The effect of with the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66/PMK.02/2021 ("PMK 66/2021") concerning the Procedures for Managing Contribution and on the Implementation of Civil Servant's Old Age Saving Program, and Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police implementation has been accounted for by adjustment to Liabilities for future policy and expenses liabilities for future policy (Note 2.b). The following tables are presented as an additional information.

	2022	
	Tingkat Bunga PMK/*PMK Interest Rate*	**Tingkat Bunga Pasar/*Market Rate***
	Rp	**Rp**
Laporan Posisi Keuangan		***Statements of Financial Position***
Liabilitas		***Liabilities***
Liabilitas manfaat polis masa depan		*Liabilities for future policy benefits*
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain		***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Beban		***Expenses***
Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan		*Increase in liabilities for future policy benefits*

	2021		
	Tingkat Bunga PMK/*PMK Interest Rate* Rp	Tingkat Bunga Pasar/*Market Rate* Rp	
Laporan Posisi Keuangan			***Statements of Financial Position***
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas manfaat polis masa depan			*Liabilities for future policy benefits*
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain			***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Beban			***Expenses***
Penurunan liabilitas manfaat polis masa depan			*Decrease in liabilities for future policy benefits*

b. Estimasi liabilitas klaim / *b. Estimated claim liabilities*

	2022 Rp	2021 Rp	
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Jumlah			***Total***

c. Utang klaim / *c. Claim payables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Party (Note 31)*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
	-		
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Jumlah			***Total***

13. Akrual dan Utang Lain-lain / *13. Accrued Expenses and Other Payables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Gaji dan tunjangan pegawai			*Employee salaries and allowance*
Biaya kantor			*Office expenses*
Bantuan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (BUM KPR)			*Advance Payment Assistant Housing Loan (BUM KPR)*
Denda pajak			*Tax penalties*
Liabilitas sewa			*Lease liability*
Lain-lain			*Others*
Jumlah			***Total***

14. Utang Investasi / *14. Investment Payables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Obligasi:			*Bonds:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Properti investasi			*Investment properties*
Jumlah			***Total***

Utang properti investasi pada 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan utang atas pembelian properti investasi Grand Dhika City, Bekasi sebesar dan pencatatan atas penerimaan uang muka atas pelepasan Ruko Bulan Terang Utama masing-masing sebesar dan nihil pada tahun 2022 dan 2021.

Investment properties payables as of December 31, 2022 and 2021 represent payables for purchase of investment property of Grand Dhika City, Bekasi amounting to and advance received for selling of shophouse Bulan Terang Utama amounting to and nil in 2022 and 2021, respectively.

15. Perpajakan / *15. Taxation*

a. Utang pajak / *a. Taxes payables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
Pajak lainnya			*Other taxes*
- Pasal 25			*Article 25 -*
- Pasal 21			*Article 21 -*
- PPN			*VAT -*
- Lain-lain			*Others -*
Jumlah			***Total***

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expense*

	2022 Rp	2021 Rp	
Kini			*Current*
Penyesuaian tahun sebelumnya			*Adjusted for previous year*
Tangguhan			*Deferred*
Jumlah			***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the profit before income tax and the taxable income is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan badan			*Profit before corporate income tax*
Perbedaan waktu:			*Timing differences:*
- IBNR			*IBNR -*
- Liabilitas imbalan kerja			*Provision for employee benefits -*
- Penyusutan aset tetap			*Depreciation of fixed assets -*
Perbedaan tetap:			*Permanent difference:*
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan untuk tujuan perpajakan			*Non-deductible expenses -*
- Koreksi cadangan			*Provision correction -*
- Pendapatan bukan objek pajak			*Non-taxable income -*
- Pendapatan yang dikenakan pajak final			*Income subject to final tax -*
Penghasilan kena pajak			*Taxable income*
Beban pajak penghasilan kini			*Income tax expenses-current*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			*Less prepaid income tax:*
- PPh Pasal 23			*Article 23 -*
- PPh Pasal 25			*Article 25 -*
Pajak terutang			***Income tax payable***

Rekonsiliasi antara beban pajak Perseroan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perseroan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the Company's total tax expense and the amounts computed by applying the statutory tax rates to the Company's income before tax is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Laba sebelum pajak penghasilan badan			*Profit before corporate income tax*
Pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku			*Tax calculated at applicable tax rates*
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
Pendapatan yang dikenakan pajak final			*Income subject to final tax*
Pendapatan bukan objek pajak			*Non-taxable income*
Beban yang tidak dapat diperhitungkan untuk tujuan perpajakan			*Non-deductible expenses*
Koreksi cadangan			*Provision correction*
Lainnya			*Others*
Beban pajak penghasilan			*Income tax expense*
Penyesuaian tahun sebelumnya			*Adjustment on prior year*
Jumlah			***Total***

c. Aset pajak tangguhan – bersih / ***c. Deferred tax assets – net***

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to profit or loss* Rp	Dibebankan ke laporan penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Penyusutan aset tetap					*Depreciation of fixed assets*
Keuntungan belum direalisasi atas efek-efek tersedia untuk dijual					*Unrealised gain on available for sale marketable securities*
Liabilitas imbalan kerja					*Provision for employee benefit*
IBNR					*IBNR*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Dampak Perubahan tarif pajak/ *Impact on changes in tax rate* Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to profit or loss* Rp	Dibebankan ke laporan penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Penyusutan aset tetap						*Depreciation of fixed assets*
Keuntungan belum direalisasi atas efek-efek tersedia untuk dijual						*Unrealised gain on available for sale marketable securities*
Liabilitas imbalan kerja						*Provision for employee benefit*
IBNR						*IBNR*

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pajak penghasilan badan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 22%.

d. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DJP") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

The Company's corporate income tax for the years ended 31 December 2022 and 2021 are calculated using the tax rate of 22%.

e. Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) tahun 2016 atas Pajak Penghasilan ("PPh") Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4(2) dengan total Rp4.692 (termasuk denda dan bunga). Jumlah ini sudah disetujui dan dicatat oleh Perseroan sebagai beban tahun berjalan.

Pada tanggal 13 Januari 2022, Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk 2017 atas Pajak Penghasilan ("PPh") Badan, PPh Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4(2) masing-masing

e. Tax Audit for Fiscal Year

On December 13, 2021, the Company has received Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) of 2016 on Corporate Income Tax, Income Tax Articles 21, and Final Income Tax Article 4(2) amounted to Rp4,692 (including penalties and interests). The amount approved and recorded by the Company as an expense for the current year.

On January 13, 2022, the Company received a Notification letter of Tax Examination Results for 2017 on Corporate Income Tax ("PPh"), Articles 21 income tax and Final Income Tax Article 4(2) of Rp619 (including

sebesar Rp619 (termasuk bunga), Rp200 dan Rp23.660. Atas hal tersebut, per 13 Januari 2022, Perseroan telah menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) tahun 2017. Per 31 Desember 2021, jumlah ini sudah disetujui dan dicatat oleh Perseroan sebagai beban tahun 2021.

interest), Rp200 and Rp23,660, respectively. For this reason, as of January 13, 2022, the Company has received a 2017 Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB). As of December 31, 2021, this amount has been approved and recorded by the Company as a 2021 expense.

16. Pendapatan Diterima di Muka / *16. Deferred Income*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Lukman Leo			*Lukman Leo*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia			*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
Hanafia Cafe			*Hanafia Cafe*
KSPPS Nusa Ummat Sejatera			*KSPPS Nusa Ummat Sejatera*
Target Media Nusantara			*Target Media Nusantara*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Lain-lain			*Others*
Jumlah			***Total***

17. Liabilitas Imbalan Kerja / *17. Employee Benefit Liabilities*

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dicatat berdasarkan Laporan Aktuaria Independen yang dilakukan oleh KKA Azwir Arifin dan Rekan dan PT Sienco Actuaries & Consultants dengan laporan No. 230178/LAA-AAR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan No. 058/LA/IK/KKAICS/II-2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan menggunakan metode *projected unit credit*, dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Liability for employee benefits in December 31, 2022 and 2021 each are recorded based on Independent Actuary's Report done by KKA Azwir Arifin dan Rekan and PT Sienco Actuaries & Consultants in its report No. 230178/LAA-AAR/II/2023 dated February 17, 2023 and No. 058/LA/IK/KKAICS/II-2022 dated February 2, 2022 using the projected unit credit method, with the assumptions as follows:

	2022	2021	
Tingkat diskonto			*Discount rate*
Kenaikan gaji tahunan			*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas			*Mortality rate*
Usia pensiun normal			*Normal retirement age*
Tingkat cacat			*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri			*Resignation rate*
Tahun: Usia (Tahun)			*Years: Age (Years)*
- < 29			*< 29 -*
- 30-39			*30-39 -*
- 40-49			*40-49 -*
- 50-54			*50-54 -*

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris untuk mengestimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Following are the key matters disclosed in the actuarial report to estimate employee benefits obligations as of December 31, 2022 and 2021:

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai kini liabilitas yang didanai			*Present value of funded obligation*

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amount recognised in the statement of profit or loss is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Biaya jasa kini			*Current service cost*
Biaya jasa lalu			*Past service cost*
Biaya bunga			*Interest cost*
Dampak perubahan atribusi sesuai *IFRIC AD*			*Impact of attribution changes as per IFRIC AD*
Pembayaran manfaat			*Benefits payment*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan jangka panjang lainnya			*Remeasurement of the liability for other long term benefits*
Jumlah			***Total***
Penghasilan komprehensif lain			*Other comprehensive income*
Pengukuran kembali atas manfaat imbalan pasti			*Remeasurement of defined benefit liability*

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Detail of liability for employee benefits is as follows:

	2022 Rp	2021 Rp	
Saldo awal			*Beginning balance*
Beban			*Expenses*
Pengukuran kembali atas manfaat imbalan pasti			*Remeasurement of defined benefit liability*
Jumlah			***Total***

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumption is as follows:

	2022			
	Kewajiban imbalan pasti */Defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ ***Changes in assumption***	**Kenaikan asumsi/** ***Increase in assumption***	**Penurunan asumsi/** ***Decrease in assumption***	
Tingkat diskonto				*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan				*Future salary growth rate*

	2021			
	Kewajiban imbalan pasti */Defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/ ***Changes in assumption***	**Kenaikan asumsi/** ***Increase in assumption***	**Penurunan asumsi/** ***Decrease in assumption***	
Tingkat diskonto				*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji di masa depan				*Future salary growth rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas asumsi dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* diakhir periode) telah ditetapkan seperti dalam perhitungan kewajiban yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis is based on a change in assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some assumptions may be corrected. While calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the Projected Unit Credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun dan manfaat pascakerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and post-employement medical benefit is as follows:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *Between 1-2 years*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/*Over 5 years*	
Jumlah imbalan pensiun					*Total pension benefit*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1 sampai 2 tahun/ *Between 1-2 years*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2-5 years*	Lebih dari 5 tahun/*Over 5 years*	
Jumlah imbalan pensiun					*Total pension benefit*

18. Akumulasi Iuran Pensiun / *18. Accumulation of Pension Contribution*

	2022 Rp	2021 Rp	
ASET			***ASSETS***
INVESTASI			***INVESTMENTS***
Saham			*Shares*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Obligasi			*Bonds*
Reksadana			*Mutual funds*
Medium Term Notes (MTN)			*Medium Term Notes (MTN)*
BUKAN INVESTASI			***NON INVESTMENTS***
Kas dan bank			*Cash in banks*
Piutang Iuran			*Contribution receivable*
Piutang hasil investasi			*Investment income receivables*
Piutang bantuan uang muka (BUM) KPR			*BUM KPR receivables*
Piutang pinjaman uang muka (PUM) KPR			*PUM KPR receivables*
Tanah dan bangunan - bersih			*Lands and buildings - net*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
TOTAL ASET			***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Pendapatan diterima di muka			*Unearned revenue*
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain			*Accrued expense and other payables*
Jumlah Liabilitas			***Total Liabilities***
ASET BERSIH			***NET ASSETS***

Sebagai pengelola program Akumulasi Iuran Pensiun, Perseroan telah menyusun laporan keuangan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian

As the manager of the Pension Contribution Accumulation program, the Company has prepared separate financial statements for the Accumulated Pension of Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian

Pertahanan dan Polri (“laporan keuangan AIP”) secara terpisah yang terdiri dari laporan aset bersih pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.02/2019 tanggal 21 November 2019 tentang pelaporan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2017 sejak 1 Januari 2020.

National Police, and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police. (“AIP financial statements”) consisting of a net asset report as of December 31, 2022 and 2021, as well as a statement of changes in net assets, and cash flow statements for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information based on Regulation of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number 170/PMK.02/2019 dated November 21, 2019 concerning the Management of the the Accumulation of Pension Contribution of Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police, which replace the Ministry of Finance Regulation Number 71/PMK.02/2017 efffective starting January 1, 2020.

Laporan keuangan AIP tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi berdasarkan Peraturan Laporan Keuangan AIP yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

AIP's financial statements as of December 31, 2022 and 2021 have been prepared in accordance with accounting policies based on the AIP Financial Reporting Regulations which provide comprehensive accounting basis other than Financial Accounting Standards in Indonesia, and are not intended to be presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Berdasarkan kebijakan akuntansi laporan keuangan AIP tersebut, penilaian dan pengukuran pada tanggal pelaporan laporan keuangan AIP atas aset dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek dan reksa dana, masing-masing dinilai berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir pada tanggal pelaporan di Bursa Efek dan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Based on the AIP financial statement accounting policies, valuation and measurement at the reporting date of AIP's financial statements for assets in the form of shares that traded on the stock exchange and mutual funds, each is valued based on market value using the latest closing price information on the reporting date on the Stock Exchange and based on net asset value.

Dalam laporan keuangan AIP tersebut, jumlah aset AIP pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang di dalamnya termasuk aset dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek dan reksa dana yang dinilai dan diukur berdasarkan kebijakan akuntansi komprehensif tersebut adalah masing-masing sebesar

In the AIP financial statements, total assets of AIP as of December 31, 2022 and 2021, which include assets in the form of shares traded on the stock exchange and mutual funds, which are assessed and measured based on the comprehensive accounting policy are respectively .

a. Saham / *a. Shares*

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Wajar			*Fair Value*
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Indofarma (Persero) Tbk			*PT Indofarma (Persero) Tbk*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT PP Properti Tbk			*PT PP Properti Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk			*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk			*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk			*PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Hanson International Tbk			*PT Hanson International Tbk*
PT Inti Agri Resources Tbk			*PT Inti Agri Resources Tbk*
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk			*PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk*
PT Rimo Catur Lestari Tbk			*PT Rimo Catur Lestari Tbk*
PT Eureka Prima Jakarta Tbk			*PT Eureka Prima Jakarta Tbk*
PT Armidian Karyatama Tbk			*PT Armidian Karyatama Tbk*
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk			*PT Marga Abhinaya Abadi Tbk*
PT Alfa Energi Investama Tbk			*PT Alfa Energi Investama Tbk*
PT Sanurhasta Mitra Tbk			*PT Sanurhasta Mitra Tbk*
PT Pool Advista Finance Tbk			*PT Pool Advista Finance Tbk*
PT Sitara Propertindo Tbk			*PT Sitara Propertindo Tbk*
PT Sinergi Megah Internusa Tbk			*PT Sinergi Megah Internusa Tbk*
PT Bali Towerindo Sentra Tbk			*PT Bali Towerindo Sentra Tbk*
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk			*PT Kawasan Industri Jababeka Tbk*
PT SMR Utama Tbk			*PT SMR Utama Tbk*
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk			*PT Prima Cakrawala Abadi Tbk*
PT Trada Alam Minera Tbk			*PT Trada Alam Minera Tbk*
PT Ayana Land International Tbk			*PT Ayana Land International Tbk*
PT Hartadinata Abadi Tbk			*PT Hartadinata Abadi Tbk*
PT Hotel Mandarine Regency Tbk			*PT Hotel Mandarine Regency Tbk*
PT Meta Epsi Tbk			*PT Meta Epsi Tbk*
PT Bliss Properti Indonesia Tbk			*PT Bliss Properti Indonesia Tbk*
PT Pool Advista Indonesia Tbk			*PT Pool Advista Indonesia Tbk*
PT Pikko Land Development Tbk			*PT Pikko Land Development Tbk*
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk			*PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk*
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk			*PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk*
PT Asuransi Jasa Tania Tbk			*PT Asuransi Jasa Tania Tbk*
PT Bhaktiagung Propertindo Tbk			*PT Bhaktiagung Propertindo Tbk*
PT Steadfast Marine Tbk			*PT Steadfast Marine Tbk*
PT Andira Agro Tbk			*PT Andira Agro Tbk*
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk			*PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk*
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk			*PT Capri Nusa Satu Properti Tbk*
PT Siwani Makmur Tbk			*PT Siwani Makmur Tbk*
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk			*PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk*
PT Cowell Development Tbk			*PT Cowell Development Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk			*PT Bank Central Asia Tbk*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah			***Total***

b. Deposito berjangka / *b. Time deposits*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
Total			***Total***

c. Obligasi / *c. Bonds*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Sukuk Pemerintah			*Government Islamic Securities*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia			*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT Mayora Indah Tbk			*PT Mayora Indah Tbk*
PT Indosat Tbk			*PT Indosat Tbk*
PT XL Axiata Tbk			*PT XL Axiata Tbk*
PT Global Mediacom Tbk			*PT Global Mediacom Tbk*
Jumlah			***Total***

d. *Medium Term Notes (MTN)* / *d. Medium Term Notes (MTN)*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara III			*PT Perkebunan Nusantara III*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Kimia Farma Tbk			*PT Kimia Farma Tbk*
Jumlah			***Total***

e. Reksadana / *e. Mutual funds*

	2022 Rp	2021 Rp	
Nilai Wajar			*Fair Value*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Asia Raya Kapital			*PT Asia Raya Kapital*
PT Henan Putihrai Asset Management			*PT Henan Putihrai Asset Management*
PT Aurora Asset Management			*PT Aurora Asset Management*
PT Treasure Fund Investama			*PT Treasure Fund Investama*
PT Insight Investment Management			*PT Insight Investment Management*
PT Corfina Capital			*PT Corfina Capital*
PT Kresna Asset Management			*PT Kresna Asset Management*
PT Pool Advista Aset Manajemen			*PT Pool Advista Aset Manajemen*
PT Lautandhana Investment Management			*PT Lautandhana Investment Management*
PT Millenium Capital Management			*PT Millenium Capital Management*
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Jumlah			***Total***

Berikut ini adalah rincian saldo efek-efek dalam bentuk saham yang dimiliki secara langsung maupun kepemilikan tidak langsung melalui reksadana:

Below is the detail of balances of marketable securities for shares which are directly owned or indirectly owned through mutual fund:

	2022 Rp	2021 Rp	
Dimiliki langsung			*Directly owned*
Dimiliki melalui reksadana			*Owned through mutual fund*
Jumlah			***Total***

f. Kas di bank / *f. Cash in banks*

	2022 Rp	2021 Rp	
Bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Bumi Artha Tbk			*PT Bank Bumi Artha Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Pihak Berelasi:			*Related Party:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah			***Total***

g. Piutang Hasil Investasi / *g. Investment Income Receivables*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Obligasi			*Bonds*
Surat Berharga Negara			*Government Bonds*
Sukuk Pemerintah			*Government Islamic Bonds*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Deposito Berjangka			*Time Deposit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
Medium Term Notes			*Medium Term Notes*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)			*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Kimia Farma Tbk			*PT Kimia Farma Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Obligasi			*Bonds*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia			*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT XL Axiata			*PT XL Axiata*
PT Mayora Indah			*PT Mayora Indah*
PT Global Mediacom			*PT Global Mediacom*
PT Indosat Tbk			*PT Indosat Tbk*
Jumlah			***Total***

h. Piutang Bantuan Uang Muka-KPR / *h. Bantuan Uang Muka-KPR Receivable*

Piutang BUM KPR merupakan dana pensiun yang digunakan untuk membantu Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) (dahulu bernama Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)) dalam

BUM KPR receivable is pension fund used to assist Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) (formerly Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)) to build special program houses which is derived

rangka pembangunan rumah dengan program khusus yang berasal pengembangan investasi AIP dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Nilai Piutang BUM KPR pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar dan

from investment yield of AIP since from 2001 to 2008. BUM KPR receivable as of December 31, 2022 and 2021 is amounting to , respectively.

i. Piutang Pinjaman Uang Muka-KPR

Piutang PUM KPR merupakan pinjaman uang muka diberikan kepada peserta aktif yang berhak untuk kredit pemilikan rumah, pembelian rumah secara mandiri, dan pembangunan dilahan milik sendiri. Dana PUM sebesar 10% dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Nilai Piutang PUM KPR pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar .

i. Pinjaman Uang Muka-KPR Receivable

PUM KPR receivable is a loan advance to active members who are entitled to home ownership credit, the purchase of their house, and to fund the construction of a land they own. PUM funds allocated 10% of investment income after deducting the annual investment cost. PUM KPR receivable as of December 31, 2022 and 2021 amounted to , respectively.

j. Piutang lain-lain

j. Other receivables

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Piutang kontribusi pembayaran pensiun pe pemerintah			*Receivable contributions for pension payments government*
Piutang pendapatan pengelolaan kepesertaan pensiun:			*Receivable income for pension participaion:*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Piutang pendapatan pengelolaan kepesertaan pensiun:			*Receivable income for pension participaion:*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank Bumi Arta Tbk			*PT Bank Bumi Arta Tbk*
Lain-lain			*Others*
Piutang program THT			*THT program receivables*
Klaim dalam proses			*Claim on process*
Jumlah			***Total***

Piutang kontribusi pembayaran pensiun merupakan piutang kepada Pemerintah atas penalangan pembayaran uang pensiun untuk bulan Januari tahun 2023 dan 2022. Penalangan uang pensiun per 31 Desember 2022 menggunakan dana pinjaman pencairan aset investasi, sedangkan penalangan uang pensiun per 31 Desember 2021 menggunakan dana pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pencairan aset investasi.

Pension contribution receivables are receivables to the Government for the distribution of pension payments for January 2023 and 2022. The distribution of pensions as of December 31, 2022 uses disbursement of investment assets, while the pension increase as December 31, 2021 uses loan funds from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and disbursement of investment assets.

k. Tanah dan bangunan - bersih / *k. Lands and buildings - net*

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additional* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Tanah						*Land*
Bangunan kantor						*Buildings*
Kendaraan kantor						*Office vehicles*
Peralatan kantor						*Office equipments*
Perabot kantor						*Office furnitureand fixtures*
Perlengkapan lain-lain						*Other inventories*
Perlengkapan kantor						*Office supplies*
Komputer dan perangkat keras						*Computer and hardware*
Akumulasi penyusutan:						***Acuumulated depreciation:***
Bangunan kantor						*Buildings*
Kendaraan kantor						*Office vehicles*
Peralatan kantor						*Office equipments*
Perabot kantor						*Office furnitureand fixtures*
Perlengkapan lain-lain						*Other inventories*
Perlengkapan kantor						*Office supplies*
Komputer dan perangkat keras						*Computer and hardware*
Nilai buku bersih						***Net book value***

	2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additional* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Revaluasi/ *Revaluation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga perolehan:						***Acquisition cost:***
Tanah						*Land*
Bangunan kantor						*Buildings*
Kendaraan kantor						*Office vehicles*
Peralatan kantor						*Office equipments*
Perabot kantor						*Office furnitureand fixtures*
Perlengkapan lain-lain						*Other inventories*
Perlengkapan kantor						*Office supplies*
Komputer dan perangkat keras						*Computer and hardware*
Akumulasi penyusutan:						***Acuumulated depreciation:***
Bangunan kantor						*Buildings*
Kendaraan kantor						*Office vehicles*
Peralatan kantor						*Office equipments*
Perabot kantor						*Office furnitureand fixtures*
Perlengkapan lain-lain						*Other inventories*
Perlengkapan kantor						*Office supplies*
Komputer dan perangkat keras						*Computer and hardware*
Nilai buku bersih						***Net book value***

l. Pendapatan Diterima di Muka / *l. Unearned Revenue*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
Yayasan Increase Foundation			*Yayasan Increase Foundation*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Ny. Sri Mumpuni			*Mrs. Sri Mumpuni*
Jumlah			***Total***

m. Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain

m. Accrued expense and other payables

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Utang pajak pemerintah			*Taxes payable government*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Pengelolaan investasi iuran AIP			*Managing investment of AIP program*
Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)			*Return The Value of Cash Pension (NTIP)*
Liabilitas biaya kustodi			*Custody fee payable*
Pinjaman pembayaran pensiun			*Pension payment loan*
Liabilitas biaya bunga			*Interest fee payable*
Lain-lain			*Others*
Jumlah			***Total***

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.02/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2017 tanggal 5 Juni 2017 sejak 1 Januari 2020, Perseroan sebagai pengelola program wajib membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri tersebut.

Based on the Ministry of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 170/PMK.02/2019 dated November 21, 2019 concerning the Reports on the Management of the Accumulation of the Pension Contribution of Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police which replace the Ministry of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 71/PMK.02/2017 dated June 5, 2017 starting January 1, 2020. the Company, as the administrator of the accumulation of pension contributions is obligated to prepare regular reports in accordance with the provisions of this Ministrial Regulation.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terdapat klausul atau ketentuan khusus yang memfasilitasi Kementerian Keuangan untuk menarik dana setiap saat. Menurut peraturan tersebut, akumulasi iuran pensiun, hanya dapat digunakan untuk pembayaran manfaat bagi para anggotanya (Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Based on the Ministry of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 52/PMK.02/2021 concerning the Management of the Accumulation of the Pension Contribution of Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police, there is no specific clause or condition that facilitates the Ministry of Finance to withdraw the fund anytime. According to the regulation, accumulated pension contribution, can only be used for benefit payment for the members (Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police).

Pinjaman pembayaran pensiun per 31 Desember 2021 merupakan pinjaman ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas talangan pembayaran uang pensiun bulan Januari 2022.

The pension payment loan as of December 31, 2021 is a loan to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for the bailout of pension payments in January 2022.

19. Laporan Perubahan Aset Bersih / *19. Statement of Changes in Net Asset*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan			***Income***
Penghasilan Investasi			*Investment Income*
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Bunga obligasi:			*Bonds interest:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Sukuk Pemerintah			*Government Islamic Securities*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Bunga deposito berjangka:			*Time deposits interests:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur*
Bunga *Medium Term Notes* (MTN):			*Medium Term Notes (MTN) interests:*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)			*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Kimia Farma (Persero)			*PT Kimia Farma (Persero)*
Dividen saham:			*Dividend shares:*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk			*PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang Tbk			*PT Aneka Tambang Tbk*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan			***Income***
Penghasilan Investasi			*Investment Income*
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Peningkatan (penurunan) nilai saham:			*Increasi (decrease) in shares value:*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk			*PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk			*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT PP Properti Tbk			*PT PP Properti Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Indofarma (Persero) Tbk			*PT Indofarma (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk			*PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Penurunan nilai obligasi:			*Decrease in bonds value:*
Surat Berharga Negara			*Government Bonds*
Laba pelepasan investasi - saham:			*Gain on investment - shares:*
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk			*PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Aneka Tambang Tbk			*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Laba pelepasan investasi - obligasi:			*Gain on investment - bonds:*
Surat Berharga Negara			*Government Bonds*
Sukuk Pemerintah			*Government Islamic Securities*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-		*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
Laba pelepasan investasi - *Medium Term Notes* (MTN):			*Gain on investment - Medium Term Notes (MTN):*
PT Kimia Farma Tbk			*PT Kimia Farma Tbk*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
Jumlah pihak berelasi			*Total related parties*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Bunga obligasi			*Bonds interests*
Dividen saham			*Dividend shares*
Peningkatan nilai investasi:			*Increase on investment:*
- Saham			*Shares -*
Laba pelepasan investasi:			*Gain on investment:*
- Saham			*Shares -*
- Obligasi			*Bonds -*
- Reksa Dana			*Mutual Funds -*
Pendapatan investasi lain:			*Others investment income:*
Laba selisih kurs			*Gain on foreign exchange*
Jumlah pihak ketiga			*Total related parties*
Jumlah Penghasilan Investasi			***Total Investment Income***

	2022 Rp	2021 Rp	
Penghasilan Nilai Investasi			***Increase on Investment***
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Peningkatan (penurunan) nilai investasi - Obligasi:			*Increase (decrease) on investment - Bonds:*
Surat Berharga Negara			*Government Bonds*
Sukuk Pemerintah			*Government Islamic Securities*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
PT Jasa Marga (Persero) Tbk			*PT Jasa Marga (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			*PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*
Penurunan nilai investasi - Saham:			*Decrease on investment - Share:*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
Peningkatan (penurunan) nilai investasi - *Medium Term Notes* (MTN):			*Increase (decrease) on investment - Medium Term Notes (MTN):*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)			*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
Pendapatan di luar investasi			*Non-investment income*
- Jasa giro:			*Interest from current account -*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
- Pendapatan sewa gedung			*Rent of building income -*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
- Imbal jasa pengelolaan pembayaran pensiun			*Pension Management -*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
- Pengembalian BOP Pemerintah			*Return BOP - Government*
- Iuran jatuh tempo Iuran peserta			*Contribution due - Participant Contribution*
Jumlah pihak berelasi			*Total related parties*

	2022 Rp	2021 Rp	
Penghasilan Nilai Investasi			***Increase on Investment***
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Peningkatan (penurunan) nilai investasi:			*Increase (decrease) on investment:*
- Obligasi korporasi			*Coorporate bonds -*
- Reksadana			*Mutual funds -*
- Saham			*Shares -*
Pendapatan di luar investasi:			*Non-investment income:*
- Jasa giro			*Interest from current account -*
- Pendapatan sewa gedung			*Rent of building income*
- Pendapatan hasil lelang			*Auction income -*
- Imbal jasa pengelolaan pembayaran pensiun			*Pension management service fee -*
- Lain-lain			*Others -*
Jumlah pihak ketiga			*Total third parties*
Jumlah Penghasilan Nilai Investasi			***Total Increase on Investment***
Beban			***Expenses***
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
Investasi			*Investment*
Manfaat Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)			*Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)*
Operasional			*Operational*
Lain-lain			*Others*
Jumlah beban			***Total expenses***
Peningkatan Dana Bersih			***Increase in Net Assets***
Dana bersih pada awal tahun			*Net assets at the beginning of the year*
Revaluasi aset tetap			*Fixed assets revaluation*
Dana Bersih pada Akhir Tahun			***Net Assets at the end of the Year***

20. Aset Pembayaran Pensiun / *20. Pension Payment Assets*

	2022 Rp	2021 Rp	
Bank			*Cash in banks*
Titipan uang pensiun ke Mitra Bayar			*Pension fund deposit to Payment Partners*
Piutang dari Pemerintah			*Receivable from Government*
Jumlah			***Total***

a. Bank / *a. Cash in banks*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Bumi Arta Tbk			*PT Bank Bumi Arta Tbk*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
Jumlah			***Total***

b. Titipan uang pensiun ke mitra bayar / *b. Pension fund deposit to payment partners*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Bank Neo Commerce Tbk			*PT Bank Neo Commerce Tbk*
PT Bank BTPN Tbk			*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk			*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk			*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank Bumi Arta Tbk			*PT Bank Bumi Arta Tbk*
Jumlah			***Total***

c. Piutang dari Pemerintah

Piutang dari pada Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar .

Jumlah piutang kepada Pemerintah per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan piutang atas kekurangan dana estimasi non-daftar pembayaran dan/atau potongan pembayaran pensiun bulan Januari tahun berikutnya.

c. Receivable from Government

Receivable from Government as of December 31, 2022 and 2021 amounted to , respectively.

Receivable to Government as of December 31, 2022 and 2021 representing receivable for deficiency of the estimated non payment lists and/or receivable witholding pension fund in January of the following year.

21. Liabilitas Pembayaran Pensiun / *21. Pension Payment Liabilities*

	2022 Rp	2021 Rp	
Utang pembayaran pensiun			*Pension payment loan*
Kewajiban penyaluran dana pensiun			*Pension fund distribution liabilities*
Liabilitas kepada pemerintah			*Liabilities to government*
Utang BPJS			*Payable to BPJS*
Jumlah			***Total***

a. Utang pembayaran pensiun

Utang ini merupakan pinjaman yang terjadi pada akhir tahun yang diperoleh dalam rangka memenuhi pendanaan untuk pembayaran pensiun bulan Januari, karena penyaluran dana dari Pemerintah menunggu pembiayaannya yang berasal dari APBN tahun berikutnya.

Jumlah utang pembayaran pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021, berasal dari dana akumulasi iuran pensiun, masing-masing sebesar dan

a. Pension payment loan

These loans are occurred each year-end in order to fulfil funding needs for pension payment in January, since Government fund allocation awaits funding from next year's APBN.

Pension payment that come from accumulation of pension contribution, as of 31 December 2022 and 2021 is amounted to and , respectively.

b. Kewajiban penyaluran dana pensiun

Kewajiban penyaluran dana pensiun merupakan saldo uang pensiun yang belum dibayarkan.

b. Pension fund distribution liabilities

Witholding liabilities pension fund represents pension fund balance that has not been paid.

	2022 Rp	2021 Rp	
Daftar pembayaran:			*Payment lists:*
Induk			*Primary*
Susulan			*Suplementary*
Non-daftar pembayaran			*Non-payment list*
Jumlah			***Total***

22. Modal Saham / *22. Share Capital*

Berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, S.H. No.16 tanggal 27 Agustus 2008, modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp500.000 terbagi atas 500.000 saham. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 200.000 saham, atau sejumlah Rp200.000.

Based on Notarial Deed No. 16 dated August 27, 2008 of Muhani Salim, S.H., authorised capital is 500,000 shares at par value of Rp500,000. Share capital that were issued and paid by Government of Indonesia is amounting to 200,000 shares at par value off or a number of Rp200,000.

23. Cadangan Wajib / *23. Statutory Reserves*

Pembentukan cadangan wajib sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 mengenai Perusahaan Terbatas yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2007, yang mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan wajib sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Ketentuan ini berlaku jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The appropriation of legal reserves is in accordance with Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 issued in August 2007. This law requires Indonesian companies to set up legal reserves amounting to 20% of their issued and paid-up share capital. This provision applies if the Company has a positive balance of retained earnings. There is no set period of time over which the amount should be provided.

24. Pendapatan Premi / *24. Premium Income*

	2022 Rp	2021 Rp	
Premi THT:			***THT Premium***
TNI			*TNI*
POLRI			*POLRI*
UPSL			*UPSL*
Premi JKK			***JKK Premium***
TNI			*TNI*
POLRI			*POLRI*
Premi JKm			***JKm Premium***
TNI			*TNI*
POLRI			*POLRI*
Jumlah			***Total***

Pendapatan premi *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) merupakan pendapatan premi berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada PT ASABRI (Persero) senilai Rp4.550.264.

Premium income of Unfunded Past Service Liability (UPSL) represents premium income based on the letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK.02/2022 dated January 30, 2022 regarding the Determination of Unfunded Past Service Liability for THT Program at PT ASABRI (Persero) amounted to Rp4,550,264.

25. Hasil Investasi – Bersih / *25. Investment Income – Net*

	2022 Rp	2021 Rp	
Program THT, JKK, dan JKm			***THT, JKK, and JKm Program***
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Bagi hasil dan keuntungan Penjualan reksadana			*Profit sharing and Capital gain of mutual funds*
Bunga dan penjualan obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN)			*Bonds and Medium Term Notes (MTN) interests and sales*
Bunga deposito berjangka			*Time deposits interests*
Keuntungan penjualan dan dividen saham			*Capital gain and shares dividend*
Bagi hasil dan keuntungan penjualan dana investasi real estate			*Profit sharing and capital gain of real estate investment funds*
Hasil properti investasi			*Income from investment property*
Penurunan milai saham			*Decrease in shares value*
Kenaikan nilai obligasi			*Increase fair value of bonds*
Program JKK			*JKK Program*
Bunga dan penjualan obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN)			*Bonds and Medium Term Notes (MTN) interests and sales*
Bunga deposito berjangka			*Time deposits interests*
Program JKm			*JKm Program*
Bunga dan penjualan obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN)			*Bonds and Medium Term Notes (MTN) interests and sales*
Bunga deposito berjangka			*Time deposits interests*
Jumlah Hasil Investasi			***Total Investment Income***

26. Pendapatan Lain-Lain - Bersih / *26. Other Income – Net*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Imbal jasa pengelolaan investasi			*Investment management fee*
Imbal jasa *flagging*			*Flagging service fee*
Pendapatan sewa gedung			*Rent of building income*
Pendapatan hasil lelang			*Auction income*
Laba (rugi) selisih kurs			*Gain (loss) on foreign exchange*
Jasa giro			*Interest from current account*
Pendapatan pinjaman polis			*Policy loan income*
Pengembalian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP)			*Return of Reimbursement of Pension Operation Cost (BOP)*
Lain-lain			*Others*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program JKK			*JKK Program*
Jasa giro			*Interest from current account*
Lain-lain			*Others*
Program JKm			*JKm Program*
Jasa giro			*Interest from current account*
Lain-lain			*Others*
Jumlah Pendapatan Lain-lain			***Total Investment Income***

Pada bulan Juni 2022, berdasarkan berita acara nomor 1/BA/BOP/DJPb-ASABRI/2022 dan BA/KU.02.01/175-AS/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Perhitungan Selisih Lebih/Kurang Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun Anggaran 2021, Perseroan mengembalikan dana atas penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun (BOP) dari rekening perusahaan program THT ke rekening perusahaan program AIP senilai .

In June 2022, based on the minutes of the event number 1/BA/BOP/DJPb-ASABRI/2022 and BA/KU.02.01/175-AS/VI/2022 dated June 24, 2022 regarding Calculation of the Difference in Operational Costs for Pension Payment Benefits for Fiscal Year 2021, the Company returns the funds for the reimbursement of Pension Implementation Operational Costs for Pension from THT program company account to AIP program company account worth

27. Klaim dan Manfaat / *27. Claims and Benefits*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 31)			*Related Parties (Note 31)*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
Program THT			*THT Program*
Program JKK			*JKK Program*
Program JKm			*JKm Program*
Jumlah			***Total***

Jumlah dan jenis manfaat asuransi yang diterima peserta sejak 1 Juli 2015 ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 tahun 2015, tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Amount and type of insurance benefits received by participants effective since July 1, 2015 are stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 102 Year 2015 regarding Social Insurance for The Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police.

Sejak 30 September 2020, terdapat perubahan jumlah manfaat asuransi Program JKK dan JKm yang diterima oleh peserta sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI/POLRI dan ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Since September 30, 2020, there were changes in insurance benefits on JKK and JKm Program received by participants as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 54 Year 2020 on changes to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 102 Year 2015 regarding Social Insurance for the TNI/POLRI and ASN in the Ministry of Defence and the Indonesian National Police.

28. Penggantian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pensiun / *28. Reimbursement of Pension Operation Cost*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 366/KMK.02/2022 tentang Besaran Biaya Operasional Penyelenggaraan dan Biaya Satuan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT ASABRI (Persero) tahun 2022, penggantian biaya operasional penyelenggaraan pensiun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Peraturan ini berlaku efektif sejak diundangkan pada tanggal 15 September 2022.

Based on the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia number 366/KMK.02/2022 concerning the Amount of Operational Costs for Implementation and Unit Costs of Pension Benefit Payments Implemented by PT ASABRI (Persero) year 2022, reimbursement of operational costs for implementing pensions using the State Revenue and Expenditure Budget for the 2022 fiscal year. This regulation is effective from the date it was promulgated September 15, 2022.

Jumlah Penggantian BOP Pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar dan

Total reimbursement of Pension BOP as of December 31, 2022 and 2021 respectively amounted to dan

29. Beban Umum dan Administrasi / *29. General and Administrative Expenses*

	2022 Rp	2021 Rp	
Program THT			*THT Program*
Gaji dan tunjangan pegawai			*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi			*General and administrative*
Penyusutan dan amortisasi			*Depreciation and amortisation*
Pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor			*Buildings and vehicle maintenance*
Program JKK			*JKK Program*
Gaji dan tunjangan pegawai			*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi			*General and administrative*
Pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor			*Buildings and vehicle maintenance*
Program JKm			*JKm Program*
Gaji dan tunjangan pegawai			*Salaries and allowances*
Umum dan administrasi			*General and administrative*
Pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor			*Buildings and vehicle maintenance*
Jumlah			***Total***

Pada tahun 2022, Perseroan menerapkan kebijakan alokasi biaya umum dan administrasi ke masing-masing program.

In 2022, the Company applied new policy for allocation of general and administrative expenses to each programs.

30. Penghasilan Komprehensif Lain / *30. Other Comprehensive Income*

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penyesuaian/ *Adjustment* Rp	Reklasifikasi ke Laba (Rugi)/ *Reclassification to Profit (Loss)* Rp	Naik (Turun) dari Perubahan Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) Changes of Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain						***Fair Value through Other Comprehensive Income***
Pihak Berelasi:						*Related Parties:*
Program THT						*THT Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:						*Bonds*
Surat Berharga Negara						*Indonesian Bonds*
Obligasi Negara Indonesia (USD)						*Obligasi Negara Indonesia (USD)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk						*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Efek Pajak Terkait						*Related Tax Effect*
Kontrak Investasi Kolektif						*Collective Investment Contract*
Efek Beragun Aset:						*Asset Backed Securities:*
PT PLN (Persero)						*PT PLN (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk						*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:						*Increase from Fair Value:*
Saham:						*Shares:*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk						*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
Reksadana:						*Mutual funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bahana TCW Investment Management						*PT Bahana TCW Investment Management*
Dana Investasi Infrastruktur:						*Infrastructure Investment Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Program JKK						*JKK Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:						*Bonds*
Surat Berharga Negara						*Indonesian Bonds*
Efek Pajak Terkait						*Related Tax Effect*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:						*Increase from Fair Value:*
Dana Investasi Infrastruktur:						*Infrastructure Investment Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Program JKm						*JKm Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:						*Bonds*
Surat Berharga Negara						*Indonesian Bonds*
Efek Pajak Terkait						*Related Tax Effect*
Jumlah Pihak Berelasi						***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:						*Third Parties:*
Program THT						*THT Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:						*Bonds*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:						*Increase from Fair Value:*
Saham						*Shares*
Reksadana						*Mutual funds*
Dana Investasi Real Estate						*Real Estate Investment Funds*
Program JKK						*JKK Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi						*Bonds*
Program JKm						*JKm Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:						*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi						*Bonds*
Jumlah Pihak Ketiga						***Total Third Parties***
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain						***Total Other Comprehensive Income Current Year***

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* **Rp**	**Reklasifikasi ke Laba (Rugi)/ *Reclassification to Profit (Loss)*** **Rp**	**Naik (Turun) dari Perubahan Nilai Wajar/ *Increase (Decrease) Changes of Fair Value*** **Rp**	**Saldo Akhir/ *Ending Balance*** **Rp**	
Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain					***Fair Value through Other Comprehensive Income***
Pihak Berelasi:					*Related Parties:*
Program THT					*THT Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:					*Bonds*
Surat Berharga Negara					*Indonesian Bonds*
Obligasi Negara Indonesia (USD)					*Obligasi Negara Indonesia (USD)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk					*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Efek Pajak Terkait					*Related Tax Effect*
Kontrak Investasi Kolektif					*Collective Investment Contract*
Efek Beragun Aset:					*Asset Backed Securities:*
PT PLN (Persero)					*PT PLN (Persero)*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk					*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:					*Increase from Fair Value:*
Saham:					*Shares:*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk					*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
Reksadana:					*Mutual funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bahana TCW Investment Management					*PT Bahana TCW Investment Management*
Dana Investasi Infrastruktur:					*Infrastructure Investment Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Program JKK					*JKK Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:					*Bonds*
Surat Berharga Negara					*Indonesian Bonds*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:					*Increase from Fair Value:*
Dana Investasi Infrastruktur:					*Infrastructure Investment Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Program JKm					*JKm Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:					*Bonds*
Surat Berharga Negara					*Indonesian Bonds*
Jumlah Pihak Berelasi					***Total Related Parties***
Pihak Ketiga:					*Third Parties:*
Program THT					*THT Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi:					*Bonds*
Medium Term Notes (MTN)					*Medium Term Notes (MTN)*
Kenaikan dari Perubahan Nilai Wajar:					*Increase from Fair Value:*
Saham					*Shares*
Reksadana					*Mutual funds*
Dana Investasi Real Estate					*Real Estate Investment Funds*
Program JKK					*JKK Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi					*Bonds*
Program JKm					*JKm Program*
Aset Keuangan yang Jatuh Tempo atau Dijual:					*Mature or Sold Financial Asset:*
Obligasi					*Bonds*
Jumlah Pihak Ketiga					***Total Third Parties***
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain					***Total Other Comprehensive Income Current Year***

31. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi / *31. Related Parties Balances and Transactions*

a. Sifat dan Hubungan dengan Plhak Berelasi / *a. Nature of relationship with Related Parties*

Pihak Berelasi/*Related Party*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Sifat Transaksi/*Nature of Transaction*
Pemerintah Negara Republik Indonesia/ *Government of The Republic of Indonesia*	Pemegang saham/*Shareholder* Pemberi kerja/*Employer*	Piutang dan iuran premi/*Premium receivable and income* Obligasi pemerintah/*Government bonds*
Badan Usaha Milik Negara/ *State-owned enterprises*	Agen pembayaran manfaat klaim dan pensiun/*Claims and pension payment agent* Entitas sepengendali/*Entities under common control*	Rekening giro/*Checking accounts* Deposito berjangka/*Time deposits* Efek-efek/*Marketable securities*
Badan Usaha Milik Daerah/ *Local government-owned enterprises*	Agen pembayaran/*Payment agent* Entitas sepengendali/*Entities under common control*	Rekening giro/*Checking accounts* Deposito berjangka/*Time deposits* Efek-efek/*Marketable securities*
Manajemen kunci/*Key management*	Dewan Komisaris/*Board of Committees* Dewan Direksi/*Board of Directors* Karyawan Utama/*Key employees*	Beban gaji/*Salary* Kompensasi dan remunerasi/*Compensation and remuneration* Imbalan kerja/*Employee benefit*

Jumlah kompensasi dan remunerasi untuk manajemen kunci untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar dan

Total compensation and remuneration for key management for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to and .

b. Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi / *b. Significant balances and transactions with related parties*

	2022 Rp	2021 Rp	
Aset:			***Assets:***
Kas di Bank (Catatan 4)			***Cash in Banks (Note 4)***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKK			*JKK Program*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*

	2022 Rp	2021 Rp	
Aset:			***Assets:***
Kas di Bank (Catatan 4)			***Cash in Banks (Note 4)***
Rupiah			*Rupiah*
Program JKK			*JKK Program*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKm			*JKm Program*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Mata Uang Asing			*Foreign Currency*
Program THT			*THT Program*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah Kas di Bank			***Total Cash in Banks***
Deposito Berjangka (Catatan 5)			***Time Deposit (Note 5)***
Program THT			*THT Program*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKK			*JKK Program*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKm			*JKm Program*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Jumlah Deposito Berjangka			***Total Time Deposit***

	2022 Rp	2021 Rp	
Aset:			***Assets:***
Efek-Efek (Catatan 6)			***Marketable Securities (Note 6)***
Saham			***Shares***
Nilai Wajar melalui Laba Rugi			***Fair Value through Profit or Loss***
Program THT			*THT Program*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Indofarma (Persero) Tbk			*PT Indofarma (Persero) Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk			*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT PP Presisi Tbk			*PT PP Presisi Tbk*
PT PP (Persero) Tbk			*PT PP (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk			*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk			*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Saham			***Shares***
Tersedia untuk Dijual			***Available for Sale***
Program THT			*THT Program*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Jumlah Saham			***Total Shares***
Obligasi			***Bonds***
Tersedia untuk dijual			***Available for sale***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKK			*JKK Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKm			*JKm Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Mata uang asing			*Foreign currency*
Program THT			*THT Program*
Obligasi Negara Indonesia (USD)			*Indonesian Bonds (USD)*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Obligasi			***Bonds***
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			***Held to Maturity***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Program JKK			*JKK Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Sub Jumlah			*Sub Total*
Jumlah Obligasi			***Total Bonds***
Medium Term Note (MTN)			***Medium Term Note (MTN)***
Tersedia untuk Dijual			***Available for Sale***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara II			*PT Perkebunan Nusantara II*
Sub Jumlah			*Sub Total*

	2022 Rp	2021 Rp	
Aset:			***Assets:***
Efek-Efek (Catatan 6)			***Marketable Securities (Note 6)***
Medium Term Note (MTN)			***Medium Term Note (MTN)***
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo			***Held to Maturity***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT HK Realtindo			*PT HK Realtindo*
Jumlah			*Total*
Jumlah *Medium Term Note* (MTN)			***Total Medium Term Note (MTN)***
Reksadana			***Mutual Funds***
Tersedia untuk dijual			***Available for sale***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Mandiri Manajer Investasi			*PT Mandiri Manajer Investasi*
PT Bahana TCW Investment Management			*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Danareksa Investment Management*)			*PT Danareksa Investment Management*)*
Jumlah Reksadana			***Total Mutual Funds***
Dana Investasi Infrastruktur			***Infrastructure Investment Funds***
Tersedia untuk dijual			***Available for sale***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Mandiri Sekuritas			*PT Mandiri Sekuritas*
Program JKK			*JKK Program*
PT Mandiri Sekuritas			*PT Mandiri Sekuritas*
Jumlah Dana Investasi Infrastruktur			***Total Infrastructure Investment Funds***
Kontrak Investasi Kolektif			***Collective Investment Contract***
Efek Beragunan Aset			***Asset Backed Securities***
Tersedia untuk dijual			***Available for sale***
Rupiah			*Rupiah*
Program THT			*THT Program*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk			*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT PLN (Persero)			*PT PLN (Persero)*
Jumlah Kontrak Investasi Kolektif			***Total Collective Investment Contract***
Efek Beragunan Aset			***Asset Backed Securities***
Jumlah Efek-efek			***Total Markatable Securities***
Piutang Lain-lain (Catatan 7)			***Other Receivables (Note 7)***
Program THT			*THT Program*
Piutang Premi			*Premium Receivables*
Piutang Premi UPSL			*Premium UPSL Receivables*
Piutang Bunga Deposito Berjangka:			*Interest Receivables of Time Deposits:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
Piutang Bunga Obligasi:			*Interest Receivables of Bonds:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
Obligasi Negara Indonesia (USD)			*Indonesian Bonds (USD)*
Piutang Bunga			*Interest Receivables of*
Medium Term Notes (MTN):			*Medium Term Notes (MTN):*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara II			*PT Perkebunan Nusantara II*
PT HK Realtindo			*PT HK Realtindo*
Kontrak Investasi Kolektif			*Collective Investment Contract*
Efek Beragun Aset:			*Asset Backed Securities:*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk			*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT PLN (Persero)			*PT PLN (Persero)*
Piutang Sewa Gedung:			*Receivables from Rent of Building:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah			*Total*

*) Pada tahun 2022, PT Danareksa Investment Mangement masuk pihak ketiga.

**) In 2022, PT Danareksa Investment Management will enter a third party.*

	2022 Rp	2021 Rp	
Aset:			***Assets:***
Piutang Lain-lain (Catatan 7)			***Other Receivables (Note 7)***
Program JKK			*JKK Program*
Piutang Premi			*Premium Receivables*
Piutang Bunga Deposito Berjangka:			*Interest Receivables of Time Deposits:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Piutang Bunga Obligasi:			*Interest Receivables of Bonds:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Piutang Pendapatan Fee Taspen Life:			*Receivables from Fee of Taspen Life:*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Jumlah			*Total*
Program JKm			*JKm Program*
Piutang Premi			*Premium Receivables*
Piutang Bunga Deposito Berjangka:			*Interest Receivables of Time Deposits:*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Piutang Bunga Obligasi:			*Interest Receivables of Bonds:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Piutang Pendapatan Fee Taspen Life:			*Receivables from Fee of Taspen Life:*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Jumlah			*Total*
Jumlah Piutang Lain-lain			***Total Other Receivables***
Aset Lain-lain (Catatan 8)			***Other Assets (Note 8)***
Program THT			*THT Program*
Piutang Jasa *Flagging* :			*Flagging Services Receivables:*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
Jumlah Piutang Lain-lain			***Total Other Receivables***
Jumlah aset dengan pihak berelasi			***Total assets with related parties***
Persentase terhadap jumlah aset			*Percentage of total assets*

	2022 Rp	2021 Rp	
Liabilitas:			***Liabilities:***
Utang Klaim (Catatan 12.c)			***Claim Payables (Note 12.c)***
Program JKK			*JKK Program*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Program JKm			*JKm Program*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Jumlah Utang Investasi			***Total Investment Payables***
Utang Investasi (Catatan 14)			***Investment Payables (Note 14)***
Program THT			*THT Program*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Jumlah Utang Investasi			***Total Investment Payables***
Pendapatan Diterima di Muka (Catatan 16)			***Deffered Income (Note 16)***
Program THT			*THT Program*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Selular			*PT Telekomunikasi Selular*
Program JKK			*JKK Program*
Pemerintah			*Government*
Program JKm			*JKm Program*
Pemerintah			*Government*
Jumlah Pendapatan Diterima di Muka			***Total Deffered Income***
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi			***Total liabilities with related parties***
Persentase terhadap jumlah liabilitas			*Percentage of total liabilities*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan:			***Revenues:***
Hasil investasi - Bersih (Catatan 25)			***Investment Income - Net (Note 26)***
Program THT			*THT Program*
Keuntungan Penjualan dan Dividen Saham:			*Capital Gain and Shares Dividend:*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk			*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
PT PP Presisi Tbk			*PT PP Presisi Tbk*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk			*PT Kimia Farma (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Indofarma (Persero) Tbk			*PT Indofarma (Persero) Tbk*
Bagi Hasil dan Keuntungan Penjualan Reksa Dana:			*Profit Sharing and Capital Gain of Mutual Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN:			*Bonds and MTN Interests and Sales:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Obligasi Negara Indonesia (USD)			*Obligasi Negara Indonesia (USD)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT HK Realtindo			*PT HK Realtindo*
PT Perkebunan Nusantara II			*PT Perkebunan Nusantara II*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)*
Bunga dan Penjualan KIK EBA:			*KIK EBA Interests and Sales:*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk			*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT PLN (Persero)			*PT PLN (Persero)*

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan:			***Revenues:***
Hasil investasi - Bersih (Catatan 25)			***Investment Income - Net (Note 26)***
Program THT			*THT Program*
Bunga Deposito Berjangka:			*Time Deposits Interests:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
Hasil Properti Investasi			*Income from Investment Property*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk			*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Kenaikan (Penurunan) Nilai Saham:			*Increase (Decrease) Shares Value:*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk			*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk			*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT PP (Persero) Tbk			*PT PP (Persero) Tbk*
PT PP Presisi Tbk			*PT PP Presisi Tbk*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk			*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk			*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk			*PT Semen Baturaja (Persero) Tbk*
PT Pelat Timah Nusantara Tbk			*PT Pelat Timah Nusantara Tbk*
PT Indofarma (Persero) Tbk			*PT Indofarma (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Kenaikan (Penurunan) Nilai Obligasi:			*Bonds Market Price:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Program JKK			*JKK Program*
Bagi Hasil dan Keuntungan Penjualan Reksa Dana:			*Profit Sharing and Capital Gain of Mutual Funds:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN:			*Bonds and MTN Interests and Sales:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Bunga Deposito Berjangka:			*Time Deposits Interests:*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Program JKm			*JKm Program*
Bunga dan Penjualan Obligasi dan MTN:			*Bonds and MTN Interests and Sales:*
Surat Berharga Negara			*Indonesian Bonds*
Bunga Deposito Berjangka:			*Time Deposits Interests:*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah Hasil Investasi			***Total Investment Income***

	2022 Rp	2021 Rp	
Pendapatan:			***Revenues:***
Pendapatan lain-lain (Catatan 26)			***Others Income - Net (Note 26)***
Program THT			*THT Program*
Pendapatan Sewa Gedung:			*Rent of Building Income:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Telekomunikasi Selular			*PT Telekomunikasi Selular*
Jasa Giro:			*Interest from Current Account:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
Imbal Jasa Flagging:			*Flagging Service Fee:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Pos Indonesia (Persero)			*PT Pos Indonesia (Persero)*
Program JKK			*JKK Program*
Jasa Giro:			*Interest from Current Account:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
Pendapatan Fee Taspen Life:			*Taspen Life Fee:*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Program JKm			*JKm Program*
Jasa Giro:			*Interest from Current Account:*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen			*PT Bank Mandiri Taspen*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur			*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pendapatan Fee Taspen Life:			*Taspen Life Fee:*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Jumlah Pendapatan Lain-lain			***Total Other Income***
Jumlah pendapatan dengan pihak berelasi			***Total income with related parties***
Persentase terhadap jumlah pendapatan			*Percentage of total income*

	2022 Rp	2021 Rp	
Beban:			***Expenses:***
Klaim dan Manfaat (Catatan 27)			***Claims and Benefits (Note 27)***
Program JKK			*JKK Program*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Program JKm			*JKm Program*
PT Asuransi Jiwa Taspen			*PT Asuransi Jiwa Taspen*
Jumlah Klaim dan Manfaat			***Total Claims and Benefits***
Jumlah beban dengan pihak berelasi			***Total expenses with related parties***
Persentase terhadap jumlah beban			*Percentage of total expenses*

32. Manajemen Risiko Keuangan / *32. Financial Risks Management*

Aktivitas usaha Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko tersebut, mengelola posisi risiko, dan menentukan alokasi modal. Direksi secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar dan praktik pasar terbaik.

The Company's business activities expose it to a variety of financial risks such as market risks (include foreign exchange and interest rate risks), credit risk, and liquidity risk. The core functions of the Company's risk management are to identify all key risks for the Company, measure these risks, manage the risk positions, and determine capital allocations. The Directors regularly review its risk management policies and systems to reflect changes in market, and best market practice.

Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perseroan. Perseroan mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

The Company's aim is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimise potential adverse effects on the Company's financial performance. The Company defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors.

Manajemen risiko dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Direksi memberikan kebijakan tertulis atas manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis yang mencakup area khusus, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, dan pemanfaatan instrumen keuangan. Risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh Perseroan mengandung risiko keuangan, termasuk juga risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko permodalan.

Risk management is carried out under policies approved by Directors. The Directors provides written principles for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and use of financial instrument. The risk arising from financial instruments to which the Company is exposed are financial risks, which includes market risk, credit risk and liquidity risk, and capital risk.

a. Risiko pasar

Perseroan menghadapi eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atas arus kas masa depan atas suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar. Risiko pasar

a. Market risk

The Company is aware about exposure to market risks which is the risks that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risks arise from open

berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk-produk suku bunga, mata uang dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, nilai tukar, dan produk ekuitas.

positions in interest rate, currency and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, foreign exchange rates, and equity products.

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing
Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang pada posisi keuangan dan arus kas. Direksi menetapkan *limit* tingkat eksposur berdasarkan mata uang yang dimonitor secara berkala.

(i) Foreign exchange risk
The Company takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing foreign exchange rates on its financial position and cash flows. The Directors set limits on the level of exposure by currency, which are monitored periodically.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing. Seluruh eksposur adalah dalam Dolar AS, tidak terdapat eksposur risiko mata uang asing selain dalam Dolar AS.

The table below summarises the Company's financial assets and liabilities exposure to foreign exchange rate risk. All exposure is to US Dollar, there is no foreign exchange exposure other than US Dollar.

	2022 **Rp**	**2021** **Rp**	
Aset:			*Assets:*
Kas dan bank			*Cash on hand and in banks*
Efek-efek			*Marketable securities*
Jumlah aset			***Total assets***

Sensitivitas Perseroan terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi Posisi Devisa Neto yang ditranslasikan ke dalam mata uang asing Dolar AS. Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba sebelum pajak Perseroan atas perubahan nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Company's sensitivity on foreign currencies is determined using the Net Open Position information that translated into USD. The table below shows the sensitivity of the Company's income before tax to movement of foreign exchange rates on December 31, 2022 and 2021.

	Pengaruh pada laba rugi/ ***Impact on profit or loss***		
	Peningkatan/ ***Increase by 5%***	**Peningkatan/** ***Increase by 5%***	
31 Desember 2022			*December 31, 2022*

	Pengaruh pada laba rugi/ ***Impact on profit or loss***		
	Peningkatan/ ***Increase by 5%***	**Peningkatan/** ***Increase by 5%***	
31 Desember 2021			*December 31, 2021*

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan.

The projection assumes that all other variable are held constant and assumes a constant reporting date position.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko perubahan nilai aset dan liabilitas yang disebabkan fluktuasi suku bunga pasar.

Perseroan menghadapi risiko suku bunga, dimana penurunan suku bunga pasar menyebabkan nilai liabilitias (LMPMD) akan meningkat sementara atas nilai aset investasi yang didominasi instrumen investasi atau surat hutang berbunga tetap.

Manajemen melakukan evaluasi untuk meminimalkan dampak negatif atas fluktuasi suku bunga. Penggunaan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan diharapkan dalam meminimalkan risiko suku bunga pada liabilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan adalah tidak dikenakan bunga atau berbunga tetap, sehingga tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk of changes in the value of assets and liabilities caused by fluctuations in market interest rates.

The Company faces interest rate risk, where a decrease in market interest rates causes the value of liabilitias (LMPMD) to temporarily increase the value of investment assets dominated by investment instruments or fixed-interest bonds.

Management conducts evaluations to minimize the negative impact of interest rate fluctuations. The use of actuarial interest set by the Minister of Finance is expected in minimizing the risk of interest rates on liabilities.

As at December 31, 2022 and 2021, the Company has no significant interest rate risk. Most of the Company's financial assets and financial liabilities are non interest bearing or fixed interest rate, thus no significant exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterpart* Perseroan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Perseroan juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Perseroan; sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi, seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti objektif atas penurunan nilai).

b. Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Company's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Company. The Company is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

Credit risk is the one of the largest risk for the Company's business; management therefore carefully manages its exposure to credit risk. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties.

Impairment allowances (if any) are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Perseroan terhadap risiko kredit untuk aset keuangan:

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

The following table presents the Company's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	2022 Rp	2021 Rp	
Kas dan bank			*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Efek-efek			*Marketable securities*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Aset lain-lain*)			*Other assets*)*
Jumlah			***Total***

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman dan piutang atas properti terbengkalai

*Other assets consist of loan receivables and *) receivable of abandoned property*

i) Sektor geografis
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan tidak memiliki risiko kredit (sektor geografis) yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Perseroan ditempatkan di Pulau Jawa.

i) Geographic sectors
As at December 31, 2022 and 2021, the Company has no significant credit risk (geographic sectors). Most of the Company's financial assets and financial liabilities are placed in Java.

ii) Sektor industri
Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Perseroan terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan berdasarkan sektor industri:

ii) Industry sectors
The following table presents the Company's maximum exposure to credit risk of financial asset based on industry sector:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Pemerintah/ *Government* Rp	Institusi Keuangan/ *Financial institutions* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* Rp	
Kas dan bank					*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka					*Time deposits*
Efek-efek					*Marketable securities*
Piutang lain-lain					*Other receivable*
Aset lain-lain*)					*Other assets*)*
Dikurangi:					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai					*Allowance for impairment losses*

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman dan piutang atas properti terbengkalai

**) Other assets consist of loan receivables and receivable of abandoned property*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Pemerintah/ *Government* Rp	Institusi Keuangan/ *Financial institutions* Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* Rp	
Kas dan bank					*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka					*Time deposits*
Efek-efek					*Marketable securities*
Piutang lain-lain					*Other receivable*
Aset lain-lain*)					*Other assets*)*
Dikurangi:					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai					*Allowance for impairment losses*

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman

**) Other assets consist of loan receivables*

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Direksi yakin akan kemampuan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum.

The above table represents a worst-case scenario of credit risk exposure to the Company as at December 31, 2022 and 2021. The Directors are confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

iii) Kualitas kredit dari aset keuangan
Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Perseroan terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan berdasarkan sektor industri:

iii) Credit quality of financial assets
The following table presents the Company's maximum exposure to credit risk of financial asset based on industry sector:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* **Rp**	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*** **Rp**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*** **Rp**	**Jumlah/ *Total*** **Rp**	
Kas dan bank					*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka					*Time deposits*
Efek-efek					*Marketable securities*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Aset lain-lain*)					*Other assets*)*
Dikurangi:					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai					*Allowance for impairment losses*

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman dan piutang atas properti terbengkalai

**) Other assets consist of loan receivables and receivable of abandoned property*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired* **Rp**	**Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*** **Rp**	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*** **Rp**	**Jumlah/ *Total*** **Rp**	
Kas dan bank					*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka					*Time deposits*
Efek-efek					*Marketable securities*
Piutang lain-lain					*Other receivables*
Aset lain-lain*)					*Other assets*)*
Dikurangi:					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai					*Allowance for impairment losses*

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman

**) Other assets consist of loan receivables*

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo sebagai akibat dari pembayaran klaim/manfaat pemegang polis, kebutuhan kas dari komitmen kontraktual, atau arus keluar kas lainnya, seperti utang yang telah jatuh tempo. Arus kas keluar ini akan menghabiskan sumber daya kas yang tersedia untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Dalam suatu keadaan yang ekstrim, kekurangan likuiditas dapat mengarah pada penurunan posisi keuangan dalam laporan keuangan dan penjualan aset, atau ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen kepada pemegang polis.

Risiko ini melekat pada semua operasi asuransi dan bisa dipengaruhi oleh kejadian spesifik secara institusional dan pasar secara luas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, transaksi kredit, aktivitas *merger* dan akuisisi, goncangan sistemik dan bencana alam. Perseroan melakukan evaluasi dan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Internal Perseroan dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Perseroan sehubungan dengan *maturity gap* antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan *gap limit* yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan untuk memperoleh likuiditas segera.

Tabel di bawah ini menunjukan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pada *undiscounted cash flows*:

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company unable to meet its obligations when they fall due as a result of policyholder benefit/claim payment, cash requirements from contractual commitments, or other cash outflows, such as debt maturities. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading, and investment activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the financial statement of financial position and sales of assets, or potentially an inability to fulfill policyholder commitment.

The risk is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters. The Company evaluates and reviews its statements of financial position structure, by analysing and measuring liquidity risk based on its Internal Control Manual and Assets Liabilities Management Guideline from shareholders.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Company encounters liquidity needs, marketable securities and liquid assets could be liquidated. The Company's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Company ability to obtain immediate liquidity.

The tables below show the remaining contractual maturities of the Company's financial liabilities based on undiscounted cash flows:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*					
	Jumlah/ *Total* **Rp**	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*** **Rp**	**Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*** **Rp**	**1 - 6 bulan/ *1 - 6 months*** **Rp**	**6 - 12 bulan/ *6 - 12 months*** **Rp**	
Liabilitas						*Liabilities*
Akrual dan utang lain-lain						*Accrued expenses and other payables*
Utang investasi						*Investment payables*
Utang klaim						*Claim payables*
Jumlah						***Total***

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*					
	Jumlah/ *Total* **Rp**	**Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No maturity contract*** **Rp**	**Kurang dari 1 bulan/ *Less than 1 month*** **Rp**	**1 - 6 bulan/ *1 - 6 months*** **Rp**	**6 - 12 bulan/ *6 - 12 months*** **Rp**	
Liabilitas						*Liabilities*
Akrual dan utang lain-lain						*Accrued expenses and other payables*
Utang investasi						*Investment payables*
Utang klaim						*Claim payables*
Jumlah						***Total***

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, semua liabilitas Perseroan tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

As of December 31, 2022 and 2021, all the Company's liabilities did not consist of interest rate therefore no disclosure on contractual undiscounted cash flows.

d. Risiko permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan pemeliharaan optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi liabilitas.

d. Capital risk

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce liabilities.

e. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam jangka pendek, maka nilai tercatatnya merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan dengan nilai tercatatnya.

a. Tingkat 1
   Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait;
b. Tingkat 2
   Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

e. Fair value of financial assets and liabilities

All financial assets classified as loan and receivables and financial liabilities at amortised cost have a short-term maturity, therefore, the carrying amount is a reasonable approximation of fair value. The fair value of financial assets and liabilities classified at fair value through profit or loss are same with the carrying amount.

a. Level 1
   Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;

b. Level 2
   Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and

c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi *(unobservable input).*

c. *Level 3*
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Financial instruments measured at fair value
The following tables show the Company's financial assets and liabilities that are measured at fair value as of December 31, 2022 and 2021:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						*Assets*
Efek-efek						*Marketable Securities*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						*Assets*
Efek-efek						*Marketable Securities*

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar
Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang tidak diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Financial instruments not measured at fair value
The following tables show the Company's financial assets and liabilities that are not measured at fair value as of December 31, 2022 and 2021:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						*Assets*
Kas dan bank						*Cash on hand and in Bank*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Aset lain-lain*)						*Other assets*)*
Jumlah						***Total***
Liabilitas						*Liabilities*
Akrual dan utang lain-lain						*Accrued expense and other payables*
Utang investasi						*Investment Payables*
Utang klaim						*Claim payables*
Jumlah						***Total***

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman dan piutang atas properti terbengkalai

**) Other assets consist of loan receivables and receivable of abandoned property*

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset						*Assets*
Kas dan bank						*Cash on hand and in Bank*
Deposito berjangka						*Time deposits*
Piutang lain-lain						*Other receivables*
Aset lain-lain						*Other assets*
Jumlah						***Total***
Liabilitas						*Liabilities*
Akrual dan utang lain-lain						*Accrued expense and other payables*
Utang investasi						*Investment Payables*
Utang klaim						*Claim payables*
Jumlah						***Total***

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang pinjaman

**) Other assets consist of loan receivables*

Sensitivitas keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Sensitivity to unrealised gain/(loss) on fair value through profit or loss marketable securities.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 atas perubahan harga pasar:

The table below shows the sensitivity of the Company's unrealised gain/(loss) on fair value through profit or loss marketable securities to movement of market value on December 31, 2022 and 2021:

	Pengaruh harga pasar terhadap keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Market value impact to unrealised gain/(loss) on fair value through profit or loss*	
	Peningkatan/ *Increase* 1%	**Penurunan/ *Decrease* 1%**
31 Desember 2022 / *December 31, 2022*		

	Pengaruh harga pasar terhadap keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Market value impact to unrealised gain/(loss) on fair value through profit or loss*	
	Peningkatan/ *Increase* 1%	**Penurunan/ *Decrease* 1%**
31 Desember 2021 / *December 31, 2021*		

Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi hingga jatuh tempo.

The projection assumes that all other variables are held constant and it also assumes a constant reporting date position and all positions until the maturity date.

33. Risiko Asuransi / *33. Insurance Risk*

Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola secara tepat dalam menghadapi perubahan dalam siklus asuransi terhadap lingkungan politik dan ekonomi dimana Perseroan beroperasi.

The Company is responsible for managing appropriately in response to changes in insurance cycles to the political and economic environments in which the Company operates.

Tabel di bawah menunjukkan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi berdasarkan tipe produk:

The table below sets out the concentration of life insurance contract liabilities by type of product:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*		
	Liabilitas kotor/ *Gross liabilities* Rp	**Aset reasuransi/ *Reinsurance assets* Rp**	**Liabilitas bersih/ *Net liabilities* Rp**
Produk dasar tradisional / *Traditional basic product*			

	31 Desember 2021/*December 31, 2021*			
	Liabilitas kotor/ ***Gross liabilities*** **Rp**	**Aset reasuransi/** ***Reinsurance assets*** **Rp**	**Liabilitas bersih/** ***Net liabilities*** **Rp**	
Produk dasar tradisional				*Traditional basic product*

34. Informasi Tambahan Arus Kas / *34. Additional Information of Cash Flow*

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation from financing activities are as follow:

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*				
	Saldo awal/ ***Beginning***	**Arus kas /** ***Cash flow***	**Lain-lain/** ***Others***	**Saldo akhir/** ***Ending***	
Liabilitas sewa					*Lease liability*
Total					***Total***

	31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Saldo awal/ ***Beginning***	**Arus kas /** ***Cash flow***	**Lain-lain/** ***Others***	**Saldo akhir/** ***Ending***	
Liabilitas sewa					*Lease liability*
Total					***Total***

Pengungkapan tambahan atas aktivitas nonkas adalah sebagai berikut:

Supplemental disclosures on noncash activities are as follow:

	31 Desember/ ***December 31,*** **2022**	**31 Desember/** ***December 31,*** **2021**	
Penambahan aset tetap melalui utang			*Addition of fixed assets through payable*

35. Perjanjian Penting / *35. Significant Agreements*

a. Program THT, JKK dan JKm

Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama pembayaran manfaat program THT, JKK, JKm termasuk NTIP bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan beberapa Mitra Bayar yaitu:

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
d. PT Bank KB Bukopin Tbk;
e. PT Bank Neo Commerce;
f. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
g. PT Bank Bumi Arta Tbk;
h. PT Bank BTPN Tbk;
i. PT Bank Mandiri Taspen;

a. THT, JKK and JKm Program

The Company signed a cooperation agreement payment retirement THT, JKK, JKm include NTIP of The Indonesian National Armed Forces, members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police with several partners which are:

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
d. PT Bank KB Bukopin Tbk;
e. PT Bank Neo Commerce;
f. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk;
g. PT Bank Bumi Arta Tbk;
h. PT Bank BTPN Tbk;
i. PT Bank Mandiri Taspen;

j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
k. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
l. PT Pos Indonesia;
m. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
n. PT Jasa Raharja (Persero);
o. BPJS Kesehatan.

b. Program Pembayaran Pensiun

Perseroan menandatangani perjanjian pembayaran pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan beberapa Mitra Bayar yaitu:

a. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
e. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
f. PT Bank Mandiri Taspen
g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
h. PT Pos Indonesia (Persero)
i. PT Bank KB Bukopin Tbk
j. PT Bank Neo Commerce
k. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
l. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
m. PT Bank Bumi Arta Tbk
n. PT Bank BTPN Tbk

j. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
k. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
l. PT Pos Indonesia;
m. PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
n. PT Jasa Raharja (Persero);
o. BPJS Kesehatan.

b. Pension Payment Program

The Company signed a cooperation agreement for payment of pension payment program of The Indonesian National Armed Forces, members of the Indonesian National Police and Civil Government Officer in the Ministry of Defense and the Indonesian National Police. with several partners which are:

a. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
e. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
f. PT Bank Mandiri Taspen
g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
h. PT Pos Indonesia (Persero)
i. PT Bank KB Bukopin Tbk
j. PT Bank Neo Commerce
k. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
l. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
m. PT Bank Bumi Arta Tbk
n. PT Bank BTPN Tbk

36. Kondisi Ekonomi

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

36. Economy Condition

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Perseroan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perseroan dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari penempatan investasi.

The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that taken by the Government of Republic of Indonesia, an action that is beyond the Company's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Company's liquidity and earnings, asset realization, including impact on placement of investment.

37. Kelangsungan Usaha / *37. Going Concern*

Laporan keuangan disusun dengan anggapan Perseroan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

The financial statements have been presented with the assumption that the Company was continued to operate as going concern.

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mengalami defisit signifikan sebesar

). Untuk tahun 2021, tingkat solvabilitas program THT, JKK, dan JKm berada di bawah tingkat solvabilitas minimum yang diatur oleh ketentuan.

On December 31, 2022, the Company has a significant deficit amounted to
(

). For 2021, solvability rate below minimum requirement for THT, JKK, and JKm program according to regulation.

a) Pemenuhan tingkat solvabilitas minimal
Berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No.248/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.227/PMK.02/2017 jo. PMK No .66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa Perseroan wajib menjaga tingkat solvabilitasnya paling sedikit 2% dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan ditambah utang klaim THT dan cadangan teknis JKK dan JKm.

a) Compliance on minimum solvability rate
Based on article 4 and 5 of Regulation of Ministry of Finance No. 248/PMK.02/2017 regarding Procedures for Management and Reporting on Implementation of THT, JKK and JKM Program for Indonesia National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police and Employee of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police as amended by the Ministry of Finance Regulation No. 227/PMK.02/2017 jo. PMK No. 66/PMK.02/2021 concerning Management Procedures Contribution and Reporting on the implementation of Civil Servant's Old Age Saving Program, Work Accident Insurance, and Death Insurance for Employee of the State Civil Apparatus, Indonesia National Armed Forces, and Members of the Indonesian National Police, regarding the Company need to maintain its solvability 2% at minimum from total liabilities for future policy benefit plus THT claim payables and estimated claim liabilities of JKK and JKm.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.05/2018 Tentang Perubahan atas Jasa Keuangan dan No.71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 3 menetapkan bahwa Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% (seratus persen) dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

In 2021, based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 27/POJK.05/2018 Concerning The Changes to Financial Services and No.71/POJK.05/2016 concerning The Financial Health of Insurance Companies and Reinsurance Companies Article 3 stipulates that the Company must at any time meet the solvency rate of at least 100% (one hundred percent) of the Minimum Risk-Based Capital (MMBR).

Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 92 menetapkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh Perseroan mengikuti bentuk dan isi laporan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kementerian pertahanan dan kepolisian negara Republik Indonesia.

In 2022, based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 25 Year 2022 concerning Supervision of Social Insurance Program Managers for Soldiers of the Indonesian National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police, and Employees of the State Civil Apparatus within the Ministry of Defense and the Indonesian National Police by the Financial Services Authority Article 92 stipulates that financial reports submitted by the Company follow the form and the contents of the report as contained in the Minister of Finance Regulation concerning procedures for managing contributions and reporting on old-age savings programs, work accident benefits, and death benefits for soldiers of the Indonesian National Armed Forces, members of the Indonesian National Police, and employees of the state civil apparatus within the Ministry of Defense and the Police Republic of Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tingkat solvabilitas Perseroan berdasarkan PMK adalah sebesar 74,26% (2021:-1.210%). Sedangkan tingkat solvabilitas berdasarkan POJK tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -248%.

As of December 31, 2022 and 2021, the solvency ratio of the Company based on PMK is 74.26% (2021: -1,210%). While, the solvency ratio based on the POJK as of December 31, 2021 is -248%.

b) Defisit modal

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan mengalami defisit ekuitas signifikan sebesar (2021:).

b) Deficiency capital

As at December 31, 2022 and 2021, the Company experienced a significant deficiency of equity (2021:).

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk tahun 2022, anggaran beban Perseroan berkisar sedangkan anggaran pendapatan Perseroan yang akan diterima berkisar
Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki obligasi Pemerintah Indonesia sebesar dan deposito berjangka sebesar , menurut analisa manajemen, obligasi pemerintah dan

Based on the Company's Business Plan and Budget for 2022, the Company's budget for expenses is around , while the Company's revenue budget to be received around . As of December 31, 2021, the Company had Indonesian Government bonds of and time deposits of , which according to management's analysis, the Indonesian bonds and deposits held can cover the

deposito yang dimiliki tersebut dapat menutupi kebutuhan operasional Perseroan selama 12 bulan ke depan dan Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada isu kegagalan bayar.

Company's operational needs for the next 12 months and Management believes that there is no issue of default.

Dalam menghadapi dua kondisi tersebut di atas, Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan Perseroan telah melaksanakan 5 (lima) strategi utama dalam upaya penyehatan keuangan, sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan infrastruktur;
   Perseroan telah melaksanakan perubahan anggaran dasar pada bulan Juli 2021, melakukan revisi strategi dan kebijakan investasi, serta melakukan integrasi sistem terkait penggelolaan investasi dan manajemen risiko.
2. Pelaksanaan Program Kementerian BUMN untuk Klasterisasi Asuransi;

   Pelaksanaan kerja sama Perseroan dan PT TASPEN (Persero) dalam pengadaan produk manfaat tambahan dan peningkatan efisiensi dalam proses dan layanan.

3. Penyesuaian bunga Aktuaria;
   Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa metode dan asumsi dalam perhitungan liabilitas manfaat polis masa depan program THT ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perseroan menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Persetujuan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT pada Perseroan Tahun 2022. Pada surat tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan menyetujui penggunaan metode GPV dan asumsi bunga aktuaria sebesar 9,50%.

To address two conditions above, the Company's Financial Health Improvement Team has did 5 (five) main strategies implemented to improve in financial restructuring, are as follows:

1. *Strengthening governance and infrastructure;*
   The Company has conducted an amendment of Article of Association in July 2021, revised investment strategy and policy, as well as built integrated system for investment and risk management.
2. *Implementation of the Ministry of State-Owned Enterprises Program for Insurance Clusterization;*
   Implementation of cooperation between the Company and PT TASPEN (Persero) in providing additional claim benefits and increasing efficiency for process and services.
3. *Actuarial interest adjustment;*
   The Minister of Finance has issued Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.02/2021 dated June 14, 2021 concerning Procedures for Contribution Management and Reporting Implementation of THT, JKK, and JKm Program for State Civil Apparatus Employees, Indonesian National Armed Forces Soldiers, and Members of the Indonesian National Police, which among others stipulated the methods and assumptions used for calculation of liability for future policy benefits of THT Program were determined by the Minister of Finance. The Company received a letter from the Minister of Finance Number S-49/MK.02/2022 dated January 30, 2022 regarding to Approval for the Use of Methods and Assumptions in the calculation of the THT Program Liabilities for Future Policy Benefits at the Company for year of 2022. The letter stated that the Minister of Finance approved the use of the GPV method and assumed an actuarial interest rate for 9.50%.

4. Pengajuan *Unfunded Past Service Liability (UPSL);* dan
   Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan besaran Kontribusi Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) program THT akibat perubahan formulasi manfaat program THT sebesar Rp4.550.264 melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-56/MK.02/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua pada Perseroan. Manajemen terus berupaya melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait informasi pembayaran UPSL program THT Perseroan.

5. *Recovery* aset bermasalah.
   Perseroan sedang menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka restrukturisasi aset nonproduktif sebagai solusi alternatif percepatan pemulihan aset investasi di luar aset sitaan yang masih dalam proses pengadilan.

Progres pelaksanaan 5 (lima) strategi utama dalam penyehatan keuangan Perseroan berjalan dengan baik. Perseroan secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kejaksaan, dan lainnya untuk mendapatkan dukungan dalam upaya melakukan penyehatan keuangan. Perseroan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait upaya penyehatan keuangan pada tanggal 9 Juni 2021 dan 25 Januari 2022.

Selain 5 (lima) program strategi utama yang disebutkan di atas, Perseroan juga berinisiatif menyampaikan kepada Pemerintah perlu dilakukannya penyesuaian atas premi THT. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat keberlangsungan program THT di masa depan.

4. *Submission of Unfunded Past Service Liability (UPSL); and*
   The Minister of Finance of the Republic of Indonesia has determined the amount of the Government's Contribution to the Unfunded Past Service Liability (UPSL) of the THT program due to changes in the formulation of the benefits of the THT program of Rp4,550,264 through the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-56/MK. 02/2022 dated January 30, 2022 regarding the Determination of the Unfunded Past Service Liability of the THT Program at the Company. Management continues to strive to communicate with the Ministry of Finance regarding payment information for the UPSL THT program to the Company.

5. *Recovery of problem assets.*
   The Company is exploring cooperation with third parties in the context of restructuring non-earning assets as an alternative solution to accelerate the recovery of investment assets excluding confiscated assets which are still in the process of court.

The progress of the implementation of the 5 (five) main strategies in the Company's financial restructuring is going well. The Company intensively performed coordination with stakeholders such as Ministry of State Owned Enterprises, Ministry of Finance, OJK, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Public Prosecutor, and others to gain support for the financial restructuring efforts. The Company also has attended hearing meeting with the House of Representatives (DPR) regarding to financial restructuring efforts on June 9, 2021 and January 25, 2022.

In addition to the 5 (five) main strategic programs mentioned above, the Company also took the initiative to convey to the Government the need for adjustment of THT premium. This step is needed to strengthen the sustainability of THT program in the future.

38. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akumulasi Iuran Pensiun / *38. Reconciliation on Financial Statements Accumulation of Pension Contribution*

Per 31 Desember 2022, Perseroan melakukan penyesuaian atas nilai pasar saham, surat berharga negara, reksa dana saham, reksa dana campuran, dan reksa dana penyertaan terbatas agar sesuai dengan ketentuan PSAK 68, yaitu dengan menggunakan pendekatan penilaian level 2, yang terjadi pada instrumen saham dan reksa dana yang merupakan instrumen dari Akumulasi Iuran Pensiun.

As at December 31, 2022, The Company has implemented adjustment on market value of shares, Indonesian bonds, shares mutual funds, mixed mutual funds, and limited participation mutual funds to conform with PSAK 68, which are used level 2 valuation approach, also occurs in shares and mutual funds instruments owned by Accumulation of Pension Contribution.

Rekonsiliasi terhadap laporan posisi keuangan Akumulasi Iuran Pensiun tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan PMK dan laporan posisi keuangan Akumulasi Iuran Pensiun berdasarkan PSAK 68 adalah sebagai berikut:

Reconciliation on financial statements Accumulation of Pension Contribution for the period December 31, 2022 based on PMK and financial statements Accumulation of Pension Contribution based on PSAK 68 is as follows:

LAPORAN DANA BERSIH AKUMULASI IURAN PENSIUN / ***STATEMENT OF NET ASSETS ACCUMULATION OF PENSION CONTRIBUTION***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
	PMK/ ***PMK***	**PSAK/** ***PSAK***	**Perbedaan/** ***Difference***	
ASET				***ASSETS***
INVESTASI				***INVESTMENTS***
Saham				*Shares*
Deposito Berjangka				*Time Deposits*
Obligasi				*Bonds*
Reksadana				*Mutual funds*
Medium Term Notes (MTN)				*Medium Term Notes (MTN)*
BUKAN INVESTASI				***NON INVESTMENTS***
Kas dan bank				*Cash in banks*
Piutang Iuran				*Contribution receivable*
Piutang hasil investasi				*Investment income receivables*
Piutang bantuan uang muka KPR				*BUM KPR receivables*
Piutang pinjaman uang muka KPR				*PUM-KPR receivables*
Tanah dan bangunan - bersih				*Lands and buildings - net*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
TOTAL ASET				***TOTAL ASSETS***
Pendapatan diterima di muka				*Unearned revenue*
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain				*Accrued expense and other payables*
Jumlah Liabilitas				***Total Liabilities***
ASET BERSIH				***NET ASSETS***

LAPORAN PERUBAHAN DANA BERSIH AKUMULASI IURAN PENSIUN

STATEMENT OF NET ASSETS CHANGES ACCUMULATION OF PENSION CONTRIBUTION

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
	PMK/ ***PMK***	**PSAK/** ***PSAK***	**Perbedaan/** ***Difference***	
Pendapatan				***Income***
Penghasilan Investasi				*Investment Income:*
Bunga deposito berjangka				*Time Deposits Interests*
Bunga obligasi				*Bonds Interest*
Dividen saham				*Dividend shares*
Peningkatan (penurunan) nilai saham				*Increase (Decrease) Shares Value*
Peningkatan (penurunan) nilai obligasi				*Increase (Decrease) Bonds Value*
Laba (rugi) pelepasan investasi				*Gain (Loss) on Investment*
Jumlah Penghasilan investasi				*Total Investment Income*
Penghasilan Nilai Investasi				***Increase on Investment***
Surat berharga negara				*Government Bonds*
Sukuk pemerintah				*Government Islamic Securities*
Obligasi korporasi				*Coorporate Bonds*
Medium Term Notes (MTN)				*Medium Term Notes (MTN)*
Saham				*Shares*
Reksadana				*Mutual Funds*
Iuran jatuh tempo				*Contribution Due*
Iuran peserta				*Participant Contribution*
Pendapatan di luar investasi				*Non-Investment Income*
Jumlah Pendapatan				***Total Income***
Beban				***Expenses***
Investasi				*Investment*
Operasional				*Operational*
Manfaat Nilai Tunai				*Nilai Tunai*
Iuran Pensiun (NTIP)				*Iuran Pensiun (NTIP)*
Jumlah Beban				***Total Expenses***
Peningkatan Dana Bersih				***Increase Net Assets***
Dana Bersih pada Awal Tahun				***Net Assets at the beginning of the Year***
Revaluasi aset tetap				*Fixed Assets Revaluation*
Dana Bersih pada Akhir Tahun				***Net Assets at the end of the Year***

39. Kasus Hukum / *39. Legal Case*

41. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direksi untuk terbit pada tanggal 28 Februari 2023.

41. Responsibilities and Authorized Assurance Financial Statements

Management of The Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that are authorized by Directors for issuance on February 28, 2023.

Laporan Tahunan 2022
Annual Report



ASABRI

Jl Mayjen Sutoyo No. 11,
Cawang, Jakarta Timur, 13630
Email : asabri@asabri.co.id

1500 043
www.asabri.co.id
asabri_official
asabri_official
PT Asabri-Persero
Asabri Official